



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 84 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023;
26. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019 - 2024;
31. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 138 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu.
2. Bupati adalah Bupati Luwu.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

16. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaransatuan kerja perangkat daerah.
18. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.
19. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnyadisingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis danMutu Pelayanan Dasar yang merupakan UrusanPemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiapWarga Negara secara minimal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan RKPD dimaksudkan untuk menjabarkan kebijakan strategis pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam rencana pembangunan tahunan daerah.
- (2) Penyusunan RKPD bertujuan untuk menyediakan dokumen rencana pembangunan tahunan daerah sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan perangkat daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

RKPD memuat gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dan realisasi RPJMD sampai dengan tahun berjalan, Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan daerah, serta Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk Tahun 2021.

Pasal 4

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan Sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
 - d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - g. Penutup.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dijadikan sebagai:
 - a. Pedoman PD dalam perumusan dan penyempurnaan rancangan akhir Renja PD Tahun 2021.
 - b. Pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan KUA/PPAS Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021.
- (2) Rancangan Akhir Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan Kepala PD kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (Satu) Minggu setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (4) BAPPEDA menyampaikan hasil verifikasi Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Renja PD.
- (5) Penetapan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (Satu) Bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan tahunan daerah mencakup Renja PD Tahun 2021 dan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2021.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap Renja PD dan RKPD dilaksanakan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 7

- (1) Kepala PD melaksanakan Pengendalian dan evaluasi terhadap Pelaksanaan dan Hasil Renja PD.
- (2) Hasil Pengendalian dan Evaluasi menjadi bahan pengendalian dan evaluasi RKPD sekaligus sebagai bahan penyusunan Renja PD untuk tahun berikutnya.
- (3) Kepala PD menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA paling lambat 2 (Dua) Minggu setelah berakhirnya triwulan berjalan.

Pasal 8

- (1) Kepala BAPPEDA melaksanakan Evaluasi terhadap Hasil Pengendalian dan Evaluasi Renja PD.
- (2) Kepala BAPPEDA Melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan dan Hasil RKPD.
- (3) Hasil Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan dan Hasil RKPD menjadi bahan penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 24 Juli 2020

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 24 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU



RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2020 NOMOR 24....

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 84 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LUWU TAHUN 2021**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka 1 (satu) tahun. Untuk menjamin keselarasan antara prioritas serta sasaran pembangunan dan program/kegiatan tahunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional, RKPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) serta rencana kerja dan program strategis yang ditetapkan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi bagi kabupaten/kota. Ketentuan tentang penyusunan RKPD bagi pemerintah daerah sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

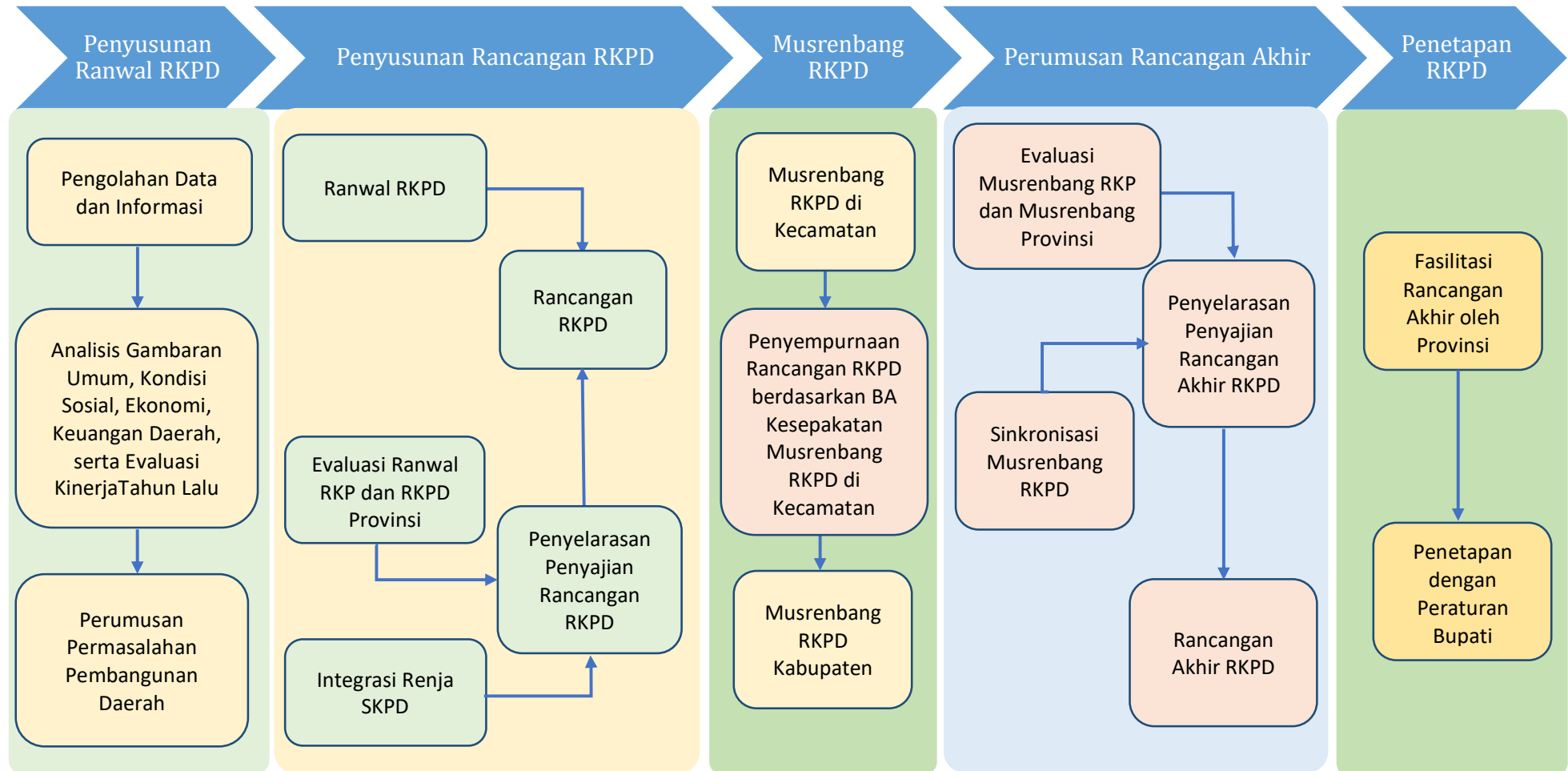
Sesuai dengan ketentuan di atas, penyusunan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2021 dilakukan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Luwu, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP)/Program Strategis Nasional. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah teknokratik, partisipatif, politik, serta *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan tersebut diimplementasikan melalui: (1) penelaahan terhadap sasaran RPJMD Kabupaten Luwu, kebijakan pemerintah pusat pada RKP, kebijakan pemerintah provinsi pada RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, serta pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Luwu; (2) melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan; (3) menyelaraskan hasil perencanaan dalam musyawarah pembangunan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional; (4) menajamkan program prioritas pembangunan daerah; (5) mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/

kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya, serta (6) mempertimbangkan dimensi tata ruang daerah.

RKPD Kabupaten Luwu tahun 2021 merupakan penjabaran tahun kedua dari RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, dirumuskan secara holistik-tematik, integratif, dan spasial, untuk menjamin kesinambungan pembangunan. Oleh karena itu rumusannya memiliki kedudukan yang strategis dalam pencapaian visi daerah yang tertuang dalam RPJMD. RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2021 merupakan hasil penajaman program prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RPJMD Kabupaten Luwu yang dipetakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 untuk dijadikan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyempurnaan renja perangkat daerah. RKPD juga menjadi pedoman dalam menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rancangan KUA dan PPAS merupakan bahan dalam pembahasan antara pemerintah daerah bersama dengan DPRD Kabupaten Luwu untuk disepakati sebagai rancangan APBD Kabupaten Luwu.

Sesuai dengan peraturan perundangan, penyusunan RKPD tahun 2021 dilakukan dengan tahapan penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, musrembang RKPD (baik di ibu kota kabupaten maupun di kecamatan), penyusunan rancangan akhir, fasilitasi oleh Provinsi Sulawesi Selatan, penetapan RKPD dan klarifikasi peraturan bupati tentang RKPD. Selengkapnya, bagan alur tahapan penyusunan RKPD adalah sebagaimana pada bagan berikut ini.

Gambar 1.1.
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Luwu



Untuk menjaga keterkaitan dan konsistensi dalam penyusunan RKPD dilakukan melalui proses *E-Planning* dengan menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Perencanaan (SIMCAN) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan). Dalam upaya memastikan pencapaian target pembangunan daerah dilakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara berkala.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2021 berlandaskan pada beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024;
23. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dokumen RKPD kabupaten terhubung dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya yang ada, baik di tingkat nasional (RKP/program strategis nasional), provinsi (RKPD Provinsi), dan kabupaten (RPJMD Kabupaten). Secara singkat, hubungan antara RKPD Kabupaten Luwu dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

➤ **RKPD Kabupaten Luwu dengan RPJMD Kabupaten Luwu**

RKPD Kabupaten Luwu merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Luwu pada setiap tahunnya. Oleh karena itu, sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD memuat prioritas program dan kegiatan pembangunan yang berpedoman pada RPJMD. Selanjutnya, dalam rangka mengimplementasikan perencanaan yang partisipatif, RKPD merupakan bahan

utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Luwu yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.

➤ RKPD Kabupaten Luwu dengan RKP/Program Strategis Nasional

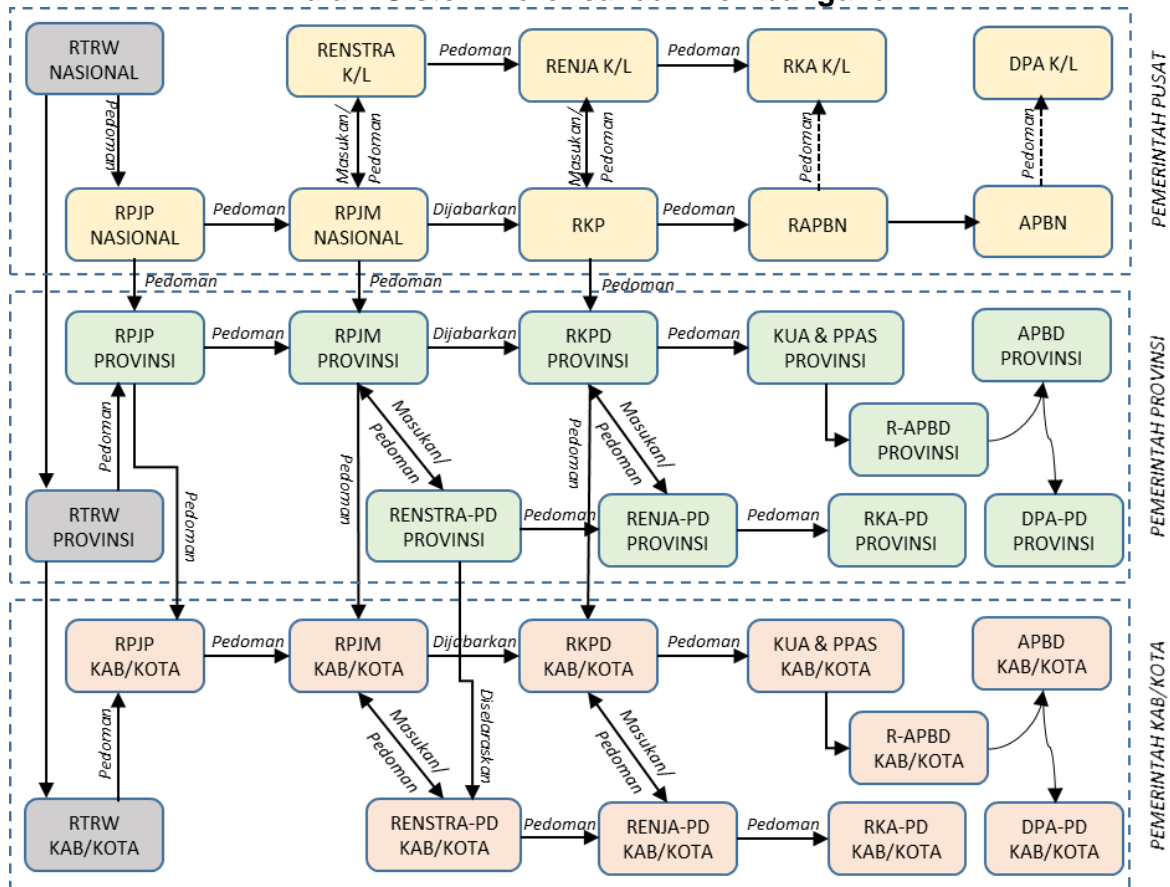
Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, dilakukan penyelarasan prioritas pembangunan antara RKPD Kabupaten Luwu dengan RKP/Program Strategis Nasional, sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah Kabupaten Luwu.

➤ RKPD Kabupaten Luwu dengan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan

Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, RKPD Kabupaten Luwu disusun dengan berpedoman pada RKPD Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah Kabupaten Luwu.

Adapun hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.2.
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan
Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan



1.4. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RKPD

Penyusunan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2021 dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang terencana, berkesinambungan, dan sistematis. Selain itu RKPD tahun 2021 disusun untuk menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Tujuan penyusunan RKPD adalah untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu dalam menyusun Renja Perangkat Daerah serta memberikan dasar dalam penyusunan KUA-PPAS. Adapun sasaran yang diharapkan adalah meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Luwu.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2021 disajikan sesuai dengan sistematika yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, yang meliputi Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini menguraikan kondisi daerah dan gambaran pembangunan daerah dari berbagai aspek, meliputi Kondisi Umum Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, Permasalahan Pembangunan Daerah, pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, untuk merumuskan Tujuan dan Sasaran Pembangunan, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, keterkaitan prioritas pembangunan dengan indikator makro ekonomi pembangunan, keterkaitan prioritas pembangunan dengan indikator makro ekonomi pembangunan, dukungan

terhadap prioritas pembangunan provinsi, integritas tujuan pembangunan prioritas pembangunan provinsi, integrasi SPM, serta inovasi daerah.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan kerangka pendanaan tahun 2021 serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN LUWU

Gambaran umum kondisi daerah penting dikemukakan sebagai landasan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan mengenai kondisi geografi dan demografi serta aspek-aspek pembangunan daerah, yaitu kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing. Disamping itu, bab ini juga memuat uraian terkait dengan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun yang lalu dan tahun berjalan serta pencapaian RPJMD s/d tahun lalu, permasalahan pembangunan daerah, serta capaian indikator SPM dan TPB.

2.1. GAMBARAN UMUM WILAYAH

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Pemahaman tentang kondisi dan potensi sumberdaya alam serta kependudukan suatu daerah dapat dicermati dari aspek geografi dan demografi. Uraian kondisi geografi diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan wilayah rawan bencana.

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Luwu adalah salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang ber Ibukota di Belopa dan diresmikan sejak 13 Februari 2016. Kabupaten Luwu memiliki wilayah geografis yang unik karena wilayahnya terbagi dua yang dipisahkan oleh sebuah daerah otonom yakni Kota Palopo, ada pun daerah yang terpisah tersebut adalah wilayah Walenrang dan Lamasi atau yang juga dikenal dengan sebutan WALMAS.

Kabupaten Luwu memiliki potensi pembangunan berupa luas wilayah yang cukup besar, yaitu kurang lebih 3.000,25 km², merupakan kabupaten terbesar keempat di Sulawesi Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Toraja Utara
 Sebelah Timur : Teluk Bone
 Sebelah Selatan : Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Luwu
 Sebelah Barat : Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang

Secara administrasi, sejak tahun 2017 Kabupaten Luwu terdiri dari 22 kecamatan yang dibagi habis menjadi 207 Desa dan 20 Kelurahan. Kecamatan Latimojong adalah Kecamatan terluas yaitu mencapai sekitar 467,75 km² atau 15,59% dari luas Kabupaten Luwu, menyusul kemudian Kecamatan Walenrang Utara dan Walenrang Barat dengan luas masing-masing sekitar 259,77 km² atau 8,66% dan 247,13 km² atau 8,24%. Sedangkan Kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Belopa Utara yaitu kurang lebih 34,73 km² atau hanya sekitar 1,16%.

Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan dan Luas masing-masing Kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.
 Luas Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan Kabupaten Luwu

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	%
1	Larompong	Larompong	12	1	225,25	7,51
2	Larompong Selatan	Bonepute	9	1	131,00	4,37
3	Suli	Suli	12	1	81,75	2,72
4	Suli Barat	Lindajang	7	1	153,50	5,12
5	Belopa	Tampumia Radda	5	4	59,26	1,98
6	Kamanre	Cilallang	7	1	52,44	1,75
7	Belopa Utara	Pammanu	6	2	34,73	1,16
8	Bajo	Bajo	11	1	68,52	2,28
9	Bajo Barat	Bonelemo	9	-	66,30	2,21
10	Bassesangtempe	Lissaga	12	-	178,12	5,94
11	Latimojong	Kadundung	12	-	467,75	15,59
12	Bassesangtempe Utara	Pantilang	12	-	122,88	4,10
13	Bupon	Noling	9	1	182,67	6,09
14	Ponrang	Padangsappa	8	2	107,09	3,57
15	Ponrang Selatan	Pattedong	12	1	99,98	3,33
16	Bua	Bua	14	1	204,01	6,80
17	Walenrang	Batusitanduk	8	1	94,60	3,15
18	Walenrang Timur	Tabah	8	-	63,65	2,12
19	Lamasi	Lamasi	9	1	42,20	1,41
20	Walenrang Utara	Bosso	10	1	259,77	8,66
21	Walenrang Barat	Ilan Batu	6	-	247,13	8,24
22	Lamasi Timur	To'lemo	9	-	57,65	1,92
JUMLAH			207	20	3.000,25	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Luwu, Tahun 2019.

Gambar 2.1.
Peta Letak dan Batas Kecamatan di Kabupaten Luwu



RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2021

36,01%. Disamping itu, Kabupaten Luwu dilintasi oleh Trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, didukung pula dengan adanya pengembangan pelabuhan Taddatte, Ulo-Ulo, dan Balambang, serta keberadaan Bandara Bua yang terus dikembangkan kapasitasnya dari tahun ketahun.

2.1.1.2. Kondisi Topografi

Kondisi topografis Kabupaten Luwu terdiri dari wilayah dengan ketinggian 0-25 meter (dpl) sebesar 19,42%, ketinggian 25-100 meter (dpl) sebesar 16,58%, ketinggian 100-500 m (dpl) sebesar 22,03%, ketinggian 500-1000 m(dpl) sebesar 18,34%, dan wilayah yang berada pada ketinggian diatas 1000 meter (dpl) adalah sebesar 23,62%. Topografi wilayah Kabupaten Luwu selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
Tofografi Kabupaten Luwu Ditinjau Dari Ketinggiannya

No	Kecamatan	Ketinggian Wilayah (Ha)				
		0-25 m (dpl)	25-100 m (dpl)	100-500 m (dpl)	500-1000 m (dpl)	1000 m (dpl)
1	Larompong	1.807,54	3.944,92	9.479,15	3.728,15	3.563,43
2	Larompong Selatan	2.776,64	4.760,38	4.636,21	926,09	-
3	Suli	4.080,06	3.057,23	1.034,03	-	-
4	Suli Barat	121,38	3.338,78	3.806,05	3.939,32	4.143,98
5	Belopa	4.716,05	1.207,83	-	-	-
6	Kamanre	4.975,49	265,37	-	-	-
7	Belopa Utara	3.471,66	-	-	-	-
8	Bajo	1.896,63	2.311,73	2.642,47	-	-
9	Bajo Barat	316,83	-	2.268,42	2.468,06	234,15
10	Bassesangtempe	-	-	9.601,02	12.130,84	8.366,58
11	Latimojong	-	-	6.524,25	8.964,08	31.285,45
12	Bassesangtempe Utara	-	5.306,79	-	-	-
13	Bupon	1.969,25	5.306,79	7.440,40	3.547,47	-
14	Ponrang	5.864,46	1.716,70	1.348,64	1.779,23	-
15	Ponrang Selatan	9.996,12	-	-	-	-
16	Bua	6.105,67	4.274,99	4.445,76	5.573,21	-
17	Walenrang	-	4.310,23	1.943,32	2.144,70	1.060,15
18	Walenrang Timur	4.086,96	2.277,59	-	-	-
19	Lamasi	913,66	3.017,60	287,80	-	-
20	Walenrang Utara	-	8.012,55	10.300,64	6.701,78	960,23
21	Walerang Barat	-	-	322,93	3.125,62	21.261,67
22	Lamasi Timur	5.162,26	600,61	-	-	-

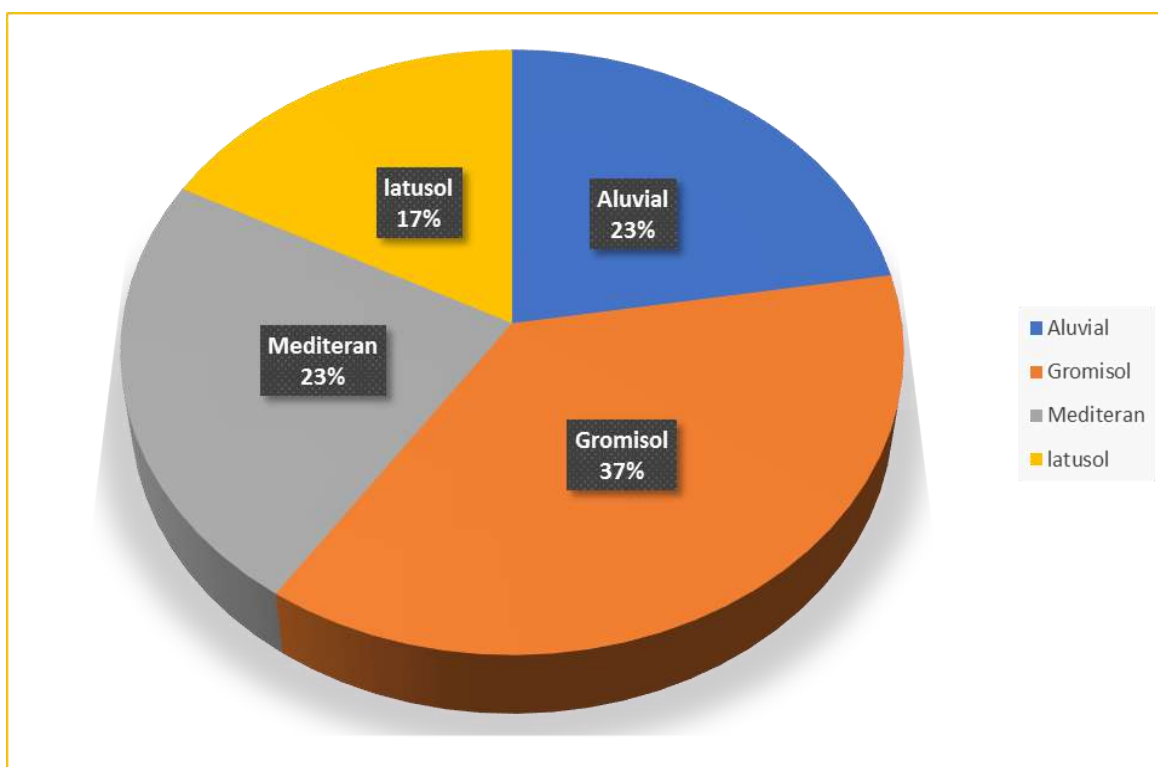
Sumber : Kabupaten Luwu Dalam Angka 2018,Badan Pusat Statistik, 2019

Kondisi kemiringan tanah mempunyai pengaruh sangat besar dalam pemanfaatan lahan Berdasarkan tingkat kemiringan tanah dan lahan, wilayah Kabupaten Luwu dapat dikelompokkan kedalam 5 kelompok kemiringan, yaitu 0-8% sebesar 42.094,88 Ha, 8-15% sebesar 29.696,28 Ha, 15-25% sebesar 8245,50 Ha, 25-40% sebesar 22.297,60 Ha, dan 40% sebesar 197.690,77 Ha. Rincian kemiringan lahan berdasarkan Kecamatan dapat di lihat pada tabel berikut (data RKPD 2019 tabel 2.3 halaman II-5).

2.1.1.3. Kondisi Geologi

Struktur dan karakteristik geologi wilayah Kabupaten Luwu banyak dipengaruhi oleh pegunungan Latimojong dan Teluk Bone, jenis tanah yang terdapat yakni tanah Aluvial dengan luasan 40.246,11 ha, tanah Latusol dengan luasan 30.989,34, tanah Mediteran dengan luasan 41.937,38, tanah Gromisol dengan luasan 114.967,97 ha, dan tanah Podlosik dengan luasan 66.526,79 ha.

Gambar 2.2.
Grafik Jenis Tanah di Kabupaten Luwu



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019

Selain tanah juga terdapat pasir, batu kali/pasir kerikil/pasir timbunan, sirtu, kalsit, dan batu gunung/batu kali. Untuk jenis galian terdapat potensi tambang emas

di Kecamatan Latimojong, Walenrang Utara, Batu Gamping di Kecamatan Latimojong, Walenrang, Lamasi, Granodiorit di Kecamatan Bajo, Rijang (Chert) di Kecamatan Latimojong, Kuarsa di Kecamatan Walenrang, Batu Sabak di Kecamatan Latimojong, Bajo Barat, Andesit di Kecamatan Bajo, Basalt di Kecamatan Latimojong, Bajo, Gabro di Kecamatan Latimojong, Diorit di Kecamatan Latimojong, Monzonit di Kecamatan Latimojong, Larompong, Besi di Kecamatan Bajo di Kecamatan Larompong Suli, Lempung di Kecamatan Bajo.

Kabupaten Luwu mempunyai 2 (dua) potensi sumber daya logam dan sumber daya non logam, yaitu GALENA dengan potensi cadangan diperkirakan 1.800.000 ton terdapat di Kecamatan Suli Barat dan Walenrang Barat, BESI dengan potensi cadangan belum diketahui persis, terdapat di Kecamatan Bajo Barat dan Walenrang, Hematit dengan potensi cadangan diperkirakan mencapai jutaan ton terdapat di Kecamatan Suli Barat dan Kecamatan Bajo Barat, TEMBAGA yang terdapat di Kecamatan Walenrang Barat dan Kecamatan Latimojong, BESIMANGANIS dengan potensi masih bersifat indikasi dan masih perlu dilokalisir, terdapat di Kecamatan Suli, dan EMAS yaitu:

- Potensi cadangan sebesar 1.45-18.84 g/Ton (hasil analisa laboratorium) terdapat di Kecamatan Latimojong.
- Potensi cadangan sebesar 35-37 ppb terdapat di Kecamatan Walenrang Timur.
- Potensi cadangan sebesar 13 ppm terdapat di Kecamatan Walenrang Barat.
- Potensi cadangan sebesar 122.08-29.08 ppm terdapat di Kecamatan Suli Barat.

Selama lima tahun terakhir, pengelolaan bahan-bahan galian tersebut belumlah optimal. Jika dikelola dengan baik tentu dapat menunjang pelaksanaan pembangunan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan.

2.1.1.4. Kondisi Hidrologi

Potensi sumber daya air yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu tergolong baik dimana terdapat 11 sungai yang cukup besar dan panjang, yang mengalir dari arah barat ke arah timur atau ke wilayah Teluk Bone. Kesebelas sungai tersebut masing-masing adalah Sungai Lamasi yang melintasi Kecamatan Walenrang Barat, Walenrang dan Kecamatan Lamasi, Sungai Makawa melintasi Kecamatan Lamasi Timur, Sungai Bua melintasi Kecamatan Bua, Sungai Pareman melintasi Kecamatan Bupon, Ponrang, Ponrang Selatan dan Kecamatan Kamanre, Sungai Bajo melintasi Kecamatan Bajo Barat, Bajo dan Kecamatan Belopa, Sungai Suli melintasi Kecamatan

Suli Barat dan Kecamatan Suli, Sungai Larompong melintasi Kecamatan Larompong, Sungai Tembo'e melintasi Kecamatan Larompong Selatan, Sungai Rantebelu melintasi Kecamatan Larompong, Sungai Sampano melintasi Kecamatan Larompong Selatan, Sungai Kandoa (Balambang) melintasi Kecamatan Bua. Dari 11 sungai tersebut yang terpanjang adalah Sungai Pareman (Noling) dengan panjang tercatat sekitar 73 km. Sepuluh sungai lainnya panjangnya tercatat sekitar 12 - 69 km. Dengan potensi sungai tersebut di atas sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai sumber air baku, pengairan persawahan, perkebunan, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan sarana transportasi.

2.1.1.5. Kondisi Klimatologi

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, dan perputaran/ pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Secara umum Kabupaten Luwu beriklim tropis basah dan terbagi atas 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Intensitas curah hujan termasuk sedang. Curah hujan berkisar antara 2000 - 4000 mm pertahun. Suhu udara rata-rata berkisar antara 30,60C - 31,60C. Pada musim kemarau dan antara 250C - 280C pada musim penghujan. Untuk wilayah bagian utara (WAL-MAS) musim hujan jatuh pada bulan oktober sampai bulan maret, sedangkan wilayah bagian selatan (dari Kecamatan Bua sampai Kecamatan Larompong Selatan) musim hujan jatuh pada bulan april sampai dengan bulan september. Dalam beberapa tahun terakhir ini, keadaan musim di Kabupaten Luwu kadang tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan dalam kenyataannya tidak ada hujan sama sekali, atau sebaliknya pada bulan-bulan yang seharusnya kemarau justru terjadi hujan dengan musim yang jauh lebih panjang, rata-rata curah hujan selama tahun 2012 berkisar 203,14 mm per bulan.

Suhu udara pada suatu tempat di daerah tropik antara lain ditentukan oleh ketinggian tempat terhadap permukaan laut. Secara umum Kabupaten Luwu beriklim tropik dengan temperature udara pada tahun 2012 berkisar dari 22,17°C sampai dengan 32,03°C. Pada Daerah pegunungan yakni Kecamatan Latimojong, Basesangtempe, Basesangtempe Utara, Walenrang Barat pada umumnya suhu lebih rendah yakni berkisar 22,17 °C sampai dengan 30°C sehingga di daerah tersebut berpotensi untuk dijadikan kawasan sentra hortikultura dan dapat dikembangkan sebagai daerah agrowisata.

Kecepatan angin di Kabupaten Luwu berkisar antara 3 sampai 21 knot. Kecepatan angin terkadang tinggi pada musim peralihan dengan arah angin barat yang mempengaruhi masyarakat pesisir dengan pekerjaan nelayan yang batal melaut dan masyarakat pegunungan yang memiliki pertanian perkebunan pada daerah dataran tinggi dimana sering terjadinya tanaman produksi yang tumbang khususnya tanaman cengkeh serta masyarakat dataran yang memiliki persawahan yang terkadang tanaman padi mereka rebah sehingga kualitas dan kuantitas hasil produksinya menurun.

2.1.1.6. Kondisi Penggunaan Lahan

Proporsi penggunaan lahan utama di Kabupaten Luwu Tahun 2015 tidak berubah dibandingkan tahun sebelumnya. Dari seluruh luas lahan yang ada di Kabupaten Luwu 52,01% digunakan untuk usaha pertanian, yaitu untuk tegal/ kebun/ ladang/ huma, tambak, kolam/ tebat/ empang, sawah, lahan untuk tanaman kayu-kayuan, perkebunan negara dan swasta. Sedangkan sisanya digunakan untuk pekarangan/lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya, padang rumput serta lahan yang sementara tidak digunakan. Pada tahun 2015 luas lahan yang digunakan untuk usaha pertanian di Kabupaten Luwu mencapai 300.025 Ha, sedangkan luas lahan yang tidak diusahakan untuk pertanian sebesar 31.048.10 Ha. Dari 300.025 Ha lahan pertanian tersebut, 38.429.Ha diantaranya merupakan lahan sawah, dan selebihnya merupakan lahan bukan sawah atau 230.547 Ha.

Pada wilayah pesisir terdapat terumbu karang dengan kedalaman antara 10-15 meter, namun arealnya sedikit berkurang akibat terjadinya perubahan iklim. Untuk itu kegiatan mitigasi mulai dilakukan dengan transplansi karang di beberapa wilayah pesisir Teluk Bone. Penggunaan lahan pada wilayah ini adalah untuk areal budidaya rumput laut. Kemudian pada wilayah peralihan terdapat ekosistem mangrove yang merupakan peralihan atau gabungan antara ekosistem darat dan laut dimana terdapat habitat berbagai jenis burung, primata, reptil dan berbagai jenis habitat lainnya. Kegiatan masyarakat pada wilayah tersebut adalah budidaya tambak dengan luas areal pada tahun 2012 tercatat sekitar 10.041,40 Ha.

Pada wilayah pegunungan peruntukan penggunaan lahan lebih banyak digunakan sebagai kawasan budidaya kehutanan (KBK) dan kawasan budidaya non kehutanan (KBNK). Dalam KBK terdapat sebagian kecil areal persawahan terasering, dan hamparan tempat memelihara hewan ternak (sapi, Kerbau, kambing dll).

2.1.1.7. Wilayah Rawan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun unfactor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Didalam menyusun suatu perencanaan, aspek rawan bencana perlu diperhatikan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Setiap daerah itu memiliki potensi bencana berbeda, termasuk Kabupaten Luwu. Mengamati kondisi yang terjadi beberapa tahun terakhir ini potensi terjadinya bencana alam seperti tanah longsor, banjir, abrasi, angin kencang dan lain-lain masih cukup tinggi. Sesuai dengan karakteristik Kabupaten Luwu, beberapa daerah merupakan daerah rawan tanah longsor, banjir, abrasi, angin kencang dan lain-lain:

- a. Tanah longsor (*landslide*) merupakan salah satu bentuk erosi yang pengangkutan atau pemindahan masa tanahnya terjadi pada suatu saat secara tiba-tiba dalam volume yang besar (sekaligus). Untuk Kabupaten Luwu kawasan rawan bencana tanah longsor terdapat di Kecamatan Latimojong, Larompong, Larompong Selatan, Bajo, Bajo Barat, Suli Barat, Bastem, Bupon, Bua, Walenrang Utara dan Walenrang Barat;
- b. Banjir adalah debit aliran air sungai yang secara relative lebih besar dari biasanya/ normal akibat hujan yang turun di hulu atau disuatu tempat tertentu secara terus menerus, sehingga tidak dapat ditampung oleh alur sungai yang ada, maka air melimpah keluar dan menggenangi daerah sekitarnya. Banjir merupakan suatu peristiwa alam biasa, kemudian menjadi suatu masalah apabila sudah mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia serta mengancam keselamatan. Kawasan rawan bencana banjir di Kabupten Luwu terdapat di Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Belopa, Belopa Utara, Bajo, Kamanre, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Walenrang Timur dan Lamasi Timur;
- c. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi adapun kawasan

rawan abrasi di Kabupaten Luwu terdapat di Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Walenrang Timur dan Lamasi Timur;

- d. Angin kencang adalah angin dibuat oleh area udara yang dingin secara signifikan akibat hujan, setelah mencapai permukaan tanah, menyebar ke segala arah memproduksi angin kencang. Tidak seperti angin tornado, angin dalam suatu angin kencang diarahkan ke arah luar dari titik di mana menyentuh tanah atau air. Angin kencang kering dikaitkan dengan badai dengan hujan sangat sedikit, sementara angin kencang basah diciptakan oleh badai dengan jumlah curah hujan yang tinggi. Daerah rawan bencana angin kencang di Kabupaten Luwu terdapat di Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli Barat, Ponrang Selatan, Bua, Bassesangtempe, Bassesangtempe Utara dan Walenrang Barat dan Walenrang Utara.

Untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam perlu dilakukan rehabilitasi hutan dan lahan, perbaikan kondisi hutan atau tutupan vegetasi permanen dapat berfungsi mengikat tanah selain menahan laju aliran (*run-off*) sehingga dapat mengurangi tanah longsor, banjir maupun abrasi pantai; Perencanaan bangunan teknik sipil dapat diarahkan untuk mengurangi beban alami, seperti tekanan aliran; Penggunaan lahan seperti pemukiman, persawahan ataupun pembangunan embung seharusnya diaplikasikan menyesuaikan kondisi alam sehingga dapat dicapai keseimbangan alam yang berkualitas, dan yang terpenting adalah penataan hukum mengenai lingkungan hidup dan peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup.

Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan untuk tujuan tersebut diatas adalah dengan melakukan pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan. Untuk dapat mewujudkan program tersebut, maka dipandang perlu untuk menilai kerawanan bencana tiap-tiap kecamatan.

2.1.1.8. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah sebagaimana yang sudah dikaji dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu (RTRW) berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Pengembangan kawasan pada beberapa sektor harus sesuai dengan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berdasarkan RTRW, hal

itu untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang kabupaten, menghindari penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, menjaga keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang, sebagai alat pengendali pengembangan kawasan, mencegah dampak pembangunan yang merugikan kepentingan umum.

Pemetaan potensi daerah dalam rangka pengembangan kawasan Kabupaten Luwu dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011. Adapun potensi pengembangan wilayah yang perlu menjadi perhatian adalah sebagai berikut:

1. Kawasan lindung tersebar di 19 kecamatan dengan luas kurang lebih 85.371,63 Ha diluar kawasan hutan mangrove dan luasan kawasan hutan mangrove kurang lebih 4.372 Ha.
2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resepan air terdapat di Kecamatan Walenrang Utara dan Lamasi Timur dengan luas kurang lebih 1.000 Ha.
3. Kawasan perlindungan setempat, kawasan sempadan pantai; dan kawasan sempadan sungai. Kawasan sempadan pantai terdapat di Kecamatan Larompong, Larompong Selatan, Suli, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang Selatan, Ponrang, Bua, Walenrang Timur dan Lamasi Timur dengan Panjang Kurang Lebih 116,161 Kilometer dengan ketentuan daratan sepanjang tepian laut minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi kearah darat. Kawasan sempadan sungai terdapat di sungai Noling, Bajo, Suli, Larompong, Tembo'e, Bua, Lamasi dan Makawa. Di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10-15 meter.
4. Kawasan cagar budaya terdiri atas kawasan cagar budaya Lapandoso terdapat di Kecamatan Bua; kawasan cagar budaya Meriam Kuno terdapat di Kecamatan Suli; kawasan cagar budaya Ayam Puang Ritede terdapat di Kecamatan Bastem; kawasan cagar budaya Bubun Lamu terdapat di Kecamatan Bastem; kawasan cagar budaya Benteng Tajojok terdapat di Kecamatan Bastem; kawasan cagar budaya Awa'tondong terdapat di Kecamatan Bastem; kawasan cagar budaya Pantilang terdapat di Kecamatan Bastem; kawasan cagar budaya Loko Maindo terdapat di Kecamatan Bastem; kawasan cagar budaya Bukit Kamanre terdapat di Kecamatan Kamanre; kawasan cagar budaya Kuburan Tua Noling terdapat di Kecamatan Bupon; kawasan cagar budaya Kaili terdapat di Kecamatan Suli Barat;

dan kawasan cagar budaya Patung Batu Pemburu terdapat di Kecamatan Walenrang Barat.

5. Kawasan budi daya terdiri atas kawasan hutan produksi; kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan permukiman; dan kawasan peruntukan lainnya.
6. Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas kawasan hutan produksi terbatas, dan kawasan hutan produksi tetap. Untuk kawasan hutan produksi terbatas terdapat di Kecamatan Walenrang Barat, Bastem, Bua, Bupon dan Ponrang dengan luas kurang lebih 5.122,08 Ha. Sedangkan untuk kawasan hutan produksi tetap terdapat di kecamatan Bastem, Bua, Bupon, Latimojong, Ponrang dan Walenrang Utara dengan luas kurang lebih 18.349,7 Ha.
7. Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas:
 - a. kawasan pertanian tanaman pangan terdapat di setiap wilayah kecamatan ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dengan luas kurang lebih 52.738 Ha.
 - b. kawasan pertanian hortikultura terdapat di setiap wilayah kecamatan kurang lebih 7.953 Ha.
 - c. kawasan perkebunan terdiri dari kawasan pengembangan Tanaman Kakao dengan luas kurang lebih 36.762 Ha tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Luwu; kawasan pengembangan Tanaman Kelapa dengan luas kurang lebih 4.711 Ha tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Luwu; kawasan pengembangan Tanaman Cengkeh dengan luas kurang lebih 14.280 Ha tersebar di wilayah Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Suli Barat, Belopa, Belopa Utara, Bajo, Bajo Barat, Latimojong, Bastem, Ponrang, Bupon, Bua, Walenrang, Walenrang Barat, Walenrang Timur dan Walenrang Utara; kawasan pengembangan Tanaman Kopi dengan luas kurang lebih 4.627 Ha tersebar di wilayah Kecamatan Bastem dan Latimojong; kawasan pengembangan Tanaman Lada dengan luas kurang lebih 321 Ha tersebar di wilayah Kecamatan Larompong, Larompong Selatan, Suli, Suli Barat, Bajo, Bajo Barat, Latimojong dan Bastem; kawasan pengembangan tanaman sagu dengan luas kurang lebih 1.462 Ha tersebar di wilayah Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Suli Barat, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Bajo, Bajo Barat, Latimojong, Ponrang, Ponrang Selatan,

Bupon, Bua, Lamasi, Lamasi Timur, Walenrang, Walenrang Barat, Walenrang Timur dan Walenrang Utara; dan Kawasan perkebunan komoditas lain-lain dengan luas kurang lebih 2.833 Ha.

- d. kawasan peternakan terdapat di setiap wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu.
8. Kawasan peruntukan Perikanan terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat di Teluk Bone meliputi: Kecamatan Belopa, Larompong Selatan, Bua, Ponrang, Ponrang Selatan, Larompong dan Suli;
 - b. Kawasan peruntukan budi daya perikanan terdiri atas rumput laut di Kecamatan Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Suli, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Larompong, Larompong Selatan, Walenrang Timur dan Lamasi Timur; udang di Kecamatan Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Suli, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Larompong, Larompong Selatan, Walenrang Timur dan Lamasi Timur; ikan Bandeng di Kecamatan Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Suli, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Larompong, Larompong Selatan, Walenrang Timur dan Lamasi Timur; ikan Mas di Kecamatan Bajo, Suli Barat, Bupon, Walenrang dan Lamasi; dan
 - c. Kawasan peruntukan pengolahan ikan terdapat di Kecamatan Larompong, Suli, Ponrang Selatan dan Bua.
9. Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam dan batu bara meliputi kecamatan Walenrang Utara, Walenrang Barat, Walenrang, Bastem, Latimojong, Bajo Barat, Suli Barat, Larompong, Bupon dan Bua.
 - b. Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam meliputi kecamatan Walenrang Utara, Walenrang Barat, Lamasi, Lamasi Timur, Walenrang, Bastem, Latimojong, Bajo, Bajo Barat, Suli, Suli Barat, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Bupon, Ponrang, Ponrang Selatan, Larompong dan Larompong Selatan.
 - c. Kawasan peruntukan pertambangan mineral batuan meliputi kecamatan Walenrang Utara, Walenrang Barat, Lamasi, Lamasi Timur, Walenrang, Bastem, Latimojong, Bajo, Bajo Barat, Suli, Suli Barat, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang Selatan, Larompong dan Larompong Selatan.

- d. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi. berada di Teluk Bone Utara.
10. Kawasan peruntukan industri merupakan kawasan yang potensi dimanfaatkan untuk kegiatan industri yang meliputi :
- a. Kawasan industri menengah meliputi: kawasan potensi usaha industri di kecamatan Bua dan Walenrang;
 - b. Kawasan industri kecil meliputi: kawasan potensi usaha industri di kecamatan Belopa, Suli, Suli Barat, Bajo Barat, Bupon, Ponrang, Ponrang Selatan, Larompong Selatan, Walenrang Barat, Walenrang Timur, Walenrang Utara, dan Lamasi Timur; dan
 - c. Kawasan industri mikro meliputi: kawasan potensi usaha industri di Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Suli Barat, Bajo, Bajo Barat, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang Selatan, Ponrang, Bupon, Bua, Latimojong, Bastem, Walenrang, Walenrang Timur, Walenrang Barat, Walenrang Utara, Lamasi, Lamasi Timur.
11. Kawasan peruntukan pemukiman terdiri atas :
- a. Kawasan peruntukan pemukiman perkotaan terdiri dari kurang lebih 4.464 Ha tersebar di Kecamatan Belopa, Belopa Utara, Larompong Selatan, Larompong, Suli, Kamanre, Bajo, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Walenrang dan Lamasi;
 - b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan terdiri dari atas kurang lebih 2.773 Ha tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Luwu kecuali Kecamatan Belopa dan Belopa Utara.
12. Kawasan peruntukan lainnya adalah kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan terdiri atas:
- a. Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Larompong;
 - b. Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Suli;
 - c. Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Belopa;
 - d. Kawasan Wilayah pertahanan KORAMIL Bajo;
 - e. Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Bastem;
 - f. Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Ponrang; dan
 - g. Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Walenrang.

Selain potensi pengembangan wilayah yang telah disebutkan di atas masih dapat dilakukan beberapa terobosan pemanfaatan kawasan namun demikian

diperlukan kajian komprehensif lebih lanjut dengan memperhatikan kondisi lingkungan setempat dan tetap melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait. Namun kemungkinan adanya gangguan terhadap kawasan tersebut perlu terus diantisipasi dengan sebaik-baiknya. Bentuk gangguan yang sering terjadi adalah kebakaran hutan, penebangan liar, alih fungsi lahan dan lainnya.

2.1.1.9. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Pengertian daya dukung dan daya tampung lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Penentuan daya dukung lingkungan dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas manusia. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

Banyak metode yang telah dikembangkan dalam menentukan daya dukung lingkungan suatu wilayah. Sampai saat ini metode yang kerap digunakan yaitu metode penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis pada potensi lingkungan seperti kapasitas bio ekologi, kapasitas lahan, air, dan udara dalam menyerap karbondioksida. Penentuan daya dukung berbasis potensi terkadang kurang dapat menggambarkan kondisi daya dukung secara komprehensif dan kurang dapat menggambarkan data secara spasial kewilayahan. Hasil penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis potensi ini terkadang kurang dapat dimanfaatkan secara tepat guna dalam penentuan kebijakan pembangunan di suatu daerah pada wilayah tertentu. Hal ini terjadi karena penentuan daya dukung berbasis potensi hanya menggambarkan kondisi kapasitas lingkungan berbasis wilayah administrasi saja.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menjawab kelemahan metode daya dukung berbasis potensi yaitu dengan berbasis pada jasa ekosistem. Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem dilakukan dengan mendasarkan pada manfaat yang dapat dihasilkan dari suatu ekosistem. Pendekatan nilai jasa ekosistem dalam perhitungan daya dukung lingkungan didasarkan pada fungsi dari

sumberdaya alam dan lingkungan yaitu berbentuk barang (goods) dan pelayanan (services). Produk berupa barang yang dinilai berupa hasil langsung dari sumberdaya alam dan lingkungan seperti kayu, bahan tambang, minyak, gas, pangan, dan sebagainya. Sedangkan, produk jasa yang dinilai berupa hasil tidak langsung atau disebut pula jasa lingkungan (jasa ekosistem) berupa fungsi lingkungan seperti tata air, iklim, air bersih, biodiversitas, keindahan, kesejukan, dan lain sebagainya. Pendekatan nilai jasa ekosistem yang digunakan dalam perhitungan daya dukung lingkungan dapat dikategorikan dalam empat aspek yaitu: Jasa penyediaan (provisioning); Jasa pengaturan (regulating); Jasa budaya (cultural); Jasa pendukung (supporting).

Konsep perhitungan daya dukung lingkungan dengan pendekatan nilai jasa ekosistem dihitung dengan mempertimbangkan dari kondisi penggunaan atau tutupan lahan. Penggunaan atau tutupan lahan inilah yang dipertimbangkan sebagai aspek penilaian jasa ekosistem untuk berbagai aspek perhitungan daya dukung. Asumsi yang digunakan dimana setiap penggunaan lahan memiliki nilai kemampuan tersendiri dalam mendukung berbagai kebutuhan hidup manusia. Nilai kemampuan suatu sumberdaya alam dan lingkungan ditampilkan dalam bentuk nilai indeks jasa ekosistem dengan rentang nilai 0 – 1, dimana semakin mendekati 1 (satu), semakin baik fungsi wilayah dalam menyediakan jasa lingkungan.

Kajian daya dukung Kabupaten Luwu menyajikan daya dukung yang berbasis potensi dan jasa ekosistem. Untuk berbasis potensi, daya dukung ditentukan pada kemampuan lahan di Kabupaten Luwu. Sementara untuk jasa ekosistem ditentukan melalui penetapan status ketersediaan air di wilayah Kabupaten dengan pendekatan jasa ekosistem.

Kemampuan lahan adalah penilaian lahan secara sistematis berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaannya secara lestari. Kelas kemampuan lahan terbagi atas VIII kelas. Dari kelas I s.d. IV dapat digunakan untuk pertanian, sedangkan dari kelas V s.d. VII untuk padang rumput, kelas VIII sebaiknya secara alami sebagai hutan lindung. Masing-masing kelas dibagi lagi menjadi subkelas yaitu subkelas erosi, subkelas genangan air, subkelas solum (penghambat perakaran) dan subkelas iklim. Subkelas dapat diuraikan lagi menjadi beberapa unit. Adapun kriteria penggunaan lahan yang diperkenankan pada setiap kelas kemampuan lahan diperlihatkan pada tabel dibawah ini:

Gambar 2.3.

Skema Hubungan antara Kelas Kemampuan Lahan dengan intensitas dan Macam penggunaan Lahan

KELAS KEMAMPUAN LAHAN		INTENSITAS DAN PILIHAN PENGGUNAAN MENINGKAT								
		CAGAR ALAM/ HUTAN LINDUNG	HUTAN PRODUKSI TERBATAS	PENGEMBALAAN TERBATAS	PENGEMBALAAN SEDANG	PENGEMBALAAN INTENSIP	GARAPAN TERBATAS	GARAPAN SEDANG	GARAPAN INTENSIP	GARAPAN SANGAT INTENSIP
← HAMBATAN/ANCAMAN MENINGKAT. KESESUAIAN DAN PILIHAN PENGGUNAAN BERKURANG	I									
	II									
	III									
	IV									
	V									
	VI									
	VII									
	VIII									

Berdasarkan kriteria tersebut dilakukan analisis kemampuan lahan di Kabupaten Luwu. Hasilnya adalah sebesar 2,16% luas lahan kelas II, 0,19% luas lahan kelas III, 23,18% luas lahan kelas V, 72,81 % luas lahan kelas VI, dan 1,66% luas lahan kelas VIII. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar lahan di Kabupaten Luwu terletak pada daerah yang mempunyai lereng yang cukup curam, sehingga mudah ter-erosi/telah mengalami erosi yang sangat berat/mempunyai sokum yang sangat dangkal.

Tabel 2.3.

Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Luwu

Kelas	Luas (Ha)	Persentase (%)
II	6.598,23	2,16
III	586,68	0,19
V	70.722,59	23,18
VI	222.178,74	72,81
VIII	5.057,54	1,66

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019

Berdasarkan kriteria kuantitatif kemampuan lahan dan faktor pembatas, lahan di Kabupaten Luwu umumnya terlalu banyak batu di atas permukaan tanah dan cenderung sering terjadi banjir serta erosi sedang. Selain itu kondisi drainase lahan sangat buruk sehingga sering tergenang air, terletak pada lereng yang agak curam,

ancaman erosi berat, hanya cocok untuk tanaman permanen atau dihutankan. Oleh sebab itu tanah pada kelas ini membutuhkan pengelolaan tanah yang cukup hati-hati meliputi tindakan konservasi, menghindari kerusakan dan memperbaiki hubungan air-udara dalam tanah bila ditanami faktor pembatas dalam kelas ini dapat merupakan satu atau kombinasi dari faktor-faktor lereng landai, kepekaan erosi sedang dan struktur tanah yang kurang baik.

Sebaran kelas kemampuan lahan setiap kecamatan diperlihatkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4.
Kelas Kemampuan Lahan per Kecamatan di Kabupaten Luwu

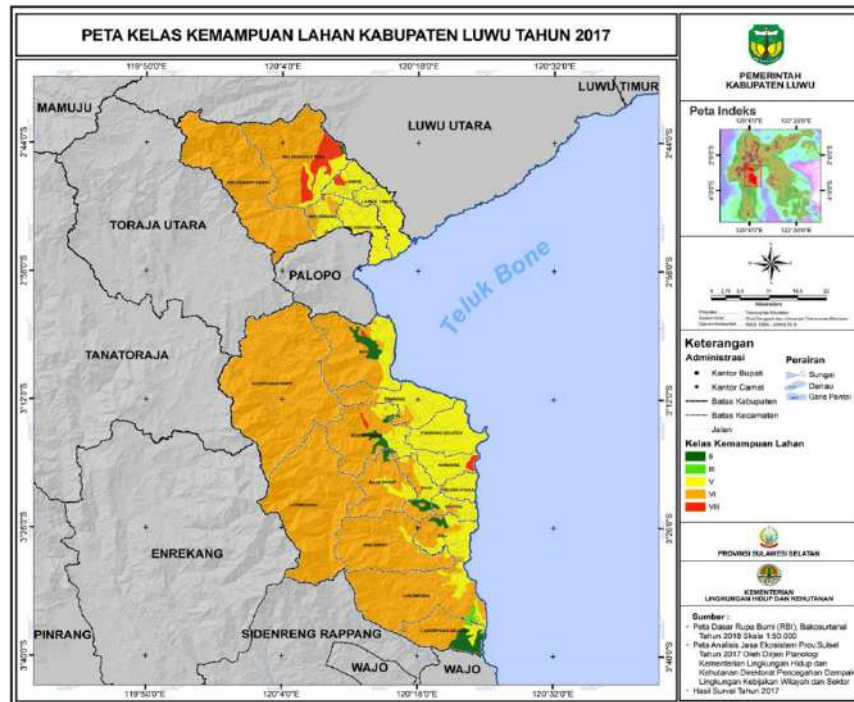
Kecamatan	Kelas				
	II	III	V	VI	VIII
BAJO	653,32		2.458,58	2.785,86	
BAJO BARAT	365,61		1.416,53	8.867,36	
BASSESANGTEMPE				48.830,69	
BELOPA	141,01		2.547,92	549,86	
BELOPA UTARA			3.095,57		
BUA	1.430,98		4.626,72	12.791,90	85,74
BUAPONRANG	1.058,52		3.345,38	11.212,46	180,42
KAMANRE			4.756,22		489,35
LAMASI			3.907,47		351,68
LAMASI TIMUR			6.556,58		
LAROMPONG		426,90	2.437,83	21.725,78	
LAROMPONG SELATAN	2.254,84	159,78	820,24	6.383,72	
LATIMOJONG				34.170,87	
PONRANG	85,56		6.970,57	3.981,83	
PONRANG SELATAN			9.761,45		
SULI	432,33		4.599,79	3.010,36	
SULI BARAT			743,81	18.289,71	
WALENRANG			2.781,23	1.479,65	51,92
WALENRANG BARAT			80,13	30.762,24	
WALENRANG TIMUR			6.601,84	93,85	
WALENRANG UTARA	176,07		3.214,72	17.242,58	3.898,43
Total	6.598,23	586,68	70.722,59	222.178,74	5.057,54

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, daerah yang tidak sesuai dengan pengembangan sektor pertanian yang didukung oleh potensi lahan terdapat pada Kecamatan Basesangtempe (48.830,69 ha), Kecamatan Latimojong (34.170,87 ha), Kecamatan Walenrang Barat (30.762,24 ha) dan beberapa kecamatan lainnya. Hasil ini

menunjukkan bahwa sebagian besar lahan di Kabupaten Luwu terletak pada daerah yang mempunyai lereng yang cukup curam, sehingga mudah ter-erosi/telah mengalami erosi yang sangat berat/mempunyai solum yang sangat dangkal.

Gambar 2.4.
Peta Kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Luwu Tahun 2017



Sumber: Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019

Adapun hasil analisis daya dukung berdasarkan jasa ekosistem yang datanya tersedia adalah daya dukung penyediaan air bersih dan penyediaan pangan. Penentuan ambang batas dihitung berdasarkan jasa ekosistem penyediaan air bersih dengan pendekatan ketersediaan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) melalui pembangunan model distribusi populasi penduduk resolusi tinggi dengan menggunakan system grid skala ragam. Hasil analisis yang menunjukkan terlampaui atau tidaknya ambang batas penyediaan air bersih dan pangan menggambarkan status daya dukung suatu wilayah. Penyediaan air bersih di Kabupaten Luwu diperlihatkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5.

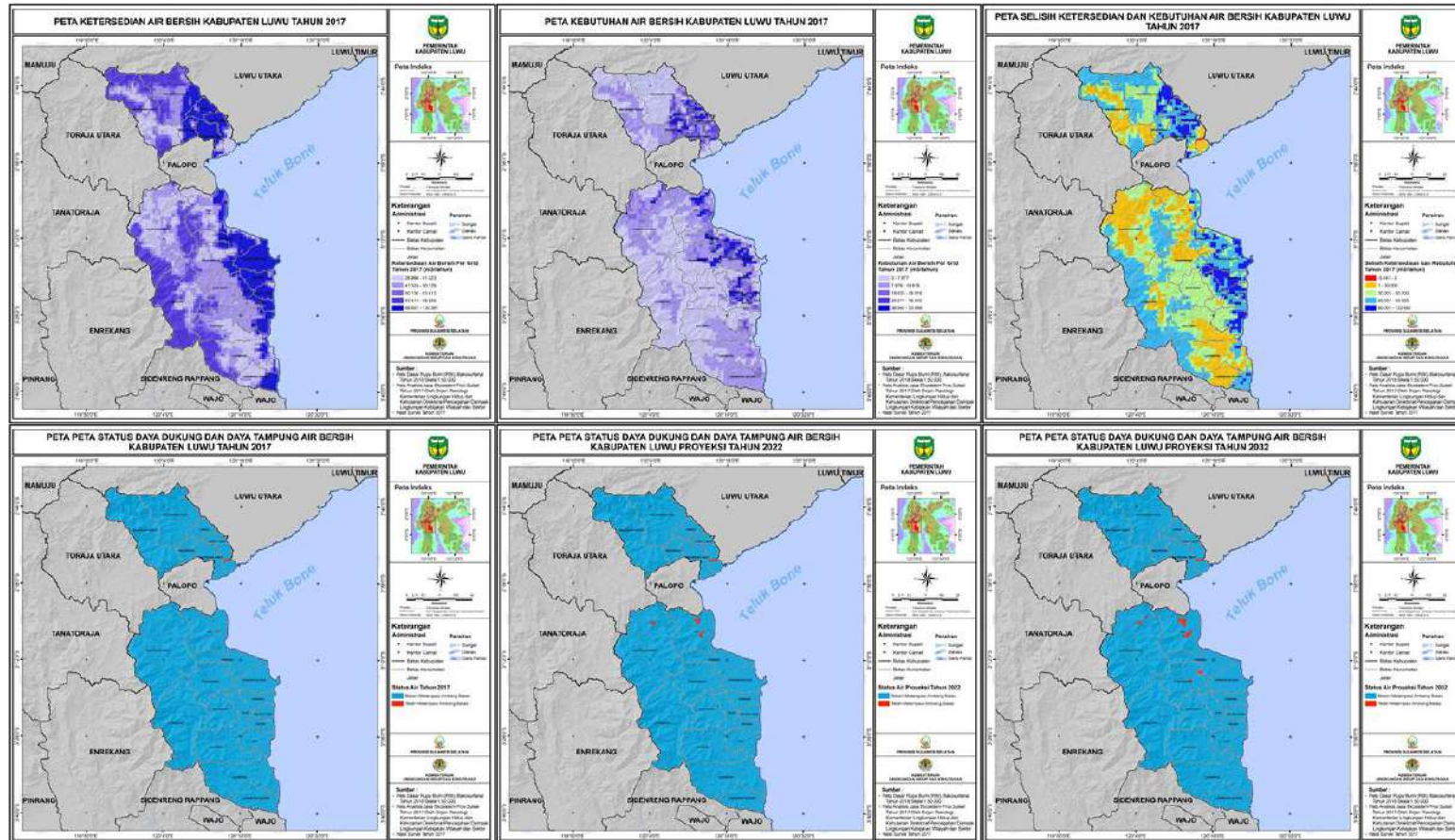
Status Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Luwu

Kecamatan	Status Air Tahun 2017 (m ³ /tahun)		
	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih
BAJO	6.951.306,55	1.002.820,71	5.948.485,84
BAJO BARAT	7.818.874,17	170.558,30	7.648.315,88
BASSESANGTEMPE	32.564.862,62	5.272.984,55	27.291.878,07
BELOPA	5.227.987,77	983.365,85	4.244.621,92
BELOPA UTARA	5.365.864,11	1.027.169,13	4.338.694,98
BUA	15.450.151,80	3.720.772,77	11.729.379,03
BUAPONRANG	13.472.313,49	2.457.519,45	11.014.794,04
KAMANRE	9.040.440,19	1.219.569,39	7.820.870,80
LAMASI	8.376.108,13	1.890.821,91	6.485.286,22
LAMASI TIMUR	8.264.462,71	2.146.957,74	6.117.504,97
LAROMPONG	18.103.380,17	3.072.078,35	15.031.301,82
LAROMPONG SELATAN	9.308.859,54	2.077.731,84	7.231.127,70
LATIMOJONG	28.519.566,67	1.191.640,32	27.327.926,35
PONRANG	13.125.524,42	3.119.581,64	10.005.942,79
PONRANG SELATAN	14.353.214,09	2.606.116,43	11.747.097,66
SULI	8.032.471,92	787.384,94	7.245.086,99
SULI BARAT	13.802.335,39	1.610.218,31	12.192.117,09
WALENRANG	6.145.939,95	1.899.296,12	4.246.643,84
WALENRANG BARAT	24.252.097,57	3.037.823,46	21.214.274,11
WALENRANG TIMUR	10.142.069,02	2.159.490,02	7.982.579,00
WALENRANG UTARA	24.126.249,87	1.502.679,45	22.623.570,42
Total	282.444.080,16	42.956.580,63	239.487.499,53

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019

Hasil kajian daya dukung penyediaan air menunjukkan ketersediaan air di Kabupaten Luwu sebesar 282.444.080,16 m³/tahun, sementara kebutuhan sebesar 42.956.580,63 m³/tahun, sehingga masih ada selisih sebesar 239.487.499,53 m³/tahun, hal ini berarti ambang batas terhadap daya dukung penyediaan air belum terlampaui. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan air untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada Kecamatan Latimojong (27.327.926,79 m³/Tahun), dan Bessesangtempe (27.291.878,07 m³/Tahun). Hal ini dapat dipahami dikarenakan Kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang tutupan lahannya masih bagus (bervegetasi) dan berada dalam kawasan hutan. Sementara untuk selisih antara ketersediaan dan kebutuhan terkecil terdapat pada Kecamatan Belopa (4.244.621,92 m³/tahun).

Gambar 2.5.
Peta Kajian Daya Dukung Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Luwu



Untuk hasil proyeksi ketersediaan dan kebutuhan air tahun 2022, 2027 dan 2032 secara umum masih mencukupi dengan pertumbuhan penduduk 1- 2%, dengan asumsi ketersediaan air tetap. Pada tahun 2022, 2027 dan 2032 kebutuhan air di Kabupaten Luwu masing-masing 44.862.628,11 m³/tahun, 46.864.325,96 m³/tahun, 48.966.962,83 m³/tahun.

Tabel 2.6.
Proyeksi Daya Dukung Air Bersih Kabupaten Luwu

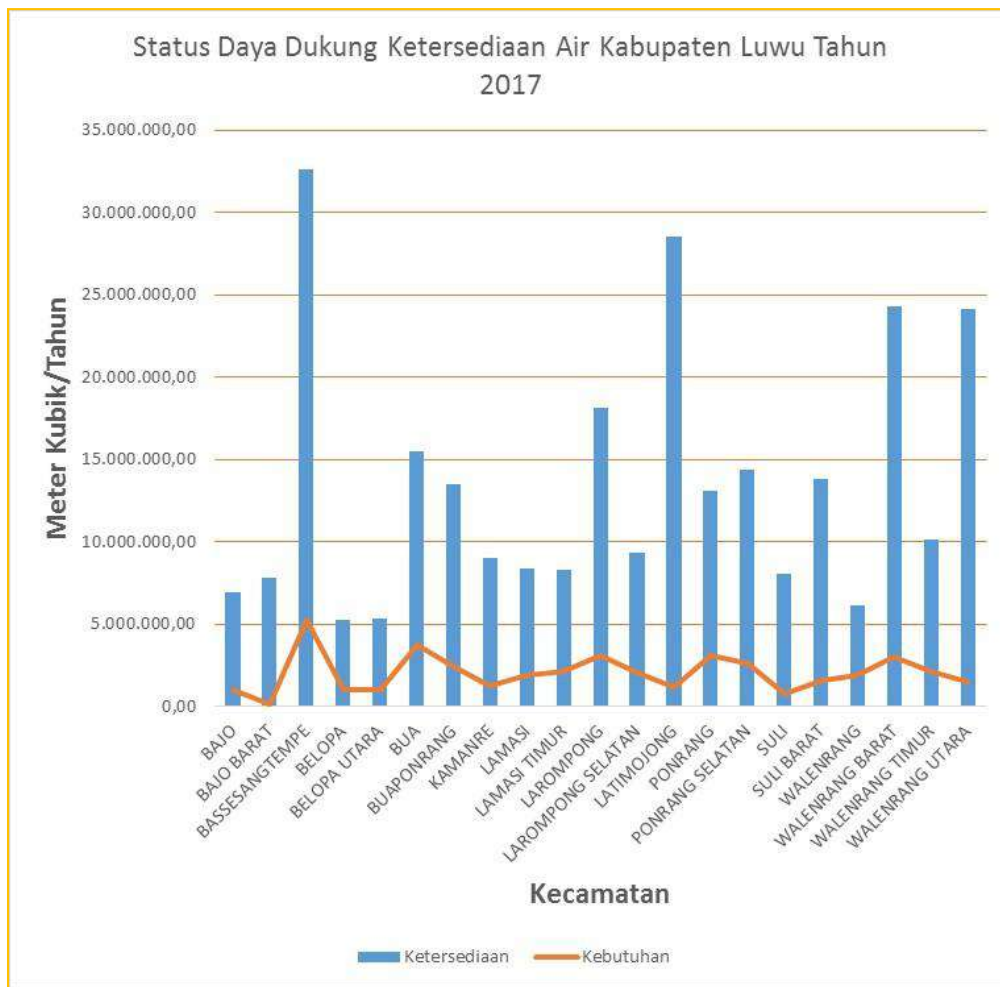
Kecamatan	Volume Status Air (m3/tahun)				
	Ketersediaan	Kebutuhan 2017	Kebutuhan 2022	Kebutuhan 2027	Kebutuhan 2032
BAJO	6.951.306,55	1.002.820,71	1.059.852,40	1.120.127,56	1.183.830,64
BAJO BARAT	7.818.874,17	170.558,30	181.482,66	193.106,74	205.475,35
BASSESANGTEMPE	32.564.862,62	5.272.984,55	5.595.140,56	5.936.978,87	6.299.702,00
BELOPA	5.227.987,77	983.365,85	1.060.732,26	1.144.185,48	1.234.204,40
BELOPA UTARA	5.365.864,11	1.027.169,13	1.103.884,46	1.186.329,37	1.274.931,77
BUA	15.450.151,80	3.720.772,77	3.970.854,81	4.237.745,46	4.522.574,48
BUAPONRANG	13.472.313,49	2.457.519,45	2.529.769,94	2.604.144,57	2.680.705,80
KAMANRE	9.040.440,19	1.219.569,39	1.262.141,44	1.306.199,58	1.351.795,67
LAMASI	8.376.108,13	1.890.821,91	1.945.154,09	2.001.047,49	2.058.546,98
LAMASI TIMUR	8.264.462,71	2.146.957,74	2.204.754,45	2.264.107,07	2.325.057,48
LAROMPONG	18.103.380,17	3.072.078,35	3.221.598,78	3.378.396,50	3.542.825,68
LAROMPONG SELATAN	9.308.859,54	2.077.731,84	2.126.659,79	2.176.739,94	2.227.999,41
LATIMOJONG	28.519.566,67	1.191.640,32	1.221.651,72	1.252.418,95	1.283.961,05
PONRANG	13.125.524,42	3.119.581,64	3.218.518,68	3.320.593,49	3.425.905,59
PONRANG SELATAN	14.353.214,09	2.606.116,43	2.682.949,01	2.762.046,75	2.843.476,43
SULI	8.032.471,92	787.384,94	808.155,37	829.473,72	851.354,42
SULI BARAT	13.802.335,39	1.610.218,31	1.684.094,34	1.761.359,77	1.842.170,10
WALENRANG	6.145.939,95	1.899.296,12	2.001.234,16	2.108.643,37	2.221.817,39
WALENRANG BARAT	24.252.097,57	3.037.823,46	3.165.187,03	3.297.890,44	3.436.157,56
WALENRANG TIMUR	10.142.069,02	2.159.490,02	2.275.595,71	2.397.943,87	2.526.870,12
WALENRANG UTARA	24.126.249,87	1.502.679,45	1.543.216,43	1.584.846,96	1.627.600,53
Total	282.444.080,16	42.956.580,63	44.862.628,11	46.864.325,96	48.966.962,83

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019

Hasil proyeksi kebutuhan air di Kabupaten Luwu menunjukkan bahwa tidak terdapat Kecamatan yang diperkirakan kebutuhan airnya sudah melebihi ketersediaan airnya pada tahun 2022, 2027 dan 2032.

Gambar 2.6.

Grafik Status Daya Dukung Ketersediaan Air Kabupaten Luwu Tahun 2017



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019

Adapun hasil kajian ketersediaan pangan juga menunjukkan masih belum melampaui daya dukung penyediaan pangan. Ketersediaan pangan di Kabupaten Luwu sebesar 1.203.352.091,24 Kkal/tahun, sementara kebutuhan sebesar 346.630.791,00 Kkal/tahun, sehingga masih terdapat selisih sebesar 856.721.300,24 Kkal/tahun. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan pangan untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada kecamatan Basesangtempe (117.228.559,41 Kkal/tahun), dan selisih terkecil terdapat pada Kecamatan Walenrang (6.467.389,88 Kkal/tahun).

Tabel 2.7.

Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Pangan di Kabupaten Luwu

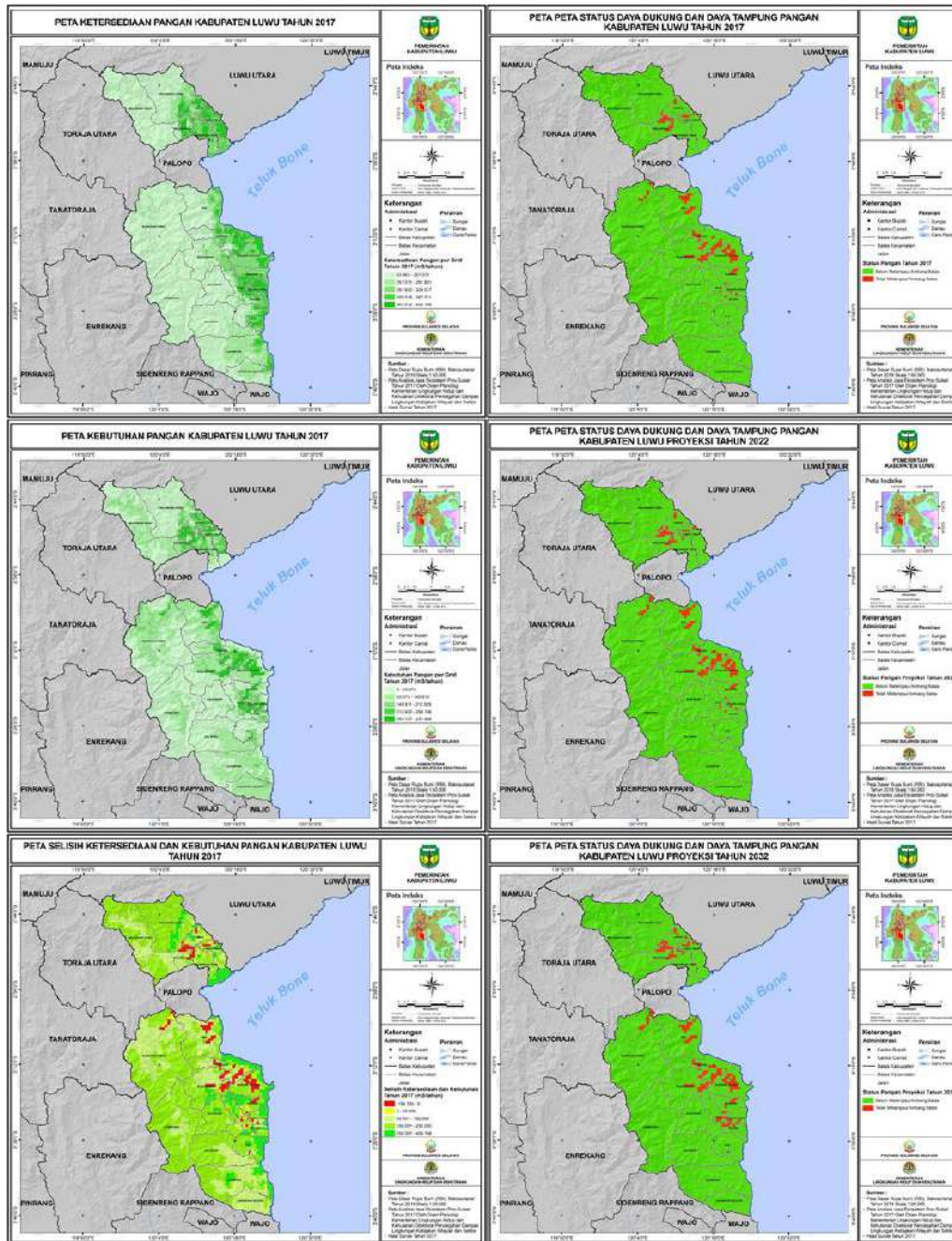
Kecamatan	Status Pangan Tahun 2017 (kkal/tahun)		
	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih
BAJO	28.517.758,82	8.022.565,68	20.495.193,14
BAJO BARAT	39.646.127,66	1.364.466,36	38.281.661,30
BASSESANGTEMPE	160.818.915,09	43.590.355,68	117.228.559,41
BELOPA	19.690.891,21	7.866.926,76	11.823.964,45
BELOPA UTARA	20.108.023,15	8.236.449,84	11.871.573,31
BUA	72.686.857,84	29.766.182,16	42.920.675,68
BUAPONRANG	60.763.028,07	19.660.155,60	41.102.872,47
KAMANRE	29.502.384,22	9.756.555,12	19.745.829,10
LAMASI	25.263.159,59	15.126.575,28	10.136.584,31
LAMASI TIMUR	37.499.838,31	17.175.661,92	20.324.176,39
LAROMPONG	91.913.730,18	24.696.936,60	67.216.793,58
LAROMPONG SELATAN	37.874.125,30	16.621.854,72	21.252.270,58
LATIMOJONG	114.964.312,00	9.533.122,56	105.431.189,44
PONRANG	53.828.613,72	24.956.653,08	28.871.960,64
PONRANG SELATAN	49.021.087,24	20.848.931,40	28.172.155,84
SULI	36.288.862,24	6.299.079,48	29.989.782,76
SULI BARAT	67.732.203,42	12.881.746,44	54.850.456,98
WALENRANG	21.661.758,80	15.194.368,92	6.467.389,88
WALENRANG BARAT	108.835.867,70	25.734.847,68	83.101.020,02
WALENRANG TIMUR	36.595.244,04	17.275.920,12	19.319.323,92
WALENRANG UTARA	90.139.302,63	12.021.435,60	78.117.867,03
Total	1.203.352.091,24	346.630.791,00	856.721.300,24

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019

Ketersediaan pangan dapat dipengaruhi oleh kesuburan tanah, mata pencarian, dan ketinggian tempat. Keragaman konsumsi pangan dapat dipengaruhi oleh ketersediaan pangan yang ditentukan dari nilai-nilai kebiasaan/adat (tradisi dan kepercayaan) yang berhubungan dengan pangan, pengetahuan gizi dan kualitas pangan. Menggantikan beberapa jenis pangan tertentu dengan pangan lain yang memiliki kandungan gizi serupa membawa konsekuensi pada ketersediaan pangan yang mungkin berhubungan dengan keragaman pangan seperti yang telah diperhitungkan dari keragaman konsumsi pangan sejenis tetapi tidak dengan keragaman pangan seperti yang telah diperhitungkan dari sebagian besar kelompok pangan. Jika jenis pangan di seluruh wilayah yang tersedia sama, maka akan sulit untuk memasukkan jenis pangan yang tersedia sebagai salah satu determinan keragaman konsumsi pangan. Keragaman pangan setiap wilayah berbeda-beda dan

dipengaruhi oleh faktor luar seperti iklim, kondisi tanah dan keadaan biologis wilayah, yang nantinya berpengaruh terhadap ketersediaan pangan di wilayah tersebut.

Gambar 2.7.
Peta Kajian Daya Dukung Penyediaan Pangan di Kabupaten Luwu



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019

Adapun proyeksi kebutuhan pangan di Kabupaten Luwu untuk setiap kecamatannya diperlihatkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.8.
Proyeksi Daya Dukung Pangan Kabupaten Luwu

Kecamatan	Volume Status Pangan (kkal/tahun)				
	Ketersediaan	Kebutuhan 2017	Kebutuhan 2022	Kebutuhan 2027	Kebutuhan 2032
BAJO	28.517.758,82	8.022.565,68	8.478.819,22	8.961.020,49	9.470.645,16
BAJO BARAT	39.646.127,66	1.364.466,36	1.451.861,28	1.544.853,91	1.643.802,77
BASSESANGTEMPE	160.818.915,09	43.590.355,68	46.253.533,43	49.079.419,55	52.077.954,80
BELOPA	19.690.891,21	7.866.926,76	8.485.858,07	9.153.483,87	9.873.635,21
BELOPA UTARA	20.108.023,15	8.236.449,84	8.851.598,75	9.512.690,79	10.223.157,25
BUA	72.686.857,84	29.766.182,16	31.766.838,49	33.901.963,72	36.180.595,82
BUAPONRANG	60.763.028,07	19.660.155,60	20.238.159,50	20.833.156,58	21.445.646,44
KAMANRE	29.502.384,22	9.756.555,12	10.097.131,54	10.449.596,62	10.814.365,36
LAMASI	25.263.159,59	15.126.575,28	15.561.232,75	16.008.379,96	16.468.375,81
LAMASI TIMUR	37.499.838,31	17.175.661,92	17.638.035,63	18.112.856,58	18.600.459,84
LAROMPONG	91.913.730,18	24.696.936,60	25.898.955,68	27.159.477,97	28.481.350,85
LAROMPONG SELATAN	37.874.125,30	16.621.854,72	17.013.278,35	17.413.919,51	17.823.995,27
LATIMOJONG	114.964.312,00	9.533.122,56	9.773.213,73	10.019.351,58	10.271.688,40
PONRANG	53.828.613,72	24.956.653,08	25.748.149,40	26.564.747,91	27.407.244,70
PONRANG SELATAN	49.021.087,24	20.848.931,40	21.463.592,11	22.096.374,03	22.747.811,40
SULI	36.288.862,24	6.299.079,48	6.465.242,99	6.635.789,74	6.810.835,34
SULI BARAT	67.732.203,42	12.881.746,44	13.472.754,70	14.090.878,14	14.737.360,77
WALENRANG	21.661.758,80	15.194.368,92	16.009.873,26	16.869.146,94	17.774.539,11
WALENRANG BARAT	108.835.867,70	25.734.847,68	26.813.805,08	27.937.998,78	29.109.325,34
WALENRANG TIMUR	36.595.244,04	17.275.920,12	18.204.765,71	19.183.550,99	20.214.960,98
WALENRANG UTARA	90.139.302,63	12.021.435,60	12.345.731,47	12.678.775,69	13.020.804,27
Total	1.203.352.091,24	346.630.791,00	362.032.431,18	378.207.433,34	395.198.554,88

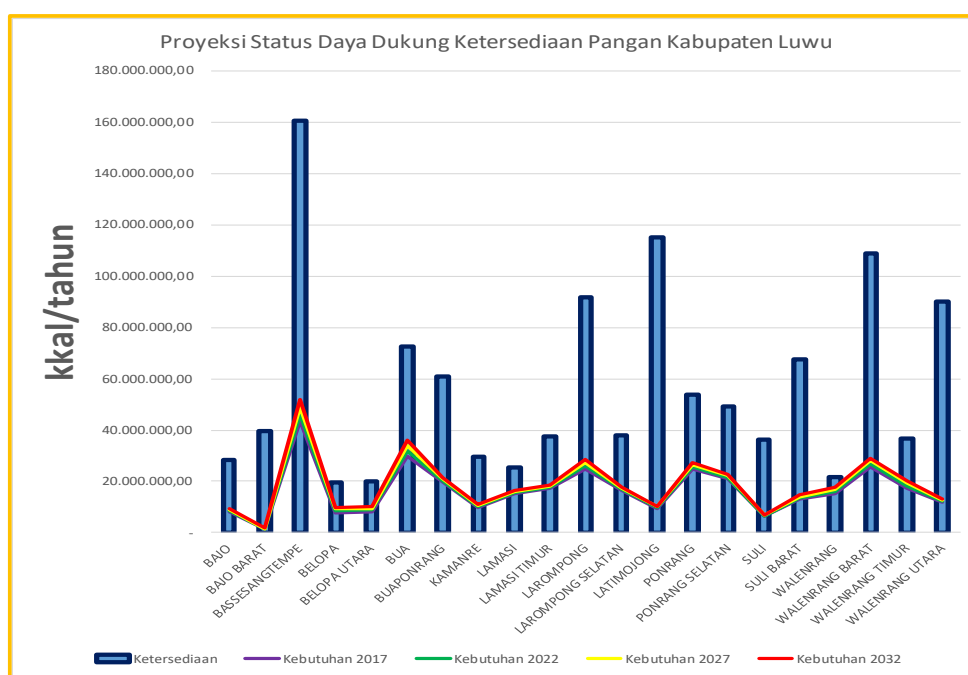
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019

Hasil proyeksi kebutuhan pangan di Kabupaten Luwu menunjukkan bahwa tidak terdapat Kecamatan yang diperkirakan kebutuhannya pangannya sudah lebih besar dari ketersediaan pangannya pada tahun 2022, 2027, dan 2032. Hal ini sudah cukup bagus dalam menetapkan masalah pangan yang juga menjadi tanggung jawab unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat lainnya. Bahan pangan untuk konsumsi sehari-hari di kabupaten Luwu dapat dikelompokkan menjadi 9 kelompok besar. Jenis pangan pada masing-masing kelompok dapat berbeda-beda pada setiap rumah tangga sesuai sumber pangan yang tersedia. Secara nasional bahan pangan dikelompokkan sebagai berikut: (1) Padi-padian: beras, jagung, sorgum dan terigu (2) Umbi-umbian: ubi kayu, ubi jalar, kentang, talas, sagu, dan umbi lainnya (3) Pangan hewani: ikan, daging, susu dan telur (4) Minyak dan lemak: minyak kelapa, minyak sawit (minyak goreng, minyak jagung, margarin) (5) Buah/biji berminyak: kelapa, kemiri, jambu mete dan cokelat (6) Kacang-kacangan: kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, dan kacang lainnya (7) Gula: gula pasir, gula merah (8) Sayur

dan buah: semua jenis sayuran dan buah-buahan yang biasa dikonsumsi (9) Lain-lain: teh, kopi, sirup, rempah-rempah, makanan dan minuman jadi.

Untuk lebih menumbuhkan motivasi dan mengoptimalkan partisipasi aparatur, lembaga swasta dan masyarakat lainnya, perlu ada gerakan-gerakan yang mampu meningkatkan kinerja lembaga-lembaga tersebut dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan sesuai dengan perannya masing-masing. Salah satu cara untuk memotivasi kelompok tani, lembaga pedesaan (Koperasi Tani, KUD, dan sebagainya) dan aparatur pelayanan agar lebih efektif berpartisipasi dalam pelaksanaan program peningkatan produksi dan produktivitas usaha tani, adalah dengan penyelenggaraan perlombaan ketahanan pangan. Perlembagaan ini telah diyakini sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi petani secara aktif agar petani mau dan mampu meningkatkan produksi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.

Gambar 2.8.
Proyeksi Daya Dukung Penyediaan Pangan di Kabupaten Luwu



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019

2.1.1.10. Demografi

Penjelasan mengenai aspek demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian dan migrasi. Analisis kependudukan dapat dilakukan secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, usia, agama, dan lain-lain.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Luwu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 6,73%, dengan jumlah penduduk pada tahun sebelumnya sebesar 370.675 jiwa terdiri dari 186.575 jiwa laki-laki dan 184.100 jiwa perempuan. Jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Luwu. Tahun 2019, jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Bua yaitu sebesar 8.49% dan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Latimojong sekitar 1,64%.

Tabel 2.9.
Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Tahun 2019

No	Kecamatan	KK	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Larompong	6.742	11.644	11.156	22.800
2	Larompong Selatan	5.563	9.137	9.267	18.404
3	Suli	6.234	10.844	11.011	21.855
4	Suli Barat	2.873	5.267	4.865	10.132
5	Belopa	5.325	9.355	9.697	19.052
6	Kamanre	3.640	6.233	6.284	12.517
7	Belopa Utara	4.982	8.931	8.963	17.894
8	Bajo	4.546	8.198	8.287	16.485
9	Bajo Barat	2.842	5.267	5.149	10.416
10	Basse sangtempe	1.625	3.282	2.954	6.236
11	Latimojong	1.545	3.218	2.897	6.115
12	Basse sangtempe Utara	1.936	4.100	3.699	7.799
13	Bupon	4.497	8.004	7.733	15.737
14	Ponrang	7.683	13.925	13.907	27.832
15	Ponrang Selatan	7.233	13.040	12.985	26.025
16	Bua	9.278	16.357	16.448	32.205
17	Walenrang	5.195	9.258	9.352	18.610
18	Walenrang Timur	4.507	8.179	7.972	16.151
19	Lamasi	6.622	11.430	11.298	22.714
20	Walenrang Utara	5.273	9.508	9.298	18.806
21	Walenrang Barat	1.907	4.622	4.187	8.809
22	Lamasi Timur	3.770	6.776	6.705	13.481
JUMLAH		103.895	186.575	184.100	370.675

Sumber: Dinas Kependudukan & Catatan Sipil

Sementara jika dilihat kepadatan penduduk per km², Kecamatan Lamasi merupakan daerah terpadat yaitu 536 penduduk per kilometer persegi (km²) dengan luas wilayahnya hanya 1,40% dari luas Kabupaten Luwu, sementara yang paling rendah kepadatannya terdapat di Kecamatan Latimojong yaitu hanya 13 penduduk per kilometer persegi (km²) dengan luas wilayah 15,60% dari luas kabupaten Luwu.

Tabel 2.10.
Kepadatan Penduduk Kabupaten Luwu Tahun 2019

No	Kecamatan	KK	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan (Jiwa/Km2)
1	Larompong	6.742	22.800	225,25	101
2	Larompong Selatan	5.563	18.404	131,00	140
3	Suli	6.234	21.855	81,75	267
4	Suli Barat	2.873	10.132	153,50	66
5	Belopa	5.325	19.052	59,26	321
6	Kamanre	3.640	12.517	52,44	239
7	Belopa Utara	4.982	17.894	34,73	515
8	Bajo	4.546	16.485	68,52	241
9	Bajo Barat	2.842	10.416	66,30	157
10	Basse sangtempe	1.625	6.236	178,12	35
11	Latimojong	1.545	6.115	467,75	13
12	Basse sangtempe Utara	1.936	7.799	122,88	63
13	Bupon	4.497	15.737	182,67	86
14	Ponrang	7.683	27.832	107,09	260
15	Ponrang Selatan	7.233	26.025	99,98	260
16	Bua	9.278	32.205	204,01	161
17	Walentrang	5.195	18.610	94,60	197
18	Walentrang Timur	4.507	16.151	63,65	254
19	Lamasi	6.622	22.714	42,20	538
20	Walentrang Utara	5.273	18.806	259,77	72
21	Walentrang Barat	1.907	8.809	247,13	36
22	Lamasi Timur	3.770	13.481	57,65	234
JUMLAH		103.818	370.675	3.000,25	4.257

Sumber: Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Luwu

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu tujuan dari pelaksanaan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang dikatakan sejahtera adalah ketika setiap individu dalam masyarakat dapat menyediakan barang untuk memenuhi kepuasannya. Oleh karena itu pembangunan yang dilakukan pemerintah sedianya harus dapat meningkatkan kemampuan individu dalam masyarakat untuk memenuhi kepuasannya yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat. Lebih lanjut, pembangunan harus mampu mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas, tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan, tetapi juga dapat mewujudkan pemerataan, penurunan kemiskinan, serta penciptaan kesempatan kerja. Secara umum, gambaran aspek kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu dapat dijelaskan melalui berbagai indikator yang sesuai dengan kebutuhan.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Dalam istilah umum, sejahtera menunjukkan keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Sedangkan pemerataan ekonomi adalah satu cara untuk menciptakan ketenangan dalam masyarakat, karena ketimpangan ekonomi yang semakin melebar dari suatu masyarakat akan menimbulkan gejolak sosial. Berdasarkan konstitusi, pemerintah jelas memiliki peran yang besar, terutama dalam mengatur perekonomian suatu wilayah maupun nasional. Terdapat berbagai indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi di suatu wilayah.

2.1.2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB secara umum digunakan untuk meninjau kondisi ekonomi suatu wilayah administrasi. PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian diseluruh wilayah dalam periode tahun tertentu. Perhitungan PDRB dapat menggunakan dua harga yaitu PDRB harga berlaku dan PDRB harga konstan. PDRB harga berlaku merupakan nilai suatu barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut, dan PDRB harga konstan adalah nilai suatu barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu yang dijadikan sebagai tahun acuan atau tahun dasar.

Tabel 2.11
PDRB Atas Harga Berlaku Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019

Kategori	Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.549,09	53,55	6.435,09	54,30	6969,61	53,50	7.781,89	53,88	8.201,86	52,38
B	Pertambangan dan Penggalian	283,54	2,74	327,24	2,76	360,78	2,77	397,14	2,75	429,52	2,74
C	Industri Pengolahan	424,86	4,10	476,38	4,02	541,30	4,16	595,41	4,12	668,83	4,27
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,47	0,06	7,84	0,07	10,50	0,08	11,52	0,08	12,05	0,08
E	Pengadaan Air	1,44	0,01	1,63	0,01	1,80	0,01	1,96	0,01	2,07	0,01
F	Konstruksi	857,87	8,28	951,50	8,03	1064,96	8,18	1.169,56	8,10	1.349,18	8,62
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Spd Motor	1.059,22	10,22	1.178,87	9,91	1273,94	9,78	1.408,16	9,75	1.587,98	10,14
H	Transportasi dan Pergudangan	87,60	0,85	97,56	0,82	103,92	0,80	121,37	0,84	135,69	0,87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minuman	720	0,69	81,59	0,69	87,82	0,67	101,04	0,70	110,28	0,70
J	Informasi dan Komunikasi	228,54	2,21	250,04	2,11	273,55	2,10	301,95	2,09	335,04	2,14
K	Jasa Keuangan	143,18	1,38	169,80	1,43	187,17	1,44	201,94	1,40	218,61	1,40
L	Real Estate	606,20	5,85	682,49	5,76	759,59	5,83	821,14	5,69	881,80	5,63
M,N	Jasa Perusahaan	2,55	0,02	2,94	0,02	3,37	0,03	3,81	0,03	4,19	0,03
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jam. Sosial Wajib	492,42	4,75	550,17	4,64	590,17	4,53	628,83	4,35	726,50	4,64
P	Jasa Pendidikan	338,46	3,27	400,13	3,38	435,43	3,34	492,52	3,41	545,34	3,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	179,71	1,73	208,19	1,76	324,66	2,49	358,49	2,48	398,30	2,54
R,S,T,U	Jasa Lainnya	29,40	0,28	34,38	0,29	38,25	0,29	45,20	0,31	50,38	0,32
PDRB Luwu		10.362,55	100	11.855,84	100	13.026,82	100	14.441,93	100	15.657,62	100,00

Sumber : KDA 2019 BPS Luwu

PDRB atas harga berlaku di Kabupaten Luwu menunjukkan bahwa komposisi lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2019 masih memberikan kontribusi yang signifikan dengan sumbangsih lebih dari setengah dari total PDRB bila dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya. Sebagaimana tabel diatas, rentang waktu antara tahun 2015-2019 secara umum PDRB Kabupaten Luwu terus menunjukkan geliat yang baik, dimana pada tahun 2015 nilai PDRB ADHB Kabupaten Luwu sebesar 10,362t riliun rupiah, hingga pada tahun 2019 mencapai 15,657 triliun rupiah. Pada tahun 2019 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih memberikan kontribusi yang paling besar terhadap PDRB Kabupaten Luwu, yakni sebesar 52,38 persen, kemudian disusul sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda sebesar 10,14 persen kemudian sector konstruksi (8,62 persen), real estate (5,63 persen), administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial (4,6 persen), industri pengolahan (4,27) dan sektor lainnya.

Merujuk pada data PDRB atas harga konstan lansiran Badan Pusat Statistik, diketahui bahwa ekonomi Kabupaten Luwu masih sangat ditopang oleh sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Pada tahun 2019 nilai PDRB meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.12
PDRB dan Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019

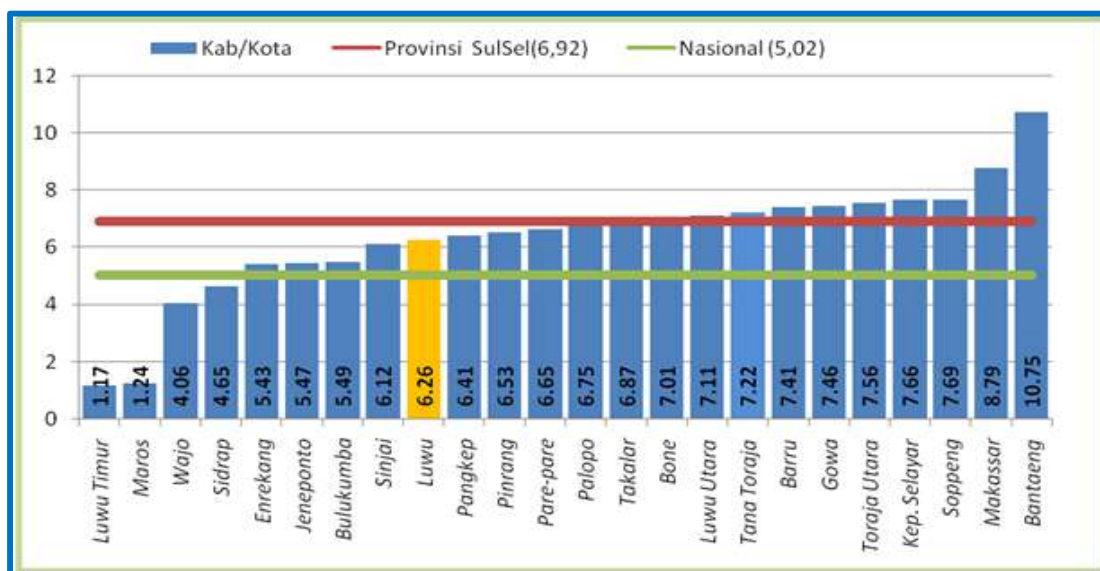
Kat	Lapangan Usaha	PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN (ADHK) & PERTUMBUHAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Rp (Miliar)	%	Rp (Miliar)	%	Rp (Miliar)	%	Rp (Miliar)	%	Rp (Miliar)	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.756,05	6,48	4.046,08	7,79	4.267,80	5,41	4.565,06	6,97	4.747,14	3,98
B	Pertambangan dan Penggalian	168,83	6,06	184,04	9,01	200,41	8,89	212,83	6,2	227,42	6,86
C	Industri Pengolahan	330,2	4,44	359,81	8,97	387,11	7,59	414,03	6,95	457,47	10,94
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,53	-7,24	10,07	18,13	10,67	5,90	11,47	7,49	11,93	4,09
E	Pengadaan Air	1,18	0,56	1,30	10,02	1,41	8,47	1,50	6,31	1,56	3,83
F	Konstruksi	646,04	5,31	676,59	4,99	712,78	5,09	756,96	6,2	823,64	8,81
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Sepeda Motor	864,50	9,33	943,16	8,60	999,37	6,44	1.080,04	8,07	1.173,45	8,65
H	Transportasi dan Pergudangan	59,15	6,68	61,94	4,72	65,73	6,12	74,81	13,82	81,81	9,36
I	Penyediaan Akodasi dan Makanan dan Minuman	54,01	6,30	58,20	7,77	61,63	5,89	68,40	10,98	72,56	6,09
J	Informasi dan Komunikasi	218,1	14,69	237,43	8,86	258,05	8,69	281,68	9,16	309,75	9,97
K	Jasa Keuangan	104,32	10,31	120,24	15,25	126,83	5,48	130,8	3,13	136,65	4,47
L	Real Estate	452,54	6,75	484,98	7,17	517,08	6,62	541,09	4,64	572,49	5,8
M,N	Jasa Perusahaan	1,79	11,67	1,95	9,14	2,19	12,34	2,37	7,99	2,56	8,09
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sos Wajib	344,66	6,24	372,23	8,00	389,60	4,67	398,37	2,25	446,86	12,17
P	Jasa Pendidikan	255,29	13,57	279,76	9,59	302,25	8,04	329,74	9,09	354,86	7,62
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	151,7	14,54	163,39	7,71	240,35	47,10	258,38	7,50	278,88	7,93
R,S,T,U	Jasa Lainnya	20,53	10,26	22,19	8,08	24,62	10,96	27,64	12,25	29,93	8,31
PDRB Luwu		7.437,42	7,26	8.023,37	7,88	8.567,87	6,79	9.155,16	6,86	9.728,96	6,26
Rerata Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)											7,01

Sumber: KDA 2019 BPS Luwu

Tabel diatas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu dalam lima tahun terakhir berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,01 persen, yang mana pada tahun 2015 LPE sebesar 7,26 persen dengan nilai PDRB sebesar 7,437 triliun rupiah, pada tahun 2016 naik menjadi menjadi 7,88 persen dengan nilai PDRB sebesar 8,023 triliun rupiah, untuk tahun 2017 meskipun nilai PDRB lebih tinggi dari tahun sebelumnya namun LPE turun menjadi 6,79 persen dengan nilai PDRB sebesar 8,567 triliun rupiah, kemudian pada tahun 2018 naik menjadi 6,86 persen dengan nilai PDRB sebesar 9,155 triliun rupiah, dan pada tahun 2019 LPE kembali turun menjadi 6,26 persen dengan nilai PDRB sebesar 9,728 triliun rupiah.

Apabila membandingkan pertumbuhan ekonomi antara Kabupaten Luwu dengan wilayah Kabupaten/Kota lainnya, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, pada tahun 2019 Kabupaten Luwu berada pada posisi ke-16 dari 24 Kabupaten/ Kota dan lebih rendah dari capaian Provinsi (6,92%), namun demikian lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional (5,02%). Lebih detail dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.9
Tingkat Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota se-SulSel,
Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik

Perkembangan ekonomi suatu daerah juga dapat diukur dengan melihat pertumbuhan PDRB Berdasarkan Pengeluaran, komponen pembentuk PDRB pengeluaran terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRIT (Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga), pengeluaran konsumsi

pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto, Perubahan Inventori, dan Net Ekspor Barang dan Jasa.

Tabel 2.13
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Luwu ADHK (2010) Berdasarkan Pengeluaran
Tahun 2015 - 2019

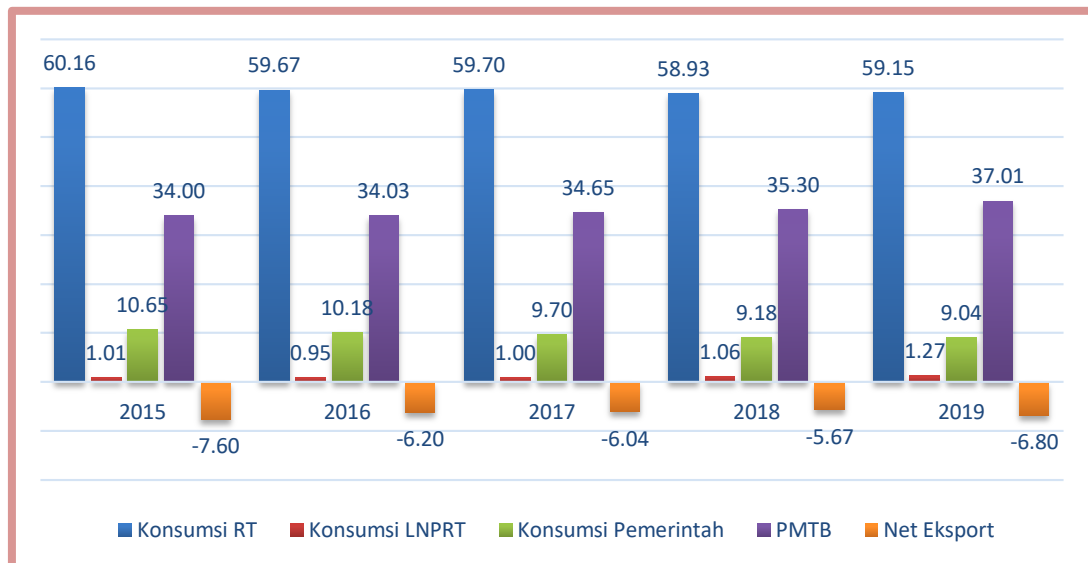
Jenis Pengeluaran	PDRB Kabupaten Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)	6,234,261.84	7,077,215.01	7,786,535.59	8,510,996.40	9,261,246.00
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	105,025.35	112,705.82	130,683.29	153,672.83	199,227.00
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,103,959.71	1,207,351.60	1,265,290.46	1,325,989.30	1,415,399.00
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	3,522,884.44	4,035,668.42	4,478,616.34	5,098,703.41	5,795,425.00
Perubahan Inventori	184,070.73	153,988.06	125,108.29	170,732.83	50,602.00
Net Ekspor Barang dan Jasa	-787,687.46	-735,066.77	-759,403.08	-818,154.46	-1,064,281.00
PDRB	10,362,514.61	11,851,862.14	13,026,830.89	14,441,940.31	15,657,618.00

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 2.13 menunjukkan PDRB ADHK berdasarkan pengeluaran periode tahun 2015-2019 terus naik, kenaikan ini sejalan dengan kenaikan 5 komponen pembentuk PDRB ADHK berdasarkan pengeluaran yakni pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto dan net ekspor barang dan jasa sementara komponen perubahan inventori mengalami penurunan.

Sedangkan berdasarkan distribusinya, komposisi PDRB di Kabupaten Luwu sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga yang berkisar pada 59,15% hingga 60,16%. Persentase pengeluaran rumah tangga paling tinggi terjadi pada tahun 2015 dan persentase pengeluaran rumah tangga paling rendah pada tahun 2019. Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 34,00% sampai 37,01%. Persentase PMTB terhadap paling tinggi terjadi pada tahun 2019 dan paling rendah terjadi pada tahun 2015. Konsumsi pemerintah berada pada rentang 9,04% sampai 10,65%, hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak terlalu besar, meskipun komponen berkontribusi sekitar 30,00% s.d 30,80%, namun disisi lain komponen impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB juga masih berkontribusi relatif besar yakni sekitar 35,83 sampai dengan 38,47%

Gambar 2.10
Perkembangan Distribusi PDRB Kabupaten Luwu ADHB Dari Sisi Pengeluaran
Tahun 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik

2.1.2.1.2 Laju Inflasi dan Indeks Harga Implisit

Perhitungan inflasi Kabupaten Luwu berdasarkan IHK dilakukan dengan mengikuti perkembangan zona IHK Kota Palopo. Untuk tahun 2019 nilai inflasi zona Kota Palopo tercatat sebesar 1,91%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,19%. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Bank Indonesia, pada tahun 2018 terjadi peningkatan tekanan harga di hampir seluruh kota di Provinsi Sulawesi Selatan secara umum hal ini dipengaruhi oleh kenaikan tarif angkutan udara, sementara itu untuk peningkatan harga komoditas hortikultura dan sayur-sayuran masih terjadi, namun relatif terkendali disebabkan panen dan kondisi cuaca yang kondusif. Secara keseluruhan perkembangan laju inflasi seluruh kota IHK di provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

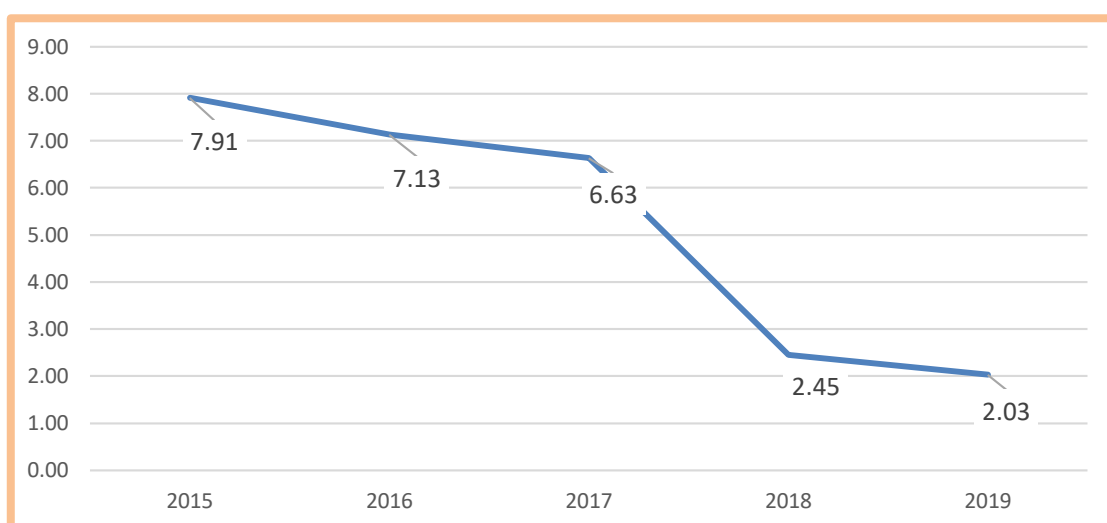
Tabel 2.14
Perkembangan Laju Inflasi Kota IHK di Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2015-2019

No	Prov/Kab/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
1	Bulukumba	9,45	2,17	1,48	4,66	2,32	4,02
2	Bone	8,22	0,97	1,50	5,54	3,02	3,85
3	Makassar	8,51	5,18	3,18	4,48	0,05	4,28
4	Pare-Pare	9,38	1,58	2,11	3,43	1,06	3,51
5	Palopo	3,38	2,74	3,95	4,19	1,91	3,23
6	Sul-Sel	4,48	2,94	4,44	3,50	0,76	3,22

Sumber: Badan Pusat Statistik

Sedangkan jika melihat indeks harga implisit, perkembangan harga-harga di Kabupaten Luwu tahun 2019 justru melambat. Laju pertumbuhan indeks harga implisit pada tahun 2019 tercatat sebesar 2,03%, lebih rendah dibanding tahun 2018 yang tercatat sebesar 2,45%. Melambatnya indeks harga implisit terjadi pada pada berbagai sektor pengeluaran kecuali pengeluaran konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga. Indeks harga implisit untuk pengeluaran LNPRT tercatat sebesar 27,72%, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebesar 10,77%.

Gambar 2.11
Perkembangan Indeks Harga Implisit Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

2.1.2.1.3 PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Luwu atas dasar harga berlaku sejak tahun 2015 hingga 2019 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita tercatat sebesar 29,59 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga

tahun 2019 mencapai 43,25 juta rupiah. Begitupun dengan nilai PDRB perkapita atas dasar harga konstan, meskipun nilainya lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku. Kenaikan angka PDRB perkapita yang cukup tinggi masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

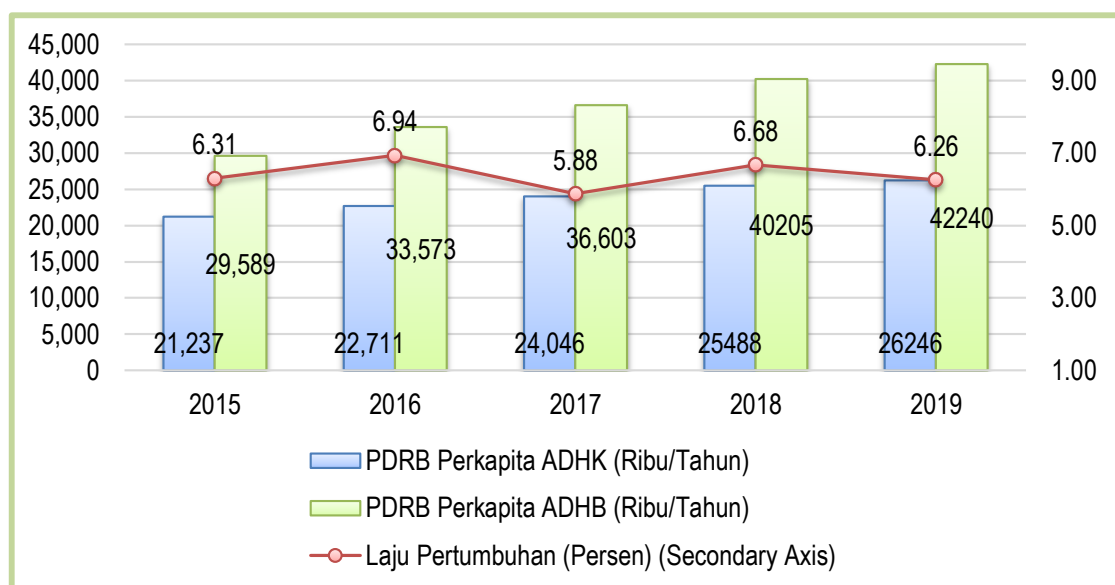
Tabel 2.15
PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Luwu
Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
PDRB ADHK (Miliar Rupiah)	7.437,42	8.023,37	8.567,87	9.155,16	9.728,96
PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	10.362,21	11.851,86	13.026,83	14.441,94	15.657,62
Jumlah Penduduk (ribuan orang)	350.218	353.277	356.305	359.209	362.027
PDRB ADHK Perkapita (jutaan rupiah)	21,24	22,71	24,05	25,49	26,87
PDRB ADHB Perkapita (jutaan rupiah)	29,59	33,55	36,56	40,20	43,25

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Sepanjang tahun 2015-2019 pendapatan perkapita Kabupaten Luwu terus meningkat. Hal ini tidak terlepas dari kinerja perekonomian yang mampu tumbuh dengan baik sepanjang periode tersebut.

Gambar 2.12
Perkembangan Pendapatan Perkapita Kabupaten Luwu
Tahun 2015 – 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik

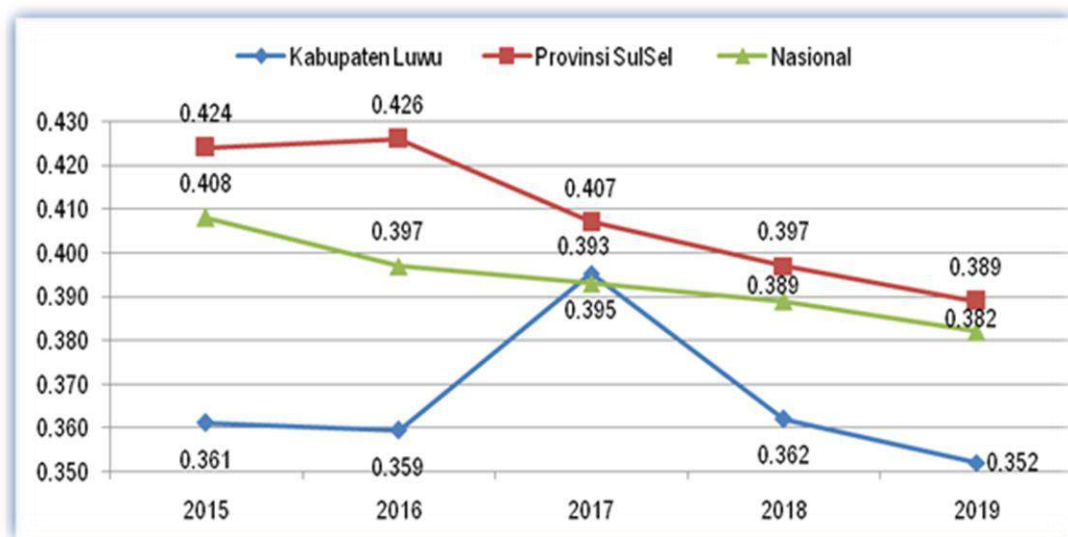
Pada tahun 2019 pendapatan perkapita Kabupaten Luwu mencapai Rp.26,246 ribu/tahun meningkat sebesar 6,26% dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp.25,488 ribu/tahun. Meskipun mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, laju pertumbuhan pendapatan perkapita Kabupaten Luwu pada

tahun 2019 terkesan melambat seiring dengan melambatnya kinerja perekonomian daerah pada tahun tersebut.

2.1.2.1.4 Indeks Gini

Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Luwu antara tahun 2015-2017 berfluktuatif, dimana gini rasio yang tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 0,395 persen, yang disebabkan terjadinya paceklik di Kabupaten Luwu sehingga petani mengalami gagal panen, sementara sumber mata pencaharian terbesar di Kabupaten Luwu berada pada sector pertanian, sehingga tingkat ketimpangan pendapatan dan pengeluaran pada tahun 2017 naik secara signifikan dari tahun 2016. Kemudian pada tahun 2019 turun menjadi 0,352 persen, hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran di Kabupaten Luwu semakin membaik.

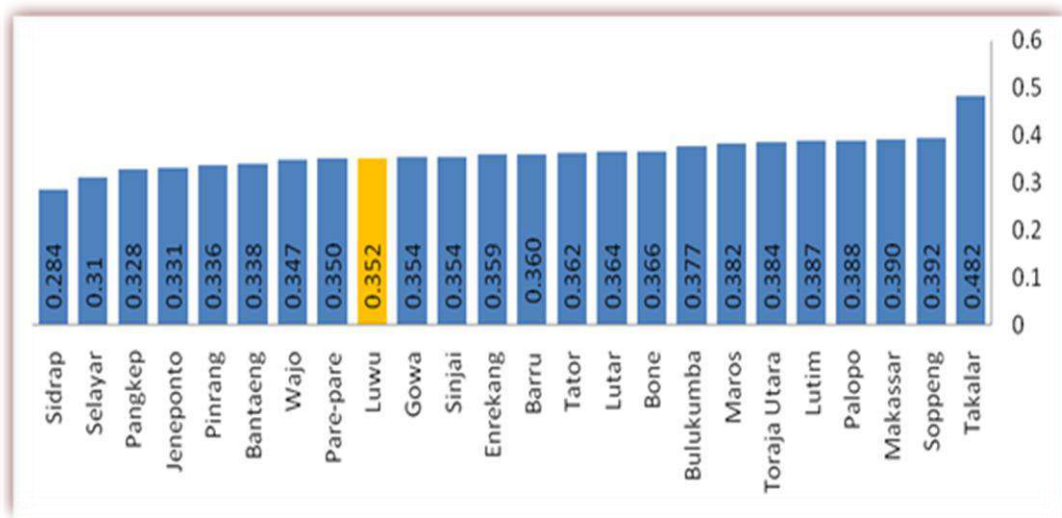
Gambar 2.13
Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, maka tingkat ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Luwu masih lebih rendah. Dan jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di Wilayah Luwu Raya (Palopo, Luwu Timur, Luwu Utara), dengan capaian masing-masing Palopo (0,388), Luwu Timur (0,387) dan Luwu Utara (0,364), maka tingkat ketimpangan pengeluaran di Kabupaten Luwu masih lebih rendah dari daerah lainnya yang ada di Luwu, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.14
Gini Rasio Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan skala gini ratio, maka gini ratio Kabupaten Luwu selama tahun 2015-2019 berada pada angka $\geq 0,30$ dan lebih $\leq 0,50$ sehingga mengindikasikan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Luwu masih tergolong sedang.

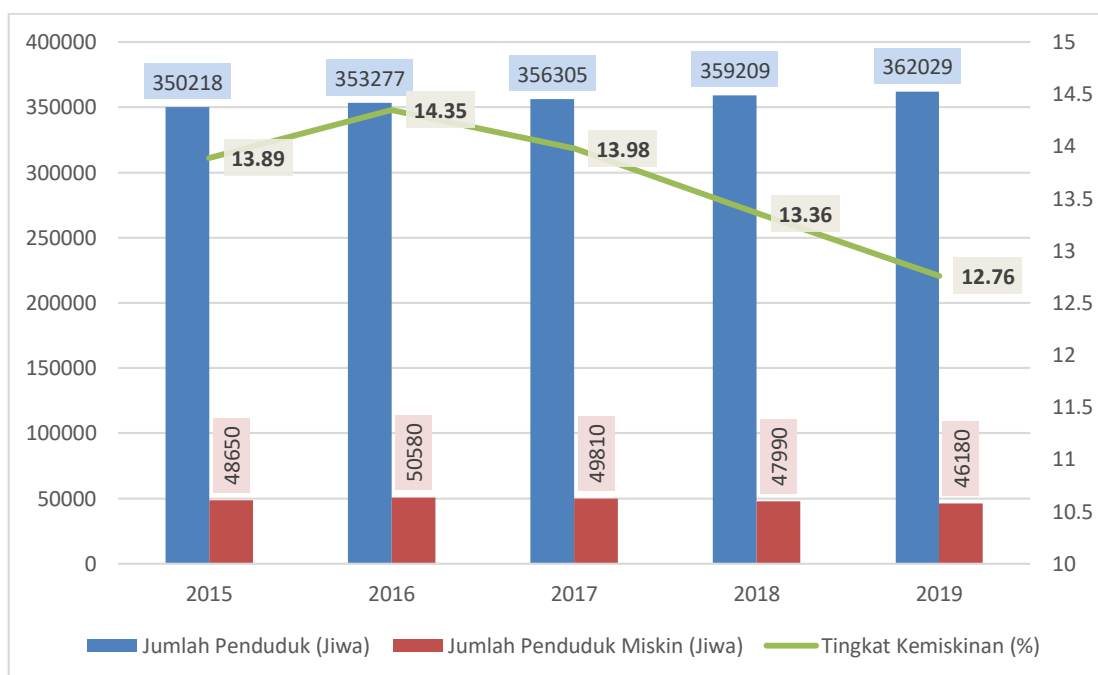
2.1.2.1.5 Indeks Ketimpangan Williamson

Indikator lain yang digunakan untuk melihat ketimpangan wilayah adalah indeks Williamson. Perhitungan indeks Williamson Kabupaten Luwu didasarkan pada data PDRB per kapita dan jumlah penduduk masing-masing kecamatan. Semakin indeks Williamson mendekati angka 0, maka ketimpangan pembangunan ekonomi semakin kecil, sedangkan semakin mendekati angka 1, maka ketimpangan pembangunan ekonomi semakin besar. Tidak terdapat data terkait indikator ini karena tidak tersedia data BPS dan tidak dapat dihitung karena tidak tersedia indikator PDRB menurut kecamatan

2.1.2.1.6 Tingkat Kemiskinan

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan di wilayah Kabupaten Luwu cenderung fluktuatif dimana pada tahun 2015 tingkat kemiskinan mencapai 13,89% dengan tingkat kedalaman 2,54, lalu pada tahun 2016 naik menjadi 14,35% dengan tingkat kedalaman 2,32% lalu pada tahun 2019 turun menjadi 12,76% dengan tingkat kedalaman 2,71%. Untuk lebih jelasnya seperti yang disajikan pada gambar berikut:

Gambar 2.15
Perkembangan Kondisi Kemiskinan Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi. Perhitungan garis kemiskinan diperoleh dengan menjumlahkan antara garis Kemiskinan Makanan (GKM) dengan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita perhari. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

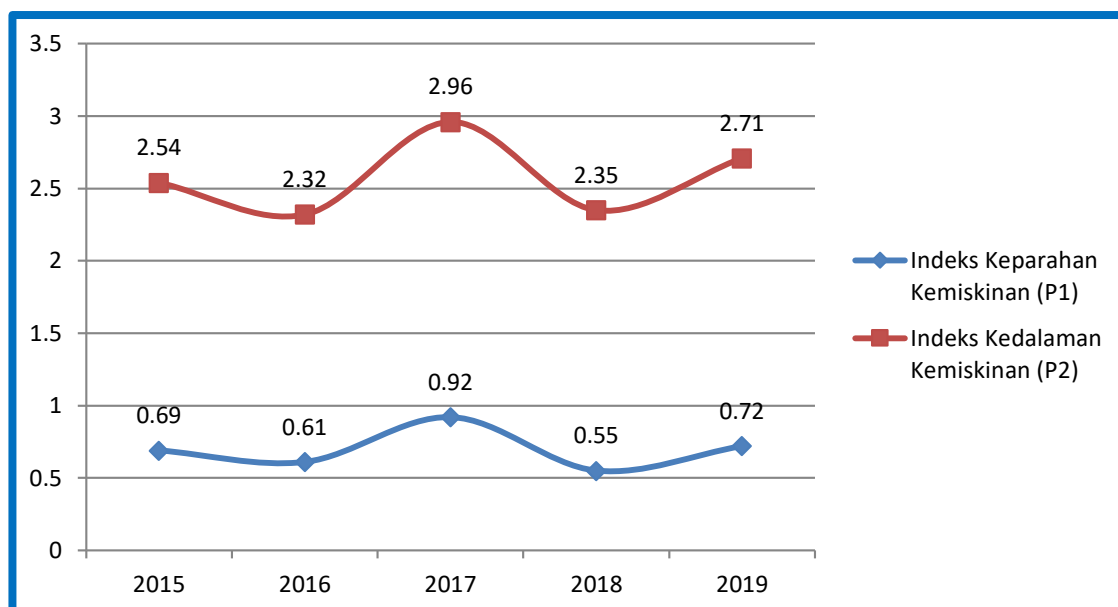
Tabel 2.16
Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu
Tahun 2015-2019

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Persentase Penduduk diatas Garis kemiskinan (%)
2015	252.549	86,11
2016	271.804	85,65
2017	281.195	86,02
2018	305.722	86,64
2019	318.911	87,22

Sumber: Badan Pusat Statistik,(diolah)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Indeks/P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Indeks/P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Gambar 2.16
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P1) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik, (diolah)

2.1.2.1.7 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kemampuan keuangan dari suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya PAD yang diperoleh dari daerah yang bersangkutan. Berkaitan dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah, PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah. PAD merupakan unsur yang penting dalam pendapatan daerah.

PAD merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Rasio antara PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan rasio ketergantungan suatu daerah. Semakin tinggi nilai rasio PAD terhadap total pendapatan maka semakin kecil ketergantungan suatu daerah terhadap transfer dana dari pihak eksternal baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi bagi kabupaten/kota. Dengan kata lain persentase PAD terhadap total pendapatan daerah merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu daerah.

Berdasarkan perkembangan data keuangan daerah Kabupaten Luwu selama periode 2015-2017, memperlihatkan bahwa realisasi PAD mengalami peningkatan yang cukup tinggi, tetapi pada periode 2018-2019 sedikit menurun dibanding tahun 2017. Pada tahun 2015 pendapatan Kabupaten Luwu yang bersumber dari PAD sebesar Rp78,56 miliar, meningkat menjadi Rp109,17 miliar pada tahun 2017, menurun menjadi 106,87 miliar pada tahun 2018 dan kembali meningkat menjadi 113,77 miliar pada tahun 2019, yang berarti selama periode 2015-2019 penerimaan PAD Kabupaten Luwu tumbuh sekitar 44,82% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,05% per tahun. Peningkatan PAD yang cukup tinggi ini menyebabkan rasio PAD terhadap total pendapatan juga meningkat dari 6,37% pada tahun 2015 menjadi 7,85% pada tahun 2019.

Tabel 2.17
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
Tahun 2015-2019

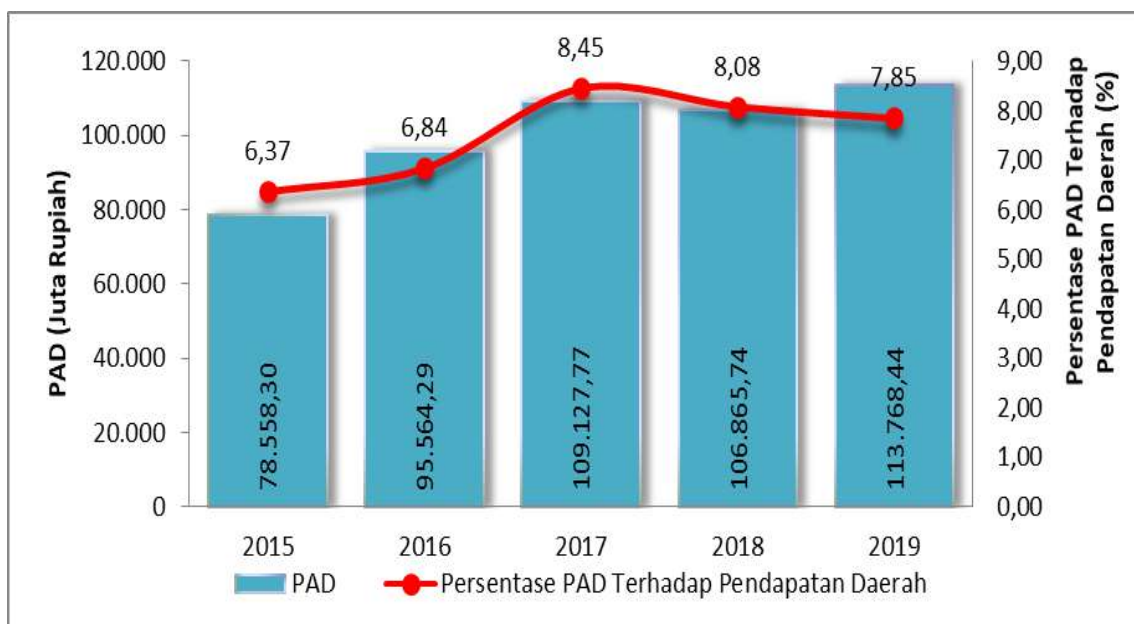
Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
PAD (Rp Juta)	78.558,30	95.564,29	109.172,77	106.865,74	113.768,44
Pendapatan Daerah (Rp Juta)	1.233.809,15	1.397.284,61	1.292.583,08	1.323.121,88	1.449.067,07
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	6,37	6,84	8,45	8,08	7,85

Sumber : BPKAD Kabupaten Luwu, 2019

Kecenderungan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah yang menurun pada 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan bahwa ketergantungan Kabupaten Luwu terhadap transfer dana dari pihak eksternal (pemerintah pusat dan pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan) masih sangat tinggi, yang berarti pula bahwa derajat kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Luwu selama periode 2017-2019 tidak semakin membaik. Hal ini harus menjadi perhatian untuk secara maksimal menggali potensi PAD sesuai kewenangan daerah, agar kemandirian daerah semakin

meningkat dan pembiayaan pembangunan untuk mempercepat kesejahteraan rakyat semakin besar. Oleh karena itu, pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah perlu dikaji sejauhmana efektivitasnya dan strategi apa yang perlu dilakukan untuk menjadi kebijakan di masa depan. Berikut disajikan pertumbuhan PAD dan proporsinya terhadap pendapatan daerah.

Gambar 2.17
Grafik Pertumbuhan PAD terhadap Pendapatan Daerah
Tahun 2014-2018



Sumber: Data diolah, BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

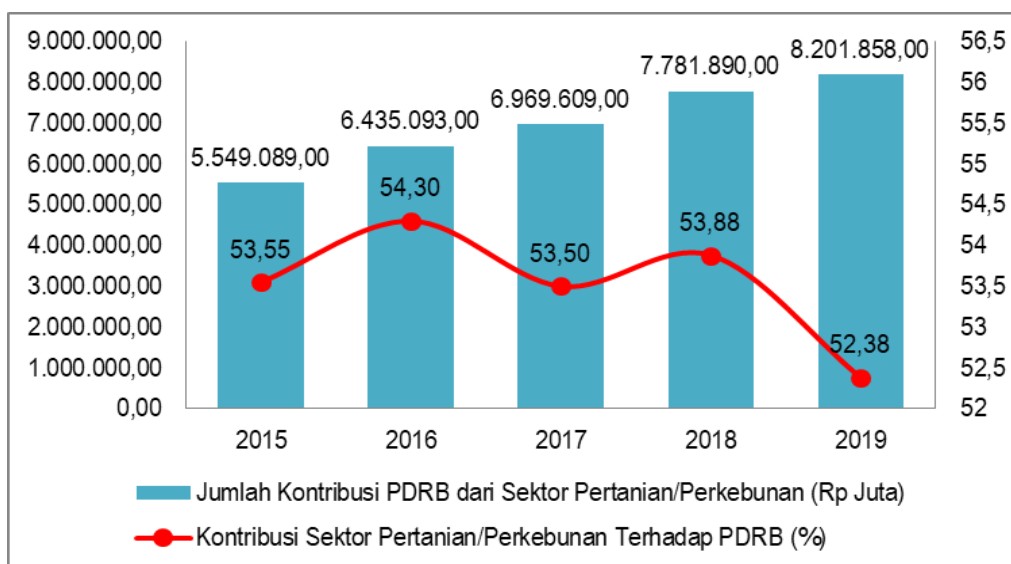
2.1.2.1.8 Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat empat jenis opini BPK yakni (1) Wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*); (2) Wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*); (3) Tidak wajar (*adversed opinion*) dan (4) Tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*). Berdasarkan hasil audit BPK, Kabupaten Luwu dalam lima tahun terakhir memperoleh opini Wajar tanpa pengecualian (WTP).

2.1.2.1.9 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB merupakan ukuran untuk melihat peranan sektor pertanian/perkebunan dalam pembangunan ekonomi daerah, sekaligus sebagai ukuran untuk melihat kinerja pembangunan sektor pertanian/perkebunan itu sendiri. Indikator ini diukur dari rasio antara nilai tambah sektor pertanian/perkebunan dengan total PDRB menurut harga berlaku. Nilai tambah sektor pertanian/perkebunan mencakup nilai tambah dari sub sektor tanaman pangan, sub sektor hortikultura dan sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan dan sub sektor jasa pertanian. Berikut ini disajikan grafik kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Luwu.

Gambar 2.18
Grafik Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB
Tahun 2015-2019



Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Luwu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019

Nilai tambah sektor pertanian/perkebunan di Kabupaten Luwu yang didasarkan pada nilai PDRB harga berlaku selama periode 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 nilai PDRB menurut harga berlaku sektor pertanian/perkebunan sebesar Rp5,55 triliun, meningkat menjadi Rp8,20 triliun pada tahun 2019. Sedangkan angka kontribusinya terhadap PDRB harga berlaku mengalami penurunan dari 53,55% pada tahun 2015 menjadi 52,38% pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor lain semakin mempengaruhi PDRB Kabupaten Luwu, dalam arti semakin kecil ketergantungannya terhadap sektor pertanian yang menunjukkan bahwa sektor industry telah mulai berkembang.

2.1.2.1.10 Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Pertanian/perkebunan dimaksudkan untuk mengetahui porsi nilai tambah pertanian (palawija) terhadap total nilai tambah pertanian/perkebunan, sekaligus mengukur kinerja pembangunan sektor pertanian (palawija) itu sendiri. Indikator ini diukur dari rasio antara nilai tambah sektor pertanian (palawija) dengan total PDRB pertanian/perkebunan menurut harga berlaku. Nilai tambah sektor pertanian (palawija) mencakup nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya), serta tanaman serelia lainnya. Berikut ini disajikan grafik kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB pertanian/perkebunan Kabupaten Luwu.

Gambar 2.19
Grafik Kontribusi Sektor Pertanian (palawija) Terhadap PDRB
Pertanian/Perkebunan Tahun 2015 – 2019



Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Luwu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019

Nilai tambah sektor pertanian (palawija) menurut harga berlaku selama periode 2015-2019 mengalami peningkatan dari Rp.1,04 triliun pada tahun 2014 menjadi 1,16 triliun pada tahun 2019. Namun demikian, meskipun nilainya terus meningkat, besaran kontribusinya terhadap PDRB sektor pertanian/perkebunan mengalami penurunan secara terus-menerus pula, yaitu dari 9,58% pada tahun 2015 menjadi 7,40% pada tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa produk olahan dari palawija kurang dapat dikembangkan dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten

Luwu. Hal ini perlu mendapat perhatian di masa depan, supaya potensi pertanian palawija yang sangat melimpah di Kabupaten Luwu diikuti dengan pengembangan produk olahannya.

2.1.2.1.11 Produksi Sektor Pertanian dan Perkebunan

Kabupaten Luwu memiliki potensi untuk pengembangan komoditi pangan dan palawija karena didukung dengan sumber daya lahan yang cukup luas. Namun demikian, perkembangan produksi di sektor ini kurang menggembirakan, mengingat produksinya yang tidak bertumbuh, bahkan cenderung menurun. Penurunan produksi sektor pertanian di Kabupaten Luwu antara lain disebabkan:

1. Harga komoditi yang tidak menentu/tidak menguntungkan secara ekonomi sehingga masyarakat beralih kepada jenis tanaman lain.
2. Kurang maksimalnya peran institusi yang mengemban tugas dalam peningkatan produksi di sektor pertanian.

Kabupaten Luwu merupakan sentra utama beberapa komoditi perkebunan, baik kelompok komoditi perkebunan tahunan, maupun komoditi perkebunan yang bersifat musiman. Pada kelompok komoditi perkebunan tahunan, daerah ini memiliki potensi produksi yang cukup besar untuk komoditi seperti : Kelapa, kakao, cengkeh, jambu mete dan aren. Kabupaten Luwu adalah merupakan sentra utama berbagai komoditi perkebunan di Sulawesi Selatan. Pada tahun 2016, produksi cengkeh di Kabupaten Luwu memberikan kontribusi terbesar terhadap produksi Sulawesi Selatan yaitu mencapai 44,48%, demikian halnya kakao, dengan kontribusi sebesar 19,15%. Gambaran perkembangan produksi tanaman pertanian dan perkebunan di Kabupaten Luwu periode tahun 2015-2018 terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.18
Produksi Pertanian Pangan dan Palawija
Tahun 2015-2018

No	Uraian	Jumlah Produksi (ton)				Rerata Pertumbuhan
		2015	2016	2017	2018	
1	Padi	308.380,00	312.382,00	294.586,00	288.273,00	-3,67
2	Jagung	10.406,00	34.126,40	41.191,00	56.204,00	57,44
3	Ubi Kayu	1.895,00	1.946,60	1.872,00	1.614,53	-20,19
4	Ubi Jalar	1.370,00	889,90	117,60	1.695,40	-20,19
5	Kacang Tanah	48,00	59,20	50,50	1.695,40	-19,29
6	Kacang Kedelai	263,00	16,40	31,70	134,80	61,50
7	Kacang Hijau	50,00	34,40	47,30	70,03	-5,03
Jumlah		322.412,00	349.354,90	337.896,10	348.039,86	-1,26

Sumber: BPS, Statistik Tanaman Pangan, Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa produksi pertanian pangan dan palawija pada periode 2015-2018 cenderung menurun, hal ini terlihat dari rerata pertumbuhannya yang minus 1,26%. Dari 7 (tujuh) komponen produksi, hanya komoditi jagung dan kacang kedelai yang mengalami pertumbuhan positif.

Tabel 2.19
Produksi Tanaman Perkebunan
Tahun 2015-2018

No	Uraian	Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat (ton)				Rerata Pertumbuhan
		2015	2016	2017	2018	
1	Kelapa Dalam	3.735,23	3.793,00	3.764,00	N/A	0,39
2	Kelapa Hibrida	204,04	197,00	181,00	N/A	-5,79
3	Kopi Robusta	449,72	342,00	400,00	423,72	-0,35
4	Kopi Arabika	1.851,20	1.852,00	1.955,00	1.961,20	1,97
5	Cengkeh	9.006,35	7.856,00	6.976,00	8.006,35	-3,07
6	Kakao	27.000,00	28.989,00	24.262,00	33.902,00	10,26
7	Pala	21.788,00	28,00	28,00	28,79	-32,35
8	Lada	321,79	399,00	299,00	297,79	-0,49
9	Kapuk	4,98	4,00	4,00	N/A	-9,84
10	Kemiri	68,90	70,00	79,00	N/A	7,23
11	Jambu Mente	353,09	350,00	352,00	N/A	-0,15
12	Kelapa Sawit	1.677,50	3.763,00	480,00	325,00	1,60
13	Sagu	687,62	876,00	876,00	N/A	27,40
14	Aren	149,06	172,00	172,00	N/A	15,39
15	Pinang	8,78	6,00	5,00	N/A	-24,16
16	Tembakau		15,00	15,00	23,75	29,17
Jumlah		67.306,26	48.712,00	39.848,00	44.968,60	0,84*

*) rata-rata pertumbuhan komoditi yang tersedia datanya untuk tahun 2020.

Sumber: BPS, Kabupaten Dalam Angka, Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan produksi sebagian besar komoditi perkebunan dalam kurun waktu tahun 2015-2018 adalah menurun dan stagnan. Dari 16 (enam belas) komoditi yang ada, hanya kakao, sagu, aren dan tembakau yang mengalami pertumbuhan signifikan. Kondisi yang demikian ini perlu mendapat perhatian, mengingat salah satu isu utama Kabupaten Luwu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah optimalisasi potensi sektor pertanian dan perkebunan.

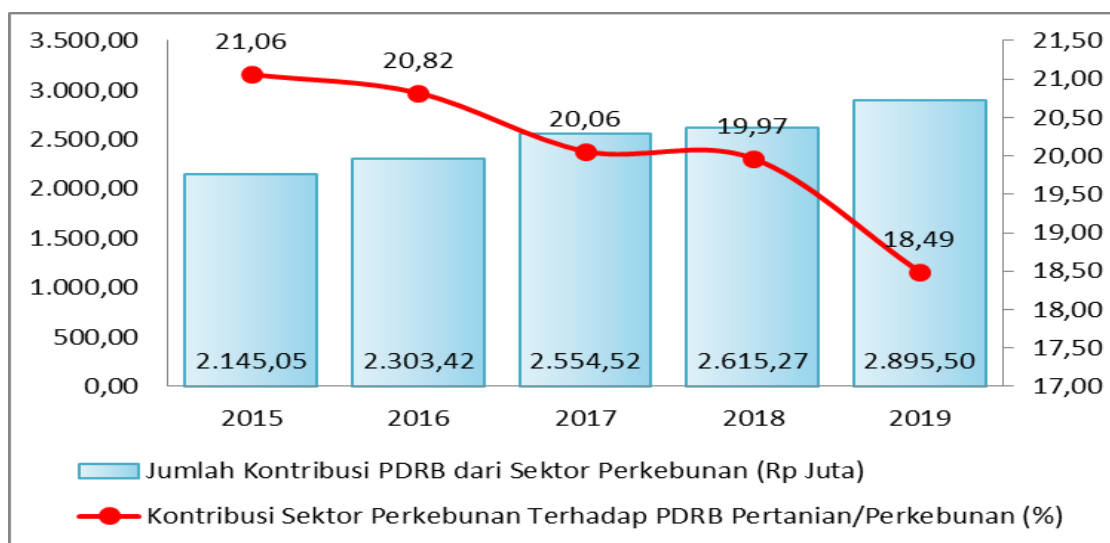
2.1.2.1.12 Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB Pertanian/perkebunan menggambarkan besarnya kontribusi nilai tambah yang diciptakan sektor perkebunan terhadap total nilai tambah pertanian/perkebunan. Indikator ini diukur dari rasio antara

nilai tambah sektor perkebunan dengan total PDRB pertanian/perkebunan menurut harga berlaku. Nilai tambah sektor perkebunan mencakup nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas dari tanaman Perkebunan yang terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan diantaranya adalah tebu, tembakau, tanaman berserat, kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, jambu mete, dan sebagainya.

Nilai tambah sektor perkebunan menurut harga berlaku selama periode 2015-2019 memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2015 nilai PDRB menurut harga berlaku sektor perkebunan sebesar Rp.2,15 triliun, meningkat menjadi Rp2,90 triliun pada tahun 2019. Sektor perkebunan merupakan sektor yang sangat penting di Kabupaten Luwu karena memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB sektor pertanian. Meskipun demikian, kinerja perkembangan sektor perkebunan di Kabupaten Luwu mengalami stagnasi pada tahun 2015-2016, bahkan cenderung menurun, yang ditunjukkan oleh kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB pertanian/perkebunan yang semakin menurun. Pada tahun 2015 kontribusi sektor ini terhadap PDRB pertanian/perkebunan sebesar 21,06%, sedangkan pada tahun 2016 menurun sedikit menjadi 20,82%, dan terus menurun hingga hanya mencapai 14,49% pada tahun 2019.

Gambar 2.20
Grafik Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB Pertanian/Perkebunan Tahun 2015 - 2019



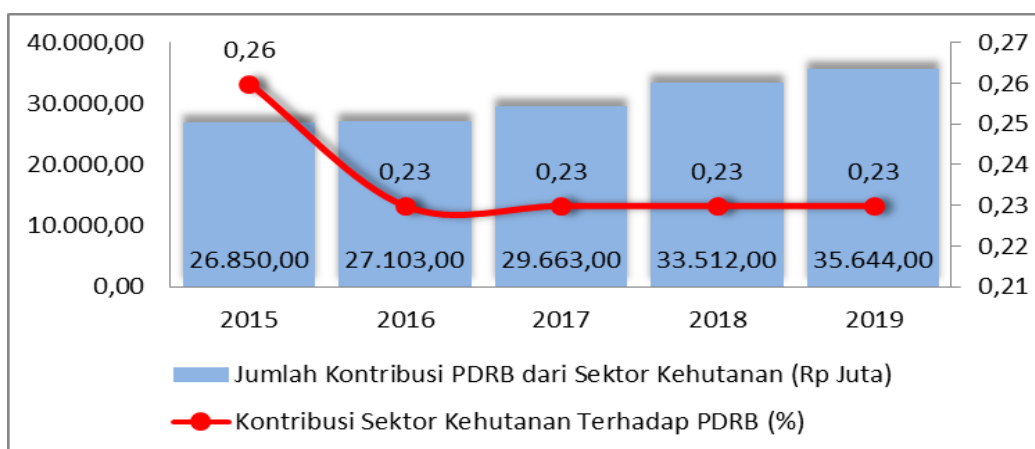
Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Luwu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019

Meskipun terjadi penurunan, kinerja pertumbuhan sektor perkebunan masih lebih baik dari sektor sektor-sektor pertanian lainnya. Kecenderungan perlambatan ini bisa jadi terkait dengan trend perlambatan harga berbagai komoditi perkebunan di pasar internasional yang kemudian berimbas di pasar domestik, yang selanjutnya mempengaruhi produktivitas di tingkat petani.

2.1.2.1.13 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB

Berdasarkan data BPS Tahun 2018, luas kawasan hutan di Kabupaten Luwu adalah 108.437,53 Ha, dan sekitar 23.144,22 Ha atau 21,34% merupakan kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap. Berbagai potensi ekonomi dari kawasan kehutanan di daerah ini diantaranya hutan rakyat dengan berbagai potensi kayu, jasa lingkungan seperti air terjun, dan hutan wisata. Selain itu kawasan hutan di daerah ini juga menghasilkan berbagai hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti rotan, lebah madu dan lainnya.

Gambar 2.21
Grafik Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB
Tahun 2015 - 2019



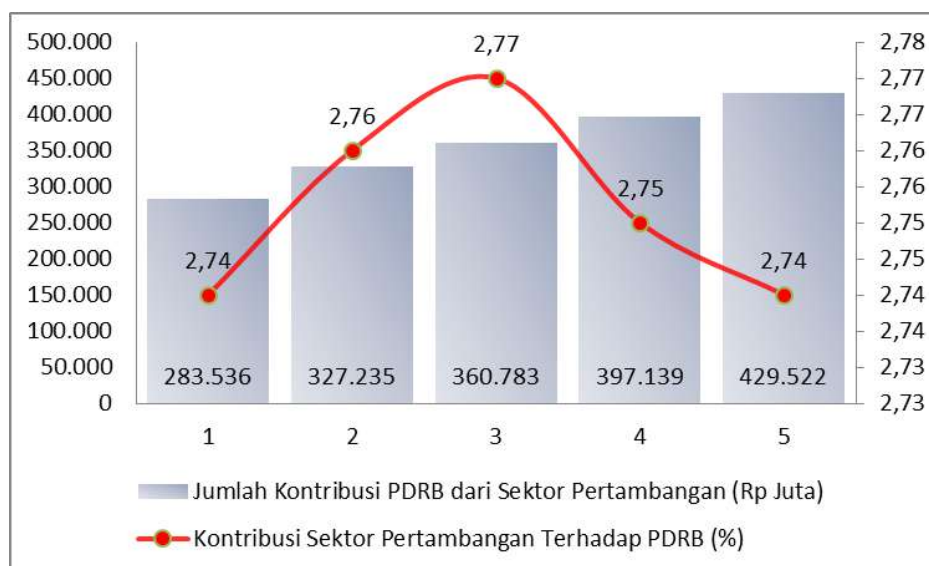
Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Luwu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019

Data PDRB Harga berlaku Kabupaten Luwu selama kurun waktu 2015-20197 sebagaimana terlihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai tambah sektor kehutanan meningkat rata-rata 3,86% per tahun. Pada tahun 2015 nilai tambah yang diciptakan sektor ini sekitar 26,85 miliar dan meningkat menjadi 35,64 miliar pada tahun 2019. Namun demikian, kontribusi sektor kehutanan terhadap total PDRB harga berlaku Kabupaten Luwu mengalami penurunan, dimana pada tahun 2015 sebesar 0,26%, menurun menjadi 0,23% pada tahun tahun 2016 hingga tahun 2019.

2.1.2.1.14 Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB

Sektor pertambangan Kabupaten Luwu memiliki potensi yang cukup besar dan beragam. Potensi pertambangan di daerah ini terdiri sejumlah potensi mineral logam dan bukan logam. Potensi mineral logam diantaranya seperti potensi emas, Tembaga, Zeng, Mangan dan endapan besi. Selain itu daerah juga memiliki potensi batu baran dan berbagai mineral non logam seperti Batugamping, Marmer, Dolomit, Kuarsa, Batu Sabak dan Basal, Batu tempel (ornamen stone) dari jenis riolit dan tufa hijau, yang tersebar di beberapa wilayah. Adapun komoditas yang telah diusahakan diantaranya seperti bijih besi, mangan, pasir, sirtu, tanah timbun, batugamping dan lainnya. Berbagai potensi tambang yang ada di daerah ini telah berkontribusi terhadap penciptaan nilai tambah di Kabupaten Luwu.

Gambar 2.22
Grafik Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB
Tahun 2015 - 2019



Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Luwu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2017

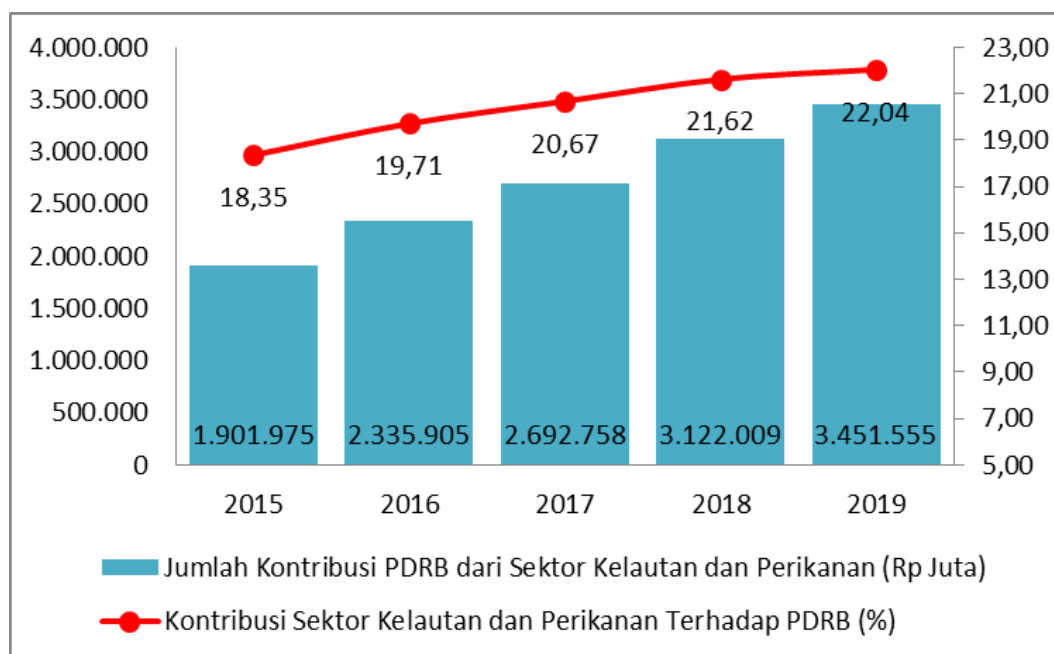
Selama kurun waktur 2015-2019, nilai PDRB sektor pertambangan di Kabupaten Luwu memiliki kecenderungan yang terus meningkat, dengan tingkat pertumbuhan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Nilai PDRB sektor pertambangan menurut harga berlaku di Kabupaten Luwu pada tahun 2015 adalah sebesar Rp283,54 miliar, meningkat menjadi Rp.429,52 miliar pada tahun 2019. Meskipun pertumbuhan yang relatif tinggi yakni tumbuh rata-rata 14,73% per tahun, namun kontribusi sektor ini terhadap PDRB daerah cenderung stagnan.

2.1.2.1.15 Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB

Kabupaten Luwu memiliki garis pantai sepanjang 139,92 Km sehingga memiliki potensi besar dalam pengembangan kelautan dan perikanan, seperti potensi penangkapan ikan, budidaya laut dan air payau. Sektor perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang telah memberikan kontribusi cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Luwu. Pada tahun 2015 nilai tambah yang diciptakan oleh sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp1,90 triliun, meningkat menjadi Rp3,45 triliun pada tahun 2019, dengan rata-rata pertumbuhan sejumlah Rp.387,40 miliar atau sebesar 16,15%.

Kinerja pertumbuhan sektor ini dalam lima tahun terakhir juga relatif lebih tinggi dibandingkan kinerja pertumbuhan sektor lainnya di Kabupaten Luwu. Hal ini tercermin dari nilai kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 sektor ini berkontribusi sebesar 18,35 terhadap PDRB, kemudian meningkat menjadi 22,04% pada tahun 2019, atau memiliki rata-rata sebesar 20,48%.

Gambar 2.23
Grafik Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB
Tahun 2015 - 2019



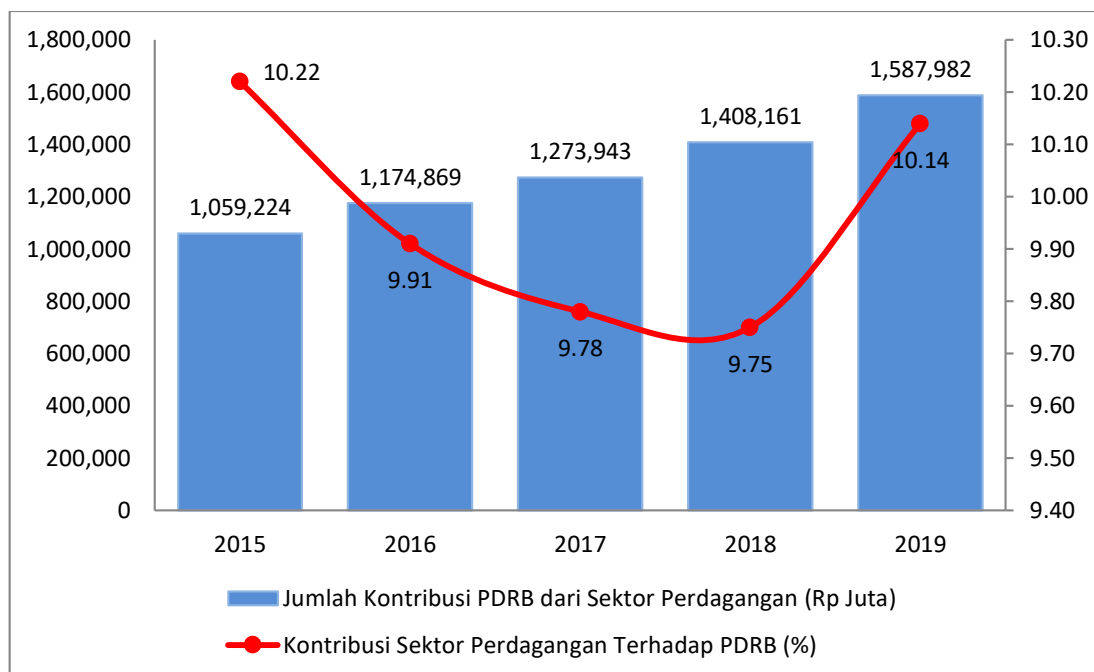
Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Luwu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019

2.1.2.1.16 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Luwu diukur dengan membagi nilai PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap total PDRB Kabupaten Luwu menurut harga berlaku. Berdasarkan nilai PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kabupaten Luwu, tercatat pada tahun 2015 sebesar Rp1,06 triliun dan meningkat menjadi Rp1,59 triliun pada tahun 2019, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,66% per tahun. Kontribusi sektor ini dalam penciptaan nilai tambah terus menurun periode 2015-2018 yaitu dari 10,22% menjadi 9,75%, kemudian pada tahun 2019 sedikit mengalami kenaikan menjadi 10,14%.

Nilai kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap total PDRB yang terus menurun selama periode 2015-2018 menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin rendah sehingga belanja pada sektor ini menjadi berkurang. Kondisi ini perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Gambar 2.24
Grafik Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Tahun 2015 - 2019

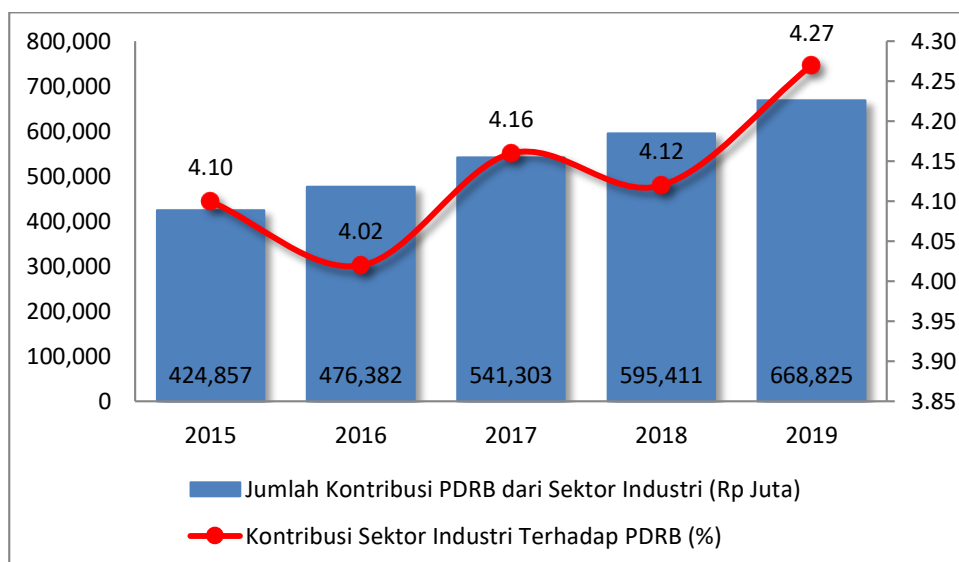


Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Luwu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019

2.1.2.1.17 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Terdapat industri kecil dan industri rumah tangga yang beragam dan tersebar di 22 Kecamatan di Kabupaten Luwu, dengan kontribusi sejumlah Rp424,86 milyar pada tahun 2015. Pertumbuhan nilai tambah sektor industri terhadap PDRB di Kabupaten Luwu rata-rata sebesar 12,02% per tahun dan pada tahun 2019 nilainya mencapai Rp668,83 milyar. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Luwu pada periode tahun 2015-2019 berfluktuasi, tetapi mengalami peningkatan yaitu dari 4,10% pada tahun 2015 menjadi 4,27% pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri belum begitu berkembang di Kabupaten Luwu.

Gambar 2.25
Grafik Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB
Tahun 2015 - 2019



Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Luwu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019

2.1.2.1.18 Pertumbuhan Industri

Kabupaten memiliki sejumlah industri, yaitu industri pengilangan migas, makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, barang dari kulit dan alas kaki, kayu, barang dan gabus, barang dari anyaman bambu, rotan dan sejenisnya, kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, industri karet, barang dari karet dan plastik, industri barang galian bukan logam, industri barang logam, dll. Perkembangan industri di Kabupaten Luwu berdasarkan besarnya nilai produksi seluruh unit usaha industri periode tahun 2014-2017 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Pada tahun 2014 mencapai

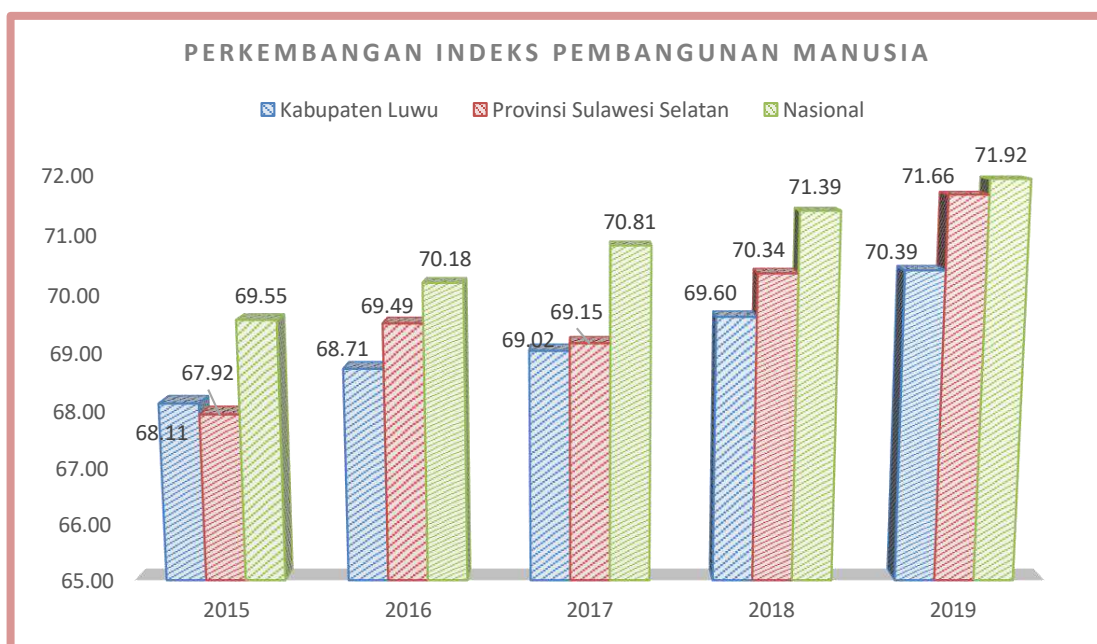
7,49%, meningkat menjadi 8,51% pada tahun 2016, namun menurun menjadi 6,09% pada tahun 2017. Hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Luwu di masa depan mengingat sektor industri merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Terbukanya kesempatan kerja akan meningkatkan pemerataan pendapatan dan menumbuhkan perekonomian suatu wilayah.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan data yang diperoleh Badan Pusat Statistik, pada tahun 2019 nilai IPM Kabupaten Luwu tercatat sebesar 70.39, dan secara umum meningkat selama lima tahun terakhir. Dengan capaian ini Kabupaten Luwu berada di peringkat 9 jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang berada di Provinsi Sulawesi dan masih lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Rendahnya kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Luwu terutama dipengaruhi oleh angka rata-rata lama sekolah (RLS) serta pengeluaran perkapita yang masih jauh dari standar yang telah ditetapkan UNDP. Sementara itu untuk komponen lain seperti angka harapan hidup dan harapan lama sekolah sudah cukup baik meskipun masih perlu untuk terus ditingkatkan. Indeks pembangunan manusia dalam kurun 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.26
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu
Tahun 2015-2019

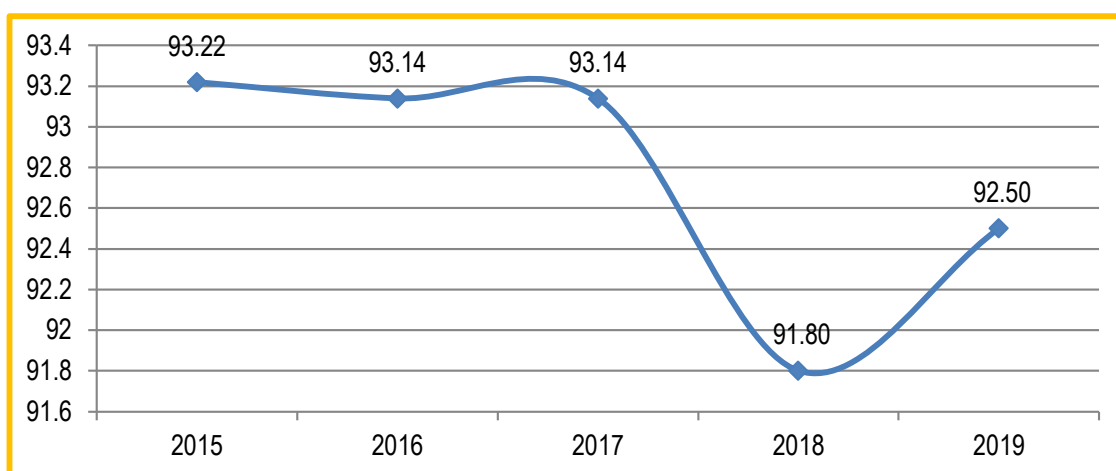


Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

2.1.2.2.2 Angka Melek Huruf (AMH)

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan bidang pendidikan adalah angka melek huruf. Semakin tinggi angka melek huruf menunjukkan tingkat keberhasilan program pendidikan begitu pula sebaliknya. Angka melek huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Berikut perkembangan AMH Kabupaten Luwu selama periode 2015-2019

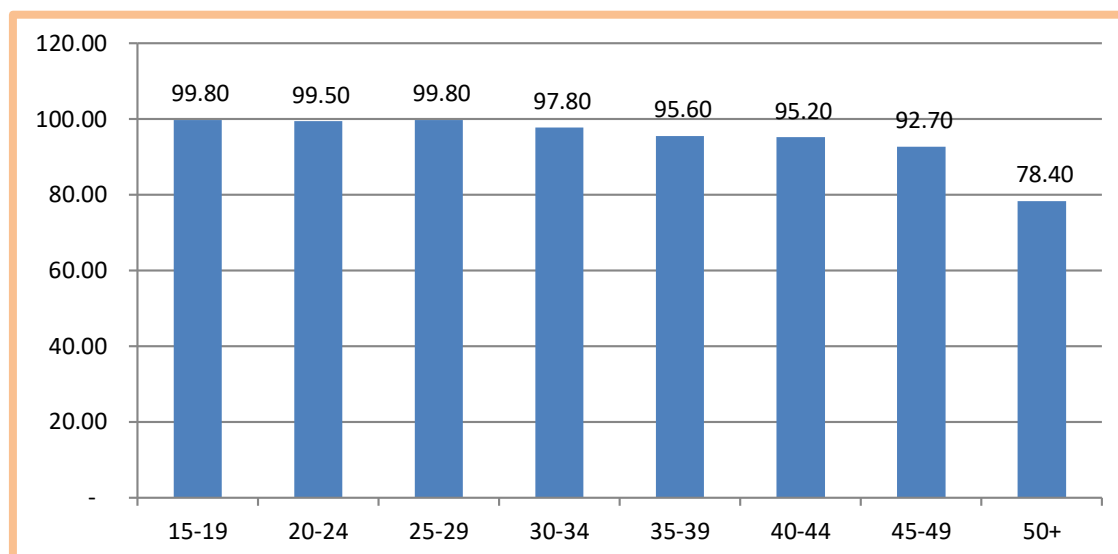
Gambar 2.27
Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Luwu
Tahun 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

AMH Kabupaten Luwu pada tahun 2019 cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan AMH pada tahun 2015, namun jika dibandingkan dengan tahun 2018 AMH pada tahun 2019 meningkat sebesar 0,70 persen dari 91,80 pada tahun 2018 menjadi 92,50 di tahun 2019. Angka AMH pada tahun 2019 menunjukkan bahwa dari total penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 92,50 persen penduduk mampu membaca dan menulis dan masih terdapat 7,50 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf). Jika dikelompokkan berdasarkan umur maka persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang paling banyak yang dapat membaca dan menulis (melek huruf) adalah penduduk yang berusia 15-29 tahun sedangkan yang paling sedikit adalah penduduk usia 50 tahun ke atas sebesar 78,40 persen. Dengan data yang ada menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Luwu yang tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf) paling banyak berada pada kelompok umur 50 tahun keatas atau berada pada usia lanjut.

Gambar 2.28
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut
Kelompok Umur di Kabupaten Luwu, Tahun 2019

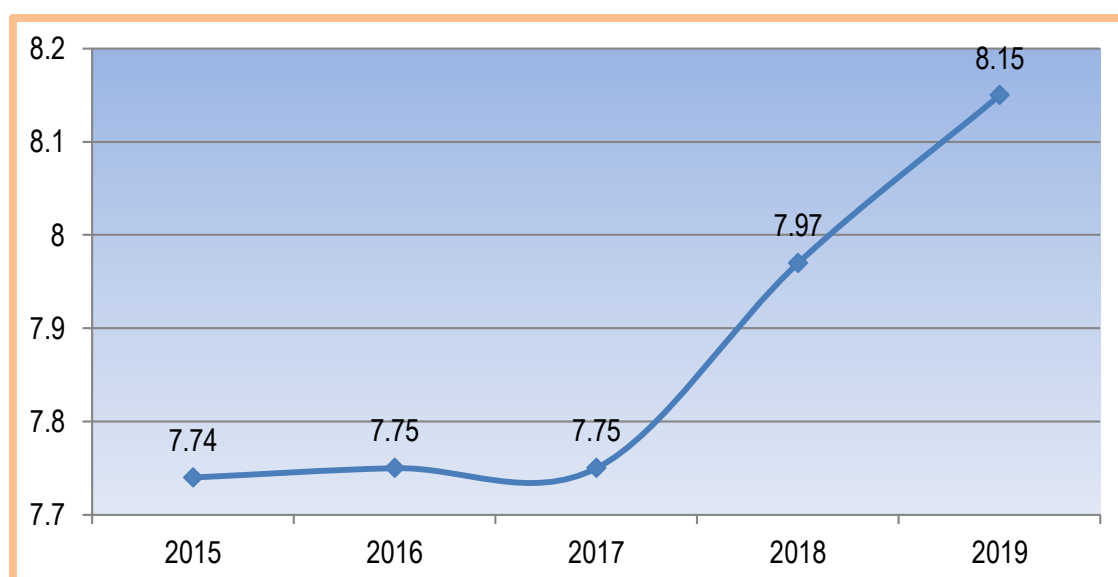


Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

2.1.2.2.3 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (*Mean Years School/MYS*) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah.

Gambar 2.29
Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Luwu
Tahun 2015-2019



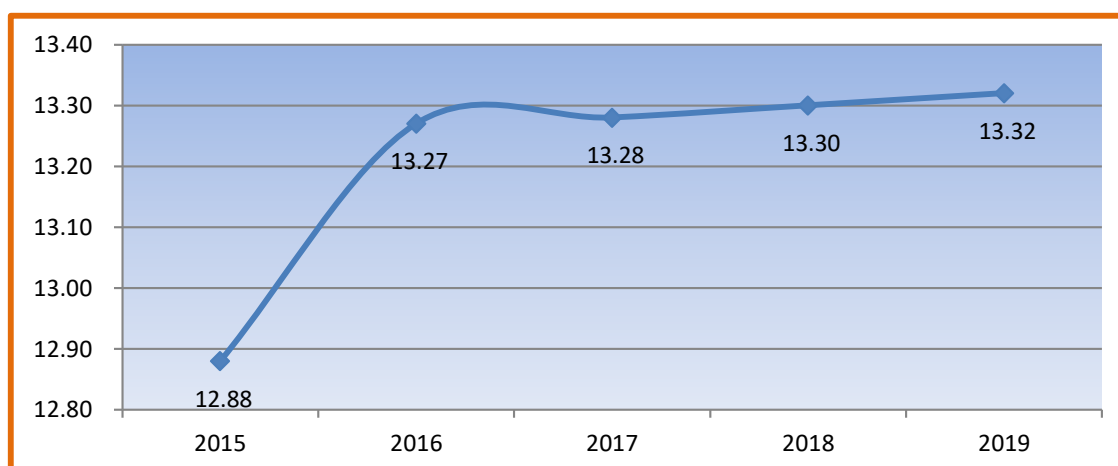
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir cukup dinamis. Pada tahun 2015 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Luwu mencapai 7,74 tahun dan mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2019 menjadi 8,15 tahun.

2.1.2.2.4 Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah (HLS) dihitung pada penduduk berusia 7 tahun ke atas, yang diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Luwu pada tahun mencapai 12,88 pada tahun 2015 dan terus meningkat sampai dengan tahun 2019 hingga mencapai 13,32 tahun.

Gambar 2.30
Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Luwu
Tahun 2015-2019

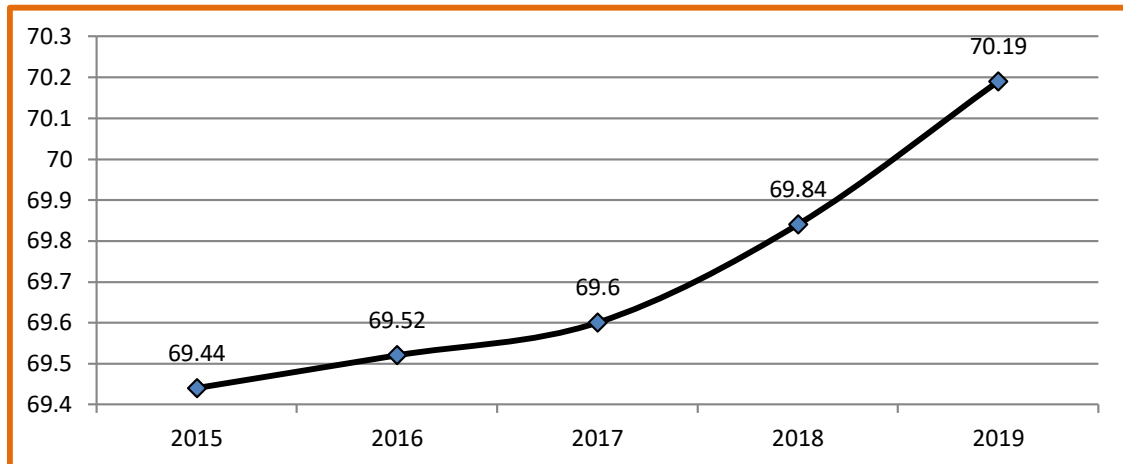


Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

2.1.2.2.5 Angka Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup, angka harapan hidup standar nasional adalah 71 tahun (WHO, 2014). Angka harapan hidup di Kabupaten Luwu selama tahun 2015-2019 terus meningkat hingga mencapai angka 70,19 tahun, hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Luwu terus meningkat meskipun belum mencapai angka nasional. Berikut perkembangan angka harapan hidup di Kabupaten Luwu selama tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.31
Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Luwu
Tahun 2015-2019

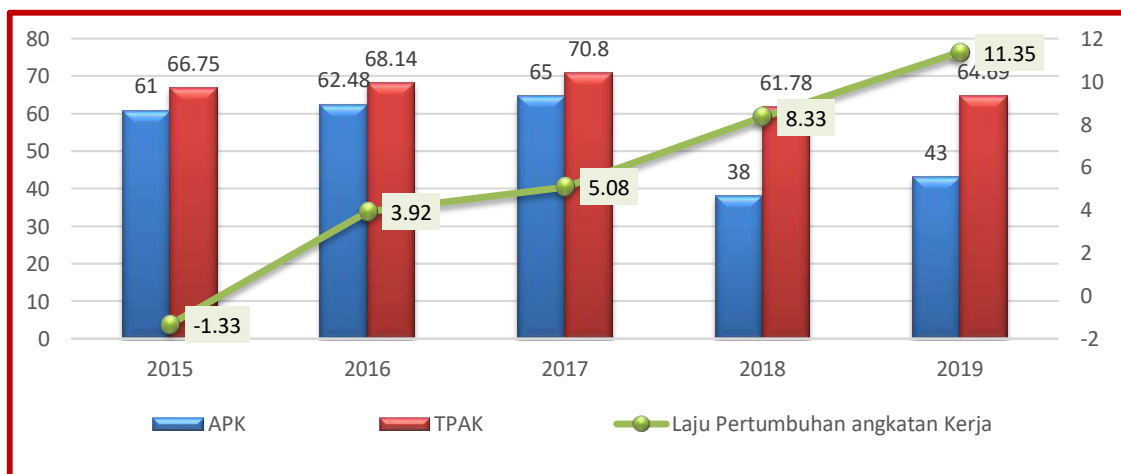


Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

2.1.2.2.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tumbuhnya sektor-sektor ekonomi khususnya sektor yang padat karya dan usaha mikro dan kecil menjadi aktor pendorong meningkatnya penyerapan tenaga kerja ditengah meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja. Laju pertumbuhan angkatan kerja di Kabupaten Luwu cenderung meningkat signifikan, dimana rata-rata pertumbuhannya mencapai 3,25 persen setiap tahunnya, sedangkan angka partisipasi kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja selama kurun waktu lima tahun terakhir cenderung fluktuatif dengan pembeda yang tidak begitu signifikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

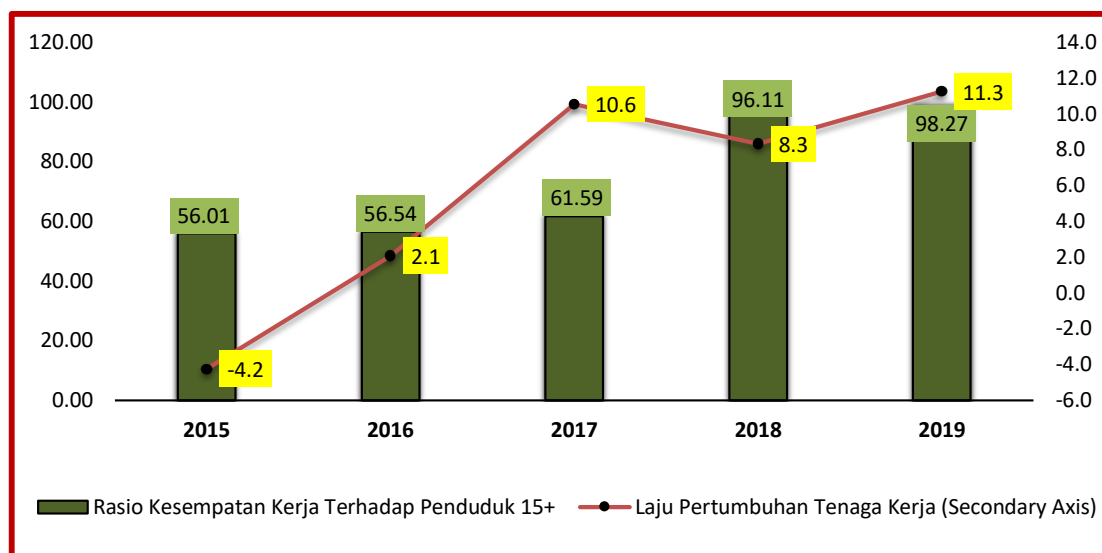
Gambar 2.32
Angka Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan
Laju Pertumbuhan Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 rasio kesempatan kerja penduduk usia 15 tahun keatas sudah sangat tinggi namun memang penyerapannya yang masih rendah. Sementara itu bila melihat laju pertumbuhan tenaga, pada tahun 2019 mencapai 11,3 persen dimana angka ini sangat signifikan bila melihat laju pertumbuhan tenaga kerja pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian khusus pemerintah guna mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan kualitas para pencari kerja dengan memberikan bantuan-bantuan pelatihan yang diharapkan para pencari kerja bias mandiri setelah mendapatkan pembekalan.

Gambar 2.33
Rasio Kesempatan Kerja dan Laju Pertumbuhan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Tahun 2015 -2019



Sumber: Badan Pusat Statistik

2.1.2.2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Luwu mencapai 4,66%, naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada pada angka 3,89%. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan angka pengangguran bila yang disebabkan oleh bertambahnya angka angkatan kerja di wilayah Kabupaten Luwu. Untuk melihat tren perkembangan jumlah angkatan kerja dengan tingkat pengangguran terbuka dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.34
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Angkatan Kerja
Kabupaten Luwu Tahun 2015 –2019



Sumber: Badan Pusat Statistik

2.1.2.2.8 Rasio Penduduk yang Bekerja

Penduduk bekerja adalah penduduk dari kelompok angkatan kerja yang melakukan kegiatan pekerjaan paling sedikit satu jam berturut-turut selama seminggu dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja.

Tabel 2.20
Rasio Penduduk Yang Bekerja
Tahun 2015 - 2019

No	Tahun	Uraian		
		Penduduk yang bekerja	Angkatan kerja	Rasio penduduk yang bekerja
1	2015	131.615	142.839	92,14
2	2016	n.a	n.a	n.a
3	2017	148.516	155.978	95,22
4	2018	151.284	158.363	95,53
5	2019			

Sumber : BPS Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Rasio penduduk bekerja yang diukur dari perbandingan penduduk bekerja dengan jumlah penduduk angkatan kerja di Kabupaten Luwu memperlihatkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2014 rasio penduduk bekerja di daerah ini adalah 94,94%, meningkat menjadi 95,53% pada tahun 2018. Meningkatnya rasio penduduk bekerja di daerah ini dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa adanya

peningkatan kesempatan kerja yang tersedia di daerah ini untuk memberikan penghidupan yang layak bagi penduduknya.

2.1.2.2.9 Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja

PDRB per tenaga kerja merupakan indikator yang merepresentasikan produktivitas tenaga kerja. PDRB per tenaga kerja yang diukur dari rasio antara PDRB harga berlaku dengan jumlah penduduk bekerja merupakan besarnya nilai tambah berdasarkan harga berlaku yang diciptakan oleh setiap penduduk bekerja selama satu tahun. Indikator ini sekaligus menggambarkan besar pendapatan yang diterima setiap satu penduduk bekerja sesuai harga berlaku pada tahun analisa. Sedangkan laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja adalah rata-rata laju pertumbuhan PDB per kapita tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. PDB yang digunakan adalah PDB atas dasar harga konstan, sedangkan data tenaga kerja yang diperlukan adalah jumlah orang yang bekerja. indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat tingkat produktivitas tenaga kerja.

Tabel 2.21
PDB per Tenaga Kerja Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Produk Domestik Bruto (PDRB) (Rp Juta)	6.934.029,75	7.437.417,27	n.a	8.567.872,02	9.075.000,00
2	Jumlah tenaga kerja	137.441	131.615	n.a	148.516	151.284
PDB per tenaga kerja (Rp Juta)		50,45	56,51	n.a	57,69	59,99

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Luwu Tahun 2018

2.1.2.2.10 Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas, merupakan Persentase penduduk yang bekerja terhadap penduduk usia kerja 15 tahun keatas. Semakin tinggi rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas, berarti semakin tinggi kesempatan kerja yang tersedia disuatu daerah.

Berdasarkan data ketenagakerjaan Kabupaten Luwu, selama kurun waktu 2014-2018, penduduk bekerja mengalami fluktuasi sedangkan penduduk usia kerja 15 tahun keatas menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2014 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia di daerah ini berjumlah 231.606 jiwa, meningkat menjadi 258.371 jiwa pada tahun 2018. Sedangkan untuk penduduk bekerja, menurun dari 137.441 jiwa pada tahun 2014 menjadi 131.615 jiwa pada tahun 2015.

Selanjutnya, pada tahun 2017 meningkat menjadi 148.516 jiwa dan menurun kembali menjadi 144.859 jiwa pada tahun 2018.

Fluktuasi jumlah penduduk bekerja dan jumlah penduduk usia kerja 15 tahun keatas tersebut berpengaruh terhadap rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas. Pada tahun 2014 rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas adalah sebesar 59,34%, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia, sebanyak 59 hingga 60 orang merupakan penduduk bekerja. Selanjutnya pada tahun 2018 rasio penduduk bekerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas menurun menjadi 56,07% yang berarti hanya 56 orang hingga 57 orang penduduk di Kabupaten Luwu yang bekerja untuk memproduksi barang dan jasa, dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia. Uraian tersebut sekaligus mengindikasikan bahwa dalam kurun waktu 2014-2018 kesempatan kerja yang tersedia di daerah ini mengalami penyempitan, karena itu sejumlah kebijakan diperlukan untuk mendukung perluasan kesempatan kerja.

Tabel 2.22
Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke atas
Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kesempatan kerja	137.441	131.615	n.a	148.516	144.859
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	231.606	234.992	n.a	241.127	258.371
Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas		59,34	56,01	n.a	61,59	56,07

Sumber: Keadaan Angkatan Kerja Sulawesi Selatan, 2014-2018.

Untuk meningkatkan kesempatan kerja, berbagai upaya dapat dilakukan di Kabupaten Luwu mengingat potensi untuk pengembangan industri besar sangat memungkinkan untuk direalisasikan di masa datang.

2.1.2.2.11 Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja

Indikator proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja, diukur dengan membandingkan penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja baik berstatus berusaha sendiri, pekerja bebas dan pekerja keluarga terhadap total penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja (dinyatakan dalam format persentase). Indikator bertujuan untuk melihat proporsi penduduk bekerja yang memiliki pekerjaan pada kegiatan informal. Pengertian proporsi tenaga

kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja, sebagai indikator pekerja informal sedikit berbrbeda dengan dengan definisi pekerja informal yang dijelaskan dalam Kepmen Ketenagakerjaan RI No. 206 Tahun 2017 tentang pedoman pengukuran indeks pembangunan ketenagakerjaan, bahwa Penduduk yang bekerja secara Informal adalah penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan utama sebagai berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu pekerja tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non - pertanian dan pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar.

Tabel 2.23
Proporsi Penduduk 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan

No	Status Pekerjaan	Proporsi				
		2014	2015	2016	2017	2018
A	Tenaga Kerja Formal	33,90	24,84	n.a	24,09	25,39
1	Buruh/Karyawan/Pegawai	31,81	20,35	n.a	22,08	22,77
2	Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	2,09	4,49	n.a	2,01	2,61
B	Tenaga Kerja Informal	66,10	75,16	n.a	75,91	74,62
1	Berusaha Sendiri (BS)	21,24	27,26	n.a	23,07	22,76
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	19,47	21,06	n.a	24,11	21,88
3	Pekerja bebas (PB)	3,66	2,49	n.a	3,65	6,15
4	Pekerja keluarga/tidak dibayar (PK)	21,73	24,35	n.a	25,08	23,83
C	Total Penduduk Bekerja	100,00	100,00	n.a	100,00	100,00
D	Berusaha Sendiri + Pek Bebas + Pek Keluarga	46,63	54,10	n.a	51,80	52,74

Sumber: Keadaan angkatan kerja Sulawesi Selatan, 2014-2018

2.1.2.2.12 Proporsi Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Terhadap Total Kesempatan Kerja, Tahun 2014-2018

Perkembangan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten Luwu baik berstatus berusaha sendiri (BS), pekerja bebas (PB), dan pekerja keluarga (PK) terhadap total kesempatan kerja, serta perkembangan proporsi penduduk bekerja sebagai tenagakerja formal dan informal disajikan pada tabel berikut.

Berdasarkan tabel yang disajikan di atas, terlihat bahwa proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten Luwu dengan status berusaha sendiri (BS), pekerja bebas (PB), dan pekerja keluarga (PK) terhadap total kesempatan kerja selama kurun waktu 2014-2018 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014, proporsi tersebut sebesar 46,63% dan meningkat menjadi 54,10% pada tahun 2015. Tetapi

kembali menurun pada tahun 2017 menjadi 51,80% dan meningkat lagi menjadi 52,74% pada tahun 2018. Secara keseluruhan, proporsi Penduduk 15 tahun keatas yang bekerja sebagai tenaga kerja informal juga mengalami fluktuasi, dimana dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan dari 66,10% menjadi 75,91%, tetapi menurun menjadi 74,62% pada tahun 2018. Gambaran tersebut sekaligus menjelaskan bahwa proporsi pekerja formal di daerah ini relatif kecil yakni hanya 25,39% dari total Kesempatan Kerja di Kabupaten Luwu pada 2018.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Analisis capaian kinerja pada aspek pelayanan umum dilakukan pada setiap indikator bidang urusan yang terdapat pada layanan urusan wajib dasar, layanan urusan wajib non dasar, layanan urusan pilihan serta penunjang urusan pemerintahan.

2.1.3.1 Layanan Urusan Wajib Dasar

2.1.3.1.1 Pendidikan

Berdasarkan data capaian indikator kinerja, secara umum terdapat peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam bidang urusan pendidikan. Hal ini dapat dilihat pada angka partisipasi kasar, baik pada tingkat dasar, menengah pertama, dan menengah atas yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sejalan dengan capaian dengan tersebut, hal yang sama juga terlihat pada capaian angka partisipasi murni. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah, baik pusat maupun daerah yang memberikan bantuan melalui program-program peningkatan kualitas pendidikan. Untuk mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah, perlu ditingkatkan kesadaran orangtua akan pentingnya peran pendidikan.

Rasio perbandingan antara tenaga pendidik dengan siswa baik ditingkatkan dasar, menengah pertama maupun menengah atas cenderung sudah mendekati tataran yang cukup ideal, meskipun terdapat nilai yang fluktuatif dari perkembangannya yang diakibatkan oleh berbagai faktor, hal ini sudah menunjukan angka yang baik.

Presentase jumlah pendidik yang memiliki kualifikasi pendidikan S-1 semakin meningkat, namun perlu adanya upaya untuk peningkatan kualitas tenaga pendidik agar inovasi-inovasi dalam kegiatan belajar mengajar dapat diterapkan sehingga diharapkan semakin meningkatnya antusiasme siswa dalam kegiatan tersebut.

Perkembangan penyelenggaraan bidang urusan pendidikan di Kabupaten Luwu periode tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
Tahun 2015 – 2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Angka Partisipasi Sekolah (APS)					
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
	Jumlah siswa jenjang TK/ RA/TPA (orang)	5.383	5.465	6.336	7.484	7.384
	Jumlah anak usia 4-6 tahun (orang)	22.876	22.993	19.254	21.294	14.091
	APS PAUD (%)	23,53	23,76	32,91	35,15	52,40
1.2.	Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI (orang)	48.224	47.900	46.960	46.287	47.211
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun (orang)	47.131	47.226	47.358	47.451	47.491
	APS SD / MI (%)	102,32	101,43	99,16	97,55	99,41
1.3.	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs)					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs (orang)	24.257	23.239	23.162	22.883	22.276
	Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun (orang)	23.404	23.647	23.685	23.727	23.747
	APS SMP / MTs (%)	103,64	98,27	97,79	96,44	93,81
1.4.	Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA)					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang SMA/SMK/MA (orang)	11.406	12.370	13.855	15.561	16.274
	Jumlah penduduk kelompok usia 16 - 18 tahun (orang)	21.448	21.620	21.800	22.191	22.572
	APS SMA/SMK/MA (%)	53,18	57,22	63,56	70,12	72,10
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
2.1.	SD/MI/Paket A					
	Jumlah murid SD/MI/Paket A	48.257	47.964	47.070	46.397	44.857
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun (orang)	47.131	47.226	47.358	47.451	47.491
	APK	102,39	102,39	102,39	97,78	94,45
2.2.	SMP/MTs/Paket B					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B (orang)	24.395	23.521	23.522	23.328	22.981
	Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun (orang)	23.404	23.647	23.685	23.727	23.747
	APK (%)	104,23	99,47	99,31	98,32	96,77
2.3.	SMA/SMK/MA/Paket C					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/ Paket C (orang)	11.406	12.370	13.855	15.561	16.274
	Jumlah penduduk kelompok usia 16 - 18 tahun (orang)	21.448	21.620	21.800	22.191	22.572
	APK (%)	54,84	58,89	67,66	74,85	72,10

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
3.	Angka Partisipasi Murni (APM)					
3.1.	SD/MI/Paket A					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI/PAKET	45.543	45.522	45.231	45.472	44.411
	Jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 tahun	47.131	47.226	47.358	47.451	47.491
	APM	96,63	96,39	95,51	95,83	93,51
3.2.	SMP/MTs/Paket B					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/PAKET B	18.882	18.918	18.967	19.361	19.646
	Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun	23.404	23.647	23.687	23.727	23.747
	APM	80,68	80,00	80,07	81,60	82,73
3.3.	SMA/SMK/MA/Paket C					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/ PaketC	11.762	12.733	14.750	15.561	16.274
	Jumlah penduduk kelompok usia 16 - 18 tahun	21.448	21.620	21.800	22.191	22.572
	APM SMA/SMK/Paket C	54,84	58,89	67,77	74,85	72,10
4.	Angka Kelulusan					
4.1.	SD/MI					
	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	8.194	8.043	8.235	7.723	7.723
	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada tahun sebelumnya	8.489	8.398	8.263	7.893	7.822
	Angka Kelulusan SD/MI	96,52	95,77	99,66	97,85	98,73
4.2.	SMP/MTs					
	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	6.926	7.345	7.305	7.348	7.394
	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada tahun sebelumnya	7.231	7.393	7.761	7.670	7.640
	Angka Kelulusan SMP/MTs	95,78	99,35	94,12	95,80	76,78
4.3.	SMA/SMK/MA					
	Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA	4.370	4.530	4.939	5.173	5.361
	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada tahun sebelumnya	4.417	4.639	4.995	5.217	5.439
	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	98,94	97,65	98,88	99,16	98,57
5.	Angka Melanjutkan (AM)					
5.1.	SD/MI ke SMP/MTs					
	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	8.194	8.043	8.235	7.723	7.394
	Jumlah siswa yang melanjutkan ke SMP/MTs	7.821	7.711	7.735	7.352	7.221
5.2.	SMP/MTs ke SMA/SMK/MA					
	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	6.926	7.345	7.305	7.348	5.642
	Jumlah siswa yang melanjutkan ke SMA/SMK/MA	6.602	6.820	6.905	6.998	5.442
	AM SMP/MTs keSMA/SMK/ MA	95,32	92,85	94,52	95,24	96,46
6.	Fasilitas Pendidikan					
6.1.	SD/MI					
	Jumlah ruang kelas SD/MI kondisi bangunan baik	522	574	574	536	519

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
	Jumlah seluruh ruang kelas SD/MI	2.220	2.289	2.293	2.243	2.617
	Persentase	23,51	25,08	25,03	23,90	19,83
6.2.	SMP/MTs					
	Jumlah ruang kelas SMP/MTs kondisi bangunan baik	452	461	474	495	541
	Jumlah seluruh ruang kelas SMP/MTs	963	895	900	952	970
	Persentase	46.94	51.51	52.67	52.00	55.77
6.3.	SMA/SMK/MA					
	Jumlah ruang kelas SMA/SMK/ MA kondisi bangunan baik	378	426	451	567	577
	Jumlah seluruh ruang kelas SMA/ SMK/MA	486	621	631	633	651
	Persentase	77,78	68,60	71,47	89,57	88.63
7.	Ketersediaan Sekolah					
7.1.	Pendidikan Dasar					
	Jumlah Sekolah	453	454	456	467	275
	Jumlah penduduk kelompok usia (7 s/d 12 tahun) + (13 sd/ 15 tahun)	70.702	70.873	71.043	71.178	71.295
	Rasio	64,07	64,06	64,19	65,61	38.57
7.2.	Pendidikan Menengah					
	Jumlah Gedung Sekolah	64	67	68	68	68
	Jumlah penduduk kelompok usia (16 - 18 tahun)	21.448	21.620	21.800	22.191	22.572
	Rasio	29,84	30,99	31,19	30,64	30.85
8.	Rasio Guru / Murid					
8.1.	Pendidikan Dasar					
	Jumlah Guru (SD/MI +SMP/MTs)	6.892	6.093	6.115	5.952	4.133
	Jumlah Murid (SD/MI+SMP/MTs)	71.787	72.139	70.122	69.200	54.161
	Rasio	960,06	844,62	872,05	860,12	763.10
8.3.	Pendidikan Menengah					
	Jumlah Guru (SMA/MA/SMK)	1.487	1.675	1.308	1.330	1.351
	Jumlah Murid (SMA/MA/SMK)	11.406	12.370	13.855	15.561	16.112
	Rasio	1.303,70	1.354,08	944,06	854,70	838.51
9.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)					
	Jumlah penduduk berusia >15 Tahun melek huruf se Kabupaten Luwu	Na	353.574	348.693	352.059	350.442
	Jumlah seluruh penduduk yang berusia>15 Tahun	Na	357.920	352.979	356.305	357.171
10.	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV					
	Jumlah guru berijazahberkualifikasi S1 dan D.IV	5.745	6.440	4.881	5.181	4.042
	Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	7.279	7.768	6.115	5.952	6.316
	Persentase	78,93	82,90	79,82	87,05	98,12
11.	Pendidikan Non Formal					
	Paket A	33	64	40	110	92
	Paket B	138	282	360	445	454
	Paket C	356	363	895	1.050	1.185
	Jumlah	527	709	1295	1.605	1.731

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2020.

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel di atas, dapat dijelaskan perkembangan pendidikan di Kabupaten Luwu antara lain sebagai berikut:

1) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, dengan memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama pada usia muda. APS adalah perbandingan penduduk usia 4-6 Tahun (PAUD), 7-12 tahun (SD), 13-15 tahun (SLTP), dan 16-18 tahun (SLTA) yang sedang bersekolah terhadap total penduduk usia yang sama. Indikator ini memberikan gambaran tentang kemampuan dan kesadaran penduduk (dalam hal ini orang tua) dalam menyekolahkan anak-anaknya.

Pada tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2015 APS PAUD di Kabupaten Luwu sebesar 23.53%, meningkat menjadi 52,40% pada tahun 2019. Untuk jenjang pendidikan SD/MI, pada tahun 2015 mencapai 102,32%, sedangkan pada tahun 2019 APS SD sebesar 97,41%. Jenjang pendidikan SMP/MTs, pada tahun 2015 sebesar 103,64%, menjadi 93.81% pada tahun 2019. Menurunnya APS pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs adalah dikarenakan kebijakan yang tidak memperbolehkan anak bersekolah melebihi batas usianya.

2) Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk yang mengenyam pendidikan. APK di Kabupaten Luwu untuk jenjang pendidikan dasar cenderung menurun, sedangkan untuk pendidikan menengah meningkat. Untuk jenjang pendidikan SD/MTs terjadi penurunan dari 102,39 pada tahun 2015 menjadi 94,45 pada tahun 2019. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs juga terjadi penurunan dari 101,83% menjadi 95.87%. Sedangkan jenjang pendidikan SMA/MA/SMK mengalami kenaikan dari 54,84% pada tahun 2015 menjadi 74,85% pada tahun 2019.

3) Angka Partisipasi Murni (APM)

APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di

suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 APM jenjang pendidikan SD di Kabupaten Luwu adalah sebesar 96,63% tetapi kemudian menurun menjadi 93,51% di tahun 2019. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs adalah sebesar 80,68% di tahun 2015, kemudian menurun menjadi 82.73% di tahun 2019. Sedangkan untuk jenjang pendidikan menengah terjadi peningkatan yaitu dari 54,84% pada tahun 2015 menjadi 72.10% pada tahun 2019.

4) Angka Kelulusan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa angka kelulusan pada jenjang pendidikan SD mengalami fluktuasi. Tahun 2015 angka kelulusan jenjang pendidikan SD di Kabupaten Luwu adalah sebesar 96,52% dan menjadi 98,73% di tahun 2019. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs juga mengalami fluktuasi. Angka kelulusan paling tinggi terjadi pada tahun 2016 yang mencapai 99,35%, tetapi menurun menjadi 76.78% pada tahun 2019. Namun demikian, angka kelulusan pada tahun 2018 ini lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2015 yang hanya sebesar 95,78%. Sedangkan untuk jenjang SMA/SMK/MA menurun dari 98,94% pada tahun 2015 menjadi 98.57% pada tahun 2019.

5) Angka Melanjutkan (AM)

AM digunakan untuk mengetahui seberapa jauh lulusan dari satu jenjang pendidikan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Angka melanjutkan dari jenjang pendidikan SD ke SMP di Kabupaten Luwu mengalami fluktuasi dan cenderung menurun yaitu dari 95,45% pada tahun 2015 menjadi 97.66% pada tahun 2019. Sedangkan angka melanjutkan dari SMP ke SMA cenderung meningkat, yaitu dari 95,32% pada tahun 2015 menjadi 96.46% pada tahun 2019.

6) Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan di wilayah Kabupaten Luwu sebagaimana yang disajikan pada tabel diatas dapat diketahui kondisi ruang kelas dalam kondisi baik untuk SD/MI pada tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2015, yaitu dari 23,51% menjadi 19.83%. Sedangkan untuk jenjang pendidikan

SMA/ sederajat mengalami peningkatan dari 77,78% pada tahun 2015 menjadi 88,83% pada tahun 2019.

7) Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar

Sebagaimana sajian tabel diatas dapat diketahui rasio ketersediaan sekolah di tingkat pendidikan dasar semakin meningkat. Pada tahun 2015 adalah sebesar 64,07%, yang berarti bahwa tersedia 62 sampai dengan 63 sekolah untuk setiap 10.000 penduduk pada usia sekolah pendidikan dasar. Angka ini menurun menjadi 38,57% pada tahun 2019. Untuk jenjang pendidikan menengah juga mengalami peningkatan dari 29,84% pada tahun 2015 menjadi 30,85% pada tahun 2019.

8) Rasio Guru/Murid

Sebagaimana sajian tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan dasar semakin menurun, dari 960,06 pada tahun 2015 menjadi 763,10 pada tahun 2019. Ini berarti setiap 10.000 murid pendidikan dasar di Kabupaten Luwu, tersedia sejumlah 763 sampai dengan 764 orang guru. Sedangkan untuk pendidikan menengah mengalami penurunan dari 1.373,70 pada tahun 2015 menjadi 838,51 pada tahun 2019.

9) Angka Melek Huruf (AMH)

AMH menunjukan trend yang signifikan meningkat tiap tahunnya hingga jika melihat data tabel di atas menunjukkan angka melek huruf sudah hampir mencapai angka 100%. Kenaikan ini disebabkan adanya kebulatan tekad di masing-masing daerah menjadikan program strategis dalam meningkatkan Indeks pembangunan manusia. Oleh karena itu bantuan pendanaan melalui dekonsentrasi memberikan alokasi dana yang signifikan untuk layanan bagi warga masyarakat yang tidak melek huruf setiap tahunnya.

10) Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV

Secara umum, jika melihat perkembangan guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Luwu antara tahun 2016-2019 mengalami kenaikan, yaitu dari 79,83% menjadi 98,12 2019. Hal yang perlu ditekankan pada masa mendatang adalah meningkatkan keberdayaan para guru yang telah memenuhi kualifikasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

11) Pendidikan Non Formal

Jumlah peserta didik non formal mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan 2018, yaitu dari 527 orang menjadi 1.731 orang. Peningkatan tertinggi adalah pada Paket C yaitu dari 356 orang pada tahun 2015 menjadi 1.185 orang pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usia anak didik.

2.1.3.1.2 Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Perkembangan penyelenggaraan bidang urusan kesehatan di Kabupaten Luwu periode tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Tahun 2015 - 2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Puskesmas dan Puskesmas Pembantu					
	Jumlah Puskesmas	21	22	22	22	22
	Jumlah Puskesmas Pembantu	103	105	105	105	112
	Jumlah seluruh kecamatan	21	22	22	22	22
	Jumlah desa / kelurahan	227	227	227	227	227
	Cakupan Puskesmas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Cakupan Puskesmas Pembantu	45,37	46,26	46,26	46,26	49,34
2.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) per 1000 Kelahiran Bayi					
	Jumlah kematian bayi pada 1 tahun tertentu.	52	54	75	68	57
	Jumlah kelahiran hidup pada 1 Tahun tertentu.	6.554	6.603	6.599	6.355	6.273
	Angka Kematian Bayi (AKB)	0,0079	0,0081	0,0113	0,0107	0,0091
	AKHB (1-AKB)	0,9921	0,9919	0,9887	0,9893	0,99909
3.	Angka usia harapan hidup	69,44	69,52	69,60	69,84	70,19
4.	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup					
	Jumlah kematian bayi pada 1 tahun tertentu.	56	62	82	69	61
	Jumlah kelahiran hidup pada 1 Tahun tertentu.	6.554	6.603	6.599	6.355	6,273

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Rasio	8,54	9,39	12,43	10,86	9,72
5.	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup					
	Jumlah kematian bayi pada 1 tahun tertentu.	41	40	47	48	41
	Jumlah kelahiran hidup pada 1 Tahun tertentu.	6.554	6.603	6.599	6.355	6,273
	Rasio	6,29	6,06	7,12	7,55	6,54
6.	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup					
	Jumlah Ibu Hamil yang meninggal karena Hamil, bersalin dan Nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 Thn	11	7	7	6	6
	Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama.	6.554	6.603	6.599	6.353	6,273
	AKI	167,80	106,01	106,08	94,40	95,65
7.	Jumlah Posyandu dan Balita					
	Jumlah Posyandu	365	365	416	418	420
	Jumlah Balita	21.186	17.103	18.866	18.522	29,127
	Rasio per satuan balita	0,0172	0,0213	0,0221	0,0226	0,0144
8.	Puskesmas, Poliklinik dan Pustu					
	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	218	218	218	224	254
	Jumlah Penduduk	350.218	353.277	356.305	359.209	341.266
	Rasio per satuan penduduk	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0007
9.	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk					
	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	1	2	2	2	2
	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/ Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	0	0	0	0	0
	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI/Swasta	0	0	0	0	1
	Jumlah Rumah Sakit Daerah	1	1	1	1	1
	Jumlah seluruh Rumah Sakit	1	2	2	2	2
	Jumlah Penduduk	350.218	353.277	356.305	359.209	341.266
	Rasio	1:350.218	1:176.638	1:182.652	1:179.604	1:170.633
10.	Dokter					
	Jumlah Dokter	36	32	47	48	67
	Jumlah Penduduk	350.218	353.277	356.305	359.209	341-266
	Rasio per satuan penduduk	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0002
11.	Tenaga Medis					
	Jumlah Tenaga Medis	36	32	47	48	67
	Jumlah penduduk	350.218	353.277	356.305	359.209	341.266
	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0002
12.	Komplikasi kebidanan yang ditangani					
	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di	610	954	1.112	1.048	1.188

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu					
	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	1.162	1.451	1.451	1.476	1.476
	Cakupan	52,50	65,75	76,64	71,00	80,49
13.	Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan					
	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	6.585	6.585	6.528	6.326	6.237
	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	7.392	6.925	6.925	7.046	7.046
	Cakupan	89,00	95,01	94,27	89,78	88,52
14.	Desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI)					
	Jumlah Desa/Kelurahan UCI	220	219	199	199	203
	Jumlah Desa/Kelurahan	227	227	227	227	227
	Cakupan	96,91	96,47	87,67	87,67	89,42
15.	Balita Gizi Buruk mendapat perawatan					
	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan disarana pelayanan kesehatan disatu wilayah kerja	9	13	9	5	30
	Jumlah seluruh balita gizi buruk disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	9	13	9	5	30
	Cakupan	100	100	100	100	100
16.	Persentase balita gizi buruk	0.04	0.08	0.05	0.03	0.03
17.	Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak					
	Jumlah anak usia 1 Tahun yang mendapat Imunisasi Campak di suatu wilayah selama 1 Tahun	6.551	6.531	6.272	6.272	6.768
	Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama.	6.643	7.047	6.817	6.475	7.554
	Persentase	98,61	92,67	92,00	96,86	89,59
18.	Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani					
	Jumlah penderita Pneumonia balita	102	101	121	116	158
	Jumlah penderita Pneumonia balita yang ditangani	102	101	121	116	158
	Jumlah perkiraan penderita Pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.	1.091	1.092	1.166	1.104	1.338
	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100
19.	Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA					
	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukandan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun	286	324	320	300	606
	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun waktu yang sama	533	537	602	690	1.005
	Cakupan	53,66	60,34	53,16	43,48	60,30

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
20.	Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)					
	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	489	489	592	637	640
	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	350.218	353.277	356.305	359.209	341.266
	Persentase	0,14	0,14	0,17	0,18	0,19
21.	Tingkat kematian karena tuberkulosis(per 100.000 penduduk)					
	Jumlah pasien TB yang meninggal	8	29	19	n.a.	28
	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	350.218	353.277	356.305	359.209	341.266
	Persentase	0,002	0,008	0,005	n.a	0.008
22.	Kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS					
	Jumlah pasien Tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	488	489	592	637	640
	Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut	533	537	602	690	1.005
	Persentase	74,90	91,56	91,06	98,34	63.68
23.	Kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS					
	Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun	198	208	206	232	231
	Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati diwilayah dan pada kurun waktu yang sama	325	287	324	334	300
	Persentase	60,92	72,47	63,58	69,46	77,00
24.	Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD					
	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. kerja selama 1 Tahun	41	60	67	14	28
	Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama	41	60	67	14	28
	Cakupan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
25.	Anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida					
	Banyaknya balita yang pada malam sebelum survey tidur menggunakan kelambu	Tidak ada pembagian kelambu	Tidak ada pembagian kelambu	Tidak ada pembagian kelambu	Tidak ada pembagian kelambu	Tidak ada pembagian kelambu
	Jumlah balita					
	Persentase Anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
26.	Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari total populasi					
	Jumlah pasien HIV dan AIDS disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu	10	5	31	19	16
	Jumlah penduduk dalam kurun waktu yang sama	350.218	353.277	356.305	359.209	341.266
	Persentase	0,003	0,001	0,009	0,005	0:005

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
27.	Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin					
	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1	129.275	123.085	119.972	127.985	183.314
	Jumlah seluruh penduduk miskin di Kabupaten	166.575	153.088	184.734	188.121	253.441
	Cakupan	77,59	80,40	64,94	68,03	72,33
28.	Cakupan kunjungan bayi					
	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standardi satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	6.452	7.393	6.355	6.776	6.352
	Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	6.554	6.603	6.599	6.355	6.273
	Cakupan	98,44	111,96	96,30	106,62	101,26
29.	Kunjungan Ibu hamil K4					
	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wilayah kerja pada waktu tertentu	6.564	6.457	6.412	6.270	5.978
	Jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu sama	7.744	7.254	7.254	7.380	7.380
	Cakupan	84,76	89,01	88,39	84,96	81,00
30.	Pelayanan nifas					
	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	6.368	6.480	6.482	6.336	6.106
	Seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	7.392	6.925	6.925	7.046	7.046
	Cakupan	86,15	93,57	93,60	89,92	86,66
31.	Neonatus dengan komplikasi yang ditangani					
	Jumlah neonates dengan komplikasi yang tertangani	171	389	534	586	491
	Jumlah seluruh neonitas dengan komplikasi yang ada	1.408	989	989	1.006	1.006
	Cakupan	12,14	39,33	53,99	58,25	48,81
32.	Pelayanan anak balita					
	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada waktu tertentu	12.482	16.786	18.881	20.457	20.849
	Jumlah seluruh anak balita di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama	28.809	28.809	30.754	29.132	29.306
	Cakupan	43,33	58,27	61,39	70,22	71,14
33.	Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat					
	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga	4.852	5.759	6.910	6.508	6.499

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	terlatih disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu					
	Jumlah murid SD dan setingkat disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	4.945	5.759	7.378	7.248	7.248
	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	98,11	100,00	93,66	89,79	89.67
34.	Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 Jam					
	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani >24 jam dalam periode tertentu	6	4	3	3	3
	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama	4	3	3	3	3
	Persentase	66,7	75,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2019

1) Cakupan Puskesmas

Jumlah puskesmas yang terdapat di Kabupaten Luwu sudah cukup memadai sebab jumlah puskesmas telah sama dengan jumlah kecamatan sehingga telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Pemerintah Kabupaten Luwu ke depan akan fokus untuk meningkatkan sarana dan prasarana Puskesmas di setiap kecamatan agar dapat dicapai peningkatan kualitas layanan. Sedangkan untuk Puskesmas Pembantu pada tahun 2019 baru mencapai 49,34% dari seluruh desa di Kabupaten Luwu.

2) Angka Kelangsungan Hidup Bayi Per 1000 Kelahiran Bayi

Keselamatan kelahiran bayi di Kabupaten Luwu sejak tahun 2015 hampir mencapai 100% (tahun 2019 mencapai 99,91%). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berkomitmen untuk lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan kelahiran hingga di masa yang akan datang diharapkan angka kelangsungan hidup bayi dapat mencapai angka 100%

3) Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup dari sajian data pada tabel menggambarkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2015 mencapai 69,44 tahun dan pada tahun 2019 mencapai 70,19 tahun.

4) Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup

Kasus kematian Balita di Kabupaten Luwu pada tahun 2019 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2015. Pada tahun 2015 angka kematian balita per-1000 kelahiran hidup dengan angka rasio sebesar 8,54, selanjutnya naik menjadi 9,39 pada tahun 2016, selanjutnya naik menjadi 12,43 pada tahun 2017 dan kemudian turun menjadi 10,86 pada tahun 2018 dan turun lagi pada tahun 2019 menjadi 9,72.

Kematian balita pada umumnya disebabkan oleh diare dan pneumonia, yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat yang belum optimal serta bagaimana masyarakat dalam mendapatkan pertolongan pada anak sakit. Disamping itu hal ini juga berkaitan dengan deteksi dini faktor resiko serta tata laksana dalam penanganan balita sakit.

5) Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup

Kematian neonatal rata-rata disebabkan oleh berat badan lahir rendah (BBLR) dan Asfiksia (gangguan dalam pengangkutan oksigen (O₂) ke jaringan tubuh yang disebabkan terganggunya fungsi paru-paru, pembuluh darah, ataupun jaringan tubuh). Kondisi ini berkaitan dengan kualitas kesehatan ibu hamil yang melahirkan bayi dan kemampuan petugas dalam penanganan awal bayi beresiko serta dukungan sarana prasarana dalam penanganan bayi baru lahir bermasalah. Kondisi bayi baru lahir bermasalah disebabkan oleh kualitas kesehatan ibu pada masa sebelum dan saat hamil yang mempengaruhi kondisi kesehatan bayi baru lahir, sementara kualitas kesehatan ibu hamil ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial budaya. Kematian neonatus di Kabupaten Luwu periode tahun 2015 s/d 2019 masih fluktuatif. Periode tahun 2015-2017 terjadi penurunan rasio angka kematian neonatal dengan angka berturut-turut yakni 6,29, 6,06, dan 7,12, kemudian meningkat di tahun 2018 yakni 7,56 dan menurun lagi pada tahun 2019 menjadi 6,54.

6) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup

AKI menjadi salah satu indikator yang mendapatkan perhatian global dan merupakan indikator yang digunakan dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu meningkatkan kesehatan ibu. SDGs menargetkan bahwa setiap negara yang telah menyepakati SDGs harus berhasil mengurangi $\frac{3}{4}$ resiko jumlah kematian ibu. Oleh karena itu, Indonesia harus

berhasil menurunkan angka kematian ibu menjadi 167,8 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015.

Kasus kematian ibu di Kabupaten Luwu pada tahun 2015 adalah 140,3 per 100.000 kelahiran hidup, tahun 2016 meningkat menjadi 167,8, kemudian menurun menjadi 106,02 pada tahun 2017, dan jumlah kematian ibu menurun menjadi 94,40 per 100.000 pada tahun 2018. Selanjutnya jumlah kematian ibu meningkat menjadi 95,65 pada tahun 2019.

7) Jumlah Posyandu dan Balita

Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Oleh karena itu perlu dihitung rasio ketersediaan posyandu per balita. Kegunaannya untuk mengetahui berapa selayaknya jumlah posyandu yang efektif tersedia sesuai dengan tingkat penyebarannya serta sebagai dasar untuk merevitalisasi fungsi dan peranannya dalam pembangunan daerah. Keberadaan posyandu merupakan upaya peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi, dan balita.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah Posyandu di Kabupaten Luwu relatif meningkat. Pada tahun 2015 jumlah posyandu sebanyak 365 unit, meningkat menjadi 420 unit pada tahun 2019. Sedangkan jumlah balita pada tahun 2015 sebanyak 21.186 jiwa, meningkat pada tahun 2019 sebanyak 29,127 jiwa. Rasio Posyandu persatuan Balita pada tahun 2015 adalah 0,172 dan menurun menjadi 0,0144 per 1000 balita pada tahun 2019. Dengan demikian, meskipun jumlah Posyandu telah meningkat tetapi tidak tertinggal jika dibandingkan dengan jumlah balita yang harus dilayani.

8) Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu

Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kabupaten Luwu periode tahun 2015-2019 mengalami peningkatan .Pada tahun 2015 jumlah sarana pelayanan kesehatan adalah 218 unit dan meningkat menjadi 254 unit pada tahun 2019. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, dapat diukur rasio ketersediaan sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Luwu yaitu sebesar 0,0007.

9) Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk

Sejak tahun 2016, jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Luwu adalah 2 unit. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka rasio pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Luwu adalah 1 : 170 ribu orang lebih.

10) Dokter

Jumlah dokter di Kabupaten Luwu terus meningkat pada periode tahun 2015-2019, dari 36 orang menjadi 67 orang. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk, rasio dokter terhadap jumlah penduduk adalah sebesar 0,0002. Akan tetapi apabila dilihat dari perbandingan antara dokter dan penduduk terdapat peningkatan dari sebelumnya di tahun 2015 setiap dokter harus melayani sebanyak 110.399 penduduk menjadi sebanyak 101.870 penduduk di tahun 2019.

11) Tenaga Medis

Upaya pemenuhan tenaga kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini dianggap belum mencukupi dan belum sesuai kebutuhan di unit pelayanan kesehatan termasuk di Puskesmas dan Rumah Sakit. Secara umum tenaga medis (dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi) masih kurang jumlahnya, serta tenaga untuk upaya promotive dan preventif (tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga Farmasi, dan tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medis). Pendistribusian tenaga kesehatan tidak merata utamanya di daerah terpencil, perbatasan dan rawan bencana.

Jumlah tenaga medis di Kabupaten Luwu selama kurun waktu 2016-2019 terus mengalami peningkatan yaitu dari 32 orang menjadi 67 orang. Jumlah tenaga medis tersebut mengakibatkan rasio tenaga medis persatuan penduduk juga masih kurang. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus mengupayakan berbagai langkah untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis, khususnya di daerah-daerah terpencil.

12) Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Dengan memperhatikan jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu jika dibandingkan dengan jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama akan diperoleh gambaran tentang komplikasi kebidanan yang ditangani. Pada tahun 2015, cakupan komplikasi kebidanan yang

ditangani baru mencapai 52,50%, namun pada tahun 2019 telah dapat ditangani sebesar 80,49%.

13) Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2019 sangat fluktuatif. Sehingga upaya penolongan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan paling menurun terjadi pada tahun 2019 dengan cakupan 88,52%, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang pernah mencapai 95,01% pada tahun 2016.

14) Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Upaya penyebarluasan program *Universal Child Immunization* (UCI) di Desa/Kelurahan secara keseluruhan dianggap masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari jumlahnya yang tidak bertambah baik. Pada tahun 2015, terdapat 220 desa/kelurahan yang telah dilakukan UCI, menurun menjadi 203 desa/kelurahan pada tahun 2019.

15) Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Penanganan perawatan terhadap balita gizi buruk dapat dikatakan sangat baik. Dengan melihat data jumlah bayi penderita gizi buruk setiap tahunnya mendapat perawatan secara menyeluruh. Adapun penanganan paling banyak dilakukan pada tahun 2019 yang mencapai 30 balita. Penyebabnya tentunya karena beberapa faktor salah satunya yaitu kurangnya asupan makanan bergizi yang diakibatkan rendahnya perekonomian keluarga.

16) Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk pada tahun 2016 sempat mengalami peningkatan sampai pada 0,08%, tetapi dapat diturunkan pada tahun-tahun berikutnya, hingga 0,03% pada tahun 2019.

17) Anak Usia 1 Tahun Diimunisasi Campak

Terjadi fluktuasi pada jumlah anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak selama periode tahun 2015-2019. Jumlah anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak pada tahun 2019 hanya mencapai 89,59%, lebih rendah jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

18) Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani

Penanganan terhadap balita penderita pneumonia setiap tahunnya telah dapat dilakukan 100%, meskipun kasusnya cenderung meningkat. Pada tahun 2019 tercatat 158 kasus, hal ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu 116 kasus. Meskipun telah ditangani 100%, namun perkiraan jumlah balita penderita pneumonia sangat tinggi dibanding yang ditangani pada tahun yang sama. Ini mengartikan bahwa penanganan terhadap balita penderita pneumonia masih belum menyeluruh dan oleh karena itu dibutuhkan pengecekan rutin terhadap balita secara berkala dan menyeluruh di setiap wilayah.

19) Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA pada tahun 2019 masih pada kisaran 60,30%. Hal ini masih kurang dengan melihat angka perkiraan penderita yang mencapai 1.005 orang. Berdasarkan hal tersebut maka perlu diberikan perhatian lebih karena mengingat penularannya yang sangat mudah. Seperti halnya penanganan penyakit lainnya maka perlu diadakan tes kesehatan khusus penanganan penyakit TBC BTA secara rutin dan berkala tiap tahunnya.

20) Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Jumlah penduduk yang menderita TBC periode tahun 2015-2019 cenderung meningkat, yaitu dari 489 kasus pada tahun 2015 menjadi 640 kasus pada tahun 2019. Hal ini menandakan bahwa tingkat prevalensi tuberkulosis sangat tinggi. Berdasarkan hal tersebut maka harus dilakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas tenaga kesehatan dalam penanganan TBC, juga dengan mengingat ancaman dan penularan penyakit ini.

21) Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Angka kematian yang merupakan salah satu ancaman besar terhadap penderita penyakit tuberkulosis menjadi salah satu tolok ukur penilaian terhadap keberhasilan penanganan penyakit. Tingkat kematian karena penyakit ini, dapat dilihat pada tabel yang disajikan masih fluktuatif dan cenderung meningkat jumlahnya. Oleh karenanya itu harus terus dilakukan penanganan khusus untuk menekan angka kematian yang diakibatkan oleh penyakit ini.

22) Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

Kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS mengalami fluktuasi beriringan dengan meningkatnya perkiraan jumlah penderita tuberkulosis paru BTA. Persentasi penanganan terendah terjadi pada tahun 2019 yang hanya mencapai 63,68% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 98,34%.

23) Kasus Tuberkulosis Yang Diobati Dan Sembuh Dalam Program DOTS

Penanganan kasus tuberkulosis sembuh dalam program DOTS terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, walaupun terjadi sedikit peningkatan pada jumlah penderita penyakit tuberkulosis yang sedang diobati dalam program DOTS pada kurun waktu yang sama. Kasus yang sembuh mencapai 77,00% pada tahun 2019, meningkat dari 60,92% pada tahun 2015.

24) Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD sudah sangat baik karena tanggap dalam melakukan perawatan terhadap orang yang ditemukan menderita penyakit DBD, sekalipun dalam jumlahnya yang tidak sedikit terkhusus pada tahun 2017 yang mencapai 67 kasus.

25) Anak Balita Yang Tidur Dengan Kelambu Yang Berinsektisida

Tidak ada penemuan anak balita yang tidur dengan kelambu yang berinsektisida dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

26) Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi

Terjadi fluktuasi persentase pada prevalensi HIV/AIDS dari tahun ketahun, dimana tertinggi terjadi pada tahun 2017 yang mencapai 0,009% dengan jumlah penderita 13 dari 356.305 jumlah penduduk yang ada dalam kurun waktu yang sama.

27) Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin periode 2017 s/d 2019 lebih rendah jika dibandingkan ada tahun 2016, yaitu dari 80,40% pada tahun 2016 menjadi hanya 72,33% pada tahun 2019. Hal tersebut perlu mendapat perhatian untuk dilakukan upaya peningkatannya di masa depan.

28) Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi tiap tahunnya dalam kurun waktu yang sama sudah termasuk optimal dengan melihat persentase cakupan yang disajikan pada tabel dengan rata-rata 102% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

29) Kunjungan Ibu Hamil K4

Ibu hamil yang memperoleh pelayanan K4 mengalami penurunan antara tahun 2015-2019, dimana pada tahun 2015 mencapai 6.564 kunjungan atau 84,76% dari total ibu hamil, menjadi 5.978 atau 81,00% pada tahun 2019.

30) Pelayanan Nifas

Jumlah pelayanan yang memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar disatu wilayah dalam kurun waktu tertentu mengalami penurunan yang sangat mencolok pada tahun 2019 dengan jumlah ibu nifas yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu dari 89,92% menjadi 86,66%.

31) Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani

Penanganan neonatus dengan komplikasi yang ada masih sangat minim. Dapat dilihat dalam perkembangan jumlah penanganan dari tahun ketahun yang masih sangat rendah jika dibandingkan dengan jumlah seluruh neonitas dengan komplikasi yang ada pada tiap tahunnya, yaitu hanya 48,81%.

32) Pelayanan Anak Balita

Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali disatu wilayah dalam kurun waktu yang sama pada tiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup baik di Kabupaten Luwu, yaitu dari 43,33% pada tahun 2015 menjadi 71,14% pada tahun 2019.

33) Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat sudah terbilang cukup baik walaupun sedikit mengalami penurunan sejak tahun 2016 s/d 2019, yaitu dari 100% menjadi 89,67%.

34) Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi<24 Jam

Desa/Kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidomologi<24 jam cukup baik, yaitu mencapai 100%.

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sub urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan kewenangan kabupaten/kota adalah Sumber Daya Air (SDA), air minum, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang. Adapun capaian kinerja berdasarkan indikator yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Sumber Daya Air (SDA)					
1.1.	Irigasi kabupaten dalam kondisi baik					
	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	1.618	2.268	2.797	3.225	3.585
	Luas irigasi kabupaten (Ha)	8.904	8.904	8.904	8.904	8.904
	Persentase (%)	18,17	25,47	31,41	36,33	40,26
1.2.	Rasio Jaringan Irigasi					
	Jaringan primer	1.750	5.000	4.435	5.337	6.046
	Jaringan Sekunder	8.904	8.904	8.904	8.904	8.904
	Jaringan Tersier	NA	NA	NA	NA	NA
	Total Panjang Jaringan Irigasi (1+2+3)	NA	NA	NA	NA	NA
	Luas lahan budidaya	NA	NA	NA	NA	NA
	Rasio Jaringan Irigasi	19,65%	56,15%	49,81%	59,94%	67,90%
2.	Air Minum					
2.1	Penduduk berakses Air Minum					
	Penduduk berakses air minum	140.087	166.040	249.415	296.850	289.720
	Jumlah penduduk	350.218	353.277	356.305	359.209	359.290
	Persentase	40,00	47,00	70,00	82,64	80,64%
2.2	Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak Perkotaan dan Perdesaan					
	Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan	141.883	147.337	140.463	169.601	172.251
	Persentase	40,51	41,71	39,42	47,22	47,94
3.	Air Limbah					
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	71,00	76,00	75,45	82,46	84,52
4.	Jalan					
4.1.	Panjang Jalan di Kabupaten Luwu					
	Jalan kabupaten (Km)	2.142,07	2.312,96	2.444,02	2.541,39	2.748,84
	Jalan Propinsi (Km)	32,00	32,00	32,00	79,00	83,90
	Jalan Nasional (Km)	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5
	Total Panjang Jalan (Km)	2.289,57	2.460,46	2.591,52	2.735,89	2.948,24

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
4.2.	Jalan Kabupaten Menurut Kondisi					
	Kondisi Baik	385,5	424,81	533,48	538,02	585,26
	Kondisi Sedang	512,25	480,41	50,75	73,42	78,62
	Kondisi Rusak Ringan	570,4	614,95	1.048,68	1.063,09	1.118,42
	Kondisi Rusak Berat	673,92	792,79	811,11	866,86	966,54
	Rasio panjang jalan kondisi baik	0,17	0,17	0,21	0,21	0,21
	Panjang jalan kondisi mantap (km)	897,75	905,22	584,23	611,44	663,88
	Panjang jalan seluruhnya (km)	2.142,07	2.312,96	2.444,02	2.541,39	2.748,84
	Proporsi jaringan jalan dalam kondisi mantap (%)	41,91	39,14	23,90	24,06	24,15
4.3.	Panjang jalan dengan jumlah penduduk					
	Jumlah panjang jalan (km)	2.142,07	2.312,96	2.444,02	2.541,39	2.748,84
	Jumlah penduduk	350.218	353.277	356.305	359.209	375.535
	Rasio	0,00612	0,00655	0,00686	0,00707	0,00732
4.4.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)					
	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (km)	385,5	424,81	533,48	538,02	585,26
	Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut (km)	2.142,07	2.312,96	2.444,02	2.541,39	2.748,84
	Persentase	18,00	18,37	21,83	21,17	21,29
4.5.	Panjang jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)					
	Panjang jalan yang memiliki drainase (Km)	NA	NA	1.380	1.380	1.382,26
	Persentase	-	-	56,46	54,30	50,30
5.	Penataan Ruang					
5.1	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah					
	Luas ruang terbuka hijau (ha)	1,00	1,00	9,15	10,20	204,70
	Luas wilayah ber HPL/HGB	NA	NA	4,15	6,20	3,002.25
	Rasio	NA	NA	13,30	16,40	0,07
5.2	Bangunan ber- IMB per satuan bangunan-					
	Jumlah bangunan ber – IMB	90,00	91,00	93,00	93,00	98.05
	Jumlah bangunan	NA	NA	NA	NA	Na
	Rasio	NA	NA	NA	NA	Na

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian di bidang pekerjaan umum, antara lain sebagai berikut:

1) Sumber Daya Air

Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat diutamakan guna memenuhi kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangan pengelolaannya. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air

untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, mutu sesuai dengan kebutuhan menunjang pertanian dan keperluan lainnya.

Luas irigasi Kabupaten Luwu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tidak mengalami penambahan yaitu seluas 8,904 Ha. Sedangkan luas irigasi dalam kondisi baik selama periode tahun 2015-2019 secara terus menerus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah 1.618 Ha atau 18,17%, meningkat menjadi 3.585 Ha atau 40,26% pada tahun 2019.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan irigasi untuk mendukung pencapaian target “*overstock pangan*” dan mendukung ketahanan pangan nasional dilakukan peningkatan luas layanan jaringan irigasi dan optimalisasi fungsi irigasi di Kabupaten Luwu dengan luas areal Daerah Irigasi jaringan primer mengalami peningkatan dari tahun ketahun yang signifikan, dari 1.750 km pada tahun 2015 menjadi 6.046 km pada tahun 2019. Sedangkan jaringan sekunder tidak mengalami penambahan.

2) Air Minum

Peningkatan kualitas kesehatan sangat dipengaruhi oleh kualitas air minum. Pada tahun 2015, persentase penduduk terhadap akses air bersih/air minum di Kabupaten Luwu adalah sebesar 40,00%. Kondisi tersebut semakin membaik di tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 80,00% pada tahun 2019.

Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan di Kabupaten Luwu pada tahun 2015 adalah 141.883 jiwa, tetapi kemudian menurun menjadi 172.251 jiwa pada tahun 2019. Sedangkan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan, meskipun mengalami fluktuasi tetapi secara keseluruhan kondisi pada tahun 2019 lebih baik dibandingkan tahun 2015 yaitu dari 41,71% menjadi 47,94%.

3) Air Limbah

Air limbah adalah air yang telah mengalami penurunan kualitas karena pengaruh manusia. Oleh karena itu, air limbah harus dialirkan di saluran air kombinasi atau saluran sanitasi, dan diolah di fasilitas pengolahan air limbah atau *septic tank*. Air limbah yang telah diolah dilepaskan ke badan air penerima melalui saluran pengeluaran. Air limbah, terutama limbah perkotaan, dapat tercampur dengan

berbagai kotoran seperti feses maupun urin. Untuk menghindari pencemaran lingkungan akibat air limbah khususnya diperkotaan, pemerintah Kabupaten Luwu melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kondisi sanitasi setiap rumah tangga. Persentase rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Luwu pada tahun 2015 adalah sebesar 71,00%, kemudian mengalami peningkatan secara terus menerus hingga mencapai 84,52% pada tahun 2019.

4) Jalan

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 disebutkan bahwa kriteria kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik dan sedang, sedangkan kriteria kondisi jalan tidak mantap meliputi kondisi rusak ringan dan rusak berat. Kriterianya adalah jalan yang memiliki kerataan permukaan jalan memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalannya diukur menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai *International Roughness Index-IRI*) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai *Road Condition Index-RCI*).

Jalan raya yang melintas di wilayah Kabupaten Luwu pada tahun 2019 adalah 2.948,24 Km, yang terdiri dari jalan negara 115,50 Km, jalan provinsi sepanjang 83,90 Km dan jalan kabupaten 2.748,84 Km. Berdasarkan kondisi jalan pada tahun 2019, jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Luwu adalah 585,26 Km atau 21,29% dari total panjang jalan. Sedangkan jalan dalam kondisi sedang adalah 78,62 Km atau 28,60%, rusak ringan sepanjang 1.118,42 Km atau 40,68%, dan kondisi rusak berat sepanjang 966,54 km atau 35,16%. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 dengan persentase jalan dalam kondisi baik sebesar 17,99%, keadaan pada tahun 2019 sudah menunjukkan adanya peningkatan. Namun tidak demikian halnya dengan proporsi jalan dalam kondisi mantap, yang justru mengalami penurunan dari 41,91% menjadi 24,15%. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (lebih besar 40 Km/jam) pada 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun 2015 mencapai 385,5 km menjadi 585,26 km pada tahun 2019. Sedangkan panjang seluruh jalan kabupaten tahun 2015 sebesar 2.142,07 km, meningkat menjadi 2.748,84 km pada tahun 2019.

Dengan demikian dapat dilihat besaran rasionya dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun 18,00 persen menjadi 21,29 persen. Adapun panjang jalan yang memiliki drainase pada tahun 2015 sampai tahun 2016 tidak

memiliki data dari instansi yang bersangkutan yaitu khususnya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, namun tahun 2017 sampai tahun 2019 terdapat data yaitu sepanjang 1.380 menjadi 1.382,26 km pada tahun 2019.

5) Penataan Ruang

Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Luwu sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 telah meningkat secara signifikan dari 1,00 Ha sampai 204,70 Ha. Luas wilayah ber HPL/HGB pada tahun 2015 sampai tahun 2016 tidak ada datanya dari instansi yang terkait dan pada tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 4,15 Ha menjadi 6,20 Ha dan pada tahun 2019. Jumlah bangunan ber-IMB mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, dimana pada tahun 2015 sebesar 90,00%, menjadi 98,05 persen pada tahun 2019.

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa, dan perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Perumahan dan permukiman tidak dapat dilihat sebagai sarana kebutuhan kehidupan semata-mata, tetapi lebih dari itu merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan dirinya, dan menampilkan jati diri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perumahan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Capaian kinerja di bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan
Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Rumah Layak Huni					
	Jumlah rumah layak huni	67.773	68.313	69.313	72.868	75.231
	Jumlah penduduk	350.218	353.277	356.305	359.209	369.542
	Rasio	0,196	0,196	0,196	0,204	0,20
2.	Permukiman Layak Huni					
	Luas pemukiman layak huni (ha)	7.119,55	7.119,95	7.119,55	7.030,64	7.030,64
	Luas wilayah permukiman (ha)	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237
	Rasio	0,98	0,98	0,98	0,97	0,97
3.	Permukiman yang Tertata					
	Luas area permukiman tertata (ha)	0,3	0,3	0,3	2,57	11,2

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
	Luas area permukiman keseluruhan (ha)	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237
	Persentase	0,0041	0,0041	0,0041	0,0355	0,155
4.	Lingkungan Pemukiman Kumuh					
	Luas lingkungan permukiman kumuh (ha)	117,45	117,45	117,45	206,36	206,36
	Luas wilayah (ha)	3000,25	3000,25	3000,25	3000,25	300,000,25
	Persentase	0,0391	0,0391	0,0391	0,0688	0,07
5.	Luasan permukiman kumuh di perkotaan					
	Luasan permukiman kumuh kota yang tertangani (Ha)	8	8	8	8	8
	Luas permukiman kumuh Kota (Ha)	117,45	117,45	117,45	206,36	206,36
	Persentase	0,06	0,06	0,06	0,03	0,03
6.	Rumah tangga kumuh perkotaan					
	Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan	NA	NA	1.328	1.339	1.339
	Jumlah seluruh rumah	117,45	117,45	80.663	83.511	83,511
	Proporsi	NA	NA	0,164	0,0164	0,0164

Sumber: Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, antara lain sebagai berikut:

1) Rasio Rumah Layak Huni

Pada tahun 2018 jumlah rumah tangga yang menempati rumah layak huni yang tercatat adalah sejumlah 67.773 RT. Angka ini terus meningkat dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2019 mencapai 75.231 RT. Seiring dengan meningkatnya jumlah rumah layak huni, juga meningkatkan rasio rumah layak huni terhadap jumlah penduduk dari 0,196 pada tahun 2015 menjadi 0,20 pada tahun 2019. Akan tetapi, angka pada tahun 2019 tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan angka pada tahun 2018 yang mencapai 0,204. Terjadinya penurunan rasio rumah layak huni disebabkan peningkatan jumlah rumah layak huni tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk walaupun terus diupayakan penanganan rumah yang luasnya <45 m² menjadi rumah layak huni.

Masih tingginya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni akibat keterbatasan akses MBR terhadap penguasaan lahan dan pembiayaan perumahan dan tidak adanya kesediaan data terkait jumlah rumah layak huni di Kabupaten Luwu.

2) Rasio Permukiman Layak Huni

Rasio permukiman layak huni dari tahun 2015 ke tahun 2019 mengalami penurunan, yaitu 0,98 pada tahun 2015 menjadi 0,97 pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan luas areal permukiman tidak seiring dengan peningkatan kualitas rumah layak huni. Perbandingan permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman tidak sebanding dengan rasio permukiman layak huni.

3) Rasio Permukiman yang tertata

Permukiman di Kabupaten Luwu secara umum belum dilakukan penataan dalam rangka meningkatkan fungsinya. Hal ini terlihat dari kondisi bahwa sampai dengan tahun 2019, luas area permukiman yang tertata baru mencapai 11,2 Ha atau 0,16% dari 7.237 Ha luas permukiman.

4) Lingkungan Permukiman Kumuh dan Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Perkotaan

Penataan lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Luwu periode 2015-2019 belum terlaksana dengan maksimal. Luas permukiman kumuh di Kabupaten Luwu pada tahun 2019 adalah 206,38 Ha, meningkat dari kondisi pada tahun 2015 yaitu seluas 117,75 Ha. Luasan pemukiman kumuh yang tertangani pada tahun 2015 sampai dengan 2019 tidak mengalami peningkatan dan tidak mengalami penurunan yaitu 8,00 Ha.

5) Luasan Permukiman Kumuh di Perkotaan

Tidak ada perubahan terhadap luasan permukiman kumuh di perkotaan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, melainkan penambahan luasan wilayah perkotaan pada 2 tahun terakhir.

6) Rumah Tanggah Kumuh di Perkotaan

Sama halnya dengan luasan permukiman kumuh, pada rumah tanggah kumuh juga tidak terjadi perubahan dan stagnan pada 0,0164 pada 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2017 sampai tahun 2019.

2.1.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dilakukan untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tertib dan dapat mendukung

pelaksanaan pembangunan. Kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat sangat berkaitan erat dengan aspek sosial, politik, dan hukum. Layanan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Dinas Satuan Polisi Pamong Paja serta Dinas Pemadam Kebakaran dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)					
	Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	1.580	1.645	1.850	1.850	2.344
	Jumlah Penduduk	350.218	353.277	356.305	359.209	269.542
	Rasio	0,45	0,47	0,52	0,52	0,86
2.	Penegakan PERDA					
	Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA	28	31	31	46	127
	Jumlah Pelanggaran PERDA	28	31	31	46	127
	Persentase	100	100	100	100	100
3.	Pelayanan Bencana Kebakaran					
	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	3	4	4	6	8
	Jumlah Personil Pemadam Kebakaran	98	98	98	98	324
	Jumlah Penduduk	350.218	353.277	356.305	359.209	269.542
	Cakupan	0,000857	0,001132	0,001122	0,001669	0,120239
4.	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)					
	Jumlah Ketepatan Waktu Tindakan Pemadam Kebakaran (<1 jam setelah pengaduan)	30	30	30	30	30
	Jumlah Kejadian Kebakaran	30	8	13	16	68
	Tingkat waktu tanggap (menit)	15	15	15	15	15

Sumber: - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu, Tahun 2020.
 - Satuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Luwu, Tahun 2020
 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, antara lain sebagai berikut:

1) Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Ketentraman dalam kehidupan masyarakat terus diupayakan peningkatannya antara lain dengan keberadaan Linmas di setiap desa. Jumlah petugas

perlindungan masyarakat dari tahun ke tahun semakin meningkat dari 1.580 orang pada tahun 2015 menjadi 2.344 orang pada tahun 2019. Demikian pula rasionya terhadap jumlah penduduk, meningkat dari 0,45 pada tahun 2015 menjadi 0,86 pada tahun 2019.

2) Penegakan PERDA

Pelaksanaan penegakan PERDA oleh petugas dari tahun ke tahun semakin ditingkatkan. Pada tahun 2015 jumlah pelanggaran PERDA yang ditindak adalah 28 kasus, meningkat menjadi 127 kasus pada tahun 2019.

3) Pelayanan Bencana Kebakaran

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pelayanan terhadap bencana kebakaran semakin ditingkatkan. Hal ini terlihat dari keberadaan sarana prasarana yaitu mobil pemadam kebakaran yang semakin meningkat jumlahnya dari 3 unit pada tahun 2015 menjadi 8 unit pada tahun 2019. Sedangkan jumlah personil juga meningkat dari 90 orang pada tahun 2015 menjadi 324 orang pada tahun 2019.

4) Tingkat waktu tanggap (Response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018, tingkat waktu tanggap kebakaran adalah 15 menit. Dari setiap kasus kebakaran yang terjadi di Kabupaten Luwu (68 kasus pada tahun 2019), waktu tanggap 15 menit telah dapat dipenuhi.

2.1.3.1.6 Sosial

Pelayanan dan pemberdayaan sosial merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Layanan urusan sosial menjadi kewenangan Dinas Sosial dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pelayanan Sosial					
	Jumlah Sarana Sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo, Panti Rehab) yang terbina	8	10	9	9	8
	Persentase Panti Sosial yang menerima Program Pemberdayaan Sosial	35,00	40,00	58,00	65,00	75,00

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
	Persentase Penyandang Cacat Fisik, Mental dan Lanjut Usia yang menerima Jaminan Sosial	66,00	66,00	57,00	57,00	66,23
	Jumlah Kejadian Bencana (kali)	10	12	17	22	24
	Persentase Kejadian Bencana yang tertangani	100,00	100,00	100,00	100,00	100
	Jumlah Korban Bencana selama masa tanggap darurat (jiwa)	1.318	978	186	165	159
	Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Korban Bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	30,00	20,00	22,00	69,14	20,00
	Jumlah Sarana dan Prasana Tanggap Darurat	6	10	10	29	29
2.	Bantuan Sosial					
	Jumlah PMKS yang menerima bantuan	4.684	9.936	23.771	40.514	91.500
	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	9.253	10.000	198.922	206.215	205.264
	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	50,62	99,36	11,95	19,65	44,58
3.	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial					
	Jumlah PMKS yang tertangani	562	8	6.376	40.529	91.500
	Jumlah PMKS yang ada	18.278	17.632	22.220	206.215	205.264
	Persentase	3,07%	0,04%	28,69%	19,65%	44,58
4.	PMKS Skala Kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar					
	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun	149	250	270	23.620	91.500
	Jumlah PMKS yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	9.253	10.000	198.922	206.215	205.260
	Persentase	1,61	2,50	0,14	11,45	44,58
5.	Panti Sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis Lainnya					
	Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat	2.165	875	1.160	300	357
	Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat	2.500	1.000	50.413	50.413	20.475
	Persentase	86,6	87,5	2,30	0,60	1,74
6.	Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial					
	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	8	8	8	8	8
	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	8	8	8	8	8
	Persentase	100	100	100	100	100

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
7.	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial					
	Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos	0	0	0	0	0
	Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos skala	0	0	0	0	0
	Persentase					
8.	Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat					
	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun	480	1.318	978	186	159
	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun	480	1.318	978	186	159
	Persentase	100	100	100	100	100
9.	Korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap					
	Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun	148	396	197	6	8
	Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat skala	480	1.318	978	186	40
	Persentase kejadian bencana alam dan kebakaran yang tertangani dengan baik	43,86	65,79	65,79	65,79	66,23
10.	Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial					
	Jumlah yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	100	150	150	150	2.483
	Jumlah yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun	228	228	228	228	3.749

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang sosial, antara lain sebagai berikut:

1) Pelayanan Sosial

- Terdapat sejumlah 8 (delapan) sarana sosial (panti asuhan, panti jompo, dan panti rehab) yang dibina pada periode tahun 2015-2019.
- Pada tahun 2019, sejumlah 75,00% panti sosial yang ada di Kabupaten Luwu telah menerima program pemberdayaan sosial. Sedangkan pada tahun 2015 baru mencapai 35,00%.
- Pada tahun 2019, sejumlah 66,23% penyandang cacat fisik, mental, dan lansia telah menerima jaminan sosial, angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar 66,00%.

- d) Pada tahun 2019, jumlah kejadian bencana yang diberikan pelayanan social adalah 24 kejadian, angka ini meningkat jika dibandingkan tahun 2015 yaitu 10 kejadian bencana.
- e) Pada tahun 2015, jumlah korban bencana yang diberikan pelayanan social selama masa tanggap darurat mencapai 1.318 jiwa, menurun menjadi 159 jiwa pada tahun 2019.
- f) Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat periode tahun 2015-2019 adalah mencapai 100%.
- g) Pada tahun 2019, korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat adalah sebesar 20,00% dari jumlah korban bencana. Angka ini lebih kecil jika dibandingkan dengan angka pada tahun 2018 yang mencapai 69,14%.
- h) Jumlah sarana dan prasarana tanggap darurat yang dimiliki Kabupaten Luwu meningkat dari 6 unit pada tahun 2015 menjadi 29 unit pada tahun 2019.

2) Bantuan Sosial

PMKS yang menerima bantuan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu dari 4.684 jiwa pada tahun 2015 menjadi 91.500 jiwa pada tahun 2019.

3) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

PMKS yang ditangani dengan bantuan sosial pada tahun 2019t mencapai 91.500 jiwa, meningkat dari 562 jiwa pada tahun 2015. Peningkatan ini merupakan dampak dari program nasional yang meluncurkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

4) PMKS Skala Kabupaten Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

PMKS yang memperoleh bantuan sosial dari tahun ke tahun mengalami peningkatan hingga mencapai 91.500 jiwa pada tahun 2019., sehingga jika dibandingkan dengan jumlah penduduk diperoleh persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial yaitu sebesar 44,58%.

5) Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Sejenis Lainnya

Jumlah PMKS dalam satu tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE juga mengalami peningkatan sebesar 357 pada tahun 2019 dibanding pada tahun 2018 sebesar 300 jiwa.

6) Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial

Jumlah panti sosial dalam satu tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos tidak mengalami peningkatan dari tahun ketahun, begitu pula jumlah panti sosial dalam satu tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasaran pelayanan kesos juga tidak mengalami peningkatan.

7) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Jumlah WKBSM dalam satu tahun yang menyediakan sarana dan prasarana kesos belum ada di kabupaten luwu sesuai dengan data yang ada.

8) Korban Bencana Yang Dievakuasi Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dalam satu tahun dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 186 korban menjadi 978 korban pada tahun 2018, sehingga persentase kejadian bencana alam dan kebakaran yang tertangani dengan baik pada tahun 2019 mencapai 65,79 persen.

9) Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensi yang telah menerima jaminan tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 150 Jiwa pada Tahun 2019 dan penyandang cacat fisik dan mental serta lansia yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam satu tahun juga tidak mengalami peningkatan dari Tahun 2018 ke Tahun 2019 sebesar 228 Jiwa.

2.1.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Sejalan dengan maksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemerintah Kabupaten Luwu secara terus-menerus melaksanakan kewenangan di bidang Ketenagakerjaan. Berbagai data tentang kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu telah diuraikan pada bagian terdahulu. Data Layanan urusan Tenaga kerja menjadi kewenangan Dinas tenaga kerja dan transmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	Na	Na	Na	Na	Na
2.	Besarnya kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Besaran pencarian kerja yang terdaftar yang ditempatkan	4,70	14,34	8,44	16,15	17,08
4.	Keselamatan dan perlindungan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	65	70	75	78	100,00
6.	Penanganan perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Besaran pemeriksaan perusahaan	65,9	87,9	89,5	Propinsi	Propinsi
8.	Besaran pengujian peralatan di perusahaan	100,00	100,00	100,00	100,00	Propinsi
9.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	27,00	50,00	27,00	79,60	79,27
10.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	35	47	41	47	48

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang ketenagakerjaan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Tidak tersedia data terkait dengan angka sengketa pengusaha-pekerja selama periode tahun 2015-2019.
- 2) Semua kasus yang terkait dengan perjanjian bersama antara pengusaha dan pekerja dalam 5 tahun terakhir dapat diselesaikan.
- 3) Persentase antara pencari kerja yang terdaftar dan yang ditempatkan dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari 4,70% pada tahun 2015 menjadi 17,08% pada tahun 2019.
- 4) Terkait dengan jaminan keselamatan dan perlindungan terhadap tenaga kerja, telah mencapai seratus persen sejak tahun 2015.
- 5) Pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek telah mencapai 100% pada tahun 2019.
- 6) Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah seluruhnya dapat diselesaikan sesuai ketentuan.
- 7) Pemeriksaan perusahaan yang dilakukan Pemda Kabupaten Luwu dari tahun 2015 sampai tahun 2017 semakin meningkat dari 65,90 persen menjadi 87,90

persen ditahun 2016 dan pada tahun 2017 sebesar 89,50 persen. Sedangkan pada Tahun 2018 sampai pada Tahun 2019 ditangani oleh Provinsi Sulawesi Selatan.

- 8) Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan telah dilakukan 100% selama periode tahun 2015-2018. Sedangkan tahun 2019 kewenangannya dilimpahkan ke Provinsi Sulawesi Selatan.
- 9) Tenaga kerja terdaftar yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu dari 27,00% pada tahun 2015 menjadi 79,27% pada tahun 2019.
- 10) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan pada tahun 2019 mencapai 48 orang. Angka ini meningkat dari tahun 2015 yang mencapai 35 orang.

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

.Meningkatkan ketahanan keluarga dan penegakan hukum terkait ketentuan persyaratan pernikahan mempengaruhi pembentukan kebijakan pemerintah daerah yang *family friendly* dan responsif gender, khususnya untuk memberikan akses kepada perempuan untuk lebih berperan dalam pembangunan bangsa, baik secara sosial, budaya, dan politik. Sedangkan pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin.

Data Layanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2015 - 2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah					
	Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah	3.552	3.651	3.821	4.143	4.237
	Jumlah Pekerja Perempuan	108.546	108.546	113.419	187.605	165.037
	Persentase	3,27	3,36	3,37	2,21	2,56
2.	Kursi yang di Duduki Perempuan di DPRD					
	Jumlah Kursi DPRD yang diduduki perempuan	3	3	3	3	2
	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	35	35	35	35	35

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
	Proporsi	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	5,71%
3.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta					
	Pekerja perempuan di lembaga swasta	10.652	10.750	11.450	11.750	11.800
	Jumlah pekerja perempuan	108.546	108.546	113.419	187.605	165.037
	Persentase	9,81	9,90	10,10	6,26	7,15
4.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)					
	Rasio KDRT	0,001	0,009	0,001	0,001	0,0027
	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (%)	100	100	100	100	100
	Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	1	1	44	15	27
	Peyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	92	10	15	20	27
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas mampu tatalaksana KIP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Na	Na	Na	Na	Na
	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	Na	Na	Na	Na	Na
5.	Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu					
	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	9	10	12	30	27
	Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	9	10	12	30	27
	Cakupan (%)	100	100	100	100	100
6.	Penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasuskasus kekerasan terhadap perempuan dan anak					
	Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Na	Na	Na	8	16
	Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan	Na	Na	Na	8	16
	Cakupan (%)	Na	Na	Na	100	100
7.	Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum					
	Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum	5	7	8	17	16
	Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum	7	10	25	31	16
	Cakupan (%)	71,42	70,00	32,00	54,84	100
8.	Layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan					
	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulihan	Na	Na	1	3	11
	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT	Na	Na	33	48	27
	Cakupan (%)			3,03	6,25	40,70

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
9.	Layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan					
	Jumlah Perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya	3	3	3	3	11
	Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial	3	3	3	3	11
	Cakupan (%)	100	100	100	100	100
10.	APM perempuan/laki-laki di SD					
	APM-SD Perempuan	20.873	21.254	22.045	23.033	
	APM-SD Laki Laki	20.995	21.362	22.456	23.584	
	Rasio	99,42	99,49	98,17	97,66	
11.	Perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian					
	Banyaknya pekerja upahan perempuan di sektor pertanian	150	168	185	270	144
	Banyaknya pekerja upahan di sektor non pertanian	78	85	80	76	60
	Kontribusi (%)	19,23	19,76	23,12	35,51	24,00
12.	Indeks Pembangunan Gender	91,89		92,52	92,28	92,00
13.	Indeks Pemberdayaan Gender	62,47		61,61	63,58	

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain sebagai berikut:

1) Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Pekerja perempuan dilembaga pemerintah dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya, yaitu dari 3.552 orang pada tahun 2015 menjadi 4.237 orang pada tahun 2019, sedangkan jumlah total pekerja perempuan meningkat dari 108.546 orang pada tahun 2015 menjadi 165.037 orang pada tahun 2019. Meskipun terjadi peningkatan dari sisi jumlah pekerja, namun persentasenya semakin menurun yaitu dari 3,27% menjadi 2,56%.

2) Kursi yang diduduki perempuan di DPRD

Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 2 orang dimana sebelumnya adalah 3 orang. Dengan demikian, dari sejumlah 35 orang anggota DPRD pada tahun 2019, hanya sebesar 5,71% yang diwakili oleh perempuan. Kondisi ini perlu mendapat perhatian mengingat pembangunan nasional di bidang politik menargetkan keterlibatan perempuan sebesar 30%.

3) Partisipasi perempuan dilembaga swasta

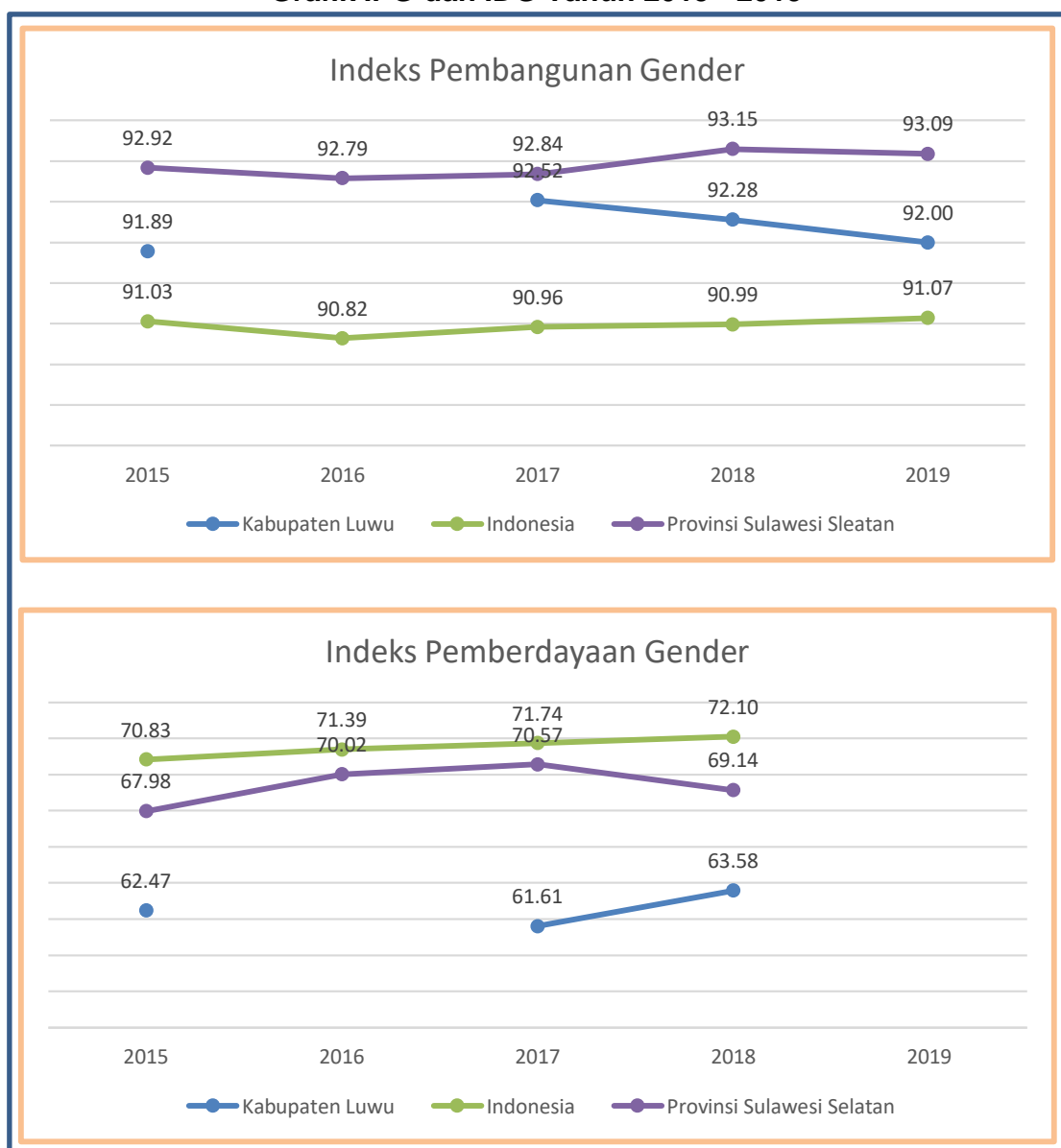
Pekerja perempuan dilembaga swasta mengalami peningkatan dari 10.652 orang pada tahun 2015 menjadi 11.800 orang pada tahun 2019. Meskipun demikian, secara agregat jika dibandingkan dengan jumlah pekerja perempuan, kondisi ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu dari 9,81% menjadi 7,15%.

4) KDRT

- a) Rasio KDRT pada tahun 2015 lebih kecil dibandingkan tahun 2019, yaitu 0,001% dengan 0,0027%, bahkan pada tahun 2016 mencapai 0,009%.
 - b) Sejak tahun 2015 s/d 2019, Perempuan dan Anak Korban Kekerasan telah mendapatkan layanan bantuan hukum yang maksimal.
 - c) Jumlah korban kekerasan perempuan dan anak sejak tahun 2017 cukup tinggi dan berfluktuasi. Pada tahun 2017, terdapat 44 kasus, menurun menjadi 15 kasus pada tahun 2018 tetapi kembali meningkat menjadi 27 kasus pada tahun 2019.
 - d) Jumlah kasus pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang diselesaikan pada tahun 2019 adalah 27 kasus. Angka ini terus-menerus meningkat dari tahun 2016 yang hanya 10 kasus.
- 5) Jumlah laporan dan kasus yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari 9 kasus pada tahun 2015 menjadi 27 kasus pada tahun 2019.
- 6) Penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2019 adalah 16 kasus, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 8 kasus.
- 7) Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan hukum telah mencapai 100% pada tahun 2019.
- 8) Layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Luwu pada tahun 2019 mencapai 40,70% dari total 27 kasus.
- 9) Layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Luwu pada tahun 2019 mencapai 100% dari total 11 kasus.

- 10) APM perempuan di jenjang pendidikan SD pada tahun 2019 adalah 97,66% dibandingkan APM laki-laki.
- 11) Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan disektor non pertanian pada tahun 2019 adalah 24,00%.
- 12) Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Luwu pada tahun 2019 adalah 92,00%, sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender pada tahun 2018 adalah 63,58%, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah.

Gambar 2.35
Grafik IPG dan IDG Tahun 2015 - 2019



Sumber: Data diolah, BPS, Tahun 2019 (belum ada data 2016 IPG IDG & 2019 IDG)

2.1.3.2.3 Pangan

Situasi ketersediaan pangan antara lain tercermin dari jumlah ketersediaan pangan, yang digambarkan dari ketersediaan pangan maupun mutu keanekaragaman pangan yang digambarkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH). Layanan urusan pangan menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
Tahun 2015 – 2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Cakupan Desa Mandiri Pangan	70,93	71,81	73,57	73,57	85,90
2.	Ketersediaan pangan utama					
	Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)	208.905.465	218.867.796	212.930.862	223.291.313	298.497.393
	Jumlah penduduk	350.218	353.277	356.305	359.209	362.027
	Ketersediaan pangan utama	59.650	61.954	59.761	62.162	82.452
3.	Ketersediaan energi dan protein perkapita					
	Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari):	68	69	69	69	69
	Ketersediaan energi (ka/kapita/hari)	3.306	3.327	3.322	3.294	3.406
4.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan					
	Pencapaian skor pola pangan harapan	85,2	87,4	87,8	86,3	89,2
	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan (persen)	100	100	100	100	100
	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	26,66	32,00	44,68	44,68	11,59
	Pengawasan dan pembinaan keamanan Pangan	40,0	26,7	30,0	40,9	48,8

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang pangan, antara lain sebagai berikut:

1) Cakupan Desa Mandiri Pangan

Cakupan desa mandiri pangan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu dari 70,93 persen pada tahun 2015 menjadi 85,90 persen pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa desa yang masuk kategori mandiri pangan di Kabupaten Luwu semakin meningkat. Desa Mandiri Pangan adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan

subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan.

2) Ketersediaan Pangan Utama

Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan untuk mengaksesnya. Ketersediaan pangan utama pertahun (kg) di Kabupaten Luwu semakin meningkat dari tahun ke tahun pada periode tahun 2015-2019, yaitu dari 59.650 Kg pada tahun 2015 menjadi 82.452 Kg pada tahun 2019. Hal ini sebanding dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat.

3) Ketersediaan energi dan protein perkapita

Ketersediaan protein perkapita cenderung stagnan, hanya berkisar 69 gram/perkapita/hari. Sedangkan ketersediaan energi secara umum mengalami peningkatan dari 3.306 ka/kapita/hari pada tahun 2015 menjadi 3.406 ka/kapita/hari pada tahun 2019, meskipun mengalami fluktuasi pada tahun 2017.

4) Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

- a) Pencapaian skor pola pangan harapan dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan, yaitu dari 85,20 pada tahun 2015 menjadi 89,20 pada tahun 2019.
- b) Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan telah dilakukan maksimal setiap tahunnya.
- c) Pengembangan cadangan pangan daerah menurun pada tahun 2019 menjadi 11,59. Angka ini lebih rendah disbanding tahun 2015 yang mencapai 26,66.
- d) Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan juga mengalami peningkatan dari meskipun baru mencapai 48,80% pada tahun 2019.

2.1.3.2.4 Pertanahan

Permasalahan pertanahan erat kaitannya dengan surat atau bukti kepemilikan atas tanah tersebut, sehingga pemerintah Kabupaten Luwu selalu berusaha untuk meningkatkan anggarannya dalam sertifikasi hak atas tanah yang dikuasai dan dimiliki. Namun kemauan pemerintah daerah terhalang atau terhambat dengan pihak lain yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan sertifikat atau bukti kepemilikan atas tanah dengan alasan kapasitas dan kemampuannya yang terbatas. Layanan urusan pertanahan menjadi kewenangan Dinas Pertanahan dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
Tahun 2015 - 2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Luas lahan bersertifikat					
	Jumlah Luas Lahan Bersertifikat	15.454	15.666	133.03	144.864	298.919
	Jumlah Luas Wilayah (ha)	3.000,25	3.000,25	3.000,25	3.000,25	3.000,25
	Persentase	0,0345	0,0255	0,0827	0,017	0,996
2.	Penyelesaian Kasus Tanah Negara					
	Jumlah Kasus yang diselesaikan	1	1	1	3	4
	Jumlah kasus yang terdaftar	4	2	3	3	6
	Penyelesaian kasus tanah Negara	45,00	50,00	33,33	100,00	66,67
3.	Penyelesaian izin lokasi					
	Jumlah Ijin Lokasi	7	3	4	6	10
	Permohonan Ijin Lokasi	7	3	4	6	10
	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang pertanahan, antara lain sebagai berikut:

1) Luas lahan bersertifikat

Lahan yang memiliki sertifikat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu dari 15.454 Ha pada tahun 2015 menjadi 298.919 Ha pada tahun 2019. Namun demikian, kondisi ini baru mencapai 0,10% dari luas wilayah Kabupaten Luwu.

2) Penyelesaian kasus tanah Negara

Jumlah kasus yang diselesaikan selama periode tahun 2015-2019 mengalami peningkatan yaitu dari 4 kasus pada tahun 2015 menjadi 6 kasus pada tahun 2019. Dari sejumlah kasus tersebut, yang dapat diselesaikan mengalami peningkatan yaitu dari 45,00% pada tahun 2015 menjadi 66,67% pada tahun 2019.

3) Penyelesaian izin lokasi

Penyelesaian Ijin lokasi selalu mencapai 100% sepanjang periode tahun 2015-2019. Sedangkan permohonan yang diselesaikan terus meningkat pada periode 2016-2019 yaitu dari 3 permohonan menjadi 10 permohonan.

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Layanan urusan lingkungan hidup menjadi

kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2015 - 2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tersusunnya RPPLH Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Peningkatan Indeks Kualitas Air	26,55	26,56	26,65	26,65	26,65
5.	Pembinaan dan Pengawasan Izin PPLH dan PUU LH					
	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.	38,45	39,65	39,50	39,22	37,89
	Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang ditangani	8	10	41	40	36
	Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten	1	36	57	102	95
	Persentase	26,45	27,78	71,93	39,22	37,89
6.	Pendidikan dan pelatihan masyarakat					
	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten	1	1	2	2	3
7.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup					
	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	1	1	2	2	3
8.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten					
	Pengaduan Masyarakat yang ditangani	1	1	1	2	3
	total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	1	1	1	2	3
	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9.	Persentase Timbunan Sampah yang tertangani	76,03	80,50	83,75	83,75	67,30
10.	Persentase Jumlah Sampah yang berkurang melalui 3R	23,70	19,50	16,27	16,27	23,40
11.	Persentase Cakupan Area Pelayanan (%)	76,03	80,50	83,75	83,75	83,75
12.	Nilai Operasionalisasi TPA/TPST/SPA	67,00	71,00	83,00	83,00	85,00
13.	Persentase Izin Pengolahan Sampah oleh Swasta yang diterbitkan	Tidak ada izin yang dikeluarkan sehubungan belum ada pihak swasta yang kerjasama dengan Pemkab mengenai pengolahan sampah				

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
14.	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan.	Tidak ada izin yang dikeluarkan sehubungan belum ada pihak swasta yang kerjasama dengan Pemkab mengenai pengolahan sampah				

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang lingkungan hidup, antara lain sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Luwu telah memiliki Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan telah terintegrasi dengan rencana pembangunan kabupaten.
- 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah diselenggarakan sejak tahun 2015.
- 3) Indeks kualitas air sejak tahun 2015 adalah 26,55.
- 4) Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan kegiatan terhadap ketaatan izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Luwu dari tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami fluktuasi.
- 5) Pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan dalam pengelolaan lingkungan hidup pada tahun 2019 mencapai 3 kegiatan.
- 6) Pemberian penghargaan lingkungan hidup diberikan kepada 3 orang pada tahun 2019.
- 7) Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kabupaten telah dapat ditangani seluruhnya.
- 8) Timbunan sampah yang tertangani baru mencapai 67,30% pada tahun 2019.
- 9) Sampah yang berkurang melalui 3R baru mencapai 23,40% pada tahun 2019.
- 10) Cakupan area pelayanan persampahan baru mencapai 67,30% pada tahun 2019.
- 11) Nilai operasionalisasi TPA/TPST/SPA baru mencapai 85,00 pada tahun 2019.
- 12) Tidak ada izin yang dikeluarkan untuk pengolahan sampah karena belum ada pihak swasta yang kerjasama dengan pemerintah daerah mengenai pengolahan sampah.

2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan

daerah. Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan. Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan
Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2015 - 2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Penduduk ber-KTP					
	Jumlah penduduk yang ber-KTP	165.466	203.081	211.958	229.974	239.663
	Jumlah penduduk > 17 tahun atau telah menikah	247.420	252.943	256.791	261.879	254.355
	Rasio	0,67	0,80	0,83	0,88	0,94
2.	Penduduk ber-KK					
	Jumlah penduduk ber-KK	91.735	90.604	92.364	92.997	82.540
	Jumlah penduduk yang telah menikah	148.336	146.284	148.346	150.482	149.570
	Rasio	0,62	0,62	0,62	0,62	0,55
3.	Bayi ber-Akte Kelahiran					
	Jumlah bayi yang ber-akte kelahiran	4.326	4.234	4.576	5.851	6.707
	Jumlah bayi	6.964	6.979	6.390	7.196	7.779
	Rasio	0,62	0,61	0,72	0,81	0,86
4.	Pasangan ber-Akte Nikah					
	Jumlah pasangan nikah ber-akte nikah	14.186	15.768	18.073	22.402	35.662
	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	151.076	152.452	154.871	153.080	152.365
	Rasio	0,09	0,10	0,12	0,15	0,23
5.	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
7.	PenerbitanKartu Tanda Penduduk (KTP)					
	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	165.466	203.081	211.958	229.974	239.663
	Jumlah penduduk wajib KTP	247.420	252.943	256.791	261.879	254.355
	Cakupan	66,88	80,29	82,54	87,82	0,94
8.	Penerbitan Akte Kelahiran					
	jumlah penduduk lahir dan memperolehakta kelahiran di tahun bersangkutan	4.326	4.234	4.576	5.851	6.707
	Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan	6.964	6.979	6.390	7.196	7.779
	Cakupan	62,12	60,67	71,61	81,31	0,86

Sumber: Dinas Kependudukan & Catatan Sipil

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, antara lain sebagai berikut:

1) Penduduk Ber-KTP

Perkembangan jumlah penduduk yang ber-KTP pada tahun 2019 meningkat hingga mencapai 239.663 jiwa dengan jumlah penduduk usia > 17 tahun atau yang telah menikah sebanyak 254.355 jiwa atau dengan rasio 0,94.

2) Penduduk Ber-KK

Jumlah penduduk ber-KK pada tahun 2019 rasionya menurun sampai 0,55 dibanding tahun sebelumnya 0,62. Ini menandakan bahwa kinerja dalam mengadakan KK masih kurang dan diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap progres pendataan keluarga yang masih belum mempunyai KK.

3) Bayi Ber-Akte Kelahiran

Perbandingan antara Tahun 2019 dan 2018 cukup jelas terlihat adanya peningkatan dimana Tahun 2018 rasio bayi yang ber-akte kelahiran 0,81 dan mencapai 0,86 pada Tahun 2019.

4) Pasangan Ber-Akte Nikah

Berdasarkan data yang tertera pada tabel memperlihatkan sangat jelas rendahnya rasio pada pasangan yang ber-Akte nikah. Bahkan tahun terakhir hanya mencapai 0,23 akan tetapi dibandingkan Tahun 2018 yang jauh lebih rendah dengan rasio 0,15.

5) Database kependudukan skkala kabupaten telah tersedia sejak tahun 2015.

6) Untuk penerapan KTP nasional berbasis NIK sudah menyeluruh dalam 5 tahun terakhir.

7) Perkembangan penerbitan KTP dari tahun ketahun sudah terbilang baik. Melihat data yang disajikan dalam 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan beriringan dengan fluktuatifnya jumlah penduduk wajib KTP.

8) Hampir sama halnya dengan penerbitan KTP, penerbitan akte kelahiran juga sudah terbilang baik dalam 5 tahun terakhir. Namun berdasarkan cakupannya ditahun terakhir, masih tetap harus dilakukan pengoptimalan.

2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Layanan urusan pemberdayaan

masyarakat dan desa menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2015 - 2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Sarana prasaran perkantoran pemerintahan desa yang baik					
	Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik	195	198	198	198	202
	Jumlah seluruh pemerintahan desa	207	207	207	207	207
	Cakupan	94,20	95,65	95,65	95,65	97,58
2.	Kelompok Binaan LPM					
	Jumlah Kelompok Binaan LPM	207	207	207	207	207
	Jumlah LPM	207	207	207	207	207
	Rata-rata	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Kelompok Binaan PKK					
	Jumlah Kelompok Binaan PKK	229	229	229	229	229
	Jumlah PKK	229	229	229	229	229
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	LSM Aktif					
	Jumlah LSM aktif	1	9	12	12	12
	Jumlah LSM	48	56	59	59	59
	Persentase	2,08	16,07	20,34	20,34	20,34
5.	LPM Berprestasi					
	Jumlah LPM berprestasi	0	0	0	0	0
	Jumlah LPM	207	207	207	207	207
	Persentase	0	0	0	0	0
6.	PKK Aktif					
	Jumlah PKK aktif	229	229	229	229	249
	Jumlah PKK	229	229	229	229	249
	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	PKK Aktif					
	Jumlah posyandu aktif	417	417	417	417	418
	Jumlah posyandu	417	417	417	417	418
	Swasembada Masyarakat terhadap program pemberdayaan Masyarkat.	417	417	417	417	418
	Persentase posyandu aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, antara lain sebagai berikut:

- 1) Cakupan dalam program sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik pada Tahun 2019 mengalami peningkatan cakupan yaitu 97,58. Perbandingannya dengan Tahun 2016-2018 yang hanya stagnan di angka 95,65.

- 2) Kelompok binaan LPM sudah maksimal terbukti dari 5 tahun terakhir sudah mencapai 207 kelompok.
- 3) Pada tahun terakhir kelompok binaan PKK juga sudah maksimal, yaitu mencapai 229 PKK di 22 kecamatan.
- 4) Jumlah LSM aktif di perdesaan pada Tahun 2019 baru mencapai 20,34%. Hal ini menyebabkan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Luwu dalam rangka meningkatkan taraf hidup penduduk perdesaan kurang berhasil sebagaimana yang diharapkan. Hal ini menjadi perhatian dan sebagai input untuk perumusan kebijakan di masa depan, mengingat potensi perdesaan di Kabupaten Luwu untuk berkembang sangat besar.
- 5) Tidak ada LPM berprestasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
- 6) Semua PKK yang ada sudah tergolong aktif dalam 5 tahun terakhir.
- 7) Semua posyandu sudah tergolong aktif dalam 5 tahun terakhir.

2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kehadiran perangkat daerah yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Luwu adalah dalam rangka melakukan upaya-upaya menekan laju pertumbuhan penduduk, antara lain dengan menggunakan strategi pembinaan keluarga berencana. Layanan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana menjadi kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2015 - 2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,90	0,87	0,86	0,82	0,82
2.	Total Fertility Rate (TFR)	2,67	2,83	2,86	2,96	2,96
3.	Dukungan Perangkat Daerah (Dinas/Badan) dalam Kebijakan Pengendalian Penduduk					
	Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	3	3	3	3	3
	Jumlah perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	0	0	0	0	0
	Jumlah kebijakan daerah yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	0	0	0	0	0
	Jumlah semua perangkat daerah	33	34	34	34	34

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
	Jumlah sektor yang menyepakati pemanfaatan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	4	4	4	4	4
	Jumlah Kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan Informasi yang melakukan pendidikan kependudukan	3	3	3	3	3
	Jumlah Kampung KB	1	1	23	59	59
	Persentase OPD yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan induk pengendalian Penduduk	0	0	0	0	0
4.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,9	2,8	2,7	2,4	2,4
5.	Akseptor KB					
	Jumlah Akseptor KB	42.401	42.615	38.615	38.755	38.366
	Jumlah Pasangan Subur	51.175	50.666	50.721	50.849	50.580
	Ratio	82,85	84,11	76,13	76,22	75,85
6.	Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun					
	Jumlah Peserta KB Aktif	34.560	32.415	32.575	33.029	33.473
	Jumlah Pasangan Usia Subur	51.175	50.666	50.721	50.849	50.580
	Angka (%)	67,53	63,98	64,22	64,96	66,18
7.	Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun					
	Jumlah pasangan usia subur dengan istri dibawah 20 tahun	1.158	1.000	609	500	537
	Jumlah Pasangan Usia Subur	51.175	50.666	50.721	50.849	50.622
	Cakupan	2,26	1,97	1,20	0,98	1,06
8.	Pasangan Usia Subur (PUS) yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)					
	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	6.853	7.096	7.882	7.624	7.216
	Jumlah Pasangan Usia Subur	51.175	50.666	50.721	50.849	50.580
	Cakupan	13,39	14,01	15,54	14,99	14,27
9.	Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)					
	Jumlah Akseptor KB yang menggunakan MKJP	7.390	7.301	7.840	8.564	9.399
	Jumlah Akseptor KB	42.401	42.615	38.615	38.755	38.366
	Persentase	17,43	17,13	20,30	22,10	24,50
10.	Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi					
	Jumlah Pasangan Usia Subur yang masih menggunakan kontrasepsi	34.560	32.415	32.575	33.029	33.473
	Jumlah Akseptor KB	42.401	42.615	38.615	38.755	38.366
	Persentase	81,51	76,06	84,36	85,23	84,25
11.	Anggota Bina Keluarga Balita					
	Jumlah Anggota Kelompok BKB yang ber-KB	3.051	4.556	4.438	4.015	3.849
	Jmlah Anggota Kelompok BKB	4.896	8.134	7.672	6.455	6.291
	Cakupan	62,32	56,01	57,85	62,20	61,18

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB					
	Jumlah Anggota Kelompok BKR yang ber-KB	771	2.144	2.217	1.947	1.871
	Jmlah Anggota Kelompok BKR	2.875	4.429	4.358	3.785	3.681
	Cakupan	26,82	48,41	50,87	51,44	50,83
13.	Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB					
	Jumlah Anggota Kelompok BKL yang ber-KB	469	1.792	1.746	1.271	1.283
	Jmlah Anggota Kelompok BKL	2.962	4.246	4.175	3.567	3.460
	Cakupan (%)	15,83	42,20	41,82	35,63	37,08
14.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan					
	Jumlah PPKS	2	2	2	2	2
	Jumlah Kecamatan	22	22	22	22	22
	Persentase	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09
15.	Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa					
	Jumlah PIK R/M	25	25	25	34	34
	Jumlah Kecamatan	22	22	22	22	22
	Cakupan	113,64	113,64	113,64	154,55	154,55
16.	PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk					
	Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan	49	48	47	47	44
	Jumlah PKB/PLKB	49	48	47	47	44
	Cakupan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri					
	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri	Mulai tahun 2020 baru dihitung				
	Jumlah anggota kelompok UPPKS	Mulai tahun 2020 baru dihitung				
	Cakupan					
18.	Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan					
	Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa	227	227	227	227	227
	Jumlah desa/kelurahan	227	227	227	227	227
	Rasio	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.	Ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat					
	Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon kab/kota	21.713	33.707	36.500	32.676	23.826
	Perkiraan Permintaan Masyarakat	20.650	30.643	31.577	26.095	21.644
	Cakupan	105,15	110,00	115,59	125,22	110,08
20.	Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan					
	Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS	21	42	42	42	42
	Jumlah Faskes dan jejaring	84	85	96	96	96
	Persentase	25,00	49,41	43,75	43,75	43,75
21.	Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa					
	Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia	80.232	80.700	80.992	85.994	86.029

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
	Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga	83.412	84.171	84.673	85.915	86.029
	Cakupan	96,19	95,88	95,65	100,09	100
22.	Tahapan Keluarga Sejahtera					
	Keluarga Pra Sejahtera	19.361	18.213	17.780	15.014	14.963
	Keluarga Sejahtera I	17.889	17.437	17.072	23.209	22.277
	Keluarga Sejahtera II	42.982	45.050	46.140	47.771	48.789
	Total Keluarga	80.232	80.700	80.992	85.994	86.029
23.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	46,43	44,18	43,03	44,45	43,28
24.	Persentase remaja yang terkena infeksi menular seksual (IMS)	Na	Na	Na	Na	Na
25.	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui delapan fungsi keluarga	Na	Na	Na	Na	Na
26.	Cakupan keluarga yang mempunyai belita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Na	Na	Na	Na	Na
27.	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Na	Na	Na	Na	Na
28.	Pembiayaan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui APBD dan APBDes	Na	Na	Na	Na	Na

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, antara lain sebagai berikut:

- 1) Sepanjang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019, pemerintah daerah perlahan berhasil mengendalikan jumlah penduduk di Kabupaten Luwu. Pada Tahun 2015, penduduk Kabupaten Luwu naik 0,90% dibandingkan tahun sebelumnya, namun secara konsisten menurun meski cenderung lambat menjadi 0,82% pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan cukup luasnya cakupan program keluarga berencana di Kabupaten Luwu.
- 2) Rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun sekitar 2,96% (2018-2019) dan rata-rata jumlah anak tiap keluarga yang diukur melalui TFR sebesar 2,3 atau rata-rata keluarga memiliki lebih dari dua anak. Sementara jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan pemerintah adalah dua anak lebih baik.
- 3) Dari data yang disajikan mengenai dukungan perangkat daerah dalam kebijakan pengendalian penduduk stagnan dalam 5 tahun terakhir yaitu 3 perangkat daerah.

- 4) Jumlah Akseptor KB periode Tahun 2015-2019 mengalami penurunan yaitu dari 42.401 pasangan (82,85%) pada tahun 2015 menjadi 38.366 pasangan pada tahun 2019 (75,85)%.
- 5) Jumlah peserta KB aktif periode tahun 2015-2019 mengalami penurunan dari 34.560 pasangan (67,53%) menjadi 33.473 pasangan (66,18%).
- 6) Pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun di Tahun 2019 berjumlah 537 pasangan atau mencakup 1,06, angka ini menurun dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 1.158 atau dengan cakupan 2,26.
- 7) Jumlah PUS yang ber-KB tetapi tidak dilayani dari Tahun 2015-2017 mencapai 15,54%, dan pada Tahun 2018-2019 mengalami penurunan dengan cakupan masing-masing hanya 14,99% dan 14,27%.
- 8) Jumlah pasangan yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) sempat mengalami penurunan ditahun 2016 dan terus meningkat ditahun-tahun berikutnya hingga mencapai 24,50% ditahun 2019.
- 9) Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi tertinggi terjadi pada Tahun 2018 dengan nilai 85,23% sedangkan di Tahun 2019 nilainya 84,25%.
- 10) Jumlah anggota kelompok BKB ditahun 2016 merupakan cakupan terendah dengan nilai 56,01 dan tertinggi pada Tahun 2015 dengan nilai 62,32, hal ini tidak jauh berbeda dengan Tahun 2018 yang nilainya 62,20 kemudian sedikit turun di tahun 2019 dengan nilai 62,18.
- 11) Cakupan anggota bina keluarga remaja ber-KB mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Untuk 2 tahun terakhir yaitu 2018 dan 2019 terjadi sedikit penurunan dimana nilai cakupan pada Tahun 2018 mencapai 51,44% dan di tahun 2019 50,83%.
- 12) Dalam perkembangan anggota BKL ber-KB juga terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun dimana 2019 mencakup 37,08% yang ini terbilang masih rendah jika dibandingkan dengan Tahun 2016 yang mencapai 42,20%.
- 13) Persentase cakupan PPKS dalam 5 Tahun terakhir stagnan pada 9,09%, yaitu hanya 2 PPKS dari 22 kecamatan yang ada.
- 14) Cakupan remaja dalam PIK R/M di Tahun 2015-2017 stagnan pada 113,64% kemudian naik di Tahun 2018 dengan persentase 154,55% sampai di Tahun 2019. Artinya, dari 22 kecamatan yang ada, terdapat 34 PIK RM.

- 15) Cakupan jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk dalam 5 tahun terakhir stagnan mencapai angka maksimal 100%
- 16) PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber-KB Mandiri baru akan mulai dihitung pada Tahun 2020
- 17) Rasio petugas pembantu Pembina KB Desa dalam 5 tahun sudah maksimal yaitu mencapai 100%.
- 18) Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di faskes dan gudang alkon Kabupaten melebihi perkiraan permintaan masyarakat. Di Tahun 2019 ketersediaan dan perkiraan permintaan masyarakat menurun secara beriringan namun tetap ketersediaan masih lebih banyak dibandingkan permintaan masyarakat.
- 19) Cakupan faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR di 3 tahun terakhir stagnan pada 43,75%. Nilai ini menurun dari tahun sebelumnya yaitu 2016 yang mencapai 49,41%.
- 20) Penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa terus mengalami peningkatan dan mencapai nilai maksimal ditahun terakhir dengan persentase 100%.
- 21) Perkembangan tahapan keluarga sejahtera dari tahun ke tahun terbilang cukup baik ditandai dengan menurunnya nilai keluarga Pra Sejahtera dan meningkatnya keluarga Sejahtera I dan II. Dimana ditahun 2019 mencapai 48.789 Keluarga Sejahtera II, 22.277 Keluarga Sejahtera I, dan 14.963 keluarga Pra Sejahtera dengan total jumlah keluarga pada tahun yang sama sebanyak 86.029.
- 22) Keluarga Pra Sejahtera I di tahun terakhir adalah sebesar 43,28% dimana nilai ini merupakan nilai rata-rata dalam 5 tahun terakhir.

2.1.3.2.9 Perhubungan

Fasilitas perlengkapan jalan memberi informasi kepada pengguna jalan tentang peraturan dan petunjuk yang diperlukan untuk mencapai arus lalu lintas yang selamat, seragam dan beroperasi dengan efisien. Fasilitas perlengkapan jalan diantaranya adalah marka jalan; rambu-rambu lalu lintas; alat pemberi isyarat lalu lintas; dan fasilitas penerangan jalan. Layanan urusan perhubungan menjadi kewenangan Dinas Perhubungan dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
Tahun 2015 - 2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Penumpang Angkutan Umum					
	Jumlah penumpang Angkutan Umum	396.457	476.639	499.782	346.014	212.582
	Jumlah penumpang Pesawat udara	830	8.301	44.825	65.041	47.201
	Total Jumlah Penumpang	397.287	484.840	544.607	411.055	259.201
2.	Ijin Trayek					
	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	402	528	430	470	540
	Jumlah penduduk	350.218	353.277	356.305	359.209	362.027
	Rasio	0,0011	0,0015	0,0012	0,0013	0,0014
3.	Jumlah Uji kir angkutan umum	1.975	1.989	1.884	1.878	1,926
4.	Pelabuhan Laut/Terminal Bis					
	Jumlah pelabuhan laut	1	1	1	1	1
	Jumlah terminal bis	2	2	1	1	0
	Jumlah	3	3	2	2	1
5.	Layanan Angkutan Darat					
	Jumlah angkutan darat	31.062	34.968	37.795	41.124	45.287
	Jumlah penumpang angkutan darat	396.457	476.539	499.782	511.328	212.582
	Persentase	7,83	7,34	7,56	8,04	21,30
6.	Kepemilikan KIR angkutan umum					
	Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR	100	215	897	1.037	1.598
	Jumlah Penduduk	350.218	353.277	356.305	359.209	362.027
	Jumlah angkutan umum	2.075	2.204	2.781	2.915	3.524
	Persentase	4,80	9,70	32,20	35,60	45,35
7.	Pemasangan Rambu-rambu					
	Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n	81	157	223	332	450
	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Persentase	3,52	6,83	9,70	14,43	19,56
8.	Panjang jalan per jumlah kendaraan					
	Panjang Jalan (Km)	2.049,45	2.049,45	2.049,45	2.049,45	2.049,45
	Jumlah Kendaraan	31.062	34.968	37.795	41.124	45.287
	Rasio	0,066	0,059	0,054	0,049	0,045
9.	Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum					
	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (Orang)	396.457	476.539	499.782	346.014	212.582
	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (Ton)	221	301	386	204	167
10.	Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal					
	Jumlah Orang	397.287	484.840	544.607	411.055	259.783
	Jumlah Barang (kg)	221,9	312,01	426,25	518,6	449,46
11.	Layanan Urusan Perhubungan					
	Angkutan Darat	31.062	34.968	37.795	41.124	45.287
	Kepemilikan KIR Angkutan Umum	1.975	1.989	1.884	1.874	1.926
	Traffic Light	1	4	4	4	4

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
	Warning Light	8	10	10	10	10
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,066	0,059	0,054	0,049	0,045

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang perhubungan periode tahun 2015-2019, antara lain sebagai berikut:

- 1) Jumlah penumpang angkutan umum di Tahun 2015-2017 mengalami peningkatan hingga mencapai 544.607 penumpang. Sedangkan di Tahun 2018 dan 2019 menurun sampai mencapai angka terendah pada Tahun 2019 yaitu 259.201 penumpang. Hal ini juga dipengaruhi dengan meningkatnya jumlah kendaraan milik pribadi.
- 2) Ijin trayek yang dikeluarkan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dan jumlah tertinggi terjadi di Tahun 2016 yang mencapai 528, Tahun 2019 meningkat menjadi 540 ijin yang mencakup 0,0014 dari jumlah penduduk.
- 3) Jumlah uji KIR angkutan umum dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dan jumlah tertinggi terjadi di Tahun 2016 dengan jumlah 1.989 kendaraan.
- 4) Jumlah pelabuhan laut/terminal bus stagnan di Tahun 2015 dan 2016 masing-masing berjumlah 3, dalam 2016 dan 2017 masing-masing berjumlah 2, dan di Tahun terakhir terdapat penambahan 1 pelabuhan laut.
- 5) Persentase layanan angkutan darat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun sempat turun sedikit di Tahun 2016. Selebihnya meningkat dan pada Tahun 2019 mencapai persentase tertinggi 21,3%.
- 6) Persentase kepemilikan KIR terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan pada Tahun 2019 mencapai 43,53%.
- 7) Rasio pemasangan rambu-rambu masih terbilang minim namun terus terjadi peningkatan dari tahun ke tahun dalam 5 tahun terakhir dan pada tahun 2019 telah mencapai 19,56%.
- 8) Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dari tahun ke tahun mengalami penurunan dari 0,06 pada tahun 2015 menjadi 0,45 pada tahun 2019..
- 9) Terjadi penurunan jumlah orang yang terangkut angkutan umum yaitu dari 396.457 orang pada tahun 2015 menjadi 212.582 orang pada tahun 2019. Sedangkan terhadap barang mengalami fluktuasi dan kondisi tahun 2019 yang mencapai 167 ton lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 221 ton.

Jumlah orang/barang yang melalui dermaga/bandara/terminal sangat fluktuatif. Untuk jumlah orang sendiri menurun sangat jelas di Tahun 2019 dengan jumlah 259.783 orang dan untuk barang 449.46 ton.

- 10) Capaian angkutan darat dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, sedangkan untuk kepemilikan KIR angkutan umum terbilang fluktuatif , *traffic light* dalam menagalami peningkatan pada Tahun 2015 ke Tahun 2016 dan stagnan di 4 tahun berikutnya. Demikian halnya dengan *warning light*, sedangkan untuk panjang jalan per jumlah kendaraan mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

2.1.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika menjadi kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
Tahun 2015 - 2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat ditingkat kecamatan	Na	Na	Na	Na	Na
Cakupan layanan telekomunikasi	Na	Na	Na	Na	Na
Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon	Na	Na	Na	Na	Na
Proporsi rumah tangga dengan akses internet	49,00	50,00	50,00	50,00	40,00
Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Na	Na	Na	Na	Na
Jumlah Server yang dikelola	0	0	1	7	7
Jumlah Aplikasi Pemerintah yang dikembangkan	0	0	1	5	4
Cakupan Layanan Internet pada OPD yang dikelola	0	0	0	0	8
Cakupan Akses Layanan Internet di Desa dengan Baik	0	0	0	20%	40%
Tersedianya Website Pemerintah Daerah	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Persentase Website OPD	0	20,00	40,00	50,00	50,00
Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI)	0	0	40	50	50

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang komunikasi dan informatika periode tahun 2015-2019, antara lain sebagai berikut:

- 1) Sehubungan dengan semakin canggihnya perkembangan teknologi komunikasi, maka beberapa indikator yang menjadi tolok ukur kinerja yang ditetapkan di bidang komunikasi dan informatika sudah tidak relevan dan tidak tersedia datanya.
- 2) Proporsi rumah tangga dengan akses internet dari Tahun 2015 ke Tahun 2016 mengalami peningkatan dan stagnan sampai Tahun 2018 kemudian turun di Tahun 2019 dengan angka 40%.
- 3) Jumlah server yang dikelola mengalami peningkatan dan stagnan di dua tahun terakhir dengan jumlah 7 server.
- 4) Jumlah aplikasi pemerintah daerah yang dikembangkan dari Tahun 2016 ke Tahun 2018 mencakup 5 aplikasi, kemudian berkurang di Tahun 2019 menjadi 4 aplikasi.
- 5) Cakupan layanan internet pada OPD yang dikelola hanya terdapat pada Tahun 2019 dengan cakupan 8 OPD.
- 6) Akses layanan internet di desa meningkat dalam 2 tahun terakhir dengan persentase masing-masing 20% dan 40%
- 7) Website Pemerintah Daerah telah tersedia sejak lima tahun terakhir.
- 8) OPD yang memiliki *website* meningkat dalam 5 tahun terakhir dan untuk 2 tahun terakhir stagnan di 20%.
- 9) Indeks kematangan keamanan informasi (IKKI) meningkat dalam 3 tahun terakhir dan stagnan di 50% pada Tahun 2018 dan 2019

2.1.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah merupakan aktor utama penggerak perekonomian daerah, sehingga harus dibarengi dengan inovasi berbasis penelitian dan teknologi serta pengembangan pasar. Urusan koperasi, usaha kecil dan menengah menjadi kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan
Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2015 - 2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
	Koperasi Aktif					
	Jumlah Koperasi	412	413	413	424	423
	Jumlah Koperasi Aktif	201	206	127	187	210
	Persentase	48,81	49,95	30,71	44,10	44,60
	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah					
	Jumlah UMKM	18.080	18.117	18.183	18.406	19.250

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
	Jumlah UMKM Aktif	16.290	15.399	15.637	15.921	16.761
	Persentase	90,10	85,00	86,00	86,50	87,07
	Persentase UKM BPR/LKM Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Jumlah Produk Asli Daerah Hasil dari UKM	18	18	18	18	18

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah periode tahun 2015-2019, antara lain sebagai berikut:

- 1) Jumlah koperasi aktif di Kabupaten Luwu pada Tahun 2019 masih sangat rendah yaitu 44,60% dari koperasi yang ada.
- 2) Jumlah UMKM terus mengalami perkembangan, meskipun keaktifannya mengalami fluktuasi. Secara umum, UMKM aktif pada Tahun 2019 lebih besar dibandingkan pada Tahun 2015. Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kabupaten Luwu dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah.
- 3) Jumlah produk asli daerah hasil dari UKM stagnan dalam 5 tahun terakhir dengan jumlah 18 komoditi.

2.1.3.2.12 Penanaman Modal

Peran swasta melalui investasi sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Investasi harus mampu meningkatkan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Efisien dan efektifitas birokrasi, adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha, serta infrastruktur pendukung yang mencukupi merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan investasi daerah. Urusan penanaman modal menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
Tahun 2015 - 2019

No.	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang	7	7	7	7	7
2	Jenis dan Jumlah perusahaan asuransi	2	2	2	2	2
3	Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/ Hotel	13	14	14	14	14
4	Lama Proses perizinan	1-3 hari	1-15 hari	1-15 hari	1-15 hari	1-5 hari
5	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	3	3	4	4	4
6	Jumlah/ Macam Pajak	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7

No.	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
7	Jumlah/ Macam Retribusi	3	3	3	3	2
8	Presentase indeks kepuasan masyarakat	50,45	73,66	75,45	87,01	91,12
9	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	15,02	17,45	21,45	20,31	25,48
	Jumlah investor (PMDN dan PMA)	18	19	12	13	13

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang penanaman modal periode tahun 2015-2019, antara lain sebagai berikut:

- 1) Sejak tahun 2015 tidak ada penambahan jenis dan jumlah bank dan cabang serta perusahaan asuransi yang beroperasi di Kabupaten Luwu.
- 2) Pada Tahun 2015 terdapat 13 jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel dan sejak tahun 2016 bertambah menjadi 14.
- 3) Pada tahun 2015 lama proses perizinan hanya 1-13 hari dan diperpanjang lagi pada tahun-tahun berikutnya yaitu 1-15 hari.
- 4) Terdapat 4 Perda yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Luwu sejak tahun 2017.
- 5) Terdapat 7 jenis/macam pajak dan 2 jenis/macam retribusi yang diselenggarakan Pemda Kabupaten Luwu.
- 6) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan perizinan mencapai 90,12 pada tahun 2019.
- 7) Rasio daya serap juga meningkat dari tahun ke tahun yaitu dari 15,02 menjadi 25,48.
- 8) Realisasi investasi menurun secara signifikan, yaitu dari Rp.567,97 milyar dengan jumlah investor 18 perusahaan pada tahun 2015 menjadi 13 perusahaan dengan nilai investasi 16,69 milyar.

2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan dibidang kepemudaan dan olahraga merupakan salah satu unsur yang penting untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing. Oleh karena itu perlu disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya, mulai dari tingkat pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatannya. Urusan kepemudaan dan olah raga menjadi kewenangan Dinas Pemuda dan Olahraga dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
Tahun 2015 - 2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Organisasi Pemuda	20	25	30	30	30
Jumlah kegiatan kepemudaan	4	6	7	4	4
Jumlah kegiatan olahraga	6	5	6	2	2
Jumlah Organisasi Olahraga	15	15	15	15	15
Persentase Organisasi Olahraga yang Aktif	32,00	40,00	50,00	55,00	55,00
Cakupan Pembinaan Olahraga (cabang olahraga unggulan yang dibina)	2	2	5	3	3
Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi (jumlah cabang olah raga yang memiliki pelatih yang telah sertifikasi)	4	4	7	10	15
Cakupan Wasit yang Bersertifikasi	40	50	50	65	60
Jumlah atlet yang berprestasi	8	9	9	11	11
Jumlah Klub Olahraga	22	22	22	22	22
Jumlah Gedung/Lapangan Olahraga	2	1	1	1	1
Cakupan Pembinaan atlet muda	4	4	7	10	15
Jumlah prestasi olahraga	8	9	9	11	11
Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu Tahun	8	9	9	11	11

Sumber: Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang kepemudaan dan olahraga periode tahun 2015-2019, antara lain sebagai berikut:

- 1) Sejak tahun 2017, jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Luwu adalah 30 organisasi.
- 2) Kegiatan kepemudaan yang difasilitasi Pemda rata-rata 4 kegiatan setiap tahun.
- 3) Jumlah kegiatan olahraga yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu berkisar antara 2 s/d 6 event.
- 4) Sejak tahun 2015, terdapat 15 organisasi olahraga yang ada di Kabupaten Luwu, dari jumlah tersebut 55,00% diantaranya merupakan organisasi yang aktif.
- 5) Pada tahun 2019, terdapat 3 cabang olahraga unggulan yang dibina.
- 6) Sejak tahun 2019, semua cabang olahraga sudah memiliki pelatih yang telah tersertifikasi.
- 7) Pada tahun 2019, terdapat 60 wasit yang bersertifikat.
- 8) Terdapat 11 atlet yang berprestasi pada tahun 2019.
- 9) Terdapat 22 klub olah raga
- 10) Terdapat 1 gedung/lapangan olahraga yang ada di Kabupaten Luwu.
- 11) Pada tahun 2019, terdapat 15 atlet muda yang dibina.

2.1.3.2.14 Kebudayaan

Kebudayaan dapat didefinisikan sebagai sebuah hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum adat serta setiap kecakapan, dan kebiasaan. Urusan kebudayaan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.43
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	4	6	6	7	8
2.	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	3	3	4	5	7
3.	Total Benda, situs dan kawasan yang dimiliki daerah	3	3	4	5	7
4.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	4	6	6	7	8
5.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	4	6	6	7	8

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang kebudayaan periode tahun 2015-2019, antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan festival seni dan budaya pada tahun 2019 lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya yaitu mencapai 8 kali.
- 2) Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan meningkat dari 3 menjadi 7.
- 3) Karya budaya yang direvitalisasi dan dinventarisasi setiap tahunnya berkisar antara 4 s/d 8 karya budaya.
- 4) Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu meningkat dari 4 menjadi 8 cagar budaya.

2.1.3.2.15 Statistik

Statistik adalah suatu kumpulan data yang berbentuk angka dan disusun dalam bentuk diagram dan/atau tabel yang isinya menjelaskan mengenai masalah tertentu. Dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan, ketersediaan data dan informasi yang memadai dapat memberikan dasar dan arahan supaya

kebijakan dan program yang dicanangkan dapat tepat sasaran. Urusan statistik diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu, Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa seluruh indikator kinerja yang ditetapkan telah terpenuhi secara berkelanjutan selama periode tahun 2015-2019.

2.1.3.2.16 Persandian

Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu krypto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi. Urusan persandian diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.45
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah	3	3	3	4	6
3	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	75%	95%	100%	100%-	100%-

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang persandian periode tahun 2015-2019 antara lain sebagai berikut:

- 1) Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah pada tahun 2019 sudah mencapai 6 OPD.
- 2) Seluruh Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah sejak tahun 2017.

2.1.3.2.17 Perpustakaan

Perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar-mengajar. Perpustakaan yang terorganisasi secara baik dan sistematis, secara langsung atau pun tidak langsung dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar disekolah tempat perpustakaan tersebut berada. Urusan perpustakaan diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.46
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pengunjung Perpustakaan					
	Jumlah pengunjung perpustakaan milik pemerintah daerah (pemda)	27.395	30.157	31.685	25.789	26.694
	Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda	1.447.533	1.769.251	1.859.205	1.879.815	1.998.931
	Total	1.474.928	1.799.408	1.890.890	1.905.604	2.025.625
	Rata-Rata Pengunjung per Bulan (orang)	2.283	2.513	2.640	2.149	168.802
2.	Jumlah Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah (exp)	45.830	47.674	48.912	49.746	52.067
3.	Rasio perpustakaan per satuan penduduk					
	Jumlah Perpustakaan	513	520	525	525	529
	jumlah Penduduk	350.218	353.277	356.305	359.209	359.209
	Rasio	0,00146	0,00147	0,00147	0,00146	0,00147
4.	Pustakawan, tenaga teknis, dan penilai memiliki sertifikat (orang)					
	Jumlah putakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	3	3	3	3	7
	jumlah seluruh pustakawan tenaga teknis dan penilai	3	3	3	3	12
	Jumlah	6	6	6	6	19
5.	Jumlah Perpustakaan di Desa/Kelurahan yang dikelola	111	-	2	2	2
6.	Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan yang Berprestasi	1	1	1	0	0

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
7.	Jumlah Armada Perpustakaan Keliling yang dikelola	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang perpustakaan pada periode tahun 2015-2019 antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengunjung perpustakaan terus meningkat setiap tahun dan dalam tahun terakhir mencapai 2.025.625 total pengunjung dengan rata-rata perbulan 168.802 orang.
- 2) Jumlah koleksi buku yang tersedia juga meningkat tiap tahunnya hingga mencapai 52.067 di tahun 2019.
- 3) Rasio perpustakaan per satuan penduduk stagnan dalam 3 tahun terakhir dengan rasio 0,00147.
- 4) Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai memiliki sertifikat (orang) stagnan dengan jumlah 6 pada tahun 2015-2017 dan meningkat sampai tahun 2019 dengan jumlah 19.
- 5) Jumlah perpustakaan di Desa/Kelurahan yang disekolah stagnan dengan jumlah 2 dalam 3 tahun terakhir.
- 6) Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan yang berprestasi pada tahaun 2015-2017 masing-masing hanya ada 1 dan tidak ada dalam 2 tahun terakhir.
- 7) Jumlah Armada Perpustakaan Keliling yang dikelola stagnan dalam 5 tahun terakhir dengan jumlah masing-masing setiap tahun 5.

2.1.3.2.18 Kearsipan

Sistem pengarsipan atau sistem kearsipan adalah cara pengaturan atau penyimpanan arsip secara logis dan sistematis dengan memakai abjad, numerik/ nomor, huruf ataupun kombinasi huruf dan nomor sebagai identitas arsip yang terkait. Sistem ini dibuat untuk mempermudah dalam penyimpanan dan penemuan kembali arsip. Hal ini merupakan bagian dari pekerjaan kantor yang sangat penting. Informasi yang tertulis yang tepat harus tersedia apabila diperlukan, agar kantor dapat memberikan pelayanan yang efektif. Kearsipan juga sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan administrasi, karena arsip merupakan pusat ingatan bagi setiap kegiatan dalam suatu kantor. Urusan kearsipan diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.47
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
Tahun 2015 - 2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	25,45	45,12	52,45	75,15	85,12
Jumlah Arsip daerah yang dikelola	7 OPD	7 OPD	7 OPD	7 OPD	7 OPD
Jumlah SDM Pengelola Kearsipan	3	3	7	4	4
Jumlah Sarana Kearsipan Daerah	7	7	13	13	13

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang kearsipan pada periode tahun 2015-2019 antara lain sebagai berikut:

- 1) Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan hingga pada tahun terakhir mencapai 85,12%.
- 2) Jumlah Arsip daerah yang dikelola dalam 5 tahun terakhir berjumlah 7OPD.
- 3) Jumlah SDM pengelola kearsipan stagnan dan sempat mengalami peningkatan pada tahun 2017 dan kembali menurun dalam 2 tahun terakhir.
- 4) Jumlah Sarana Kearsipan Daerah stagnan pada tahun 2015 dan 2016 dengan jumlah 7 sarana dan meningkat serta stagnan dalam 3 tahun terakhir dengan jumlah 13 sarana.

2.1.3.3 Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.1.3.3.1 Pariwisata

Kabupaten Luwu merupakan salah satu kabupaten yang berpotensi untuk menjadi daerah utama tujuan wisata karena memiliki beragam obyek dan daya tarik wisata terutama wisata pantai, alam dan budaya serta ditunjang oleh sarana dan prasarana akomodasi yang memadai. Kegiatan pariwisata di Luwu cukup potensial untuk menunjang pendapatan dan pembangunan daerah. Layanan urusan pariwisata menjadi kewenangan Dinas Pariwisata dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.48
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	PAD sektor pariwisata (Rp)	50.160.000	50.350.000	50.160.000	149.975.000	10.585.000
2	Total PAD (Juta Rp)	78.558,30	95.564,29	109.172,77	106.865,74	119.000.000
3	PAD Sektor Pariwisata (%)	0,06	0,05	0,05	0,14	0.07
4	Kunjungan Wisata	987	10.423	12.436	12.573	2.960
5	Lama Kunjungan Wisata	1	1	1	1	1
6	Jumlah obyek wisata pantai yang terdata dan terdaftar	7	8	9	10	11
7	Jumlah Objek Wisata Sejarah yang terdata dan terdaftar	12	12	12	12	12
8	Jumlah objek wisata Budaya yang terdata dan terdaftar	2	2	2	2	2
9	Jumlah objek wisata seni yang terdata dan terdaftar	3	3	3	3	3
10	Jumlah objek wisata agrowisata yang terdata dan terdaftar	2	2	2	2	2
11	Jumlah objek wisata buatan yang terdata dan terdaftar	2	2	2	2	2
12	Jumlah objek wisata dikelola denga sistembagi hasil pemerintah setempat	3	3	3	3	3
13	Jumlah objek wisata yang dikelola oleh PEMDA	1	1	1	1	1
14	Jumlah objek wisata yang dikelola oleh swasta	2	2	2	3	3

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang kearsipan pada periode tahun 2015-2019 antara lain sebagai berikut:

- 1) PAD sektor pariwisata mengalami fluktuasi dalam 5 tahun terakhir dan PAD pariwisata tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan total Rp.149.975.000, tetapi menurun menjadi Rp.10.585.000 pada tahun 2019.
- 2) Jika dilihat dari total PAD Kabupaten Luwu pada tahun 2019 yaitu sejumlah Rp.119,00 milyar, PAD sektor pariwisata di atas berkontribusi sebesar 0,07%.
- 3) Wisatawan yang berkunjung ke objek-objek wisata daerah pada tahun 2019 tercatat hanya berjumlah 2.960 orang, menurun dari capaian tahun 2018 yang berjumlah 12.573 orang.
- 4) Lama kunjungan wisata stagnan pada 1 hari dalam 5 tahun terakhir.
- 5) Jumlah obyek wisata pantai terus menerus meningkat dalam 5 tahun terakhir sampai mencapai 11 obyek wisata pada tahun 2019, objek wisata sejarah

berjumlah 12 objek dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, objek wisata budaya juga stagnan dengan total 2 objek dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, objek wisata seni juga stagnan dengan total 3 dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, objek wisata agrowisata yang terdata dan terdaftar sejumlah 2 objek dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, serta obyek wisata buatan juga stagnan, dengan total 2 dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

- 6) Objek wisata dikelola dengan sistem bagi hasil pemerintah setempat tidak mengalami perubahan, dengan total 3 dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
- 7) Objek wisata yang dikelola oleh PEMDA juga stagnan, dengan total 1 dalam kurun waktu 5 tahun terakhir
- 8) Objek wisata yang dikelola oleh swasta berjumlah 2 objek pada tahun 2015-2017 dan meningkat menjadi 3 objek sejak tahun 2018.

2.1.3.3.2 Pertanian

Sektor pertanian yang berkembang sangat bervariasi mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Tanaman pangan dan palawija merupakan salah satu bidang yang sangat strategis dan berkembang dengan baik. Sektor pertanian yang terdiri dari sub sektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan, memiliki peranan yang cukup penting dalam perekonomian Kabupaten Luwu, diantaranya adalah penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Luwu, penyerapan tenaga kerja yang besar, serta pembangunan ekonomi daerah. Urusan pertanian diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dengan capaian indikator kinerja telah dijelaskan pada bagian terdahulu. Sebagai tambahan, dapat dikemukakan bahwa cakupan bina kelompok petani pada tahun 2019 hanya mencapai 5,30%.

2.1.3.3.3 Perdagangan

Perdagangan adalah sektor jasa yang menunjang kegiatan ekonomi antaranggota masyarakat. Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang penting dalam perekonomian daerah. Penyelenggaraan urusan perdagangan oleh Dinas Perdagangan mencatat bahwa ekspor bersih perdagangan Kabupaten Luwu tahun 2019 adalah Rp.38.611.486,07.

2.1.3.3.4 Perindustrian

Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh, pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. Urusan perindustrian diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan capaian indikator pada periode tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Capaian				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertumbuhan industri	Na	Na	Na	6,09	Na
2	Cakupan bina kelompok pengrajin	Na	Na	Na	35,00	Na
3	Jumlah kemasan lokal yang tercipta	Na	Na	Na	20	Na

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Mengah Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian atas indikator yang dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang perindustrian hanya tersedia untuk tahun 2018, yaitu pertumbuhan industri sebesar 6,09 persen, cakupan bina kelompok pengrajin mencapai 35,00 persen, dan jumlah kemasan lokal yang tercipta sejumlah 20 kemasan.

2.1.3.3.5 Transmigrasi

Urusan transmigrasi diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
Tahun 2015 - 2019

No	Transmigrasi	Capaian Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Transmigran swakarsa	50 KK	50 KK	50 KK	50 KK	50 KK
2	Luas Lahan Transmigrasi yang dikelola	101 Ha	102 Ha	103 Ha	104 Ha	104 Ha
3	Luas Areal Lahan Transmigrasi yang disiapkan	251 Ha	252 Ha	253 Ha	254Ha	254Ha

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang transmigrasi pada periode tahun 2015-2019 antara lain sebagai berikut:

- 1) Setiap tahun terdapat 50 KK transmigran swakarsa.
- 2) Luas lahan transmigrasi yang dikelola meningkat dari 101 Ha menjadi 104 Ha.
- 3) Areal lahan transmigrasi yang disiapkan saat ini adalah 254Ha.

2.1.3.3.6 Kelautan dan Perikanan

Sumber daya perikanan dan kelautan merupakan aset penting yang dimiliki oleh Indonesia, demikian juga dengan Kabupaten Luwu. Sumber daya perikanan dengan kekayaan hayatinya akan memberikan suatu nilai kesejahteraan bagi masyarakat pesisir, tentunya dengan sistem pengelolaan dan pemanfaatan yang benar. Urusan perikanan diselenggarakan oleh Dinas Perikanan dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.51
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
Tahun 2015 - 2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Produksi Perikanan					
	Produksi perikanan (ton)	667.410,50	537.487,00	648.650,33	628.748,61	644.357,48
	Target Daerah (Ton)	597.741,00	624.845,00	655.427,00	687.531,00	653.154,45
	Persentase Produksi Perikanan	111,66	86,02	98,97	91,45	98,65
2.	Konsumsi Ikan					
	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)	48,05	50,32	52,00	53,04	53,57
	Target Daerah (Kg)	48,81	49,29	49,79	49,79	49,87
	Konsumsi ikan	98,44	102,09	104,44	106,53	107,42
3.	Cakupan bina kelompok nelayan					
	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda tahun n (kelompok)	41	32	15	8	9
	Jumlah kelompok nelayan	187	204	224	232	241

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
	Cakupan bina kelompok nelayan	58,82	69,61	70,09	71,12	72,20
	Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	11,98	11,00	10,83	10,68	10,54
	Bantuan Alat Tangkap	50	33	15	25	38
4.	Produksi perikanan kelompok nelayan					
	Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan	1.496,00	1.632,00	1.792,00	1.856,00	11.329,44
	Jumlah produksi ikan di daerah	12.486,20	14.842,80	16.552,70	17.379,30	17.429,90
	Produksi perikanan kelompok nelayan	11,98	11,00	10,83	10,68	65,00
5.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman					
	Jumlah tangkapan ikan	12.486,20	14.842,80	16.552,70	17.379,30	17.429,90
	80% dari tangkapan maksimum lestari	Na	Na	Na	Na	Na
	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Na	Na	Na	Na	Na
6.	Rasio kawasan lindung terhadap total luas perairan teritorial					
	Kawasan lindung perairan	Na	Na	Na	Na	Na
	Total luas perairan teritorial	Na	Na	Na	Na	Na
	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	Na	Na	Na	Na	Na
7.	Nilai Tukar Nelayan					
	Indeks yang diterima nelayan	Na	Na	Na	Na	Na
	Indeks yang dibayar nelayan	Na	Na	Na	Na	Na
	Nilai tukar nelayan	Na	Na	Na	Na	Na

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang kelautan dan perikanan pada periode tahun 2015-2019 antara lain sebagai berikut:

- 1) Produksi nelayan sangat fluktuatif dalam 5 tahun terakhir dan di tahun terakhir tidak mencapai target yang ditetapkan, yaitu 644.357,48 ton, masih lebih rendah dibanding tahun 2015 yang mencapai 667.410,50 ton.
- 2) Konsumsi ikan meningkat secara terus menerus dalam 5 tahun terakhir dan mencapai 107,42 Kg di tahun 2019 atau 107,42% dari target yang ditetapkan.
- 3) Cakupan bina kelompok nelayan juga meningkat tiap tahunnya dimana tahun terakhir mencapai 72,20%.
- 4) Produksi perikanan kelompok nelayan sempat mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2017 kemudian kembali mengalami peningkatan di tahun selanjutnya hingga pada tahun 2019 mencapai 65,00% dari total produksi perikanan.

- 5) Jumlah tangkapan ikan pada tahun 2015 sebanyak 12.486,20 ton, meningkat menjadi 17.429,90 ton pada tahun 2019.

2.1.3.4 Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.4.1 Perencanaan Pembangunan

Layanan urusan perencanaan pembangunan diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah dengan capaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.52
Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan
Bidang Perencanaan Pembangunan Tahun 2015 - 2019

No	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	52,75	52,45	53,69	100,00	100,00
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	52,75	52,45	53,69	100,00	100,00
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	52,75	52,45	53,69	100,00	100,00

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian seluruh indikator yang ditetapkan telah dipenuhi secara maksimal.

2.1.3.4.2 Keuangan

Layanan urusan keuangan menjadi kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Badan Pendapatan Daerah dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.53
Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
Tahun 2015 - 2019

No	Keuangan	Capaian Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
3	Persentase SILPA terhadap APBD	11,67%	3,95%	2,55%	1,31%	2,18%
4	Persentase program/ kegiatan yang tidak terlaksana	0,35%	0,54%	0,20%	0,20%	0,20%

No	Keuangan	Capaian Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
5	Persentase belanja pendidikan	36,92%	28,58%	25,76%	26,16%	27,13%
6	Persentase belanja kesehatan	11,20%	13,46%	13,41%	14,54%	14,71%
7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung (%)	47,36/52,64	50,83/49,17	43,03/56,97	41,73/58,27	45,53/54,47
8	Persentase Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	0,33%	0,34%	0,20%	0,22%	0,20%
9	Penetapan APBD Pokok	Desember 2014	Desember 2015	Desember 2016	Desember 2017	Desember 2018
10	Penetapan APBD Perubahan	September 2015	September 2016	Oktober 2017	Oktober 2018	September 2019

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang keuangan pada periode tahun 2015-2019 antara lain sebagai berikut:

- 1) Persentase SILPA terhadap APBD sebesar 1,31% pada tahun 2018 merupakan nilai terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sedangkan tahun 2019 adalah sebesar 2,18%.
- 2) Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana di 3 tahun terakhir stagnan di 0,20%
- 3) Alokasi belanja pendidikan dari tahun 2015-2017 mengalami penurunan dari 36,92% menjadi 25,76%, tetapi meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi sebesar 27,13 persen.
- 4) Alokasi belanja kesehatan dari tahun ketahun semakin meningkat dari tahun 2015 sampai tahun 2019 yaitu dari 11,20% menjadi 14,71%.
- 5) Pada tahun 2016, belanja langsung lebih tinggi dibanding belanja tidak langsung yaitu 50,83% berbanding 49,17%.
- 6) Alokasi Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa menurun dari 0,34% pada tahun 2016 menjadi 0,20% pada tahun 2019.
- 7) Penetapan APBD Pokok dan APBD Perubahan selalu dilakukan tepat waktu.

2.1.3.4.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan menjadi diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.54
Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan
Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2015 - 2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	22.292	16.185	16.345	11.356	11.275
2.	Pendidikan dan Pelatihan Struktural					
	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	35	101	91	92	95
	Jumlah Total Jabatan	538	591	728	696	662
	Persentase	6,51	17,09	12,51	13,21	14,35
3.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintahan	34	35	40	29	38
4.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Na	Na	Na	Na	215
5.	Persentase penempatan SDM sesuai kompetensi	Na	Na	Na	Na	0,25
6.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah					
7.	Pendidikan dan Pelatihan Formal					
	Cakupan PNS yang telah lulus diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis dan diklat managerial	Na	Na	Na	Na	Na
	Persentase ASN dengan Predikat kinerja baik	Na	Na	Na	Na	Na
	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan formal (orang)	92	74	83	45	36
	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan non formal (orang)	1.011	91	92	209	145
	Jumlah ASN (Orang)	6.896	6.707	5.981	5.778	6.629
	Persentase	1,33	1,10	1,38	0,78	0,54

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan pada periode tahun 2015-2019 antara lain sebagai berikut:

- 1) Pendidikan dan latihan merupakan salah satu bentuk pembinaan terhadap PNS untuk menambah pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat mengikuti perkembangan, perubahan sistem dan teknologi dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. Selain itu pendidikan dan pelatihan mempunyai berbagai manfaat karier jangka panjang yang membantu pegawai untuk bertanggung jawab lebih besar di waktu yang akan datang. Data yang ada menunjukkan bahwa pelatihan pegawai pada tahun 2019 mencapai 11.275 jam pelajaran. Hal ini merupakan angka terendah sejak tahun 2015.

- 2) Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural di tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup drastis yang nilainya dari 35 kemudian mencapai 101 ditahun berikutnya. Kemudian di tahun 2017 terjadi penurunan sampai kepada 91 dan kembali naik sedikit demi sedikit ditahun berikutnya dan terakhir mencapai 95 ditahun 2019.
- 3) Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintahan mulai tahun 2015-2017 mengalami peningkatan hingga mencapai angka 40 kemudian turun di tahun 2018 dengan angka 29, selanjutnya kembali naik ditahun 2019 dengan angka 38.
- 4) Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan formal pada tahun 2019 adalah 36 orang, merupakan terendah selama lima tahun terakhir. Sedangkan yang mengikuti pendidikan non formal tercatat sejumlah 145 orang pada tahun 2019.

2.1.3.4.4 Pengawasan

Urusan pengawasan diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.55
Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan
Tahun 2015 - 2019

No	Pengawasan	Capaian Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase tindak lanjut temuan BPK	86.20	70.17	92.71	69.50	94,46
2	Persentase tindak lanjut temuan BPKP	75.00	85.00	90.00	100,00	100,00
3	Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	75.00	85.00	90.00	100,00	100,00
4	Persentase pelanggaran pegawai yang diproses	75.00	85.00	90.00	100,00	100,00
5	Jumlah temuan BPK	20	15	11	19	12

Sumber: Inspektorat Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang pengawasan pada periode tahun 2015-2019 antara lain sebagai berikut:

- 1) Tindak lanjut terhadap temuan BPK dari tahun ke tahun berfluktuasi, namun demikian capaian tahun 2019 sebesar 94,46% merupakan angka tertinggi yang pernah dicapai.
- 2) Tindak lanjut temuan BPKP terjadi peningkatan sejak tahun 2015 dengan nilai 75,00% dan mencapai 100,00 ditahun 2018 sampai 2019.
- 3) Tindak lanjut temuan inspektorat provinsi terjadi peningkatan mulai dari tahun 2015 dengan nilai 75,00% dan mencapai 100,00% ditahun 2018 sampai di 2019.

- 4) Pelanggaran pegawai yang diproses mengalami peningkatan dari tahun 2015 dengan nilai 75,00 dan mencapai 100.00 ditahun 2018 sampai di 2019.
- 5) Jumlah temuan BPK pada tahun 2019 lebih kecil disbanding tahun sebelumnya yaitu 12 kasus berbanding 19 kasus.

2.1.3.4.5 Sekretariat DPRD

Capaian indikator yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.56
Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat DPRD
Tahun 2015 - 2019

No	Sekretariat Dewan	Capaian Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	103	152	119	70	72
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan	117	170	137	197	185
3	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	98.5%	95.6%	97%	94%	95%

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian kinerja Sekretariat DPRD pada periode tahun 2015-2019 antara lain sebagai berikut:

- 1) Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD telah tersedia setiap tahun. Adapun realisasi dari rencana kerja tersebut adalah 72 kegiatan pada tahun 2019.
- 2) Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan DPRD telah tersusun dan terintegrasi setiap tahun meliputi 185 program pada tahun 2019.
Dari tahun ke tahun Mengalami Fluktuasi hingga ditahun terakhir mencapai 185.
- 3) Program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD telah dilaksanakan dengan capaian 95,00%.

2.1.3.4.6 Sekertariat Daerah

Capaian indikator yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.57
Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah
Tahun 2015 - 2019

No	Sekretariat Daerah	Capaian Tahun				2019
		2015	2016	2017	2018	
1	Persentase Penyelesaian Tapal batas antar kecamatan	50%	50%	60%	60%	60%
2	Jumlah analisa berita dan kebutuhan publik yang disampaikan kepada kepala daerah	225	238	248	250	252
3	Jumlah UMKM yang memperoleh akses ke lembaga keuangan	Na	Na	Na	Na	1.067
4	Persentase Potensi Sumber Daya Alam yang telah dimanfaatkan	Na	Na	Na	Na	90%
5	Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Tender	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Aset Sekertariat yang sudah direkonsiliasi	Na	Na	Na	Na	90%
7	Persentase paket tender yang diselesaikan tepat waktu	85%	85,20%	85,25%	87,21%	87,21%
8	Persentase besaran efisiensi nilai kontrak terhadap nilai pagu	4%	4%	4%	4%	4%
9	Nilai LPPD	Na	Na	Na	2.771	2.975
10	Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi dalam kurun waktu tahun yang sama	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase pejabat yang menyampaikan LHKPN	25%	25%	25%	25%	80%
12	Persentase ketersediaan analisis jabatan	100%	100%	100%	100%	100%
13	Persentase RKA unit kerja lingkup sekretariat daerah yang diverifikasi	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian kinerja Sekretariat Daerah pada periode tahun 2015-2019 antara lain sebagai berikut:

- 1) Persentase penyelesaian tapal batas antar kecamatan dari tahun 2015 sampai tahun 2016 hanya mencapai 50 persen penyelesaiannya dan pada tahun 2016 sampai tahun 2019 naik 10% atau menjadi 60 persen.
- 2) Jumlah analisis yang dilakukan terhadap berita dan kebutuhan publik yang disampaikan kepada kepala daerah dari tahun ketahun semakin meningkat yaitu dari 225 kali menjadi 252 kali.

- 3) Jumlah UMKM yang difasilitasi untuk memperoleh akses ke lembaga keuangan pada tahun 2019 adalah 1.067 Unit usaha.
- 4) Berdasarkan kajian yang dilakukan, telah diperoleh data pemanfaatan potensi sumber daya alam Kabupaten Luwu sebesar 90%.
- 5) Ketersediaan sistem informasi tender dari tahun 2015 sampai tahun 2019 telah mencapai 100 persen.
- 6) Asset Sekertariat Daerah yang sudah direkonsiliasi pada tahun 2019 telah mencapai 90%.
- 7) Paket tender yang diselesaikan tepat waktu dari tahun ke tahun semakin meningkat yaitu dari 85% pada tahun 2015 menjadi 87,21% pada tahun 2019.
- 8) Besaran efisiensi nilai kontrak dari nilai pagu dari tahun 2015 sampai tahun 2019 rata-rata sebesar 4%.
- 9) Nilai LPPD Kabupaten Luwu pada tahun 2019 adalah 2.975.
- 10) Fasilitasi terhadap pembentukan produk hukum daerah dari tahun 2015 sampai tahun 2019 mencapai 100%
- 11) Pejabat yang menyampaikan Laporan harta kekayaan penyelenggaraan Negara (LHKPN) telah mencapai 80% pada tahun 2019.
- 12) Ketersediaan dokumen analisis jabatan dari 5 tahun terakhir mencapai 100%
- 13) Rencana Kerja Anggaran (RKA) unit kerja lingkup Sekertariat Daerah telah dilakukan verifikasi sesuai ketentuan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

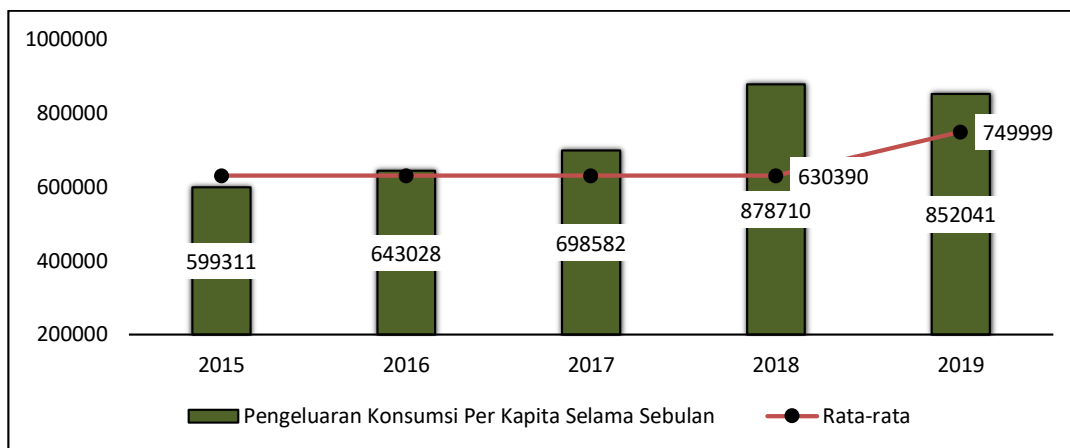
Perkembangan aspek daya saing daerah digambarkan dalam indikator-indikator sebagai berikut:

2.1.4.1 Pengeluaran Konsumsi Perkapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita menggambarkan kemampuan ekonomi penduduk suatu wilayah. Konsumsi masyarakat yang tinggi menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di Indonesia, hampir seluruh daerah masih mengandalkan pengeluaran konsumsi rumah tangga sebagai penggerak perekonomian. Nilai rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita sebulan di Kabupaten Luwu mencapai Rp.852.041,00 pada tahun 2019. Nilai ini terus meningkat sejak tahun 2014 yang hanya sebesar Rp.580.638. Meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga terutama dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan rumah tangga, kebijakan

pemerintah seperti kebijakan menaikkan pajak juga dapat mempengaruhi pengeluaran konsumsi rumah tangga. secara ringkas perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.36
Grafik Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Selama Sebulan Tahun 2015 - 2019

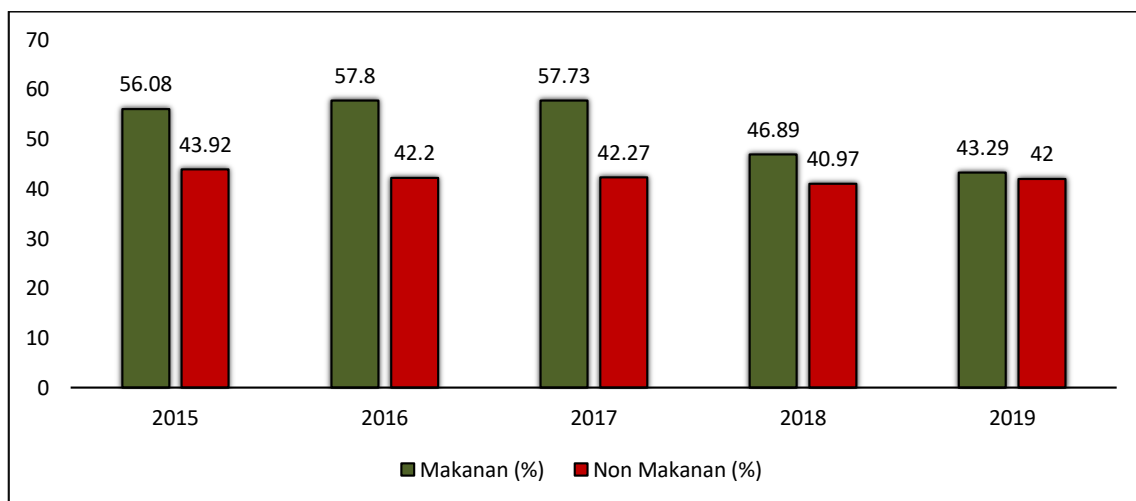


Sumber: Badan Pusat Statistik

2.1.4.2 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita

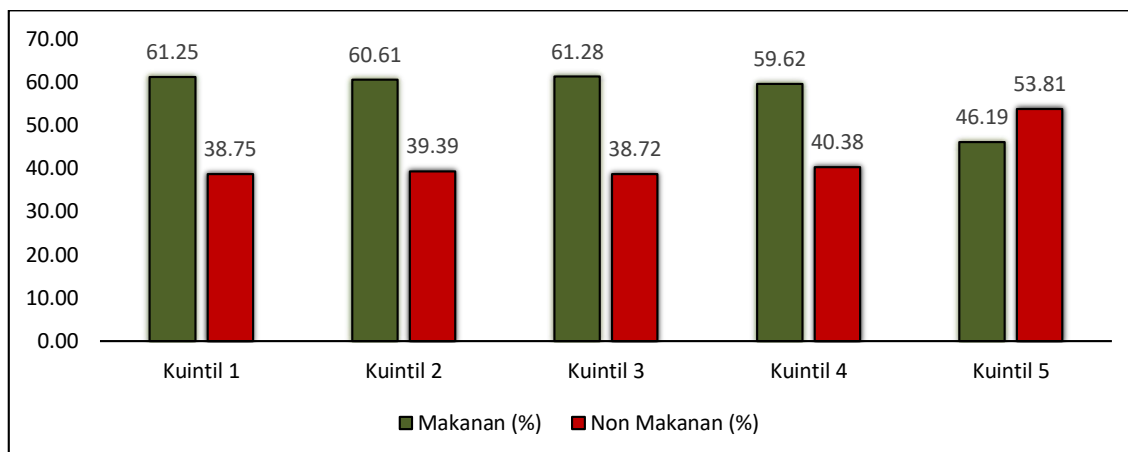
Pola konsumsi rumah tangga menggambarkan daya saing sumber daya manusia. Manusia yang sehat memiliki kesempatan lebih baik untuk berusaha dan meningkatkan kesejahteraannya, disisi lain mereka yang tidak sehat cenderung memiliki produktivitas yang rendah sehingga cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang juga rendah. Jika dilihat dari pola konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Luwu, sebagian besar masyarakat masih tergolong rawan pangan. Hal ini tercermin dari pengeluaran konsumsi pangan yang masih memiliki kontribusi terbesar dalam pengeluaran. Pada tahun 2019, pengeluaran masyarakat untuk konsumsi pangan mencapai 43,29%. Jika diperhatikan lebih rinci, kelompok masyarakat yang tergolong rawan pangan adalah mereka yang berada pada kelompok pengeluaran kurang dari 1 juta per bulan. Untuk lebih jelas, pola pengeluaran konsumsi masyarakat dan perkembangannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.37
Grafik Pola Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Tahun 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.38
Grafik Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Menurut Barang dan Kuintil Pengeluaran Tahun 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah idealnya merupakan hasil evaluasi kinerja program dan kegiatan yang telah dilakukan, yang memuat realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2019 belum sepenuhnya disusun sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017, khususnya terhadap target kinerja yang merupakan objek evaluasi. Oleh karena itu evaluasi program dan kegiatan RKPD tahun lalu yang dimuat dalam dokumen ini hanya dilakukan terhadap realisasi kinerja keuangan.. Pada Tahun 2019 secara garis besar realisasi kinerja keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Total Program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Luwu pada Tahun 2019 adalah sebanyak 473 Program yang terdiri atas 2503 kegiatan, jumlah ini sudah termasuk Program dan Kegiatan yang sama yang dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah seperti contoh Program dan Kegiatan Administrasi Perkantoran.
2. Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar dilaksanakan 113 Program dengan 1020 Kegiatan.
3. Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Dasar dilaksanakan 124 Program dengan 577 Kegiatan.
4. Pada Urusan Pilihan dilaksanakan 33 Program dengan 130 Kegiatan.
5. Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang dilaksanakan 203 Program dengan 776 Kegiatan.

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan RKPD tahun lalu selengkapnya disajikan dalam **Tabel** berikut ini.

Tabel 2.58
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2019

No	Perangkat Daerah	Capaian Keuangan Kegiatan			Capaian Keuangan Program		
		< 100%	100 %	> 100 %	< 100%	100 %	> 100 %
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	58	6	28	15	1	0
2	DINAS KESEHATAN	102	5	0	17	1	0
3	RSUD BATARA GURU BELOPA	44	0	12	3	0	3
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	71	3	6	14	0	1
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	162	285	4	21	0	0
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN LINMAS	31	1	1	8	0	1
7	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	29	0	28	8	0	0
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	45	1	0	5	0	0
9	DINAS SOSIAL	74	4	1	9	1	0
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11	3	5	3	0	2
JUMLAH		627	308	85	103	3	7
TOTAL URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		1020			113		
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR							
11	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	22	5	7	12	1	1
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	75	9	0	6	1	0
13	DINAS KETAHANAN PANGAN	25	0	20	4	0	5
14	DINAS PERTANAHAN	17	0	16	5	0	2
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	20	2	8	5	0	3
16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	20	4	0	4	0	0
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	28	2	0	7	0	0
18	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	61	2	2	9	0	0
19	DINAS PERHUBUNGAN	44	1	7	11	1	1
20	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, STATISTISTIK DAN PERSANDIAN	23	3	0	7	2	0
21	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN	19	5	0	8	0	0
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	21	1	4	8	0	0
23	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	23	1	0	9	0	1
24	DINAS PERPUSTAKAAN	70	4	6	11	0	0
JUMLAH		468	39	70	106	5	13

No	Perangkat Daerah	Capaian Keuangan Kegiatan			Capaian Keuangan Program		
		< 100%	100 %	> 100 %	< 100%	100 %	> 100 %
1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		577			124		
URUSAN PILIHAN							
25	DINAS PERIKANAN	20	7	0	5	2	0
26	DINAS PARIWISATA	29	0	0	7	0	0
27	DINAS PERTANIAN	46	0	3	12	0	1
28	DINAS PERDAGANGAN	19	6	0	5	1	0
JUMLAH		114	13	3	29	3	1
TOTAL URUSAN PILIHAN		130			33		
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG							
29	SEKERTARIAT DAERAH	90	1	0	21	0	0
30	SEKERTARIAT DPRD	47	0	6	4	0	0
31	KECAMATAN BUA	4	16	0	2	5	0
32	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE	5	7	1	2	3	0
33	KECAMATAN WALENRANG TIMUR	8	9	0	2	4	0
34	KECAMATAN LAMASI TIMUR	1	15	0	0	3	0
35	KECAMATAN PONRANG SELATAN	3	15	0	1	4	0
36	KECAMATAN BUPON	10	12	0	3	4	0
37	KECAMATAN WALENRANG BARAT	7	8	0	2	3	0
38	KECAMATAN WALENRANG UTARA	6	9	0	2	3	0
39	KECAMATAN LAMASI	7	14	0	2	4	0
40	KECAMATAN KAMANRE	6	14	0	3	4	0
41	KECAMATAN BAJO BARAT	4	11	0	1	5	0
42	KECAMATAN BELOPA	15	7	0	6	1	0
43	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN	10	6	4	5	2	3
44	KECAMATAN LAROMPONG	11	6	0	4	3	0
45	KECAMATAN SULI	11	9	0	6	2	0
46	KECAMATAN SULI BARAT	5	12	0	4	3	0
47	KECAMATAN BELOPA UTARA	7	11	0	4	2	0
48	KECAMATAN BAJO	6	13	0	3	6	0
49	KECAMATAN LATIMOJONG	13	5	0	4	1	0
50	KECAMATAN PONRANG	8	14	0	3	6	0
51	KECAMATAN WALENRANG	1	17	0	1	6	0

No	Perangkat Daerah	Capaian Keuangan Kegiatan			Capaian Keuangan Program		
		< 100%	100 %	> 100 %	< 100%	100 %	> 100 %
1	2	3	4	5	6	7	8
52	KECAMATAN BASTEM UTARA	5	12	0	2	5	0
53	INSPEKTORAT	41	1	0	6	0	0
54	BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG DAERAH	36	3	3	5	1	2
55	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	54	1	0	6	1	0
56	BADAN PENDAPATAN DAERAH	46	1	0	7	0	1
57	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	43	3	0	5	0	0
JUMLAH		510	252	14	116	81	6
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		776			203		
TOTAL URUSAN		2503			473		

Mengingat tahun 2020 adalah tahun pertama pelaksanaan RPJMD periode 2019-2024, maka untuk realisasi program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD disajikan pada Lampiran I.

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Suatu perencanaan yang baik, adalah yang dapat merumuskan permasalahan dan dimana permasalahan itu berada karena tujuan mendasar dari pembangunan daerah adalah untuk mengatasi berbagai permasalahan di daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dilakukan.

Perumusan permasalahan pembangunan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi bagaimana keberhasilan maupun kegagalan dalam kinerja pembangunan pada masa lalu, termasuk hubungan dengan kemampuan manajemen pemerintah dalam memberdayakan kewenangan yang dimiliki. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan kepada seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah maupun sekaligus terhadap beberapa urusan, yang bertujuan untuk memetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Penuntasan permasalahan pembangunan merupakan salah satu esensi dari tujuan pembangunan daerah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan tahap demi tahap. Oleh karena itu, permasalahan pembangunan menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan setiap arah kebijakan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks, baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah. Dengan kebijakan yang tepat otomatis akan menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Untuk itu, hasil pengendalian dan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya sangat penting untuk memahami sejauhmana kebijakan pembangunan di masa lalu mampu memecahkan berbagai permasalahan.

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD ditahun rencana serta prioritas lain dari Kebijakan Nasional/Provinsi yang bersifat mandatori. Secara umum permasalahan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Luwu tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Belum optimalnya tata kelola dan tata laksana pemerintahan daerah

Pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang mengaplikasikan prinsip-prinsip *clean and good governance*, dimana antara lain prinsipnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah Kabupaten Luwu dalam penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah pada tahun 2019 masih mendapatkan nilai CC atau predikat “kurang” dari Kementerian PAN dan RB, yang mengindikasikan bahwa akuntabilitas kinerja masih rendah. Belum maksimalnya nilai akuntabilitas ini disebabkan kualitas laporan yang masih rendah, penyelesaian laporan yang belum tepat waktu, laporan yang belum taat azas dan indikator kinerja utama yang belum ditetapkan secara jelas dan terukur. Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa kualitas perencanaan belum baik, kemudian belum optimalnya kualitas pengukuran kinerja, dan masih lemahnya Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah belum dapat diukur karena survey terkait hal tersebut belum dilakukan secara ilmiah dengan sample yang sesuai. Perangkat daerah yang sudah melaksanakan survey secara mandiri baru Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Dibalik sebuah sistem tentu ada manusia yang harus melaksanakan kebijakan dengan baik. Untuk Kabupaten Luwu, sistem merit belum maksimal dijalankan dalam pembinaan dan pengembangan pegawai. Hal ini menyebabkan masih rendahnya kompetensi aparatur dalam melaksanakan fungsi-fungsi utama pemerintahan yaitu pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Aparatur sipil negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal setiap tahunnya juga sedikit. Dari jumlah PNS yang mencapai \pm 6.000 orang, yang memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kurang dari 100 orang setiap tahunnya. Dari aspek pejabat yang telah menduduki jabatan dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jabatannya, tidak tersedia

data. Selanjutnya, juga tidak diketahui seberapa besar kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki pejabat dengan jabatan yang didudukinya.

Dari aspek pengelolaan keuangan daerah, pertumbuhan PAD Kabupaten Luwu tahun 2019 hanya sebesar 6,46%, dengan nilai realisasi sebesar Rp113,77 milyar. Jumlah tersebut baru mencapai 7,85% dari total pendapatan daerah.

2. Kualitas pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan belum maksimal

Sumber daya manusia adalah aset yang mempunyai andil besar terhadap kemajuan pelaksanaan pembangunan daerah dimana manusia sebagai subjek pembangunan harus memiliki kualifikasi pada bidang tertentu dalam meningkatkan segala bentuk pencapaian pembangunan pada seluruh aspek kehidupan. Daya saing sumber daya manusia menunjukkan bagaimana kualitas masyarakat Kabupaten Luwu dapat berperan di berbagai sektor penting dalam pembangunan daerah. Hal yang terpenting dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia diwujudkan melalui kesejahteraan masyarakat.

Perwujudan kesejahteraan masyarakat pada umumnya ditandai dengan kemampuan masyarakat mengakses pelayanan dasar terutama pendidikan dan kesehatan. Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan, dalam hal ini adalah layanan pendidikan dan layanan kesehatan.

Kesejahteraan masyarakat secara umum dihubungkan dengan bagaimana kualitas pendidikan di suatu wilayah. Begitu juga dengan Kabupaten Luwu, belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan memiliki dampak yang tinggi terhadap rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia. Permasalahan dalam bidang pendidikan antara lain dapat dilihat dengan rendahnya angka rata-rata lama sekolah. Faktor penyebab dari hal tersebut antara lain adalah belum optimalnya sarana dan prasarana pendidikan, misalnya kondisi ruang kelas serta partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anak sesuai usia. RLS di Kabupaten Luwu pada tahun 2019 adalah 8,15 tahun, yang berarti bahwa penduduk Kabupaten Luwu rata-rata mengenyam jenjang pendidikan sekolah sampai dengan kelas 2 SMP, masih jauh dari tercapainya program pemerintah yaitu wajib belajar 12 tahun.

Kesehatan merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengingat masyarakat memerlukan kondisi tersebut agar dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat dengan menyediakan pusat kesehatan masyarakat pada tingkat Kecamatan, menyeimbangkan ketersediaan tenaga medis, meningkatkan kualifikasi tenaga medis, hingga mengefisiensikan pelayanan kesehatan terhadap pasien. Disamping itu, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan perlu mendapat perhatian. Kurang berhasilnya pembangunan di bidang kesehatan dapat terlihat dari belum disiplinnya masyarakat dalam pencegahan penularan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan melaksanakan protokol kesehatan serta masih adanya *stunting* dikalangan masyarakat Kabupaten Luwu.

Selanjutnya, IPM Kabupaten Luwu berada pada posisi ke-9 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, bahkan masih di bawah IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah mengingat angka IPM yang cukup rendah pada lingkup provinsi.

3. Kualitas dan ketersediaan infrastruktur masih rendah.

Untuk mewujudkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang prima, pemerintah daerah harus mampu merumuskan program/kegiatan yang penunjang peningkatan kualitas infrastruktur maupun sumber daya manusia. Infrastruktur merupakan urat nadi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur tidak dilihat dari sekadar berapa kuantitasnya, tetapi juga harus dijamin kualitasnya sesuai dengan standar dan dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan pelayanan, menumbuhkan seluruh sektor yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Dibidang air minum, persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Luwu pada tahun 2019 baru mencapai 80,64%, sedangkan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak Perkotaan dan Perdesaan baru mencapai 47,94%, sedangkan rumah tangga bersanitasi pada tahun 2019 baru mencapai 84,52%.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap

kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai. Panjang jalan kabupaten di Kabupaten Luwu adalah 2.948,24 km, pada tahun 2019 jaringan jalan yang dalam kondisi baik hanya mencapai 585,26 km atau 19,85%, jauh dari angka provinsi Sulawesi Selatan yang di atas 80%. Hal ini tentu saja menyebabkan terganggunya aksesibilitas orang, barang maupun jasa di daerah ini.

Ketimpangan antar wilayah, terutama antara wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan tampak jelas. Konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan menjadi penyebab terjadinya ketimpangan antar wilayah. Konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang cenderung timpang juga berkontribusi terhadap ketimpangan wilayah. Alokasi anggaran pemerintah yang cenderung ke wilayah perkotaan, juga menjadi penyebab lain terjadinya ketimpangan antar wilayah, disamping perbedaan kondisi dan karakteristik geografis dan demografis di Kabupaten Luwu. Hal lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah optimalisasi penyelenggaraan infrastruktur perhubungan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

4. Kesejahteraan masyarakat masih rendah

Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2019 adalah 4,66%, meningkat jika dibandingkan angka pada tahun 2018 yaitu sebesar 4,47%, sedangkan angka kemiskinan masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional yaitu 12,78%. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu masih menjadi permasalahan utama yang harus dicarikan jalan keluarnya. Sementara itu jumlah rumah tangga kumuh perkotaan mencapai 1.339, serta masih terdapat 14.963 keluarga yang tergolong Pra Sejahtera dan 22.277 keluarga tergolong keluarga Sejahtera I.

5. Produktivitas dan nilai tambah produk pertanian masih rendah

Peningkatan produktivitas masyarakat melalui peningkatan potensi lahan yang luas, serta peningkatan kualitas produksi melalui pemanfaatan teknologi merupakan tujuan pembangunan dibidang pertanian. Untuk mendukung pertanian, Kabupaten Luwu memiliki jaringan irigasi dengan luas 8.904 Ha. Irigasi yang tersedia tersebut baru mencakup 59,94% dari lahan budidaya di

Kabupaten Luwu. Selanjutnya, irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2019 baru mencapai 40,26%.

Rasio jaringan irigasi merupakan perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap lahan jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, dan tersier. Selama 5 tahun terakhir rasio jaringan irigasi masih berada dibawah standar yang diharuskan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sehingga perlu ada penambahan jaringan irigasi untuk menyesuaikan luas lahan pertanian.

Salah satu masalah utama yang dihadapi sektor pertanian adalah rendahnya tingkat produktivitas. Produksi padi per hektar pada tahun 2019 baru mencapai 6,54 ton. Penyebab rendahnya tingkat produktivitas pertanian adalah tingginya proporsi lahan sawah yang masih tadah hujan Selain itu, berkurangnya luas lahan sawah akibat terjadinya alih fungsi lahan juga menjadi penyebab lainnya rendahnya tingkat produktivitas pertanian di Kabupaten Luwu.

Meskipun nilai tambah sektor pertanian (pangan dan palawija) menurut harga berlaku terus meningkat yaitu dari 1,04 triliun pada tahun 2015 menjadi 1,16 triliun pada tahun 2019, namun kontribusinya terhadap PDRB sektor pertanian/perkebunan terus mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2015 kontribusi sektor ini terhadap PDRB pertanian/perkebunan sebesar 9,58%, namun pada tahun 2019 menurun menjadi 7,40%. Hal ini mengisyaratkan bahwa sektor pertanian (pangan dan palawija) kurang berkembang. Sementara itu

6. Belum maksimalnya penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dewasa ini, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, rendahnya kompetensi ini sangat dirasakan dimasa kini. Bergulirnya dana desa sejak tahun 2016, tidaklah terlihat semakin meningkatkan keberdayaan masyarakat desa, tetapi justru semakin pasif dan cenderung menunggu apa yang hendak dilakukan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari kurangnya prestasi desa maupun desa yang berprestasi, baik secara regional maupun nasional.

Penduduk miskin di Kabupaten Luwu yang mencapai 12,76% pada tahun 2019 sebagian besar adalah penduduk desa, mengingat di Kabupaten Luwu terdapat 207 desa. Oleh karena itu, jika angka kemiskinan Kabupaten Luwu, yang memiliki persentase terbesar ke-5 di Provinsi Sulawesi Selatan ingin diturunkan, maka peran pemerintahan desa yang aktif menjadi suatu keharusan. Pemerintahan desa harus mampu memberdayakan masyarakat desa dan meyakinkan masyarakat desa untuk bebas dari belenggu kemiskinan maupun golongan penduduk miskin.

7. Rendahnya nilai investasi.

Tumbuhnya perekonomian daerah merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan dari perkembangan suatu perekonomian dari satu periode ke periode berikutnya. Kemampuan daerah dalam mengalokasikan factor-faktor produksi yang dimilikinya melalui pertambahan jumlah dan kualitas berakibat kepada penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Faktor-faktor produksi yang antara lain ketersediaan sumber daya alam, tenaga kerja yang handal, adanya kemudahan akses dalam memperoleh permodalan serta peran serta wirausaha yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai dari investasi dan mendorong masyarakat untuk mampu berusaha meningkatkan pendapatan harus dimaksimalkan melalui rumusan kebijakan yang berpihak dan berkelanjutan.

Realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA) pada tahun 2019 hanya Rp.16,69 milyar. Mengingat potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Luwu maupun perhitungan perekonomian oleh berbagai kalangan, maka diperlukan upaya yang lebih maksimal dari pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi di daerah ini.

8. Belum Optimalnya Ketersediaan dan Penegakan Hukum

Hakikat penegakan hukum antara lain adalah mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Dalam kaitannya dengan hukum publik, pemerintah daerah memegang tanggung jawab atas tegaknya hukum di daerah tersebut. Oleh karenanya, pemerintah harus menjadi teladan dalam ketaatan maupun penegakan terhadap hukum.

Terdapat berbagai peraturan perundangan di tingkat daerah menjadi tanggung jawab perangkat daerah diberbagai bidang untuk dirumuskan, dilaksanakan, dan ditegakkan. Tidak hanya yang terkait dengan keamanan dan ketertiban, tetapi juga pada aspek lain seperti perlindungan terhadap warga negara, tata ruang, lingkungan, perizinan, dan lain-lain. Tingkat ketersediaan dan penegakan hukum di Kabupaten Luwu saat ini kondisinya kurang dapat dijelaskan karena kurangnya data yang dapat digunakan sebagai bahan analisis. Oleh karena itu, hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan keadilan ditengah-tengah masyarakat.

Terkait dengan pemenuhan hak azasi manusia, hal yang menjadi pokok permasalahan adalah pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Meskipun belum tersedia data yang lengkap, beberapa indikator dapat dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan bahwa pemenuhan hak azasi manusia, khususnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, serta pemenuhan hak anak menjadi suatu permasalahan pembangunan di Kabupaten Luwu. Rangkaian data tersebut antara lain adalah, indeks pemberdayaan perempuan Kabupaten Luwu pada tahun 2017 lebih rendah dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 61,61 berbanding 71,74, bahkan angka tahun 2017 ini lebih rendah dari capaian pada tahun 2013 yang mencapai 63,05.

Pembangunan daerah membutuhkan partisipasi dari semua pihak. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian maupun evaluasi pembangunan daerah, termasuk melalui regulasi yang tersedia dan penegakan atas produk hukum tersebut.

Salah satu permasalahan utama di Kabupaten Luwu adalah meningkatkan partisipasi publik dibidang perencanaan, yang ditunjukkan dengan keterlibatan dalam perumusan kebijakan, misalnya dalam Musrenbang maupun forum perangkat daerah. Dalam kaitan itu, perangkat daerah ke depan harus mendata aspirasi masyarakat dan merumuskan formula untuk menentukan mana yang didahulukan. Hal ini dilakukan agar masyarakat tetap percaya bahwa forum partisipasi yang dilaksanakan adalah benar-benar dijadikan sebagai bahan dalam perencanaan pembangunan.

Dalam kaitan pengendalian dan evaluasi, partisipasi masyarakat ditunjukkan antara lain dengan adanya pengaduan ataupun keluhan atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Sama halnya dengan keterlibatan dibidang perencanaan, dari aspek pengendalian dan evaluasi ini juga perlu mendapat perhatian yang serius dengan memberikan tanggapan dan penyelesaian atas segala pengaduan/keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, agar tidak tumbuh rasa pesimis ataupun apatis dihati masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah.

Selain itu, kebutuhan akan regulasi sebagai pedoman dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah belum terpenuhi secara maksimal. Penyusunan regulasi di Kabupaten Luwu masih menghadapi kendala. Rancangan regulasi yang telah disusun perangkat daerah tidak dapat segera ditetapkan menjadi peraturan daerah.

9. Menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah secara maksimal akan menunjang pelaksanaan pembangunan untuk mempercepat kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, pemerintah Kabupaten Luwu harus menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan dalam memanfaatkan potensi tersebut. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan akan meminimalkan kerusakan lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu belum maksimal. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten pada tahun 2019 baru

mencapai 37,89%, menurun dibandingkan angka pada tahun 2018 yang mencapai 39,220%. Demikian halnya dengan pengelolaan sampah, meskipun dari tahun ke tahun semakin meningkat tetapi masih belum maksimal, dimana pada tahun 2018 rata-rata penanganan sampah masih di bawah 84%.

10. Risiko yang ditimbulkan akibat bencana masih tinggi.

Bencana alam atau musibah yang menimpa disuatu daerah dapat saja datang secara tiba-tiba, sehingga masyarakat yang berada di lokasi musibah bencana, tidak sempat melakukan antisipasi pencegahan terhadap musibah tersebut. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin topan dan kebakaran sering terjadi yang mengakibatkan penderitaan dan kerugian bagi masyarakat. Dengan seringnya bencana alam yang terjadi, diperlukan manajemen risiko bencana (*disaster risk management*) yang baik untuk penanganan bantuan terhadap bencana secara lebih baik dan sistematis. Permasalahan yang timbul adalah masih banyaknya warga masyarakat yang belum mengetahui dan memahami tentang apa itu bencana, bagaimana cara mengantisipasi dan mengatasi bencana, sehingga risiko yang ditimbulkan akibat bencana tersebut seminimal mungkin, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap penanganan bencana tersebut.

Manajemen Risiko Bencana adalah pengelolaan bencana sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan (aplikatif) yang mencari, dengan melakukan observasi secara sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan-tindakan (*measures*), terkait dengan pencegahan (*preventif*), pengurangan (mitigasi), persiapan, respon darurat dan pemulihan. Manajemen dalam bantuan bencana merupakan hal-hal yang penting bagi manajemen puncak yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*directing*), pengorganisasian (*coordinating*) dan pengendalian (*controlling*). Tujuan dari manajemen risiko bencana antara lain: (1) mengurangi atau menghindari kerugian secara fisik, ekonomi maupun jiwa yang dialami oleh perorangan atau masyarakat; (2) mengurangi penderitaan korban bencana; (3) mempercepat pemulihan; dan (4) memberikan perlindungan kepada pengungsi atau masyarakat yang kehilangan tempat ketika kehidupannya terancam.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut Layanan Dasar dan Tugas/Fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Adapun permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dapat dilihat berdasarkan urusan layanan wajib dan pilihan serta urusan penunjang pada pembahasan berikut :

1) Pendidikan

Layanan Urusan Pendidikan menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.59
Identifikasi dan Solusi Permasalahan Bidang Pendidikan

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
1	Layanan pendidikan masih belum optimal	Angka Putus Sekolah meningkat	Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan
2	Penerapan Manajemen berbasis Sekolah masih belum optimal	Rendahnya kualitas pelayanan publik	Optimalisasi perenarapan Manajemen berbasis sekolah
3	Proses belajar mengajar belum sepenuhnya berbasis Information Technology	Minimnya pengetahuan peserta didik dibidang teknologi informasi	Peningkatan kualitas sarana dan prasanana teknologi informasi
4	Kualitas dan kuantitas PAUD masih terbatas	Rendahnya angka Pendidikan Anak Usia Dini	Penguatan Program Pendidikan Anak Usia Dini
5	Masih kurangnya aktualisasi budaya daerah	Rendahnya Pemahaman masyarakat pada budaya daerah	Penguatan nilai-nilai budaya pada peserta didik
6	Profesionalisme guru masih rendah dan distribusinya belum merata	Rendahnya Angka Melanjutkan pada jenjang pendidikan	Penguatan Tenaga Pendidik
7	Pembiayaan pendidikan yang berkeadilan belum terwujud	Meningkatnya Angka Putus Sekolah	Pemutahiran Data Peserta Didik dari keluarga tidak mampu

2) Kesehatan

Layanan Urusan Kesehatan menjadi kewenangan Dinas Kesehatan dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.60
Identifikasi dan Solusi Permasalahan Bidang Kesehatan

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
1	Pelayanan Kesehatan masih belum optimal	Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan
2	Meningkatnya penyakit degeneratif, penyakit tidak menular pada usia lansia	Tingginya angka kematian akibat penyakit degeneratif	Penguatan penanganan penyakit degeneratif
3	Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat (PHBS);	Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Masyarakat melalui Sosialisasi PHBS
4	Banyaknya jajanan anak sekolah yang tidak memenuhi standar kesehatan yang baik	Tingginya angka kasus penyakit gangguan pencernaan pada anak usia sekolah	Peningkatan kualitas pengawasan
5	Belum optimalnya fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan bagi penyandang cacat dan lansia	Minimnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan bagi penyandang difabel	Optimalisasi pelayanan kesehatan bagi penyandang cacat
6	Penanganan limbah medis belum optimal	Meningkatnya angka kasus pencemaran lingkungan hidup	Penanganan Sistem Limbah Terpadu medis
7	Minimnya kemampuan daerah dalam penanganan dan ketanggapan masalah penyakit-penyakit pandemi	Tingginya angka kematian akibat penyakit-penyakit yang pandemi	Penguatan pada kegiatan-kegiatan tanggap wabah (Kesehatan masyarakat dan kesehatan perseorangan) dan meningkatkan intensitas sosialisasi New Normal (sesuai protokol kesehatan) dalam tatanan kehidupan

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Layanan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.61
Identifikasi dan Solusi Permasalahan
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
1	Kurangnya pembangunan jaringan irigasi dan pengelolaan sungai, rawa dan pantai belum optimal	Rendahnya rasio jaringan irigasi	Penguatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan jaringan irigasi kabupaten
2	Kurang optimalnya tingkat layanan jaringan air minum	Rendahnya angka penduduk berakses air minum	Penguatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan akses air minum
3	Infrastruktur jalan belum mengakses seluruh wilayah	Rendahnya angka rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Penguatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan jalan kabupaten
4	Pelayanan Gedung Pemerintah Daerah Belum Maksimal	Rendahnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana bangunan pemerintah

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
5	Manfaat jasa konstruksi bagi masyarakat belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan masyarakat di gedung penda belum optimal • Tenaga kerja lokal kurang mampu bersaing dibidang jasa konstruksi 	Penguatan pelayanan penyediaan jasa konstruksi bagi masyarakat
6	Aspek penataan ruang kurang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah	Rendahnya Kualitas pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang	Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Layanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Permukiman dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.62
Identifikasi dan Solusi Permasalahan
Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
1	Pembangunan dan penataan permukiman yang layak belum maksimal	Pembangunan dan penataan kawasan permukiman akan kurang maksimal dan kurang berkelanjutan Banyaknya kawasan permukiman belum memiliki PSU yang berkualitas Rasio rumah layak huni masih rendah	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan permukiman layak
2	Kurangnya pemahaman aparatur terhadap tugas dan fungsi perangkat daerah	Tatakelola dan tata laksana perangkat daerah kurang maksimal	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan
3	Lemahnya kualitas pengelolaan data dan informasi	Rendahnya kualitas perencanaan	Peningkatan kualitas tata kelola data dan informasi
4	Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah dalam pencapaian target ketersediaan rumah layak huni	Rendahnya angka rasio rumah layak huni	Penguatan kordinasi antar instansi pemerintah deraerah terkait

5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Layanan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Dinas Satuan Polisi Pamong Paja serta Dinas Pemadam Kebakaran dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.63
Identifikasi dan Solusi Permasalahan
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
1	Pencegahan dan pengendalian terhadap bahaya kebakaran belum berjalan dengan maksimal	Rendahnya capaian angka waktu tanggap kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pemadam kebakaran - Penambahan jumlah pos pemadam kebakaran di wilayah manajemen kebakaran
2	Perbaikan sarana dan prasarana yang rusak pasca bencana belum maksimal	Rendahnya kualitas penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Penguatan manajemen pasca bencana
3	Perkelahian Pemuda antar Kelompok akibat pengaruh miras dan narkoba	Tingginya angkat perkelahian pemuda sehingga menimbulkan keresahan dan mengganggu ketenteraman masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan koordinasi dari Pemda dan aparat keamanan - Pengawasan peredaran minuman keras/ballo mulai ditingkatkan
4	Menurunnya pemahaman generasi muda terkait ideologi bangsa dan berkurangnya nilai-nilai toleransi antar umat beragama	Tingginya angka kasus penyebaran paham-paham radikalisme dan penistaan agama	Perlu maksimalkan upaya bina ideologi dan sosialisasi serta pengawasan kerukunan antar umat beragama
5	Tingginya angka penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian	Rendahnya kualitas demokrasi dan minimnya angka keikutsertaan masyarakat dalam pemilu	Pembinaan Organisasi sosial politik dan
6	Peristiwa pencurian dan penipuan milik masyarakat di Pedesaan	Peristiwa pencurian dan penipuan rawan menimbulkan perkelahian dari kerawanan keamanan	Pengaktifkan anggota Linmas sebagai penjaga keamanan disertai dengan pembangian insentif dari biaya hidup

6) Sosial

Layanan Urusan Sosial menjadi kewenangan Dinas Sosial bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.64
Identifikasi dan Solusi Permasalahan Bidang Sosial

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
1	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS belum optimal - Pemberdayaan dan rehabilitasi masyarakat dalam pengentasan kemiskinan belum optimal - Rendahnya kualitas sumber daya manusia pada masyarakat 	Tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial	Peningkatan kualitas pelayanan kepada PMKS melalui: <ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial secara berkala - Peningkatan kerjasama provinsi dan kabupaten/kota untuk memfasilitasi PSKS

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
			<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi PMKS - Mendorong peran aktif PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
2	Belum optimalnya kerja sama yang baik dengan PSKS	Rendahnya peran aktif potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Penguatan peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui optimalisasi sosialisasi dan pembinaan
3	Minimnya jumlah ASN berkinerja baik sehingga	Rendahnya Capaian kinerja pemerintah bidang urusan sosial	Penambahan Jumlah ASN dan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur melalui Pelatihan dan Bimtek
4	Rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat menyikapi kondisi alam yang rawan bencana.	Rendahnya kualitas penanganan pasca bencana	Pelaksanaan Pelatihan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan mitigasi bencana
5	Rendahnya sinergitas Lintas Sektor dan Keterlambatan Informasi Kurangnya kesadaran Masyarakat tentang penanggulangan masalah sosial	Rendahnya tingkat akurasi data dalam rangka perencanaan yang tepat sasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Menjalin Sinergitas Lintas OPD dan Pembuatan line/website • Sosialisasi penanggulangan masalah sosial sampai desa desa
7	Tingginya Konflik Keluarga di Lingkungan Masyarakat	Tingginya Konflik Keluarga di Lingkungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Sosialisasi tentang keberadaan dan fungsi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) • Pelaksanaan tugas dan fungsi LK3 secara berkesinambungan
8	Penanganan pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik peralatan belum memadai	Minimnya kualitas penanganan pada saat tanggap darurat bencana	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang penanganan kebencanaan
9	Minimnya kemampuan daerah dalam menghadapi situasi status darurat nasional non bencana	Tingginya angka kerugian yang timbul	Penguatan kesiapsiagaan dan ketahanan bencana alam dan non alam

7) Tenaga Kerja

Layanan Urusan Tenaga Kerja menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.65
Identifikasi dan Solusi Permasalahan Bidang Tenaga Kerja

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
1	Serapan tenaga kerja masih rendah	Tingginya angka pengangguran terbuka	Peningkatan Kualitas SDM dengan melalui pelatihan dan keterampilan
2	Kesesuaian antara kesempatan kerja yang ada dengan kualifikasi, kemampuan dan harapan pencari kerja masih kurang;	Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat	
3	Kurangnya minat penduduk usia kerja untuk bekerja secara mandiri	Rendahnya angka jumlah wirausahaan muda secara	Penguatan SDM melalui pelatihan/seminar

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
	dan menciptakan lapangan kerja baru bagi pengembangan kewirausahaan	mandiri	kewirausahaan (<i>enterpreunership</i>)
4	Kurang informatifnya lembaga penempatan tenaga kerja dan dunia kerja/ industri tentang kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan	Rendahnya angka besaran tenaga kerja yang ditempatkan	Penguatan koordinasi dengan perusahaan / lembaga pencari kerja dengan melalui <i>kegiatan job fair</i>
5	Belum dipahami secara menyeluruh aturan ketenagakerjaan oleh tenaga kerja maupun perusahaan	Rendahnya sosialisasi peraturan/ regulasi tentang ketenagakerjaan oleh lembaga pemerintah	Sosialisasi peraturan / regulasi tentang ketenagakerjaan
6	Terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan ketenagakerjaan yang sesuai dengan standar kebutuhan peralatan berbasis kompetensi dan perkembangan teknologi terutama untuk disabilitas	Rendahnya kualitas pencari kerja lokal	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pelatihan, keterampilan tenaga kerja
7	Banyaknya sektor-sektor usaha kecil yang terdampak pandemic Covid-19	Bertambahnya jumlah pengangguran	Pemberian stimulant guna membangkitkan sektor-sektor usaha yang terdampak

8) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Layanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan capaian identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.66
Identifikasi dan Solusi Permasalahan
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
1	Belum pernah dilakukan mapping data dan informasi gender dan anak sehingga belum tersedia data	Belum menjadi prioritas dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran	Perlu dilakukan <i>Mapping Data</i> dan Informasi gender dan Anak untuk mendapatkan data gender dan anak yang valid
2	Belum tersedianya data dan informasi terpadu gender dan anak	Belum mampu mengakses data dan informasi gender dan anak secara menyeluruh di seluruh sektor	Perlu dibangun kemitraan dan kerja sama lintas sektor untuk mendapatkan data dan informasi gender dan anak yang up to date
3	Belum ada tenaga pengelola data dan informasi gender dan anak yang terampil	Belum tersedia fasilitasi data dan informasi gender dan anak gender dan anak yang memadai	Perlu pengadaan fasilitasi data dan informasi gender dan anak yang cukup dan pelatihan tenaga terlatih gender anak
4	Belum tersedia pengolahan dan penyajian data secara grafis dan on line	Belum tersedia fasilitas data gender dan anak yang memadai	Perlu pengadaan software data dan informasi gender dan anak yang gratis dan one line

9) Pangan

Layanan Urusan Pangan menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.67
Identifikasi dan Solusi Permasalahan Bidang Pangan

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
1	Belum optimalnya pengelolaan ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah	Rendahnya kualitas data ketersediaan pangan, minimnya infrastruktur pendukung, adanya daerah rawan pangan	Peningkatan pengelolaan pangan melalui: Ketersediaan data yang akurat Penguatan infrastruktur pendukung dan Pengawasan daerah rawan pangan
2	Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata antar waktu dan antar wilayah	Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan serta panjangnya mata rantai pasokan dan jaringan distribusi pangan	Peningkatan pengelolaan cadangan serta peningkatan pengawasan jaringan distribusi pangan
3	Konsumsi pangan masyarakat yang belum beragam, bergizi seimbang, dan aman	Rendahnya pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal	Sosialisasi tentang pangan yang berkualitas di masyarakat
4	Masih adanya pangan segar tidak aman yang beredar di masyarakat	Tingkat kesadaran agen pengecer dalam peredaran pangan belum optimal	Peningkatan pengawasan pemerintah dan aparat terkait
5	Manajemen kelembagaan dan regulasi belum optimal	Rendahnya dan sinkronisasi kebijakan ketahanan pangan	Peningkatan kebijakan regulasi tentang ketahanan pangan

10) Pertanahan

Layanan Urusan Pertanahan menjadi kewenangan Dinas Pertanahan dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.68
Identifikasi dan Solusi Permasalahan Bidang Pertanahan

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
1	Kurang tertibnya administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum	Rendahnya tingkat akurasi data dan informasi aset tanah pemerintah	Optimalisasi pemutakhiran data
2	Kurang lengkapnya data dan dokumen pertanahan	Rendahnya tingkat akurasi data dan informasi aset tanah	
3	Pemanfaatan sistem informasi teknologi yang belum optimal	Rendahnya tingkat efisiensi laporan monitoring dan evaluasi data pertanahan	Pembuatan aplikasi data pertanahan secara online
4	Tanah Negara yang dikuasai oleh Masyarakat	Rendahnya pemahaman/ kesadaran masyarakat tentang tanah negara	Percepatan penerbitan sertifikat tanah aset pemda

5	Kewenangan daerah di bidang Pertanahan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan belum diselenggarakan secara maksimal	Pelayanan kepada masyarakat belum maksimal sesuai ketentuan	Optimalisasi penyelenggaraan kewenangan daerah
---	--	---	--

11) Lingkungan Hidup

Layanan Urusan Lingkungan Hidup menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.69
Identifikasi dan Solusi Permasalahan Bidang Lingkungan Hidup

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
1	Keterbatasan sarana dan prasarana dalam menganalisa kualitas air dan udara sesuai parameter uji untuk perhitungan IKA dan IKU	Terbatasnya (tidak adanya) sarana dan prasarana dalam menganalisa indeks kualitas air dan udara sesuai dengan parameter	Peningkatan sarana dan prasarana
2	Keterbatasan lahan yang memenuhi persyaratan yang dapat digunakan untuk lokasi pembangunan pilot project sarana pengendalian pencemaran air	Rendahnya kualitas penanganan air limbah	Koordinasi dengan instansi terkait
3	Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM Pengawas yang memahami pengetahuan mengenai pengelolaan lingkungan	Rendahnya capaian kinerja bidang urusan lingkungan hidup	Penguatan kualitas SDM melalui pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan sistem reward and punishment
4	Masih kurangnya kepedulian pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan	Tingginya tingkat pencemaran lingkungan	Penegakan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar regulasi lingkungan hidup
5	Penebangan hutan secara liar/perambahan hutan yang berlebihan	Berkurang tutupan lahan yang berdampak pada: - Menurunnya kualitas tanah - Menurunnya kualitas air tanah - Menurunnya kualitas udara - Terganggunya habitat flora dan fauna - Rentang terjadinya longsor/bencana alam	- Penanaman kembali hutan yang sudah gundul - Konservasi hutan - Perbaikan daerah tangkapan air
6	Perburuan liar dan perdagangan hewan yang dilindungi	Kepunahan terhadap hewan yang diburu	Pengawasan terhadap perdagangan hewan di Pasaran
7	Kerusakan Terumbu Karang	Kepunahan terhadap biota laut	Rehabilitasi terumbu karang
8	Penebangan hutan Mangrove	Terjadinya abrasi pantai	Penanaman Mangrove
9	Kebiasaan Buang Sampah sembarangan	Terjadinya pencemaran lingkungan pemukiman	Pembinaan tentang pengolahan sampah rumah tangga
10	Polusi emisi kendaraan bermotor	Terjadinya pencemaran udara Ambien	Pengujian terhadap kendaraan bermotor

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
11	Penggunaan pestisida secara berlebihan	Terjadinya pencemaran air pemukiman	Pembinaan terhadap petani dalam penggunaan pestisida yang tidak merusak lingkungan

12) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Layanan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi kewenangan Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.70
Identifikasi dan Solusi Permasalahan
Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
1	Pengaruh media internet dan pengawasan orangtua pada anak	Perkawinan usia muda umur wanita < 20 tahun masih terjadi diberbagai daerah	Penguatan sosialisasi melalui media dan peningkatan peran orangtua terhadap anak
2	Sarana dan prasarana pendukung pelayanan belum sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)	Data base kependudukan yang kurang akurat	Optimalisasi data dan informasi melalui penyuluhan dan pemutakhiran database kependudukan
3	Belum adanya perangkat teknologi yang memadai		
4	Kurangnya SDM yang menguasai Teknologi dan informasi		
5	Adanya pemalsuan data dokumen kependudukan		
6	Masih banyak warga yang belum sadar tentang pentingnya kepemilikan dok. kependudukan	Masih banyak warga yang belum sadar tentang pentingnya kepemilikan dok. kependudukan	Memperbanyak sosialisasi ke masyarakat akan pentingnya kepemilikan dok. kependudukan

13) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Layanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.71
Identifikasi dan Solusi Permasalahan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
1	Belum adanya bantuan keuangan oleh Pemprov Terkait pembangunan sarana prasarana	Rendahnya kualitas sarana dan prasarana pemerintah tingkat desa	Memaksimalkan upaya koordinasi dengan pemprov dan penyusunan regulasi yang

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
	perkantoran desa sebagaimana amanat UU Desa sementara dana desa belum dapat dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa		mengatur perihal dana desa dapat dialokasikan untuk pembangunan dan atau pemeliharaan prasarana perkantoran desa
2	Anggaran pembinaan LPMD masih minim dan hanya dialokasikan melalui APBDes sementara Anggaran Dinas terkait (DPMD) belum dapat dialokasikan pada kegiatan Pembinaan LPMD	Kemandirian masyarakat akan mengalami hambatan akibat minimnya keterlibatan Pemerintah Desa dalam upaya membangun kemandirian masyarakat melalui pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa	Alokasi anggaran yang memadai dapat bertahap untuk Pembinaan LPMD bagi seluruh 207 Desa dan 20 Kelurahan
3	Masih minimnya pengelola BUMDes yang diberi pelatihan teknis, terutama pelatihan pengelolaan keuangan desa	Rendahnya kualitas pengelolaan dan besarnya potensi penyalahgunaan bantuan BUMDes oleh Pengelola BUMDes	Perlu ditingkatkan anggaran Pelatihan Teknis Pengelola BUMDes baik di Daerah maupun dari Pemprov

14) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Layanan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana menjadi kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.72
Identifikasi dan Solusi Permasalahan
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
1	Tenaga Penyuluh masih sangat minim	Rendahnya capaian kinerja urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Penguatan tenaga Penyuluh melalui rekrutemen yang komprehensif
2	Insentif PPKB dan Sub PPKB masih sangat minim		
3	Program Tribina belum dapat berjalan Optimal	Rendahnya partisipasi kelompok Tribina dalam memajukan Program yang mendukung Kampung Keluarga Berencana	Dukungan kebijakan pemerintah dan Optimalisasi kegiatan sosialisasi untuk semua kelompok Tribina
4	Kurangnya sarana untuk operasional di lapangan dalam melakukan Bimtek dan Monev	Rendahnya kualitas hasil monitoring dan evaluasi	Diharapkan adanya dukungan kebijakan pembiayaan untuk Bimtek dan Monev

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

15) Perhubungan

Layanan urusan perhubungan menjadi kewenangan Dinas Perhubungan dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.73
Identifikasi dan Solusi Permasalahan Bidang Perhubungan

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
1	Minimnya fasilitas marka jalan di wilayah kabupaten	Tingginya angka kecelakaan lalulintas	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang perhubungan
2	Belum optimalnya sumber daya aparatur yang ada sesuai dengan tugas dan fungsinya (penguji kendaraan bermotor)	Rendahnya capaian kinerja urusan bidang perhubungan	Penguatan SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis
3	Banyaknya fasilitas penunjang dalam kondisi rusak	Berkurangnya Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pengujian Kendaraan Bermotor	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkantoran
4	Tidak adanya Terminal Penumpang dalam wilayah kabupaten	Rendahnya Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Darat	Perlu Mempercepat Pembangunan Terminal Belopa Guna Menunjang Arus Transportasi

16) Komunikasi dan Informatika

Layanan urusan komunikasi dan informatika menjadi kewenangan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.74
Identifikasi dan Solusi Permasalahan Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
1	Belum baiknya tata kelola dan penatausahaan PPID dan Belum maksimalnya hasil kerja tim media center	Masih kurangnya akses masyarakat terhadap informasi	Optimalisasi tata kelola dan penatausahaan PPID
2	Belum maksimalnya penyelenggaraan e-government	Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur penyelenggaraan pelayanan e-government	Penguatan penyelenggaraan E-Government

17) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Layanan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah menjadi kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.75
Identifikasi dan Solusi Permasalahan
Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
1	Sulitnya memperoleh data dan informasi yang akurat	Rendahnya kualitas perencanaan dan penganggaran kegiatan	Optimalisasi dan pemutakhiran data
2	Minimnya kualitas sumber daya manusia	Rendahnya capaian kinerja urusan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penguatan kualitas SDM manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis
3	Rendahnya jumlah pelaku usaha kecil dan menengah	Rendahnya laju pertumbuhan ekonomi kabupaten	Penyederhanaan regulasi dan pemberian bantuan stimulant pelaku usaha
4	Banyaknya pelaku usaha kecil dan menengah yang terdampak pandemi covid-19	Bertambahnya jumlah pengangguran	Sosialisasi tatanan normal baru pada sektor-sektor usaha kecil menengah dan pemberian stimulan usaha

18) Penanaman Modal

Layanan urusan penanaman modal menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.76
Identifikasi dan Solusi Permasalahan Bidang Penanaman Modal

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
1	Belum optimalnya perusahaan PMA dan PMDN dalam menyampaikan LKPM	Belum terciptanya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan	Optimalisasi Investasi PMA dan PMDN
2	Ketepatan waktu penerbitan perizinan yang belum sesuai dengan waktu yang ditetapkan	Rendahnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan melalui optimalisasi penyederhanaan pelayanan
3	Keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendorong pelayanan perizinan		
4	Tim Teknis masih melekat di OPD Teknis	Tim Teknis Masih Melekat di OPD Teknis	Tim Teknis melekat di DPMTSP

19) Kepemudaan dan Olah Raga

Layanan urusan kepemudaan dan olah raga menjadi kewenangan Dinas Pemuda dan Olahragadengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.77
Identifikasi dan Solusi Permasalahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
1	Belum terlaksananya pembinaan dan promosi secara optimal	Rendahnya capaian persentase organisasi pemuda yang aktif	Penguatan tata kelola pembinaan dan promosi kepemudaan dan olahraga
2	Belum maksimalnya perhatian terhadap kepemudaan dan olahraga		
3	Belum maksimalnya pembinaan dan pelatihan atlet serta pelatihan olahraga unggulan daerah	Rendahnya jumlah atlet berprestasi	Optimalisasi kualitas pembinaan dan peningkatan sarana & prasana penunjang kepemudaan dan olahraga
4	Masih kurangnya sarana prasarana kepemudaan dan olahraga yang memenuhi standar		
5	Keterbatasan daerah dalam menjamin kesejahteraan atlet	Rendahnya angka jumlah prestasi olahraga	

20) Statistik

Layanan Statistik menjadi kewenangan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.78
Identifikasi dan Solusi Permasalahan Bidang Statistik

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
1	Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral	Kurangnya pemahaman aparatur dibidang statistik sektoral	Penguatan dan pemutahiran data sektoral
2	Lemahnya kualitas sumber daya manusia	Sulitnya memenuhi "sistem data statisti yang terintegrasi"	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis

21) Persandian

Layanan Persandian menjadi kewenangan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.79
Identifikasi dan Solusi Permasalahan Bidang Persandian

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
1	Masih rendahnya penyelenggaraan persandiaan untuk keamanan informasi	Belum maksimalnya ketersediaan sumber daya, baik aparatur yang memiliki kualifikasi sandi, tempat kegiatan persandiaan dan peralatan persandiaan	Optimalisasi penyelenggaraan persandian lintas Perangkat daerah

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
2	Lemahnya kualitas sumber daya manusia	Sulitnya memenuhi "sistem data statisti yang terintegrasi"	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis

22) Kebudayaan

Layanan urusan kebudayaan menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.80
Identifikasi dan Solusi Permasalahan Bidang Kebudayaan

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
1	Pemerhati atau lembaga di bidang seni budaya masih minim	Rendahnya jumlah ragam seni budaya yang dilestarikan	Pembentukan lembaga pengembangan seni dan budaya Perlunya tersedia anggaran penyelenggaraan festival seni dan budaya
2	Minimnya daya tarik untuk melestarikan benda situs cagar budaya	Rendahnya jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Penyusunan dan penegakan PERDA terkait Benda Situs Cagar Budaya
3	Sumber Daya Manusia masih minim	Rendahnya capaian kinerja urusan kebudayaan	Pengembangan SDM melalui Diklat/Bimtek Perlunya tersedia anggaran revitalisasi dan inventarisasi

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

23) Perpustakaan

Layanan Urusan Perpustakaan menjadi kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.81
Identifikasi dan Solusi Permasalahan Bidang Perpustakaan

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
1	Belum efektifnya pelayanan perpustakaan dan pengelolaan akibat	Rendahnya jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Penguatan pelayanan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan
2	Kurangnya minat dan berdaya baca masyarakat yang berbanding lurus dengan rendahnya partisipasi masyarakat dan kesadaran aparat terkait khususnya di pedesaan dan pembinaan minat dan berdaya baca masyarakat		Optimalisasi pembinaan minat baca melalui penerapan teknologi berbasis daring

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
3	Tingginya volume pekerjaan yang belum di dukung sumber daya manusia yang belum memadai	Rendahnya capaian kinerja urusan bidang perpustakaan	Penguatan kualitas SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis

24) Kearsipan

Layanan urusan kearsipan menjadi kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.82
Identifikasi dan Solusi Permasalahan Bidang Kearsipan

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
1	Kurangnya pengetahuan pengelola Perpustakaan	Rendahnya persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Sosialisasi terkait pentingnya pengelolaan arsip secara baku
2	Sumber daya manusia yang belum memadai	Rendahnya capaian kinerja urusan bidang kearsipan	Penguatan kualitas SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis

25) Pariwisata

Layanan urusan pariwisata menjadi kewenangan Dinas Pariwisata dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.83
Identifikasi dan Solusi Permasalahan Bidang Pariwisata

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
1	Belum adanya Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah	Investasi dibidang kepariwisataan masih minim	Pengelolaan pariwisata terpadu melalui Penyusunan PERDA Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah
2	Minimnya sarana dan prasarana penunjang pada objek-objek wisata	Rendahnya jumlah wisatawan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pariwisata
3	Kurangnya promosi dibidang pariwisata	Rendahnya Pendapatan Asli Daerah pada sektor pariwisata	Penguatan promosi melalui penyelenggaraan even-even pariwisata
4	Berkurangnya jumlah wisatawan akibat pandemi Covid-19	Berkurangnya PAD sektor pariwisata	Promosi tatanan normal baru di sektor pariwisata
5	Masih kurangnya generasi muda yang kreatif untuk mendukung perkembangan pariwisata	Generasi muda tidak mampu melahirkan kreasi yang mendukung kegiatan kepariwisataan	Pelaksanaan pelatihan secara terstruktur dan berkelanjutan sesuai potensi daerah
6	Belum optimalnya kerjasama dengan pihak-pihak terkait	Pembangunan pariwisata daerah kurang terkoordinasi	Membangun kerjasama yang baik dengan pihak terkait

26) Pertanian

Layanan urusan pertanian menjadi kewenangan Dinas Pertanian dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.84
Identifikasi dan Solusi Permasalahan Bidang Pertanian

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
1	Belum maksimalnya pencapaian produksi dan produktivitas hasil pertanian	Rendahnya kualitas tata kelola sistem pengelolaan usaha tani	Penguatan kualitas tata kelola sistem pengelolaan usaha tani
2	Harga komoditas pertanian yang cenderung fluktuatif	Kurangnya akses petani terhadap informasi harga pasar dan akses ke lembaga keuangan	Sosialisasi harga komoditas secara berlanjut dan konsisten
3	Belum optimalnya fungsi kelembagaan tani yang ada	Rendahnya kualitas pembinaan dan pendampingan kepada kelompok tani	Peningkatan kapasitas peyuluh melalui pelatihan
4	Ketersediaan infrastruktur sarana prasarana lahan dan air yang dirasakan belum memadai secara maksimal	Rendahnya Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	Peningkatan kualitas infrastruktur penunjang pertanian
5	Sumber Daya Manusia dan kelembagaan peternak belum berkembang dengan baik	Rendahnya capaian kinerja urusan bidang peternakan	Peningkatan kapasitas SDM dan Penguatan kelembagaan peternak
6	Sarana penunjang pengembangan perbibitan ternak yang masih sangat terbatas		Peningkatan kualitas sarana dan prasarana peternakan

27) Perdagangan

Layanan urusan perdagangan menjadi kewenangan Dinas Perdagangan dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.85
Identifikasi dan Solusi Permasalahan Bidang Perdagangan

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
1	Lemahnya pengelolaan data dan informasi perangkat daerah	Rendahnya capaian kinerja terhadap pengelolaan data dan informasi di bidang perdagangan	Peningkatan SDM melalui pelatihan dan pendidikan
2	Belum optimalnya kerjasama dengan pemerintah daerah sekitar untuk pengembangan perdagangan produk unggulan daerah	Belum optimalnya pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan lintas sektoral untuk memaksimalkan produk unggulan lokal daerah - Pembinaan produk usaha kecil menengah dan BUMDes ditingkatkan

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
3	Masih terjadinya lonjakan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting pada waktu tertentu	Menurunnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Meningkatkan hasil kontribusi di segala bidang sektor
4	Belum optimalnya pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen	Rendahnya kualitas SDM serta pertumbuhan waralaba tidak sebanding dengan jumlah pegawai	Peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan Penambahan pegawai baru

28) Perindustrian

Layanan urusan perindustrian menjadi kewenangan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.86
Identifikasi dan Solusi Permasalahan Bidang Perindustrian

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
1	Sulitnya mendapatkan data jumlah pengrajin di wilayah kabupaten dengan tingkat akurasi yang baik	Rendahnya kualitas perencanaan dan penganggaran kegiatan	Penguatan data dan informasi
2	Rendahnya kualitas sumberdaya manusia	Minimnya capaian kinerja urusan bidang perindustrian	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis
3	Minimnya jumlah industri berskala menengah	Angkar pengangguran yang sulit berkurang	Penguatan strategi pertumbuhan industri

29) Transmigrasi

Layanan urusan transmigrasi menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.87
Identifikasi dan Solusi Permasalahan Bidang Transmigrasi

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
1	Sulitnya penerbitan sertifikat tanah hak milik transmigran	Identifikasi kepemilikan tanah tidak diketahui	Mempercepat proses sertifikasi hak milik dari Pemerintah Pusat

30) Kelautan dan Perikanan

Layanan urusan perikanan menjadi kewenangan Dinas Perikanan dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.88
Identifikasi dan Solusi Permasalahan Bidang Kelautan dan Perikanan

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
1	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kepemilikan asset yang bias dijadikan agunan untuk mengakses permodalan pada lembaga keuangan - Belum optimalnya penerapan metode CBIB dan CPIB - Kegiatan pembinaan ke masyarakat masih kurang 	Rendahnya angka produktivitas usaha pembudidayaan ikan	Optimalisasi upaya peningkatan produktivitas pembudidaya ikan
2	Secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat perikanan masih rendah	Kualitas produksi hasil perikanan belum sesuai dengan Pemerintah Pasar/Konsumen	Penambahan Aparat Dinas dan Penyuluhan Perikanan/ Tenaga Teknis dengan kualitas dan kuantitas yang memadai
3	Belum optimalnya produksi perikanan budi daya (Ikan, udang dan rumput laut)	Kualitas produksi hasil perikanan belum sesuai dengan Pemerintah Pasar/Konsumen	
4	Masih rendahnya posisi tawar pelaku usaha perikanan	Akses Pasar dikuasai Oleh Lembaga yang mempunyai Modal besar	Peningkatan akses informasi pasar dan pemasaran produk perikanan melalui Website Pemerintah dan Aplikasi Android

31) Perencanaan Pembangunan

Layanan Urusan Perencanaan Pembangunan menjadi kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.89
Identifikasi dan Solusi Permasalahan Bidang Perencanaan Pembangunan

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
1	Tahapan dan tata cara perencanaan pembangunan daerah belum dilaksanakan dengan maksimal	Rendahnya capaian kinerja urusan Perencanaan Pembangunan	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur perencanaan
2	Rendahnya kualitas perumusan kebijakan pembangunan	Minimnya kebijakan pembangunan yang tepat sasaran	Pemutakhiran data dan informasi perencanaan dan penguatan koordinasi Penetapan dan pengisian jabatan fungsional perencana pada setiap OPD
3	Minimnya pemahaman aparatur terhadap tahapan dan tata cara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Rendahnya kualitas hasil evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur urusan perencanaan pembangunan
4	Data & Informasi yang pembangunan daerah yang kurang optimal	Rendahnya kualitas kebijakan perencanaan pembangunan	Pemutakhiran data dan informasi perencanaan pembangunan

32) Keuangan

Layanan Urus Keuangan menjadi kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Badan Pendapatan Daerah dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.90
Identifikasi dan Solusi Permasalahan Bidang Keuangan

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
1	Belum Maksimalnya Kualitas SDM Pengelola Keuangan	Rendahnya Kualitas SDM Pengelola Keuangan	Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan, Bimtek, dan Studi Perbandingan
2	Rendahnya Pemahaman terhadap aturan-aturan yang berhubungan dengan pengelolaan Keuangan	Rendahnya capaian kinerja urusan bidang keuangan	
4	Pengelolaan asset belum maksimal	Minimnya kualitas penatausahaan aset daerah	Penguatan kualitas penatausahaan aset daerah
5	Penyusunan laporan Pertanggung jawaban belum maksimal	Menurunnya capaian kategori laporan pertanggungjawaban	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan daerah

33) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Layanan Urus Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan menjadi kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.91
Identifikasi dan Solusi Permasalahan
Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
1	Posisi jabatan struktural dan fungsional yang masih belum terisi	Rendahnya capaian kinerja pemerintah	Optimalisasi kegiatan mutasi dan rotasi
2	Adanya komitmen dari pemerintah dalam pemanfaatan teknologi	Petugas aparatur tidak semua memiliki kemampuan IT	Peningkatan kapasitas SDM lingkup pemerintah kabupaten
3	Update data pegawai belum akurat atau lengkap dan Belum adanya sistem informasi Kepegawaian yang terintegrasi	Rendahnya kualitas perencanaan	Optimalisasi dan pemutakhiran data urusan kepegawaian dan pendidikan pelatihan
4	Pelaksanaan dan pelaporan Diklat yang belum terpadu melalui BKPSDM sehingga menyebabkan database Diklat menjadi tidak akurat	Minimnya kualitas data ASN yang mendapatkan pelatihan atau bimbingan teknis	Optimalisasi pelaksanaan Diklat secara terpadu melalui BKPSDM
5	Manajemen kepegawaian yang belum terlaksana secara maksimal dikarenakan sarana dan prasarana yang belum mendukung	Rendahnya kualitas dan kapasitas ASN	Komitmen dari Pimpinan untuk melaksanakan sistem Merit secara menyeluruh

34) Penelitian dan Pengembangan

Layanan Urusan Penelitian dan Pengembangan menjadi kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.92
Identifikasi dan Solusi Permasalahan
Bidang Penelitian dan Pengembangan

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
1	Kurangnya penelitian untuk perumusan kebijakan pembangunan daerah	Perencanaan pembangunan daerah kurang terukur Kurang berkualitasnya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Masih lemahnya penyelenggaraan kelitbangan daerah Lemahnya pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah Rendahnya kapabilitas kelembagaan	Penguatan urusan Kelitbangan daerah
2	Minimnya perhatian terhadap kegiatan-kegiatan kelitbangan	Rendahnya Capaian kinerja urusan kelitbangan	Perencanaan kegiatan-kegiatan kelitbangan dan inovasi daerah
3	Rendahnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi kelitbangan	Rendahnya tingkat efisiensi dan efektivitas, pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan sebagai wujud implementasi inovasi di daerah	Peningkatan pemahaman terhadap tugas dan fungsi kelitbangan
4	Rendahnya angka indeks inovasi daerah	Minimnya capaian dana insentif daerah	Penguatan Inovasi Daerah melalui kajian dan penyediaan regulasi
5	Kebijakan daerah belum didasarkan pada hasil penelitian dan pengembangan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum terlaksana secara efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatkan penyelenggaraan Kelitbangan daerah dengan target tertentu

35) Pengawasan

Layanan Urusan Pengawasan menjadi Inspektorat Daerah dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.93
Identifikasi dan Solusi Permasalahan Bidang Pengawasan

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
1	Masih kurangnya bidang kompetensi pendidikan sesuai dengan Daftar Materi Pemeriksaan	Belum maksimalnya kegiatan audit terhadap seluruh mandatory audit	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas SDM

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
	<ul style="list-style-type: none"> Belum seimbangnya rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan Masih kurangnya jatah diklat kompetensi khusus dari instansi Pembina (BPKP untuk auditor dan kemendagri untuk P2UPD) 		
2	Belum terpenuhinya anggaran pengawasan sebesar 0,75% dari APBD Kabupaten Luwu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri	Rendahnya capaian kinerja pemerintah dibidang pengawasan	Penyusunan PERDA terkait pemenuhan anggaran inspektorat daerah Kabupaten Luwu

36) Sekretariat DPRD

Identifikasi dan solusi permasalahan Bidang Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.94
Identifikasi dan Solusi Permasalahan Bidang Sekretariat DPRD

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
1	Manajemen pengelolaan kesekretariaatan yang belum mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi	Rendahnya kualitas manajemen berbasis digital	Penguatan tata kelola sistem berbasis digital
2	Belum maksimalnya ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang mendukung birokrasi cerdas	Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung birokrasi cerdas	Pembangunan serta pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung

37) Sekretariat Daerah

Identifikasi dan solusi permasalahan Bidang Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.95
Identifikasi dan Solusi Permasalahan Bidang Sekretariat Daerah

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi
1	Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi sesuai tugas dan fungsi	Kebijakan pembangunan kurang efektif akibat lemahnya evaluasi	
2	Belum optimalnya pengelolaan kepegawaian dan asset perangkat daerah	Potensi SDM dan asset daerah kurang berkembang sebagaimana mestinya	
3	Belum optimalnya penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa	Efisiensi anggaran dan transparansi PPBJ kurang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	

2.4. STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam SPM merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan Sosial.

2.4.1. Pendidikan

SPM pada Bidang Pendidikan terdiri dari 3 (tiga) jenis pelayanan dasar, dengan rincian dan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.96.
Target dan Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

INDIKATOR PENCAPAIAN	Target Nasional	Capaian SPM		Interpretasi
		2018	2019	
1. Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	100%	88,71	96,78	Belum tercapai
2. Jumlah Warga Negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	82,73	17,70	Belum tercapai
3. Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	35,15	52,40	Belum tercapai

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu, Tahun 2020.

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh jenis layanan SPM Bidang Pendidikan belum mencapai target sesuai mutu yang ditetapkan. Hal ini menjadi perhatian melalui pembangunan pendidikan yang berkelanjutan, sejak perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, agar standar pendidikan masyarakat Kabupaten Luwu sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman.

2.4.2. Kesehatan

SPM pada Bidang Kesehatan terdiri dari 12 (dua belas) jenis pelayanan dasar, dengan rincian dan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.97.
Target dan Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

INDIKATOR PENCAPAIAN	Target Nasional	Capaian SPM		Interpretasi
		2018	2019	
1. Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	84,96	93,94	Belum tercapai
2. Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	89,78	88,52	Belum tercapai
3. Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	98,93	100,00	Belum tercapai
4. Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100,00	71,14	Belum tercapai
5. Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	84,96	87,05	Belum tercapai
6. Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100,00	53,50	Sudah tercapai
7. Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100,00	39,57	Belum tercapai
8. Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan		100,00	44,90	
9. Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan		100,00	67,90	
10. Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan		100,00	95,70	
11. Jumlah Warga Negara terduga tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan		100,00	77,00	
12. Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan		100,00	64,54	

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Luwu, Tahun 2020.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 7 (indikator) SPM pada Bidang Kesehatan yang ditetapkan targetnya secara nasional, seluruhnya belum mampu dicapai Kabupaten Luwu.

2.4.3. Pekerjaan Umum

SPM pada Bidang Pekerjaan Umum terdiri dari 4 (empat) jenis pelayanan dasar, dengan rincian dan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.98.
Target dan Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

INDIKATOR PENCAPAIAN	Target Nasional	Capaian SPM		Interpretasi
		2018	2019	
1. Warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100%	100,00	Sudah tercapai
2. Warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%			belum tercapai

INDIKATOR PENCAPAIAN	Target Nasional	Capaian SPM		Interpretasi
		2018	2019	
3. Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	60,00%	24,00%		Belum tercapai
4. Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	70,00%	59,94%		Belum tercapai

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu, Tahun 2020.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 4 (indikator) SPM pada Bidang Pekerjaan Umum, baru indikator kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang sudah tercapai, sedangkan sisanya belum tercapai atau belum tersedia data. Hal ini menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan selanjutnya.

2.4.4. Perumahan Rakyat

SPM pada Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari 2 (dua) jenis pelayanan dasar, dengan rincian dan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.99.
Target dan Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

INDIKATOR PENCAPAIAN	Target Nasional	Capaian SPM		Interpretasi
		2018	2019	
1. Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	NA	Tidak tersedia data
2. Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kab/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%	Tidak ada warga yang terkena relokasi		

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Luwu, Tahun 2020.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 2 indikator SPM pada Bidang Perumahan Rakyat, terdapat satu indikator yang tidak tersedia data capaian. Sedangkan indikator lainnya tidak ada kejadian yang dimaksudkan. Hal ini menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan selanjutnya.

2.4.5. Ketentraman dan Ketertiban Umum

SPM pada Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 5 (lima) jenis pelayanan dasar, dengan rincian dan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.100.
Target dan Pencapaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

INDIKATOR PENCAPAIAN	Target Nasional	Capaian SPM		Interpretasi
		2018	2019	
1. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum	100%	100%	100,00	Sudah tercapai

INDIKATOR PENCAPAIAN	Target Nasional	Capaian SPM		Interpretasi
		2018	2019	
2. Perda dan perkara	100%	47%	100,00	Belum tercapai
3. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100,00	Sudah tercapai
4. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	22%	100,00	Belum tercapai
5. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100,00	100,00	Belum tercapai

Sumber: - Satuan Polisi Pamong Praja, Kab. Luwu, Tahun 2020.

- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu, Tahun 2020..

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 5 indikator SPM pada Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dalam pelaksanaannya di Kabupaten Luwu seluruhnya telah mencapai target yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

2.4.6. Sosial

SPM pada Bidang Sosial terdiri dari 5 (lima) jenis pelayanan dasar, dengan rincian dan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.101.
Target dan Pencapaian SPM Bidang Sosial

INDIKATOR PENCAPAIAN	Target Nasional	Capaian SPM		Interpretasi
		2018	2019	
1. Warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100,00	100,00	Sudah tercapai
2. Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100,00	100,00	Sudah tercapai
3. Warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%	100,00	Sudah tercapai
4. Warga tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	100%	Tidak ada warga	100,00	Sudah tercapai
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	100%	100,00	100,00	Sudah tercapai

Sumber: Dnas Sosial Kab. Luwu, Tahun 2020.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 5 indikator SPM pada Bidang Sosial, dalam pelaksanaannya di Kabupaten Luwu seluruhnya telah mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini harus dipertahankan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

2.5. TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* disingkat dengan *SDGs* adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Tujuan ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari Tujuan Pembangunan Milenium yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.

Agenda pembangunan berkelanjutan yang baru dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan lahir pada Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB, Rio+20, pada 2012 dengan menetapkan rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara universal serta dapat diukur dalam menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan; (1) lingkungan, (2) sosial, dan (3) ekonomi.

Agenda 2030 terdiri dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SGD) atau Tujuan Global, yang akan menjadi tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan (2030). Capaian Kabupaten Luwu terhadap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.102.
Capaian dan Target TPB/SDGs Tahun 2015-2019

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					Keterangan
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun								
1.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	7-8%	11%	13,89%	14,35%	14,01%	13,36%	12,78%	Belum tercapai
1.2	Proporsipeserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	90%	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sudah tercapai
1.3	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	17,12%	20,15%	41,95%	41,95%	41,95%	41,95%	20,86%	Sudah tercapai
1.4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	2,8 Juta Rumah Tangga	10.000 KSM	4.684 KSM	9.936 KSM	9.903 KSM	16.879 KSM	16.526 KSM	Sudah tercapai
1.5	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	70%	97,96%	86,2%	93,57%	93,57%	89,90%	97,96%	Sudah tercapai
1.6	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	63%	73%	95%	100%	100%	94%	73%	Sudah tercapai
1.7	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15- 49 tahun yang berstatus kawin	65%	69,90%	64,93%	66,27%	69,20%	70,00%	69,90%	Sudah tercapai
1.8	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	100%	75,45%	71,00%	76,00%	75,45%	75,45%	75,45%	Belum tercapai
1.9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat	91,63%	72,10%	54,48%	58,89%	67,66%	74,85%	72,10%	Belum tercapai
1.10	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	77,40%	55,26%	75,18%	75,96%	55,26%	52,45%	55,26%	Belum tercapai
1.11	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	100%	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
1.12	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Menurun	• 0 • 0 • 0,0005	• 0 • 0 • 0,02	• 0 • 0 • 0,04	• 0,00001 • 0,00002 • 0,01101	• 0,00001 • 0 • 0,00618	• 0 • 0,0001 • 0,03901	Sudah tercapai
1.13	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	39 Daerah	8 Kecamatan	0 Kecamatan	1 Kecamatan	2 Kecamatan	4 Kecamatan	1 Kecamatan	Sudah tercapai

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					Keterangan
				2015	2016	2017	2018	2019	
1.14	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Ada	Ada	-	-	-	-	-	Belum tercapai
1.15	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Sudah tercapai
2	Tujuan 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan								
2.1	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	17%	15%	N/A	N/A	15,90%	13,40%	9,80%	Sudah tercapai
2.2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Menurun	12,50%	14,40%	14,20%	13,80%	13,60%	13,05%	Sudah tercapai
2.3	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	8,50%	8,50%	13,60%	12,70%	9,10%	9,00%	8,50%	Sudah tercapai
2.4	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun /balita	Menurun	14,00%	N/A	N/A	14,30%	27,90%	18,40%	Belum tercapai
2.5	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/balita	28%	11%	N/A	N/A	12,35%	10,21%	14,67%	Sudah tercapai
2.6	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	N/A	3,50%	N/A	N/A	8,06%	6,03%	4,04%	Belum tercapai
2.7	Prevalensi anemia pada ibu hamil	28%	15%	-	8,40%	6,25%	14,30%	11,01%	Sudah tercapai
2.8	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	50%	91,29%	-	67,3%	66,00%	74,5%	86,4%	Sudah tercapai
2.9	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Skor PPH = 92,5; Tingkat Konsumsi Ikan = 54,5 kg/kapita/tahun	89,2 50,32	81,9 48,32	85,2 48,81	87,8 49,29	86,3 49,79	89,2 50,32	Belum tercapai
3	Tujuan 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia								
3.1	Angka Kematian Ibu (AKI)	306	92,00 per 100,00.000 penduduk	167,8 per 100.000 penduduk	106,01 per 100.000 penduduk	106,08 per 100.000 penduduk	94,40	95,65	Sudah tercapai
3.2	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	95%	88,52%	89,7	86,2	93,57	89,9	88,52%	Belum tercapai

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					Keterangan
				2015	2016	2017	2018	2019	
3.3	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	85%	97,96%	89,75%	86,93%	95,51%	87,65%	97,96%	Sudah tercapai
3.4	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Menurun	9,08	1 ;117	1;106	1;80	1;92	9,72	Sudah tercapai
3.5	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Menurun	Menurun	1; 160	1;165	1;140	1;132	1:54	Sudah tercapai
3.6	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran Hidup	24	0,0091	0,0079	0,0081	0,0113	0,0107	0,0091	Sudah tercapai
3.7	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	95%	Mencapai 80%	Mencapai 80%	Mencapai 80%	Mencapai 80%	Mencapai 80%	Mencapai 80%	Sudah tercapai
3.8	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	<0,5%	0,005 dari total populasi	0,003 dari total populasi	0,001 dari total populasi	0,009 dari total populasi	0,005 dari total populasi	0,005	Sudah tercapai
3.9	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	245	125	370	484	489	592	183	Sudah tercapai
3.10	Kejadian Malaria per 1000 orang	Menurun	47	36	34	40	59	52	Belum tercapai
3.11	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	300 Kab/Kota	Mencapai Eliminasi Malaria	Tidak Mencapai	Tidak Mencapai	Tidak Mencapai	Mencapai	Tidak Mencapai	Belum tercapai
3.12	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	-	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	Sudah tercapai
3.13	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Menurun	15	27	10	29	24	18	Sudah tercapai
3.14	Jumlah Provinsi/Kab/Kota dengan eliminasi Kusta	34 Provinsi	34 Provinsi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak ada data
3.15	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)	35 Kab/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak ada data
3.16	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	5,40%	4,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak ada data
3.17	Prevalensi tekanan darah tinggi	24,30%	20%	N/A	14,8%	26,1%	18,2%	34,6%	Belum tercapai
3.18	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun	15,40%	12,90%	N/A	1,00%	17,20%	8,20%	12,90%	Sudah tercapai
3.19	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri	Menurun	-	N/A	-	-	-	-	Tidak ada data
3.20	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa kesehatan	280 Kab/Kota	4	N/A	-	2	4	6	Sudah tercapai
3.21	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	0,02%	1,00%	N/A	-	-	-	-	Tidak ada data

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					Keterangan
				2015	2016	2017	2018	2019	
3.22	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	66%	69,90%	N/A	66,27%	69,20%	70,00%	69,90%	Sudah tercapai
3.23	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	65%	69,90	64,93	66,27	76,06	84,36	69,90	Sudah tercapai
3.24	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	23,50%	18,77%	N/A	15,44%	17,15%	19,10%	20,88%	Sudah tercapai
3.25	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	Meningkat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sudah tercapai
3.26	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	95%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sudah tercapai
3.27	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Meningkat	90%	N/A	80	80	90	90	Sudah tercapai
3.28	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Meningkat	1:443	1:9.915	1:11.039	1:7.580	1:7.484	1:443	Sudah tercapai
4	Tujuan 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua								
4.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ MA/ sederajat	91,63%		93,60%	98,50%	96,50%	70,12%	72,10%	
4.2	Rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun	8,8 Tahun	8,15 Tahun	7,74	7,75	7,75	7,97	8,15	Sudah tercapai
4.3	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) Rasio Angka Partisipasi Kasar Tinggi	Meningkat	<ul style="list-style-type: none"> 93,51 82,73 	<ul style="list-style-type: none"> 91,39 77,13 	<ul style="list-style-type: none"> 94,50 86,60 	<ul style="list-style-type: none"> 95,51 80,07 	<ul style="list-style-type: none"> 95,83 81,60 	<ul style="list-style-type: none"> 93,51 82,73 	Sudah tercapai
4.4	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	96,10%	98,12%	NA	98,78%	98,78%	98,80%	98,12%	Sudah tercapai
4.5	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	Meningkat	<ul style="list-style-type: none"> 99% 92,66 	N/A	N/A	N/A	<ul style="list-style-type: none"> 98,86 91,80 	<ul style="list-style-type: none"> 98,83 92,50 	Belum tercapai
5	Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan								
5.1	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	16 Kebijakan	2	NA					Belum tercapai
5.2	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	70%	100%	100	100%	100%	100,00%	100,00%	Sudah tercapai
5.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	91,63%	Provinsi	74,75%	53,18%	57,22%	63,56%	70,12%	Belum tercapai

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					Keterangan
				2015	2016	2017	2018	2019	
5.4	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	16,60%	11%	8,57	8,57	8,57	8,57	5,71	Belum tercapai
6	Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan								
6.1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	100%	75,45%	71,00%	76,00%	75,45%	75,45%	75,45%	Belum tercapai
6.2	Kualitas Air Danau	Meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak ada data
6.3	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak ada data
6.4	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi	5,5 Juta Ha	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak ada data
7	Tujuan 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua								
7.1	Rasio elektrifikasi	96,60%	99%	88,11%	89,60%	97,82%	98,02%	98,66%	Sudah tercapai
8	Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua								
8.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita (%)	Meningkat	7,65%	7,26%	7,88%	6,79%	6,86%	6,62%	Belum tercapai
8.2	PDB per kapita	50 Juta	43,25	29,59	33,57	36,60	40,20	43,25	Belum tercapai
8.3	Persentase tenaga kerja formal	Meningkat	62,23%	60,78	61,03	64,69%	64,89%	61,75%	Belum tercapai
8.4	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Meningkat			60,49%			64,84	
8.5	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	25%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak ada data
8.6	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Menurun	4,08%	7,87		4,78%	3,89%	4,66%	Sudah tercapai
8.7	Tingkat setengah pengangguran	Menurun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak ada data
8.8	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Meningkat	Meningkat	N/A	22,867	23,131	23,392	23,283	Sudah tercapai
8.9	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	8%	Meningkat	0,06%	0,05%	0,05%	0,14%	0,07%	Sudah tercapai
8.10	Jumlah wisatawan mancanegara	20 Juta (skala nasional)	N/A	333 Skala Kabuapten	180 Skala Kabuapten	224 Skala Kabuapten	311 Skala Kabuapten	276 Skala Kabupaten	Sudah tercapai
8.11	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Meningkat	2.960	11.117	10.700	12.477	12.573	2.960	Sudah tercapai
8.12	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Meningkat	21.584	N/A	18.867	19.967	20.921	21.584	Sudah tercapai
8.13	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak ada data
9	Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi								
9.1	Panjang jalur kereta api	3.258 Km		NA					

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					Keterangan
				2015	2016	2017	2018	2019	
9.2	Jumlah dermaga penyeberangan	275 Unit					10	10	Sudah tercapai
9.3	Jumlah pelabuhan strategis	24 Pelabuhan (skala nasional)	1	1	1	1	1	1	Sudah tercapai
9.4	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	Meningkat	10%	4,44%	8,97%	7,59%	6,95%	10,94%	Sudah tercapai
9.5	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	4,3% (2015)	10,49	N/A	8,97	7,59	6,95	10,49	Sudah tercapai
9.6	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	Meningkat	7.161	N/A	6.162	6.367	6.848	7.161	Sudah tercapai
9.7	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak ada data
9.8	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	26%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak ada data
10	Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara								
10.1	Koefisien Gini	0,36	0,355	0,361	0,359	0,395	0,362	0,352	Sudah tercapai
10.2	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	7-8%	11%	13,89%	14,35%	14,01%	13,36%	12,78%	Sudah tercapai
10.3	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	Meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak ada data
10.4	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	14%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak ada data
11	Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan								
11.1	Persentase pengguna modal di perkotaan	32%	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	Sudah tercapai
11.2	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama	20 kota sedang (skala nasional)							
11.3	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	5 Metropolitan (skala nasional)							
11.4	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Menurun	<ul style="list-style-type: none"> • 0 • 0 • 0,0005 	<ul style="list-style-type: none"> • 0 • 0 • 0,02 	<ul style="list-style-type: none"> • 0 • 0 • 0,04 	<ul style="list-style-type: none"> • 0,00001 • 0,00002 • 0,01101 	<ul style="list-style-type: none"> • 0,00001 • 0 • 0,00618 	<ul style="list-style-type: none"> • 0 • 0,0001 • 0,03901 	Sudah tercapai
11.5	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	30%	25%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak ada data
11.6	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	80%	70%	76,03%	80,50%	83,75%	83,75%	67,30%	Belum tercapai

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					Keterangan
				2015	2016	2017	2018	2019	
11.7	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	Ada	Ada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak ada data
12	Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan								
12.1	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	150 Juta Ton	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak ada data
12.2	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	20 Ton/Hari		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak ada data
13	Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya								
13.1	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Ada	Ada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak ada data
13.3	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Biennial Update Report (BUR Ke3)	Ada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak ada data
14	Tujuan 14 : Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan								
14.1	Jumlah nelayan yang terlindungi	Meningkat	644	NA	112	2.389	129	692	Sudah tercapai
15	Tujuan 15 : Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati								
15.1	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak ada data
15.2	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak ada data
15.3	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak ada data
16	Tujuan 16 : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan								
16.1	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Meningkat							Tidak ada data
16.2	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	75%	BB	C	C	81,94	CC	CC	Belum tercapai
16.3	Persentase penggunaan E- procurement terhadap belanja pengadaan	80%	100%	N/A	100	100	100	100,00	Sudah tercapai
16.4	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	16,60%	11%	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	Belum tercapai

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					Keterangan
				2015	2016	2017	2018	2019	
17	Tujuan 17 : Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan								
17.1	Total pendapatan pemerintah PDB sumbernya	Meningkat	Meningkat	7.437,42	8.023,37	8.567,87	9.155,16	9.728,96	Sudah tercapai
17.2	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan	Meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak ada data
17.3	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Meningkat	BPS	N/A	N/A	N/A	100,00	93,5	Sudah tercapai
17.4	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Meningkat	BPS	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	Sudah tercapai
17.5	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi rujukan statistik	Meningkat	BPS	N/A	N/A	N/A	6	9	Sudah tercapai
17.6	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Ada		N/A	-	-	-	-	Tidak ada data
17.7	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	Meningkat	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak ada data
17.8	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)	Meningkat	BPS	N/A	N/A	N/A	98,89	100,00	Sudah tercapai

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah adalah kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah dibidang ekonomi yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Dengan demikian, arah kebijakan ekonomi Daerah merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran pembangunan tahunan daerah maupun jangka menengah daerah serta mengatasi isu strategis dan menyelesaikan permasalahan daerah yang dilakukan melalui prioritas perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan.

3.1.1. Kondisi Eksisting Ekonomi Daerah

3.1.1.1. *Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB*

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu pada tahun 2019 adalah 6,26 persen dengan nilai PDRB sebesar 9,73 triliun rupiah. Untuk tahun 2020, dengan adanya pandemic *Covid-19* yang berdampak kepada kehidupan masyarakat secara keseluruhan, sangat signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi Kabupaten Luwu diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,60 persen dengan nilai PDRB 10,18 triliun rupiah.

Tabel 3.1.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB ADHK
Tahun 2020

Kategori	Lapangan Usaha	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB ADHK			
		2019		Perkiraan 2020	
		Rp (milyar)	%	Rp (milyar)	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.747,14	3,98	4.895,25	3,12
B	Pertambangan dan Penggalian	227,42	6,86	243,61	7,12
C	Industri Pengolahan	457,47	10,94	508,94	11,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,93	4,09	13,42	5,89
E	Pengadaan Air	1,56	3,83	1,62	4,12
F	Konstruksi	823,64	8,81	881,13	6,98
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Sepeda Motor	1.173,45	8,65	1.223,32	4,25
H	Transportasi dan Pergudangan	81,81	9,36	85,21	4,15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minuman	72,56	6,09	74,05	2,05
J	Informasi dan Komunikasi	309,75	9,97	340,88	10,54
K	Jasa Keuangan	136,65	4,47	140,95	3,15
L	Real Estate	572,49	5,8	584,80	2,15
M,N	Jasa Perusahaan	2,56	8,09	2,67	4,45
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	446,86	12,17	473,00	5,85
P	Jasa Pendidikan	354,86	7,62	374,06	5,41
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	278,88	7,93	302,39	8,43
R,S,T,U	Jasa Lainnya	29,93	8,31	30,87	3,15
PDRB Luwu		9.728,96	6,26	10.176,17	4,60

Sumber : BPS, Perkiraan Capaian 2020 oleh Bappeda Kabupaten Luwu Luwu.

Jika dilihat dari laju pertumbuhan setiap sektor lapangan usaha yang disajikan pada tabel 3.1, maka sektor yang mengalami penurunan pada tahun 2020 sebagai akibat dari dampak covid-19 yakni sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, sektor Jasa Lainnya, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan sepeda motor, sektor penyediaan akomodasi dan makanan dan minuman, real estate, sektor jasa perusahaan, sektor jasa pendidikan, sektor konstruksi, sektor jasa keuangan dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Selain Pertumbuhan Ekonomi ADHK, pertumbuhan Ekonomi ADHB pada tahun 2020 juga di perkirakan akan lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Berikut dapat dilihat pertumbuhan ekonomi dan PDRB ADHB Kabupaten pada tabel 3.2. berikut ini.

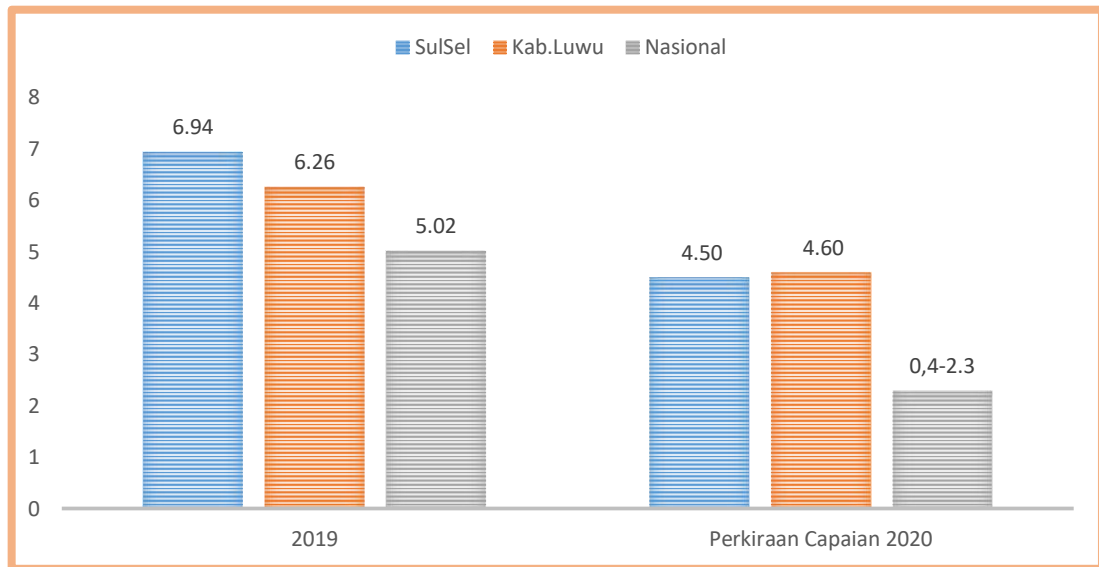
Tabel 3.2.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB ADHB
Tahun 2020

Kategori	Lapangan Usaha	Pertumbuhan Ekonomi ADHB dan PDRB ADHB			
		2019		Perkiraan 2020	
		Rp (milyar)	%	Rp (milyar)	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.201,86	5,40	8.573,96	4,54
B	Pertambangan dan Penggalian	429,52	8,15	465,66	8,41
C	Industri Pengolahan	668,83	12,33	753,38	12,64
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12,05	4,60	12,82	6,40
E	Pengadaan Air	2,07	5,61	2,19	5,90
F	Konstruksi	1.349,18	15,36	1.531,70	13,53
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Sepeda Motor	1.587,98	12,77	1.720,89	8,37
H	Transportasi dan Pergudangan	135,69	11,80	144,63	6,59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minuman	110,28	9,14	115,91	5,10
J	Informasi dan Komunikasi	335,04	10,96	373,67	11,53
K	Jasa Keuangan	218,61	8,25	233,77	6,93
L	Real Estate	881,8	7,39	914,76	3,74
M,N	Jasa Perusahaan	4,19	9,97	4,46	6,33
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	726,5	15,53	793,43	9,21
P	Jasa Pendidikan	545,34	10,72	591,77	8,51
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	398,3	11,10	444,52	11,60
R,S,T,U	Jasa Lainnya	50,38	11,46	53,55	6,30
PDRB Luwu		15.657,62	8,42	16.731,05	6,86

Sumber : BPS, Perkiraan Capaian 2020 oleh Bappeda Kabupaten Luwu.

Dampak dari wabah covid-19 juga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan diproyeksikan akan mengalami penurunan dari 6,94 persen pada tahun 2019 menjadi sebesar 4,5 persen pada tahun 2020, begitupun juga dengan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu dari 5,02 persen pada tahun 2019 menjadi sekitar 0,4-2,3 persen pada tahun 2020. Berikut dapat dilihat perbandingan perkiraan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2020.

Gambar 3.1.
Perbandingan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020



Sumber : RKPD Provinsi Sul-Sel 2021, diolah Bappeda Kabupaten Luwu.

3.1.1.2 PDRB Perkapita

PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Luwu tahun 2020 adalah Rp.45.833.0000,-, tumbuh 5,97% dari tahun 2019 yaitu Rp.43.250.000,00. Sedangkan ADHK diperkirakan tumbuh sebesar 3,74%, yaitu dari Rp.26.874.000,00 menjadi Rp.27.879.000,00. Nilai PDRB perkapita ADHB dan ADHK tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.
Proyeksi PDRB Perkapita ADHB dan ADHK
Tahun 2020

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Nilai (Rp Juta)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rp Juta)	Pertumbuhan (%)
2018	40.200,00	9,83	25.487,00	5,99
2019	43.250,00	7,59	26.874,00	5,44
2020	45.833,00	5,97	27.879,00	3,74
Rerata Pertumbuhan		7,80		5,06

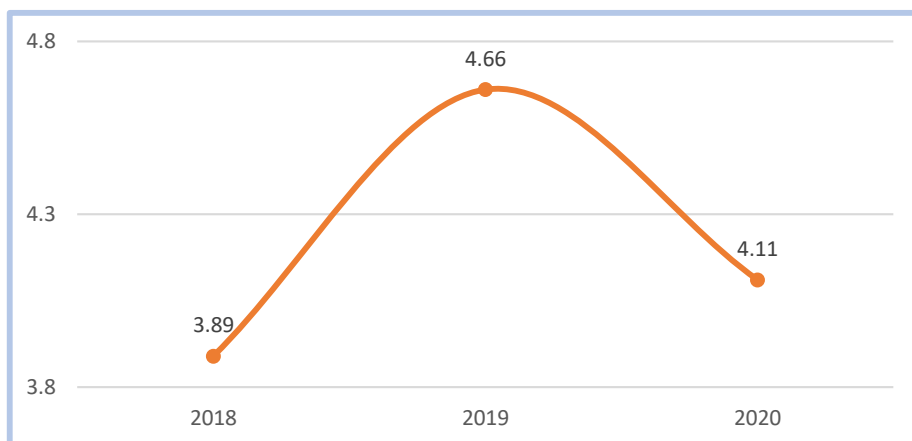
Sumber : BPS, Perkiraan Capaian 2020 oleh Bappeda Kabupaten Luwu.

3.1.1.3 Ketenagakerjaan

Penyebaran wabah Covid-19 juga meningkatkan jumlah pengangguran sebagai akibat rendahnya permintaan terhadap produksi. Namun demikian hal ini tidak berdampak di Kabupaten Luwu mengingat belum adanya perusahaan yang berskala

besar serta kondisi yang ada saat ini dimana sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, sehingga pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Luwu diperkirakan akan turun menjadi 4,10 persen, lebih baik jika dibandingkan pada tahun 2019 yang mencapai 4,66%.

Gambar 3.2.
Proyeksi Tingkat Pengangguran Kabupaten Luwu Tahun 2020

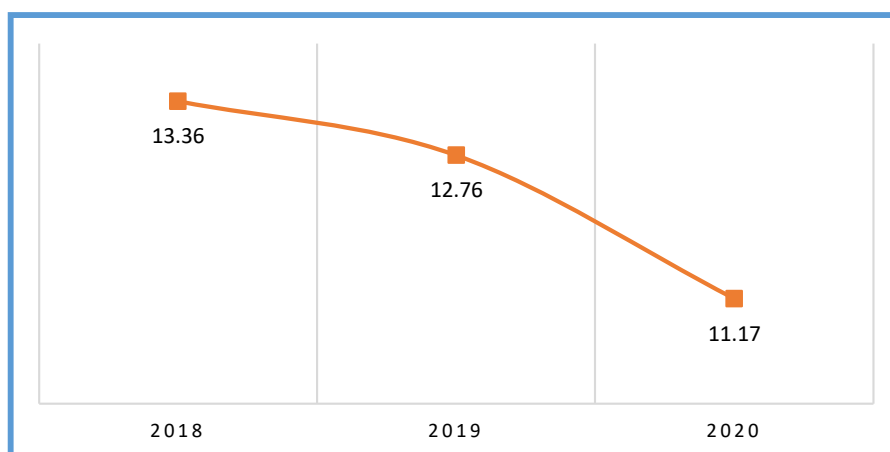


Sumber : BPS, Perkiraan Capaian 2020 oleh Bappeda Kabupaten Luwu.

3.1.1.4 Tingkat Kemiskinan

Seperti halnya dengan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan pada tahun 2020 diperkirakan juga akan turun menjadi 11,17 persen dibanding pada tahun 2018 yang mencapai 13,36 persen dan 2019 sebesar 12,76 persen. Hal ini di dasari asumsi bahwa di Kabupaten Luwu sebagian besar penduduknya bekerja disektor pertanian sehingga secara umum kejadian pandemic *Covid-19* tidak terlalu mempengaruhi aktivitas sehari-hari serta mempengaruhi struktur mata pencaharian penduduk.

Gambar 3.3.
Grafik Tingkat Kemiskinan Kabupaten Luwu Tahun 2018-2020



Sumber : BPS, Perkiraan Capaian 2020 oleh Bappeda Luwu

3.1.2 Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah

3.1.2.1 Prospek Perekonomian Daerah

Kondisi perekonomian Kabupaten Luwu pada tahun 2021 diperkirakan akan tetap tumbuh meskipun mengalami stagnasi ditengah kondisi dunia yang dilanda pandemic covid-19. Hal ini didasari dengan adanya kebijakan pemerintah terkait penanganan akibat dari dampak pendemi *Covid-19* yang mendorong perbaikan ekonomi. Selain itu pembangunan jalan dari Kabupaten Luwu-Toraja yang diperkirakan sudah dapat dilalui pada tahun 2021, serta kebijakan pemerintah untuk pengembangan kawasan bandara Bua dan pengembangan objek-objek wisata khususnya pengembangan agrowisata di Kecamatan Bua dan Bessesang Tempe (Bastem) diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan sektor penyediaan akomodasi dan makanan dan minuman. Faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yakni peningkatan investasi, dimana saat ini pemerintah telah berupaya melakukan penataan regulasi yang memberikan kemudahan dalam berinvestasi serta mengupayakan peningkatan infrastruktur yang akan mendukung konektivitas dalam pengembangan investasi.

3.1.2.2 Tantangan Perekonomian Daerah

Tantangan perekonomian Kabupaten Luwu pada tahun 2021 tidak hanya sebatas faktor internal, tetapi juga dipengaruhi faktor eksternal. Perekonomian global pada tahun 2021 diperkirakan masih terkait dengan penanganan *Covid-19*. Diperkirakan situasi ekonomi global akan mengalami perlambatan dan ancaman resesi di sejumlah Negara akibat perang dagang Amerika dan Tiongkok/China, tapi juga perang dagang AS dan Eropa.

Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan sebesar 3,6-3,8 persen pada tahun 2021. Harga komoditas ekspor utama Indonesia diperkirakan juga akan cenderung menurun, diantaranya batu bara dan minyak kelapa sawit, seiring dengan beralihnya permintaan dunia ke produk yang lain.

Pertumbuhan ekonomi nasional yang melambat tersebut, penyebab utamanya adalah tingkat produktivitas yang rendah seiring tidak berjalannya transformasi struktural. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat adalah: (1) regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang menghambat; (2) sistem perpajakan dan besarnya

penerimaan pajak belum cukup memadai; (3) kualitas infrastruktur yang masih rendah terutama konektivitas dan energi; (4) rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja; dan (5) intermediasi sektor keuangan yang rendah dan pasar keuangan yang dangkal.

Tantangan perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 tidak lagi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi. Faktanya, bahwa inklusivitas pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tergolong rendah dalam lima tahun terakhir, sehingga kerangka pendanaan harus mampu difokuskan pada inklusivitas pertumbuhan, dan tetap diupayakan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi tinggi yang dicapai selama ini.

Berdasarkan analisis terhadap perekonomian daerah, dapat dirumuskan tantangan perekonomian Kabupaten Luwu tahun 2021 sebagai berikut :

- ✓ Pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat/stagnan sehingga masih terdapat resiko pertumbuhan akan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Dampak dari mewabahnya Pandemi Covid-19 dapat menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan rendahnya pertumbuhan ekonomi jika tidak ditangani dengan maksimal.
- ✓ Terbatasnya kemampuan fiskal daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi akibat belum maksimalnya pengelolaan potensi pendapatan daerah sehingga menyebabkan APBD Kabupaten Luwu masih sangat tergantung dengan dana transfer.
- ✓ Daya saing produk komoditi unggulan Kabupaten Luwu masih tergolong rendah akibat rendahnya kualitas SDM dan belum maksimalnya kerjasama.
- ✓ Rendahnya nilai jual hasil pertanian masyarakat akibat perubahan iklim dan kemampuan SDM petani. Nilai jual petani yang rendah juga dipengaruhi kurangnya kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi dan pemanfaatan produk lokal.

Tantangan tersebut di atas merupakan tantangan laten perekonomian Kabupaten Luwu. Untuk itu, dibutuhkan suatu strategi untuk mengubah berbagai tantangan yang ada sehingga perekonomian daerah Kabupaten Luwu mampu bertransformasi menuju tingkat yang lebih baik.

3.1.3 Investasi Daerah

Belum tersedianya rencana umum pengembangan investasi daerah serta adanya koordinasi yang baik antarsektor merupakan faktor utama rendahnya investasi

di Kabupaten Luwu. Hal ini terlihat dari tidak berkembangnya realisasi investasi maupun jumlah investor yang menanamkan modalnya selama periode 2016-2019. Oleh karena itu, seluruh *stakeholder* perlu melakukan transformasi dan mengembangkan paradigma untuk mendatangkan investor berskala menengah dan besar di Kabupaten Luwu. Dalam hal ini, faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya investasi antara lain ketersediaan infrastruktur, kemudahan perolehan lahan dan tenaga kerja terlatih direncanakan dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Disamping itu, juga dukungan kemudahan berusaha bagi UMKM perlu diperhatikan.

3.1.4 Sasaran dan Arah Kebijakan Perekonomian daerah

3.1.4.1 Sasaran Ekonomi Makro

Pembangunan yang dilaksanakan diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita yang didorong oleh peningkatan produktivitas subsektor lapangan usaha. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat, sehingga jumlah penduduk miskin dan pengangguran akan berkurang. Selain itu, pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mengurangi ketimpangan wilayah dan mendukung perekonomian wilayah sesuai dengan potensi yang ada.

Birokrasi merupakan penggerak roda pemerintahan, sehingga pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat dan peningkatan kualitas layanan publik tidak akan dapat tercapai jika birokrasi tidak berjalan dengan baik sehingga perlu dilakukan penguatan Kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur. Adanya kebijakan untuk menggunakan produk lokal –termasuk belanja pemerintah-, diversifikasi pangan –termasuk untuk peningkatan gizi-, pembangunan infrastruktur sesuai dengan potensi wilayah, distribusi yang aman dan terjamin, antara lain merupakan sasaran yang perlu diperhatikan untuk kestabilan dan pertumbuhan ekonomi makro.

3.1.4.2 Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Dalam rangka mengembangkan perekonomian daerah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, maka arah kebijakan perekonomian daerah yang akan ditempuh dalam RKPD Tahun 2021 adalah meningkatkan minat investor terhadap potensi dan peluang investasi yang bersifat padat karya, yang didukung oleh terealisasinya sejumlah pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan

perekonomian, pengendalian inflasi, berkembangnya UMKM yang berbasis produk unggulan daerah, peningkatan intensifikasi sektor pertanian yang didukung rekayasa teknologi, pengembangan usaha di sektor pertanian/peternakan, berkembangnya sektor pariwisata, dan kemudian dukungan regulasi yang lebih efektif dan efisien.

Arah kebijakan tersebut di atas sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019, namun demikian mengingat dampak dari wabah pandemi *Covid-19* selain arah kebijakan yang telah disebutkan di atas, pada Tahun 2021 arah kebijakan perekonomian daerah Kabupaten Luwu juga difokuskan pada pemulihan ekonomi dalam kondisi *new normal*, baik untuk mendukung program strategis nasional yang terkait pemulihan dampak pandemi, maupun inovasi untuk mendorong pertumbuhan sektor yang terkena dampak pandemi covid-19 .

3.1.5 Proyeksi Kerangka Ekonomi Daerah

Tahun 2021 merupakan tahun pemulihan dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19, baik sosial maupun ekonomi. Untuk keberhasilan pemulihan tersebut maka pada Tahun 2020 daerah harus mampu mengidentifikasi setiap sektor yang terkena dampak paling parah, yang sedang ataupun sektor yang tidak terkena dampak dari pandemi. Dari hasil identifikasi ini akan menjadi pedoman dalam menyusun langkah untuk pengambilan kebijakan guna mendorong pertumbuhan sektor tersebut.

Meskipun dengan adanya pandemic *Covid-19*, diharapkan masih terjadi pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Asumsi pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya diharapkan sekadar meningkat, tetapi juga menjadi lebih inklusif dan berkualitas sehingga tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan menurun secara signifikan. Dengan demikian, stabilitas harga-harga dapat tercipta dan daya beli masyarakat tetap terjaga pada level lebih tinggi, melebihi capaian dalam beberapa tahun terakhir. Asumsi indikator pembangunan ekonomi Kabupaten Luwu pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4.
Proyeksi Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Luwu Tahun 2021

No	Indikator	Satuan	Proyeksi 2021
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,52
2	PDRB Perkapita ADHB	Rp. Juta	49.41
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,87
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	11,09
5	Gini Rasio	Persen	0,348

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan keuangan daerah dirumuskan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah dengan berpedoman kepada rencana kerja pembangunan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah dan mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah. Kondisi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu pada Tahun 2020 masih bergantung dari penerimaan pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

Pada Tahun 2021 Arah Kebijakan Pendapatan daerah Kabupaten Luwu diharapkan dapat mengurangi ketergantungan penerimaan pendapatan dari pemerintah pusat maupun provinsi melalui optimalisasi pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dengan melakukan ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak daerah. Ekstensifikasi pajak daerah adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak yang belum terdaftar dan perluasan objek pajak, sedangkan intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan peningkatan penerimaan pajak dari wajib pajak yang sudah terdaftar.

Tabel 3.5.
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2018-2022
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019

URAIAN	JUMLAH				
	Realisasi 2018	Realisasi 2019	APBD Pokok2020	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	106.865.737.219,45	113.768.440.255,63	115.457.806.770,00	120.055.280.006,95	124.847.908.307,19
Pendapatan Pajak Daerah	23.225.730.202,36	25.548.757.376,37	23.040.000.000,00	24.422.400.000,00	25.887.744.000,00
Pendapatan Retribusi Daerah	8.262.082.267,00	7.568.962.950,00	9.310.000.000,00	9.589.300.000,00	9.876.979.000,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.146.303.141,00	5.462.261.986,00	5.400.000.000,00	5.616.000.000,00	5.840.640.000,00
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	70.231.621.609,09	75.188.457.943,26	77.707.806.770,00	80.427.580.006,95	83.242.545.307,19
PENDAPATAN TRANSFER	1.164.539.094.627,00	1.301.890.876.218,73	1.341.512.622.840,00	1.381.784.119.357,05	1.418.227.545.724,08
<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</i>	<i>922.578.716.117,00</i>	<i>1.043.484.276.331,00</i>	<i>1.059.443.828.840,00</i>	<i>1.090.868.479.537,05</i>	<i>1.113.078.167.678,15</i>
Bagi Hasil Pajak	10.608.342.717,00	7.592.463.500,00	10.893.276.000,00	11.166.301.805,00	11.445.459.350,13
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.364.733.091,00	6.238.798.434,00	4.077.119.000,00	4.178.348.195,00	4.282.806.899,88
Dana alokasi umum	680.212.384.000,00	718.676.594.000,00	735.958.910.000,00	754.357.882.750,00	773.216.829.818,75
Dana alokasi khusus	226.393.256.309,00	310.976.420.397,00	308.514.523.840,00	321.165.946.787,05	324.133.071.609,40
<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</i>	<i>192.040.061.000,00</i>	<i>195.242.489.000,00</i>	<i>225.067.194.000,00</i>	<i>231.819.209.820,00</i>	<i>238.773.786.114,60</i>
Dana Penyusaian	192.040.061.000,00	195.242.489.000,00	225.067.194.000,00	231.819.209.820,00	238.773.786.114,60
<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</i>	<i>42.812.904.477,00</i>	<i>55.518.012.487,73</i>	<i>50.350.000.000,00</i>	<i>52.112.250.000,00</i>	<i>53.936.178.750,00</i>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	28.098.516.958,00	38.716.661.695,00	35.350.000.000,00	36.587.250.000,00	37.867.803.750,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	14.714.387.519,00	16.801.350.792,73	15.000.000.000,00	15.525.000.000,00	16.068.375.000,00
<i>Bantuan Keuangan</i>	<i>7.107.413.033,00</i>	<i>7.646.098.400,00</i>	<i>6.651.600.000,00</i>	<i>6.984.180.000,00</i>	<i>7.377.389.334,00</i>
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	7.107.413.033,00	7.646.098.400,00	6.651.600.000,00	6.984.180.000,00	7.377.389.334,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	51.717.052.400,00	57.882.203.943,00	58.645.981.200,00	60.405.360.636,00	62.217.521.455,08
Pendapatan Hibah	51.717.052.400,00	57.882.203.943,00	58.645.981.200,00	60.405.360.636,00	62.217.521.455,08
TOTAL PENDAPATAN	1.323.121.884.246,45	1.473.541.520.417,36	1.515.616.410.810,00	1.562.244.760.000,00	1.605.292.975.486,35

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kebijakan belanja daerah merupakan rencana belanja daerah dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pembangunan daerah. Kebijakan belanja daerah Kabupaten Luwu pada Tahun 2021 akan dititik beratkan pada :

1. Pencapaian Visi Misi dan janji kerja Bupati dan Wakil Bupati periode 2019-2024
2. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
3. Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan
4. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar
5. Peningkatan Kualitas Fasilitas Umum dan Kawasan Permukiman
6. Penguatan Kelembagaan dan Kompetensi ASN serta,
7. Mendukung kebijakan nasional tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Percepatan Pencegahan Stunting, Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), serta penerapan tatanan normal baru (new normal).

Selain kebijakan tersebut di atas, kebijakan belanja daerah juga diarahkan pada pemenuhan Belanja tidak langsung yang terdiri atas: Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

Tabel 3.6.
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2018-2022
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019

Uraian	Jumlah				
	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Pagu APBD Pokok 2020	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
BELANJA	1.092.560.683.991,39	1.175.958.066.703,00	1.254.984.302.878,00	1.272.570.050.000,00	1.304.901.710.586,35
BELANJA OPERASI	892.686.013.874,39	875.538.460.205,00	924.723.772.681,00	930.463.772.351,05	947.444.868.262,69
Belanja Pegawai	492.427.421.414,00	509.307.545.818,00	523.903.281.727,00	551.641.533.216,00	570.948.986.878,56
Belanja Barang dan Jasa	354.423.814.042,39	330.363.873.320,00	340.456.802.000,00	289.770.904.313,05	285.489.155.872,12
Belanja Hibah	45.452.078.418,00	35.000.541.067,00	59.132.188.954,00	60.405.360.636,00	62.217.521.455,08
Belanja Bantuan Sosial	382.700.000,00	866.500.000,00	1.231.500.000,00	28.645.974.186,00	28.789.204.056,93
BELANJA MODAL	199.814.400.867,00	299.939.445.953,00	327.260.530.197,00	337.106.277.648,95	352.456.842.323,67
Belanja Modal Tanah	4.157.950.900,00	526.728.230,00	3.160.000.000,00	7.800.000.000,00	51.821.020.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.213.247.209,00	45.678.473.160,00	58.291.527.807,00	51.421.255.500,00	34.547.350.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.453.833.915,00	80.418.045.489,00	63.898.708.255,00	34.280.837.000,00	69.094.690.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	101.070.055.547,00	166.381.925.078,00	166.971.758.758,00	226.463.766.500,00	179.720.113.084,64
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	1.919.313.296,00	6.934.273.996,00	34.938.535.377,00	17.140.418.648,95	17.273.669.239,02
BELANJA TAK TERDUGA	60.269.250,00	480.160.545,00	3.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Belanja Tak Terduga	60.269.250,00	480.160.545,00	3.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
TRANSFER	241.297.844.134,00	273.109.006.911,00	273.489.498.000,00	285.674.710.000,00	296.391.264.900,00
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	2.881.319.358,00	2.842.208.785,00	3.247.000.000,00	3.322.980.000,00	3.339.594.900,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	2.027.107.362,00	2.160.398.395,00	2.304.000.000,00	2.357.913.741,92	2.369.703.310,63
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	854.211.996,00	681.810.390,00	943.000.000,00	965.066.258,08	969.891.589,38
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	238.416.524.776,00	270.266.798.126,00	270.242.498.000,00	282.351.730.000,00	293.051.670.000,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	600.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	236.684.861.000,00	268.122.149.000,00	270.242.498.000,00	282.351.730.000,00	293.051.670.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.131.663.776,00	1.144.649.126,00	-	-	-
TOTAL ABD (TOTAL BELANJA + TRANSFER)	1.333.858.528.125,39	1.449.067.073.614,00	1.528.473.800.878,00	1.558.244.760.000,00	1.601.292.975.486,35

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi. Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan terdiri atas: Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri atas: Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Daerah, Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7 .
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 2018-2022

Uraian	Jumlah				
	Realisasi 2018	Realisasi 2019	APBD 2020	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penerimaan Pembiayaan	34.253.771.032,09	18.000.657.205,12	16.857.390.068,00	-	-
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	34.252.571.032,09	17.999.507.205,12	15.339.650.414,00	-	-
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan kembali pemberian pinjaman	1.200.000,00	1.150.000,00	1.517.739.654,00	-	-
Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	5.517.620.000,00	4.009.619.650,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-
Penyertaan modal (investasi) daerah	5.500.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	17.620.000,00	9.619.650,00	-	-	-
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	28.736.151.032,09	13.991.037.555,12	12.857.390.068,00	(4.000.000.000,00)	(4.000.000.000,00)

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Merujuk pada pengertian yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan dan sasaran dapat dimaknai sebagai rumusan strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan yang secara lengkap tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024.

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, maka perlu penjabaran lebih lanjut dengan menetapkan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Luwu.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kabupaten Luwu dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil

pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD, oleh karena itu rumusan tujuan dan sasaran RKPD berpedoman pada atau diturunkan secara langsung dari RPJMD. Dengan demikian, tujuan dan sasaran RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2021 merupakan implementasi pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 adalah **“KABUPATEN LUWU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI DALAM NUANSA RELIGI”**. Sasaran rumusan Visi tersebut dijabarkan pada 4 (Empat) pokok visi yang menjadi pilar utama dengan penjelasan sebagai berikut :

- **Maju**, mengandung makna terwujudnya Kabupaten Luwu yang lebih baik dengan meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, keadaan sosial ekonomi masyarakat yang stabil, yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kemiskinan dan pengangguran serta ditopang oleh transformasi birokrasi secara bertahap.
- **Sejahtera**, mengandung makna suatu keadaan masyarakat Kabupaten Luwu dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya yang ditandai dengan peningkatan derajat kesehatan, pemenuhan pendidikan dasar dan peningkatan daya beli dalam kondisi masyarakat yang aman dan tentram.
- **Mandiri**, mengandung makna dengan kemandirian pengelolaan daerah berupa kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi Sumber Daya Alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan Sumber Daya Manusia.
- **Religi**, mengandung makna suatu kondisi masyarakat Kabupaten Luwu dapat meningkatkan pemahaman ajaran agama dan pengamalan agamanya dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Adapun Misi pembangunan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Luwu dalam mewujudkan Visi tersebut adalah:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan Dan Akuntabel;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat;
3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
4. Pengembangan Ekonomi Masyarakat, melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Perluasan Lapangan Kerja;
5. Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Perekonomian Daerah yang Tangguh Berbasis Agribisnis;
6. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu yang Religius;
7. Optimalisasi Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan;
8. Menciptakan Iklim Investasi dan Usaha yang Kondusif Berwawasan Lingkungan dan Sistem Pengupahan yang Berkeadilan;
9. Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, untuk Mendorong Partisipasi Publik Yang Dinamis Dan Kondusif;
10. Mewujudkan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup serta Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan analisis pembangunan daerah dalam rangka penyusunan RKPD, tujuan dan sasaran RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target RPJMD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2021	Penjelasan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih		Indeks Reformasi Birokrasi	Baik	Baik	Lebih baik dari capaian Tahun 2020 yang ditargetkan dengan predikat “cukup”
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	B	B	Lebih baik dari capaian Tahun 2020 yang ditargetkan dengan nilai “CC”
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	Sama dengan capaian tahun-tahun sebelumnya
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Sama dengan target tahun 2020
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia		Indeks Pembangunan Manusia	70,87	70,87	Meningkat dari tahun sebelumnya yang ditargetkan pada angka 70,40
	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	64,42	64,42	Meningkat dari tahun sebelumnya yang ditargetkan pada angka 63,72
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	76,64	76,64	Meningkat dari tahun sebelumnya yang ditargetkan pada angka 76,55
Pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Cukup	Cukup	Layanan infrastruktur Kabupaten Luwu masih serba kekurangan, oleh karena itu sama dengan tahun 2020 hanya ditargetkan predikat “cukup”
	Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	26,26	26,26	Capaian pada tahun 2020 ditarget pada kondisi 23,87%.
	Meningkatkan kelayakan dan ketersediaan infrastruktur dasar	Persentase penduduk berakses air minum	86,19	86,19	Capaian pada tahun 2020 ditarget pada kondisi 84,09%
		Rasio jaringan irigasi	65,00	65,00	Capaian pada tahun 2020 ditarget pada kondisi 63,00%
	Meningkatkan PSU lingkungan kawasan permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	77,10	77,10	Capaian pada tahun 2020 ditarget pada angka 76,00%
Meningkatnya perekonomian daerah		Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,65	6,52	Diturunkan karena melemahnya perekonomian global

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target RPJMD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2021	Penjelasan
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB Perkapita (Juta Rp.)	38,98	49.40	Meningkat dari target RPJMD karena perubahan data dasar dari BPS
		Indeks Gini	0,358	0,358	Menurun dari target tahun 2020 yaitu pada angka 0,360
	Mengembangkan destinasi wisata daerah	Jumlah obyek wisata unggulan yang dikembangkan	2	2	Meningkat dari target pada tahun 2020 yaitu hanya pada 1 destinasi.
	Menurunnya jumlah pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,25	3,87	Lebih baik dari target tahun 2020 yaitu pada angka 4,36%
Meningkatkan hasil pangan dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat		Skor Pola Pangan Harapan	8	8	Menurun dari angka target tahun 2020 yaitu dengan skor 9
	Meningkatnya perekonomian daerah berbasis agribisnis	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian (%)	7,30	7,30	Meningkat dari target tahun 2020 yaitu pada angka pertumbuhan 7,20%
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius		Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk	2,80	2,80	Diturunkan kembali dari target 3,20 pada tahun 2020, sedangkan angka pada tahun 2018 adalah 4,00
	Meningkatnya upaya penyebarluasan ajaran agama	Jumlah kader mubaligh muda (orang)	40	40	Setiap tahun selama periode RPJMD target ditetapkan 40 orang
		Persentase kasus suap, penipuan dan penggelapan	25,00	25,00	Pada tahun 2016 mencapai 44,48%, pada tahun 2020 ditarget menjadi 27,50%.
Meningkatkan kemandirian Desa		Persentase desa berstatus mandiri	60,00	0,97	Target diubah berdasarkan kesepakatan pada Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD
	Berkembangnya Perekonomian Desa	Jumlah BUMDes berprestasi (Maju dan Mandiri)	0	0	Tahun 2021 ditargetkan terdapat 1 BUMDes Mandiri
Meningkatkan nilai investasi		Nilai investasi PMA dan PMDN (Miliar Rp)	17,53	17,53	Meningkat sedikit dibandingkan target tahun 2020 sebesar 17,11
	Meningkatnya realisasi investasi	Jumlah PMA dan PMDN yang berinvestasi (perusahaan)	13	13	Target sama dengan target pada tahun sebelumnya
		Persentase wirausaha muda	1,50	1,50	Target lebih besar dibanding tahun sebelumnya sebesar 1,00%

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target RPJMD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2021	Penjelasan
Meningkatnya penegakan dan perlindungan hukum		Cakupan penegakan dan perlindungan hukum (%)	100,00	100,00	Ditargetkan 100 persen setiap tahun
	Meningkatkan produk hukum daerah	Cakupan ketersediaan produk hukum daerah (%)	81,00	81,00	Ditargetkan meningkat 1% setiap tahun.
	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah sosial	Persentase PMS yang memperoleh bantuan sosial	100,00	100,00	Sesuai dengan target SPM, 100% setiap tahun
	Meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender	70,27	70,27	Ditargetkan lebih tinggi dari target provinsi untuk mengejar ketertinggalan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		Indeks kualitas lingkungan hidup	Baik	Baik	Ditargetkan sama dengan target tahun sebelumnya
	Meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase pembinaan dan pengawasan izin PPLH dan PUU LH	60,00	60,00	Pada tahun 2018 hanya 39,22%, tahun 2020 ditargetkan mencapai 50%.
	Meningkatnya kualitas pengelolaan bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	30,00	30,00	Target setiap tahun disesuaikan dengan standar IRBI

Sumber: RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan tahun 2019 dan tahun berjalan, terdapat target sasaran RPJMD yang harus direvisi dalam RKPD.

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021

Prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2021 disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Tema pembangunan RKP 2021 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2019 serta kebijakan pembangunan tahun 2020. Dengan terjadinya pandemi global *Covid-19* yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020, maka tema pembangunan RKP 2021 diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan nasional yang terdampak pandemi Covid-19 yaitu “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”. RKPD Tahun 2021 menetapkan fokus pembangunan pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem perlindungan sosial; dan reformasi sistem ketahanan bencana.-19.

Untuk mewujudkan tema tersebut maka sasaran pembangunan nasional tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan industri, dan pembangunan pariwisata dengan indikator pembangunan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2
Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021

Indikator Pembangunan	Target 2021
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5–5,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	7,5–8,2
Tingkat Kemiskinan (%)	9,2–9,7
Rasio Gini (indeks)	0,377–0,379
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,78–72,90
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) <i>*menuju target 29% di 2030 (Paris Agreement)</i>	23,55–24,14

Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (%)	3,41–4,26
Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%)	3,35–4,21
Kontribusi PDB Pariwisata (%)	4,20

Sumber: RKP Tahun 2021

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2021, maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2021 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), *health security*, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana nonalam.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang- Undang. pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang- Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai

tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut maka diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dengan penekanan terhadap:

PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat akibat pandemi COVID-19. Pelaksanaannya diantaranya melalui: menjalankan Program Ketersediaan Akses dan Kualitas Pangan; penguatan penyediaan energi yang terjangkau; penguatan daya saing industri melalui peningkatan akses ke pasar ekspor; pemulihan pariwisata nasional dengan meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata; dan, penguatan dukungan kepastian usaha, perluasan investasi, serta efisiensi distribusi dan perdagangan.

PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada perwujudan kerja sama investasi, perdagangan dan investasi sektor-sektor industri dan pariwisata wilayah timur, dengan tetap menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat.

PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Kebijakan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 2021 diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial; peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan health security; peningkatan pemerataan layanan berkualitas; penyediaan dan

pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual; peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda; perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif; serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19.

PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 melalui perluasan pusatpusat gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu; pembangunan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan; peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran; serta pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat.

PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan pascapandemi Covid19 yaitu pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman; peningkatan layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; peningkatan layanan keselamatan dan keamanan transportasi; peningkatan ketahanan infrastruktur; optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi; peningkatan konektivitas wilayah; pengembangan angkutan umum massal di enam kota metropolitan; peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik; pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; serta optimalisasi strategi investasi badan usaha dan pengembangan metode-metode peningkatan kualitas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan proyek infrastruktur.

PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap dampak bencana nonalam seperti pandemi Covid-19, serta perubahan iklim tahun 2021, diarahkan untuk: penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologi tektonik dan vulkanik, bencana hidrometeorologi, dan bencana lingkungan) dan bencana nonalam (fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi penyakit); serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK, dengan fokus penurunan emisi GRK pada sektor lahan, industri, dan energi.

PN 7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Kebijakan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik tahun 2021 diarahkan untuk mendukung pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 dalam upaya mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (law and order). Kebijakan ini diantaranya dilaksanakan melalui: penguatan perlindungan WNI di luar negeri; intensifikasi kerjasama pembangunan internasional; penguatan sinergitas, sinkronisasi, dan pemerataan informasi berkeadilan; pemulihan kinerja pelayanan publik; serta peningkatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) penanggulangan bencana serta kontingensi dalam rangka pemulihan pascapandemi Covid-19.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Sulawesi pada tahun 2021 adalah (1) mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) mempercepat penurunan kemiskinan dan kesenjangan; serta (3) memperluas kesempatan kerja. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (rebound) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi Covid-19, serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah. Adapun target pembangunan wilayah Sulawesi sesuai dengan Rancangan RKP 2021 sebagai mana pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3
Target Pengembangan Wilayah Sulawesi Per Provinsi Tahun 2021

Indikator	Target Tahun 2021					
	Sulut	Sulteng	Sulsel	Sultra	Gorontalo	Sulbar
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,6–6,1	4,2–7,4	6,0–7,2	4,5–7,1	5,6–6,8	4,4–6,2
Tingkat Kemiskinan (%)	7,3	12,7	8,2	11,5	14,1	10,7
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,6	4,9	7,4	5,3	5,5	4,9

Sumber: RKP Tahun 2021.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 berkorelasi dengan pencapaian prioritas pembangunan nasional (RKP). Untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah, maka tema pembangunan daerah Tahun 2021 adalah **“Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Membangun Infrastruktur untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas”** dengan prioritas pembangunan Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan berdaya saing, dengan sasaran pembangunan:
 - a. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia
 - b. Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja dan daya saing daerah
 - c. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan
2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dengan sasaran pembangunan:
 - a. Berkembangnya komoditas unggulan Daerah
 - b. Menurunnya kesenjangan antar lapisan masyarakat dan antar wilayah
 - c. Berkembangnya Pembangunan Desa
3. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan, dengan sasaran pembangunan “meningkatnya pembangunan infrastruktur”.
4. Percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi perlindungan sosial, dengan sasaran pembangunan:
 - a. Meningkatnya kinerja ekonomi makro.
 - b. Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat
 - c. Membaiknya stabilitas ekonomi makro
 - d. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk

- e. Meningkatnya produktifitas perekonomian daerah berbasis sumberdaya alam
- 5. Pengelolaan Sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan sasaran pembangunan:
 - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
 - b. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
 - c. Meningkatnya nilai tambah Produk unggulan daerah
- 6. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola serta pelayan publik, dengan sasaran pembangunan “Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola serta pelayan publik”.

Sesuai dengan prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 difokuskan pada tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- Tujuan 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan, dengan sasaran pembangunan meliputi:
 - a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan;
 - b. Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik.
- Tujuan 2. Meningkatkan infrastruktur wilayah, dengan sasaran pembangunan “meningkatkan aksesibilitas infrastruktur”.
- Tujuan 3. Meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata antar lapisan dan antar wilayah, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya produktifitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru;
 - b. Menurunnya kesenjangan antar lapisan masyarakat dan antar wilayah.
- Tujuan 4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara inklusif, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat;
 - b. Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan;
 - c. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
- Tujuan 5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya produktifitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumber daya alam;
- b. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Adapun strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian target-target pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Strategi dan Arah Kebijakan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

Sasaran Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatkan Kualitas dan akses pendidikan yang berkeadilan dan merata	Peningkatan akses layanan pendidikan yang merata dan berkualitas.
	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara promotif, preventif dan kuratif.	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja dan daya saing daerah	Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja berbasis keterampilan dan kompetensi tenaga kerja.	Peningkatan produktivitas, keterampilan tenaga kerja dan diversifikasi keterampilan kewirausahaan
	Mengefektifkan <i>link and match</i> antara proses pendidikan vokasional dengan perkembangan dunia usaha dan industri.	
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan	Meningkatkan kualitas dan perlindungan perempuan	Peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam Pembangunan.
Berkembangnya komoditas unggulan Daerah	Meningkatkan Penyediaan sarana dan parasarana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Peningkatan produk unggulan daerah yang berdaya saing pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
Menurunnya kesenjangan antar lapisan masyarakat dan antar wilayah	Meningkatkan pemenuhan kualitas dan pemerataan akses pelayanan dasar bidang pendidikan, Kesehatan, dan infrastruktur pendukung perekonomian	Peningkatan pemenuhan pelayanan dasar dan infrastruktur pendukung perekonomian
Berkembangnya Pembangunan Desa		Peningkatan kapasitas Pemerintahan dan pembangunan desa terpadu
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur	Meningkatkan Kualitas dan ketersediaan Infrastruktur wilayah	Peningkatan Kualitas dan ketersediaan Infrastruktur wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Meningkatnya kinerja ekonomi makro.	Memperluas kerjasama dan kemitraan dalam investasi, promosi, pemasaran dan perdagangan	Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah berbasis komoditas unggulan wilayah
Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat	Memperkuat ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.	Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan
	Memperluas akses program pengentasan kemiskinan.	
Membaiknya stabilitas ekonomi makro	Memperkuat koordinasi untuk menjamin ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi .	Jaminan ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga pasar

Sasaran Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	Memperluas jangkauan pelayanan sosial dan subsidi yang tepat sasaran	Pemenuhan perlindungan dan perluasan jangkauan pelayanan sosial yang tepat sasaran
Meningkatnya produktifitas perekonomian daerah berbasis sumberdaya alam	Meningkatkan produktifitas perekonomian daerah berbasis sumberdaya alam.	Peningkatan produktivitas perekonomian daerah dan pengembangan industri.
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengoptimalkan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup	Peningkatan upaya pencegahan, pelestarian, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta pembangunan rendah karbon	Penurunan emisi dan intensitas emisi pada bidang energi, lahan, limbah, dan industri
Meningkatnya nilai tambah Produk unggulan daerah	Meningkatkan nilai tambah produk komunika s unggulan daerah	Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.
		Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola serta pelayan publik	Meningkatkan kapasitas dan keunggulan SDM aparatur	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif.
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	

Sumber: RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.

Prioritas, arah kebijakan, strategi, Arah kebijakan, dan fokus pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 merupakan upaya untuk mencapai target sasaran makro pembangunan Tahun 2021 yang meliputi antara lain:

Tabel 4.5
Target Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

Indikator Makro Pembangunan	Target RKPD Tahun2021
1. Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,1
2. PDRB per kapita (ADHK)	40,72
3. PDRB per kapita (ADHB)	65,76
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	7,20
5. Tingkat Kemiskinan:	
- Persentase Penduduk Miskin	9,1
- Jumlah Penduduk Miskin	819.169
- Jumlah Penduduk	9.001.863
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,22
7. Angka Harapan Hidup (AHH)	70,54
8. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,47
9. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,72
10. Pengeluaran Perkapita	10.992
11. Rasio Gini (indeks)	0,414
12. Indeks Williamson	0,61
13. Tingkat Inflasi (%)	3,00

Sumber: RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu

Prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2021 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang yang dijabarkan dari RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Selain itu, juga dilakukan penyesuaian dengan hasil evaluasi, serta mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang terjadi sebagai akibat perubahan dinamika pembangunan dan isu strategis pembangunan Tahun 2021. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah dan disusun berdasarkan arah kebijakan serta menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Prioritas tahun 2021 dipengaruhi adanya pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi dan berakibat terjadinya resesi. Namun patut disyukuri, dampak yang dirasakan Kabupaten Luwu tidak berpengaruh besar terhadap mata-rantai pasokan barang dan jasa, mobilitas masyarakat, dan kegiatan ekonomi secara umum meskipun sedikit menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam rangka mewujudkan kebijakan nasional untuk mengembalikan kehidupan yang normal, maka menjadi keharusan bagi pemerintah daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2021 yaitu: **“Penguatan Birokrasi Dan Pemantapan Infrastruktur Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Tatakelola dan Tatalaksana Pemerintahan;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Kawasan Permukiman;
4. Perluasan Kesempatan Kerja dan Perlindungan Sosial;
5. Pengembangan kehidupan beragama dan budaya daerah; dan
6. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan dan Kapasitas Manajemen Penanggulangan Bencana.

Untuk melihat sinkronisasi permasalahan dan isu strategis terhadap prioritas pembangunan tahun 2021 dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 4.6
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2021

ISU STRATEGIS RPJPD KABUPATEN LUWU TAHUN 2005-2025	ISU STRATEGIS RPJMD KABUPATEN LUWU TAHUN 2019-2024	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN LUWU TAHUN 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LUWU TAHUN 2021	INDIKATOR SASARAN
Pemantapan desentralisasi dan otonomi daerah	Reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan daerah	1. Peningkatan Kualitas Tatakelola dan Tatalaksana Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini LKPD dari BPK RI
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat publik
Pembangunan manusia	Kualitas sumber daya manusia	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan
Transportasi dan perhubungan	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur untuk Mendukung Iklim Investasi	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Kawasan Permukiman	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap
			Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Pengangguran dan rendahnya produktivitas tenaga kerja	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	4. Perluasan Kesempatan Kerja dan Perlindungan Sosial	Menurunnya jumlah pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka
Pengembangan koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur untuk Mendukung Iklim Investasi		Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Pertumbuhan ekonomi
Kemiskinan dan kesenjangan.	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat		Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat	Tingkat kemiskinan

Kehidupan beragama	Memperteguh Kondisi Masyarakat Yang Religius	5. Pengembangan kehidupan beragama dan budaya daerah	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius	Angka kriminalitas
				Persentase kasus suap, penipuan dan penggelapan
Kerusakan lingkungan hidup dan bencana alam	Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berbasis Pembangunan Keberlanjutan	6. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan dan Kapasitas Manajemen Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup
			Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)

4.2.3.1 Target Indikator Makro Pembangunan

Perekonomian suatu daerah tidak akan terlepas dari masalah pengangguran dan inflasi yang dampaknya mempengaruhi tingkat kesejahteraan. Ekonomi makro memberikan penjelasan tentang perubahan ekonomi suatu daerah yang berdampak pada masyarakatnya. Pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini melalui serangkaian kebijakan. Ekonomi makro dapat membantu memahami dan menyelesaikan masalah terkait perekonomian, dan juga sebagai alat untuk menentukan arah kebijakan yang akan diambil. Oleh karena itu, untuk menjadi tolok ukur dalam menentukan kebijakan maupun mengukur keberhasilan, untuk masing-masing aspek ditetapkan suatu target.

Dalam pencapaian target indikator makro ekonomi daerah, pemerintah daerah selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya di daerahnya. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makro ekonomi daerah dan pencapaian target Nasional, mulai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, laju inflasi yang stabil, PDRB per kapita meningkat tajam, persentase penduduk miskin yang menurun, serta tingkat pengangguran terbuka yang menurun dan mencapai tingkat yang terendah. Dalam perspektif itulah, arah kebijakan perekonomian daerah sangat diperlukan, bukan hanya untuk sektor pemerintah, tetapi yang jauh lebih penting untuk menjadi arahan bagi pelaku ekonomi lainnya.

4.2.3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Perkapita

Merujuk pada target pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu tahun 2021 ditargetkan sebesar 6,52%. Program pemerintah pusat dan daerah terkait dengan pemulihan ekonomi, akan mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2021 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020 yang diproyeksi sebesar 4,60%. Sedangkan PDRB perkapita ditargetkan mencapai Rp.49,51 juta, meningkat dari proyeksi tahun 2020 yang mencapai Rp. 45.83 juta.

Tabel 4.7
Capaian dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Perkapita
Tahun 2019-2021

Tahun	PDRB Perkapita		PDRB ADHB	
	Nilai (Rp Juta)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rp Milyar)	Pertumbuhan (%)
2019	43.250,00	7,59	9.728,96	6,26
2020	45.833,00	5,97	10.176,17	4,60
2021	49.407,97	7,80	10.839,66	6,52

Sumber : BPS, Perkiraan Capaian 2020 oleh Bappeda Kabupaten Luwu.

4.2.3.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Pengangguran

TPT Kabupaten Luwu pada tahun 2019 4,66% dan diproyeksikan menurun kembali pada tahun 2020 menjadi 4,10. Untuk tahun 2021, sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD, TPT Kabupaten Luwu ditargetkan sebesar 3,87%. Jumlah pengangguran pada tahun 2019 adalah 7.436 orang dengan angkatan kerja sebesar 159.605. Tahun 2020 angkatan kerja diproyeksikan sejumlah 161.020 orang dengan angkatan kerja yang menganggur sejumlah 6.618 orang sedangkan untuk tahun 2021 jumlah pengangguran menurun menjadi 6.289 orang dari sejumlah 162.507 angkatan kerja.

Tabel 4.8
Capaian, Proyeksi dan Target TPT dan Jumlah Pengangguran
Tahun 2019-2021

No	Tahun	Uraian		
		Angkatan Kerja	Jumlah Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka
1	2019	159.605	7.436	4,66
2	2020	161.020	6.618	4,11
3	2021	162.507	6.289	3,78

*Sumber: BPS Kabupaten Luwu, Tahun 2019
Bappeda Kabupaten Luwu, Tahun 2020.*

4.2.3.1.3 Tingkat Kemiskinan

Dalam kurun waktu 2 tahun, jumlah penduduk miskin Kabupaten Luwu berhasil diturunkan dari 47.910 jiwa atau 13,36% pada tahun 2018 menjadi 46.180 jiwa atau 12,78% pada tahun. Hal ini berarti bahwa pendapatan perkapita penduduk miskin mengalami peningkatan karena penentuan kategori miskin ditentukan oleh pendapatan masyarakat. Semakin tinggi penduduk miskin menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi.

Pemerintah Kabupaten Luwu telah mengambil berbagai kebijakan dalam rangka mengentaskan kemiskinan, di antaranya adalah melalui program pemberdayaan potensi Desa/Kelurahan, pemberian fasilitas dan kemudahan untuk UMKM, fasilitas Koperasi, serta pendirian Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) dengan tujuan menarik investor untuk menanamkan modalnya dan program-program anti kemiskinan yang sifatnya target sasaran (jaring-jaring pengaman sosial, seperti raskin, PKH, Jamkesmas, dll.). Semakin tingginya investasi diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru yang dapat menyerap angkatan kerja sehingga dapat menurunkan kemiskinan.

Permasalahan yang terjadi pada tahun 2020 adalah terganggunya kehidupan dan penghidupan masyarakat dikarenakan terjadinya wabah Covid-19 yang menimbulkan tingkat pendapatan masyarakat menurun drastis, hal ini menyebabkan dampak yang terjadi adalah ketergantungan masyarakat pada bantuan dari pemerintah, sehingga pada tahun 2021 kabupaten Luwu pada tingkat kemiskinan ditargetnya diangka 11,09%. Berikut adalah Perbandingan jumlah penduduk miskin dan presentase penduduk miskin Kabupaten Luwu dengan Kabupaten lain.

Tabel 4.9
Capaian, Proyeksi dan Target Kemiskinan
Tahun 2019-2021

No	Tahun	Uraian				
		Tingkat Kemiskinan (%)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Indeks P1	Indeks P2
1	2019	12,78	46.180	318.911	2,71	0,72
2	2020	11,17	40.775	338.141	2,80	0,70
3	2021	11,09	40.819	358.531	2,23	0,44

Sumber: BPS Kabupaten Luwu, Tahun 2019
Bappeda Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

4.2.3.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*). IPM digunakan sebagai indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup; rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah untuk mengukur status pendidikan; serta pengeluaran per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup

layak. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

Tabel 4.10
Capaian, Proyeksi dan Target IPM
Tahun 2019-2021

No	Tahun	Uraian				
		IPM	AHH	RLS	HLS	Pengeluaran Perkapita (Rp/Hari)
1	2019	70,39	70,19	8,15	13,32	10.085
2	2020	70,40	70,21	8,23	13,68	10.693
3	2021	70,80	70,23	8,20	13,96	11.335

Sumber: BPS Kabupaten Luwu, Tahun 2019
Bappeda Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

4.2.3.1.5 Gini Ratio

Gini rasio Kabupaten Luwu selama kurun waktu 2015-2019 mengalami fluktuasi, dimana nilai pada tahun 2016 lebih rendah dari tahun 2015 yaitu dari 0,361 menjadi 0,359. Tetapi pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 0,395. Salah satu penyebab meningkatnya ketimpangan pendapatan ini adalah turunnya nilai tukar rupiah terhadap US\$ yang berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat karena turunnya harga jual komoditas kakao, cengkeh, merica dan lain-lain yang menjadi mata pencaharian sebagian penduduk Kabupaten Luwu. Sedangkan pada tahun 2018 kembali menurun menjadi 0,362 sehubungan dengan kembali stabilnya nilai tukar rupiah terhadap US\$. Sedangkan tahun 2019 kembali menurun menjadi 0,352 dan diproyeksikan turun menjadi 0,350. Melihat Trend tersebut diatas target Gini Rasio Kabupaten Luwu pada tahun 2021 adalah 0,348.

4.2.3.1.6 Pelayanan Publik dan Pengelolaan Keuangan

Penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan. Dalam penyusunannya diharuskan melibatkan dan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait pelayanan publik dengan prinsip tidak diskriminatif, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah serta memperhatikan keberagaman.

Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 Kabupaten Luwu telah diterapkan dalam sebuah sistem yang terintegrasi yaitu SIMDA Perencanaan Integrasi dan SIMDA Keuangan. Hal ini berdasar pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, asas manfaat dan penyesuaian program kegiatan yang didasarkan pada kebutuhan pembangunan. Dengan demikian diharapkan penetapan APBD tahun 2021 dapat dilakukan tepat waktu, semua Program dan Kegiatan dapat berjalan lancar dan tujuan pembangunan daerah dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Dalam Proses pengadaan barang dan jasa sepenuhnya telah dilakukan sesuai petunjuk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu menggunakan Sistem Pengadaan Secara elektronik (SPSE) dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sehingga pada Tahun 2021 di Kabupaten Luwu semua jenis pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Luwu terpantau semua dalam sistem tersebut, penerapan aplikasi e-Procurement sangat bermanfaat untuk transparansi, akuntabilitas dan menanggulangi tindakan pelanggaran dalam pelaksanaan Proses pengadaan barang dan jasa.

Penerapan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam bidang Kesehatan bertujuan untuk peningkatan kualitas layanan dan tingkat Kesehatan masyarakat Kabupaten Luwu, pada tahun 2020 bidang kesehatan menjadi sorotan karena berfokus pada penanganan wabah *Covid-19*. Segala upaya untuk pencegahan dilakukan secara maksimal dengan menerapkan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah/lembaga pusat, sehingga Kabupaten Luwu berhasil menjaga angka pasien terjangkit wabah tersebut diangka rendah.

Investasi merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi karena mempunyai keterkaitan dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang. Semakin banyak dan tinggi nilai investasi, semakin besar pula dampak dan manfaat seperti menyerap tenaga kerja, optimalisasi sumber daya alam. Pada tahun 2021 Kabupaten Luwu akan melakukan untuk menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dapat meningkatkan efisiensi proses perijinan, meningkatkan kepastian berinvestasi dan berusaha di Indonesia, serta mendorong persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan dengan target nilai investasi sebesar 17,53 miliar.

4.2.3.1.7 Tranparansi

Pemanfaatan Teknologi dalam penyelenggaraan birokrasi sangat penting untuk diterapkan hal ini untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien, teknologi berbasis *online proses* membuat semua menjadi mudah, murah dan cepat hampir dalam segala sektor. Dalam Penerapannya kegiatan berbasis *on line proses* telah banyak diterapkan oleh Kabupaten Luwu, dalam bentuk penyampaian regulasi terhadap masyarakat sudah sangat mudah diakses melalui *website* resmi Kabupaten Luwu. Sehingga masyarakat bisa akses regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu tanpa datang ke kantor. Pengembangan perencanaan pembangunan daerah sepenuhnya telah berbasis *online* menggunakan aplikasi Simda Perencanaan Integrasi yang bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuannya adalah untuk menciptakan transparansi dan kemudahan akses bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan sistem *online* yang sudah diterapkan Kabupaten Luwu, target pada tahun 2021 adalah memaksimalkan teknologi yang sudah diterapkan dan mengembangkan segala bentuk teknologi yang mampu menciptakan efektivitas dan efisiensinya sebuah pelayanan publik

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kabupaten Luwu dalam lima tahun terakhir memperoleh opini Wajar tanpa pengecualian (WTP). Sehingga pada tahun 2021 Target Kabupaten Luwu Tetap pada opini Wajar tanpa pengecualian (WTP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*), penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban

dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tujuan SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

4.2.3.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program pembangunan yang termasuk dalam program prioritas pembangunan daerah adalah program yang secara langsung berpengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam NEgeri Nomor 90 Tahun 2019, program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD harus dipetakan sesuai dengan nomenklatur yang ditetapkan. Oleh karena itu, judul program prioritas pembangunan daerah yang disusun dalam RKPD ini telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berdasarkan pemetaan sebagaimana terlihat pada Lampiran II.

Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.11
Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2021

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
Peningkatan Kualitas Tatakelola dan Tatalaksana Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Skor LPPD	2.983	2.218.988.710	Inspektorat Daerah
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai eselon		503.160.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Aplikasi Informatika	Jumlah aplikasi dalam rangka e-Gov yang telah digunakan pemda kabupaten luwu	1 Aplikasi	493.300.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD	100,00 %	809.086.320	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
			Persentase ketersediaan dokumen rencana dan evaluasi pembangunan daerah	100,00 %		
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase penyelesaian penyusunan PERDA sesuai Prolegda	100,00 %	9.415.764.300	Sekretariat DPRD
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan dan kebutuhan	100,00 %	10.699.335.528	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Persentase Penerbitan SP2D yang Tepat Waktu	95,00 %		
			Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	98,00 %		
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi pajak daerah terhadap target yang ditetapkan	98,99 %	1.798.888.250	Badan Pendapatan Daerah
			Persentase ketercapaian target penerimaan retribusi daerah	98,99 %		
			Persentase Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan terhadap Target yang ditetapkan	90,00 %		
			Persentase realisasi penerimaan PBB dan BPHTB	80,00 %		

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Hasil kelitbangan utama	1 Rekomendasi	948.771.750	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mampu melaksanakan tata laksana pemerintahan desa secara tertib	100,00 %	905.950.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pendaftaran Penduduk	Rasio Penduduk Ber KK	0,70	921.394.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah investor yang merealisasikan penanaman modal	13 Investor	395.000.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD	61,55 %	115.817.881.287	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			APM SD/Mi/Paket A	100,00 %		
			APM SMP/MTs/PAKET B	85,73 %		
			Persentase sekolah yang telah melaksanakan manajemen pendidikan yang baik	50,00 %		
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan.	85,00 %	172.216.730.090	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan RSUD Batara Guru
			Rasio pembiayaan operasional rumah sakit (<i>Cost Recovery Ratio/CRR</i>)	85,00 %		
			Cakupan Persalinan yang ditolong Tenaga Kesehatan	85,00 %		
			Cakupan penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular	22 Kecamatan		
			Indeks Kepuasan Masyarakat	80,00 %		
Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Kawasan Permukiman	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jaringan jalan kabupaten dengan aspal dan beton	64,84 %	108.416.823.065	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Tingkat mobilitasi (panjang jalan per luas wilayah)	0,87		
			Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam)	22,80 %		
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah arus penumpang angkutan umum	421.300 orang	9.414.763.750	Dinas Perhubungan

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
			Cakupan ketersediaan PJU	300 titik		
			Cakupan ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengamanan dan Keselamatan Lalu Lintas	78,00 %		
	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi dalam kondisi baik	38,17	18.349.674.118	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor yang dibangun turap/Talud/Bonjong dan Pengendali Banjir	700 meter		
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang berakses air minum berkelanjutan	81,85 %	20.279.996.070	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase air limbah domestik yang telah dikelola secara sistematis	50,00 %	2.035.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	Persentase kawasan kumuh kabupaten yang tertata	21,63 %	3.403.336.160	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah layak huni	20,84 %	1.090.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
Perluasan Kesempatan Kerja dan Perlindungan Sosial	Menurunnya jumlah pengangguran	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi	100,00 %	221.985.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah pemuda pelopor pembangunan tingkat kabupaten	... orang	860.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif Kabupaten Luwu	250 orang	146.200.000	Dinas Pariwisata
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro dan menengah aktif	30,75 %	87.500.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
		Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam rangka peningkatan kesetaraan gender dan ketahanan keluarga	100,00 %	124.800.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS menerima perlindungan dan jaminan sosial			
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100,00	1.164.416.000	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan RSUD Batara Guru
			Persentase peningkatan pelayanan dan kerjasama RS	50,00 %		
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	44,45%	1.691.203.159	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pengembangan kehidupan beragama dan budaya daerah	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan penyelenggaraan peningkatan kualitas keluarga	100,00 %	364.900.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pengembangan Kebudayaan	Penyelenggaraan festival seni dan budaya daerah	6 kali	130.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan penyelenggaraan koordinasi bidang pemerintahan	100,00 %	4.354.550.432	Sekretariat Daerah
			Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan otonomi daerah	100,00 %		
			Cakupan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat	100,00 %		
			Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi dalam kurun waktu tahun yang sama	100,00 %		
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penegakan PERDA	81,95 %	2.514.541.830	Satuan Polisi Pamong Praja
			Persentase Pemenuhan Kompetensi Aparatur sesuai ketentuan	75,00 %		
			Cakupan penyelenggaraan perlindungan masyarakat	100,00 %		
Peningkatan Pengelolaan Lingkungan dan Kapasitas Manajemen Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan penyelenggaraan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	60,00 %	149.500.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	90,19 %	4.286.250.000	Dinas Lingkungan Hidup

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
	Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	100,00 %	7.256.952.500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100,00 %		

4.2.4 Dukungan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Terhadap Pembangunan Nasional

Sebagai implementasi dari sistem perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah harus terintegrasi dan dapat dipetakan bentuk dukungannya terhadap perencanaan pembangunan lainnya.

4.2.4.1 Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah Terhadap Prioritas Nasional Tahun 2021

Dukungan prioritas pembangunan Kabupaten Luwu tahun 2021 terhadap prioritas pembangunan nasional yang merupakan tahun awal dari RPJMN Tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.12
Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021

PERMASALAHAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN LUWU	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
Belum optimalnya tatakelola dan tata laksana pemerintahan daerah	Peningkatan Kualitas Tatakelola dan Tatalaksana Pemerintahan	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN 7)
Layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas belum merata	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing (PN 3)
Kualitas dan ketersediaan infrastruktur masih rendah	Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Kawasan Permukiman	Memperkuat Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar (PN 5)
		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2)
Masih rendahnya pendapatan masyarakat	Perluasan Kesempatan Kerja dan Perlindungan Sosial	Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (PN 1)
Masih tingginya angka kemiskinan di perdesaan		
Pengamalan nilai-nilai agama perlu ditingkatkan	Pengembangan kehidupan beragama dan budaya daerah	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (PN 4)
Menurunnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kapasitas Manajemen Penanggulangan Bencana	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim (PN 6)
Risiko yang ditimbulkan akibat bencana masih tinggi		

4.2.4.2 Dukungan Sasaran RKPD Terhadap Sasaran RKP Tahun 2021

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2021, maka arah kebijakan nasional yang akan ditempuh pada RKP 2021 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), health security, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana nonalam. Sehubungan dengan hal tersebut, dukungan rencana prioritas pembangunan daerah tahun 2021 terhadap sasaran pembangunan nasional, dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.13
Dukungan Sasaran RKPD Kabupaten Luwu Terhadap Sasaran RKP Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN LUWU	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LUWU	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL	INDIKATOR SASARAN
1. Peningkatan Kualitas Tatakelola dan Tatalaksana Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN 7)	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori Baik ke Atas
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini LKPD dari BPK RI			Persentase Instansi Pemerintah dengan skor B ke atas Atas SAKIP (%)
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat publik			
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing (PN 3)	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	Rata-Rata lama sekolah
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan			Harapan lama sekolah
					Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)
				Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	
3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Kawasan Permukiman	Meningkatnya aksesibilitas dan konektifitas infrastruktur wilayah	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Memperkuat Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar (PN 5)	Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten/kota (%)
	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur		Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 (%)
			Volume tampungan air per kapita (m3/kapita)		
					Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2)

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN LUWU	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LUWU	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL	INDIKATOR SASARAN
4. Perluasan Kesempatan Kerja dan Perlindungan Sosial	Menurunnya jumlah pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3)	Meningkatnya produktivitas dan daya saing	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas
	Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Pertumbuhan ekonomi	Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (PN 1)	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	Pertumbuhan PDB Pertanian (%)
					Pertumbuhan PDB industri pengolahan
	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat	Tingkat kemiskinan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3)	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program perlindungan jaminan sosial (%)
Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)					
5. Pengembangan kehidupan beragama dan budaya daerah	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius	Angka kriminalitas	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (PN 4)	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif	Nilai Budaya Literasi (nilai)
		Persentase kasus suap, penipuan dan penggelapan		Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	Indeks Pembangunan Masyarakat (nilai)
6. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan dan Kapasitas Manajemen Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim (PN 6)	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
	Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)		Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline	Persentase penurunan emisi GRK (%)

4.2.4.3 Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Terhadap Program Prioritas Nasional Tahun 2021

Rencana pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, program pembangunan nasional harus terstruktur dalam program pembangunan daerah.

Tabel 4.14
Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah
Terhadap Program Prioritas Nasional Tahun 2021

Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas Nasional
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3
Program Penanggulangan Bencana	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana
Program Penanggulangan Kebakaran	
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan (Ketahanan Pangan)
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Destinasi Pariwisata Prioritas
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh
Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
Program Penyelenggaraan Jalan	Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	

4.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rangkaian rumusan perencanaan komprehensif yang berisikan uraian penjelasan tentang upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mencapai misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara efektif dan efisien.

4.3.1 Strategi Pembangunan Daerah

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*added value*) bagi para pemangku kepentingan

pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan yang selanjutnya akan dijadikan sebagai prioritas pembangunan jangka menengah maupun tahunan daerah. Adapun rumusan strategi pembangunan Kabupaten Luwu untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15
Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah

Sasaran Pembangunan Tahun 2021	Strategi	Penjelasan Strategi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Menata, memperbaiki dan mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan agar berkinerja lebih optimal melalui transformasi pada seluruh aspek pemerintahan, termasuk kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan paradigma aparatur mengenai tugas dan fungsinya. Hal ini akan menstimulasi kinerja birokrasi dan mengubah pola pikir pegawai pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Selain itu pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian dan pengelolaan aset daerah secara efektif akan mendorong percepatan pembangunan daerah darisegi infrastruktur dan layanan masyarakat.
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah	Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dapat diukur dari pertumbuhan pendapatan asli daerah dan efektivitas belanja daerah. Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, dilakukan melalui pemutakhiran regulasi, pendataan wajib pajak, menghapus sumber-sumber kebocoran pendapatan dan pemanfaatan asset daerah. Optimalisasi belanja daerah dilakukan melalui sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, belanja sesuai kebutuhan yang telah diverifikasi dan penerapan system yang akuntabel.

Sasaran Pembangunan Tahun 2021	Strategi	Penjelasan Strategi
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Pemanfaatan sistem informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik merupakan suatu keharusan di era modern ini. System yang baik harus didukung pula dengan SOP yang diterapkan dengan konsekwen. Selain itu, juga dibutuhkan sarana dan prasarana antara lain gedung yang representatif karena berbagai bidang pelayanan akan menjadi mudah dan cepat jika dilakukan dalam satu gedung yang sama.
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah maupun nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena memiliki peran yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan mempunyai makna yang luas, tidak hanya persamaan dalam memperoleh kesempatan pendidikan, tetapi juga harus dengan mutu yang sama bagi setiap anak bangsa, agar setiap anak memperoleh pendidikan dan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Mutu pelayanan kesehatan dapat dilihat dari aspek teknis medis yang berhubungan langsung antara pelayanan medis dan pasien, atau mutu kesehatan dalam sudut pandang sosial dan pelayanan kesehatan secara keseluruhan, termasuk manajemen administrasi, keuangan, peralatan dan tenaga kesehatan lainnya. Dengan demikian diperlukan upaya yang lebih memadai bagi peningkatan derajat kesehatan dan pembinaan penyelenggaraan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu. Terkait dengan upaya pembangunan kesehatan tersebut, maka pemerintah wajib meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Pencegahan dan penanganan kasus pada masa pandemi Covid-19 menjadi fokus utama sesuai arahan pemerintah pusat.
Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah	Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Pembangunan infrastruktur yang merata diseluruh wilayah diprioritaskan agar terjadi peningkatan perekonomian. Pembangunan akses ke kawasan terisolir seperti daerah tertinggal dan perbatasan akan mengurangi kesenjangan/ketimpangan antarwilayah. Jalan merupakan salah satu prasarana penting dalam pengembangan suatu wilayah, untuk memudahkan aksesibilitas manusia, barang dan jasa. Dalam konteks ini, pendekatan pembangunan infrastruktur

Sasaran Pembangunan Tahun 2021	Strategi	Penjelasan Strategi
		berbasis wilayah semakin penting untuk diperhatikan. Infrastruktur jalan tersebut, harus diikuti dengan ketersediaan sarana dan prasarana jalan yang mencukupi, terminal, dan moda penghubung antarwilayah.
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan kawasan permukiman	<p>Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjiwa diri, mandiri, dan produktif.</p> <p>Rumah mempunyai fungsi yang multidimensi. Selain fungsi fisik, rumah juga mempunyai fungsi sosial dan ekonomi yang dapat terlihat dari pemanfaatannya. Agar dapat berfungsi secara layak, rumah harus dilengkapi infrastruktur dasar seperti taman, ruang terbuka, jaringan jalan dan sistem transportasi, jaringan listrik dan air minum. Penyediaan tersebut harus sesuai dengan tata ruang yang ada sehingga dapat mendukung berbagai kegiatan sosial dan ekonomi baik dalam skala lingkungan perumahan maupun kota.</p> <p>Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjadi fasilitator, memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat, serta melakukan penelitian dan pengembangan yang meliputi berbagai aspek yang terkait, antara lain, tata ruang, pertanahan, prasarana lingkungan, industri bahan dan komponen, jasa konstruksi dan rancang bangun, pembiayaan, kelembagaan, sumber daya manusia, kearifan lokal, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung.</p>
Menurunnya jumlah pengangguran	Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	<p>Tenaga kerja merupakan faktor pendukung perekonomian yang bertujuan untuk memajukan perekonomian daerah. Sebagian besar tenaga kerja di Kabupaten Luwu berpendidikan rendah dengan pengalaman yang kurang memadai (minim), sehingga belum memiliki keterampilan dan keahlian yang baik serta maksimal untuk memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, dilakukan optimalisasi peran pemuda dan masyarakat untuk lebih meningkatkan keterampilan, juga keahlian diri, supaya daya saing tenaga kerja dan iklim wirausaha lebih berkembang dan menyerap tenaga kerja</p> <p>Di samping itu, dalam rangka mengantisipasi perkembangan pencari kerja yang terus</p>

Sasaran Pembangunan Tahun 2021	Strategi	Penjelasan Strategi
		meningkat, dilakukan upaya-upaya untuk membuka lapangan pekerjaan dengan mendorong peningkatan investasi dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah.
Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Peningkatan iklim usaha yang kondusif	Penanggulangan kemiskinan memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat. Usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dilakukan dengan cara menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai, mengembangkan produk unggulan di setiap wilayah, menggalakkan program kerja di berbagai sektor (pertanian, perikanan, kehutanan, industri kreatif). Upaya pemerintah yang tidak kalah penting adalah pengembangan koperasi dan UMKM yang merupakan landasan utama perekonomian negara. Melalui pengelolaan koperasi dan UMKM secara profesional dan bantuan pemerintah terhadap akses permodalan, pemerataan pendapatan masyarakat dapat ditingkatkan.
	Pengembangan produk unggulan daerah	Bidang pertanian merupakan bidang pekerjaan yang paling dominan dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Luwu karena keadaan wilayah yang merupakan daerah dengan potensi pertanian yang sangat besar. Oleh karena itu fasilitasi dibidang permodalan, peningkatan keahlian, dan akses pasar produk pertanian harus ditingkatkan. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan nilai tambah hasil pertanian juga langkah strategis untuk penanggulangan kemiskinan.
Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat	Peningkatan perlindungan sosial	Perlindungan sosial bagi penyandang masalah sosial merupakan pelayanan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah daerah. Sehubungan dengan masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Luwu, perlu ditata kembali sejauhmana perlindungan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang wajib menerimanya. Hal ini terkait dengan data yang selama ini belum maksimal pengelolaannya. Oleh karena itu, peningkatan perlindungan sosial harus dilakukan secara transparan, dengan niat yang tulus dan dilakukan semata-mata untuk mengurus rakyat yang membutuhkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius	Peningkatan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya	Setiap orang memiliki agama dan kepercayaan yang diyakini, serta memahami budaya leluhur yang dijadikan sebagai teladan dalam kehidupan. Namun demikian, pemahaman terhadap agama dan budaya masih belum menjadi perilaku yang mewarnai setiap gerak kehidupan, baik

Sasaran Pembangunan Tahun 2021	Strategi	Penjelasan Strategi
		dilingkungan pemerintahan maupun dalam bermasyarakat. Strategi ini merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan sosial melalui kegiatan-kegiatan keagamaan. Selain itu, strategi ini juga mencakup dimensi peningkatan kerukunan hidup umat beragama, yang mendukung peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat. Budaya dan seni daerah merupakan kekayaan bangsa yang harus dilestarikan dan digunakan sebagai media dalam pembangunan mengingat peranannya yang mampu memberi andil yang sangat besar dalam pembentukan jati diri bangsa dan proses regenerasi bangsa, terlebih untuk Kabupaten Luwu yang memiliki sejarah yang gemilang dimasa lalu.
	Optimalisasi pengundangan dan penegakan produk hukum daerah	Dibutuhkan berbagai regulasi untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Regulasi secara umum merupakan suatu aturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga atau organisasi dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat dan bersosialisasi. Regulasi merupakan kebutuhan pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pelayanan, sebagai pengatur, dan juga sebagai pengelola usaha untuk menghasilkan pendapatan. Penegakan regulasi dilakukan secara menyeluruh, bagi seluruh warga masyarakat, yang diikuti dengan tindakan hukum sesuai ketentuan.
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas dan pengelolaan lingkungan hidup	Perubahan ekosistem lingkungan yang paling utama disebabkan oleh perilaku masyarakat yang kurang baik dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya yang dilakukan untuk memelihara kualitas lingkungan adalah mengelola sumber daya alam berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam merupakan usaha secara sadar dengan cara menggali sumber daya alam, tetapi tidak merusak sumber daya alam lainnya sehingga dalam penggunaannya harus memerhatikan pemeliharaan dan perbaikan kualitas dari sumber daya alam tersebut. Pengelolaan sumber daya alam ini tidak hanya tugas pemerintah daerah saja, namun masyarakat juga berpartisipasi aktif dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan bencana	Peningkatan kapasitas manajemen penanggulangan bencana	Kabupaten Luwu tergolong wilayah yang rawan bencana. Oleh karena itu, strategi penanggulangan bencana perlu menjadi salah satu kebijakan pemerintahan daerah.

Sasaran Pembangunan Tahun 2021	Strategi	Penjelasan Strategi
		<p>Pemerintah daerah membutuhkan langkah-langkah tertentu dalam melakukan penanggulangan bencana, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana pendukung serta kajian risiko bencana pada setiap wilayah.</p> <p>Terkait dengan adanya pandemi <i>Covid-19</i>, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi yang bertujuan untuk menanggulangi penyebarannya. Salah satu hal yang perlu disikapi adalah respon dan perilaku masyarakat mematuhi protocol kesehatan. Sifat apatis masyarakat terhadap aturan yang ditetapkan menciptakan masalah tersendiri, sehingga sinkronisasi perencanaan dan kesesuaian pelaksanaan dilapangan harus selaras dan terkoordinir dengan baik.</p>

4.3.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari perencanaan pembangunan agar lebih optimal dalam mencapai sasaran pembangunan. Prioritas yang ditetapkan sebagai jalan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Sedangkan arah kebijakan menjadi pedoman untuk mengoperasionalkan strategi yang dipilih agar lebih fokus terhadap capaian yang diinginkan. Disamping itu arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program/kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Adapun arah kebijakan pada setiap sasaran pembangunan Kabupaten Luwu untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut

Tabel 4.16
Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2021

Sasaran Pembangunan Tahun 2021	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Penataan organisasi dan peningkatan kualitas SDM aparatur	<p>Postur kelembagaan dan kemampuan SDM aparatur merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu untuk mencapai sasaran ini arah kebijakan yang ditempuh adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Evaluasi terhadap beban kerja pada setiap perangkat daerah; 2) Proses bisnis yang sederhana, responsif, adaptif dan membuka ruang peran serta publik dalam pemerintahan; 3) Diklat struktural, fungsional, teknis sesuai kebutuhan perangkat daerah;

Sasaran Pembangunan Tahun 2021	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan
		4) Penerapan merit system dalam pembinaan dan pengembangan pegawai.
	Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi	Perencanaan yang baik dan selanjutnya konsisten dalam penganggaran serta pelaksanaan evaluasi secara regular merupakan kerangka kebijakan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Arah kebijakan yang terkait dengan hal ini adalah: 1) Penguatan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; 2) Pengembangan birokrasi yang berintegritas dan terintegrasi; 3) Membangun organisasi yang akrab dengan pembelajaran.
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Optimalisasi pengelolaan sumber PAD	PAD merupakan urat nadi pembangunan daerah. Arah kebijakan yang dilakukan untuk mengoptimalkan PAD adalah: 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah; 2) Efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber PAD; 3) Monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan permasalahan.
	Peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja daerah	Anggaran yang terbatas harus dikelola untuk melaksanakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk itu arah kebijakan yang ditempuh adalah: 1) Penganggaran yang sesuai dengan perencanaan; 2) Penetapan dan pelaksanaan anggaran yang tertib administrasi, taat azas dan tepat waktu; 3) Tatakelola sesuai ketentuan peraturan perundangan; 4) Akuntabel dan transparan.
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Pengembangan pelayanan satu pintu	Mewujudkan terbentuknya Mall Pelayanan Publik (MPP) yang representatif dan modern. Kebijakan tahun 2021 adalah: 1) Peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah yang terkait dengan pelayanan publik; 2) Pengembangan sistem informasi yang mudah dan adaptif; 3) Koordinasi yang baik dan terencana antarinstansi terkait.
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Peningkatan akses layanan pendidikan yang merata dan berkualitas.	Arah kebijakan untuk mengurangi dampak berbagai permasalahan dibidang pendidikan adalah: 1) Dukungan terhadap guru di daerah terpencil; 2) Pemerataan guru sesuai kebutuhan; 3) Meningkatkan peran serta masyarakat terhadap kegiatan pendidikan formal dan non formal;

Sasaran Pembangunan Tahun 2021	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan
		4) Meningkatkan ketersediaan maupun kualitas sarana dan prasarana pendidikan; 5) Bantuan kepada murid jenjang pendidikan dasar.
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Pandemi <i>Covid-19</i> menunjukkan bahwa berbagai persoalan dalam pembangunan kesehatan dapat dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan, yaitu: 1) Kelompok sasaran program UKP dan UKM dipetakan dengan baik dan jelas; 2) Pemerataan layanan kesehatan; 3) Peningkatan kualitas layanan kesehatan 4) Pencegahan dan Minimalisir jumlah pasien ODP, PDP, Positif Covid-19 5) Peningkatan layanan siaga Covid-19 di puskesmas dan rumah sakit, 6) Percepatan pencegahan stunting terintegrasi.
Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah	Peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.	Pertumbuhan perekonomian daerah membutuhkan infrastruktur yang mantap dan terkoneksi dengan sentra-sentra ekonomi atau pusat-pusat pertumbuhan. Kebijakan yang dilakukan adalah: 1) Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan maupun jembatan yang diprioritaskan pada upaya menjangkau daerah terpencil; 2) Pengembangan aksesibilitas wilayah sebagai prioritas pemerataan Infrastruktur dengan peningkatan pelayanan angkutan darat, laut dan udara, serta peningkatan sarana dan prasarana perhubungan baik untuk kelancaran akses maupun keselamatan;
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	Peningkatan pemenuhan pelayanan dasar untuk mendukung fungsi hunian	Menyediakan <i>basic life access</i> untuk penduduk perkotaan (termasuk menjadikan Belopa sebagai pusat kebudayaan Luwu) dan perdesaan dengan arah kebijakan: 1) Pembangunan dan peningkatan jaringan air bersih dan sanitasi; 2) Penataan lingkungan kawasan permukiman; 3) Penyediaan maupun fasilitasi rumah layak huni; 4) Penanganan kawasan permukiman kumuh, 5) Meningkatkan sarana pelayanan publik dengan revitalisasi infrastruktur ruang publik pada pusat pelayanan kawasan dan pusat pelayanan lingkungan; 6) Pengembangan Kota Hijau serta peningkatan kualitas lingkungan kawasan minapolitan dan agropolitan.
Menurunnya jumlah pengangguran	Peningkatan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja	Memberikan fasilitasi bagi tenaga kerja untuk lebih terampil dan profesional dengan kebijakan: 1) Pelatihan keterampilan berbasis sesuai kebutuhan;

Sasaran Pembangunan Tahun 2021	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan
		2) Sosialisasi dan pengawasan penerapan protokol kesehatan; 3) Pengembangan pariwisata daerah.
	Mendorong pertumbuhan lapangan kerja	Upaya untuk menyerap sebanyak mungkin angkatan kerja, dengan kebijakan: 1) Mendorong meningkatnya realisasi investasi; 2) Pengembangan jasa konstruksi; 3) Penggunaan material lokal dalam pembangunan infrastruktur; 4) Meningkatkan kreativitas dan inovasi.
Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Pengembangan koperasi dan UMKM	Memberikan fasilitasi kepada koperasi dan UMKM untuk kemudahan dan kelancaran usaha, dengan kebijakan: 1) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas koperasi dan UMKM 2) Fasilitasi akses UMKM terhadap permodalan dan layanan perbankan; 3) Peningkatan keterampilan sesuai potensi keunggulan.
	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian	Fasilitasi kepada kelompok petani dengan kebijakan: 1) Pengembangan inovasi produk unggulan; 2) Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian/perkebunan; 3) Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan kelompok tani; 4) Bantuan sarana dan prasarana pertanian.
Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat	Pengembangan pelayanan dan pemberdayaan sosial	Upaya untuk penanggulangan PMKS dengan kebijakan: 1) Optimalisasi pendataan agar bantuan tepat sasaran; 2) Peningkatan dan pengembangan pemberdayaan masyarakat desa 3) Pengawasan dan penyaluran bantuan Covid-19 bersumber dari dana desa maupun yang berasal dari Pusat dan Provinsi; 4) Penanganan PMKS serta monitoring dan evaluasi pada pusat-pusat pelayanan
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius	Fasilitasi kegiatan keagamaan, kebangsaan, dan kebudayaan	Upaya untuk meningkatkan pengamalan ajaran agama, kerukunan hidup berbangsa, dan menanamkan nilai-nilai budaya daerah, dengan kebijakan: 1) Aktif dalam pelaksanaan peringatan hari-hari besar agama, bangsa dan budaya, baik dalam daerah maupun luar daerah; 2) Pembinaan kesejahteraan keluarga; 3) Pelestarian seni dan cagar budaya.
	Penataan dan sosialisasi produk hukum daerah	Upaya pembangunan dibidang hukum untuk ketertiban dan ketentraman, dengan kebijakan: 1) Penyusunan dan penetapan peraturan perundangan daerah;

Sasaran Pembangunan Tahun 2021	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan
		2) Sosialisasi dan penegakan produk hukum daerah; 3) Peningkatan kapasitas aparatur Linmas.
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup	Upaya preventif dan refresif dalam pelaksanaan pembangunan yang ramah lingkungan, dengan kebijakan: 1) Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan SDA maupun kelestarian alam; 2) Pengelolaan kebersihan; 3) Penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.
Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan bencana	Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Upaya untuk meminimalisir korban akibat bencana alam maupun bencana non alam, dengan kebijakan: 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penanggulangan bencana 2) Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manajemen penanggulangan bencana 3) Pembentukan Tim Gugus Tugas Covid-19 dan Penetapan Tupoksi bertanggungjawab sesuai sektor masing-masing. 4) Respon Cepat Informasi Pasien terjangkit Covid-19 dalam mendapat pelayanan Medis

4.4 KETERKAITAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DENGAN INDIKATOR MAKRO EKONOMI PEMBANGUNAN

Sebagaimana diketahui bahwa indikator makro ekonomi dapat dijadikan sebagai dasar perumusan kebijakan. Oleh sebab itu, rencana pembangunan daerah harus memiliki kaitan dengan indikator makro ekonomi. Keterkaitan indikator makro ekonomi dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.17
Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Indikator Makro Ekonomi

Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021	Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Luwu
Meningkatnya daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia
Meningkatnya aksebilitas dan konektifitas infrastruktur wilayah	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Pertumbuhan Ekonomi

Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021	Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Luwu
Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi
		PDRB per Kapita
Menurunnya jumlah pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran
Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius	Angka kriminalitas per 10.000 penduduk	Indeks Pembangunan Manusia

4.5 DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Rencana pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sistem perencanaan pembangunan provinsi. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan harus terstruktur dalam prioritas pembangunan daerah Kabupaten Luwu. Dukungan prioritas tersebut dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.18
Dukungan Prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu
Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN LUWU	INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN
Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan berdaya saing.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia
		Indeks Pendidikan
		Indeks Kesehatan
Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Kawasan Permukiman	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap
Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Kawasan Permukiman	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Percepatan Pemulihan ekonomi dan reformasi perlindungan sosial	Pengembangan Koperasi dan UKM	Pertumbuhan ekonomi
	Peningkatan Perlindungan Sosial	Indeks Pembangunan Manusia
Pengelolaan SDA berbasis kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan dan Kapasitas Manajemen Penanggulangan Bencana	Indeks kualitas lingkungan hidup
		Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)
Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola serta pelayanan publik	Peningkatan Kualitas Tatakelola dan Tatalaksana Pemerintahan	Nilai SAKIP
		Opini LKPD dari BPK RI
		Indeks Kepuasan Masyarakat

4.6 INTEGRASI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/ PENGARUSUTAMAAN SDGs

TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan social masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tatakelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Terdapat tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu: (1) indikator yang melekat pembangunan manusia (*human development*), di antaranya pendidikan, kesehatan; (2) Indikator yang melekat pada lingkungan sosial (*social economic development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi; dan (3) indikator yang melekat pada lingkungan (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021, target TPB diintegrasikan kedalam program pembangunan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.19
Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
Dalam Program Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021

No	Indikator TPB	Program Pembangunan Daerah	Ket
	Tujuan 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun		
01.01	Jumlah desa tertinggal	Program Administrasi Pemerintahan Desa	
01.02	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
01.03	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
01.04	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.		
01.05	Jumlah Penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas		
01.06	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan		
01.07	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		
01.08	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap		

No	Indikator TPB	Program Pembangunan Daerah	Ket
01.09	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin		
01.10	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat	Program Pengelolaan Pendidikan	
01.11	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Program Pencatatan Sipil	
01.12	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran		
01.13	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umum		
01.14	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Program Pengembangan Perumahan	
01.15	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Program Penanggulangan Bencana	
01.16	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah		
01.17	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah		
01.18	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan			
02.01	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
02.02	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan		
02.03	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.		
02.04	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun /balita		
02.05	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/balita		
02.06	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe		
02.07	Prevalensi anemia pada ibu hamil		
02.08	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif		
02.09	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	
Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia			
03.01	Angka Kematian Ibu (AKI)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
03.02	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih		

No	Indikator TPB	Program Pembangunan Daerah	Ket
03.03	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		
03.04	Angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup		
03.05	Angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup		
03.06	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran Hidup		
03.07	Prevalensi HIV pada populasi dewasa		
03.08	Insiden tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk		
03.09	Kejadian Malaria per 1000 orang		
03.10	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria		
03.11	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B		
03.12	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)		
03.13	Jumlah Provinsi/Kab/Kota dengan eliminasi Kusta		
03.14	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)		
03.15	Persentase merokok pada penduduk umur <18 tahun		
03.16	Prevalensi tekanan darah tinggi		
03.17	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun		
03.18	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
03.19	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	Program Perlindungan Khusus Anak	
03.20	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
03.21	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa kesehatan		
03.22	Prevalensi penyalahgunaan narkoba		
03.23	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
03.24	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin		
03.25	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern		
03.26	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
03.27	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		
03.28	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas		

No	Indikator TPB	Program Pembangunan Daerah	Ket
03.29	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan		
	Tujuan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua		
04.01	Persentase SD/MI berkreditasi minimal B	Program Pengelolaan Pendidikan	
04.02	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B		
04.03	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat		
04.04	Angka partisipasikasar (APK) SD/MI/Sederajat		
04.05	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/Mts/sederajat		
04.06	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ MA/ sederajat		
04.07	Rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun		
04.08	Jumlah remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TiIK)		
04.09	Rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/Sederajat; (2) SMP/Mts/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) perguruan tinggi		
04.10	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun		
04.11	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun		
	Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan		
05.01	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age Specific Fertility rate/ASFR)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
05.02	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
05.03	Indikator total Fertility rate (TFR)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
05.04	Korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Program Perlindungan Perempuan	
05.05	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir		
05.06	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
05.07	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah		
05.08	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)		
	Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan		
06.01	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	

No	Indikator TPB	Program Pembangunan Daerah	Ket
06.02	Persentase umah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
06.03	Kualitas Air Danau		
06.04	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku		
06.05	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
Tujuan 7 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua			
07.01	Rasio elektrifikasi		
Tujuan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua			
08.01	Laju pertumbuhan PDB per kapita	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	
08.02	PDB per kapita		
08.03	Persentase tenaga kerja formal	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
08.04	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
08.05	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	
08.06	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
08.07	Tingkat setengah pengangguran		
08.08	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)		
08.09	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
08.10	Jumlah wisatawan mancanegara		
08.11	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara		
08.12	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja		
08.13	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	
Tujuan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi			
09.01	Panjang jalur kereta api		
09.02	Jumlah dermaga penyeberangan	Program Pengelolaan Pelayaran	
09.03	Jumlah pelabuhan strategis		
09.04	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
09.05	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur		
09.06	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur		
09.07	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri		

No	Indikator TPB	Program Pembangunan Daerah	Ket
09.08	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
	Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara		
10.01	Koefisien Gini	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
10.02	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur		
10.03	Rata-rata pertumbuhan ekonomidi daerah tertinggal		
10.04	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal		
	Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan		
11.01	Persentase pengguna moda di perkotaan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
11.02	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama		
11.03	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)		
11.04	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Program Penanggulangan Bencana	
11.05	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)		
11.06	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Program Pengelolaan Persampahan	
11.07	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	Program Penanggulangan Bencana	
	Tujuan 12 Memastikan Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan		
12.01	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	
12.02	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Program Pengelolaan Persampahan	
	Tujuan 13 Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya		
13.01	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Program Penanggulangan Bencana	
13.02	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
	Tujuan 14 Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan		
14.01	Jumlah nelayan yang terlindungi	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
	Tujuan 15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati		
15.01	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan		

No	Indikator TPB	Program Pembangunan Daerah	Ket
15.02	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Program Pengendalian	
15.03	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
Tujuan 16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan			
16.01	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
16.02	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
16.03	Persentase penggunaan E- procurement terhadap belanja pengadaan	Program Aplikasi Informatika	
Tujuan 17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan			
17.01	Total pendapatan pemerintah PDB sumbernya	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
17.02	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan	Program Aplikasi Informatika	
17.03	Jumlah metdata kegiatan statistik dasar, sektoral dan khusus yang terdapat dalam sistem informasi rujukan statistik		
17.04	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik		
17.05	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama		
17.06	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi rujukan statistik		
17.07	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Program Pencatatan Sipil	
17.08	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	Program Aplikasi Informatika	
17.09	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)		

4.7 INTEGRASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

SPM berdasar pada Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sehingga pentingnya penerapan SPM untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Tabel 4.20
Integrasi SPM Dalam Program/Kegiatan Pembangunan Daerah
Tahun 2021

NO	Indikator SPM	Kegiatan Pembangunan Daerah	Target Tahun 2021
1.	PENDIDIKAN		
1.1.	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	Program Pengelolaan Pendidikan	100
1.2.	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan	100
1.3.	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam	Program Pengelolaan Pendidikan	100
2.	KESEHATAN		
2.1	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	100
2.2.	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan		100
2.3.	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan		100
2.4.	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan		100
2.5.	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan		100
2.6.	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan		100
2.7.	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan		100
2.8.	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan		100
2.9.	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan		100
2.10.	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan		100
2.11.	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan		100
2.12.	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan		100
3.	PEKERJAAN UMUM		
3.1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten	100
3.2.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten	100

NO	Indikator SPM	Kegiatan Pembangunan Daerah	Target Tahun 2021
4.	PERUMAHAN RAKYAT		
4.1.	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Kegiatan Pendataan, Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	100
4.2.	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		100
5.	TRANTIBUMLINMAS		
5.1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	100
5.2.	Perda dan perkada	Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten dan Peraturan Bupati/Walikota	100
5.3.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten	100
5.4.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100
5.5.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100
6.	SOSIAL		
6.1.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100
6.2.	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		100
6.3.	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		100
6.4.	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti		100
6.5.	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial		100

4.8 INOVASI DAERAH

Otonomi daerah telah mendorong pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah kreatif mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Adanya kewenangan dalam pengelolaan daerah, menyebabkan pemerintah daerah dapat melakukan inovasi-inovasi dalam memberikan layanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kemampuan kepala daerah dalam memimpin daerahnya akan terlihat

pada pencapaian Visi dan Misi yang dibangun secara konsisten sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Salah satu faktor penunjang pencapaian kinerja kepala daerah yaitu melalui inovasi daerah, Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Inovasi menjadi salah satu *tool* dalam mengakselerasi peningkatan daya saing daerah, sehingga inovasi daerah menjadi kebutuhan pemerintah pusat dan daerah dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan kritik dan saran mengenai pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Inovasi daerah menjadi hal penting yang harus diterapkan oleh Kabupaten Luwu, Penerapan inovasi daerah nantinya akan melibatkan seluruh Perangkat daerah di kabupaten Luwu sehingga diharapkan setiap Perangkat daerah menciptakan satu atau beberapa inovasi yang dikembangkan, hal ini bertujuan untuk menciptakan sebuah cara baru dalam meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan meningkatkan produktifitas sebuah pekerjaan/keadaan secara dinamis dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam Pengembangan Inovasi daerah, Kabupaten Luwu berupaya untuk mengembangkan berbagai inovasi yang mampu menciptakan sebuah hal baru yang sangat bermanfaat bagi masyarakat seperti contoh Inovasi yang berfokus pada kesehatan masyarakat yang telah berjalan selama hampir 2 Tahun yaitu Inovasi BABE CERDAS (Barang Bekas Cerahkan Desa Dan Saranaku) dengan Pembangkit Listrik Tenaga Atom Hidro (PLTAH) sebagai peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, ini menjadi langkah pemanfaatan potensi alam yang sangat mumpuni di Kabupaten Luwu menjadi pendorong sarana kesehatan masyarakat. Selain itu adanya Pembentukan Gugus Tugas Geospasial (GTIG) guna terciptanya Program Satu Peta Indonesia, dengan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan data real kondisi wilayah Kabupaten Luwu. Harapan pada tahun 2021 inovasi daerah dari masyarakat juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan, masyarakat juga dilibatkan dalam menciptakan inovasi daerah karena masyarakat menjadi tujuan dari hasil inovasi daerah dalam bentuk pelayanan publik yang maksimal.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2021

Sebagaimana tertuang pada Bab III, pendapatan daerah tahun 2021 diproyeksikan sejumlah **Rp.1.562.244.760.000,00** (*Satu triliun lima ratus enam puluh dua milyar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*), yang bersumber dari PAD sebesar **Rp.120.055.280.006,95** (*Seratus dua puluh milyar lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu dan enam koma sembilan puluh lima rupiah*), pendapatan Transfer sejumlah **Rp.1.381.784.119.357,05** (*Satu triliun tiga ratus delapan puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh koma nol lima rupiah*), serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah **Rp.60.405.360.636,00** (*Enam puluh milyar empat ratus lima juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*). Pendapatan Daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan pembangunan dalam rencana belanja daerah tahun 2021, dengan jumlah proyeksi belanja sebesar **Rp.1.558.244.760.000,00** (*Satu triliun lima ratus lima puluh delapan milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*) dan pendanaan untuk kebijakan pembiayaan daerah sejumlah **Rp.4.000.000.000,00** (*Empat milyar rupiah*).

Belanja daerah tahun 2021 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah Tahun 2021 antara lain diarahkan untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2021.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang dibagi ke dalam Belanja Operasi,

Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1
Rincian Kerangka Pendanaan Tahun 2021

Uraian	Proyeksi 2021
BELANJA	1.272.570.050.000,00
BELANJA OPERASI	930.463.772.351,05
Belanja Pegawai	551.641.533.216,00
Belanja Barang dan Jasa	289.770.904.313,05
Belanja Hibah	60.405.360.636,00
Belanja Bantuan Sosial	28.645.974.186,00
BELANJA MODAL	337.106.277.648,95
Belanja Modal Tanah	7.800.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.421.255.500,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.280.837.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	226.463.766.500,00
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	17.140.418.648,95
BELANJA TAK TERDUGA	5.000.000.000,00
Belanja Tak Terduga	5.000.000.000,00
TRANSFER	285.674.710.000,00
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	3.322.980.000,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	2.357.913.741,92
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	965.066.258,08
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	282.351.730.000,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	282.351.730.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-

5.2. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Rumusan Rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan sebuah produk perencanaan sistematis, disusun berdasarkan usulan yang bersumber dari tahapan-tahapan perencanaan kemudian dijabarkan ke dalam 6 (enam) urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta Bidang Sosial. Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sejumlah 18 (delapan belas) bidang

urusan meliputi Tenaga kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan. Sedangkan Urusan Pilihan sejumlah 6 (enam) bidang meliputi Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, dan Transmigrasi. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan sejumlah 2 (dua) bidang urusan meliputi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan sejumlah 5 (lima) bidang meliputi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, serta Penelitian dan Pengembangan. Selanjutnya Unsur Pengawasan meliputi Inspektorat Daerah serta Unsur Kewilyahan meliputi 22 (dua puluh dua) Kecamatan, dan Unsur Pemerintahan Umum meliputi Kesatuan Bangsa dan Poltik. Rincian secara lengkap dapat dilihat pada tabel 5.3. di bawah ini.

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

6.1. INDIKATOR KINERJA DAERAH

Untuk memperoleh informasi kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan untuk mengetahui ukuran keberhasilan dari pencapaian dalam perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan indikator kinerja. RKPD memuat indikator kinerja sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal, Norma Standar Prosedur Kriteria, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta indikator mandiri lainnya yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu dan Renstra-PD Tahun 2019-2024, sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*).

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi *Indikator Kinerja Utama (IKU)* maupun *Indikator Kinerja Kunci (IKK)*. Adapun penetapan indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dibagi dalam 3 (tiga) aspek, yakni: (1) *Aspek Kesejahteraan Masyarakat*; (2) *Aspek Daya Saing Daerah*; dan (3) *Aspek Pelayanan Umum*.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah yang terbagi dalam tiga aspek tersebut di atas, berpedoman pada RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran dan tujuan pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program.

Rumusan *indikator kinerja utama berikut capaian tahun lalu, proyeksi tahun berjalan dan target pada tahun rencana* dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.1.
Rumusan, Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Tahun 2019 - 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Tahun 2019	Perkiraan Tahun 2020	Target Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor Indeks	Cukup	Cukup	Baik
2	Nilai SAKIP	Skor Indeks	CC	CC	B
3	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor Indeks	Baik	Baik	Baik
5	Indeks Pembangunan Manusia	Skor Indeks	70,39	70,40	70,87
6	Indeks Pendidikan	Skor Indeks	63,19	63,72	64,42
7	Indeks Kesehatan	Skor Indeks	76,31	76,55	76,64
8	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Skor indeks	Cukup	Cukup	Cukup
9	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	21,29	23,87	26,26
10	Persentase penduduk berakses air minum	%	80,64	84,09	86,19
11	Rasio jaringan irigasi	n.a	40,26	63,00	65,00
12	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	%	75,45	76,00	77,10
13	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Angka	6,26	6,52	7,65
14	PDRB (ADHB) Perkapita	Juta Rp	43,25	45,83	49,41
15	Indeks Gini	Angka	0,362	0,352	0,358
16	Jumlah obyek wisata unggulan yang dikembangkan	Obyek wisata	1	1	2
17	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Angka	4,66	4,36	3,87
18	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	89,2	90,00	90,05
19	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian (%)	%	7,02	7,20	7,30
20	Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk	Per 10.000 penduduk	4,00	3,20	2,80
21	Jumlah kader mubaligh muda (orang)	Org	0,00	40	40
22	Persentase kasus suap, penipuan dan penggelapan	%	35,00	25,00	23,00
23	Persentase desa berstatus mandiri	%	40,00	60,00	65,00
24	Jumlah BUMDes berprestasi (Maju dan Mandiri)	Unit	1	4	5
25	Nilai investasi PMA dan PMDN (Miliar Rp)	Miliar Rp	16.689	18.532	19,830
26	Jumlah PMA dan PMDN yang berinvestasi (perusahaan)	Perusahaan	13	13	14
27	Persentase wirausaha muda	% jumlah penduduk	0,50	1,00	1,50
28	Cakupan penegakan dan perlindungan hukum (%)	n.a	-	100,00	100,00
29	Cakupan ketersediaan produk hukum daerah (%)	%	66,00	81,00	82,00
30	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	44,58	100,00	100,00
31	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	92,22	92,75	92,90
32	Indeks kualitas lingkungan hidup	Skor Indeks	Cukup	Cukup	Baik
33	Persentase pembinaan dan pengawasan izin PPLH dan PUU LH	%	39,22	50,00	60,00
34	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	%	30,00	≤30,00	≤30,00

Data yang tertuang dalam tabel diatas bersumber dari data BPS atau perangkat daerah yang terkait, merupakan gambaran dari kondisi tahun 2019 dan menjadi *baseline* perencanaan, proyeksi tahun 2020 yang diukur berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2020, serta target tahun 2021

yang diturunkan dari RPJMD tahun berkenaan atau sesuai capaian tahun 2020 dan proyeksi tahun 2021.

Selain IKU, RPJMD juga menetapkan Indikator Kinerja Kunci (*key performance indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program/kegiatan pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, rangkuman Indikator Kinerja Kunci pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu yang terdiri dari capaian tahun lalu, proyeksi tahun berjalan dan target tahun rencana, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.2.
Capaian, Proyeksi dan Target Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Luwu
Tahun 2019 – 2021

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Target Tahun 2021
I.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1.	Pertumbuhan PDRB	%	6,26	7,30	7,65
2.	Laju inflasi	%	0,86	3,96	3,86
3.	PDRB (ADHK) per kapita	Juta Rp	26,87	29,87	32,11
4.	Indeks Gini	%	0,352	0,350	0,348
5.	Tingkat Kemiskinan	%	12,78	12,86	11,09
6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	70,39	70,40	70,87
7.	Angka Melek Huruf Usia 15+	%	92,23	94,25	97,35
8.	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,15	8,23	8,30
9.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,32	13,68	13,96
10.	Angka usia harapan hidup	Tahun	70,19	70,21	70,23
11.	Persentase balita gizi buruk	%	0,03	0,03	0,03
12.	Prevalensi balita gizi kurang	%	5,65	5,32	5,06
13.	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100,00	100,00	100,00
14.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	64,69	68,18	69,88
15.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,66	4,36	3,39
16.	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 Tahun ke atas	%	98,27	58,91	60,38
17.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	43,28	40,12	38,11
18.	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	7,76	6,09	7,26
19.	Opini BPK		WTP	WTP	WTP
20.	Penguatan cadangan pangan	Ton	11,15	20	40

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Target Tahun 2021
21.	Penanganan daerah rawan pangan	Skor	5	5	5
22.	Ketersediaan pangan utama	%	82,45	77,29	79,23
23.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan/kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	%	53,88	53,95	54,35
24.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	10,14	10,63	10,89
25.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	4,27	4,89	5,60
26.	Pertumbuhan Industri	%	10,94	6,28	6,44
II	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Pengeluaran konsumsi Rumah tangga per kapita	Rp.	852.041	865.250	878.815
2	Nilai tukar petani	%	103,59	105,30	105,82
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	49,30	52,66	53,98
4	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	44,07	87,23	89,41
5	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB indikator keterbukaan (ekonomi)	%	0,06	0,78	0,79
6	Angka kriminalitas yang tertangani	%	100,00	100,00	100,00
7	Rasio ketergantungan	%	61,11	61,32	61,33
III.	ASPEK PELAYANAN UMUM				
A.	URUSAN WAJIB DASAR				
1.	PENDIDIKAN				
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	52,40	60,04	61,55
1.2.	Angka partisipasi kasar (APK) :				
1.2.1.	Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A	%	94,45	99,43	100,00
1.2.2.	Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B	%	96,77	98,85	100,00
1.2.3.	Angka Pendidikan yang ditamatkan SD/MI		7.913	8.114	8.317
1.3.	Angka Partisipasi Murni (APM) :				
1.3.1.	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	%	93,51	98,23	100,00
1.3.2.	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	%	82,73	83,64	85,73
1.4.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) :				
1.4.1.	Angka partisipasi sekolah SD/MI/Paket A	%	99,41	100,00	100,00
1.4.2.	Angka partisipasi sekolah SMP/MTs/Paket B	%	93,81	71,87	73,67
1.5.	Angka Putus Sekolah (AptS) :				
1.5.1.	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,02	0	0
1.5.2.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,01	0	0
1.6.	Angka Kelulusan (AL):				
1.6.1.	Angka Kelulusan SD/MI	%	98,73	100,00	100,00
1.6.2.	Angka Kelulusan SMP/MTs	%	76,78	100,00	100,00
1.7.	Angka Melanjutkan :				
1.7.1.	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	%	97,66	97,67	100,00
1.7.2.	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	96,46	100,00	100,00
1.8.	Fasilitas Pendidikan:				
1.8.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	19,83	61,77	63,31

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Target Tahun 2021
1.9.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Angka Rasio	38,57	67,25	68,93
1.10.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (per 10.000 murid)	Orang	763,10	860,12	870,00
1.11.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	%	92,23	94,25	97,35
1.12.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	64,00	89,23	91,46
2.	KESEHATAN				
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup		0,0091	0,01	0,01
2.2.	Angka kelangsungan hidup bayi	%	98,99	100,00	100,00
2.3.	Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup		9,72	9,98	8,54
2.4.	Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup		6,54	7,17	6,29
2.5.	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup		95,65	77,64	60,80
2.6.	Rasio posyandu per satuan balita	%	0,0144	0,02	0,02
2.7.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	%	0,0007	0,0006	0,0006
2.8.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Per 1.000 Penduduk		0,006	0,007	0,009
2.9.	Rasio dokter per satuan penduduk Per 1.000 Penduduk		0,09	0,11	0,13
2.10.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk Per 1.000 Penduduk		1,14	1,17	1,19
2.11.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	80,49	72,78	74,59
2.12.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	88,52	92,02	94,33
2.13.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	98,24	89,89	92,14
2.14.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100,00	100,00	100,00
2.15.	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum standar yang digunakan Indonesia 2.100,00 (Kkal/kapita/hari)	KKAL/ Kapita/ Hari	N/A	N/A	N/A
2.16.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	89,59	100,00	100,00
2.17.	Non Polio AFP rate per 100,00.000 penduduk	%	0	0	0
2.18.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00
2.19.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	60,30	45,70	46,84
2.20.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100,00.000 penduduk)	%	0,19	0,17	0,16
2.21.	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100,00.000 penduduk)	%	0,0008	0	0
2.22.	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	63,68	100,00	100,00
2.23.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	77,00	94,61	96,97
2.24.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100,00	100,00	100,00
2.25.	Penderita diare yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00
2.26.	Angka kejadian Malaria Per 100.000 orang		52	0	0

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Target Tahun 2021
2.27.	Tingkat kematian akibat malaria	%	0	0	0
2.28.	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	-	-	-
2.29.	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	100,00	100,00	100,00
2.30.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,005	0,0000	0,0000
2.31.	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	%	100,00	100,00	100,00
2.32.	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	100,00	100,00	100,00
2.33.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100,00	100,00	100,00
2.34.	Cakupan kunjungan bayi	%	101,26	100,00	100,00
2.35.	Cakupan puskesmas	%	100,00	100,00	100,00
2.36.	Cakupan pembantu puskesmas	%	49,34	48,75	49,25
2.37.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	81,00	87,08	89,26
2.38.	Cakupan pelayanan nifas	%	86,66	92,15	94,45
2.39.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	48,81	59,69	61,18
2.40.	Cakupan pelayanan anak balita	%	71,14	71,55	73,33
2.41.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -24 bulan keluarga miskin	%	89,67	100,00	100,00
2.42.	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	89,67	92,05	94,35
2.43.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100,00	100,00	100,00
2.44.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100,00	100,00	100,00
2.45.	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100,00	100,00	100,00
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
3.1.	Proporsi jalan dalam kondisi mantap	%	21,29	23,87	26,26
3.2.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	21,29	22,24	22,80
3.3.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	75,45	82,46	84,52
3.4.	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	0	0	0
3.5.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	40,26	37,24	38,17
3.6.	Persentase penduduk berakses air minum	%	80,64	84,09	86,19
3.7.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	47,94	48,69	49,90
3.8.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	%	N/A	N/A	N/A
3.9.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	%	3,04	4,50	6,05
3.10.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	0,07	16,81	17,23
3.11.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	N/A	N/A	N/A

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Target Tahun 2021
3.12.	Bangunan ber-IMB per satuan bangunan	%	98,05	99,70	99,81
3.13.	Ruang publik yang berubah peruntukannya	%	0	0	0
3.14.	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	%	Null	Null	Null
3.15.	Ketaatan terhadap RTRW	%	N/A	N/A	N/A
4.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN				
4.1.	Rasio rumah layak huni	%	0,28	20,54	20,84
4.2.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	6,87	6,50	6,03
4.3.	Rasio permukiman layak huni	%	0,97	1,00	1,25
4.4.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	90,09	90,12	90,15
4.5.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	N/A	N/A	N/A
4.6.	Persentase pemukiman yang tertata	%	0,15	1,05	1,95
4.7.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	0,03	0,03	0,01
4.8.	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	1,60	1,20	1,00
4.9.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	N/A	N/A	N/A
4.10.	Jumlah kawasan kumuh kewenangan kabupaten yang ditata secara keseluruhan	%	0,15	15,85	21,63
5.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
5.1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	64,74	56,38	57,78
5.2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ketertiban, ketentraman, (keindahan)	%	87,89	76,88	78,8
5.3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	96,3	82,00	84,05
5.4.	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100,00	100,00	100,00
5.5.	Persentase Penegakan PERDA	%	100,00	100,00	100,00
5.6.	Cakupan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahapan Pasca Bencana	%	100,00	100,00	100,00
5.7.	Cakupan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	%	100,00	100,00	100,00
5.8.	Cakupan Jumlah Konflik/Gangguan Keamanan Daerah yang tertangani	%	100,00	90,00	90,00
5.9.	Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	%	95,00	95,00	95,00
5.10.	Persentase Keikutsertaan aparat dan masyarakat dalam bela Negara	%	00,00	5,00	6,00
6.	SOSIAL				
6.1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	44,58	100,00	100,00
6.2.	Persentase PMKS yang tertangani	%	44,58	20,65	30,45

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Target Tahun 2021
6.3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	44,58	11,95	12,35
6.4.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	1,74	0,62	0,63
6.5.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100,00	100,00	100,00
6.6.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	N/A	N/A	N/A
6.7.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100,00	100,00	100,00
6.8.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	2,00	3,00	3,39
6.9.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	66,23	67,43	69,12
6.10.	Persentase kejadian bencana alam dan kebakaran yang tertangani dengan baik	%	100,00	95,00	98,00
B.	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				
1.	TENAGA KERJA				
1.1.	Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun	%	N/A	N/A	N/A
1.2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	100,00	100,00	100,00
1.3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	17,08	100,00	100,00
1.4.	Keselamatan dan perlindungan	%	100,00	100,00	100,00
1.5.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	100,00	100,00	100,00
1.6.	Penanganan perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	100,00	100,00	100,00
1.7.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	Propinsi	100,00	100,00
1.8.	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	Propinsi	100,00	100,00
1.9.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	79,27	100,00	100,00
1.10.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	100,00	100,00	100,00
1.11.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	4,80	100,00	100,00
2.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
2.1.	Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah	%	26,00	2,67	2,94
2.2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	5,71	11,41	12,55
2.3.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	74,00	6,31	6,94
2.4.	Rasio KDRT	%	0,0027	0,001	0,001
2.5.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	-	35,42	38,96

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Target Tahun 2021
2.6.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	2,05	2,15	2,80
2.7.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100,00	100,00	100,00
2.8.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	N/A	N/A	N/A
2.9.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	N/A	N/A	N/A
2.10.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100,00	100,00	100,00
2.11.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100,00	55,45	56,00
2.12.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	4,07	6,85	7,45
2.13.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100,00	100,00	100,00
2.14.	Rasio APM perempuan/laki- laki di SD	%	-	1,04	1,04
2.15.	Rasio APM perempuan/laki- laki di SMP	%	-	1,24	1,24
2.16.	Rasio APM perempuan/laki- laki di SMA	%	-	1,03	1,03
2.17.	Rasio APM perempuan/laki- laki di Perguruan Tinggi	%	N/A	N/A	N/A
2.18.	Rasio melek huruf Perempuan terhadap laki- laki pada kelompok usia 15-24 tahun	%	-	1,02	1,02
2.19.	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian	%	24,00	35,75	36,00
2.20.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	N/A	65,03	66,10
3.	PANGAN				
3.1.	Ketersediaan pangan utama	%	82,45	77,29	79,23
3.2.	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Energi per Kpt	3,406	2.440	2.510
		Protein per Kpt	69,00	61,99	63,54
3.3.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	48,8	100,00	100,00
4.	PERTANAHAN				
4.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	%	0.996	0,103	0,104
4.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	66,66	100,00	100,00
4.3.	Penyelesaian izin lokasi	%	100,00	100,00	100,00
5.	LINGKUNGAN HIDUP				
5.1.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/Tidak Ada	ada	ada	ada
5.2.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten	Ada/Tidak Ada	Ada	ada	ada

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Target Tahun 2021
5.3.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Kabupaten	Ada/Tidak Ada	Ada	ada	ada
5.4.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air		26,65	26,65	26,65
5.5.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara		3,66	3,66	3,66
5.6.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten	%	37,89	37,89	37,89
5.7.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/Tidak Ada	Ada	ada	ada
5.8.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	100,00	100,00	100,00
5.9.	Timbulan sampah yang ditangani	%	67,30	84,50	85,01
5.10.	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	23,40	17,05	17,45
5.11.	Persentase cakupan area pelayanan	%	83,75	87,99	90,19
5.12.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	67,30	87,99	90,19
5.13.	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Nilai	85,08	85,35	85,75
5.14.	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	%	Tidak Ada	Ada	Ada
6.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
6.1.	Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	0,94	0,91	0,95
6.2.	Rasio Penduduk ber-KK	Rasio	0,55	0,65	0,70
6.3.	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	0,86	0,85	0,90
6.4.	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	0,23	0,20	0,35
6.5.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada	ada	ada
6.6.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	Sudah	Sudah	Sudah
6.7.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	94,22	95,22	96,20
6.8.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	86,22	87,32	88,56
7.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
7.1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	97,58	98,04	100,00
7.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	%	207	207	207
7.3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	100,00	100,00	100,00
7.4.	Persentase LSM aktif	%	20,48	20,84	21,36
7.5.	Persentase LPM Berprestasi	%	0,00	0,01	0,04
7.6.	Persentase PKK aktif	%	100,00	100,00	100,00
7.7.	Persentase Posyandu aktif	%	100,00	100,00	100,00

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Target Tahun 2021
8.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
8.1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	0,82	0,82	0,82
8.2.	Total Fertility Rate (TFR)	Angka TFR	2,96	2,96	2,96
8.3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	8,57	8,90	8,93
8.4.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	-	5,71	8,57
8.5.	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Kebijakan	-	-	-
8.6.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Orang	2,4	2,4	2,4
8.7.	Ratio Akseptor KB	Rasio	75,85	76,75	76,99
8.8.	Angka Pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	66,18	67,15	67,45
8.9.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 Tahun	%	1,06	0,98	0,98
8.10.	Cakupan PUS yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	14,25	15,93	16,33
8.11.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	24,50	22,35	22,75
8.12.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	84,25	86,52	88,68
8.13.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	61,18	63,15	63,89
8.14.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	50,83	51,95	52,35
8.15.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	37,08	35,98	36,25
8.16.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	9,09	18,18	27,27
8.17.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	154,55	154,55	154,55
8.18.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100,00	100,00	100,00
8.19.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB mandiri	%	N/A	N/A	N/A
8.20.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100,00	100,00	100,00
8.21.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	110,08	125,22	125,22
8.22.	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	43,75	44,50	50,15
8.23.	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro	%	100,00	100,00	100,00

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Target Tahun 2021
8.24.	Tahapan Keluarga Sejahtera	Keluarga	86.029	86.039	86.139
8.25.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera	%	43,28	44,45	44,45
9.	PERHUBUNGAN				
9.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	259.201	423.325	433.908
9.2.	Rasio ijin trayek	Rasio	0,0014	0,59	0,60
9.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	Kendaraan	1.926	1.924	1.973
9.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Pelabuhan	0/1/1	1/1/1	1/1/1
9.5.	Persentase layanan angkutan darat	%	21,30	8,54	8,75
9.6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	45,35	36,49	37,4
9.7.	Pemasangan Rambu-rambu	%	19,56	20,17	20,67
9.8.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,045	0,0641	0,0657
9.9.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang/ Ton	212.582 / 167	415.055 / 530,60	421300 / 575,60
9.10.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Orang/ Ton	259.783 / 449,46	415.055 / 530,60	421300 / 575,60
10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
10.1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	N/A	N/A	N/A
10.2.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	N/A	N/A	N/A
10.3.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	N/A	N/A	N/A
10.4.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	40,00	50,00	50,60
10.5.	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	N/A	N/A	N/A
10.6.	Jumlah Server yang di kelola	unit	7	1	1
10.7.	Jumlah Aplikasi Pemerintah yang dikembangkan	aplikasi	4	1	1
10.8.	Cakupan Layanan Internet pada OPD yang dikelola	%	8,00	12,00	15,00
10.9.	Cakupan Akses Layanan Internet di Desa dengan Baik	%	40,00	50,20	75,00
10.10.	Tersedianya Website Pemerintah Daerah	Sudah/ Belum	Sudah	Sudah	Sudah
10.11.	Persentase Website OPD	%	50,00	41,00	42,00
11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
11.1.	Persentase koperasi aktif	%	44,60	45,00	46,00
11.2.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang dibina	%	87,07-	35,88	36,77
11.3.	Jumlah Usaha Mikro dan Menengah	Unit Usaha	19.250	18.183	18.183
11.4.	Persentase Usaha Mikro dan Menengah Aktif	%	87,07	30,35	30,75
11.5.	Jumlah Produk Asli Daerah Hasil dari UKM	Produk	18	20	22
12.	PENANAMAN MODAL				
12.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan	13	14	15
12.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Miliar Rp	18.532	19.430	19.820
12.3.	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang	Unit	7	7	7

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Target Tahun 2021
12.4.	Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi	Unit	2	2	2
12.5.	Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel	Unit	14	14	14
12.6.	Lama Proses Perizinan	hari	1-5	1-15	1-15
12.7.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Perda	0	4	4
12.8.	Jumlah Macam Pajak	Jenis	7	7	7
12.9.	Jumlah Macam Retribusi	Jenis	2	3	3
12.10.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio	25,48	27,05	30,00
12.11.	Presentase Indeks Kepuasan Masyarakat	%	91,12	92,00	93,09
13.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
13.1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	100,00	100,00	100,00
13.2.	Cakupan pembinaan olahraga	%	5,00	5,13	5,25
13.3.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	7,00	7,18	7,35
13.4.	Cakupan pembinaan atlet muda	%	100,00	100,00	100,00
13.5.	Jumlah atlet berprestasi	atlet	11	11	11
13.6.	Jumlah prestasi olahraga	jenis	11	11	11
13.7.	Jumlah Organisasi Pemuda	organisasi	30	25	25
13.8.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	kegiatan	4	8	9
13.9.	Jumlah Kegiatan Olah Raga	kegiatan	2	7	8
13.10.	Jumlah Organisasi Olah Raga	organisasi	15	15	15
13.11.	Persentase Organisasi Olah Raga yang aktif	%	55,00	51,00	52,00
13.12.	Cakupan Wasit yang Bersertifikasi	%	60,00	52,00	54,00
13.13.	Jumlah Cabang Olah Raga Prestasi Setiap Tahun	cabang	2	2	3
13.14.	Jumlah Klub Olah Raga	klub	22	22	22
13.15.	Jumlah Gedung/Lapangan Olahraga	gedung	1/229	1/229	1/229
13.16.	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	orang	11	13	15
14.	STATISTIK				
14.1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak ada	ada	ada	ada
14.2.	Buku "kabupaten dalam angka"	ada/tidak ada	ada	ada	ada
14.3.	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	ada/tidak ada	ada	ada	ada
14.4.	Buku "PDRB"	ada/tidak ada	ada	ada	ada
15.	PERSANDIAN				
15.1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00
15.2.	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI)	indeks	Sangat Rendah	Baik	Baik
16.	KEBUDAYAAN				
16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	6	6	6

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Target Tahun 2021
16.2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	buah	4	4	4
16.3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	karya budaya	N/A	N/A	N/A
16.4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	cahar budaya	4	4	4
17.	PERPUSTAKAAN				
17.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	4,33	4,75	5,15
17.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	judul	52.067	51.250	52.531
17.3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk		0,00147	0,00147	0,00147
17.4.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	orang	2.025	2.706	2.773
17.5.	Jumlah koleksi buku perpustakaan	judul	52.067	52.901	53.401
17.6.	Jumlah pustakawan, tenaga Teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	orang	7	9	10
17.7.	Jumlah Perpustakaan di Desa/kelurahan yang di Kelola	unit	39	50	111
17.8.	Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan yang berprestasi	unit	1	1	2
17.9.	Jumlah Armada Perpustakaan Keliling yang dikelola	unit	2	2	2
18.	KEARSIPAN				
18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	N/A	N/A	N/A
18.2.	Jumlah SDM Pengelola Kearsipan	orang	4	8	9
18.3.	Jumlah Arsip daerah yang dikelola	arsip	7	9	10
18.4.	Jumlah Sarana Kearsipan Daerah	unit	13	13	13
C.	LAYANAN URUSAN PILIHAN				
1.	KELAUTAN DAN PERIKANAN				
1.1.	Produksi perikanan	Ribu ton	644,36	684,72	701,83
1.2.	Konsumsi ikan	%	107,42	106,53	106,53
1.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	%	72,20	100,00	100,00
1.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	65,00	11,00	12,00
1.5.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	N/A	N/A	N/A
1.6.	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	%	N/A	N/A	N/A
1.7.	Nilai tukar nelayan		N/A	N/A	N/A
2.	PARIWISATA				
2.1.	Kunjungan wisata	orang	2.960	13.206	13.216
2.2.	Lama kunjungan Wisata	hari	1	1	1
2.3.	PAD sektor pariwisata	%	0,007	0,15	0,16
2.4.	Jumlah Objek Wisata Pantai yang terdata dan terdaftar	objek	11	10	10
2.5.	Jumlah Objek Wisata Alam yang terdata dan terdaftar	objek	27	27	27

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Target Tahun 2021
2.6.	Jumlah Objek Wisata Sejarah yang terdata dan terdaftar	objek	12	12	12
2.7.	Jumlah Objek Wisata Budaya yang terdata dan terdaftar	objek	2	2	2
2.8.	Jumlah Objek Wisata Seni yang terdata dan terdaftar	objek	3	3	3
2.9.	Jumlah Objek Agrowisata yang terdata dan terdaftar	objek	2	2	2
2.10.	Jumlah Objek Wisata Buatan yang Terdata dan Terdaftar	objek	N/A	N/A	N/A
2.11.	Jumlah Objek Wisata dikelola dengan sistem bagi hasil pemerintah setempat	objek	3	3	3
2.12.	Jumlah Objek Wisata yang dikelola oleh Pemda	objek	1	1	2
2.13.	Jumlah Objek wisata yang dikelola oleh Swasta	objek	3	3	3
3.	PERTANIAN				
3.1.	Nilai PDRB Sektor Pertanian (palawija)	Juta Rp	1.158,98	1.125,32	1.130.415,00
3.2.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB sektor pertanian	%	7,40	26,52	26,53
3.3.	Nilai PDRB Sektor Perkebunan (Tanaman Keras)	Juta Rp	18,49	19,55	20,05
3.4.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB PDRB sektor pertanian/perkebunan	%	52,38	61,80	62,05
3.5.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	N/A	N/A	N/A
3.6.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ton/ha	6,54	6,80	7,05
3.7.	Cakupan bina kelompok petani	%	5,30	100,00	100,00
6.	PERDAGANGAN				
6.1.	Ekspor Bersih Perdagangan	Miliar Rp.	235,67	281,05	290,03
6.2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	N/A	N/A	N/A
7.	PERINDUSTRIAN				
7.1.	Pertumbuhan Industri	%	10,94	6,28	6,44
7.2.	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	-	36,00	37,00
7.3.	Jumlah Kemasan Lokal yang tercipta	Jenis kemasan	-	22	25
8.	TRANSMIGRASI				
8.1.	Persentase transmigran swakarsa	%	50,00	100,00	100,00
8.2.	Luas Lahan Areal Transmigrasi yang dikelola	Ha	22,25	22,25	22,25
8.3.	Luas Areal Lahan Transmigrasi yang disediakan	Ha	22,25	22,25	22,25
D.	PENUNJANG URUSAN				
1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak ada	ada	ada	ada
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada/tidak ada	ada	ada	ada

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Target Tahun 2021
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada/tidak ada	ada	ada	ada
1.4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak ada	ada	ada	ada
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100,00	100,00	100,00
1.6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100,00	100,00	100,00
2	KEUANGAN				
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Jenis Opini	WTP	WTP	WTP
2.2.	Persentase SILPA terhadap APBD	%	2,18	-	-
2.3.	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	0,20	-	-
2.4.	Persentase belanja pendidikan	%	27,13	20,00	20,00
2.5.	Persentase belanja kesehatan	%	14,71	10,00	10,00
2.6.	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	50,36/5,93	55,38/44,15	54,90/44,64
2.7.	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	0,20	0,22	0,22
2.8.	Penetapan APBD	tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
3.1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	12.932	17.601,78	18.041,82
3.2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0,78	0,97	0,97
3.3.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	13,00	13,54	13,88
3.4.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	jabatan	40	40	40
3.5.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	jabatan	2.715	2.715	2.715
3.6.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	orang	2988	2988	2988
3.7.	Persentase Penempatan SDM sesuai Kompetensi	%	0,25	0,25	0,25
3.8.	Cakupan PNS yang telah lulus diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis dan diklat managerial	%	N/A	N/A	N/A
3.9.	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	N/A	N/A	N/A
4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
4.1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	100,00	100,00	100,00
4.2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	100,00	100,00	100,00
4.3.	Penerapan SIDA :	%	100,00	100,00	100,00
4.4.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	100,00	100,00	100,00
4.5.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	100,00	100,00	100,00

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Target Tahun 2021
5	PENGAWASAN				
5.1.	Persentase tindak lanjut temuan BPK	%	100,00	100,00	100,00
5.2.	Persentase tindak lanjut temuan BPKP	%	100,00	100,00	100,00
5.3.	Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	%	94,46	100,00	100,00
5.4.	Persentase pelanggaran pegawai	%	N/A	0	0
5.5.	Jumlah temuan BPK	temuan	12	0	0
6	SEKRETARIAT DEWAN				
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat- alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada/tidak ada	ada	ada	ada
6.2.	Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada/tidak ada	ada	ada	ada
6.3.	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada/tidak ada	ada	ada	ada
7	SEKRETARIAT DAERAH				
7.1.	Persentase Penyelesaian Tapal Batas antar Kecamatan	%	60,00	80,00	100,00
7.2.	Jumlah Analisa Berita dan Kebutuhan Publik yang disampaikan kepada kepala daerah	kali	252	253	255
7.3.	Jumlah UMKM yang memperoleh akses ke lembaga keuangan	UMKM	1.067	1.067	1.067
7.4.	Persentase Potensi Sumber Daya Alam yang telah dimanfaatkan	%	90,00	100,00	100,00
7.5.	Persentase Paket Tender yang diselesaikan tepat waktu	%	87,21	100,00	100,00
7.6.	Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Tender	%	100,00	100,00	100,00
7.7.	Persentase Besaran Efisiensi Nilai Kontrak terhadap Nilai Pagu	%	4,00	4,00	4,00
7.8.	Persentase Asset Sekretariat yang sudah direkonsiliasi	%	90,00	100,00	100,00
7.9.	Nilai LPPD	Nilai	2.975	2.885	2.983
7.10.	Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi dalam kurun waktu tahun yang sama	%	100,00	100,00	100,00
7.11.	Persentase Pejabat yang menyampaikan LHKPN	%	80,00	100,00	100,00
7.12.	Persentase ketersediaan analisis jabatan	%	100,00	100,00	100,00
7.13.	Persentase RKA Unit Kerja Lingkup Sekretariat daerah yang diverifikasi	%	100,00	100,00	100,00
8	KECAMATAN				
8.1.	Jumlah Kecamatan dengan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan di atas 80 %	kecamatan	22	22	22

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Target Tahun 2021
8.2.	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan	%	100,00	100,00	100,00
8.3.	Persentase Konflik yang tertangani di tingkat kecamatan	%	100,00	100,00	100,00
8.4.	Persentase Kecamatan memiliki penurunan angka kemiskinan sesuai target RPJMD	%	-	100,00	100,00

Data yang tertuang dalam tabel diatas merupakan gambaran dari kondisi tahun 2019 yang diperoleh dari masing-masing perangkat daerah dan menjadi *baseline* perencanaan, proyeksi tahun 2020 yang diukur berdasarkan hasil evaluasi program/ kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2020, serta target tahun 2021 yang diturunkan dari RPJMD tahun berkenaan atau sesuai capaian tahun 2020 dan proyeksi tahun 2021.

6.2. INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, pemerintah kabupaten Luwu telah menerapkan standar pelayanan minimal guna mengetahui ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib sesuai dengan ukuran yang ditetapkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
6. Sosial.

Adapun penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6.3.
Capaian, Proyeksi dan Target Kinerja SPM Kabupaten Luwu
Tahun 2019-2021

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Target Tahun	
						2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
1.	PENDIDIKAN						
1.1	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/ MTs)	%	88,71	96,78	100,00	100,00

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Target Tahun	
						2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
1.2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	82,73	17,70	25,00	40,00
1.3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	35,15	52,40	60,04	61,55
2.	KESEHATAN						
2.1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	84,96	93,94	100,00	100,00
2.2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	89,78	88,52	100,00	100,00
2.3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	98,93	100,00	100,00	100,00
2.4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100,00	71,14	100,00	100,00
2.5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	84,96	87,05	100,00	100,00
2.6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100,00	53,50	100,00	100,00
2.7	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100,00	39,57	100,00	100,00
2.8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100,00	44,90	100,00	100,00
2.9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100,00	67,90	100,00	100,00
2.10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	%	100,00	95,70	100,00	100,00
2.11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100,00	77,00	100,00	100,00
2.12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100,00	64,54	100,00	100,00
3.	PEKERJAAN UMUM						
3.1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100,00	100,00	100,00	100,00
3.2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	N/A	N/A	100,00	100,00
4.	PERUMAHAN RAKYAT						
4.1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Target Tahun	
						2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
	layak huni bagi korban bencana Kab/kota						
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	TRANTIBUM LINMAS						
5.1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum	%	100,00	100,00	100,00	100,00
5.2	Pelayanan informasi rawan bencana	Perda dan perkara	%	100,00	100,00	100,00	100,00
5.3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00
5.4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00
5.5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	SOSIAL						
6.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00
6.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00
6.4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	%	100,00	100,00	100,00	100,00

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa mutu layanan di bidang pendidikan dan kesehatan perlu mendapatkan perhatian melalui kebijakan yang berhubungan langsung dengan masing-masing jenis layanan.

6.3. INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)

Sebagaimana diketahui bahwa TPB merupakan agenda pembangunan universal yang disepakati oleh negara-negara di dunia serta merupakan kesepakatan pembangunan global yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser kearah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan yang mencakup bidang sosial ekonomi, dan lingkungan hidup yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target .

Pemerintah Kabupaten Luwu dalam hal ini telah berupaya menunjang keberhasilan pelaksanaan pencapaian TPB yang menjadi tuntunan kebijakan dan pendanaan kedepan. Kondisi Pemerintah Kabupaten Luwu terhadap indikator TPB tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.4.
Capaian dan Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Luwu Tahun 2015 – 2021

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					Target 2020	Proyeksi 2021	PD Penanggung Jawab
				2015	2016	2017	2018	2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun										
1.1.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	7-8%	11%	13,89%	14,35%	14,01%	13,36%	12,78%	12,60%	12,20%	Dinas Sosial
1.2.	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	90%	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
1.3.	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	17,12%	20,15%	41,95%	41,95%	41,95%	41,95%	20,86%	20,50%	20,15%	Dinas Sosial
1.4.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	2,8 Juta Rumah Tangga	10.000 KSM	4.684 KSM	9.936 KSM	9.903 KSM	16.879 KSM	16.526 KSM	16.879 KSM	16.200 KSM	Dinas Sosial
1.5.	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	70%	97,96%	86,2%	93,57%	93,57%	89,90%	97,96%	98,20%	98,76%	Dinas Kesehatan
1.6.	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	63%	73%	95%	100%	100%	94%	73%	80,15	85,10	Dinas Kesehatan
1.7.	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15- 49 tahun yang berstatus kawin	65%	69,90%	64,93%	66,27%	69,20%	70,00%	69,90%	72,20%	75,10%	Dinas Kesehatan
1.8.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	100%	75,45%	71,00%	76,00%	75,45%	75,45%	75,45%	76,43%	76,78%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.9.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat	91,63%	72,10%	54,48%	58,89%	67,66%	74,85%	72,10%	73,05%	75,06%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.10.	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	77,40%	55,26%	75,18%	75,96%	55,26%	52,45%	55,26%	75,35%	76,05%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
1.11.	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	100,00%	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					Target 2020	Proyeksi 2021	PD Penanggung Jawab
				2015	2016	2017	2018	2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.12.	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100,00.000 orang	Menurun	• 0 • 0 • 0,0005	• 0 • 0 • 0,02	• 0 • 0 • 0,04	• 0,00001 • 0,00002 • 0,01101	• 0,00001 • 0 • 0,00618	• 0 • 0,00011 • 0,03901	• 0 • 0 • 0	• 0 • 0 • 0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.13.	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	39 Daerah	8 Kecamatan	0 Kecamatan	1 Kecamatan	2 Kecamatan	4 Kecamatan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.14.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Ada	Ada	-	-	-	-	-	Ada	Ada	
1.15.	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Dinas Sosial
2	Tujuan 2 : MenghilangkanKelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan										
2.1.	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	17%	15%	N/A	N/A	15,90%	13,40%	9,80%	9,02%	8,09%	Dinas Kesehatan
2.2.	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Menurun	12,50%	14,40%	14,20%	13,80%	13,60%	13,05%	12,04%	11,80%	Dinas Ketahanan Pangan
2.3.	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	8,50%	8,50%	13,60%	12,70%	9,10%	9,00%	8,50%	9,10%	10,22%	Dinas Ketahanan Pangan
2.4.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun /balita	Menurun	14,00%	N/A	N/A	14,30%	27,90%	18,40%	15,05%	15,00%	Dinas Kesehatan
2.5.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/balita	28%	11%	N/A	N/A	12,35%	10,21%	14,67%	12,05%	11,00%	Dinas Kesehatan
2.6.	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	N/A	3,50%	N/A	N/A	8,06%	6,03%	4,04%	4,02%	3,50%	Dinas Kesehatan
2.7.	Prevalensi anemia pada ibu hamil	28%	15%	-	8,40%	6,25%	14,30%	11,01%	9,44%	8,98%	Dinas Kesehatan
2.8.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	50%	91,29%	-	67,3%	66,00%	74,5%	86,4%	90,00%	92,03%	Dinas Kesehatan
2.9.	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan	Skor PPH = 92,5; Tingkat	89,2 50,32	81,9 48,32	85,2 48,81	87,8 49,29	86,3 49,79	89,2 50,32	90,4 51,19	91,60 51,92	Dinas Ketahanan Pangan

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					Target 2020	Proyeksi 2021	PD Penanggung Jawab
				2015	2016	2017	2018	2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Konsumsi Ikan = 54,5 kg/kapita/tahun									
3	Tujuan 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia										
3.1.	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100 ribu penduduk	306	92,00 k	167,80	106,	106,08	94,40	95,65	94,00	92,00	Dinas Kesehatan
3.2.	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	95%	88,52%	89,70%	86,20%	93,57%	89,90%	88,52%	89,74%	91,33%	Dinas Kesehatan
3.3.	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	85%	97,96%	89,75%	86,93%	95,51%	87,65%	97,96%	98,68%	99,13%	Dinas Kesehatan
3.4.	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	Menurun	9,08	8,54	9,39	12,43	10,86	9,72	9,51	9,08	Dinas Kesehatan
3.5.	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 100,000 kelahiran hidup	Menurun	Menurun	6,29	6,06	7,12	7,65	6,54	6,32	5,94	Dinas Kesehatan
3.6.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 100,000 kelahiran Hidup	24	0,0091	0,0079	0,0081	0,0113	0,0107	0,0091	0,0081	0,0065	Dinas Kesehatan
3.7.	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	95%	Mencapai 80%	Mencapai 80%	Mencapai 80%	Mencapai 80%	Mencapai 80%	Mencapai 80%	Mencapai 80%	Mencapai 80%	Dinas Kesehatan
3.8.	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	<0,5%	0,005	0,003	0,001	0,009	0,005	0,005	0,004	0,003	Dinas Kesehatan
3.9.	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	245	125	370	484	489	592	183	175	150	Dinas Kesehatan
3.10.	Kejadian Malaria per 100,000 orang	Menurun	47	36	34	40	59	52	51	48	Dinas Kesehatan
3.11.	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	300 Kab/Kota	Mencapai Eliminasi Malaria	Tidak Mencapai	Tidak Mencapai	Tidak Mencapai	Mencapai	Tidak Mencapai	Mencapai	Mencapai	Dinas Kesehatan
3.12.	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	-	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Dinas Kesehatan

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					Target 2020	Proyeksi 2021	PD Penanggung Jawab
				2015	2016	2017	2018	2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.13.	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Menurun	15	27	10	29	24	18	16	14	Dinas Kesehatan
3.14.	Jumlah Provinsi/Kab/Kota dengan eliminasi Kusta	34 Provinsi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Kesehatan
3.15.	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)	35 Kab/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Kesehatan
3.16.	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	5,40%	4,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6,00%	5,53%	Dinas Kesehatan
3.17.	Prevalensi tekanan darah tinggi	24,30%	20%	N/A	14,8%	26,1%	18,2%	34,6%	30,00%	26,73%	Dinas Kesehatan
3.18.	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun	15,40%	12,90%	N/A	1,00%	17,20%	8,20%	12,90%	11,05%	9,55%	Dinas Kesehatan
3.19.	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri	Menurun	-	N/A	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
3.20.	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa kesehatan	280 Kab/Kota	4	N/A	-	2	4	6	5	5	Dinas Kesehatan
3.21.	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	0,02%	1,00%	N/A	-	-	-	-	1,50%	1,00%	Dinas Kesehatan
3.22.	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	66%	69,90%	N/A	66,27%	69,20%	70,00%	69,90%	62,00%	64,73%	Dinas Kesehatan
3.23.	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	65%.	69,90 tingkat keberlangsungan	64,93	66,27	76,06	84,36	69,90	70,48	71,22	Dinas Kesehatan
3.24.	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	23,50%	18,77%	N/A	15,44%	17,15%	19,10%	20,88%	19,26%	18,77%	Dinas Kesehatan
3.25.	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 100,000 penduduk	Meningkat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					Target 2020	Proyeksi 2021	PD Penanggung Jawab
				2015	2016	2017	2018	2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.26.	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	95%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
3.27.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Meningkat	90%	N/A	80	80	90	90	90	90	Dinas Kesehatan
3.28.	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Meningkat	1:443	1:9.915	1:11.039	1:7.580	1:7.484	1:443	1:334	1:334	Dinas Kesehatan
Tujuan 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua											
4.1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	91,63%	propinsi	54,84	58,89	67,66	74,85	72,10	73,97	74,09	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.2.	Rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun	8,8 Tahun	8,15 Tahun	7,74	7,75	7,75	7,97	8,15	8,22	8,41	Dinas Pendidikan
4.3.	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) Rasio Angka Partisipasi Kasar Tinggi	Meningkat	93,51 82,73	91,39 77,13	94,50 86,60	95,51 80,07	95,83 81,60	93,51 82,73	94,11 83,13	94,67 84,34	Dinas Pendidikan
4.4.	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	96,10%	98,12%	N/A	98,78%	98,78%	98,81%	98,12%	98,41%	98,88%	Dinas Pendidikan
4.5.	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	Meningkat	• 99% • 92,66	N/A	N/A	N/A	• 98,86 • 91,80	• 98,83 • 92,50	• 98,88 • 92,55	• 98,97 • 92,68	Dinas Pendidikan
Tujuan 5 : Mencapai Kestaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan											
5.1.	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	16 Kebijakan	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.2.	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	70%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.3.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	91,63%	74,75%	53,18%	57,22%	63,56%	70,12%	72,10%	73,30%	74,45%	Dinas Pendidikan
5.4.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	16,60%	11%	8,57	8,57	8,57	8,57	5,71	5,71	5,71	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					Target 2020	Proyeksi 2021	PD Penanggung Jawab
				2015	2016	2017	2018	2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan										
6.1.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	100,00%	75,45%	71,00%	76,00%	75,45%	75,45%	75,45%	75,88%	76,63%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6.2.	Kualitas Air Danau	Meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
6.3.	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6.4.	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi	5,5 Juta Ha	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Kehutanan
7	Tujuan 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua										
7.1.	Rasio elektrifikasi	96,60%	99%	88,11%	89,60%	97,82%	98,02%	98,66%	98,75%	99,00%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
8	Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua										
8.1.	Laju pertumbuhan PDB per kapita (%)	Meningkat	7,65%	7,26%	7,88%	6,79%	6,86%	6,62%	7,30%	7,65%	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
8.2.	PDB per kapita	50 Juta	43,25	29,59	33,57	36,60	40,20	43,25	47,05	51,02	
8.3.	Persentase tenaga kerja formal (dari total pekerja seluruh jenis pekerjaan)	51%	61,75%	60,78%	61,03	64,69	64,89%	61,75	62,00	62,05	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
8.4.	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian (dari total pekerja seluruh jenis pekerjaan)	Meningkat	62,23	60,78%	60,49%	64,68%	64,90%	64,84	64,98%	62,23%	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
8.5.	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	25%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian
8.6.	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Menurun	4,08%	7,871%	N/A	4,784%	3,892%	4,66%	4,32%	4,08%	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
8.7.	Tingkat setengah pengangguran	Menurun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
8.8.	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Meningkat	Meningkat	N/A	22,867	23,131	23,392	23,283	22,114	22,016	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
8.9.	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	8%	Meningkat	0,06%	0,05%	0,05%	0,14%	0,07%	0,06%	0,06%	Dinas Pariwisata

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					Target 2020	Proyeksi 2021	PD Penanggung Jawab
				2015	2016	2017	2018	2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.10.	Jumlah wisatawan mancanegara	20 Juta (skala nasional)	N/A	333 Skala Kabupaten	180 Skala Kabupaten	224 Skala Kabupaten	311 Skala Kabupaten	276 Skala Kabupaten	211 Skala Kabupaten	261 Skala Kabupaten	
8.11.	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Meningkat	2.960	11.117	10.700	12.477	12.573	2.960	2.986	3.025	Dinas Pariwisata
8.12.	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Meningkat	21.584	N/A	18.867	19.967	20.921	21.584	21,782	22.901	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.13.	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian
9	Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi										
9.1.	Panjang jalur kereta api	3.258 Km	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perhubungan
9.2.	Jumlah dermaga penyeberangan	275 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perhubungan
9.3.	Jumlah pelabuhan strategis	24	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
9.4.	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	Meningkat	10%	4,44%	8,97%	7,59%	6,95%	10,94%	11,28%	11,31%	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian
9.5.	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Meningkat	10,49	N/A	8,97	7,59	6,95	10,49	11,28%	11,31%	
9.6.	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	Meningkat	7.161	N/A	6.162	6.367	6.848	7.161	8.201	8.767	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
9.7.	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian
9.8.	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	26%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Lingkungan Hidup
10	Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarneegara										
10.1.	Koefisien Gini	0,36	0,355	0,361	0,359	0,395	0,362	0,352	0,365	0,355	BPS
10.2.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	7-8%	11%	13,89%	14,35%	14,01%	13,36%	12,78%	12,86%	11,09%	BPS
10.3.	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	Meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BPS
10.4.	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	14%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BPS

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					Target 2020	Proyeksi 2021	PD Penanggung Jawab
				2015	2016	2017	2018	2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan										
11.1.	Persentase pengguna modal di perkotaan	32%	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas PMPTSP
11.2.	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	30%	25%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	<30%	<30%	
11.3.	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	80%	70%	76,03%	80,50%	83,75%	83,75%	67,30%	68.91%	69.08%	Dinas Lingkungan Hidup
11.4.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	Ada	Ada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	Ada	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12	Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan										
12.1.	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	150 Juta Ton	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Lingkungan Hidup
12.2.	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	20 Ton/Hari		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Lingkungan Hidup
13	Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya										
13.1.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Ada	Ada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	Ada	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.2.	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Ada	Ada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	Ada	Dinas Lingkungan Hidup
14	Tujuan 14 : Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan										
14.1.	Jumlah nelayan yang terlindungi	Meningkat	644	NA	112	2.389	129	692	745	800	Dinas Perikanan
15	Tujuan 15 : Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati										
15.1.	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Lingkungan Hidup
15.2.	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Lingkungan Hidup

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					Target 2020	Proyeksi 2021	PD Penanggung Jawab
				2015	2016	2017	2018	2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.3.	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Lingkungan Hidup
16	Tujuan 16 : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan										
16.1.	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Meningkat									Badan Pengelola Keuangan Daerah
16.2.	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	75%	BB	C	C	C	CC	CC	CC	B	Sekretariat Daerah
16.3.	Persentase penggunaan E- procurement terhadap belanja pengadaan	80%	100%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
16.4.	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	16,60%	11%	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
17	Tujuan 17 : Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan										
17.1.	Total Pendapatan Pemerintah PDB Menurut sumbernya	Meningkat	Meningkat	7.437,42	8.023,37	8.567,87	9.155,16	9.728,96	9.923,85	1.496,45	Badan Pengelola Keuangan Daerah
17.2.	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan	Meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	Dinas Komunikasa, Informatika, Statistik, dan Persandian
17.3.	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Meningkat	BPS	N/A	N/A	N/A	100,00	93,5	100,00	100,00	BPS
17.4.	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Meningkat	BPS	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	BPS
17.5.	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi rujukan statistik	Meningkat	BPS	N/A	N/A	N/A	6	9	9	9	BPS
17.6.	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Ada		N/A	-	-	-	-			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					Target 2020	Proyeksi 2021	PD Penanggung Jawab
				2015	2016	2017	2018	2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.7.	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	Meningkat	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	BPS
17.8.	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)	Meningkat	BPS	N/A	N/A	N/A	98,89	100,00	100,00	100,00	BPS

Tabel di atas menunjukkan target dan capaian masing-masing indikator TPB yang diperoleh dari BPS maupun perangkat daerah yang menjadi penanggung jawab pencapaian indikator sesuai tugas dan fungsinya. Berdasarkan data yang dimuat tersebut, diketahui bahwa masih terdapat indikator yang belum mencapai target sesuai yang ditetapkan. Hal ini menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan pembangunan dimasa depan, khususnya program/kegiatan yang terkait langsung dengan indikator.

BAB VII

PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan, pemerintah daerah melakukan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, sesuai tahapan dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2019, telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan telah dibahas bersama pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD maupun Musrenbang RKPD. Oleh karena itu RKPD Tahun 2021 merupakan acuan bagi perangkat daerah dan Pemerintah Kabupaten Luwu maupun masyarakat termasuk dunia usaha dalam pembangunan daerah tahun 2021, sehingga dapat tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2021 ini, seluruh Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antarkegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antarprogram, dalam satu instansi dan antarinstansi, dan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari para pelaku pembangunan dalam melaksanakan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2021, sehingga diharapkan mampu mendukung upaya menuju visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan

peraturan daerah yaitu '**Kabupaten Luwu yang Maju, Sejahtera dan Mandiri dalam Nuansa Religi**'. Meskipun dalam Proses pencapaian visi masih banyak faktor yang menjadi permasalahan, antara lain faktor SDA, SDM atau dari faktor lingkungan, seperti yang terjadi pada saat ini yaitu permasalahan Pandemi *Covid-19* yang telah ditetapkan menjadi Bencana non alam nasional. *Covid-19* telah merenggut banyak korban baik secara fisik, material, dan menimbulkan dampak berkelanjutan pada perekonomian, terlebih lagi *Covid-19* dapat merubah tatanan kehidupan sosial masyarakat. Sehingga jika dilihat dari perspektif perencanaan, pencegahan dan pemulihan dampak *Covid-19* menjadi upaya bagi suatu daerah untuk berkompetisi dalam melakukan penguatan birokrasi, pemulihan perekonomian daerah dan stabilisasi tatanan sosial masyarakat secara cepat dan tepat sasaran.

Dalam RKPD ini menguraikan: (1) Prioritas pembangunan yang akan menjadi titik berat pembangunan tahun 2021 dengan sasaran program-program dan kegiatan serta indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi, (2) Kerangka ekonomi makro dan kebijakan keuangan daerah; (3) Kebijakan pembangunan pada tahun 2021 dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan termasuk perkiraan pagu indikatif yang diperlukan untuk pendanaannya. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap implementasi RKPD ini. Dokumen perencanaan bukanlah sekadar sekumpulan niat baik, tetapi diimplementasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belopa, 24 Juli 2020

BUPATI LUWU,

TTD

BASMIN MATTAYANG

Tabel 5.1.
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2021

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
		Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
1									
1	01								
1	01	01				373.985.251.037	391.717.393.238		401.702.497.593
1	01	01	01			269.425.778.577	275.541.111.951	100	285.128.161.449
1	01	01	01	2.01		17.600.000	42.343.200	100	42.343.200
1	01	01	01	2.01	01		6.040.000	2	6.040.000
1	01	01	01	2.01	02	17.600.000	4.464.200		4.464.200
1	01	01	01	2.01	03		9.850.000	4	9.850.000
1	01	01	01	2.01	04		12.909.000	6	12.909.000
1	01	01	01	2.01	05		9.080.000	1	9.080.000
1	01	01	01	2.02		267.881.618.577	273.809.649.951	100	283.392.499.449
1	01	01	01	2.02	01	267.859.112.327	273.795.699.951	2.683	283.378.549.449
1	01	01	01	2.02	05		2.000.000	3	2.000.000
1	01	01	01	2.02	07		6.950.000	14	6.950.000
1	01	01	01	2.02	09	22.506.250	5.000.000	1	5.000.000
1	01	01	01	2.03		1.526.560.000	1.639.118.800	100	1.643.318.800
1	01	01	01	2.03	01	12.500.000	12.500.000	0	12.500.000
1	01	01	01	2.03	02	106.400.000	107.464.000	12	107.464.000
1	01	01	01	2.03	03				
1	01	01	01	2.03	06	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
1	01	01	01	2.03	07	584.000.000	847.080.000	864	847.080.000
1	01	01	01	2.03	08	27.000.000	27.000.000	0	27.000.000
1	01	01	01	2.03	09				
1	01	01	01	2.03	10	45.530.000	38.030.000	25	38.030.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
1	01	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3	Jenis		13.000.000	13.000.000	3	13.000.000
1	01	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan		jenis					
1	01	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		unit		95.480.000	76.044.800	0	76.044.800
1	01	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan		jenis					
1	01	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan		jenis		30.000.000	30.000.000	0	30.000.000
1	01	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan		jenis					
1	01	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3	jenis		30.000.000	30.000.000	3	30.000.000
1	01	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	42	OK		300.000.000	210.000.000	42	214.200.000
							Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	120	OK		30.000.000	30.000.000	120	30.000.000
1	01	01	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit					
1	01	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit					
1	01	01	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
1	01	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		unit					
1	01	01	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/dinas yang diadakan		jenis					
1	01	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan		jenis					
1	01	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan		unit					
1	01	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	1	jenis		47.650.000	50.000.000	1	50.000.000
1	01	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit					
1	01	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	486	unit		35.000.000	65.000.000	486	65.000.000
1	01	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set				0	-
1	01	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	35	unit/set		10.000.000	45.000.000	35	45.000.000
1	01	01	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
1	01	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	1	unit		140.000.000	38.000.000		38.000.000
1	01	01	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi dedang/berat		unit					
1	01	01	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
1	01	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		-	50.000.000	100	50.000.000
1	01	01	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
1	01	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		stell/ pasang					
1	01	01	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan		stell/ pasang					
1	01	01	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
1	01	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		stell/ pasang					

[illegible]

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
		Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
		Mushallah Sekolah	3	unit	-				
		Pagar sekolah	49	sekolah	8.872.600.000				
			400	meter					
			120	meter					
			200	meter					
			400	meter					
			120	meter					
			200	meter					
			400	meter					
			200	meter					
			200	meter					
			150	meter					
			150	meter					
			150	meter					
			200	meter					
			478	meter					
			200	meter					
			150	meter					
			70	meter					
			70	meter					
			50	meter					
			45	meter					
			80	meter					
			200	meter					
			200	meter					
			150	meter					
			120	meter					
			200	meter					
			150	meter					
			50	meter					
			50	meter					
			200	meter					
			50	meter					
			150	meter					
			150	meter					
			100	meter					
			100	meter					
			20	meter					
			70	meter					
			200	meter					
			150	meter					
			71	meter					
			250	meter					
			150	meter					
			150	meter					
			133	meter					
			170	meter					
			232	meter					
			157	meter					
			210	meter					

KODE							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
								Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)							(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
1	01	01	02	2.01	07		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah yang dibangun	2	unit	DAK, DAU		360.000.000	2	360.000.000
1	01	01	02	2.01	08		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi	52	ruang kelas		4.752.000.000	2.988.800.000	52	2.988.800.000
								2	ruang						
								1	ruang						
								2	ruang						
								1	ruang						
								2	ruang						
								1	ruang						
								1	ruang						
								2	ruang						
								9	ruang						
								3	ruang						
								3	ruang						
								3	ruang						
								3	ruang						
								6	ruang						
								3	ruang						
								3	ruang						
								7	ruang						
1	01	01	02	2.01	09		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang direhab		Ruang	DAK	3.751.200.000	3.751.200.000	0	3.751.200.000
1	01	01	02	2.01	10		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang direhab		Ruang	DAK				
1	01	01	02	2.01	11		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang direhab	2	sekolah		3.903.444.980	230.000.000	2	230.000.000
1	01	01	02	2.01	12		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi	132	unit	DAK	256.000.000	2.730.500.000		2.730.500.000
							Jamban Sekolah		3	unit	96.000.000				
							Penimbunan Halaman sekolah		4.790	m2	2.634.500.000				
1	01	01	02	2.01	13		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang direhab		unit					
1	01	01	02	2.01	14		Pengadaan Mebeluer Sekolah	Jumlah sekolah yang menerima Mebeluer Sekolah	123	sekolah		1.448.800.000	1.448.800.000	123	1.448.800.000
1	01	01	02	2.01	15		Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah sekolah yang menerima Alat Rumah Tangga Sekolah		sekolah					
1	01	01	02	2.01	16		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah sekolah yang menerima Perlengkapan Sekolah	33	sekolah		1.980.000.000	1.980.000.000	33	1.980.000.000
1	01	01	02	2.01	17		Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah sekolah yang menerima Perlengkapan Siswa	49	sekolah	DAK	2.450.000.000	2.450.000.000	49	2.450.000.000
							Jumlah siswa yang menerima baju seragam sekolah		6.302	orang	DAU	1.275.710.000	750.000.000	6.302	750.000.000
1	01	01	02	2.01	18		Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruangan sekolah yang dipelihara		unit					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
1	01	01	02	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dipelihara		unit					
1	01	01	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang dipelihara		unit					
1	01	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil	37.267	orang	DAK	30.045.600.000	31.557.695.600	37.267	31.557.695.600
1	01	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah sekolah yang menerima Alat Praktik dan Peraga Siswa	95	sekolah		7.576.954.649	7.576.954.649	95	7.576.954.649
1	01	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah sekolah yang menyelenggarakan proses belajar mengajar dan ujian	273	sekolah			149.781.875	273	149.781.875
1	01	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar		dokumen		82.000.000	82.000.000	0	82.000.000
1	01	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan Olimpiade MIPA SD/MI		orang		20.000.000	32.433.750	0	32.433.750
1	01	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang disediakan		orang					
1	01	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang difasilitasi dalam pengembangan karir		orang		15.000.000	15.000.000	0	15.000.000
1	01	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah dokumen data PIB/KIB yang dikelola dan divalidasi	2	dokumen		35.000.000	21.053.000	2	21.053.000
1	01	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Ruang Kelas SMP/MTs Dalam Kondisi Baik				35.566.062.288	43.354.722.413		43.354.722.413
							Angka Kelulusan SMP/MTs	100	%					
							Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	100	%					
1	01	01	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah USB yang dibangun	1	sekolah	DAK		3.700.000.000	1	3.700.000.000
1	01	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas yang ditambah	6	Ruang	DAK		1.600.000.000	6	1.600.000.000
								1	Ruang	DAK				
								3	Ruang	DAK				
								2	Ruang	DAK				
1	01	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru yang dibangun	2	unit	DAK		500.000.000	2	500.000.000
								1	unit	DAK				
								1	unit	DAK				
1	01	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang UKS yang dibangun	2	unit	DAK		125.000.000	2	125.000.000
1	01	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang dibangun	4	unit	DAK	1.212.000.000	1.212.000.000	4	1.212.000.000
1	01	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah laboratorium yang dibangun	8	unit	DAK	2.530.640.000	2.530.640.000	8	2.530.640.000
1	01	01	02	2.02	07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah ruang serba guna/aula yang dibangun		unit					
1	01	01	02	2.02	08	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah asrama sekolah yang dibangun		unit					
1	01	01	02	2.02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah rumah dinas yang dibangun		unit	DAK			0	-
								1	unit					
								1	unit					
								1	unit					
1	01	01	02	2.02	10	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah fasilitas parkir sekolah yang dibangun		unit					
1	01	01	02	2.02	11	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin sekolah yang dibangun		unit					
1	01	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah yang dibangun Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	14	Sekolah		1.311.240.000	1.311.240.000	14	1.311.240.000
							Pagar	2	unit		355.000.000			
							Pagar Sekolah	12	Sekolah		4.727.800.000			
								700	meter					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
								300	meter					
								200	meter					
								200	meter					
								200	meter					
								150	meter					
								648	meter					
								450	meter					
								250	meter					
								600	meter					
								250	meter					
								350	meter					
1	01	01	02	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah gedung sekolah yang direhab		unit					
1	01	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang keas sekolah yang direhabilitasi	7	Ruang	DAK	3.871.515.600	3.871.515.600	7	3.871.515.600
								1	Ruang					
								3	Ruang					
								2	Ruang					
								1	Ruang					
1	01	01	02	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang direhab	5	Ruang	DAK	573.440.000	573.440.000	5	573.440.000
								1	Ruang	DAK				
1	01	01	02	2.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang direhab		unit					
1	01	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang direhab	4	unit	DAK	483.000.000	483.000.000	4	483.000.000
1	01	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang direhab	2	unit	DAK	251.550.000	251.550.000	2	251.550.000
1	01	01	02	2.02	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serbayang direhab		unit					
1	01	01	02	2.02	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Sedang/Berat Asrama	Jumlah Asramayang direhab		unit					
1	01	01	02	2.02	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang direhab		unit					
1	01	01	02	2.02	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang direhab		unit					
1	01	01	02	2.02	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang direhab		unit					
1	01	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi	13	unit		522.990.000	522.990.000	13	522.990.000
							Jamban sekolah	4	unit	440.000.000				
							Mushallah sekolah	1	unit	175.000.000				
							Penimbunan halaman	3	sekolah	3.030.500.000				
								5.000	m2					
								260	m2					
								250	m2					
1	01	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Jumlah sekolah yang menerima Mebeluer	38	sekolah		1.291.118.400	1.291.118.400	38	1.291.118.400
1	01	01	02	2.02	26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah sekolah yang menerima Alat Rumah Tangga Sekolah		sekolah					
1	01	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah sekolah yang menerima Perlengkapan Sekolah		sekolah					
1	01	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Siswa yang menerima perlengkapan Siswa	5.372	orang	DAU	1.245.730.000	750.000.000	5.372	750.000.000
1	01	01	02	2.02	29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung sekolah yang dipelihara		unit					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
1	01	01	02	2.02	30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dipelihara		unit					
1	01	01	02	2.02	31	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang dipelihara		unit					
1	01	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang disediakan biaya personil	16.532	orang	DAK	16.621.000.000	17.629.271.725	16.532	17.629.271.725
1	01	01	02	2.02	33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks		orang					
1	01	01	02	2.02	34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Belajar		orang					
1	01	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah sekolah yang menerima Alat Praktik dan Peraga Siswa	104	sekolah	DAK	5.497.138.288	6.848.256.688	104	6.848.256.688
1	01	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar dan Ujian		orang		35.000.000	35.000.000	0	35.000.000
1	01	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dokumen Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		dokumen					
1	01	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang terlibat dalam Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	50	orang		25.000.000	25.000.000	50	25.000.000
1	01	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang disediakan		orang					
1	01	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang difasilitasi dalam pengembangan karir	20	orang		94.700.000	94.700.000	20	94.700.000
1	01	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang menerapkan Kelembagaan dan Manajemen yang baik		sekolah					-
1	01	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Anak Usia Dini Yang Mengikuti PAUD	61,55	%		2.008.760.543	4.913.400.000		5.361.454.857
1	01	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah RKB yang dibangun	5	unit	DAK	584.448.674	1.000.000.000	5	1.000.000.000
1	01	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah PAUD yang dibangun sarana, prasarana dan utilitasnya	5	lembaga	DAK	309.189.721	400.000.000	5	400.000.000
1	01	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang direhab	3	unit	DAK	448.054.857		3	448.054.857
1	01	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang direhab		unit					
1	01	01	02	2.03	05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dipelihara		unit					
1	01	01	02	2.03	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dipelihara		unit					
1	01	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebeluer PAUD	Jumlah lembaga PAUD yang menerima mebeluer	5	lembaga	DAK	134.817.440	75.000.000	5	75.000.000
1	01	01	02	2.03	08	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah PAUD yang menerima Pengadaan Alat Rumah Tangga		PAUD					
1	01	01	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah PAUD yang menerima pengadaan perlengkapan	5	PAUD	DAK	52.249.850	287.067.290	5	287.067.290
1	01	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Siswa PAUD yang menerima Pengadaan Perlengkapan Siswa		orang					
1	01	01	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang menerima biaya personil		orang	Hibah PAUD (DAK)		2.521.332.710		2.521.332.710
1	01	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah lembaga PAUD yang menerima alat praktik dan peraga siswa	10	lembaga	DAK	100.000.000	250.000.000	10	250.000.000
1	01	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah PAUD yang melaksanakan proses belajar mengajar		PAUD					
1	01	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Dokumen Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD		dokumen					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
													Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	Tolok Ukur	Target	(8)			(9)	(10)	(11)
1	01	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD yang disediakan		orang					
1	01	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD yang difasilitasi dalam Pengembangan Karir		orang					
1	01	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang dibina	226	unit		380.000.000	380.000.000	226	380.000.000
1	01	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Yang Dibina		lembaga		4.282.940.000	4.342.940.000		4.342.940.000
1	01	01	02	2.04	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang dibangun	2	unit		306.850.000	306.850.000	2	306.850.000
1	01	01	02	2.04	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang dibangun	2	unit		425.199.000	425.199.000	2	425.199.000
1	01	01	02	2.04	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang direhab		unit					
1	01	01	02	2.04	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang direhab		unit					
1	01	01	02	2.04	05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dipelihara		unit					
1	01	01	02	2.04	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang dipelihara		unit					
1	01	01	02	2.04	07	Pengadaan Mebeluer Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang menerima Pengadaan Mebeluer	2	lembaga		54.150.000	54.150.000	2	54.150.000
1	01	01	02	2.04	08	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang menerima Pengadaan Alat Rumah Tangga		lembaga					
1	01	01	02	2.04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang menerima Pengadaan Perlengkapan		lembaga				0	-
1	01	01	02	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga (PKB, PKBM) yang disediakan biaya personil peserta didik	8	lembaga	DAK Non Fisik	3.040.700.000	3.040.700.000	8	3.040.700.000
1	01	01	02	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Siswa Nonformal/Kesetaraan yang menerima Pengadaan Alat Praktik dan Peraga	2	orang		361.041.000	361.041.000	2	361.041.000
1	01	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah buta aksara yang mengikuti proses belajar nonformal	100	orang			65.000.000	100	65.000.000
1	01	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		dokumen					
1	01	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang disediakan		orang					
1	01	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang difasilitasi dalam Pengembangan Karir		orang					
1	01	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Kursus yang terstandar	5	lembaga		55.000.000	90.000.000	5	90.000.000
							Jumlah peserta lomba tutor KF dan Warga Belajar	40	orang		40.000.000		40	-

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
1	01	01	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah kurikulum muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diterapkan		kurikulum		-	50.000.000		-
1	01	01	03	2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar Yang Telah ditetapkan		kurikulum		-	50.000.000		-
1	01	01	03	2.01	01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dokumen yang disusun		dokumen					
1	01	01	03	2.01	02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dokumen yang disusun	1	dokumen			50.000.000		
1	01	01	03	2.01	03 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah eksemplar Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang disediakan		eksemplar					
1	01	01	03	2.01	04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah peserta pelatihan		orang					
1	01	01	03	2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah ditetapkan		kurikulum		-	-		-
1	01	01	03	2.02	01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dokumen yang disusun		dokumen					
1	01	01	03	2.02	02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dokumen yang disusun		dokumen					
1	01	01	03	2.02	03 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah eksemplar Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang disediakan		eksemplar					
1	01	01	04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV	91,46	%		25.000.000	55.000.000		55.000.000
1	01	01	04	2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar		%		25.000.000	55.000.000		55.000.000
1	01	01	04	2.01	01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3	dokumen		25.000.000	25.000.000	3	25.000.000
1	01	01	04	2.01	02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	dokumen			30.000.000	1	30.000.000
1	01	01	05		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase lembaga pendidikan yang memiliki perizinan		%		-	-		-
1	01	01	05	2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase permohonan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diselesaikan prosesnya		%		-	-		-
1	01	01	05	2.01	01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen Penilaian Kelayakan Usulan		dokumen				0	-
1	01	01	05	2.01	02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan Perizinan		dokumen				0	-
1	01	01	05	2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase permohonan izin pendidikan PAUD dan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diselesaikan prosesnya				-	-		-

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
1	01	01	05	2.02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen Penilaian Kelayakan Usulan		dokumen				0	-
1	01	01	05	2.02	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan Perizinan		dokumen				0	-
1	01	01	05	2.02	03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah PAUD dan Pendidikan Nonformal yang dibina		PAUD/ lembaga				0	-
1	01	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Tingkat pemahaman masyarakat terhadap bahasa dan sastra daerah		%		-	-		-
1	01	01	06	2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten	Jumlah bahasa dan sastra luwu yang dibina, dikembangkan, dan dilindungi		Bahasa dan sastra		-	-		-
1	01	01	06	2.01	01	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten	Dokumen yang disusun		dokumen				0	-
							Jumlah eksemplar kamus yang dicetak		eksemplar				0	-
1	01	01	06	2.01	02	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten	Dokumen hasil Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah		dokumen				0	-
1	01	01	06	2.01	03	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten	Jumlah eksemplar Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten		eksemplar				0	-
1	01	01	06	2.01	04	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah yang diberikan penghargaan		orang				0	-
1	01	01	06	2.01	05	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi yang disediakan dan didistribusikan		eksemplar				0	-
1	01	01	06	2.01	06	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten	Jumlah sekolah yang dilakukan Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah		sekolah				0	-
1	01	01	06	2.01	07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah yang disusun		modul				0	-
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						-		
1	02	01				Dinas Kesehatan					166.812.191.843	165.214.823.072		167.312.046.771
1	02	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		53.684.360.905	60.569.606.522	100	62.666.830.221
1	02	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		157.400.000	157.400.000	100	157.400.000
1	02	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		10.000.000	2	10.000.000
1	02	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan	27	Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website		35.000.000	27	35.000.000
1	02	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		35.000.000	4	35.000.000
1	02	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)	132.400.000	52.400.000	6	52.400.000
1	02	01	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya	25.000.000	25.000.000	1	25.000.000
							Laporan pelaksanaan Akselerasi Capaian SPM Kesehatan (DAK Non Fisik)	1	laporan	25.000.000				
1	02	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00			51.378.702.915	58.368.648.532	100	60.411.131.231

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
1	02	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	9.924	OB		51.356.196.665	58.356.648.532	9.924	60.399.131.231
1	02	01	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			2.000.000	3	2.000.000
1	02	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			5.000.000	14	5.000.000
1	02	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan		22.506.250	5.000.000	1	5.000.000
1	02	01	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		2.027.857.990	1.941.157.990	100	1.925.898.990
							Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
1	02	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	3.820	Surat		18.550.000	18.550.000	3.820	18.550.000
1	02	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		106.000.000	106.000.000	12	106.000.000
1	02	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB					
1	02	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	50	unit		125.000.000	125.000.000	50	125.000.000
1	02	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	552	OB		534.460.000	534.460.000	552	534.460.000
1	02	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB		39.200.000	39.200.000	0	39.200.000
1	02	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan		unit/ paket					
1	02	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	25	Jenis		21.024.520	21.024.520	25	21.024.520
1	02	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3	Jenis		6.000.000	6.000.000	3	6.000.000
1	02	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan		jenis					
1	02	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10	unit		96.000.000	96.000.000	10	96.000.000
1	02	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan		jenis					
1	02	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2	jenis		45.000.000	45.000.000	2	45.000.000
1	02	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan		jenis					
1	02	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	5	jenis		6.840.000	6.840.000	5	6.840.000
1	02	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	50	OK		356.500.000	249.550.000	50	254.541.000
1	02	01	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	209	OK		52.283.470	52.283.470	209	52.283.470
1	02	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit					
1	02	01	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit					
1	02	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
1	02	01	01	2.03	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		unit					
1	02	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
1	02	01	01	2.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		jenis					
1	02	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan	2	unit			20.250.000		
1	02	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah meubeleur yang diadakan	5	jenis		496.000.000	496.000.000	5	496.000.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
1	02	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit					
1	02	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	50	unit		125.000.000	125.000.000	50	125.000.000
1	02	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
1	02	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
1	02	01	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
1	02	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit					
1	02	01	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
1	02	01	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
1	02	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100	%		120.400.000	102.400.000	100	172.400.000
1	02	01	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
1	02	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	105	stell/ pasang				105	35.000.000
1	02	01	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan		stell/ pasang					
1	02	01	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
1	02	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	105	stell/ pasang		35.000.000		105	35.000.000
1	02	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	10	orang		63.000.000	63.000.000		63.000.000
1	02	01	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	60	orang		22.400.000	19.700.000		19.700.000
1	02	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	60	orang			19.700.000	60	19.700.000
1	02	01	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan.	85,00	%		111.838.804.938	103.382.107.990		103.382.107.990
							Cakupan Persalinan yang ditolong Tenaga Kesehatan	85,00	%					
							Cakupan menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular	22	Kecamatan					
							Indeks Kepuasan Masyarakat	80,00						
1	02	01	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya dalam kondisi baik	85	%		28.685.786.530	23.776.781.530		23.776.781.530
1	02	01	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah gedung yang dibangun		unit					
1	02	01	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang dibangun		unit					
1	02	01	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pustu/Poskesdes yang dibangun	13	unit		1.188.250.000	1.188.250.000		1.188.250.000
								1	unit					
								1	unit					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
								3	unit					
								2	unit					
								1	unit					
								1	unit					
								1	unit					
								1	unit					
								1	unit					
								1	unit					
1	02	01	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun	5	unit	DAK 4 unit dan DAU 1 unit	1.291.998.000	1.420.000.000	5	1.420.000.000
								1		250.000.000				
								1		250.000.000				
								1		250.000.000				
								1		250.000.000				
1	02	01	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah unit rumah sakit yang dibangun		unit					
1	02	01	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dikembangkan	11	Puskesmas		800.000.000	800.000.000	11	800.000.000
							Penambahan Ruangan puskesmas (Ruang Nifas, Perawatan dan ruang kerja)	1		500.000.000				
							Pembangunan Gedung Perawatan	1		500.000.000				
							Penambahan Ruangan Kerja Puskesmas	1		400.000.000				
							Pembangunan tambahan Ruang Tindakan Perawatan Puskesmas	1		200.000.000				
							Pembangunan Pagar dan Paving Blok Poskesdes	1		150.000.000				
							Pembangunan Pagar Sisi Belakang Puskesmas Bajo	1		150.000.000				
							Pembangunan Pagar Puskesmas	1		200.000.000				
							Pembangunan Pagar Puskesmas	1		150.000.000				
							Pembangunan Ruang Parkir dan Paving Blok Halaman Puskesmas	1		150.000.000				
							Penataan Halaman Puskesmas (Paving Blok)	1		250.000.000				
							Pembangunan Pagar keiling	1		300.000.000				
1	02	01	02	2.01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah unit fasilitas kesehatan yang dibangun	1	unit	DAK		1.480.000.000	1	1.480.000.000
1	02	01	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah unit rumah sakit yang direhabilitasi dan dipelihara		unit					
1	02	01	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi dan dipelihara	3	Unit		2.600.000.000	2.600.000.000	3	2.600.000.000
							Rehabilitasi Gedung Rawat Inap	1		1.000.000.000				
							Rehab Ruang Persalinan, poli umum, UGD, Ruang Perawatan	1		500.000.000				
							Rehabilitasi Gedung UGD	1		300.000.000				
1	02	01	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pustu yang direhab	22	unit		1.551.500.000	1.800.000.000	22	1.800.000.000

[illegible]

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
							Pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)						0	-
										500.000.000			0	-
										500.000.000			0	-
							Kegiatan Penunjang DAK Fisik					195.100.000	0	195.100.000
							Pengadaan Sanitarian KIT			2.000.000.000			0	-
							Biaya Umum Kegiatan Penunjang DAK Fisik			234.269.360			0	-
1	02	01	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Meubelir Poskesdes	5	unit			200.000.000	5	200.000.000
1	02	01	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Paket/unit Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan	3	Paket/ unit		8.028.306.160	5.028.306.160	3	5.028.306.160
							Pengadaan Alat kesehatan (DAK)						0	-
							Pengadaan Alat Kesehatan	1		1.000.000.000			1	-
							Pengadaan Alkes Set Pemeriksaan Umum	1		1.000.000.000			1	-
							Pengadaan Set Tindakan Medis	1		250.000.000			1	-
							Pengadaan Set Pemeriksaan Ibu	1		250.000.000			1	-
							Pengadaan UGD Set	1		250.000.000			1	-
							Pengadaan Set Pemeriksaan kesehatan anak	1		250.000.000			1	-
							Pengadaan Set Pelayanan KB	1		250.000.000			1	-
							Pengadaan Set Imunisasi	2		500.000.000			2	-
							Pengadaan Set gigi dan mulut	1		250.000.000			1	-
							Pengadaan Set Promosi Kesehatan	1		250.000.000			1	-
							Pengadaan Set ruang Persalinan	2		500.000.000			2	-
							Pengadaan Set ruangan kesehatan gigi dan mulut	2		500.000.000			2	-
							Pengadaan Set Laboratorium	2		500.000.000			2	-
							Pengadaan Set Ruang Rawat Inap	2		500.000.000			2	-
							Pengadaan Set Asi	2		500.000.000			2	-
							Pengadaan Set Farmasi	2		500.000.000			2	-
							Pengadaan sarana kesehatan UGD set, kit keperawatan	1		280.780.360			1	-
							Pengadaan Set Puskesmas keliling	1		250.000.000			1	-
							Pengadaan Alat Kesehatan	1		500.000.000			1	-
							Pengadaan Alkes Dental Chair (Gigi Mulut)	1		200.000.000			1	-
							Pengadaan Alkes	1		750.275.650			1	-
							Pengadaan Alat Kesehatan (Pajak Rokok)			2.310.943.990			0	-
							Pengadaan Alat Penanggulangan Stunting			4.000.000.000			0	-
1	02	01	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alat kalibrasi yang diadakan		unit				0	-
							Jumlah alat kalibrasi yang dipelihara		unit				0	-
1	02	01	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah puskesmas yang didistribusikan obat dan perbekalan kesehatan	22	Puskesmas		3.655.856.010	3.655.856.010	22	3.655.856.010
1	02	01	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Pengadaan Bahan Habis Pakai TB	1	paket		100.000.000	100.000.000	1	100.000.000
1	02	01	02	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah unit Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dipelihara		unit				0	-
1	02	01	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dipelihara		unit				0	-

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
													Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)	(11)
1	02	01	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah unit Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dipelihara	300	unit		75.000.000	75.000.000	300	75.000.000
1	02	01	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	Cakupan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan yang disediakan pelayanan	100	%		82.832.918.408	79.285.226.430		79.285.226.430
1	02	01	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang diberikan Pelayanan Kesehatan	7.508	orang		105.800.000	19.630.000	7.508	19.630.000
1	02	01	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang diberikan Pelayanan Kesehatan	7.166	orang		2.508.791.000	2.434.791.000	7.166	2.434.791.000
1	02	01	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang diberikan Pelayanan Kesehatan	7.543	orang			29.100.000	7.543	29.100.000
1	02	01	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang diberikan Pelayanan Kesehatan	29.841	orang			44.900.000	29.841	44.900.000
1	02	01	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak Usia Pendidikan Dasar yang diberikan Pelayanan Kesehatan	200	anak		35.000.000	34.600.000	200	34.600.000
1	02	01	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang diberikan Pelayanan Kesehatan		orang				0	-
1	02	01	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Peningkatan Pelayanan Usia Lanjut (USILA)	27.281	orang		23.900.000	23.900.000	27.281	23.900.000
1	02	01	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang diberikan Pelayanan Kesehatan		orang				0	-
1	02	01	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang diberikan Pelayanan Kesehatan		orang				0	-
1	02	01	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat yang diberikan Pelayanan Kesehatan		orang				0	-
1	02	01	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang diberikan Pelayanan Kesehatan		orang				0	-
1	02	01	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV yang diberikan Pelayanan Kesehatan	7.090	orang		37.250.000	37.250.060	7.090	37.250.060
1	02	01	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang diberikan pelayanan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		orang				0	-
1	02	01	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana yang diberikan Pelayanan Kesehatan		orang				0	-
1	02	01	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti Orientasi Pelaksanaan Gizi masyarakat	22	kelompok		36.350.000	400.000.000	22	400.000.000
							Pendampingan dalam Pemanfaatan Paket Intervensi Gizi			200.000.000			0	-
							Penyediaan Intervensi Gizi pada Ibu Hamil dalam rangka Penanggulangan Stunting			100.000.000			0	-
							Penyediaan Intervensi Micronutrient pada anak umur 6-26 bulan dalam rangka penanggulangan stunting			100.000.000			0	-
1	02	01	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Laporan pelaksanaan kesehatan kerja dan kesehatan olahraga	1	laporan		38.300.000	28.349.580	1	28.349.580
1	02	01	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kelompok masyarakat yang diberikan pelayanan kesehatan lingkungan	22	kelompok		120.500.000	120.500.330	22	120.500.330
1	02	01	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah kelompok masyarakat yang diberikan Pelayanan Promosi Kesehatan		kelompok				0	-
1	02	01	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah kelompok masyarakat yang diberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	4	kelompok		22.800.000	22.799.820	4	22.799.820
1	02	01	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kelompok masyarakat yang diberikan Surveillance Kesehatan	22	kelompok		149.450.000	149.450.000	22	149.450.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
1	02	01	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang diberikan pelayanan Kesehatan		orang				0	-
1	02	01	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah kelompok masyarakat yang diberikan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	22	kelompok		67.070.000	67.070.080	22	67.070.080
1	02	01	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah masyarakat yang diberikan pelayanan kesehatan khusus	420	orang	stunting, donor darah, kesehatan Mata, Jiwa dan Anak di daerah terpencil	459.449.000	190.318.700	420	190.318.700
1	02	01	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah kelompok masyarakat yang diberikan pelayanan dalam Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		kelompok				0	-
1	02	01	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kelompok masyarakat yang diberikan pelayanan kesehatan terdapaat penyakit menular dan tidak menular	22	kelompok	TB & Kusta, malaria, (Hepatitis), rabies, DBD, filarisis dan kecacingan	1.050.530.000	378.376.500	22	378.376.500
1	02	01	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat	22	Puskesmas		55.352.898.408	52.479.360.000	22	52.479.360.000
							Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)			80.300.000			0	-
							Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional PKM Larompong Selatan			1.077.251.028			0	-
							Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional PKM Larompong			1.230.153.400			0	-
							Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional PKM Suli			1.008.000.000			0	-
							Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional PKM Bajo Barat			1.048.870.163			0	-
							Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional PKM Ponrang			1.585.314.150			0	-
							Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional PKM Bupon			1.658.547.407			0	-
							Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional PKM Bua			1.867.600.000			0	-
							Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional PKM Walenrang			737.039.474			0	-
							Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional PKM Lamasi			1.171.178.414			0	-
							Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional PKM Lamasi Timur			733.845.541			0	-
							Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional PKM Ponrang Selatan			1.333.321.200			0	-
							Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional PKM Bajo			960.655.596			0	-
							Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional PKM Suli Barat			1.204.990.550			0	-
							Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional PKM Kamanre			614.135.976			0	-
							Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional PKM Belopa Utara			677.216.305			0	-
							Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional PKM Belopa			636.492.899			0	-
							Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional PKM Walenrang Utara			1.022.398.742			0	-
							Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional PKM Walenrang Barat			1.263.840.000			0	-

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
							Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional PKM Walenrang Timur			999.000.000			0	-
							Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional PKM Bastem			982.000.000			0	-
							Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional PKM Latimojong			910.943.725			0	-
							Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional PKM Bastem Utara			1.123.418.400			0	-
							Peningkatan pelayanan BPJS			31.088.691.438			0	-
							Dukungan Manajemen BOK dan Jampersal (DAU)			212.600.000			0	-
							Dukungan Manajemen Pelaksanaan BOK dan Jampersal (DAK Non Fisik)			125.094.000			0	-
1	02	01	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah orang yang dilakukan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah		orang				0	-
1	02	01	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional		kali				0	-
1	02	01	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten Sehat	Jumlah unsur kelayakan Kabupaten Sehat yang ditingkatkan	7	tatanan		421.700.000	421.700.000	7	421.700.000
1	02	01	02	2.02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan		unit				0	-
1	02	01	02	2.02	31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Dokumen hasil Penelitian Kesehatan		dokumen				0	-
1	02	01	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah rumah sakit yang disediakan biaya Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Rumah Sakit				0	-
1	02	01	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang disediakan biaya Operasional Pelayanan Puskesmas	22	Puskesmas	Jasa Pelayanan Medis, Operasional Kesehatan (BOK DAK Non Fisik)	21.411.126.000	21.411.126.000	22	21.411.126.000
1	02	01	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang disediakan biaya operasional		Faskes				0	-
1	02	01	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan akreditasi	9	Faskes		992.004.000	992.004.360	9	992.004.360
1	02	01	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah kejadian yang diinvestigasi		kejadian				0	-
1	02	01	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah kegiatan yang dilakukan dalam rangka Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		kegiatan				0	-
1	02	01	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah sistem informasi kesehatan yang terintegrasi		sistem informasi		222.200.000	222.200.000		222.200.000
1	02	01	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah aplikasi yang digunakan dalam rangka Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	2	aplikasi		192.200.000	192.200.000	2	192.200.000
1	02	01	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah sistem informasi yang digunakan dalam rangka Informasi Kesehatan	1	sistem informasi		30.000.000	30.000.000	1	30.000.000
1	02	01	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang diadakan		unit				0	-
1	02	01	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase permohonan izin rumah sakit kelas C dan D yang diselesaikan proses penerbitan izinnya		%		97.900.000	97.900.030		97.900.030
							Persentase permohonan izin fasilitas pelayanan kesehatan yang diselesaikan proses izinnya		%					
1	02	01	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	Laporan hasil pengendalian dan pengawasan		laporan				0	-
1	02	01	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah unit kerja rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang ditingkatkan tata kelolanya		unit kerja				0	-

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
1	02	01	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Laporan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan		laporan		97.900.000	97.900.030	0	97.900.030
1	02	01	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah masyarakat yang diberikan pelayanan kesehatan rujukan		orang				0	-
1	02	01	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kualitas sesuai standar		%		312.450.000	286.532.560		286.532.560
1	02	01	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten	Jumlah Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten yang telah diberikan izin		izin praktek		-	-		-
1	02	01	03	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		dokumen				0	-
1	02	01	03	2.02		Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten	Jumlah Praktik Tenaga Kesehatan yang dilakukan pembinaan teknis dan pengawasan				184.800.000	184.800.000		184.800.000
1	02	01	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	dokumen		184.800.000	184.800.000	1	184.800.000
1	02	01	03	2.02	02	Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang dilakukan Peningkatan Kapasitas	100	orang				100	-
1	02	01	03	2.02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mengikuti Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas		orang				0	-
1	02	01	03	2.03		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten	Persentase ketersediaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten luwu		%		27.650.000	29.032.500		29.032.500
1	02	01	03	2.03	01	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen pelaksanaan Distribusi dalam rangka Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		dokumen				0	-
1	02	01	03	2.03	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar yang disediakan	44	orang		27.650.000	29.032.500	44	29.032.500
1	02	01	03	2.04		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Luwu yang telah mengikuti pengembangan mutu dan kompetensi		%		50.000.000	22.700.060		22.700.060
1	02	01	03	2.04	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		orang		50.000.000			
1	02	01	03	2.04	02	Sertifikasi Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang disertifikasi	360	orang			22.700.060	360	22.700.060
1	02	01	03	2.05		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten	Cakupan penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten		%		50.000.000	50.000.000		50.000.000
1	02	01	03	2.05	01	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	2	laporan		50.000.000	50.000.000	2	50.000.000
1	02	01	03	2.05	02	Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang disediakan		sistem informasi				0	-
1	02	01	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase ketersediaan alat kesehatan dan makanan minuman		%		262.160.000	262.160.000		262.160.000
1	02	01	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, (UMOT) yang telah mendapat izin		toko/usaha		55.839.000	55.839.000		55.839.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
1	02	01	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT	65	dokumen	termasuk Pembinaan Penanggungjawab dan Pemilik Apotek di Sarana Komunitas	55.839.000	55.839.000	65	55.839.000
1	02	01	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen yang memuat Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT		dokumen				0	-
1	02	01	04	2.01	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT yang difasilitasi dalam Pemenuhan Komitmen Izin		unit usaha				0	-
1	02	01	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Sertifikat Produksi yang diberikan kepada Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga		sertifikat		-	-		-
1	02	01	04	2.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		dokumen				0	-
1	02	01	04	2.02	02	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		dokumen				0	-
1	02	01	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang telah diterbitkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi		produk makanan/ minuman		206.321.000	206.321.000	0	206.321.000
1	02	01	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	50	dokumen	Survey PIRT, Depot Air Minum serta sarana Kesehatan Pemerintah dan Swasta, Pengawasan Keamanan Pangan dan Berbahaya, Penyuluhan Keamanan Pangan Bagi Calon Pengelola PIRT	206.321.000	206.321.000	50	206.321.000
1	02	01	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah TPM yang telah diterbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi		TPM		-	-	0	-
1	02	01	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi TPM		dokumen				0	-
1	02	01	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah jenis Makanan Jajanan yang telah diberikan stiker pembinaan		jenis		-	-	0	-
							Jumlah Sentra Makanan Jajanan yang telah diberikan stiker pembinaan		sentra makanan					
1	02	01	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		dokumen				0	-
1	02	01	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah produsen Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Post Market		produsen		-	-	0	-

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
							Jumlah Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Post Market		produk					
1	02	01	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Laporan hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		laporan				0	-
1	02	01	04	2.06	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Dokumen yang memuat Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga yang disediakan dan dikelola		dokumen				0	-
1	02	01	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		%		714.416.000	714.416.000		714.416.000
1	02	01	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok masyarakat dan organisasi/sektor pemerintahan yang aktif dalam melakukan promosi kesehatan		kelompok masyarakat dan organisasi		336.333.000	336.333.000		336.333.000
1	02	01	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	22	Puskesmas	Pengembangan inovasi puskesmas, Sosialisasi AOC Gema Cermat, Saka Bakti Husada	336.333.000	336.333.000	22	336.333.000
1	02	01	05	2.02		Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam rangka dalam Rangka Promotif Preventif		kelompok		363.933.000	363.933.000	0	363.933.000
1	02	01	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Puskesmas yang terlibat dalam upaya promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	31	Puskesmas	sosialisasi GERMAS, Lomba Desa/Kecamatan Sehat	363.933.000	363.933.000	31	363.933.000
1	02	01	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan UKBM		kelompok masyarakat		14.150.000	14.150.000		14.150.000
1	02	01	05	2.03	01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Puskesmas yang terlibat dalam bimbingan teknis dan supervisi	22	Puskesmas		14.150.000	14.150.000	22	14.150.000
1	02	02				RSUD Batara Guru					87.242.351.052	91.634.866.576		73.791.673.032
1	02	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		20.469.688.052	22.700.244.476	100	22.166.473.032
1	02	02	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		19.269.688.052	20.069.044.476	100	20.771.461.032
1	02	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	3.396	OB		19.269.688.052	20.069.044.476	3.396	20.771.461.032
1	02	02	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		1.200.000.000	2.631.200.000	100	1.395.012.000
							Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
1	02	02	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		1.200.000.000	1.381.200.000		1.395.012.000
1	02	02	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	5	jenis	Jaringan instalasi listrik		950.000.000		
1	02	02	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1	unit	mobil untuk dokter		300.000.000		

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
1	02	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio pembiayaan operasional rumah sakit (Cost Recovery Ratio/CRR)	85,00	%		66.772.663.000	68.834.622.100		51.525.200.000
1	02	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit dalam kondisi baik	85	%		19.672.663.000	18.673.422.100		1.400.000.000
1	02	02	02	2.01	08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah unit rumah sakit yang direhab dan dipelihara		unit		5.125.000.000			
1	02	02	02	2.01	13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	2	unit	kendaraan operasional rumah sakit (DAK)	3.920.000.000	1.000.000.000		
1	02	02	02	2.01	14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	205	unit	DAK	10.627.663.000	17.673.422.100	1	1.400.000.000
1	02	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	Cakupan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan yang disediakan pelayanan	100	%		47.100.000.000	50.161.200.000		50.125.200.000
1	02	02	02	2.02	32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah bulan operasional Pelayanan Kesehatan RS	12	bulan		47.100.000.000	50.000.000.000	12	50.000.000.000
1	02	02	02	2.02	35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten	Jumlah fasilitas kesehatan yang diakreditasi	1	Faskes			161.200.000	1	125.200.000
1	02	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase peningkatan pelayanan dan kerjasama RS	50,00	%		-	100.000.000		100.000.000
1	02	02	05	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok masyarakat dan organisasi/sektor pemerintahan yang aktif dalam melakukan promosi kesehatan		kelompok masyarakat dan organisasi		-	100.000.000		100.000.000
1	02	02	05	2.01	01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat/lembaga yang terlibat dalam upaya kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat/Kerjasama Rumah Sakit	1	kelompok			100.000.000	1	100.000.000
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	03	01			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					182.900.111.888	186.113.054.036		178.833.716.793
1	03	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		11.171.143.788	13.983.873.418	100	14.449.869.985
1	03	01	01	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		-	81.790.280	100	87.600.000
1	03	01	01	2.01	01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		9.991.490	2	10.000.000
1	03	01	01	2.01	02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website		29.798.800		35.000.000
1	03	01	01	2.01	03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		10.000.850	4	10.000.000
1	03	01	01	2.01	04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan mengadakan acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)		12.000.000	6	17.600.000
1	03	01	01	2.01	05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		19.999.140	1	15.000.000
1	03	01	01	2.02	Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		8.777.663.788	10.132.611.189	100	10.486.027.706
1	03	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	1.632	OB		8.755.157.538	10.097.614.789	1.632	10.451.031.306

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
1	03	01	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Dokumen pelaporan akuntansi dan keuangan yang disusun	1	dokumen			14.996.900		14.996.900
1	03	01	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen tanggapan pemeriksaan	3	dokumen			9.999.500	3	9.999.500
1	03	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			5.000.000	14	5.000.000
1	03	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan		22.506.250	5.000.000	1	5.000.000
1	03	01	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		2.393.480.000	3.646.819.999	100	3.595.242.329
							Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
1	03	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi		Surat		87.000.000	45.900.000		46.460.000
1	03	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		163.680.000	163.680.000	12	163.680.000
1	03	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB					
1	03	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan		unit		95.000.000	146.000.000		147.460.000
1	03	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	1.224	OB		1.120.000.000	1.323.750.000	1.224	1.323.750.000
1	03	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB		110.800.000	40.003.100		40.400.000
1	03	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan		unit/ paket					
1	03	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	25	Jenis		25.000.000	24.998.310	25	24.998.310
1	03	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3	Jenis		30.000.000	29.999.680	3	29.999.680
1	03	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	jenis		8.000.000	10.019.200	10	7.575.000
1	03	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		unit					
1	03	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan		jenis					
1	03	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	3	jenis		135.000.000	135.050.000	3	135.000.000
1	03	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	10	jenis		30.000.000	49.997.150	10	49.997.150
1	03	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3	jenis		59.000.000	58.990.000	3	58.990.000
1	03	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	56	OK		400.000.000	280.000.000	56	285.600.000
1	03	01	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	356	OK		50.000.000	89.100.000	356	89.991.000
1	03	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit					
1	03	01	01	2.03	22	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit					
1	03	01	01	2.03	24	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1	unit			7.700.000	1	9.335.632
1	03	01	01	2.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	12	jenis			486.745.000	12	426.746.917
1	03	01	01	2.03	28	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan		unit					
1	03	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	1	jenis		10.000.000	14.940.919		15.150.000
1	03	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit					
1	03	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	30	unit		60.000.000	679.958.640	30	679.958.640

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
1	03	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	12	unit/set		10.000.000	14.988.000	12	15.150.000
1	03	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	40	unit/set			15.000.000	40	15.000.000
1	03	01	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	10	unit/set			5.000.000	10	5.000.000
1	03	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	1	unit			25.000.000	1	25.000.000
1	03	01	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
1	03	01	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat	30	unit					
1	03	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		-	122.651.950	100	280.999.950
1	03	01	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
1	03	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	135	stell/ pasang				135	83.700.000
1	03	01	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
1	03	01	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang				135	72.900.000
1	03	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		stell/ pasang					
1	03	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang					
1	03	01	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	50	orang			39.559.950	50	39.559.950
1	03	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	7	orang			83.092.000	7	84.840.000
1	03	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor yang dibangun turap/Talud/Bonjong dan Pengendali Banjir	700	meter		20.975.247.100	18.349.674.118		31.159.972.868
							Persentase irigasi dalam kondisi baik	38,17	%					
1	03	01	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Persentase bangunan untuk pengelolaan SDA dalam kondisi baik		%		5.482.299.000	4.645.000.000		4.805.000.000
							Persentase/pantai yang membutuhkan bangunan pengaman pantai yang telah dibangun pengaman pantai		%					
1	03	01	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dokumen yang disusun		dokumen					
1	03	01	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Dokumen yang disusun		dokumen					
1	03	01	02	2.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Dokumen yang disusun	2	dokumen		100.000.000	200.000.000	2	200.000.000
1	03	01	02	2.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten	Dokumen yang disusun		dokumen					
1	03	01	02	2.01	05	Pembangunan Bendungan	Panjang bendungan yang dibangun		meter					
1	03	01	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang dibangun	3	unit			175.000.000	3	175.000.000

KODE							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
								Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)							(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
1	03	01	02	2.01	07		Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah Untuk Air Baku yang dibangun	26	unit			-		-
1	03	01	02	2.01	08		Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang dibangun		unit					
1	03	01	02	2.01	09		Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Turap/Talud/ Bronjong dibangun	500	meter		2.565.301.000	1.500.000.000		1.500.000.000
							Desa Suka Damai - Desa Kendekan (Talud)	1.000	m		375.000.000				-
							Desa Rante Damai (Talud)	3.333	m		1.249.875.000				-
1	03	01	02	2.01	10		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun	1.220	meter			2.000.000.000	1.620	2.080.000.000
1	03	01	02	2.01	11		Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang dibangun		unit					
1	03	01	02	2.01	12		Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang dibangun		meter					
1	03	01	02	2.01	13		Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang dibangun		unit					
1	03	01	02	2.01	14		Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang dibangun		unit					
1	03	01	02	2.01	15		Pembangunan Bangunan Sabo	Jumlah Bangunan Sabo yang dibangun		unit					
1	03	01	02	2.01	16		Pembangunan Check Dam	Jumlah Check Dam yang dibangun		unit					
1	03	01	02	2.01	17		Pembangunan Breakwater	Jumlah Breakwater yang dibangun		unit					
1	03	01	02	2.01	18		Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang dibangun		meter					
1	03	01	02	2.01	19		Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang dibangun		unit					
1	03	01	02	2.01	20		Rehabilitasi Bendungan	Jumlah Bendungan yang direhab		unit					
1	03	01	02	2.01	21		Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampungan Air Lainnya yang direhab		unit					
1	03	01	02	2.01	22		Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang direhab		unit					
1	03	01	02	2.01	23		Rehabilitasi Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang direhab		unit					
1	03	01	02	2.01	24		Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang direhab		meter					
1	03	01	02	2.01	25		Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang direhab		meter					
1	03	01	02	2.01	26		Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang direhab		unit					
1	03	01	02	2.01	27		Rehabilitasi Kanal Banjir	Jumlah Kanal Banjir yang direhab		unit					
1	03	01	02	2.01	28		Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang direhab		unit					
1	03	01	02	2.01	29		Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang direhab		unit					
1	03	01	02	2.01	30		Rehabilitasi Bangunan Sabo	Jumlah Bangunan Sabo yang direhab		unit					
1	03	01	02	2.01	31		Rehabilitasi Check Dam	Jumlah Check Dam yang direhab		unit					
1	03	01	02	2.01	32		Rehabilitasi Breakwater	Jumlah Breakwater yang direhab		unit					
1	03	01	02	2.01	33		Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang direhab		meter					
1	03	01	02	2.01	34		Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang tanggul sungai yang ditingkatkan	650	meter					
							Pengendalian Banjir Sungai Bajo Kec. Bajo Barat		200	m	500.000.000				
							Pengendalian Banjir Sungai Suso Desa Marinding		150	m	300.000.000			700	
							Pengendalian Banjir Sungai Bajo Kec. Bajo		100	m	200.000.000			500	
							Pengendalian Banjir Sungai Komba		100	m	200.000.000				
							Pengendalian Banjir Sungai Komba		100	m	200.000.000				
1	03	01	02	2.01	35		Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang ditingkatkan	900	meter		1.989.000.000			
							Penguatan Tebing Sungai Temboe		900	m	200.000.000				
							Penguatan Tebing Sungai Sampano			m	200.000.000				

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
						Perkuatan Tebing Sungai Bua Kec. Bua			m	600.000.000				
						Perkuatan Tebing Sungai Pakkalolo Kec. Bua			m	-				
						Perkuatan tebing Sungai Lamasi Kec. Walenrang Barat			m	200.000.000				
						Perkuatan tebing Sungai Suli Kec. Suli Barat			m	200.000.000				
						Perkuatan Tebing Sungai Bajo Kec. Latimojong			m	200.000.000				
						Perkuatan Tebing Sungai Battang Kec. Walenrang			m	300.000.000				
						Perkuatan Tebing Sungai Salutubu			m	200.000.000				
						Perkuatan Tebing Sungai Salulino			m	200.000.000				
						Perkuatan Tebing Sungai Makawa Kec. Walenrang Utara			m	200.000.000				
1	03	01	02	2.01	36	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang ditingkatkan		unit					
1	03	01	02	2.01	37	Peningkatan Kanal Banjir	Jumlah Kanal Banjir yang ditingkatkan		unit					
1	03	01	02	2.01	38	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang ditingkatkan		unit					
1	03	01	02	2.01	39	Peningkatan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang ditingkatkan		unit					
1	03	01	02	2.01	40	Peningkatan Bangunan Sabo	Jumlah Bangunan Sabo yang ditingkatkan		unit					
1	03	01	02	2.01	41	Peningkatan Check Dam	Jumlah Check Dam yang ditingkatkan		unit					
1	03	01	02	2.01	42	Peningkatan Breakwater	Jumlah Breakwater yang ditingkatkan		unit					
1	03	01	02	2.01	43	Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang ditingkatkan		meter					
1	03	01	02	2.01	44	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang ditingkatkan		unit					
1	03	01	02	2.01	45	Revitalisasi dan Pemeliharaan Danau	Volume revitalisasi dan pemeliharaan danau		m3					
1	03	01	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Panjang Normalisasi/ Restorasi/Pemeliharaan Sungai yang dilaksanakan	2.600	meter		827.998.000	770.000.000	6.000	850.000.000
						Normalisasi Sungai Ponrang Desa Parekayu, Tirowali		3.000	m	200.000.000,00				-
						Normalisasi Sungai Suli Desa Muhajirin Kec. Suli Barat		2.000	m	150.000.000,00				-
						Normalisasi Sungai Lamasi Desa Ilanbatu		500	m	100.000.000,00				-
						Normalisasi Sungai Temboe Desa Gandang Batu		2.000	m	200.000.000,00				-
						Normalisasi Sungai Sampano Desa Sampano dan Malewong		4.000	m	300.000.000,00				-
						Normalisasi Sungai Tanjong Desa Tanjong		2.000	m	150.000.000,00				-
1	03	01	02	2.01	47	Pembangunan Infrastruktur untuk Perlindungan dan Pemeliharaan Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Perlindungan dan Pemeliharaan Mata Air yang dibangun		unit					
1	03	01	02	2.01	48	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Jumlah bendungan yang dioperasikan dan dipelihara		unit					
1	03	01	02	2.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang dioperasikan dan dipelihara		unit					
1	03	01	02	2.01	50	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang dioperasikan dan dipelihara		unit					
1	03	01	02	2.01	51	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Jumlah Embung Air Baku yang dioperasikan dan dipelihara		unit					
1	03	01	02	2.01	52	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang dioperasikan dan dipelihara		unit					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
													Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	Target	(8)			(9)	(10)	(11)
1	03	01	02	2.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang dipelihara		meter					
1	03	01	02	2.01	54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang dipelihara		meter					
1	03	01	02	2.01	55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang dioperasikan dan dipelihara		unit					
1	03	01	02	2.01	56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang dioperasikan dan dipelihara		unit					
1	03	01	02	2.01	57	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo	Jumlah Bangunan Sabo yang dioperasikan dan dipelihara		unit					
1	03	01	02	2.01	58	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Jumlah Check Dam yang dioperasikan dan dipelihara		unit					
1	03	01	02	2.01	59	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang dipelihara		meter					
1	03	01	02	2.01	60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten	Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten		dokumen					
1	03	01	02	2.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten	Dokumen Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten		dokumen					
1	03	01	02	2.01	62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten	Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten		dokumen					
1	03	01	02	2.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten	Jumlah pertemuan dalam rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA		kali					
1	03	01	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Persentase sistem irigasi primer dan sekunder yang sudah tersedia		%		15.492.948.100	13.704.674.118		26.354.972.868
							Persentase sistem irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik		%					
1	03	01	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen yang disusun	2	dokumen			230.000.000	2	230.000.000
1	03	01	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang dibangun	3.100	meter		8.712.560.081	4.489.652.368	8.000	7.489.652.368
							Pembangunan DI. Padang Tujuh (lanjutan)	3.500	m	7.000.000.000			1.750	
							Pembuatan Irigasi Pompa Desa Padang Kalua	1	bh	150.000.000				
							Pembangunan DI. To'long Desa Lissaga	800	m	600.000.000				
							Pembangunan Irigasi Desa Mappetajang	350	m	150.000.000				
							Pembangunan DI. Sinaji Desa Sinaji	800	m	500.000.000				
							Pembangunan DI. Lempe Pasang Desa Lempe Pasang	500	m	300.000.000				
							Pembangunan DI. Lempe Desa Lempe	500	m	300.000.000				
							Pembangunan Saluran irigasi Desa To'balo	1.000	m	500.000.000				
							Pembuatan saluran Irigasi Kelurahan Padang Sappa Kec. Ponrang	150	m	150.000.000				
							Pembangunan Irigasi Dsn. T. Baru	800	m	500.000.000				
							Pembangunan Saluran irigasi desa Padang ma'bud	1	keg	500.000.000				
							Pembangunan Irigasi Dsn. Lewandi	1	km	800.000.000				
							Pembangunan Irigasi perpipaan	2	km	800.000.000				
							Pembangunan Saluran irigasi Dusun P.Toluwu Desa Marabuana	1	km	750.000.000				
							Pembangunan DI. Iianbatu Uru	1.000	m	3.000.000.000				
1	03	01	02	2.02	03	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang dibangun	2	unit			150.000.000	1	10.000.000.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
							Peningkatan DI. Dadeko	1	unit	2.112.000.000				
							Pompanisasi Dusun Kalosi	1	unit	80.000.000				
							Pengadaan Pintu Air 2 unit di dusun pangembarang	2	unit	50.000.000				
1	03	01	02	2.02	04	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang jaringan irigasi Rawa yang dibangun		meter					
1	03	01	02	2.02	05	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	Panjang jaringan Irigasi Tambak yang dibangun		meter					
1	03	01	02	2.02	06	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah sumur yang dibangun	2	unit			270.000.000		
1	03	01	02	2.02	07	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun		meter					
1	03	01	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan	1.150	meter			750.000.000	1.265	825.000.000
							Peningkatan Daerah Irigasi Tiromanda		m			-	1.500	
							Peningkatan Daerah Irigasi Rantebelu Desa Bilante	1.500	m			-	1.500	
							Peningkatan DI. To'bakkun	500	m	1.650.000.000				
							Peningkatan DI. To'parada	300	m	1.940.000.000				
							Peningkatan DI. Ojo	500	m	900.000.000				
							Peningkatan DI. Pantiang/Kalolambe		m				1.800	
							Peningkatan Jaringan Irigasi Buntu Nase Desa Lambanan	500	m	200.000.000				
							Peningkatan Jaringan Irigasi Desa Boneposi	150	m	200.000.000				
							Peningkatan DI. Parekayu	500	m			-		
1	03	01	02	2.02	09	Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang ditingkatkan	1	unit			50.000.000	1	55.000.000
1	03	01	02	2.02	10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang ditingkatkan		meter					
1	03	01	02	2.02	11	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang ditingkatkan		unit					
1	03	01	02	2.02	12	Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang ditingkatkan		unit					
1	03	01	02	2.02	13	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang ditingkatkan		meter					
1	03	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang dirahabilitasi	3.160	meter		5.798.387.919	2.108.025.000	8.770	2.466.020.500
							Rehabilitasi Daerah Irigasi Kaliba	200	m	500.000.000				
							Rehabilitasi Saluran Irigasi Tambak Ponrang	250	m	150.000.000				
							Rehabilitasi DI Pabuntang		m	-			1.000	
							Rehabilitasi DI. Mamara	2.000	m	1.800.000.000			2.000	
							Rehabilitasi DI. Bakka		m	-			2.000	
							Rehabilitasi DI. Ulsalu	2.000	m	1.200.000.000				
							Rehabilitasi DI. Buntu sarek		m	-			1.500	
							Rehabilitasi DI. Tombang	700	m	600.000.000				
							Rehabilitasi Saluran Irigasi Tambak Suli	150	m	150.000.000				
1	03	01	02	2.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang direhab	2	unit			3.807.000.000	2	3.426.300.000
1	03	01	02	2.02	16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang direhab		meter					
1	03	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang direhab	4.000	meter			350.000.000	4.000	350.000.000
1	03	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang direhab		unit					
1	03	01	02	2.02	19	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang direhab		meter					
1	03	01	02	2.02	20	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa	Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa		dokumen					
1	03	01	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi yang disediakan biaya operasional dan pemeliharaan	69	DI		982.000.100	1.499.996.750	69	1.513.000.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
1	03	01	02	2.02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang disediakan biaya operasional dan pemeliharaan		unit					
1	03	01	02	2.02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Jumlah Jaringan Irigasi Rawa yang disediakan biaya operasional dan pemeliharaan		lokasi					
1	03	01	02	2.02	24	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	Jumlah Jaringan Irigasi Tambak yang disediakan biaya operasional dan pemeliharaan		lokasi					
1	03	01	02	2.02	25	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang disediakan biaya operasional dan pemeliharaan		unit					
1	03	01	02	2.02	26	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Jaringan Irigasi Air Tanah yang disediakan biaya operasional dan pemeliharaan		lokasi					
1	03	01	02	2.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang disediakan biaya operasional		unit					
1	03	01	02	2.02	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Dokumen Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi		dokumen					
1	03	01	02	2.02	29	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa		dokumen					
1	03	01	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang berakses air minum berkelanjutan	82	%		12.285.693.000	47.779.996.070		20.665.400.000
1	03	01	03	2.01		<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten</i>	<i>Persentase ketersediaan SPAM di Daerah Kabupaten</i>		%		<u>12.285.693.000</u>	<u>47.779.996.070</u>		<u>20.665.400.000</u>
							<i>Persentase SPAM yang beroperasi dengan baik</i>		%					
1	03	01	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Perencanaan	2	dokumen			350.000.000	2	350.000.000
1	03	01	03	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Laporan pelaksanaan Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM		laporan					
1	03	01	03	2.01	03	Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM yang dibangun	1	unit			550.000.000	1	550.000.000
1	03	01	03	2.01	04	Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	Panjang jaringan pipa yang dibangun	43.050	meter		-	4.150.000.000	58.200	5.600.000.000
							Pengembangan Jaringan Perpipaan - SPAM IKK Bajo	11.000	m	30.000.000.000,00				
							Pengembangan Jaringan Perpipaan - SPAM IKK Belopa Utara	10.000	m	1.500.000.000,00				
							Pengembangan Jaringan Perpipaan - SPAM IKK Kamanre	5.000	m	1.500.000.000,00				
							Pengembangan Jaringan Perpipaan - SPAM IKK Noling	20.000	m	7.000.000.000,00				
							Pengembangan Jaringan Perpipaan - SPAM IKK Padang Sappa	200.000	m	5.000.000.000,00				
							Pengembangan Jaringan Perpipaan - SPAM IKK Bua	150.000	m	4.000.000.000,00				

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
		Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
		Pengembangan Jaringan Perpipaan - SPAM IKK Walenrang/Batusitanduk	20.000	m	40.000.000.000,00				
		Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Perdesaan	5.000	m	400.000.000,00				
		Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Perdesaan	3.000	m	300.000.000,00				
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (Prioritas)	1	unit	500.000.000,00				
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (Prioritas)	3.500	meter	650.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum (prioritas) - Pengadaan Jaringan Perpipaan Air Bersih (PDAM)	2.000	meter	500.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Sarana air bersih Dusun La'loa	1	unit	300.000.000,00				
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum - Pengembangan Jaringan Perpipaan	2.000	meter	400.000.000,00				
		Pengembangan Jaringan Perpipaan - SPAM IKK Larompong	15.000	meter	3.000.000.000,00				
		Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Perdesaan	5.000	meter	850.000.000,00				
		Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Perdesaan	3.000	meter	600.000.000,00				
		Pengembangan Jaringan Perpipaan - SPAM IKK Suli	7.000	meter	1.700.000.000,00				
		Pembangunan jaringan air Bersih perpipaan dsn Buntu andi,tombonan dan bide	2.000	meter	200.000.000,00				
		Pembangunan Bak Air bersih dan perpipaan Air bersih Desa Bukit Harapan	3.000	meter	500.000.000,00				
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum - Pisanisasi untuk mendukung distribusi air Bersih ke Rumah Penduduk	1.200	meter	250.000.000,00				
		Penyediaan Jaringan Air Bersih	1.500	meter	400.000.000,00				
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum - Pengadaan Air Bersih	3	unit	500.000.000,00				
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum - Bantuan Air Bersih	3	unit	500.000.000,00				
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum - Bantuan Air Bersih	1	unit	200.000.000,00				
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum - Bantuan Air Bersih	2	unit	300.000.000,00				

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
		Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
		Pembangunan Air Bersih dusun tumbubara dan karampa	1	paket	300.000.000,00				
		Pengadaan Air Bersih	1	unit	200.000.000,00				
		Pembangunan Air PAM Desa Pammesakang	1.000	meter	300.000.000,00				
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (Prioritas) - Pengadaan Air Bersih	1	unit	500.000.000,00				
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (Prioritas) - Pengadaan Air Bersih	1	unit	500.000.000,00				
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (Prioritas) - Pengadaan Air Bersih	1	unit	500.000.000,00				
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (Prioritas) - Pembangunan Air Bersih	2.000	meter	500.000.000,00				
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (Prioritas) - Air Bersih	1	paket	500.000.000,00				
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (Prioritas) - Pembangunan Jaringan Air Bersih	1	paket	500.000.000,00				
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (Prioritas) - Pembangunan Jaringan Air Bersih	2.000	meter	500.000.000,00				
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (Prioritas) - Pembangunan Jaringan Air Bersih	5.000	meter	750.000.000,00				
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (Prioritas) - Pembangunan Jaringan Air Bersih	5.000	meter	750.000.000,00				
		Pengadaan Air Bersih Rambe Awo' Desa Pantilang	1.500	meter	300.000.000,00				
		Pembangunan jaringan perpipaan SPAM (DAU)	7.000	meter	800.000.000,00				
		Pembangunan jaringan perpipaan SPAM (DAU)	2.500	meter	450.000.000,00				
		Pembangunan jaringan perpipaan SPAM (DAU)	4.000	meter	600.000.000,00				
		Pengadaan Air bersih	700	meter	300.000.000,00				
		Pengadaan Air bersih	4	unit	500.000.000,00				
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum - Pembangunan Jaringan Air Bersih	5	unit	500.000.000,00				
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum - Pengadaan Jaringan Air bersih di dusun Saragi	5	unit	500.000.000,00				
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum - Pembangunan Jaringan Air Bersih	654	KK	500.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pengadaan air bersih Dusun Solosikaso	700	meter	200.000.000,00				

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
							Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan sarana prasarana air bersih Dusun Batari	3	unit	200.000.000,00				
							Pembangunan Sarana Air Bersih	2	dusun	200.000.000,00				
							Pembangunan Jaringan Air Bersih	2.000	meter	500.000.000,00				
							Pembangunan Jaringan Air Bersih	2	unit	400.000.000,00				
							Pembangunan Sarana Air Bersih Dsn Sanga	500	meter	150.000.000,00				
							Pembangunan Bak Penampungan air Bersih	1	paket	500.000.000,00				
							Pengadaan Air Bersih Dusun Buntu Tabang	1	paket	150.000.000,00				
							Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum - Bantuan Air Bersih	4	unit	600.000.000,00				
							Pembangunan Air Bersih Dusun Tumbubara Dan Karampa	1	paket	100.000.000				
							Pemagaran Sumber Mata Air Wai Tuo Dusun Bailing	5x7	m	50.000.000				
							Air Bersih	1	unit	100.000.000				
							Jaringan Air Bersih Kantor Camat Basse Sangtempe	1	unit	50.000.000				
							Jaringan Air Bersih Rujab Kantor Camat Basse Sangtempe	1	unit	50.000.000				
							Pengadaan Air Bersih Rambe Awo' Desa Pantilang	1,5	km	120.000.000				
							Pembangunan Jaringan Perpipaan Spam (Dau)	7	km	450.000.000				
							Pembangunan Jaringan Perpipaan Spam (Dau)	3	km	120.000.000				
							Pembangunan Jaringan Perpipaan Spam (Dau)	4	dusun	120.000.000				
							Pengadaan Air Bersih	70	SR	175.000.000				
1	03	01	03	2.01	05	Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan	Pembangunan Jaringan Air Bersih	2	km	150.000.000	1.802.121.000	6.000.000.000	2	6.000.000.000
1	03	01	03	2.01	06	Peningkatan SPAM di Kawasan Pedesaan	Jumlah kawasan pedesaan yang dilaksanakan peningkatan SPAM	64	kawasan pedesaan		10.203.572.000	6.890.000.000	64	6.890.000.000
							Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
							Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
							Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
							Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
							Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan	1	paket	600.000.000,00				
							Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
							Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
							Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
		Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS Lingk. Saparu & Pattedong	1	paket	300.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
		Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pamsimas (air bersih) Dusun Gandang Batu	1	paket	600.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pamsimas (air bersih) Dusun Gandang Batu	1	paket	600.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
		Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pembangunan PAMSIMAS	1	paket	200.000.000,00				
		Peningkatan sarana air bersih pemukiman	1	paket	100.000.000,00				
		Peningkatan sarana air bersih pemukiman	1	unit	150.000.000,00				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum - Pamsimas (air bersih) Dusun Gandang Batu	1	paket	600.000.000,00				
		Penyediaan Jaringan Air Bersih	1500	m	100.000.000				
		Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Air Bersih Permukiman Desa Uraso Bastem Utara			100.000.000				
		Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Air Bersih Permukiman Desa Tabi Kec. Bastem			100.000.000				
		Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Air Bersih Permukiman Desa Mappetajang Kec. Bastem			85.000.000				
		Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Air Bersih Permukiman Desa Salubua Kec. Suli Barat			90.000.000				
		Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Air Bersih Permukiman Desa Lampuara Kec. Ponrang Selatan			80.000.000				
		Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Air Bersih Permukiman Desa Muhajirin Kec. Suli Barat			100.000.000				
		Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Air Bersih Permukiman Desa Tampa Kec. Ponrang			80.000.000				
		Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Air Bersih Permukiman Desa Tiromanda Kec. Bua			80.000.000				
		Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Air Bersih Permukiman / Mck Lingk. Pole Wali Kel. Bone Pute Kec. Lar Sel			100.000.000				
		Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Air Bersih Permukiman Desa Botta Kec. Suli			100.000.000				
		Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Air Bersih Permukiman Desa Bakti Kec. Ponrang Selatan			85.000.000				
		Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Air Bersih Permukiman Desa Padang Kalua Kec. Bua			85.000.000				

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan						Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
													Target	Pagu Indikatif
(1)	(2)						Tolok Ukur	Target	(8)			(9)	(10)	(11)
							Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Air Bersih Permukiman/ Mck Dusun Dengeng Canning Desa Komba Selatan Kec. Larompong			85.000.000				
							Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Air Bersih Permukiman Desa Pompengan Pantai Kec. Lamasi Timur			90.000.000				
							Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Air Bersih Permukiman Desa Olang Kec. Ponrang Selatan			85.000.000				
							Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Air Bersih Permukiman Desa Poringan Kec. Suli Barat			90.000.000				
							Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Air Bersih Permukiman Desa Kaladi Darussalam Kec. Suli Barat			100.000.000				
							Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Air Bersih Permukiman Desa Rante Alang Kec. Larompong			90.000.000				
							Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Air Bersih Permukiman Desa Padang Kamburi Kec. Bupon			85.000.000				
							Peningkatan Sarana Air Bersih Pemukiman	1	paket	250.000.000				
							Peningkatan Sarana Air Bersih Pemukiman	1	unit	250.000.000				
							Pengadaan Air Bersih Dusun Buntu Tabang	1	paket	300.000.000				
1	03	01	03	2.01	07	Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM yang dilakukan perluasan	19.750	unit			29.700.000.000	19.750	1.134.000.000
1	03	01	03	2.01	08	Perbaikan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM yang diperbaiki/dipelihara		unit					
						Panjang jaringan irigasi yang diperbaiki								
							Rehabilitasi SPAM IKK Walenrang	1	unit	3.000.000.000,00				
							Rehabilitasi SPAM IKK Bajo	1	unit	3.000.000.000,00				
							Rehabilitasi SPAM IKK Padang Sappa	1	unit	1.000.000.000,00				
							Rehabilitasi SPAM IKK Bua	1	unit	1.500.000.000,00				
							Rehabilitasi SPAM IKK Larompong	1	unit	1.500.000.000,00				
1	03	01	03	2.01	09	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Laporan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum		laporan					
1	03	01	03	2.01	10	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Laporan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan		laporan					
1	03	01	03	2.01	11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah kelompok penyelenggara SPAM yang dilakukan pembinaan dan pengawasan		kelompok		140.000.000	139.996.070	0	141.400.000
1	03	01	03	2.01	12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Jumlah kerjasama yang difasilitasi		kerjasama					
1	03	01	03	2.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM	Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan		laporan					
1	03	01	03	2.01	14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah SDM yang dibina		orang					
							Jumlah kelembagaan SPAM yang dikembangkan		lembaga					
1	03	01	03	2.01	15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM di Kawasan Perkotaan yang disediakan operasi dan pemeliharaan		unit					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
1	03	01	03	2.01	16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM di Kawasan Perdesaan yang disediakan operasi dan pemeliharaan		unit		140.000.000			
1	03	01	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan persampahan regional		%		-	3.000.000.000		3.000.000.000
1	03	01	04	2.01		<i>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten</i>	<i>Persentase wilayah perkotaan yang telah dilayani oleh sistem persampahan</i>		%		-	3.000.000.000		3.000.000.000
1	03	01	04	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten	Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang disusun	1	dokumen			200.000.000	1	200.000.000
1	03	01	04	2.01	02	Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dilakukan supervisi dalam Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan		lokasi					
1	03	01	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun		lokasi					
1	03	01	04	2.01	04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang direhabilitasi	1	lokasi		500.000.000		1	500.000.000
1	03	01	04	2.01	05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan		lokasi					
1	03	01	04	2.01	06	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah unit sarana persampahan yang disediakan	2	unit			2.300.000.000	2	2.300.000.000
1	03	01	04	2.01	07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan		orang					
1	03	01	04	2.01	08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah peserta sosialisasi		orang					
1	03	01	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang jalan yang memiliki saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik	1.398	km		4.206.966.000	4.829.623.695		4.942.586.065
1	03	01	06	2.01		<i>Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten</i>	<i>Persentase jalan utama yang telah memiliki sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai</i>		%		4.206.966.000	4.829.623.695		4.942.586.065
1	03	01	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun		dokumen					
1	03	01	06	2.01	02	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah dokumen Outline Plan pada Kawasan Genangan yang disusun	1	dokumen			300.000.000	1	300.000.000
1	03	01	06	2.01	03	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan yang dilakukan Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi		unit					
1	03	01	06	2.01	04	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Jumlah peserta kegiatan Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan		orang					
1	03	01	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Panjang Saluran drainase yang Dibangun	1.000	meter		4.206.966.000	2.000.000.000	1.000	2.000.000.000
							Drainase jalan poros ruas Kadong-kadong - Tetekang dsn marinding	4.000	meter	9.033.803.896				
							pembangunan drainase ruas sampeang - kaili dsn takkun	1.000	meter	2.258.450.974				
							Pembangunan Drainase Dsn Rangi-rangi Ruas jln Bajo-kadungdung/sampeang-Saronda	1.000	meter	2.258.450.974				
							Drainase Ruas Sampeang Saronda Dsn Baling	1.000	meter	2.258.450.974				

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
		Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
		Drainase Ruas Sampeang Saronda Dsn Salumbu	1.000	meter	2.258.450.974				
		Drainase ruas Sampeang - Saronda Dusun Pakebangan	500	meter	1.129.225.487				
		Pembangunan Drainase Pembuangan Dusun salumbu	300	meter	677.535.292				
		Pembangunan Drainase Dusun Kadong-Kadong	600	meter	1.355.070.584				
		Pembangunan Drainase dusun lamanuk ruas jalan dalam desa	500	meter	1.129.225.487				
		Pembangunan Drainase	250	meter	564.612.743				
		Pembanguna Drainase Dusun Batete	500	meter	1.129.225.487				
		Pembangunan Drainase samping Puskesmas Bajo Barat Dusun Baloa	300	meter	677.535.292				
		Pembangunan Drainase di dusun salu tallang	1.500	km	3.387.676.461				
		Pembangunan Drainase Dusun Dadeko (jalan pekuburan)	300	meter	677.535.292				
		Pembangunan Drainase	700	meter	1.580.915.682				
		Pembangunan Drainase Dsn Lanrang	500	meter	1.129.225.487				
		Program pembangunan dan Penataan Lingkungan Kawasan Pemukiman (Prioritas) - Drainase	3.000	meter	7.380.848.393				
		Pembangunan Drainase Jalan Poros	2.000	meter	4.920.565.595				
		Program pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya (Prioritas) - Pembangunan Drainase	3.000	meter	7.380.848.393				
		Program pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya (Prioritas) - Pembangunan Drainase	2.000	meter	4.920.565.595				
		Program pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya (Prioritas) - Pembangunan Drainase	250	meter	615.070.699				
		Pembangunan Drainase	1.000	meter	2.460.282.798				
		Program peningkatan jalan (prioritas) - Pembangunan Drainase Poros Desa Pantilang	1.500	meter	3.690.424.196				
		Program peningkatan jalan (prioritas) - Pembangunan Drainase di Desa Salubua-Desa Maindo	200	meter	492.056.560				
		Program peningkatan jalan dan jembatan (prioritas) - Pembangunan Drainase Jln Tani Banua Tonggo Desa Tasang Tongkonan- Desa Mappetaiang	400	meter	984.113.119				

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
		Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
		Program peningkatan jalan dan jembatan (prioritas) - Pembangunan Drainase di Jln. Poros Desa Ta'ba'	300	meter	738.084.839				
		Pembuatan Drainase - Lingkungan Baranpace	500	meter	1.129.623.695				
		Pembangunan Drainase - Jl. A. Kakke	600	meter	1.355.548.434				
		Pembangunan Drainase - Dusun Labuaia	1.600	meter	3.614.795.823				
		Pembangunan Drainase Lingkungan Radda Timur	100	meter	225.924.739				
		Drainase Lingkungan Jawaro dan Lingkungan Senga	540	meter	1.219.993.590				
		Pembangunan Drainase Perkuburan Dusun Balubu	200	meter	451.849.478				
		Pembangunan Drainase belakang rumah warga Dusun Balubu	350	meter	790.736.586				
		Pembangunan Drainase Lingkungan Belopa Barat	500	meter	1.129.623.695				
		Pembangunan Drainase Jl. Ali Semmang & Jl. Pelabuhan Ulo-Ulo	2.300	meter	5.196.268.996				
		Pembangunan Drainase Lingkungan Bunga Putih	500	meter	1.129.623.695				
		Pembangunan Drainase jalan Dalam Desa Posi	750	meter	1.694.435.542				
		Pembangunan Drainase ruas jalan Poros Desa Tiromanda Menghubungkan Kel.Sakti	2.250	meter	5.083.306.626				
		Pembangunan Drainase Jalan Dalam Kel.Sakti	2.200	meter	4.970.344.257				
		Pembangunan Drainase Jalan Dalam Desa Padang Kalua	1.000	meter	2.259.247.390				
		Pembangunan Drainase Jalan Dalam Desa Barowa	400	meter	903.698.956				
		Pembangunan Drainase Jalan Dalam Desa Tanarigella	500	meter	1.129.623.695				
		Pembangunan Talud/Drainase Jalan Dalam Desa Pabbaresseng	2.000	meter	4.518.494.779				
		Pembangunan Drainase Jalan Dalam Desa Lengkong	5.000	meter	11.296.236.948				
		Pembangunan Drainase Ruas jalan Lamone - Bukit Harapan	2.500	meter	5.648.118.474				
		Pembangunan Drainase jalan Dalam Desa Puty	500	meter	1.129.623.695				
		Pembangunan Drainase Ruas Jalan Lare-Lare - Pantai	1.000	meter	2.259.247.390				
		Pembangunan Drainase Ruas Jalan Lare-Lare Tampa	5.000	meter	11.296.236.948				

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
		Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
		Pembangunan Drainase Jalan Dalam Desa Pammesakang	1.000	meter	2.259.247.390				
		Pembangunan saluran drainase Lingkungan - Pembangunan Drainase Desa Padang Ma'Bud	1.000	meter	2.259.247.390				
		Pembangunan saluran drainase Lingkungan - Pembangunan drainase Desa Balutan	500	meter	1.129.623.695				
		Pembangunan Drainase Tersier Dsn. Barakasanda	100	meter	225.924.739				
		Pembangunan Drainase Jalan Desa, Dsn Pengkasalu	1.000	meter	2.259.247.390				
		Pembangunan Drainase Jl. A. Pandangai	500	meter	1.129.623.695				
		Pembangunan Drainase Pasar Rakyat To'lemo	200	meter	458.960.858				
		Pembangunan Drainase Poros To'lemo Sinangkala dusun To'lemo	100	meter	229.480.429				
		Peningkatan Kualitas Permukiman (Pembangunan Drainase)	2.000	meter	4.589.608.578				
		Peningkatan Kualitas Permukiman (Pembangunan Drainase)	1.200	meter	2.753.765.147				
		Pembangunan Drainase Jalan Ruas Padang Kalua-Wiwitan	500	meter	1.147.402.144				
		Pembangunan Drainase Ruas Poros Bolong-Lamas	804	meter	1.845.022.648				
		Pembangunan Drainase Ruas Jalan Setiারেjo-Salujambu	200	meter	458.960.858				
		Pembangunan Drainase Dsn Salusana & Bola Tellue	230	meter	525.132.716				
		Pembangunan Drainase Dusun Bolatellue	1.500	meter	3.424.778.580				
		Pembangunan Drainase depan SD Batulappa Dusun Batulappa	300	meter	684.955.716				
		Pembangunan Drainase Jalan Poros Desa Malewong	3.000	meter	6.849.557.161				
		Pembangunan Drainase Lingk. Bonepute Kel. Bonepute	50	meter	114.159.286				
		Pembangunan Drainase Jln. Wisata Bahari Lingk. Ponnori	50	meter	114.159.286				

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
		Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
		Pembangunan Drainase Sungai Ladondi Dusun Batu Putih	900	meter	2.054.867.148				
		Pembangunan drainase Dusun Sarasa	2.000	meter	4.566.371.440				
		Pembangunan drainase Dusun Sitodong	100	meter	228.318.572				
		Pembangunan drainase Dsn Batulappa	800	meter	1.826.548.576				
		Pembangunan Drainase jalan Homebase & Pantai VII Lingk. Pommandi & Lompue	700	meter	1.598.230.004				
		Pembangunan drainase jalan empang Dsn Batu Putih	4.500	meter	10.274.335.741				
		Pembuatan drainase depan pemakaman Islam	50	meter	114.159.286				
		Pembangunan Drainase di Dusun Mandaiso	7.000	meter	15.982.300.041				
		Pembangunan Drainase Samping Pasar Keppe	1.500	meter	3.424.778.580				
		Pembangunan Drainase Ibu Kota	3.000	meter	6.849.557.161				
		Pembangunan Drainase Ibu Kota	500	meter	1.141.592.860				
		Pembangunan Drainase Jalan Poros	450	meter	1.027.433.574				
		Pembangunan Drainase g di Dusun Pekoterang	300	meter	684.955.716				
		Pembangunan Drainase Jalan Poros Bukit Sutra	2.000	meter	4.566.371.440				
		Pembangunan Drainase Jalan Poros Riwang Selatan	4.000	meter	9.132.742.881				
		Pembangunan Drainase Jalan Kota Kel. Larompong	2.500	meter	5.707.964.301				
		Pembuatan Drainase Desa To'Barru	10.000	meter	24.602.827.975				
		Pembuatan Drainase Desa Palang	4.000	meter	9.841.131.190				
		Pembuatan Drainase Desa Ulusalu	3.000	meter	7.380.848.393				
		Pembuatan Drainase Desa Buntu Sarek	3.000	meter	7.380.848.393				
		Pembuatan Drainase Desa Lambanan	200	meter	492.056.560				
		Pembuatan Drainase Desa Tolajuk	500	meter	1.230.141.399				
		Pembuatan Drainase Desa Pangli	3.000	meter	7.380.848.393				
		Pembangunan Drainase Poros Belopa Palopo Lingk. Idaman	275	meter	621.293.032				
		Pembangunan Drainase, Jln. H.M. Dahlan, Lingk. Idaman	195	meter	440.553.241				
		Pembangunan Drainase, Jln. A. Massiwas/Jln. Tumale, Lingk. Idaman	450	meter	1.016.661.325				
		Pembangunan Drainase Jalan Trans Sulawesi Lingk. Padang makmur	200	meter	451.849.478				
		Pembangunan Drainase Dsn. Ponrang 2	300	meter	677.774.217				
		Pembangunan Drainase Jalan Kuburan Dsn. Lumi	700	meter	1.581.473.173				
		Pembangunan Drainase Belakang Mesjid	200	meter	451.849.478				
		Pembangunan Drainase Jln. Poros Mario-Tanjung Dsn. Liku dengeng	500	meter	1.129.623.695				
		Pembangunan Drainase Dsn. Salunase	500	meter	1.129.623.695				
		Pembangunan Drainase Dsn Timmara, Bnt. Lura, Lara	2.300	meter	5.196.268.996				
		Pembangunan Dranase Jalan Baio	200	meter	451.849.478				
		Pembangunan Drainase di 1 Lorong Melintang ke Lorong 4	200	meter	451.849.478				
		Lanjutan Pembangunan Drainase Belakang Pasar	200	meter	451.849.478				
		Lanjutan Pembangunan Drainase Lorong 1	500	meter	1.129.623.695				
		Pembangunan Drainase Lr. 8 Padang Lambe	500	meter	1.129.623.695				

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
		Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
		Pembangunan Drainase Lr. 9 Torea	600	meter	1.355.548.434				
		Pembangunan Drainase Lr. 5,6,7	500	meter	1.129.623.695				
		Pembangunan Drainase Lr. 9 dan 10	800	meter	1.807.397.912				
		Pembangunan Drainase Dsn Sadar	200	meter	451.849.478				
		Pembangunan Drainase, depan SDN 525	200	meter	451.849.478				
		Pembangunan Drainase Dsn Labembe	200	meter	451.849.478				
		Pembangunan Drainase Jalan Poros	6.000	meter	13.555.484.337				
		Pembangunan Drainase Jalan Poros Propinsi	2.000	meter	4.518.494.779				
		Pembangunan Drainase Jl. Laminanga-nanga	3.000	meter	6.777.742.169				
		Pembangunan Drainase Jl. Poros Bassiang	1.500	meter	3.388.871.084				
		Pembangunan Drainase Jalan Desa To'balo	200	meter	451.849.478				
		Pembangunan Drainase Ruas Jalan Leppangana	3.000	meter	6.777.742.169				
		Pembangunan Drainase Poros	500	meter	1.129.623.695				
		Pembangunan Drainase sisi kanan Jalan Poros Dusun Padang Bajo	550	meter	1.242.586.064				
		Pembangunan Drainase Irigasi Sekunder ruas Desa Buntu Barana - Lingkungan Tammallumu	300	meter	677.535.292				
		Pembangunan Drainase poros ruas Desa Salubua-Desa Kaladi Darussalam	2.000	meter	4.516.901.948				
		Drainase Jalan Poros Desa Muhajiran -Desa Rantealang	4.000	meter	9.033.803.896				
		Drainase Jalan Poros Desa Muhajiran - Desa Salubua	2.000	meter	4.516.901.948				
		Pembangunan Drainase Dusun pangi - Batas Desa Kaili	2.000	meter	4.516.901.948				
		Pembangunan Drainase Kawasan Permukiman perdesaan jalan Poros Desa Salubua	2.000	meter	4.516.901.948				
		Pembangunan Drainase Lingkungan Tammallumu	1.000	meter	2.283.185.720				
		Pembangunan Drainase Dusun Siapa	1.000	meter	2.283.185.720				
		Pembangunan Drainase Buntu Batu- papakaju	2.000	meter	4.566.371.440				
		Pembangunan Drainase Sekunder Dusun Cakkeawo	1.000	meter	2.283.185.720				
		Pembangunan Drainase Dusun padang Lambe	325	meter	742.035.359				
		Lanjutan Pembangunan Drainase di dusun bibang/campurejo	200	meter	458.960.858				
		Pembangunan Drainase Jalan Desa Walenrang Ke Desa Tombang	3.000	meter	6.884.412.867				
		Pembangunan Drainase lingkungan Bulu	540	meter	1.239.194.316				
		Pembangunan Drainase di dusun Pasang Kaliba	1.000	meter	2.294.804.289				
		Drenase pemukiman pedesaan dsn tombang dan dsn batuaja	2.500	meter	5.737.010.722				
		Pembangunan Drainase Ruas Desa Lamasi Pantai - Desa Seba-seba	2.000	meter	4.589.608.578				

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
							Lanjutan Pembangunan Drainase Lr SMK dan SMP	400	meter	917.921.716				
							Drainase Poros Waerabba – Salubattang(Jalan Poros Perumahan Nelayan)	400	meter	917.921.716				
							Drainase Lr Mesjid Al-Ikhlas	300	meter	688.441.287				
							Drainase Lr samsuddin	300	meter	688.441.287				
							Pembangunan Drainase Dsn Padang To'luwu	2.000	meter	4.589.608.578				
							Pembangunan Drainase Dsn Talluara	2.000	meter	4.589.608.578				
							Pembangunan Drainase Dsn Lewo	2.000	meter	4.589.608.578				
							Pembangunan Drainase Dsn Salulino	1.000	meter	2.294.804.289				
							Pembangunan Drainase Dsn Lino	1.000	meter	2.294.804.289				
							Pembangunan Drainase Lingk To'belalang	1.200	meter	2.753.765.147				
							Pembangunan Drainase Dsn Pa'buntuan	2.000	meter	4.589.608.578				
							Pembangunan Drainase Dsn Sangtandung	3.000	meter	6.884.412.867				
							Pembangunan Drainase Lingk Padang	1.500	meter	3.442.206.433				
							Pembangunan Drainase Lingk Pusun	2.500	meter	5.737.010.722				
1	03	0	06	2.01	06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan yang ditingkatkan	500	meter			1.129.623.695	550	1.242.586.065
1	03	0	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Panjang Saluran yang Direhabilitasi	1.425	meter			1.400.000.000	1.425	1.400.000.000
							Rehab Drainase ruas Bajo-Kadundung Dusun Marinding	350	meter	790.457.841				
							Rehab Drainase	200	meter	451.690.195				
							Rehab Drainase Jl. Dg. Pawellang	300	meter	677.774.217				
							Rehab. Sekaligus Perluasan Drainase Depan RSUD Batara Guru	150	meter	338.887.108				
							Rehab Drainase Dusun Lario	25	meter	56.481.185				
							Perluasan Drainase depan SDN Lebani	400	meter	903.698.956				
							Rehabilitasi Drainase Kawasan RTH Opu dg. Risaju	100	meter	225.924.739				
							Peningkatan Drainase Pelabuhan To'kaluku	500	meter	1.129.623.695				
							Rehab Drainase Lapangan SMA-Burake Dsn. Ponrang 2	200	meter	451.849.478				
							Rehab Drainase yang terputus	100	meter	225.924.739				
1	03	01	06	2.01	08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Jumlah unit Sarana Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan yang disediakan		unit					
1	03	01	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase yang disediakan biaya Operasi dan Pemeliharaan		lokasi					
1	03	01	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Cakupan penyelenggaraan penataan bangunan gedung	30	unit		9.205.200.000	16.950.000.000		16.850.000.000
1	03	01	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan gedung daerah yang dibangun dan ditingkatkan	30	unit		9.205.200.000	16.950.000.000		16.850.000.000
							Persentase bangunan gedung diwilayah perkotaan yang telah dilakukan penataan		%					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
1	03	01	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Laporan Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	2	laporan			450.000.000	2	350.000.000
1	03	01	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten	Jumlah bangunan gedung yang dilakukan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan	5	unit		9.205.200.000	16.500.000.000	5	16.500.000.000
							Pindah dari Perkim				4.734.000.000			
							Pembangunan Gedung Pemerintahan:				3.171.200.000			
							Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintahan	522	unit		1.300.000.000,00			
							Jumlah dokumen Perencanaan		dokumen		1.074.423.000			
							Pembangunan BLK					2.500.000.000		
							Pembangunan ruang Kepala Desa dan Staf Kantor Desa	1	paket		178.500.000,00			
							Pembangunan Ruang BPD	1	unit		214.200.000,00			
							Pembangunan Pagar Puskesmas Bajo Barat	250	meter		665.000.000,00			
							Pembangunan Pintu Gerbang Puskesmas Bajo Barat	2	unit		50.000.000,00			
							Pembangunan Pintu Gerbang Masuk Desa Marinding	2	titik		70.000.000,00			
							Pembangunan Pagar Belakang Kantor Camat Bajo Barat	100	meter		276.000.000,00			
							Pembangunan Gedung BKPSDM				-	5.000.000.000		
							Pembangunan Gedung Perpustakaan	1	unit		214.200.000,00			
							Pembangunan TPA Al-Qur'an	1	unit		119.000.000,00			
							Lanjutan Pagar Kantor Camat bajo	150	meter		399.000.000,00			
							Pembangunan Asrama mahasiswa Palopo	1	unit		-	1.000.000.000		
							Pembangunan Mess Pemda	1	unit		357.000.000,00			
							Pembangunan Sanggar Seni Kantor Camat Basse Sangtempe	1	unit		119.000.000,00			
							Pembangunan Pagar Kantor Camat dan Papan Nama Kantor Camat	1	unit		133.000.000,00			
							Pembangunan Pagar Rujab Kantor Camat dan Papan Nama Kantor Camat	1	unit		79.800.000,00			
							Pembangunan Perpustakaan Kecamatan	1	unit		214.200.000,00			
							Pembangunan Gedung Serbaguna / Balai Desa Dusun To'Bua	1	unit		500.000.000,00			
							REHABILITASI GEDUNG SIMPUSRIANG MENJADI MALL LAYANAN PUBLIK	1			-	5.000.000.000		
							Pembangunan Rujab Camat	1	unit		285.600.000,00			
							Pembangunan Masjid At- Takwa Buntu Biang Desa Karatuan	1	unit		357.000.000,00			
							Pembangunan Masjid Nurul Hidayah Salulibong Desa Karatuan	1	unit		357.000.000,00			
							MESJID AGUNG				-	3.000.000.000		
							Pagar Kantor Desa Dusun Lamunre I	12	unit		133.000.000,00			
											-			
							Pagar Kantor Desa Kurrusumanga	50	meter		133.000.000,00			
											-			
							Pembangunan Atap dan Lantai Lapangan Serba Guna Desa Tanarigella	1	unit		300.000.000,00			
							Pembangunan Pagar masjid Desa Lengqong	4	unit		133.000.000,00			
											-			
							Pembangunan Pagar Pesantren MTS ASSALAM	300	meter		798.000.000,00			

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
		Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
		Pembangunan Rumah Jabatan lurah Noling	1	unit	214.200.000,00				
					-				
		Pembangunan kantor Desa	1	unit	321.300.000,00				
					-				
		Pembangunan Pagar Kantor Camat Lamasi	945	m2	2.513.700.000,00				
					-				
		Pembangunan Gedung Serba Guna Kecamatan Larompong Selatan (Lanjutan)	1	unit	500.000.000,00				
		Pembanguan gedung TPA Dusun Malewong	1	unit	119.000.000,00				
					-				
		Pembangunan Pagar TPU di Dusun Buntu Kamassi	120	meter	319.200.000,00				
		Pembangunan Kantor Camat Larompong	1	unit	3.000.000.000,00				
		Pengadaan Pagar Rumah Jabatan Camat Larompong	1.5x110	meter	266.000.000,00				
		Pengadaan Pagar Kantor Camat Larompong	1.5x100	meter	266.000.000,00				
		Pembangunan Pagar Gedung Pertemuan	1.5x150	meter	399.000.000,00				
		Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Larompong	1	unit	416.500.000,00				
		Pembangunan Rumah Jabatan Camat Larompong	1	unit	214.200.000,00				
					-				
		Pembangunan Kantor Camat Latimojong	1	unit	3.000.000.000,00				
		Pembangunan Gedung serba Guna	200	m2	1.190.000.000,00				
		Pembangunan Mushollah	1	unit	214.200.000,00				
					-				
					-				
		Pembangunan Ruang Pertemuan/Rapat Kantor Camat Ponrang Selatan	120	m2	714.000.000,00				
		Paving Blok Plataran Kantor Camat Ponrang Selatan	5.000	m2	200.000.000,00				
		Pagar Kantor Camat Ponrang Selatan	150	meter	399.000.000,00				
		Pembangunan Kantor Desa Olang	1	unit	321.300.000,00				
					-				
		Pembangunan Gedung Serba Guna Dusun Buntu	1	unit	350.000.000,00				
					-				
		Pembangunan Mesjid	1	unit	357.000.000,00				
		Pembangunan Mesjid	1	unit	357.000.000,00				
		Pembangunan Mesjid	1	unit	357.000.000,00				
					-				
		Pembangunan Area Parkir Halaman Kantor Kecamatan	1	paket	250.000.000,00				
		Pagar TPU Lingk. Padang	600	meter	500.000.000,00				
					-				
		Rehab Kantor Camat Bajo Barat	1	paket	1.000.000.000,00				
					-				
		Rahab Kantor Camat Bajo	1	unit	1.000.000.000,00				
		Rehab Gedung Pertemuan Kec.Bajo	1	unit	500.000.000,00				
		Rehab Kantor Desa	1	unit	200.000.000,00				

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
		Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
		Rehabilitasi Kantor Camat Bastem	1	unit	1.000.000.000,00				
		Rehabilitasi Rumah Jabatan Camat Bastem	1	unit	200.000.000,00				
		Pembenhahan Halaman Kantor Camat dan Pavingblok	1	unit	100.000.000,00				
		Pembenhahan Halaman Rujab Kantor Camat dan Pavingblok	1	unit	50.000.000,00				
		Rehabilitasi rumah jabatan Camat Bua	1	unit	300.000.000,00				
		Rehabilitasi gedung Kecamatan Bua	1	unit	1.000.000.000,00				
		Rehabilitasi Kantor Kecamatan	1	unit	1.000.000.000,00				
		Penataan Halaman Kantor Camat	1	unit	100.000.000,00				
		Rehab Total Kantor Kelurahan Lamasi	1	unit	500.000.000,00				
		Rehab total Kantor Camat Larompong Selatan	500	m2	3.000.000.000,00				
		Renovasi Rumah Jabatan Camat Ponrang	1	unit	300.000.000,00				
		Rehabilitasi Tempat Ibadah (Musholla) Dsn. Lara	1	unit	200.000.000,00				
		Rehabilitasi Gereja Betel Indonesia Dsn. Buntu Lura	1	unit	150.000.000,00				
		Rehab Gedung Pertemuan "SAMATURU" Suli	1	unit	200.000.000,00				
		Rehab Rumah Jabatan Camat	1	unit	300.000.000,00				
		Rehab Aula kantor camat Suli	1	unit	300.000.000,00				
		Pembangunan Pintu Pagur / Gapura kantor Camat Suli	2	unit	70.000.000,00				
		Rehab Total Kantor Kecamatan Walenrang Barat	1	unit	1.500.000.000,00				
1	03	01	08	2.01	03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten	Dokumen yang disusun	dokumen	
1	03	01	08	2.01	04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten	Jumlah Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang diberikan bantuan teknis	gedung	
1	03	01	08	2.01	05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten	Laporan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara	laporan	
1	03	01	08	2.01	06	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten	Laporan pelaksanaan Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten	laporan	
1	03	01	08	2.01	07	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan tingkat Kabupaten	Jumlah Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan tingkat Kabupaten yang diberikan bantuan teknis	orang	
1	03	01	08	2.01	08	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif Kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten yang diberikan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif	orang	
1	03	01	08	2.01	09	Penilaian terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Laporan pelaksanaan Penilaian terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	laporan	
1	03	01	08	2.01	10	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang dilakukan Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo)	gedung	
1	03	01	08	2.01	11	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang dikelola	unit	

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
1	3	01	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	22,80	%		124.955.862.000	80.264.888.815		86.579.888.815
						Tingkat mobilitasi (panjang jalan per luas wilayah)	0,87	Angka					
1	03	01	10	2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Persentase jaringan jalan kabupaten dengan aspal dan beton	64,23	%		124.955.862.000	80.264.888.815		86.579.888.815
						Persentase jembatan dalam kondisi baik		%					
1	03	01	10	2.01	01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	Jumlah DED yang disusun	20	dokumen		1.490.225.000	2.000.000.000	20	2.020.000.000
1	03	01	10	2.01	02 Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan yang dibebaskan		m2					
1	03	01	10	2.01	03 Pengelolaan Leger Jalan	Dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan leger jalan	1	dokumen			350.000.000	1	350.000.000
1	03	01	10	2.01	04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Laporan pelaksanaan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1	laporan			100.000.000	1	100.000.000
1	03	01	10	2.01	05 Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan	5	km		29.160.454.000	10.000.000.000	2	400.000.000
						Menuju Sarana Wisata air terjun Sarambu Toga Desa Siteba (Pembentukan)	2	km	150.000.000				
						Jalan Ruas Desa Ilanbatu Uru (Perintisan)	2	km	150.000.000				
						Desa Pongko (Perintisan)	1	km	75.000.000				
1	03	01	10	2.01	06 Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang jalan yang ditingkatkan dari kerikil ke aspal atau beton	12,50	km		16.773.341.500	20.000.000.000	12,50	20.200.000.000
						Peningkatan jalan dari tanah ke kerikil	46		15.020.000.000				
						- Ruas Bonglo - Beuma (Perkerasan)	5	km	2.500.000.000				
						- Ruas Rante Balla - Beuma (Perkerasan)	5	km	2.500.000.000				
						- Ruas Kadundung - Pajang (Perkerasan)	5	km	2.500.000.000				
						- Ruas Ilan Batu Uru - Lewandi (Perkerasan)	5	km	2.500.000.000				
						Ilan Batu Uru - Lewandi (Perkerasan)	5	km	2.500.000.000				
						Kelurahan Lamasi (Kerikil)	3	km	360.000.000				
						Desa Salulino (Kerikil)	3	km	360.000.000				
						Dsn Kaliba Bawah - Desa Walenrang (Kerikil)	2	km	240.000.000				
						Desa Pompengan Pantai (Kerikil)	2	km	240.000.000				
						Dsn Uru - Desa Ilanbatu Uru (Kerikil)	2	km	240.000.000				
						Dalam Desa Salu Jambu (Kerikil)	2	km	240.000.000				
						Dsn Bua - Desa Ilanbatu (Kerikil)	2	km	240.000.000				
						Dsn Seriti Tengah (Kerikil)	3	km	360.000.000				
						Desa Bululondong (Kerikil)	2	km	240.000.000				
						Peningkatan jalan dari Kerikil ke Aspal / Beton	174		372.000.000.000				
						Temboe - Laloa (Aspal)	4	km	7.120.000.000				

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
		Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
		Keppe - Buntu Matabing (Beton)	2	km	4.500.000.000				
		Binturu - Bukit Sufera (Beton)	6	km	16.500.000.000				
		Murante - Buntu Barana (Beton)	2	km	4.500.000.000				
		Suli - Papakayu - Kali (Aspal)	3	km	6.400.000.000				
		Salubua - Kaladi (Beton)	5	km	12.000.000.000				
		Towondu - Tallang (Aspal)	4	km	8.160.000.000				
		Botta - Buntu Kunyi (Aspal)	2	km	3.000.000.000				
		BWK D (Beton)	3	km	18.000.000.000				
		Taddette - Kambuno (Beton)	3	km	18.000.000.000				
		BWK B (Beton)	2	km	10.560.000.000				
		Perum PNS - Padang (Aspal)	1	km	1.800.000.000				
		Lonnyi - Mamunta (Beton)	3	km	9.000.000.000				
		Sampeang - Tallang Bulawang (Aspal)	5	km	10.000.000.000				
		Kadundung - Rante Balla (Aspal)	3	km	6.000.000.000				
		Cilallang - Pengkasalu (Aspal)	2	km	3.400.000.000				
		Cilallang - Sumabu (Beton)	3	km	9.000.000.000				
		Cilallang - Toangkajang (Aspal)	2	km	5.400.000.000				
		Taramatekkeng - Bide (Beton)	3	km	9.000.000.000				
		Bassiang - Passampa (Aspal)	1	km	2.400.000.000				
		Kariako - Buntu Batu (Beton)	1	km	3.000.000.000				
		Dalam Desa Pattedong Selatan (Aspal)	1	km	1.400.000.000				
		Dalam Desa Bakti (Aspal)	1	km	1.700.000.000				
		Dalam Kota Kec. Ponrang (Aspal)	3	km	6.000.000.000				
		Ponrang - Salu Kapa (Aspal)	2	km	4.000.000.000				
		Parekaju - Tampumia (Aspal)	5	km	10.000.000.000				
		Mario - Parekaju (Aspal)	3	km	6.000.000.000				
		Padang Tuju - Malenggang (Aspal)	3	km	6.000.000.000				
		Lare-Lare - Tampa (Aspal)	3	km	5.000.000.000				
		Lamone - Bukit Harapan (Aspal)	3	km	6.000.000.000				
		Pabbaesseng - Pammesakang (Aspal)	2	km	3.600.000.000				
		Balambang - Pammesakang (Aspal)	0	km	540.000.000				
		Padang Kalua - Sakti (Aspal)	1	km	2.400.000.000				
		Dalam Desa Toddopuli (Aspal)	1	km	2.000.000.000				
		Bosso - Kondo (Aspal)	5	km	10.000.000.000				
		Pongko - Pongsoe (Aspal)	3	km	6.000.000.000				
		Marabuana - Siteba (Aspal)	9	km	18.000.000.000				
		Pongko - To'bakung (Aspal)	1	km	2.000.000.000				
		Lalong - SMPN 2 Walenrang (Aspal)	2	km	4.000.000.000				
		Karetan - Tombang (Aspal)	3	km	6.000.000.000				
		Batusitanduk - Tombang (Aspal)	3	km	6.000.000.000				
		Bulo - Saragi (Aspal)	4	km	7.420.000.000				
		Rante Damai - Pollo Padang (Aspal)	5	km	10.000.000.000				

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan						Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
													Target	Pagu Indikatif
(1)	(2)						Tolok Ukur	Target	(8)			(9)	(10)	(11)
							Taba - Kendekan (Beton)	2	km	6.000.000.000				
							Lamasi - Salu Jambu/Awo Gading - Dermaga (Aspal)	2	km	4.000.000.000				
							Ilanbatu - Simbuang Atas (Beton)	3	km	15.000.000.000				
							Dalam Desa Pompengan Tengah (Rabat Beton)	2	km	6.000.000.000				
							SPMA - Tanete (Rabat Beton)	2	km	1.200.000.000				
							Dalam Kel. Bulu (Rabat Beton)	3	km	1.800.000.000				
							Dalam Desa Walenrang (Rabat Beton)	2	km	1.200.000.000				
							Dalam Desa Wiwitan (Rabat Beton)	2	km	1.200.000.000				
							Dsn Bolong Desa Ilanbatu (Rabat Beton)	1	km	600.000.000				
							Tombang - Batubuaja (Rabat Beton)	3	km	1.800.000.000				
							Desa Walenrang - Desa Batutitanduk (Lanjutan) (Rabat Beton)	1	km	600.000.000				
							Pompengan Tengah - Pompengan Pantai (Rabat Beton)	4	km	2.400.000.000				
							Bolong - Sangtandung (Beton)	4	km	12.000.000.000				
							Salulino - Buntu Awo (Beton)	3	km	9.000.000.000				
							Desa Seba-Seba - Desa Kendekan (Beton)	2	km	6.000.000.000				
							Wiwitan - Buntu Singki (Rabat Beton)	2	km	1.200.000.000				
							Dsn Kakobi - Desa To Pongo (Rabat Beton)	4	km	2.400.000.000				
							Desa Setiarejo (Rabat Beton)	2	km	1.200.000.000				
							Desa Lamasi Pantai (Rabat Beton)	2	km	1.200.000.000				
							Desa Tanete (Rabat Beton)	2	km	1.200.000.000				
							Desa Batutitanduk (Rabat Beton)	1	km	600.000.000				
							Dsn Wai Malino - Desa Se'pong (Rabat Beton)	3	km	1.800.000.000				
							Desa Buntu Awo (Rabat Beton)	3	km	1.800.000.000				
1	03	01	10	2.01	07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang jalan yang dilebarkan sesuai standar		km			10.000.000.000		10.000.000.000
1	03	01	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang direkonstruksi		km			5.000.000.000		5.000.000.000
1	03	01	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang direhabilitasi		km					
							Talud Jalan Dalam Desa Lalong (Talud)	0	km					-
1	03	01	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara berkala	54	km		55.384.361.500	22.614.888.815	54	22.614.888.815
							Komba - Binturu (Aspal)	1	km	2.000.000.000				
							Komba - Lumaring (Aspal)	5	km	10.000.000.000				
							Dalam Kota Belopa - Belopa Utara (Aspal)	3	km	9.000.000.000				
							Belopa - Bajo (Pelebaran Aspal)	3	km	9.000.000.000				
							Pammanu - Balabatu (Aspal)	1	km	2.250.000.000				
							Pammanu - Paconne (Aspal)	4	km	6.597.500.000				
							Rumaju - Saga (Aspal)	6	km	12.000.000.000				
							Jambu - Langkidi (Aspal)	3	km	6.000.000.000				
							Lura - Minanga Tallu (Aspal)	2	km	4.000.000.000				
							Kandoa - Balambang (Beton)	1	km	1.500.000.000				

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
						Bua - Sappang (Aspal)		7	km	14.000.000.000				
						Batu Sitanduk - Rante Damai (Aspal)		3	km	6.000.000.000				
						Rante Damai - Lamasi Pantai (Aspal)		7	km	14.000.000.000				
						Lamasi - Kondo (Aspal)		4	km	7.820.000.000				
						Lamasi - Tolemo (Aspal)		5	km	10.000.000.000				
						Reses				7.614.888.815				
1	03	01	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah titik jalan yang dipelihara		titik			2.000.000.000		2.020.000.000
1	03	01	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	4	unit		22.147.480.000	7.500.000.000		7.500.000.000
						JEMBATAN GALUNTURAN				1.000.000.000				
						JEMBATAN SALU BUA - KAILI				2.000.000.000				
						JEMBATAN PADANG TUJU				500.000.000				
						JEMBATAN BUKIT SUTRA				4.000.000.000				
1	03	01	10	2.01	13	Pembangunan Flyover	Panjang Flyover yang dibangun		meter					
1	03	01	10	2.01	14	Pembangunan Underpass	Panjang Underpass yang dibangun		meter					
1	03	01	10	2.01	15	Pembangunan Terowongan/Tunnel	Panjang Terowongan/Tunnel yang dibangun		meter					
1	03	01	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang diganti		meter				80	13.125.000.000
1	03	01	10	2.01	17	Pelebaran Jembatan	Volume pelebaran Jembatan		m3				50	1.500.000.000
1	03	01	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang direhabilitasi		m				195	1.750.000.000
1	03	01	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang dipelihara secara rutin	10	unit			200.000.000		
1	03	01	10	2.01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang dipelihara secara berkala	10	unit			500.000.000		
1	03	01	10	2.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Volume pembangunan dalam rangka Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat		m3					
1	3	01	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Cakupan penyelenggaraan pengembangan jasa konstruksi di daerah kabupaten	100	%		100.000.000	200.000.000		201.000.000
1	03	01	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang telah dilatih		orang		100.000.000	200.000.000		201.000.000
1	03	01	11	2.01	01	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) pelatihan tenaga terampil konstruksi	Jumlah Training Need Assessment (TNA) pelatihan tenaga terampil konstruksi yang disiapkan		kali		100.000.000	100.000.000		100.000.000
1	03	01	11	2.01	02	Penyiapan Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan	Jumlah Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan yang disiapkan		orang					
1	03	01	11	2.01	03	Penyiapan SOP penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	Jumlah jenis SOP penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi yang disiapkan		jenis					
1	03	01	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		orang					
1	03	01	11	2.01	05	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Laporan hasil pelaksanaan Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi		laporan					
1	3	01	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah masyarakat yang difasilitasi	4	orang			100.000.000	4	101.000.000
1	03	01	11	2.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Laporan pelaksanaan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi		laporan					
1	03	01	11	2.01	08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Laporan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		laporan					
1	03	01	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten	Jumlah sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten yang diselenggarakan		sistem informasi		-	-		-

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
1	03	01	11	2.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Laporan pelaksanaan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi		laporan					
1	03	01	11	2.02	02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah unit Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang disediakan		unit					
1	03	01	11	2.02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah peserta Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI		orang					
1	03	01	11	2.02	04	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPBU	Dokumen Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPBU yang disusun		dokumen					
1	03	01	11	2.02	05	Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur	Dokumen Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur yang disusun		dokumen					
1	03	01	11	2.02	06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha yang disusun		dokumen					
1	03	01	11	2.02	07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan yang disusun		dokumen					
1	03	01	11	2.02	08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Dokumen Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi yang disusun		dokumen					
1	03	01	11	2.02	09	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi yang disusun		dokumen					
1	03	01	11	2.02	10	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Dokumen Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi yang disusun		dokumen					
1	03	01	11	2.02	11	Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi	Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi yang disusun		dokumen					
1	03	01	11	2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) yang diselesaikan		%		-	-		-
1	03	01	11	2.03	01	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten	Dokumen Peraturan dan SOP Terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten yang disusun		dokumen					
1	03	01	11	2.03	02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah perusahaan yang diberikan Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional		perusahaan					
1	03	01	11	2.03	03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Laporan pelaksanaan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi		laporan					
1	03	01	11	2.03	04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait Ijuk Nasional	Laporan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait Ijuk Nasional		laporan					
1	03	01	11	2.03	05	Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah diterbitkan	Laporan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah diterbitkan		laporan					
1	03	01	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Cakupan penyelenggaraan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		%		-	-		-
1	03	01	11	2.04	01	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Dokumen SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi yang disusun		dokumen					
1	03	01	11	2.04	02	Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		orang					
1	03	01	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Laporan pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		laporan					

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
1	03	01	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	cakupan penyelenggaraan penataan ruang kabupaten		%		-	754.997.920		984.999.060
1	03	01	12	2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Persentase ketersediaan RTRW dan RRTR kabupaten				-	624.999.360		924.999.360
1	03	01	12	2.01	01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten	Dokumen RTRW Kabupaten yang telah diberikan/dilakukan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi		dokumen					
1	03	01	12	2.01	02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten	Dokumen RRTR Kabupaten yang telah diberikan/dilakukan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi		dokumen					
1	03	01	12	2.01	03 Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang yang ditetapkan	2	dokumen			600.000.000	3	900.000.000
1	03	01	12	2.01	04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah peserta Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	30	orang			24.999.360	30	24.999.360
1	03	01	12	2.02	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten	Cakupan penyelenggaraan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten		%		-	-		-
1	03	01	12	2.02	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten		laporan					
1	03	01	12	2.02	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten		laporan					
1	3	01	12	2.02	03 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Laporan pelaksanaan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang		laporan					
1	03	01	12	2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten	Cakupan penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten		%		-	99.998.860		30.000.000
1	03	01	12	2.03	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		laporan					30.000.000
1	3	01	12	2.03	02 Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang yang disediakan	1	sistem informasi			99.998.860		
1	03	01	12	2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten	Cakupan penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten		%		-	29.999.700		29.999.700
1	03	01	12	2.04	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang		laporan					
1	03	01	12	2.04	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang		laporan					
1	03	01	12	2.04	03 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan Ruang	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan Ruang yang disediakan biaya Operasional		orang					
1	03	01	12	2.04	04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Laporan pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	laporan			29.999.700	1	29.999.700
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	04	01			Dinas Perumahan dan Permukiman					52.599.396.654	30.446.890.593		39.283.203.943
1	03	01	05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase air limbah yang telah dikelola secara sistematis		%		6.380.291.000	2.035.000.000		2.035.000.000
1	03	01	05	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten	Persentase wilayah perkotaan yang telah dilayani dengan sistem air limbah domestik		%		6.380.291.000	2.035.000.000		2.035.000.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
1	03	01	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten	Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten yang disusun		dokumen					
1	03	01	05	2.01	02	Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dilakukan Supervisi dalam Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan	1	unit			10.000.000	1	10.000.000
1	03	01	05	2.01	03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dibangun	2	unit		3.080.291.000	1.000.000.000	2	1.000.000.000
1	03	01	05	2.01	04	Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang direhabilitasi		unit					
1	03	01	05	2.01	05	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang ditingkatkan	1	unit		3.300.000.000	1.000.000.000	1	1.000.000.000
1	03	01	05	2.01	06	Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah unit Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang disediakan		unit					
1	03	01	05	2.01	07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah peserta kegiatan Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik		orang					
1	03	01	05	2.01	08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah peserta Sosialisasi	100	orang			25.000.000	100	25.000.000
1	03	01	05	2.01	09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah SDM dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dibina		orang					
							Jumlah Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikembangkan		unit					
1	03	01	05	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang disediakan biaya operasi dan pemeliharaan		unit					
1	03	01	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Luas Ruang Terbuka Hijau yang ditata	49	Ha		1.300.000.000	1.410.000.000		1.410.000.000
1	03	01	07	2.01		<i>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten</i>	<i>Persentase Infrastruktur permukiman dalam kondisi baik</i>		%		<u>1.300.000.000</u>	<u>1.410.000.000</u>		<u>1.410.000.000</u>
1	03	01	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	Jumlah infrastruktur Kawasan Permukiman yang dibangun dan dikembangkan	1	unit/ paket		1.300.000.000	1.300.000.000		1.300.000.000
							Pembangunan/Penataan Pedestrian Jalan Gunung Latimojong Kota Belopa	1.500,00	M	2.850.000.000,00				
							Pembangunan/Penataan Pedestrian Jalan Poros Pammanu Ke-RSUD Batara Guru	1.300,00	M	4.173.000.000,00				
							Pembangunan/Penataan Pedestrian Jalan Topoka Ke Tampunia Radda	3.000,00	M	5.700.000.000,00				
							Pembangunan Penataan/Pedestrian Jalan Poros Negara (Depan Ruiah Bupati)	4.000,00	M	8.740.000.000,00				
							Pembangunan Penataan / Pedestrian jalan menuju Bandara	2.500,00	M	3.725.000.000,00				
							Pembangunan Penataan/Pedestrian Jalan Poros Negara (Jalan Topoka)	2.600,00	M	4.115.850.000,00				
							Pembangunan Trotoar Jalan Pramuka Jalan Andi Kakke, jalan Pelabuhan, Desa Lamunre Tengah	2.000,00	M	1.000.000.000,00				
1	03	01	07	2.01	02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman yang dipelihara	10	unit			100.000.000	10	100.000.000
1	03	01	07	2.01	03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	Laporan pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman	2	laporan			5.000.000	2	5.000.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
1	03	01	07	2.01	04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	Laporan pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	2	laporan			5.000.000	2	5.000.000
1	03	01	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase area kawasan kumuh		%		-	2.325.000.000		2.325.000.000
1	03	01	09	2.01		<i>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten</i>	<i>Cakupan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya</i>		%		-	2.325.000.000		2.325.000.000
1	03	01	09	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten	Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten yang disusun		dokumen					
1	03	01	09	2.01	02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Laporan pelaksanaan Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		laporan					
1	03	01	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Volume penataan bangunan yang dilaksanakan		m2			2.300.000.000		2.300.000.000
							Penataan halaman Kantor Bupati			1.000.000.000				
							Pembangunan Tribun belakang Rujab Bupati			1.000.000.000				
							Pembangunan rest area kantor bupati			300.000.000				
1	03	01	09	2.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Laporan pelaksanaan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		laporan					
1	03	01	09	2.01	05	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan		kelompok					
1	03	01	09	2.01	06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Laporan pelaksanaan Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	5	laporan			25.000.000	5	25.000.000
1	04					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	04	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		5.304.731.654	4.858.554.433	100	4.948.867.783
1	04	01	01	2.01		<i>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu</i>	100,00	%		22.000.000	160.339.610	100	91.339.600
1	04	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan	22.000.000	7.491.100	2	7.491.100
1	04	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website		104.000.010		35.000.000
1	04	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		7.993.100	4	7.993.100
1	04	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)		26.480.000	6	26.480.000
1	04	01	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		14.375.400	1	14.375.400
1	04	01	01	2.02		<i>Administrasi Keuangan</i>	<i>Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu</i>	100,00	%		2.741.506.654	2.787.883.168	100	2.885.041.528
1	04	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	420	OB		2.712.000.404	2.775.953.148	420	2.873.111.508
1	04	01	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen		7.000.000	1.999.620	3	1.999.620
1	04	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			4.930.400	14	4.930.400

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
1	04	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan		22.506.250	5.000.000	1	5.000.000
1	04	01	01	2.03		Administrasi Umum	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		2.331.725.000	1.830.331.655	100	1.793.271.655
							Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
1	04	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	700	Surat		11.700.000	11.700.000		11.700.000
1	04	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		77.760.000	80.880.000		80.880.000
1	04	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	46	unit		46.000.000	88.000.000		88.880.000
1	04	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	504	OB		492.900.000	571.950.000	504	571.950.000
1	04	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB		40.600.000	33.600.000		33.600.000
1	04	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan		unit/ paket					
1	04	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	20	Jenis		20.000.000	25.045.500	20	25.045.500
1	04	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7	Jenis		18.000.000	17.990.000	7	17.990.000
1	04	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	jenis		6.000.000	6.000.000		6.060.000
1	04	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8	unit			65.960.000	2	65.960.000
1	04	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	10	jenis			1.000.000		
1	04	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	26	jenis		50.000.000	32.160.000		32.160.000
1	04	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	7	jenis		20.000.000	20.053.555		20.053.555
1	04	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3	jenis		55.000.000	55.250.000	3	55.250.000
1	04	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	77	OK		550.000.000	385.000.000		385.000.000
						Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	291	OK		72.714.000	72.714.000		72.714.000
1	04	01	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan		unit					
1	04	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		OK					
1	04	01	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
1	04	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		unit		179.076.000	61.308.600	15	61.308.600
1	04	01	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
1	04	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		jenis					
1	04	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan		unit		8.025.000			
1	04	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor		jenis		200.500.000	100.000.000		100.000.000
1	04	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	1	unit			37.000.000		
1	04	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	24	unit		70.000.000	99.720.000		99.720.000
1	04	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set			10.000.000		10.000.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
1	04	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set		15.000.000	15.000.000		15.000.000
1	04	01	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
1	04	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit		358.450.000			
1	04	01	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
1	04	01	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat	1	unit		40.000.000	40.000.000		40.000.000
1	04	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		209.500.000	80.000.000	100	179.215.000
1	04	01	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
1	04	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		stell/ pasang		71.500.000		60	72.215.000
1	04	01	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang		17.500.000			
1	04	01	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang				60	27.000.000
1	04	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		stell/ pasang					
1	04	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang					
1	04	01	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	50	orang		120.500.000	30.000.000	50	30.000.000
1	04	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	4	orang			50.000.000	4	50.000.000
1	04	01	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah layak huni	21	%		50.000.000	1.090.000.000		1.010.000.000
1	04	01	02	2.01		Pendataan, Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Persentase korban bencana yang dilakukan penyediaan dan rehabilitasi rumah	100	%		50.000.000	105.000.000		105.000.000
1	04	01	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten	Laporan hasil Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten	1	laporan			20.000.000	1	20.000.000
1	04	01	02	2.01	02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Laporan hasil Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1	laporan			10.000.000	1	10.000.000
1	04	01	02	2.01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Laporan hasil Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1	laporan			10.000.000	1	10.000.000
1	04	01	02	2.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Laporan hasil Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	1	laporan			10.000.000	1	10.000.000
1	04	01	02	2.01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten	Jumlah desa yang didata dan diverifikasi	6	desa		50.000.000	50.000.000	6	50.000.000
1	04	01	02	2.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Laporan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	1	laporan			5.000.000	1	5.000.000
1	04	01	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Persentase korban bencana yang diberikan sosialisasi penyediaan, rehabilitasi dan relokasi	100	%		-	75.000.000		75.000.000
1	04	01	02	2.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah peserta Sosialisasi	300	orang			25.000.000	300	25.000.000
1	04	01	02	2.02	02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Jumlah peserta Sosialisasi	300	orang			25.000.000	300	25.000.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
1	04	01	02	2.02	03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah peserta Sosialisasi	300	orang			25.000.000	300	25.000.000
1	04	01	02	2.02	04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah anggota Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator yang dilatih		orang					
1	04	01	02	2.02	05	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah lokasi Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana		lokasi					
1	04	01	02	2.02	06	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Dokumen hasil Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan		dokumen					
1	04	01	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Jumlah rumah korban bencana yang dibangun dan direhabilitasi		unit		-	700.000.000		700.000.000
1	04	01	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana yang direhabilitasi	10	unit			250.000.000	10	250.000.000
1	04	01	02	2.03	02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Dokumen Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	6	dokumen			50.000.000	6	50.000.000
1	04	01	02	2.03	03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana yang diadakan		Ha					
1	4	01	2	2.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana yang dibangun	10	unit			400.000.000	10	400.000.000
1	04	01	02	2.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten yang dibangun		unit					
1	04	01	02	2.03	06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten	Jumlah Lingkungan Perumahan yang disediakan biaya operasional dan pemeliharaan		lokasi					
1	04	01	02	2.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Persentase rumah korban bencana yang telah didistribusikan dan diserahkan kepada yang berhak		%		-	10.000.000		10.000.000
1	04	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten atau Relokasi Program Kabupaten	Jumlah lokasi pembagian rumah bagi Korban Bencana Kabupaten atau Relokasi Program Kabupaten		lokasi					
1	04	01	02	2.04	02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten atau Relokasi Program Kabupaten	Dokumen Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten atau Relokasi Program Kabupaten	1	dokumen			10.000.000	1	10.000.000
1	04	01	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Cakupan penyelenggaraan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		%		-	-		-
1	04	01	02	2.05	01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun yang difasilitasi		lembaga/orang					
1	04	01	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		dokumen					
1	04	01	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase permohonan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang difasilitasi		%		-	200.000.000		120.000.000
1	04	01	02	2.06	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah permohonan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik yang difasilitasi	10	permohonan			100.000.000	10	20.000.000
1	04	01	02	2.06	02	Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Laporan hasil Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana		laporan					
1	04	01	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	20	laporan			100.000.000	20	100.000.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
1	04	01	02	2.06	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum		laporan					
1	04	01	02	2.07		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Persentase permohonan SKGB yang difasilitasi		%		-	-		-
1	04	01	02	2.07	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)		laporan					
1	04	01	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Persentase kawasan kumuh kabupaten yang tertata	22	%		6.408.131.500	3.403.336.160		3.349.336.160
1	04	01	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Permohonan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang difasilitasi		%		68.336.160	268.336.160		268.336.160
1	04	01	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi secara Elektronik	Laporan hasil Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi secara Elektronik		laporan					
1	04	01	03	2.01	02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang disusun dan/atau Review serta Legalisasi	30	dokumen			200.000.000	30	200.000.000
1	04	01	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Laporan hasil pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	14	laporan		68.336.160	68.336.160	14	68.336.160
1	04	01	03	2.02		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah kawasan permukiman kumuh yang ditata		kawasan		-	135.000.000		81.000.000
1	04	01	03	2.02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh	Laporan hasil Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh	1	laporan			13.000.000	1	7.000.000
1	04	01	03	2.02	02	Penyusunan Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Dokumen Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	20	dokumen			50.000.000	5	2.000.000
1	04	01	03	2.02	03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	5	kelompok			10.000.000	5	10.000.000
1	04	01	03	2.02	04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah peserta pertemuan untuk Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	100	orang			15.000.000	100	15.000.000
1	04	01	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Laporan hasil pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	10	laporan			30.000.000	10	30.000.000
1	04	01	03	2.02	06	Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah lokasi Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	15	lokasi			15.000.000	15	15.000.000
1	04	01	03	2.02	07	Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Dokumen Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	15	dokumen			2.000.000	15	2.000.000
1	04	01	03	2.03		Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah rumah kumuh dikawasan rumah permukiman kumuh yang ditingkatkan		unit		6.339.795.340	3.000.000.000		3.000.000.000
1	04	01	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen yang disusun	1	dokumen			150.000.000	1	150.000.000
1	04	01	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	100	unit		4.461.317.000	1.000.000.000	100	1.000.000.000
							Jumlah rumah tidak layak huni yang disediakan bagi MBR	100	unit				100	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan					Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
												Target	Pagu Indikatif
(1)	(2)					Tolok Ukur	Target	(8)			(9)	(10)	(11)
						Penyediaan perumahan bagi MBR			430.000.000				
						Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya di kawasan permukiman kumuh (DAK Reguler)			2.975.000.000				
						Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di Kawasan Permukiman Kumuh (DAK Reguler)			1.056.317.000				
						Pembangunan Rumah Baru Masyarakat miskin	5	unit	175.000.000			5	
						Pembangunan Rumah Keluarga Tidak Mampu	5	unit	175.000.000			2	
						Pembangunan Rumah Keluarga Tidak Mampu	5	unit	175.000.000			2	
						Pembangunan Rumah Keluarga Tidak Mampu	5	unit	175.000.000			5	
						Pembangunan Rumah Keluarga Tidak Mampu	5	unit	175.000.000			5	
						Pembangunan Rumah Keluarga Tidak Mampu	5	unit	175.000.000			5	
						Pembangunan Rumah Keluarga Tidak Mampu	5	unit	175.000.000			4	
						Pembangunan Rumah Baru	10	unit	350.000.000			10	
						Pembangunan Rumah Nelayan	50	unit	6.000.000.000				
						Penyediaan Rumah layak huni	5	unit	175.000.000				
						Pembangunan Rumah Baru Bagi Masyarakat Yang Belum Memiliki Rumah	5	unit	175.000.000			5	
						Pembangunan rumah baru bagi MBR	5	unit	175.000.000			5	
						Pembangunan rumah baru bagi MBR	5	unit	175.000.000			5	
						Pembangunan rumah baru bagi MBR	5	unit	175.000.000			5	
						Pembangunan baru bagi MBR (KK yang masih menumpang dengan KK lain atau belum memiliki Rumah)	10	unit	350.000.000			10	
						Pembangunan baru bagi MBR (KK yang masih menumpang dengan KK lain atau belum memiliki Rumah)	5	unit	175.000.000			5	
1	04	01	03	2.03	03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah rumah tidak layak huni dan PSU yang dilakukan perbaikan	100	unit	1.797.852.000	1.750.000.000	100	1.750.000.000
						Pembanguna Rumah Tidak Layak Huni	14	KK	210.000.000			14	
						Pembanguna Rumah Tidak Layak Huni	25	KK	375.000.000			25	
						Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	7	unit	105.000.000				
						Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	10	unit	150.000.000			10	
						Bedah Rumah	10	unit	150.000.000				
						Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	13	unit	195.000.000			12	
						Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	13	unit	195.000.000			12	
						Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Mbr Desa Bonglo	10	unit	150.000.000			5	
						Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bagi Mbr Desa Uraso	14	unit	210.000.000				
						Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bagi Mbr Desa Salubua	5	unit	75.000.000			5	
						Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bagi Mbr Desa Barana	10	unit	150.000.000			10	
						Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bagi Mbr Desa Dampas	5	unit	75.000.000			5	
						Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bagi Mbr Desa Maingo	14	unit	210.000.000				
						Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bagi Mbr Desa Tasang Tongkonan	15	unit	225.000.000				
						Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bagi Mbr Desa Ta'Ba	10	unit	150.000.000				
						Rehab Rumah Tidak Layak Huni Desa Posi	10	unit	150.000.000			10	
						Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kel.Sakti	10	unit	150.000.000			10	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
		Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
		Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa Lengkong	10	unit	150.000.000			10	
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni Desa Bukit Harapan	10	unit	150.000.000			10	
		Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa Puty	10	unit	150.000.000			10	
		Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa Raja	15	unit	225.000.000			15	
		Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bagi Mbr	10	unit	150.000.000			10	
		Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bagi Mbr	10	unit	150.000.000			10	
		Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bagi Mbr	5	unit	75.000.000			10	
		Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bagi Mbr	15	unit	225.000.000			10	
		Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bagi Mbr	10	unit	150.000.000			10	
		Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bagi Mbr	10	unit	150.000.000			5	
		Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bagi Mbr	10	unit	150.000.000				
		Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bagi Mbr	25	unit	375.000.000			25	
		Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bagi Mbr	5	unit	75.000.000			5	
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	15	unit	225.000.000			15	
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	15	unit	225.000.000			15	
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	10	unit	150.000.000			10	
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	10	unit	150.000.000			10	
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	15	unit	225.000.000			15	
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	10	unit	150.000.000			10	
		Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni / Bedah Rumah	15	unit	225.000.000			15	
		Bedah Rumah Desa Tabang	15	unit	225.000.000				
		Bedah Rumah Desa To'Barru	10	unit	150.000.000				
		Bedah Rumah Desa Tolajuk	15	unit	225.000.000				
		Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsp) Desa Ranteballa	10	unit	150.000.000			10	
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	15	KK	225.000.000			15	
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni Lingk. Rotto	15	KK	225.000.000			15	
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni Lingk. Pelita	15	KK	225.000.000			15	
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni Lingk. P.Cenrana Timur	15	unit	225.000.000			15	
		Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	15	unit	225.000.000			15	
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni Dsn Iri, Dsn Salunase, Dsn Paerun	15	unit	225.000.000			15	
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	15	unit	225.000.000			15	
		Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Mbr)	10	unit	150.000.000				
		Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Mbr)	10	unit	150.000.000			10	
		Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Mbr)	10	unit	150.000.000			10	

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
							Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Mbr)	5	unit	75.000.000			5	
							Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Mbr)	10	unit	150.000.000			10	
							Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Mbr)	10	unit	150.000.000			10	
							Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Mbr)	20	unit	300.000.000			20	
							Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Mbr)	20	unit	300.000.000			20	
							Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Mbr)	5	unit	75.000.000			5	
							Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Mbr)	15	unit	225.000.000			15	
							Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bagi Mbr (4 Dusun)	15	unit	225.000.000			15	
							Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bagi Mbr (6 Dusun)	15	unit	225.000.000			15	
							Peningkatan Rumah Layak Huni / Bedah Rumah	15	unit	225.000.000			15	
							Peningkatan Rumah Layak Huni / Bedah Rumah	15	unit	225.000.000			15	
							Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps)	10	unit	150.000.000			10	
							Rumah Nelayan	50	unit	750.000.000				
							Rehab Rumah Tidak Layak Huni	25	unit	375.000.000			25	
							Rehab Rumah Tidak Layak Huni	25	unit	375.000.000			25	
							Rehab Rumah Tidak Layak Huni	15	unit	225.000.000			15	
							Rehab Rumah Tidak Layak Huni	10	unit	150.000.000			10	
							Rehab Rumah Tidak Layak Huni	5	unit	75.000.000			5	
							Rehab Rumah Tidak Layak Huni	5	unit	75.000.000			5	
							Bedah Rumah Tidak Layak Huni	5	unit	75.000.000			5	
							Bedah Rumah Tidak Layak Huni	10	unit	150.000.000			10	
							Bantuan Rumah Layak Huni	10	unit	150.000.000			10	
							Bantuan Rumah Layak Huni	5	unit	75.000.000			5	
							Bantuan Rumah Layak Huni	10	unit	150.000.000			10	
							Bantuan Rumah Layak Huni	10	unit	150.000.000			10	
							Bantuan Rumah Layak Huni	5	unit	75.000.000			5	
							Bantuan Rumah Layak Huni	10	unit	150.000.000			10	
							Bantuan Rumah Layak Huni	10	unit	150.000.000			10	
							Bantuan Rtlh Desa Cimpu Utara	5	unit	75.000.000			5	
							Bantuan Rtlh Desa Malela	10	unit	150.000.000			10	
1	04	01	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Laporan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	10	laporan		80.626.340	100.000.000	10	100.000.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
1	04	01	03	2.03	05	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh yang diberikan Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara		Kepala Keluarga					
1	04	01	04			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan penyelenggaraan PSU	100,00			33.156.242.500	15.300.000.000		24.180.000.000
1	04	01	04	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					33.156.242.500	15.300.000.000		24.180.000.000
1	04	01	04	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	10	dokumen		735.600.000	1.000.000.000	10	1.000.000.000
1	04	01	04	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah PSU di perumahan untuk menunjang fungsi hunian yang disediakan	150	unit		32.268.869.500	14.200.000.000	152	14.200.000.000
						Jumlah kawasan permukiman perdesaan yang dibangun dan ditingkatkan				5.673.484.000				
						REVITALISASI								
						- LAPANGAN PADANG SAPPA								
						- LAPANGAN ANDI JEMMA				5.000.000.000				
						- LAPANGAN BUA				1.500.000.000				
						- LAPANGAN BATUSITANDUK				2.000.000.000				
						- LAPANGAN ILLAN BATU				500.000.000				
						PAGAR ASRAMA MAHASISWA LUWU JLN. SUNNU				200.000.000				
						Reses				5.000.000.000				
						Pembanguna Plat Deutcker Poros Bajo - Kadong-Kadong Dsn Kadong-Kadong	2	unit		100.000.000			2	
						Jalan Alternatif/Lorong Perumahan Dusun Pakebangan	1.000	m		100.000.000				
						Jalan Alternatif/ Lorong Perumahan Dusun Bailing	1.020	m		100.000.000				
						Peningkatan Kualitas Jalan Pemukiman Dusun Bide	1.000	m		100.000.000				
						Peningkatan Kualitas Jalan Masuk Sman 14 Luwu Dusun Benteng Datu	300	m		50.000.000				
						Pembangunan Rabat Beton Jalan Dalam Desa	500	m		500.000.000			500	
						Rabat Penuh Jalan Ke Masjid Raya Bonelemo Dusun Bonelemo	200	m		250.000.000				
						Rabat Beton (Penataan Kawasan Permukiman)	200	m		250.000.000				
						Rabat Beton Lingkungan Permukiman	750	m		800.000.000			750	
						Pengkrikilan Lingkungan Permukiman	1.250	m		150.000.000			1.250	
						Rabat Beton	75	m2		80.000.000				
						Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Desa To'Bia Kec. Ponsel		m		100.000.000				
						Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Desa Kursumanga Kec. Belopa		m		100.000.000				
						Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Desa Tettekang Kac. Bajo Barat		m		100.000.000				
						Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Desa Sampeang Kac. Bajo Barat		m		100.000.000				
						Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Desa Kadong-Kadong Kac. Bajo Barat		m		100.000.000				
						Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Desa Bonelemo Kac. Bajo Barat		m		100.000.000				
						Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Desa Sampa Kec. Bajo		m		100.000.000				

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
		Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Desa Lampuara Kec. Ponrang Selatan		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Desa Olang Kec. Ponrang Selatan		m	120.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Desa Bassiang Kec. Ponrang Selatan		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Desa Buntu Karya Kec. Ponrang Selatan		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Desa Muladimeng Kec. Ponrang		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Desa Buntu Kamiri Kec. Ponrang		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Desa Tampa Kec. Ponrang		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Desa Tirowali Kec. Ponrang		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Desa Riwang Kec. Larompong		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Desa Koriba Kec. Larompong		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Desa Riwang Selatan Kec. Larompong		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Desa Balla Kec. Bajo		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Desa Jambu Kec. Bajo		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Desa Cimpu Kec. Suli		m	120.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Desa Salupareman Kec. Kamanre		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Desa Libukang Kec. Kamanre		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Desa Batu Lappa Kec. Larompong Selatan		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Desa Belopa Kec. Belopa		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Desa Wara Kec. Kamanre		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Desa Lauwa Kec. Belopa Utara		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Desa Pattedong Selatan Kec. Ponrang Selatan		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Desa Kasiwang Kec. Suli		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Desa Bilante Kec. Larompong		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Desa Buntukarya Kec. Ponsel		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Dusun Dadeko Desa Kadong-Kadong Kec. Bajobarat		m	100.000.000				

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
		Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Desa Padang Kamburi Kec. Bupon		m	120.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Desa Cakkeawo Kec. Suli		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Desa Buntu Barana Kec. Suli Barat		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Desa Tallang Kec. Suli Barat		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Desa Kaili Kec. Suli Barat		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Desa Lebani Kec. Belopa Utara		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Desa Lamunre Kec. Belopa Utara		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Desa Lamunre Tengah Kec. Belopa Utara		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Desa Balubu Kec. Belopa		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Desa Babang Kec. Larompong Selatan		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Desa Tawondu Kec. Suli		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Desa Kamanre Kec. Kamanre		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Desa Saluparewang Selatan Kec. Kamanre		m	120.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Desa Senga Selatan Kec. Belopa		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Desa Temboe Kec. Larompong Selatan		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Desa Bunga Eja Kec.Kamanre		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Desa Seppong Kec. Belopa Utara		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Desa Paccerakang Kec. Ponsel		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Desa Karang-Karangan Kec. Bua		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Desa Cimpu Kec. Suli		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Desa Bonelema Kec. Bajobarat		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Desa Tanjong Kec. Bupon		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Jl. Bunga Lalang Desa Lamunre Tengah Kec. Belut		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Btn Barana Lestari Desa Lamunre Tengah Kec. Belut		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Desa Botta Kec. Suli		m	120.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Desa Kaili Kec. Suli Barat		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Desa Padang Kalua Kec. Bua		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Desa Kasiwang Kec. Suli		m	100.000.000				

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
		Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Desa Pompengan Pantai Kec. Lamasi Timur		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Desa Balla Kec. Bajo		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Desa Raja Kec. Bua		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Desa Rumaju Kec. Bajo		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Desa Lengkong Kec. Bua		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Desa Bakti Kec. Ponrang Selatan		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Desa Mario Kec. Ponrang		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Desa Jenne Maeja Kec. Ponrang Selatan		m	100.000.000				
		Jumlah kawasan minapolitan dan agropolitan yang dibangun dan ditingkatkan			642.150.500				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Agropolitan Desa Kadundung Kec. Latimojong		m	130.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Agropolitan Dusun Timbang Desa Rante Alang Kec. Larompong		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Agropolitan Dusun Kalewangan Desa Binturu Kec. Larompong		m	115.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Agropolitan Desa Salubua Kec. Suli Barat		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Agropolitan Desa Kaladi Darussalam Kec. Suli Barat		m	130.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Agropolitan Desa Gandang Batu Kec. Larompong Selatan		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Minapolitan Desa Paconne Kec. Belopa Utara		m	100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Minapolitan Desa Wara Kec. Kamanre		m	130.000.000				
		Jumlah kawasan permukiman perkotaan yang dibangun dan ditingkatkan			927.375.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Perkotaan Kelurahan Balo-Balo Kec. Belopa			100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Perkotaan Kelurahan Sabe Kec. Belopa Utara			100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Perkotaan Kelurahan Senga Kec. Belopa			100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Perkotaan Kelurahan Padang Sappa Kec. Ponrang			100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Perkotaan Kel. Tampumia Radda Kec. Belopa			120.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Perkotaan Kel. Bajo Kec. Bajo			120.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Perkotaan Kel. Cilallang Kec. Kamanre			150.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Perkotaan Kel. Pammanu Kec. Belopa Utara			120.000.000				

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
		Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Perkotaan Kel. Lindajang Kec. Suli Barat			100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Perkotaan Kel. Pattedong Kec. Ponrang Selatan			100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Perkotaan Kel. Larompong Kec. Larompong			100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Perkotaan Kel. Suli Kec. Suli			100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Perkotaan Kel. Bosso Kec. Walenrang Utara			100.000.000				
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Perkotaan Kel. Lamasi Kec. Lamasi			100.000.000				
		Pembangunan dan revitalisasi infrastruktur ruang publik pada pusat pelayanan kawasan dan pusat pelayanan lingkungan Kabupaten Luwu			19.730.131.000				
		Drainase			2.384.660.000				
		Pembangunan Drainase Pemukiman	200	m	160.000.000				
		Rehab Drainase Dusun Batete (972)	100	m	50.000.000				
		Pembangunan Drainase Dusun Batete	500	m	400.000.000				
		Pembangunan Drainase Samping Puskesmas Bajo Barat Dusun Baloa	300	m	240.000.000				
		Pembangunan Drainase Di Dusun Salu Tallang	300	m	240.000.000			300	240.000.000
		Pembangunan Drainase Jalan Tani Kombong	3000	m					
		Pembangunan Drainase Pemukiman Jalan Lingkar Dsn Tumbubara	200	m	160.000.000			200	160.000.000
		Pembangunan Plat Deuctker	2	unit	100.000.000				
		Pembangunan Talud Dusun Tettekang	300	m					
		Pembuatan Talud Dan Drainase Kantor Camat Basse Sangtempe Utara	180	m	250.000.000				
		Peningkatan Pembangunan Drainase Desa Bonglo-Desa Barana	600	m	480.000.000			600	480.000.000
		Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan	200	m	160.000.000			200	160.000.000
		Pembangunan Darinase Desa Balutan	200	m	160.000.000			300	240.000.000
		Pembangunan Drainase Jalan Lingkungan Dsn. Kaluku Mariri	200	m	160.000.000			200	160.000.000
		Pembangunan Drainase Pasar Rakyat To'Lemo	200	m	160.000.000				
		Pembangunan Drainase Poros To'Lemo Sinangkala	100	m	80.000.000				
		Pembangunan Talud Jalan Poros Dusun Pararra	1500	m					
		Talud	600	m2	480.000.000				
		(Pembangunan Drainase)	500	m	400.000.000			500	400.000.000
		(Pembangunan Saluran Drainase)	250	m	200.000.000			250	200.000.000
		Pembangunan Plat Decker Dilingkungan Permukiman	2	unit	100.000.000			2	100.000.000
		Pembuatan Drainase & Penimbunan Depan Pemakaman Islam Desa Babang	100	m	80.000.000				
		Pembuatan Drainase	500	m	400.000.000			500	400.000.000
		Pembuatan Drainase Samping Pasar Keppe	200	m	160.000.000			200	160.000.000
		Pembangunan Drainase Di Dusun Mandaiso	200	m	160.000.000			200	160.000.000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
		Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
		Drainase Jalan Poros Desa Muhajirin - Desa Salubua	500	m	400.000.000			500	400.000.000
		Pembangunan Drainase Dusun Pangi - Batas Desa Kali	500	m	400.000.000			500	400.000.000
		Pembangunan Drainase Kawasan Permukiman Perdesaan Jalan Poros Desa Salubua	500	m	400.000.000			500	400.000.000
		Plat Ducker Poros Desa Muhajirin	2	unit	100.000.000			2	100.000.000
		Pembangunan Drainase Dsn Padang To'Luwu	500	m	400.000.000			500	400.000.000
		Pembangunan Drainase Dsn Talluara	500	m	400.000.000			500	400.000.000
		Pembangunan Drainase Dsn Lewo	500	m	400.000.000			500	400.000.000
		Pembangunan Drainase Dsn Salulino	250	m	200.000.000			250	200.000.000
		Pembangunan Drainase Dsn Lino	250	m	200.000.000			250	800.000.000
		Pembangunan Drainase Lingk To'Belalang	300	m	240.000.000			300	240.000.000
		Pembangunan Drainase Dsn Pa'Buntuan	250	m	200.000.000			250	800.000.000
		Pembangunan Drainase Lingk Padang	400	m	320.000.000			400	320.000.000
		Pembuatan Drainase Di Permukiman		m					
		Dranase Pemukiman Pedesaan Dsn Tombang Dan Dsn Batuaja	700	m	560.000.000			600	480.000.000
		Pembangunan Drainase Dusun Dadeko (Jalan Pekuburan)	200	m	160.000.000			100	80.000.000
		Pembangunan Plat Dekker	1	Unit	50.000.000			1	50.000.000
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Perkotaan (Plat Dekker) Di Lingkungan Pabuntang	1	Unit	50.000.000			1	50.000.000
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Perkotaan (Plat Dekker) Di Lingkungan Lengkong Riri	1	Unit	50.000.000			1	50.000.000
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Perkotaan (Plat Dekker) Di Lingkungan Bulawenna	1	Unit	50.000.000				
		Pembuatan Saluran Pembuangan	90	m	72.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Desa Muhajirin Kec. Suli Barat		m	100.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Desa Buntu Barana Kec. Suli Barat		m	100.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Desa Riwang Kec. Larompong		m	100.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Desa Senga Selatan Kec. Belopa		m	180.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Desa Balubu Kec. Belopa		m	130.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Kel. Noling Selatan Kec. Bupon		m	100.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Kel. Larompong Kec. Larompong		m	125.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Desa Tanarigella Kec. Bua		m	115.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Desa Balla Kec. Bajo		m	100.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Kel. Bajo Kec. Bajo		m	100.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Kel. Padang Subur Kec. Ponrang		m	100.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Kel. Suli Kec. Suli		m	100.000.000				

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
		Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
		Pembangunan Saluran Drainase Desa Tallang Bulawang Kec. Bajo		m	100.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Desa Karang-Karangan Kec. Bua		m	100.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Desa Puty Kec. Bua		m	100.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Desa Barowa Kec. Bua		m	100.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Kel. Sakti Kec. Bua		m	100.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Toddopuli Kec. Bua		m	100.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Desa Seppong		m	100.000.000				
		Pembangunan Talud Desa Buntu Sarek Kec. Latimojong		m	100.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Kelurahan Sabe Kec. Belopa Utara		m	100.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Kelurahan Tampumia Radda Kec. Belopa		m	100.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Desa Poringan Kec. Suli Barat		m	100.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Dusun Kalawa Desa Riwang Selatan Kec. Larompong		m	130.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Desa Rantebelu Kec. Larompong		m	100.000.000				
		Pembuatan Plat Duicker Desa Buntu Kunyi Kec. Suli		m	90.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Dsn Buntu Garegge Desa Riwang Sel Kec. Larompong		m	100.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Desa Buntu Kunyi Kec. Suli			100.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Kelurahan Senga Kec. Belopa		m	100.000.000				
		Pembangunan Plat Duicker Desa Salupareman Selatan Kec. Kamanre		m	50.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Desa Olang Kec. Pon-Sel			100.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Desa Kamanre Kec. Kamanre		m	130.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Kel. Cilallang Kec. Kamanre			150.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Desa Tabbaja Kec. Kamanre		m	150.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Desa Toddopuli Kec. Bua			100.000.000				
		Pembangunan Talud Desa Lauwa Kec. Belopa Utara		m	100.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Desa Kasiwang Kec. Suli		m	100.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Kel. Pammanu Kec. Belopa Utara		m	125.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Desa Padang Kalua Kec. Bua		m	100.000.000				
		Pembangunan Plat Duicker Desa Tamba Kec. Ponrang		m	100.000.000				

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
		Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
		Pembangunan Saluran Drainase Desa Mario Kec. Ponrang		m	100.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Desa Bukit Harapan Kec. Bua		m	100.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Desa Buntu Kamiri Kec. Ponrang		m	100.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Desa Tampa Kec. Ponrang			100.000.000				
		Pembangunan Talud Desa Lampuara Kec. Ponrang Selatan			100.000.000				
		Pembangunan Talud Desa Karang-Karangan Kec. Bua			100.000.000				
		Pembangunan Talud Desa Tampa Kec. Ponrang			100.000.000				
		Pembangunan Talud Desa Buntu Kamiri Kec. Ponrang			100.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Desa Marinding Kec. Bajo Barat			100.000.000				
		Pembangunan Talud Desa Komba Dusun Muhajirin Kec. Larompong			100.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Desa To'Pongo Kec. Lamasi			100.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Desa Lalong Kec. Walenrang			100.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Desa Belopa Kec. Belopa			100.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Desa Lamasi Pantai Kec. Walenrang Timur			100.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Desa Sampano Kec.Larompong Selatan			100.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Desa La'Loa Kec. Larompong Selatan			100.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Kel. Pattedong Kec. Ponrang Selatan			100.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Desa Padang Kamburi Kec. Bupon			100.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Desa Bassiang Timur Kec. Ponrang Selatan			100.000.000				
		Pembangunan Saluran Drainase Desa Malewong Kec. Larompong			100.000.000				
		Air Bersih Permukiman			1.146.569.000				
		Pengadaan Mck Dan Air Bersih	1	unit	200.000.000				
		Pengadaan Air Bersih Di Smp Neg. 4 Bastem	1	unit	140.000.000				
		Pembangunan Mck Masjid Al-Mu'Min Desa Padang Kalua	1	paket	100.000.000				
		Pengadaan Sumur Bor & Mck	1	unit	100.000.000				
		Pengadaan Sumur Bor & Mck	2	unit	200.000.000				
		Pengadaan Bak & Pompa	0	unit				1	250.000.000,-
		Pembangunan Mck Majid Dan Pagar Masjid	1	paket	100.000.000				
		Pembangunan Mck Gereja		unit				1	100.000.000
		Pembangunan Mck	1	unit	100.000.000			1	100.000.000
		Pembangunan Mck Lokasi Pasar Rakyat Ponrang Selatan	1	unit	100.000.000			1	100.000.000
		Pembangunan Bak Penampungan Air Bersih	1	paket	100.000.000				

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
		Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
		Peribadatan			661.300.000				
		Pembangunan Pagar Masjid Dahrul Khairat Lingk. Pdng Cenrana Timur	200	m	200.000.000				
		Pembangunan Sarana Dan Prasarana Peribadatan Desa Pasamai Kec. Belopa			130.000.000				
		Pembangunan Sarana Dan Prasarana Peribadatan Kelurahan Sakti Kec. Bua			130.000.000				
		Pembangunan Sarana Dan Prasarana Peribadatan Desa Puty Kec. Bua			130.000.000				
		Makam			1.103.200.000				
		Pembangunan Pagar Pekuburan Desa Lengkong	2	unit	300.000.000				
		Pembangunan Jalan Baru Ke Penguburan	1 km x 4 m	unit	100.000.000				
		Kegiatan Penataan Kuburan Dsn Timmara Lara	1	unit	150.000.000			1	150.000.000
		Pagar Keliling Pemakaman	200	m	150.000.000				
		Pagar Tpu Lingk. Padang	600	m	400.000.000				
		Pembangunan Pagar Kuburan Di Dusun Tombang Dan Dusun To'Dengen	2	Lokasi	300.000.000				
		Pembangunan Pagar Pekuburan Di Dusun Soporannu	150	m	100.000.000				
		Pembuatan Pagar Pekuburan Umum Desa Cimpu	450	m	500.000.000				
		Pembangunan Jalan Pekuburuan,Ruas Jalan Dlm Desa Sangtandung Dusun Paka'Bi	30	m	100.000.000				
		Pebangunan Pagar Kuburan	100	m	170.000.000				
		Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemakaman Desa Bakti Kec. Ponrang Selatan			130.000.000				
		Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemakaman Desa Belopa Kec. Belopa			130.000.000				
		Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemakaman Desa Wara Kec. Kamanre			130.000.000				
		Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemakaman Desa Tabbaja Kec. Kamanre			130.000.000				
		Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemakaman Desa Pasamai Kec. Belopa			130.000.000				
		Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemakaman Desa Buntu Barana Kec. Suli Barat			130.000.000				
		Pembangunan Ruang Terbuka Hijau							
		Lanjutan Pembangunan/Penataan Median Jalan Depan Pasar sentral-RSUD Batara Guru	800,00	M	800.000.000,00				
		Pembangunan/Penataan Median Jalan Kompleks Mesjid Agung	420,00	M	420.000.000,00				
		Paving Blok Kawasan RTH Opu dg. Risaiju	270,00	M	150.000.000,00				
		Paving Blok Area Lapangan Balubu dan Drainase Dusun Balubu	400,00	M	500.000.000,00				
		Pembangunan Trotoar							
		Lanjutan Pembangunan/penataan pedestrian Depan Mesjid Agung Ke-Kantor Perkim	700,00	M	1.396.500.000,00				
		Lanjutan Pembangunan/penataan pedestrian Depan Kantor DPR Ke-Rumah Jabatan	800,00	M	1.695.500.000,00				
		Pembangunan Penataan/Pedestrian Jalan Pemilu (kawasan perkantoran)	620,00	M	1.384.150.000,00				
		Revitalisasi Lapangan Bosso	1	paket	3.500.000.000				

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
1	04	01	04	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka Penyediaan PSU Perumahan	20	laporan		151.773.000	100.000.000		100.000.000
1	04	01	05			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman yang telah terlaksana		%			25.000.000		25.000.000
1	04	01	05	2.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil						25.000.000		25.000.000
1	04	01	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Laoran hasil koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	1	laporan			25.000.000		25.000.000
1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	05	01				Satuan Polisi Pamong Praja					6.558.385.467	6.530.214.001		6.739.910.546
1	05	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		4.100.523.837	4.029.672.371	100	4.239.368.916
1	05	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		40.326.380	37.000.000	100	37.000.000
1	05	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		5.000.000	2	5.000.000
1	05	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website		10.000.000		10.000.000
1	05	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan	15.326.380	10.000.000	4	10.000.000
1	05	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)	25.000.000	10.000.000	6	10.000.000
1	05	01	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		2.000.000	1	2.000.000
1	05	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		3.157.479.017	3.070.931.118	100	3.177.993.707
1	05	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	468	OB		3.134.972.767	3.058.931.118	468	3.165.993.707
1	05	01	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			2.000.000	3	2.000.000
1	05	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			5.000.000	14	5.000.000
1	05	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan		22.506.250	5.000.000	1	5.000.000
1	05	01	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		902.718.440	886.741.253	100	890.925.209
							Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
1	05	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	310	Surat		47.132.250	47.132.250	310	47.132.250
1	05	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		44.400.180	44.400.180	12	44.400.180

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
													Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
1	05	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB					
1	05	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	34	unit		65.650.000	65.650.000	34	65.650.000
1	05	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	216	OB		189.960.000	189.960.000	216	189.960.000
1	05	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB		15.550.000	16.327.500	0	16.327.500
1	05	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan		unit/ paket					
1	05	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	25	Jenis		36.025.295	36.025.295	25	36.025.295
1	05	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3	Jenis			5.000.000	3	5.000.000
1	05	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan		jenis			10.000.000	0	10.000.000
1	05	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		unit					
1	05	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan		jenis					
1	05	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2	jenis		27.000.000	28.350.000	2	28.350.000
1	05	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan		jenis			20.000.000	0	20.000.000
1	05	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3	jenis		20.600.000	20.600.000	3	20.600.000
1	05	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	42	OK		298.854.000	209.197.800	42	213.381.756
1	05	01	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	63	OK		15.030.250	15.781.763	63	15.781.763
1	05	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit					
1	05	01	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit					
1	05	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
1	05	01	01	2.03	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		unit			38.800.000	0	38.800.000
1	05	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
1	05	01	01	2.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		jenis					
1	05	01	01	2.03	26	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan		unit		3.000.000			
1	05	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah meubeleur yang diadakan		unit		30.600.000	30.600.000	5	30.600.000
1	05	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	5	jenis					
1	05	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit					
1	05	01	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	34	unit		92.564.015	92.564.015	34	92.564.015
1	05	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set		16.352.450	16.352.450	0	16.352.450
1	05	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
1	05	01	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
1	05	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit					
1	05	01	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
1	05	01	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
1	05	01	01	2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		-	35.000.000	100	133.450.000
1	05	01	01	2.04	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
1	05	01	01	2.04	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		stell/ pasang					
1	05	01	01	2.04	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan		stell/ pasang					
1	05	01	01	2.04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
1	05	01	01	2.04	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		stell/ pasang				267	93.450.000
1	05	01	01	2.04	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang					
1	05	01	01	2.04	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	160	orang			35.000.000	200	40.000.000
1	05	01	01	2.04	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis		orang					
1	05	01	02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan PERDA	81,95	%		2.457.861.630	2.500.541.630		2.500.541.630
						Persentase Pemenuhan Kompetensi Aparatur sesuai ketentuan	75,00	%					
						Cakupan penyelenggaraan perlindungan masyarakat	100,00	%					
1	05	01	02	2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Cakupan penyelenggaraan peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100	%		2.372.790.630	2.372.790.630		2.372.790.630
1	05	01	02	2.01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah petugas yang melaksanakan patroli	480	OB		721.837.200	721.837.200	480	721.837.200
						Jumlah petugas yang bertugas menjaga kantor/aset Pemda	1.260	OB		1.462.890.000	1.462.890.000	1.260	1.462.890.000
						Jumlah Petugas Huru Hara yang terlibat dalam pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	468	OB					
						Jumlah anggota PRC	252	OB					
1	05	01	02	2.01	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Jumlah kasus penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada yang dilaksanakan		kasus					
1	05	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten	Jumlah pelaksanaan koordinasi	2	kali		61.392.980	61.392.980	2	61.392.980
1	05	01	02	2.01	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota Sat Linmas yang diberdayakan		orang		6.630.950	6.630.950	0	6.630.950
1	05	01	02	2.01	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraia dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satpol PP dan Sat Linmas yang mengikuti pelatihan	1.344	orang		120.039.500	120.039.500	1.344	120.039.500
1	05	01	02	2.01	Pembinaan Jabatan Fungsional Satpol Polisi Pamongpraia	Dokumen pembinaan Jabatan Fungsional Satpol Polisi Pamongpraia		dokumen					
1	05	01	02	2.01	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah MoU dengan lembaga terkait dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		MoU					
1	05	01	02	2.01	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disediakan dan dipelihara		unit					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
1	05	01	02	2.02		Penegakan Perda Kabupaten dan Peraturan Bupati/Walikota	Cakupan penyelenggaraan penegakan perda dan peraturan bupati	100	%		85.071.000	127.751.000		127.751.000
1	05	01	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah peserta sosialisasi		orang				0	-
1	05	01	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Lokasi yang dilakukan pengawasan		lokasi		85.071.000	127.751.000	0	127.751.000
							Jumlah Perda/Perkada yang dilakukan pengawasan atas kepatuhan		Perda/Perkada				0	
1	05	01	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati	Jumlah kasus pelanggaran Perda/Perkada yang ditangani		kasus				0	-
1	05	01	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten	Persentase PPNS yang dilakukan pembinaan secara berkelanjutan	100	%		-	-		-
1	05	01	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang dikembangkan kapasitas dan kariernya		orang					
1	05	02				Badan Penanggulangan Bencana Daerah					5.067.040.663	9.847.205.454		4.882.455.915
1	05	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		2.608.852.373	2.590.252.954	100	3.297.403.415
1	05	02	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		17.800.000	19.000.000	100	19.000.000
1	05	02	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		2.000.000	2	2.000.000
1	05	02	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website		5.000.000		5.000.000
1	05	02	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		5.000.000	4	5.000.000
1	05	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)	17.800.000	5.000.000	6	5.000.000
1	05	02	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		2.000.000	1	2.000.000
1	05	02	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		1.579.990.663	1.810.008.744	100	1.872.939.050
1	05	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	204	OB		1.557.484.413	1.798.008.744	204	1.860.939.050
1	05	02	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			2.000.000	3	2.000.000
1	05	02	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			5.000.000	14	5.000.000
1	05	02	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan		22.506.250	5.000.000	1	5.000.000
1	05	02	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		1.011.061.710	761.244.210	100	1.385.664.364
							Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
1	05	02	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi		Surat		3.000.000	3.000.000	0	3.000.000
1	05	02	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		41.600.000	41.600.000	12	41.600.000
1	05	02	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB					
1	05	02	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan		unit		18.250.000	18.432.500		327.958.827

KODE							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
														Target	Pagu Indikatif
(1)							(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
1	05	02	01	2.03	07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	300	OB		241.320.000	241.320.000	300	241.320.000
1	05	02	01	2.03	08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB		18.000.000	18.000.000		327.958.827
1	05	02	01	2.03	09		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan		unit/ paket					
1	05	02	01	2.03	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan		Jenis		30.391.710	30.391.710	0	30.391.710
1	05	02	01	2.03	11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		Jenis		15.000.000	15.000.000	0	15.000.000
1	05	02	01	2.03	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		jenis					
1	05	02	01	2.03	13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		unit					
1	05	02	01	2.03	14		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan		jenis					
1	05	02	01	2.03	15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan		jenis		25.000.000	25.000.000		25.000.000
1	05	02	01	2.03	16		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan		jenis			-	0	-
1	05	02	01	2.03	17		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan		jenis		35.000.000	35.000.000	0	35.000.000
1	05	02	01	2.03	18		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	40	OK		450.000.000	200.000.000		204.000.000
								Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	160	OK		40.000.000	40.000.000		40.000.000
1	05	02	01	2.03	19		Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit					
1	05	02	01	2.03	20		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit					
1	05	02	01	2.03	21		Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
1	05	02	01	2.03	22		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		unit					
1	05	02	01	2.03	23		Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
1	05	02	01	2.03	24		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		jenis					
1	05	02	01	2.03	25		Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan		unit					
1	05	02	01	2.03	28		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor		jenis		15.500.000	15.500.000		15.655.000
1	05	02	01	2.03	29		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit					
1	05	02	01	2.03	30		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit		70.000.000	70.000.000		70.700.000
1	05	02	01	2.03	32		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
1	05	02	01	2.03	34		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set		8.000.000	8.000.000		8.080.000
1	05	02	01	2.03	35		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
1	05	02	01	2.03	38		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit					
1	05	02	01	2.03	39		Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
1	05	02	01	2.03	40		Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
1	05	02	01	2.04			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		-	-	100	19.800.000
1	05	02	01	2.04	01		Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
1	05	02	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		stell/ pasang				18	9.900.000
1	05	02	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
1	05	02	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang				18	9.900.000
1	05	02	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		stell/ pasang					
1	05	02	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang					
1	05	02	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan		orang					
1	05	02	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis		orang					
1	5	02	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	100,00	%		2.458.188.290	7.256.952.500		1.585.052.500
							Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100,00	%					
1	05	02	03	2.01		<i>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten</i>	<i>Cakupan penyelenggaraan pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten</i>		%		-	28.798.500		28.798.500
1	05	02	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten	Jumlah dokumen yang disusun		dokumen					
1	05	02	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten (Per Jenis Bencana)	Jumlah peserta sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	211	orang			28.798.500		28.798.500
1	05	02	03	2.02		<i>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i>	<i>Cakupan penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</i>	100	%		1.862.281.290	6.632.247.000		960.347.000
1	05	02	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten	Jumlah dokumen yang disusun	1	dokumen			71.900.000		
1	05	02	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten	Jumlah peserta pelatihan	70	orang			28.798.500		28.798.500
1	05	02	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten	Jumlah petugas dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana yang disediakan	38	orang		564.000.000	564.000.000		564.000.000
1	05	02	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah peralatan yang disediakan	2	unit	Excavator amfibi, perahu karet	28.121.290	5.800.000.000	1	200.000.000
1	5	02	3	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten	Cakupan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten		%					
1	05	02	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan rawan bencana yang dilakukan penguatan dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan	20	Desa/ kelurahan			28.798.500	20	28.798.500
1	05	02	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten	Jumlah kejadian bencana yang ditangani	24	kejadian		1.270.160.000	100.000.000		100.000.000
1	05	02	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten	Jumlah anggota TRC yang mengikuti pengembangan kapasitas	40	orang			38.750.000		38.750.000
1	05	02	03	2.03		<i>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>	<i>Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>		%		500.000.000	500.000.000		500.000.000
1	05	02	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah kejadian luar biasa yang ditangani dengan Respon Cepat		kali					
1	05	02	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten	Jumlah kejadian bencana yang dilakukan Respon Cepat Darurat Bencana	96	kali		500.000.000	163.000.000		163.000.000
1	05	02	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten	Jumlah kejadian bencana yang ditangani	48	kali			192.000.000	48	192.000.000
1	05	02	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten	Jumlah kejadian bencana yang disediakan logistik penyelamatan dan evakuasi	48	kali			145.000.000	48	145.000.000
1	05	02	03	2.04		<i>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</i>					95.907.000	95.907.000		95.907.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
1	05	02	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten	Jumlah dokumen yang disusun	10	dokumen		38.750.000	38.750.000	10	38.750.000
1	05	02	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten	Jumlah lembaga yang difasilitasi	12	lembaga		26.500.000	26.500.000		26.500.000
1	05	02	03	2.04	03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten	Jumlah rapat dalam rangka kerjasama antar lembaga	16	kali		30.657.000	30.657.000		30.657.000
1	05	03				Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan					5.840.584.916	6.202.483.659		6.329.283.387
1	05	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		3.009.224.916	3.331.123.659	100	3.457.923.387
1	05	03	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		6.500.000	47.000.000	100	47.000.000
1	05	03	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	1	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		5.000.000	2	5.000.000
1	05	03	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website		10.000.000		10.000.000
1	05	03	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan	6.500.000	10.000.000	4	10.000.000
1	05	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)		20.000.000	6	20.000.000
1	05	03	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		2.000.000	1	2.000.000
1	05	03	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		1.748.164.916	2.180.563.659	100	2.256.463.387
1	05	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	312	OB		1.725.658.666	2.168.563.659	312	2.244.463.387
1	05	03	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			2.000.000	3	2.000.000
1	05	03	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			5.000.000	14	5.000.000
1	05	03	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan		22.506.250	5.000.000	1	5.000.000
1	05	03	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		1.138.560.000	1.033.560.000	100	1.038.460.000
							Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
1	05	03	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi		Surat		110.400.000	110.400.000	0	110.400.000
1	05	03	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		76.000.000	76.000.000	12	76.000.000
1	05	03	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB			-	0	-
1	05	03	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan		unit		42.000.000	42.000.000	0	42.000.000
1	05	03	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	204	OB		188.160.000	188.160.000	204	188.160.000
1	05	03	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB			-	0	-
1	05	03	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan		unit/ paket			-	0	-
1	05	03	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan		Jenis		12.000.000	12.000.000	0	12.000.000
1	05	03	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan		Jenis		12.000.000	12.000.000	0	12.000.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
1	05	03	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan		jenis		10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
1	05	03	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		unit			-	0	-
1	05	03	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan		jenis			-	0	-
1	05	03	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan		jenis		30.000.000	30.000.000	0	30.000.000
1	05	03	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan		jenis		40.000.000	40.000.000	0	40.000.000
1	05	03	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan		jenis		34.000.000	34.000.000	0	34.000.000
1	05	03	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	49	OK		350.000.000	245.000.000	49	249.900.000
1	05	03	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	120	OK		30.000.000	30.000.000	120	30.000.000
1	05	03	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah mobil jabatan yang diadakan		unit			-	0	-
1	05	03	01	2.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit			-	0	-
1	05	03	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis			-	0	-
1	05	03	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		unit			-	0	-
1	05	03	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis			-	0	-
1	05	03	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		jenis			-	0	-
1	05	03	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan		unit			-	0	-
1	05	03	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor		jenis		20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
1	05	03	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit			-	0	-
1	05	03	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit		100.000.000	100.000.000	0	100.000.000
1	05	03	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set			-	0	-
1	05	03	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set		9.000.000	9.000.000	0	9.000.000
1	05	03	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set			-	0	-
1	05	03	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit			-	0	-
1	05	03	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit			-	0	-
1	05	03	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit		75.000.000	75.000.000	0	75.000.000
1	05	03	01	2.04	01	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		116.000.000	70.000.000	100	116.000.000
1	05	03	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
1	05	03	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		stell/ pasang					
1	05	03	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan		stell/ pasang					46.000.000
1	05	03	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
1	05	03	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		stell/ pasang		46.000.000			
1	05	03	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
1	05	03	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan		orang					
1	05	03	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	7	orang		70.000.000	70.000.000	7	70.000.000
1	5	03	04			PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Cakupan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	100	%		2.831.360.000	2.871.360.000		2.871.360.000
							Persentase Pelayanan Penanganan Bencana Kebakaran yang terlapor	100	%					
							Cakupan Penyelenggaraan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan	100	%					
1	05	03	04	2.01		<i>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten</i>					2.708.160.000	2.708.160.000		2.708.160.000
1	05	03	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten	Cakupan penyelenggaraan pencegahan kebakaran		%		2.708.160.000	541.632.000	0	541.632.000
1	05	03	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten	Jumlah kejadian kebakaran yang dilakukan Pemadaman dan Pengendalian		kali			812.448.000	0	812.448.000
1	05	03	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		kali			1.354.080.000	0	1.354.080.000
1	05	03	04	2.01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten	Jumlah Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran		kali			-	0	-
1	05	03	04	2.02		<i>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</i>					-	20.000.000	0	20.000.000
1	05	03	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1	dokumen			10.000.000	1	10.000.000
1	05	03	04	2.02	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1	dokumen			10.000.000	1	10.000.000
1	05	03	04	2.03		<i>Investigasi Kejadian Kebakaran</i>					-	20.000.000	0	20.000.000
1	05	03	04	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah pelaksanaan Investigasi Kejadian Kebakaran		kali			20.000.000	0	20.000.000
1	05	03	04	2.04		<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</i>					123.200.000	123.200.000	0	123.200.000
1	05	03	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah masyarakat yang diberdayakan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		orang		123.200.000	123.200.000	0	123.200.000
1	06					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1	06	01				Dinas Sosial					3.358.081.590	5.554.156.792		5.693.483.760
1	06	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		2.680.572.090	3.558.839.292	100	3.698.166.260
1	06	01	01	2.01		<i>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu</i>	100,00	%		-	47.000.000	100	47.000.000
1	06	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		5.000.000	2	5.000.000
1	06	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website		10.000.000		10.000.000
1	06	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		10.000.000	4	10.000.000
1	06	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)		20.000.000	6	20.000.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
1	06	01	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		2.000.000	1	2.000.000
1	06	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		1.959.455.590	2.911.204.792	100	3.012.676.960
1	06	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	396	OB		1.936.949.340	2.899.204.792	396	3.000.676.960
1	06	01	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan		laporan			2.000.000	0	2.000.000
1	06	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun		dokumen			5.000.000	0	5.000.000
1	06	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan		22.506.250	5.000.000	1	5.000.000
1	06	01	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		721.116.500	600.634.500	100	605.489.300
							Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
1	06	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	1.400	Surat		22.200.000	24.420.000	1.400	24.420.000
1	06	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		61.440.000	67.584.000	12	67.584.000
1	06	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB					
1	06	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	19	unit		23.200.000	25.520.000	19	25.800.000
1	06	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	216	OB		144.769.000	144.769.000	216	144.769.000
1	06	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB		18.600.000	20.460.000	0	20.869.200
1	06	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan	10	unit/ paket		3.000.000	3.000.000	10	3.000.000
1	06	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	25	Jenis		13.000.000	13.000.000	25	13.000.000
1	06	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3	Jenis		5.000.000	5.000.000	3	5.000.000
1	06	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	7	jenis		2.000.000	2.200.000	7	3.000.000
1	06	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	unit		103.326.000	20.000.000	1	20.000.000
1	06	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan		jenis				0	-
1	06	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2	jenis		9.600.000	10.560.000	2	10.560.000
1	06	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	12	jenis		5.000.000	5.000.000	12	5.000.000
1	06	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3	jenis		5.000.000	5.000.000	3	5.000.000
1	06	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	34	OK		240.400.000	168.280.000	34	171.645.600
							Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	66	OK		15.000.000	16.500.000	66	16.500.000
1	06	01	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit					
1	06	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit					
1	06	01	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
1	06	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		unit					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
1	06	01	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
1	06	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		jenis					
1	06	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan		unit					
1	06	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	4	jenis		5.341.500	5.341.500	4	5.341.500
1	06	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit					
1	06	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	19	unit		14.000.000	14.000.000		14.000.000
1	06	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
1	06	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
1	06	01	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
1	06	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	1	unit		30.240.000	50.000.000		50.000.000
1	06	01	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
1	06	01	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
1	06	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		-	-	100	33.000.000
1	06	01	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
1	06	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	33	stell/ pasang					
1	06	01	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
1	06	01	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					16.500.000
1	06	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	33	stell/ pasang					16.500.000
1	06	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang					
1	06	01	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	40	orang					
1	06	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis		orang					
1	06	01	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pemberdayaan	80	%		12.845.000	1.411.060.000		1.411.060.000
1	06	01	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)					-	-		-
1	06	01	02	2.01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah KAT yang difasilitasi dalam Pemberdayaan Sosial		komuni					
1	06	01	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah KAT yang dibina dan didampingi		komuni					
1	06	01	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten					-	-		-
1	06	01	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah pelaksanaan Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		kali					
1	06	01	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten					12.845.000	1.411.060.000		1.411.060.000
1	06	01	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten	Jumlah pekerja sosial masyarakat yang ditingkatkan potensinya		orang			20.000.000	0	20.000.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
1	06	01	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang ditingkatkan potensinya	orang			20.000.000		20.000.000
1	06	01	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten	Jumlah jenis sumber kesejahteraan sosial keluarga yang ditingkatkan potensinya	jenis					
1	06	01	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten	Jumlah lembaga yang ditingkatkan potensinya	lembaga	Hibah bantuan sosial dan PMI		1.350.000.000	0	1.350.000.000
1	06	01	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah SDM yang ditingkatkan potensinya	orang		12.845.000	21.060.000		21.060.000
1	06	01	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga migran korban tindak kekerasan yang telah tertangani	%		-	20.000.000		20.000.000
1	06	01	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				-	20.000.000		20.000.000
1	06	01	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah korban yang difasilitasi pemulangannya	orang			20.000.000		20.000.000
1	06	01	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani	100	%		134.615.500	234.350.500	234.350.500
1	06	01	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				92.482.500	92.217.500		92.217.500
1	06	01	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan yang disediakan permakanan	orang					
1	06	01	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan yang disediakan sandang	orang					
1	06	01	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang disediakan alat bantu	orang					
1	06	01	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan yang direunifikasi keluarga	orang					
1	06	01	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang diberikan bimbingan	orang		23.732.500	23.732.500		23.732.500
1	06	01	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang dibimbing	Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang dibimbing	Keluarga		22.400.000	25.425.000		25.425.000
1	06	01	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang difasilitasi	orang					
1	06	01	04	2.01	08	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang difasilitasi	orang					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
1	06	01	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang diberikan layanan data dan pengaduan		orang					
1	06	01	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang diberikan layanan kedaruratan		orang		46.350.000	43.060.000		43.060.000
1	06	01	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang diberikan layanan penelusuran keluarga		orang					
1	06	01	04	2.01	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang diberikan layanan reunifikasi keluarga		orang					
1	06	01	04	2.01	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang diberikan layanan rujukan		orang					
1	06	01	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial					42.133.000	142.133.000		142.133.000
1	06	01	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah PMKS lainnya yang diberikan layanan data dan pengaduan		orang					
1	06	01	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah PMKS lainnya yang diberikan layanan kedaruratan		orang			100.000.000		100.000.000
1	06	01	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS lainnya yang diberikan permakanan		orang					
1	06	01	04	2.02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah PMKS lainnya yang disediakan sandang		orang					
1	06	01	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PMKS lainnya yang disediakan alat bantu		orang					
1	06	01	04	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti	Jumlah PMKS lainnya yang disediakan perbekalan kesehatan diluar Panti		orang					
1	06	01	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS lainnya yang diberikan bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial		orang					
1	06	01	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah keluarga PMKS lainnya yang diberikan bimbingan sosial		keluarga					
1	06	01	04	2.02	09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah PMKS lainnya yang difasilitasi		orang					
1	06	01	04	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PMKS lainnya yang diberikan akses		orang					
1	06	01	04	2.02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah PMKS lainnya yang diberikan layanan penelusuran keluarga		orang					
1	06	01	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PMKS lainnya yang diberikan layanan reunifikasi keluarga		orang					
1	06	01	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PMKS lainnya yang diberikan layanan rujukan		orang					
1	06	01	04	2.02	14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten	Laporan pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan pelaksanaan rehabilitasi sosial		laporan		42.133.000	42.133.000		42.133.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
1	06	01	05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang terpenuhi Kebutuhannya	89	%		344.489.000	70.000.000		70.000.000
						Persentase PMKS menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	100	%					
1	06	01	05	2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar					-	50.000.000		50.000.000
1	06	01	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah kecamatan yang dilakukan penjangkauan anak-anak terlantar		kecamatan		20.000.000		20.000.000
1	06	01	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang diberikan layanan rujukan		anak		20.000.000		20.000.000
1	06	01	05	2.01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah panti/lokasi pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar		panti/lokasi		10.000.000		10.000.000
1	06	01	05	2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten					344.489.000	20.000.000		20.000.000
1	06	01	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	Jumlah desa dan kelurahan yang terdata		desa	344.489.000			
1	06	01	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	Jumlah desa dan kelurahan yang dikelola data fakir miskinnya		desa		20.000.000		20.000.000
1	6	01	6		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan penyelenggaraan penanganan bencana		%		171.600.000	242.607.000		242.607.000
1	06	01	06	2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten					171.600.000	211.600.000		211.600.000
1	06	01	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang disediakan makanan		orang	171.600.000	171.600.000		171.600.000
1	06	01	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana yang disediakan sandang		orang		15.000.000		15.000.000
1	06	01	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah korban bencana yang disediakan tempat penampungan pengungsian		orang		25.000.000		25.000.000
1	06	01	06	2.01	04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah keluarga yang diberikan penanganan khusus		keluarga				
1	06	01	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana yang diberikan pelayanan dukungan psikososial		orang				
1	06	01	06	2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten					-	31.007.000		31.007.000
1	06	01	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah kampung siaga bencana yang diberdayakan		kampung		5.000.000		5.000.000
1	06	01	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang aktif		orang		26.007.000		26.007.000
1	06	01	07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan pengelolaan taman makam pahlawan	100,00	%		13.960.000	17.300.000		17.300.000
1	06	01	07	2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten					13.960.000	17.300.000		17.300.000
1	06	01	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	Jumlah jenis sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Kabupaten yang direhabilitasi		jenis		17.300.000		
1	06	01	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	Luas taman makam pahlawan kabupaten yang dipelihara		m2	13.960.000			17.300.000
1	06	01	07	2.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	Jumlah petugas pengamanan taman makam pahlawan kabupaten		orang				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
2	07	01			Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi					5.312.433.691	6.627.721.775		6.863.019.047
2	07	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		4.774.693.691	5.971.353.775	100	6.229.201.047

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	07	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		9.900.000	-	100	87.600.000
2	07	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan			2	10.000.000
2	07	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website	5.200.000			35.000.000
2	07	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan	4.700.000		4	10.000.000
2	07	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)			6	17.600.000
2	07	01	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	10	kali	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya			10	15.000.000
2	07	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		3.640.403.691	5.009.967.775	100	5.184.896.647
2	07	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	660	OB		3.617.897.441	4.997.967.775	660	5.172.896.647
2	07	01	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			2.000.000	3	2.000.000
2	07	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			5.000.000	14	5.000.000
2	07	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan		22.506.250	5.000.000	1	5.000.000
2	07	01	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		1.059.390.000	946.386.000	100	920.704.400
							Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
2	07	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	1.000	Surat		31.800.000	31.800.000	1.000	31.800.000
2	07	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		87.200.000	87.200.000	12	87.200.000
2	07	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB					
2	07	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	13	unit		15.000.000	15.750.000		
2	07	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	480	OB		309.585.000	309.585.000	480	309.585.000
2	07	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB		22.000.000	5.500.000		6.000.000
2	07	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan		unit/ paket					
2	07	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	25	Jenis	termasuk UPTD Balai Latihan Kerja (BLK)	37.521.000	37.521.000	25	37.521.000
2	07	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3	Jenis	termasuk UPTD Balai Latihan Kerja (BLK)	12.110.000	12.110.000	3	12.110.000
2	07	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan		jenis		3.500.000	4.000.000		4.500.000
2	07	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		unit		93.300.000			
2	07	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan		jenis					
2	07	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan		jenis		30.000.000	31.500.000		31.500.000
2	07	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan		jenis					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	07	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3	jenis	termasuk UPTD Balai Latihan Kerja (BLK)	24.250.000	24.250.000	3	24.250.000
2	07	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	41	OK	termasuk UPTD Balai Latihan Kerja (BLK)	290.600.000	203.420.000		207.488.400
							Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	147	OK		35.000.000	36.750.000		36.750.000
2	07	01	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit					
2	07	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1	unit		20.524.000			
2	07	01	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
2	07	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		unit					
2	07	01	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
2	07	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		jenis					120.000.000
2	07	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan		unit					
2	07	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	2	jenis		6.000.000	106.000.000	2	6.000.000
2	07	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit					
2	07	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	13	unit		35.000.000	35.000.000		
2	07	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
2	07	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set		6.000.000	6.000.000		6.000.000
2	07	01	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
2	07	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit					
2	07	01	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
2	07	01	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
2	07	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		65.000.000	15.000.000	100	36.000.000
2	07	01	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
2	07	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		stell/ pasang				70	21.000.000
2	07	01	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
2	07	01	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					-
2	07	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		stell/ pasang					
2	07	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang		50.000.000			
2	07	01	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan		orang					
2	07	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	2	orang		15.000.000	15.000.000		15.000.000
2	07	01	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase ketersediaan perencanaan tenaga kerja		%		-	-		-
2	07	01	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)					-	-		-
2	07	01	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen yang disusun		dokumen				0	-
2	07	01	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah dokumen yang disusun		dokumen				0	-

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	07	01	03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Cakupan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi	100	%		184.440.000	221.985.000		221.985.000
2	07	01	03	2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					159.340.000	154.530.000		154.530.000
2	07	01	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang diberikan pendidikan dan pelatihan	orang		136.340.000	136.340.000	0	136.340.000
						Jumlah peserta pelatihan tenun		orang					
						Jumlah peserta pelatihan alat berat		orang					
						Teknik Pendingin (AC)		orang					
						Kejuruan Komputer		orang					
						Teknisi HP		orang					
						Elektronika		orang					
						Tata Rias		orang					
						Kejuruan Mobil		orang					
						Kejuruan Sepeda Motor		orang					
						Kejuruan Las Listrik		orang					
						Menjahit		orang					
2	07	01	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah koordinasi yang dilakukan	kali		23.000.000	18.190.000	0	18.190.000
2	07	01	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				-	42.355.000		42.355.000
2	07	01	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja Swasta yang dibina	lembaga			42.355.000	0	42.355.000
2	07	01	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja				-	-		-
2	07	01	03	2.03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi yang disediakan	orang				0	-
2	07	01	03	2.04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil				-	-		-
2	07	01	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	kali				0	-
2	07	01	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten				25.100.000	25.100.000		25.100.000
2	07	01	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang dilakukan pengukuran kompetensi dan produktivitas	orang		25.100.000	25.100.000	0	25.100.000
2	07	01	04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Perluasan Kesempatan kerja sektor formal maupun informal	3,91	%		49.450.000	108.618.000		108.618.000
2	07	01	04	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten				49.450.000	49.450.000		49.450.000
2	07	01	04	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Sumber Daya Pelayanan antar Kerja yang disediakan	orang				0	-
2	07	01	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah bulan pelayanan antar kerja	bulan		37.900.000	37.900.000	12	37.900.000
2	07	01	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang diberikan penyuluhan dan bimbingan	orang					
2	07	01	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah pencari kerja disabilitas yang dilayani	orang		11.550.000	11.550.000	0	11.550.000
2	07	01	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten				-	-		-
2	07	01	04	2.02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi yang disediakan	orang				0	-
2	07	01	04	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Laporan hasil Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	laporan				0	-
2	07	01	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				-	59.168.000		59.168.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	07	01	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah informasi pasar kerja online yang dipelihara		media			29.168.000	0	29.168.000
2	07	01	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah media informasi pasar kerja online	1	media			30.000.000	1	30.000.000
2	07	01	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pelaksanaan Job Fair/Bursa Kerja		kali				0	-
2	07	01	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten					-	-		-
2	07	01	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terlibat		orang				0	-
2	07	01	04	2.04	02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran yang disediakan		layanan					
2	07	01	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan yang diberdayakan		orang				0	-
2	07	01	04	2.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten					-	-		-
2	07	01	04	2.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Jumlah permohonan Perpanjangan IMTA yang dikoordinasi dan sinkronisasi		permohonan				0	-
2	07	01	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penanganan perselisihan buruh dan pengusaha	100	%		303.850.000	325.765.000		303.215.000
2	07	01	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten					-	21.915.000		21.915.000
2	07	01	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang dilayani dalam pengesahan peraturan perusahaan		perusahaan				0	-
2	07	01	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mendaftarkan perjanjian kerjasama		perusahaan				0	-
2	07	01	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah dokumen informasi hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja	1	dokumen			21.915.000	1	21.915.000
2	07	01	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten					303.850.000	303.850.000		281.300.000
2	07	01	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Jumlah rapat koordinasi dalam rangka pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan		kali		18.350.000	18.350.000	0	18.350.000
2	07	01	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Jumlah tenaga kerja yang difasilitasi	7.000	orang		226.800.000	226.800.000	7.000	226.800.000
2	07	01	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Jumlah perusahaan yang diverifikasi dan rekapitulasi		perusahaan		42.550.000	42.550.000		20.000.000
2	07	01	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten	Jumlah bulan operasional lembaga	12	bulan		16.150.000	16.150.000		16.150.000
2	08					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
2	08	01				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					2.921.240.327	3.857.572.813		4.056.267.109
2	08	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		2.573.040.327	3.099.672.813	100	3.288.367.109

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju		
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)	
2	08	01	01	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		31.060.000	47.000.000	100	47.000.000	
2	08	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		5.000.000	2	5.000.000
2	08	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website		10.000.000		10.000.000
2	08	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		10.000.000	4	10.000.000
2	08	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/has)		20.000.000	6	20.000.000
2	08	01	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya	31.060.000	2.000.000	1	2.000.000
2	08	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		1.737.540.327	2.311.309.313	100	2.391.785.139
2	08	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	312	OB		1.715.034.077	2.299.309.313	312	2.379.785.139
2	08	01	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiaian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			2.000.000	3	2.000.000
2	08	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			5.000.000	14	5.000.000
2	08	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan		22.506.250	5.000.000	1	5.000.000
2	08	01	01	2.03		Administrasi Umum	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		765.940.000	741.363.500	100	792.581.970
							Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
2	08	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	300	Surat		5.100.000	5.100.000	300	5.202.000
2	08	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		38.400.000	38.400.000	12	39.168.000
2	08	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB					
2	08	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	4	unit		15.000.000	15.000.000	4	15.300.000
2	08	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	408	OB		303.440.000	303.440.000	408	303.440.000
2	08	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB			15.923.500	0	16.241.970
2	08	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan		unit/ paket					
2	08	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	25	Jenis		20.000.000	20.000.000	25	20.000.000
2	08	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3	Jenis		6.000.000	6.000.000	3	6.000.000
2	08	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	5	jenis			5.000.000	5	5.000.000
2	08	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	unit		10.000.000	10.000.000	1	10.000.000
2	08	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	5	jenis			1.000.000	5	1.000.000
2	08	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2	jenis		3.000.000	3.000.000	2	3.060.000
2	08	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	10	jenis			5.000.000	10	5.000.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	08	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3	jenis		10.000.000	10.000.000	3	10.000.000
2	08	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	40	OK		285.000.000	199.500.000	40	203.490.000
							Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	100	OK		20.000.000	25.000.000	100	25.500.000
2	08	01	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit					
2	08	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1	unit		20.000.000	20.000.000	2	64.000.000
2	08	01	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
2	08	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		unit					
2	08	01	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
2	08	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		jenis					
2	08	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan		unit					
2	08	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor		jenis			29.000.000	0	29.580.000
2	08	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit					
2	08	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	12	unit		25.000.000	25.000.000	12	25.500.000
2	08	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set		2.500.000	2.500.000	0	2.550.000
2	08	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set		2.500.000	2.500.000	0	2.550.000
2	08	01	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
2	08	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit					
2	08	01	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
2	08	01	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
2	08	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		38.500.000	-	100	57.000.000
2	08	01	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
2	08	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		stell/ pasang		25.000.000			
2	08	01	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
2	08	01	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
2	08	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	60	stell/ pasang					
2	08	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang				3	21.000.000
2	08	01	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan		orang					
2	08	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis		orang		13.500.000		8	36.000.000
2	08	01	02			PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam rangka peningkatan kesetaraan gender dan ketahanan keluarga	71	%		60.100.000	124.800.000		124.800.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	08	01	02	2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten					-	20.000.000		20.000.000
2	08	01	02	2.01	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Dokumen rumusan kebijakan pelaksanaan PUG		dokumen					
2	08	01	02	2.01	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG		laporan					
2	08	01	02	2.01	03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Pelaksanaan advokasi dan pendampingan PUG termasuk PPRG		kali					
2	08	01	02	2.01	04 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta sosialisasi		orang			20.000.000		20.000.000
2	08	01	02	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten					60.100.000	79.800.000		79.800.000
2	08	01	02	2.02	01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah pemangku kepentingan (sesuai kelompok sasaran) yang terlibat dalam sosialisasi PUG bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	100	orang		35.000.000	35.000.000	365	35.000.000
2	08	01	02	2.02	02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah pemangku kepentingan (sesuai kelompok sasaran) yang terlibat dalam advokasi PUG bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	150	orang		25.100.000	44.800.000	150	44.800.000
2	08	01	02	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten					-	25.000.000		25.000.000
2	08	01	02	2.03	01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang diadvokasi		lembaga					20.000.000
2	08	01	02	2.03	02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten	Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang ditingkatkan kapasitasnya		orang			20.000.000		
2	08	01	02	2.03	03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten	Jumlah laporan dalam rangka pengembangan KIE pemberdayaan perempuan	2	laporan			5.000.000		5.000.000
2	08	01	03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak	40	%		18.000.000	33.000.000		33.000.000
2	08	01	03	2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten					18.000.000	18.000.000		18.000.000
2	08	01	03	2.01	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kabupaten		laporan					
2	08	01	03	2.01	02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten	Jumlah pelaku dan korban KdRT yang diadvokasi		orang		18.000.000	18.000.000		18.000.000
2	08	01	03	2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten	Jumlah Korban Kekerasan yang menerima Layanan Rujukan Lanjutan		orang		-	5.000.000		5.000.000
2	08	01	03	2.02	01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang dilayani		orang					
2	08	01	03	2.02	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten	Jumlah rapat dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi		kali			5.000.000		5.000.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	08	01	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten					-	10.000.000		10.000.000
2	08	01	03	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten	Jumlah korban kekerasan yang diadvokasi dan dilakukan pendampingan		orang			10.000.000		10.000.000
2	08	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang dibina		orang					
2	08	01	03	2.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus yang menerima kebutuhan spesifik		orang					
2	08	01	03	2.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten	Jumlah lembaga yang dibangun jejaring dalam layanan perlindungan perempuan		lembaga					
2	08	01	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan penyelenggaraan peningkatan kualitas keluarga		%		44.900.000	364.900.000		364.900.000
2	08	01	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten					44.900.000	344.900.000		344.900.000
2	08	01	04	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten	Jumlah pemangku kepentingan (sesuai kelompok sasaran) yang terlibat dalam pembinaan ketahanan dan kualitas keluarga	100	orang		44.900.000	44.900.000	390	44.900.000
2	08	01	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten	Jumlah kegiatan dalam rangka pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak	12	kegiatan	Dharma Wanita		300.000.000	12	300.000.000
2	08	01	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten	Jumlah Kegiatan Masyarakat dalam rangka Peningkatan Kualitas Keluarga di kabupaten		kegiatan					
2	08	01	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten					-	10.000.000		10.000.000
2	08	01	04	2.02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah keluarga yang diadvokasi dan dilakukan pendampingan		keluarga			10.000.000		10.000.000
2	08	01	04	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang dibina		orang					
2	08	01	04	2.02	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten		lembaga					
2	08	01	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten					-	10.000.000		10.000.000
2	08	01	04	2.03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten	Jumlah keluarga yang disediakan layanan komprehensif		keluarga			10.000.000		10.000.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	08	01	05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ketersediaan data dan informasi yang valid tentang penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Luwu	100,00	%		63.200.000	63.200.000		63.200.000
2	08	01	05	2.01	<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten</i>					63.200.000	63.200.000		63.200.000
2	08	01	05	2.01	01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten	Jumlah dokumen data gender dan anak yang disediakan		dokumen		25.600.000	25.600.000		25.600.000
2	08	01	05	2.01	02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten	Jumlah lembaga yang menyajikan dan memanfaatkan data gender dan anak		lembaga		37.600.000	37.600.000		37.600.000
2	08	01	06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan pemenuhan hak anak		%		66.300.000	66.300.000		76.300.000
2	08	01	06	2.01	<i>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten</i>					16.300.000	16.300.000		26.300.000
2	08	01	06	2.01	01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten	Jumlah lembaga yang diadvokasi		lembaga		16.300.000	16.300.000		16.300.000
2	08	01	06	2.01	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi		kali					10.000.000
2	08	01	06	2.02	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten</i>	<i>Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang dibina</i>		lembaga		50.000.000	50.000.000		50.000.000
2	08	01	06	2.02	01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten	Jumlah Anak yang menerima layanan Peningkatan Kualitas Hidup		anak					
2	08	01	06	2.02	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah anak yang terlibat dalam pendampingan peningkatan kualitas hidup anak		orang		50.000.000	50.000.000		50.000.000
2	08	01	06	2.02	03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang menerima Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak		lembaga					
2	08	01	06	2.02	04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten		lembaga					
2	08	01	07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan penyelenggaraan perlindungan khusus anak		%		95.700.000	105.700.000		105.700.000
2	08	01	07	2.01	<i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten</i>					-	5.000.000		5.000.000
2	08	01	07	2.01	01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang diadvokasi		kebijakan					
2	08	01	07	2.01	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten	Jumlah rapat dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi		kali			5.000.000		5.000.000
2	08	01	07	2.02	<i>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten</i>					-	5.000.000		5.000.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	08	01	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang dilayani		anak					
2	08	01	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten	Jumlah rapat dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi		kali			5.000.000		5.000.000
2	08	01	07	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang memperoleh pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi		anak					
2	08	01	07	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus di Kabupaten		lembaga					
2	08	01	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten					95.700.000	95.700.000		95.700.000
2	08	01	07	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang menerima Penyediaan Sarana Prasarana Layanan		anak					
2	08	01	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang ditingkatkan kapasitasnya		orang		95.700.000	95.700.000		95.700.000
2	08	01	07	2.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kabupaten		laporan					
2	09					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
2	09	01				Dinas Ketahanan Pangan					3.158.063.857	4.552.162.104		5.871.048.095
2	09	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		2.803.699.857	3.144.686.592	100	3.381.230.943
2	09	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		-	27.000.000	100	102.000.000
2	09	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		5.000.000	2	5.000.000
2	09	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website		5.000.000		10.000.000
2	09	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		5.000.000	4	10.000.000
2	09	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)		10.000.000	6	75.000.000
2	09	01	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		2.000.000	1	2.000.000
2	09	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		1.822.463.857	2.323.070.492	100	2.403.957.959
2	09	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	300	OB		1.799.957.607	2.311.070.492	300	2.391.957.959

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	09	01	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			2.000.000	3	2.000.000
2	09	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			5.000.000	14	5.000.000
2	09	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan		22.506.250	5.000.000	1	5.000.000
2	09	01	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		901.236.000	794.616.100	100	803.872.984
							Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
2	09	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	2.000	Surat		13.550.000	13.550.000	2.000	13.550.000
2	09	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		31.860.000	31.860.000	12	32.497.200
2	09	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB					
2	09	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	23	unit		25.300.000	25.300.000	23	25.806.000
2	09	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	372	OB		261.640.000	261.640.000	372	261.640.000
2	09	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB		16.200.000	16.200.000	0	16.524.000
2	09	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan		unit/ paket					
2	09	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	25	Jenis		20.095.400	20.095.400	25	20.095.400
2	09	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3	Jenis		20.586.500	20.586.500	3	20.586.500
2	09	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan		jenis					
2	09	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	13	unit		47.654.900	122.850.000	13	125.307.000
2	09	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan		jenis					
2	09	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2	jenis		8.400.000	8.400.000	2	8.568.000
2	09	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan		jenis				-	-
2	09	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3	jenis		15.900.000	15.900.000	3	15.900.000
2	09	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	28	OK		353.000.000	140.000.000	28	142.800.000
							Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	223	OK		24.640.000	55.825.000	223	56.941.500
2	09	01	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit					
2	09	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit					
2	09	01	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
2	09	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		unit					
2	09	01	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
2	09	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		jenis					
2	09	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan		unit					
2	09	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	1	jenis		5.500.000	5.500.000	1	5.610.000
2	09	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	09	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	23	unit		52.909.200	52.909.200	23	53.967.384
2	09	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	78	unit/set		4.000.000	4.000.000	78	4.080.000
2	09	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
2	09	01	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
2	09	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit					
2	09	01	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
2	09	01	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
2	09	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		80.000.000	-	100	71.400.000
2	09	01	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
2	09	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		stell/ pasang				58	37.700.000
2	09	01	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan yang diadakan	61	stell/ pasang					
2	09	01	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan	32	stell/ pasang					
2	09	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		stell/ pasang				58	33.700.000
2	09	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang		80.000.000			
2	09	01	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan		orang					
2	09	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	8	orang					
2	09	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN					-	370.000.000		645.000.000
2	09	01	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten					-	370.000.000		645.000.000
2	09	01	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah infrastruktur lumbung pangan yang disediakan	1	unit			345.000.000	1	645.000.000
2	09	01	02	2.01	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Kelompok Wanita yang Mengembangkan Kawasan Rumah Pangan Lestari		kelompok				0	-
2	09	01	02	2.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Kelompok Wanita yang Mengembangkan Kawasan Rumah Pangan Lestari		kelompok					
2	09	01	02	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik								
2	09	01	02	2.01	05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah dokumen yang disusun	1	dokumen			25.000.000		
2	09	01	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat Konsumsi Protein	66,00	Gr/ Kapita/ Hari		240.544.000	579.024.692		1.022.293.012

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	09	01	03	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					31.440.000	85.634.692		577.013.932
2	09	01	03	2.01	01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen Analisis Harga dan Pasokan Pangan Yang Tersusun	1	dokumen			25.000.000	1	25.000.000
2	09	01	03	2.01	02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Frekuensi Pelaksanaan Pasar Murah Pangan	6	kali				6	147.965.220
						Jumlah Anggota Masyarakat yang Memperoleh Penyuluhan Keamanan Pangan Segar	50	orang				50	30.000.000
2	09	01	03	2.01	03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi	12	kali			12.000.000	12	12.000.000
2	09	01	03	2.01	04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah pelaksanaan pemantauan	2	kali			13.023.942	2	13.023.942
2	09	01	03	2.01	05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan		lembaga		31.440.000	35.610.750		35.610.750
2	09	01	03	2.01	06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Toko Tani Center yang Ditumbuhkembangkan		TTC				1	313.414.020
2	09	01	03	2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten					18.390.000	233.390.000		235.279.080
2	09	01	03	2.02	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten	Laporan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan		laporan		18.390.000	18.390.000		18.390.000
2	09	01	03	2.02	02 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Jumlah dokumen yang disusun	1	dokumen			15.000.000		
2	09	01	03	2.02	03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang Disediakan	40	ton			200.000.000	40	216.889.080
2	09	01	03	2.02	04 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	Laporan pelaksanaan Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten		laporan					
2	09	01	03	2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi					-	10.000.000		10.000.000
2	09	01	03	2.03	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	4	laporan			10.000.000	4	10.000.000
2	09	01	03	2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi					190.714.000	250.000.000		200.000.000
2	09	01	03	2.04	01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah dokumen yang disusun	1	dokumen			50.000.000		
2	09	01	03	2.04	02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Wanita yang Mengembangkan Kawasan Rumah Pangan Lestari	27	kelompok		190.714.000	200.000.000	27	200.000.000
2	09	01	03	2.04	03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun								
2	09	01	04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Angka Ketersediaan Energi	3.425	Kalori/ Perkapita/ Perhari		83.780.000	331.059.100		667.322.320
2	09	01	04	2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan					-	24.700.000		24.700.000
2	09	01	04	2.01	01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah dokumen yang disusun	1	dokumen			24.700.000	1	24.700.000
2	09	01	04	2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten					83.780.000	306.359.100		642.622.320
2	09	01	04	2.02	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi	4	kali		21.330.000	21.330.000	4	57.593.220

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	09	01	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Desa Rawan Pangan yang Dikembangkan menjadi Desa Mandiri Pangan	4	jenis		62.450.000	285.029.100	4	585.029.100
2	09	01	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Ketersediaan Informasi Harga, Pasokan dan Distribusi Pangan	100	%		30.040.000	127.391.720		155.201.820
2	09	01	05	2.01		<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten</i>					<u>30.040.000</u>	<u>127.391.720</u>		<u>155.201.820</u>
2	09	01	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten	Laporan pelaksanaan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten		laporan					
2	09	01	05	2.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten	Jumlah Produk Pangan Segar yang Terdaftar dan Disertifikasi	30	produk		30.040.000	30.040.000	30	57.850.100
2	09	01	05	2.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten	Laporan pelaksanaan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten		laporan					
2	09	01	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten	Jumlah rekomendasi	2	rekomendasi			33.835.220	2	33.835.220
2	09	01	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten	Jumlah Pangan Segar yang Diuji Tingkat Keamanannya	50	sampel			63.516.500	50	63.516.500
2	10					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
2	10	01				Dinas Pertanahan					6.377.742.343	3.132.609.765		6.737.525.361
2	10	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		2.166.692.343	2.508.814.765	100	2.618.050.361
2	10	01	01	2.01		<i>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu</i>	<i>100,00</i>	<i>%</i>		<u>-</u>	<u>47.000.000</u>	<i>100</i>	<u>47.000.000</u>
2	10	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		5.000.000	2	5.000.000
2	10	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website		10.000.000		10.000.000
2	10	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		10.000.000	4	10.000.000
2	10	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)		20.000.000	6	20.000.000
2	10	01	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		2.000.000	1	2.000.000
2	10	01	01	2.02		<i>Administrasi Keuangan</i>	<i>Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu</i>	<i>100,00</i>	<i>%</i>		<u>1.429.977.343</u>	<u>1.745.098.715</u>	<i>100</i>	<u>1.805.757.170</u>
2	10	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	204	OB		1.407.471.093	1.733.098.715	204	1.793.757.170
2	10	01	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			2.000.000	3	2.000.000
2	10	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			5.000.000	14	5.000.000
2	10	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan		22.506.250	5.000.000	1	5.000.000
2	10	01	01	2.03		<i>Administrasi Umum</i>	<i>Persentase pemenuhan administrasi perkantoran</i>	<i>100,00</i>	<i>%</i>		<u>736.715.000</u>	<u>716.716.050</u>	<i>100</i>	<u>725.293.191</u>
							<i>Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</i>		<i>%</i>					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	10	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	150	Surat		9.150.000	12.000.000		12.000.000
2	10	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		8.400.000	22.000.000		22.000.000
2	10	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB					
2	10	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	8	unit		16.900.000	18.000.000	8	20.000.000
2	10	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	588	OB		362.500.000	362.500.000	588	362.500.000
2	10	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB		9.049.650	10.000.000	6.000	10.000.000
2	10	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan		unit/ paket					
2	10	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	25	Jenis		30.427.090	30.427.090	25	30.427.090
2	10	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3	Jenis		6.525.000	6.525.000	3	6.525.000
2	10	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan		jenis					
2	10	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7	unit		4.269.250	12.000.000	7	12.000.000
2	10	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan		jenis					
2	10	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	10	jenis		18.420.000	20.000.000	10	20.000.000
2	10	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	12	jenis		9.224.050	10.000.000	12	10.000.000
2	10	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3	jenis		21.406.910	21.406.910	3	21.406.910
2	10	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	26	OK		184.081.500	128.857.050	75	131.434.191
							Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	100	OK		24.332.000	25.000.000		25.000.000
2	10	01	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit					
2	10	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit					
2	10	01	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
2	10	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		unit					
2	10	01	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
2	10	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		jenis					
2	10	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan		unit					
2	10	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor		jenis		2.840.000			
2	10	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit					
2	10	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	8	unit		29.189.550	31.000.000	8	35.000.000
2	10	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
2	10	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	10	unit/set			7.000.000	10	7.000.000
2	10	01	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
2	10	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	10	01	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
2	10	01	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
2	10	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		-	-	100	40.000.000
2	10	01	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
2	10	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	61	stell/ pasang					
2	10	01	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	20	stell/ pasang					
2	10	01	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang				20	15.000.000
2	10	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		stell/ pasang				61	25.000.000
2	10	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang					
2	10	01	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan		orang					
2	10	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis		orang					
2	10	01	2			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase permohonan izin lokasi yang diberikan		%		-	-		-
2	10	01	02	2.01		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten					-	-		-
2	10	01	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha		laporan					
2	10	01	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Jumlah konflik pertanahan yang diselesaikan	100,00	%		15.985.000	70.000.000		85.000.000
2	10	01	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten.					15.985.000	70.000.000		85.000.000
2	10	01	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten.	Laporan hasil Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten.	5	dokumen			50.000.000	5	50.000.000
2	10	01	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten.	Jumlah konflik pertanahan yang dimediasi	5	kasus		15.985.000	20.000.000	5	35.000.000
2	10	01	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan	100	%		3.675.680.000	200.000.000		3.675.680.000
2	10	01	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten					3.675.680.000	200.000.000		3.675.680.000
2	10	01	05	2.01	01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Dokumen yang memuat Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah		dokumen					
2	10	01	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah paket pengadaan tanah oleh Pemda yang diselesaikan	1	Paket		3.675.680.000	200.000.000	2	3.675.680.000
2	10	01	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					19.385.000	23.795.000		28.795.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	10	01	06	2.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten					19.385.000	23.795.000		28.795.000
2	10	01	06	2.01	01 Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Dokumen Subyek dan Obyek Redistribusi tanah		laporan		8.795.000	8.795.000		8.795.000
2	10	01	06	2.01	02 Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah	Dokumen hasil inventerisasi		dokumen		10.590.000	15.000.000	10	20.000.000
2	10	01	06	2.01	03 Koordinasi Penyelenggaraan redistribusi Tanah Obyek Reforma agraria dalam 1 (satu) Kabupaten	Laporan hasil Koordinasi Penyelenggaraan redistribusi Tanah Obyek Reforma agraria dalam 1 (satu) Kabupaten		laporan					
2	10	01	06	2.01	04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten		laporan					
2	10	01	07		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase tanah ulayat yang sudah ditetapkan		%		-	-		-
2	10	01	07	2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten					-	-		-
2	10	01	07	2.01	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat		laporan					
2	10	01	07	2.01	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Penguahan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Penguahan Masyarakat Hukum Adat		laporan					
2	10	01	07	2.01	03 Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang Berlaku	Dokumen Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku		dokumen					
2	10	01	08		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Luas tanah kosong yang dimanfaatkan		%		-	-		-
2	10	01	08	2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong					-	-		-
2	10	01	08	2.01	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten		laporan					
2	10	01	08	2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong					-	-		-
2	10	01	08	2.02	01 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Laporan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong		laporan					
2	10	01	08	2.02	02 Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah masyarakat yang dilayani dalam Pemanfaatan Tanah Kosong		orang					
2	10	01	09		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase penyelesaian permohonan izin membuka tanah		%		-	-		-
2	10	01	09	2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah					-	-		-
2	10	01	09	2.01	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah		laporan					
2	10	01	09	2.01	02 Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Laporan pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara		laporan					
2	10	01	10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase lahan yang telah dilakukan penatagunaan tanah		%		500.000.000	330.000.000		330.000.000
						Persentase Aset tanah pemda yang bersertifikat	0,13	%				0,18	
2	10	01	10	2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten					500.000.000	330.000.000		330.000.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	10	01	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		5	persil			30.000.000	2	30.000.000
2	10	01	10	2.01	02	Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten	Jumlah persil tanah yang dilakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		dokumen					
2	10	01	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten	Jumlah persil tanah yang dilakukan kordinasi dan sinkronisasi dalam rangka konsolidasi tanah kabupaten	100	persil		500.000.000	300.000.000	100	300.000.000
2	11					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
2	11	01				Dinas Lingkungan Hidup					6.094.737.921	7.926.767.935		7.847.988.188
2	11	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		2.761.087.921	3.093.117.935	100	3.244.338.188
2	11	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		-	36.875.000	100	87.600.000
2	11	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		3.875.000	2	10.000.000
2	11	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website		10.000.000		35.000.000
2	11	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		8.000.000	4	10.000.000
2	11	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)		10.000.000	6	17.600.000
2	11	01	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		5.000.000	10	15.000.000
2	11	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		1.998.237.921	2.396.492.935	100	2.479.950.188
2	11	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	300	OB		1.975.731.671	2.384.492.935	300	2.467.950.188
2	11	01	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			2.000.000	3	2.000.000
2	11	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			5.000.000	14	5.000.000
2	11	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan		22.506.250	5.000.000	1	5.000.000
2	11	01	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		750.850.000	659.750.000	100	622.788.000
							Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
2	11	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi		Surat		52.690.000	52.690.000	0	52.690.000
2	11	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		59.260.000	59.260.000	12	59.260.000
2	11	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB		10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
2	11	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	25	unit	ada tunggakan pajak kendaraan bermotor eks dinas kebersihan	27.000.000	67.000.000	25	27.000.000
2	11	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	240	OB		171.900.000	171.900.000	240	171.900.000
2	11	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB		14.000.000	14.000.000	0	14.000.000
2	11	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan		unit/ paket					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
												Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)
2	11	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	25	Jenis				
2	11	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3	Jenis	5.000.000	5.000.000	3	5.000.000
2	11	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan		jenis				
2	11	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			116.000.000	50.000.000	0	50.000.000
2	11	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan		jenis				
2	11	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan		jenis				
2	11	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan		jenis				
2	11	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3	jenis	8.000.000	8.000.000	3	8.000.000
2	11	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	30	OK	217.000.000	151.900.000	30	154.938.000
							Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	80	OK	20.000.000	20.000.000	80	20.000.000
2	11	01	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit				
2	11	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit				
2	11	01	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis				
2	11	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		unit				
2	11	01	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis				
2	11	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		jenis				
2	11	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan		unit				
2	11	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor		jenis				
2	11	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit				
2	11	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000
2	11	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set				
2	11	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set				
2	11	01	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set				
2	11	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit				
2	11	01	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi dedang/berat		unit				
2	11	01	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit				
2	11	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%	12.000.000	-	100	54.000.000
2	11	01	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit				
2	11	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		stell/ pasang				
2	11	01	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang	12.000.000			
2	11	01	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang				12.000.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	11	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		stell/ pasang					12.000.000
2	11	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang					
2	11	01	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan		orang					
2	11	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis		orang				2	30.000.000
2	11	01	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100	%		15.000.000	165.000.000		15.000.000
2	11	01	02	2.01		<i>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten</i>					<u>15.000.000</u>	<u>15.000.000</u>		<u>15.000.000</u>
2	11	01	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten	Dokumen yang disusun dan ditetapkan	1	dokumen		15.000.000			
2	11	01	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten	Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten	1	dokumen			15.000.000		15.000.000
2	11	01	02	2.02		<i>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten</i>					-	<u>150.000.000</u>		-
2	11	01	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang		dokumen					
2	11	01	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	1	dokumen			150.000.000		
2	11	01	02	2.02	03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Dokumen KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang dibuat dan dilaksanakan		dokumen					
2	11	01	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan penyelenggaraan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	60,00	%		149.500.000	149.500.000		149.500.000
2	11	01	03	2.01		<i>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten</i>					<u>149.500.000</u>	<u>149.500.000</u>		<u>149.500.000</u>
2	11	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Laporan hasil pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	3	laporan		149.500.000	149.500.000	3	149.500.000
2	11	01	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim							
2	11	01	03	2.02		<i>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten</i>					-	-		-
2	11	01	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah desa/kelompok masyarakat yang diberikan Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		desa/ kelompok					
2	11	01	03	2.02	02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi yang diisolasi		lokasi					
2	11	01	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi yang dilakukan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		lokasi					
2	11	01	03	2.03		<i>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten</i>					-	-		-
2	11	01	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Dokumen pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran		dokumen					
2	11	01	03	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Dokumen pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar		dokumen					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	11	01	03	2.03	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Dokumen pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi		dokumen					
2	11	01	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		dokumen					
2	11	01	03	2.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Dokumen pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi		dokumen					
2	11	01	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan keanekaragaman hayati		%		-	-		-
2	11	01	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten					-	-		-
2	11	01	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dokumen yang disusun dan ditetapkan		dokumen					
2	11	01	04	2.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas areal Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang dikelola		Ha					
2	11	01	04	2.01	03	Pengelolaan Kebun Raya	Luas areal Kebun Raya yang dikelola		Ha					
2	11	01	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola		Ha					
2	11	01	04	2.01	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang dikelola							
2	11	01	04	2.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah kelembagaan yang dikembangkan kapasitasnya		lembaga					
							Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya		orang					
2	11	01	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola							
2	11	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3 yang dapat dikendalikan	100,00	%		-	20.000.000		20.000.000
2	11	01	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3					-	-		-
2	11	01	05	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang difasilitasi		izin					
2	11	01	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Laporan hasil verifikasi Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3		laporan					
2	11	01	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten					-	20.000.000		20.000.000
2	11	01	05	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin Pengumpulan Limbah B3 yang difasilitasi		izin					
2	11	01	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3	1	laporan			20.000.000	1	20.000.000
2	11	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase izin lingkungan dan PPLH yang dibina dan diawasi sesuai ketentuan peraturan perundangan		%		16.500.000	46.500.000		16.500.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	11	01	06	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten					16.500.000	46.500.000		16.500.000
2	11	01	06	2.01	01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah izin yang difasilitasi		izin					
2	11	01	06	2.01	02 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kapasitasnya	2	orang			30.000.000		
2	11	01	06	2.01	03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Dokumen hasil Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten		dokumen		16.500.000	16.500.000	0	16.500.000
2	11	01	06	2.01	04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH		dokumen					
2	11	01	07		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang telah memperoleh pengakuan		%		17.900.000	17.900.000		17.900.000
2	11	01	07	2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH					17.900.000	17.900.000		17.900.000
2	11	01	07	2.01	01 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi		dokumen		17.900.000	17.900.000	0	17.900.000
2	11	01	07	2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH					-	-		-
2	11	01	07	2.02	01 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah lembaga yang terlibat dalam Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH		lembaga					
2	11	01	08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sumber daya manusia bidang lingkungan hidup yang tersedia		%		15.000.000	15.000.000		15.000.000
2	11	01	08	2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten					15.000.000	15.000.000		15.000.000
2	11	01	08	2.01	01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup pada Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya		orang					
2	11	01	08	2.01	02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kelompok/lembaga yang dilakukan pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup		kelompok/ lembaga		15.000.000	15.000.000	0	15.000.000
2	11	01	09		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah masyarakat yang diberikan penghargaan setiap tahun		orang		83.500.000	83.500.000		83.500.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	11	01	09	2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten					83.500.000	83.500.000		83.500.000
2	11	01	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah kelompok masyarakat yang dilakukan penilaian kinerja dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	kelompok		83.500.000	83.500.000	0	83.500.000
2	11	01	10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan yang dapat ditangani		%		-	50.000.000		50.000.000
2	11	01	10	2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten					-	50.000.000		50.000.000
2	11	01	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten	Dokumen pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH	dokumen			50.000.000	0	50.000.000
2	11	01	10	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Dokumen hasil pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	dokumen					
2	11	01	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	90,19	%		3.036.250.000	4.286.250.000		4.236.250.000
2	11	01	11	2.01	Pengelolaan Sampah					3.036.250.000	4.286.250.000		4.236.250.000
2	11	01	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten	Jumlah dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah yang disusun	1	dokumen		50.000.000		
2	11	01	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah lokasi Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali sampah perkotaan	1	lokasi	500.000.000	500.000.000	1	500.000.000
2	11	01	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten	Rata-rata sampah perkotaan yang dapat ditangani setiap hari	%	Pengadaan kontainer untuk pasar dan lokasi strategis serta motor sampah	1.351.750.000	2.351.750.000		2.351.750.000
2	11	01	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah lokasi pengelolaan persampahan masyarakat yang disediakan	2	lokasi	1.184.500.000	1.384.500.000	2	1.384.500.000
2	11	01	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	dokumen					
2	11	01	11	2.01	06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Dokumen kebijakan yang disusun	dokumen					
2	11	01	11	2.02	Penerbitan Izin Pendaauran Sampah/ Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta					-	-		-
2	11	01	11	2.02	01	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah permohonan perizinan berusaha yang dilayani dalam 1 tahun	permohonan					
2	11	01	11	2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta					-	-		-
2	11	01	11	2.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah izin yang difasilitasi	izin					
2	11	01	11	2.03	02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Dokumen penilaian kinerja pengelolaan sampah	dokumen					
2	11	01	11	2.03	03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Laporan hasil monitoring dan evaluasi	laporan					
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL								

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju		
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)	
2	12	01			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					5.626.654.169	6.590.759.712		6.159.732.310	
2	12	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		3.746.426.169	4.700.531.712	100	4.269.504.310	
2	12	01	01	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		-	47.000.000	100	47.000.000	
2	12	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		5.000.000	2	5.000.000
2	12	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website		10.000.000		10.000.000
2	12	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		10.000.000	4	10.000.000
2	12	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)		20.000.000	6	20.000.000
2	12	01	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		2.000.000	1	2.000.000
2	12	01	01	2.02	Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		2.715.226.169	3.081.649.812	100	3.189.087.556	
2	12	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	444	OB		2.692.719.919	3.069.649.812	444	3.177.087.556
2	12	01	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			2.000.000	3	2.000.000
2	12	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			5.000.000	14	5.000.000
2	12	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan		22.506.250	5.000.000	1	5.000.000
2	12	01	01	2.03	Administrasi Umum	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		986.200.000	1.521.881.900	100	945.916.754	
						Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%						
2	12	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	100	Surat		9.300.000	10.060.000	100	10.160.600
2	12	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		271.440.000	274.154.400	12	276.895.944
2	12	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB					
2	12	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	33	unit		22.000.000	22.220.000	33	22.442.200
2	12	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	204	OB		211.720.000	211.720.000	204	211.720.000
2	12	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB		17.400.000	17.574.000	0	17.574.000
2	12	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan		unit/ paket					
2	12	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	25	Jenis		24.365.000	24.365.000	25	24.365.000
2	12	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3	Jenis		9.000.000	9.000.000	3	9.000.000
2	12	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	jenis		5.000.000	5.050.000	10	5.100.500
2	12	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8	unit		20.000.000	60.000.000	4	26.000.000
2	12	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan		jenis					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	12	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2	jenis		45.000.000	45.000.000	2	45.450.000
2	12	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	10	jenis		20.000.000	20.200.000	10	20.402.000
2	12	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan		jenis			-	0	-
2	12	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	31	OK		220.375.000	154.262.500	31	157.347.750
							Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	63	OK		15.600.000	15.756.000	63	15.913.560
2	12	01	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan	1	unit			500.000.000	1	
2	12	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit					
2	12	01	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
2	12	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	6	unit			30.000.000		
2	12	01	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
2	12	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		jenis					
2	12	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan	1	unit			20.000.000		
2	12	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	4	jenis		20.000.000	20.200.000	4	20.402.000
2	12	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit					
2	12	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	24	unit		32.000.000	32.320.000	24	32.643.200
2	12	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	10	unit/set		43.000.000	50.000.000	10	50.500.000
2	12	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
2	12	01	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
2	12	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit					
2	12	01	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
2	12	01	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
2	12	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		45.000.000	50.000.000	100	87.500.000
2	12	01	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
2	12	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	90	stell/ pasang		20.000.000		90	45.000.000
2	12	01	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	90	stell/ pasang					
2	12	01	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang				90	22.500.000
2	12	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		stell/ pasang					
2	12	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang		25.000.000			
2	12	01	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	50	orang			20.000.000	50	20.000.000
2	12	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	3	orang			30.000.000		
2	12	01	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio Penduduk Ber KK	0,70	%		921.394.000	921.394.000		921.394.000
2	12	01	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk					921.394.000	921.394.000		921.394.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	12	01	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah penduduk yang dilakukan pendataan		orang					
2	12	01	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah petugas pelayanan pendaftaran penduduk	72	OB		57.600.000	57.600.000	72	57.600.000
2	12	01	02	2.01	03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah permasalahan pendaftaran penduduk yang diselesaikan		kasus					
2	12	01	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah unit pelayanan pendaftaran penduduk	23	unit		83.294.000	83.294.000	23	83.294.000
2	12	01	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan		dokumen					
2	12	01	02	2.01	06	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan		dokumen					
2	12	01	02	2.01	07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen yang diterbitkan	87.598	unit		780.500.000	780.500.000	87.598	780.500.000
2	12	01	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio pasangan berakte nikah	0,35	%		55.400.000	55.400.000		55.400.000
2	12	01	03	2.01		<i>Pelayanan Pencatatan Sipil</i>					<i>55.400.000</i>	<i>55.400.000</i>		<i>55.400.000</i>
2	12	01	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan		dokumen					
2	12	01	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah petugas pelayanan pencatatan sipil	84	OB		55.400.000	55.400.000	84	55.400.000
2	12	01	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Dokumen Kependudukan yang diunggah kedalam database	100,00	%		903.434.000	868.434.000		868.434.000
							Cakupan Inovasi Pelayanan Pemanfaatan Data	100,00	%					
2	12	01	04	2.01		<i>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</i>					<i>366.765.000</i>	<i>331.765.000</i>		<i>331.765.000</i>
2	12	01	04	2.01	01	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pendaftaran Penduduk	Jumlah petugas pengumpulan dan analisis data pendaftaran penduduk	420	OB		325.600.000	290.600.000	420	290.600.000
2	12	01	04	2.01	02	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen data pencatatan sipil	1	dokumen		41.165.000	41.165.000	1	41.165.000
2	12	01	04	2.01	03	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Perkembangan Penduduk	Dokumen Perkembangan Penduduk yang telah dilakukan analisis dan diseminasi		dokumen					
2	12	01	04	2.01	04	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dokumen Data Kependudukan yang disajikan		dokumen					
2	12	01	04	2.01	05	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Laporan pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		laporan					
2	12	01	04	2.01	06	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Laporan pelaksanaan Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah		laporan					
2	12	01	04	2.02		<i>Penataan Administrasi Kependudukan</i>					-	-		-
2	12	01	04	2.02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten	Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Urusan Administrasi Kependudukan		dokumen					
2	12	01	04	2.02	02	Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Blangko Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang diadakan		lembar					
2	12	01	04	2.03		<i>Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan</i>					<i>536.669.000</i>	<i>536.669.000</i>		<i>536.669.000</i>

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	12	01	04	2.03	01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah koordinasi dalam rangka Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	kali		293.499.000	293.499.000		293.499.000
2	12	01	04	2.03	02	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten	Jumlah koordinasi dalam rangka Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan	kali					
2	12	01	04	2.03	03	Koordinasi Antarlembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten dalam Penertiban Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah koordinasi dalam rangka Penertiban Pelayanan Administrasi Kependudukan	kali					
2	12	01	04	2.03	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting	Jumlah masyarakat yang dilayani dalam Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting	orang					
2	12	01	04	2.03	05	Penerimaan Dan Permintaan Data Kependudukan Dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Frekuensi Penerimaan Dan Permintaan Data Kependudukan Dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	kali					
2	12	01	04	2.03	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	laporan					
2	12	01	04	2.03	07	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Laporan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	laporan					
2	12	01	04	2.03	08	Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan	498	orang	243.170.000	243.170.000	500	243.170.000
2	12	01	04	2.03	09	Kerja Sama Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Perguruan Tinggi	Jumlah Kerja Sama Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Perguruan Tinggi		MoU				
2	12	01	04	2.03	10	Komunikasi, Informasi, Dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Dan Masyarakat	Jumlah pemangku kepentingan dan masyarakat yang terlibat dalam komunikasi, informasi dan edukasi		orang				
2	12	01	04	2.03	11	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Dokumen Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan		dokumen				
2	12	01	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan				-	-		-
2	12	01	04	2.04	01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Laporan pelaksanaan Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil		laporan				
2	12	01	04	2.04	02	Pembinaan, Pembimbingan, dan Supervisi terhadap Pelaksanaan Tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota, termasuk Meminta Laporan Pelaksanaan Tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang Berkaitan dengan Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan pelaksanaan Pembinaan, Pembimbingan, dan Supervisi terhadap Pelaksanaan Tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		laporan				
2	12	01	04	2.04	03	Pembinaan, Pembimbingan, dan Supervisi terhadap Penugasan kepada Desa atau yang Disebut dengan Nama Lain	Laporan pelaksanaan Pembinaan, Pembimbingan, dan Supervisi terhadap Penugasan kepada Desa atau yang Disebut dengan Nama Lain		laporan				

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	12	01	04	2.04	04	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam Rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Laporan pelaksanaan Supervisi		laporan					
2	12	01	04	2.04	05	Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan		laporan					
2	12	01	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang tersedia dalam profil kependudukan		%		-	45.000.000		45.000.000
2	12	01	05	2.01		<i>Penyusunan Profil Kependudukan</i>					-	45.000.000		45.000.000
2	12	01	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten	Jumlah dokumen data kependudukan yang disediakan	2	dokumen			35.000.000	2	35.000.000
2	12	01	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan	1	dokumen			10.000.000	1	10.000.000
2	13					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
2	13	01				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					276.191.213.013	287.643.839.411		287.934.221.962
2	13	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		3.906.913.013	4.097.458.603	100	4.359.556.154
2	13	01	01	2.01		<i>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu</i>	100,00	%		50.000.000	40.600.000	100	87.600.000
2	13	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		5.000.000	2	10.000.000
2	13	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website	50.000.000	5.000.000		35.000.000
2	13	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		8.000.000	4	10.000.000
2	13	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)		17.600.000	6	17.600.000
2	13	01	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		5.000.000	1	15.000.000
2	13	01	01	2.02		<i>Administrasi Keuangan</i>	<i>Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu</i>	100,00	%		2.949.393.013	3.217.758.603	100	3.329.960.154
2	13	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	480	OB		2.926.886.763	3.205.758.603	480	3.317.960.154
2	13	01	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			2.000.000	3	2.000.000
2	13	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			5.000.000	14	5.000.000
2	13	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan		22.506.250	5.000.000	1	5.000.000
2	13	01	01	2.03		<i>Administrasi Umum</i>	<i>Persentase pemenuhan administrasi perkantoran</i>	100,00	%		907.520.000	839.100.000	100	839.546.000
							<i>Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</i>		%					
2	13	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	320	Surat		19.800.000	19.800.000	320	20.196.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	13	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		13.800.000	16.380.000	12	16.380.000
2	13	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB					
2	13	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	20	unit		24.000.000	24.000.000	20	24.480.000
2	13	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	348	OB		327.920.000	327.920.000	348	327.920.000
2	13	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB					
2	13	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan	25	unit/ paket		8.000.000	8.000.000	25	8.160.000
2	13	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	25	Jenis		25.000.000	25.000.000	25	25.000.000
2	13	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3	Jenis		20.000.000	20.000.000	3	20.000.000
2	13	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	2	jenis			2.500.000	2	2.550.000
2	13	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10	unit		24.000.000	24.000.000	10	24.480.000
2	13	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan		jenis					
2	13	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2	jenis		10.000.000	10.000.000	2	10.200.000
2	13	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	20	jenis			5.000.000	2	5.100.000
2	13	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3	jenis		45.000.000	45.000.000	3	45.000.000
2	13	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	42	OK		300.000.000	210.000.000	2	214.200.000
							Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	80	OK		20.000.000	20.000.000	2	20.400.000
2	13	01	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit					
2	13	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit					
2	13	01	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
2	13	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1	unit			4.000.000	1	4.080.000
2	13	01	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
2	13	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		jenis					
2	13	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan	1	unit			7.500.000		
2	13	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor		jenis					
2	13	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit					
2	13	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	20	unit		70.000.000	70.000.000	20	71.400.000
2	13	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
2	13	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
2	13	01	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
2	13	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit					
2	13	01	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	13	01	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
2	13	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		-	-	100	102.450.000
2	13	01	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
2	13	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	69	stell/ pasang					
2	13	01	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan		stell/ pasang				40	20.000.000
2	13	01	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang				39	13.650.000
2	13	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	69	stell/ pasang					
2	13	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang					
2	13	01	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan		orang				50	18.800.000
2	13	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis		orang				5	50.000.000
2	13	01	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang telah ditata		%		271.920.500.000	282.401.730.808		282.401.730.808
2	13	01	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa					271.920.500.000	282.401.730.808		282.401.730.808
2	13	01	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Laporan pelaksanaan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa		laporan					
2	13	01	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	50	desa			50.000.000	50	50.000.000
2	13	01	02	2.01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Dokumen Penataan Kewenangan Desa		dokumen					
2	13	01	02	2.01	04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Dokumen Penamaan dan Kode Desa		dokumen					
2	13	01	02	2.01	05	Penyediaan Prasarana dan Sarana Transportasi antar Wilayah	Jumlah wilayah yang disediakan Prasarana dan Sarana Transportasi antar Wilayah		wilayah					
2	13	01	02	2.01	06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang disediakan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa		desa					
2	13	01	02	2.01	07	Penyediaan dana Operasional, Penghasilan Tetap, dan Tunjangan Lainnya bagi Perangkat Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang disediakan dana Operasional, Penghasilan Tetap, dan Tunjangan Lainnya bagi Perangkat Pemerintahan Desa	207	desa		271.920.500.000	282.351.730.808	207	282.351.730.808
2	13	01	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Skor rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM)	0,00	Nilai		115.100.000	126.200.000		128.724.000
2	13	01	03	2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDes Bersama	6,00	BUMDes					
2	13	01	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa	Jumlah kerjasama antar desa yang telah ada	100	desa		115.100.000	126.200.000		128.724.000
2	13	01	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah desa yang difasilitasi	100	desa		63.100.000	63.100.000		64.362.000
2	13	01	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah desa yang difasilitasi	100	desa		52.000.000	63.100.000		64.362.000
2	13	01	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang mampu melaksanakan tata laksana pemerintahan desa secara tertib	100,00	%		206.200.000	905.950.000		575.980.000
2	13	01	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100,00	%		206.200.000	905.950.000		575.980.000
2	13	01	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	207	desa		59.700.000	59.700.000	207	60.894.000
2	13	01	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Produk Hukum Desa		desa					
2	13	01	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan RKPDesa	207	desa		31.000.000	59.600.000		41.400.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
							Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan RPJMDesa	91	desa					
2	13	01	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	207	desa			50.000.000	207	50.000.000
2	13	01	04	2.01	05	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD	Jumlah aparatur pemerintahan Desa ditingkatkan kapasitasnya	621	orang			50.000.000	621	50.000.000
							Jumlah anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	207	orang					
2	13	01	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyelenggaraan Musyawarah Desa		desa					
2	13	01	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Peraturan Desa yang dilakukan evaluasi dan pengawasan	207	desa			30.000.000		30.000.000
2	13	01	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar desa yang dibina	80	BUM Desa dan Lembaga		68.000.000	68.000.000		68.000.000
2	13	01	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	91	Desa			500.000.000		
2	13	01	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	91	desa			13.650.000		
2	13	01	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi	207	desa		47.500.000	50.000.000	207	159.152.000
2	13	01	04	2.01	12	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	207	desa			25.000.000		116.534.000
2	13	01	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase LPM yang mandiri	0,00	%		42.500.000	112.500.000		468.231.000
2	13	01	05	2.01		<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten</i>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang telah aktif Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa				42.500.000	112.500.000		468.231.000
							Jumlah Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten yang aktif memberdayakan masyarakat		lembaga					
							Jumlah kelompok Masyarakat Hukum Adat yang aktif membangun desa		kelompok					
2	13	01	05	2.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Laporan pelaksanaan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		laporan					
2	13	01	05	2.01	02	Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kelembagaan masyarakat desa dan masyarakat hukum adat yang dibina	26	lembaga			20.000.000	26	68.526.000
2	13	01	5	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah kelembagaan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	40	desa		42.500.000	42.500.000	40	43.350.000
2	13	01	5	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan	Jumlah lembaga adat yang menerima Sarana dan Prasarana Kelembagaan		lembaga					
2	13	01	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah BUM Desa yang dibina	207	BUM Desa			25.000.000	207	140.440.000
2	13	01	5	2.01	06	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah desa yang difasilitasi	207	desa			25.000.000	207	215.915.000
2	14					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
2	14	01				<i>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</i>					8.636.166.105	10.328.235.817		10.983.251.774
2	14	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		2.320.547.855	3.074.226.963	100	3.111.862.529

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	14	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		-	34.766.000	100	34.766.000
2	14	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		4.949.000	2	4.949.000
2	14	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website		4.550.000		4.550.000
2	14	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		8.108.000	4	8.108.000
2	14	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)		15.227.000	6	15.227.000
2	14	01	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		1.932.000	1	1.932.000
2	14	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		1.640.086.105	2.075.134.239	100	2.147.420.805
2	14	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	228	OB		1.617.579.855	2.065.330.439	228	2.137.617.005
2	14	01	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			2.000.000	3	2.000.000
2	14	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			4.691.800	14	4.691.800
2	14	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan		22.506.250	3.112.000	1	3.112.000
2	14	01	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		680.461.750	964.326.724	100	887.775.724
							Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
2	14	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	1.000	Surat		14.898.000	15.489.000	1.000	15.489.000
2	14	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		9.718.440	11.930.000	12	11.930.000
2	14	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB					
2	14	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	61	unit		46.000.000	126.100.000	77	126.100.000
2	14	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	252	OB		219.360.000	258.000.000	252	258.000.000
2	14	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB					
2	14	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan	25	unit/ paket		5.915.000	5.900.000	25	5.900.000
2	14	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	25	Jenis		35.553.040	34.527.419	25	34.527.419
2	14	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2	Jenis		8.050.000	6.911.290	2	6.911.290
2	14	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan		jenis			1.716.500		1.716.500
2	14	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	9	unit		39.800.000	70.826.000	6	57.275.000
2	14	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan		jenis					
2	14	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2	jenis		9.000.000	9.180.000	2	9.180.000
2	14	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	5	jenis			6.000.000	5	6.000.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	14	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	2	jenis		22.490.000	33.800.000	2	33.800.000
2	14	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	30	OK		215.608.450	150.925.915	30	150.925.915
							Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	196	OK			49.020.600	196	49.020.600
2	14	01	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit					
2	14	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit					
2	14	01	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
2	14	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		unit					
2	14	01	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
2	14	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		jenis					
2	14	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan		unit					
2	14	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	2	jenis			70.000.000	2	7.000.000
2	14	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit					
2	14	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	51	unit		54.068.820	114.000.000	51	114.000.000
2	14	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
2	14	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
2	14	01	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
2	14	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit					
2	14	01	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
2	14	01	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
2	14	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		-	-	100	41.900.000
2	14	01	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
2	14	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		stell/ pasang					22.400.000
2	14	01	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
2	14	01	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan	35	stell/ pasang					
2	14	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		stell/ pasang				39	19.500.000
2	14	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang					
2	14	01	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan		orang					
2	14	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis		orang					
2	14	01	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk	100,00	%		20.008.600	94.195.600		20.008.600

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	14	01	02	2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					-	-		-
2	14	01	02	2.01	01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah perangkat daerah yang melakukan penyerasian kebijakan terhadap program KKBPK		Perangkat Daerah					
2	14	01	02	2.01	02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten	Jumlah GDPK yang disusun		GDPK					
						Jumlah GDPK yang dimanfaatkan		GDPK					
2	14	01	02	2.01	03 Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah survei/pendataan yang didukung pelaksanaannya		survey/ pendataan					
2	14	01	02	2.01	04 Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah survei/pendataan yang dilaksanakan		survey/ pendataan					
2	14	01	02	2.01	05 Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah lembaga pendidikan formal yang telah membangun bekerjasama dalam pelaksanaan pendidikan kependudukan		lembaga pendidikan					
2	14	01	02	2.01	06 Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah lembaga pendidikan non formal yang telah membangun bekerjasama dalam pelaksanaan pendidikan kependudukan		lembaga pendidikan					
2	14	01	02	2.01	07 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten	Jumlah Materi Pendidikan Kependudukan yang disediakan dan dikembangkan untuk pendidikan formal		materi					
2	14	01	02	2.01	08 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten	Jumlah Materi Pendidikan Kependudukan yang disediakan dan dikembangkan untuk pendidikan non formal		materi					
2	14	01	02	2.01	09 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal yang dilakukan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan		satuan pendidikan					
2	14	01	02	2.01	10 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah satuan pendidikan yang mengimplementasikan pendidikan kependudukan		satuan pendidikan					
2	14	01	02	2.01	11 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan yang mengimplementasikan pendidikan kependudukan		kelompok					
2	14	01	02	2.01	12 Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah pemangku kepentingan yang diadvokasi		orang					
2	14	01	02	2.01	13 Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti sosialisasi		orang					
2	14	01	02	2.01	14 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah peserta sarasehan		orang					
2	14	01	2	2.01	15 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah peserta dan pelaksanaan rapat pengendalian Program KKBK		OK					
2	14	01	02	2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk yang dilaksanakan		laporan		20.008.600	94.195.600		20.008.600
2	14	01	02	2.02	01 Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah dokumen hasil rumusan		dokumen					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	14	01	02	2.02	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang disediakan dan diolah	1	dokumen		9.390.000	9.390.000	1	9.390.000
2	14	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dokumen yang disusun		dokumen					
2	14	01	02	2.02	04	Pemetaan Kependudukan	Jumlah laporan pelaksanaan pemetaan		laporan					
2	14	01	02	2.02	05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah dokumen yang disusun		dokumen					
2	14	01	02	2.02	06	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah model yang dikembangkan		jenis					
2	14	01	02	2.02	07	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)	Jumlah dokumen hasil pengukuran dan perhitungan indikator kerentanan dampak kependudukan		dokumen					
2	14	01	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah kampung KB yang dibentuk Rumah Data Kependudukan		Kampung KB					
2	14	01	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah laporan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan							
2	14	01	02	2.02	10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Data keluarga hasil pemutakhiran yang dimanfaatkan		data keluarga					
2	14	01	2	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Data dan Informasi Keluarga yang disediakan		data keluarga			47.322.000		
2	14	01	2	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Persentase data keluarga yang dicatat dan dikumpulkan		%		10.618.600	10.618.600		10.618.600
2	14	01	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah laporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		laporan			6.333.000		
2	14	01	02	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah laporan hasil Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK		laporan			20.532.000		
2	14	01	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	22,75	%		4.481.820.850	5.468.610.095		5.830.467.645
2	14	01	03	2.01		<i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Binaan</i>	<i>Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Binaan</i>		%		<u>1.489.250.000</u>	<u>1.616.860.000</u>		<u>1.616.860.000</u>
2	14	01	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Stakeholders dan Mitra Kerja yang diadvokasi		orang					
2	14	01	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Stakeholders dan Mitra Kerja yang dilakukan KIE		orang					
2	14	01	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah bahan penunjang Media KIE yang diadakan dan didistribusikan dalam 1 tahun	380	unit/ paket		215.090.000	184.360.000	380	184.360.000
2	14	01	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Jumlah Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang yang digunakan sebagai alat promosi dan KIE Program KKBPK		media					
2	14	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas)	Jumlah peserta yang difasilitasi dalam pelaksanaan Harganas	500	orang			232.000.000		232.000.000
2	14	01	03	2.01	06	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang yang digunakan sebagai alat pencitraan Program KKBPK							
2	14	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah lokakarya yang dilaksanakan di Kampung KB	59	kali		81.760.000	290.400.000	59	290.400.000
							Jumlah pertemuan forum musyawarah di kampung KB	59	kali				59	
2	14	01	03	2.01	08	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	Jumlah sarana yang diadakan		unit		1.192.400.000	910.100.000	0	910.100.000
2	14	01	03	2.01	09	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian Program KKBPK		kali					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	14	01	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan pelaksanaan pendayagunaan PKB/PLKB		%		792.097.500	1.678.720.000		2.059.720.000
2	14	01	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah pelaksanaan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB		kali					
2	14	01	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang disediakan	2	unit/ paket		792.097.500	319.000.000	2	700.000.000
2	14	01	03	2.02	03	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PL KB)	Jumlah Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PL KB) yang didayagunakan		orang					
2	14	01	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader IMP yang digerakkan		orang			1.359.720.000		1.359.720.000
2	14	01	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten	Cakupan pelaksanaan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB		%		161.109.850	209.707.095		190.564.645
2	14	01	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang menerima distribusi alat dan obat kontrasepsi		Fasyankes		63.336.000	63.166.250		63.166.250
2	14	01	03	2.03	02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan Petugas yang ditingkatkan kompetensinya		orang					
2	14	01	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah PUS pengguna MKJP	1.380	PUS		66.574.400	95.968.395	1.380	95.968.395
2	14	01	03	2.03	04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah alat yang disediakan		unit					
2	14	01	03	2.03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah dokumen yang disusun		dokumen					
2	14	01	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana penunjang pelayanan KB yang disediakan		unit/paket					
2	14	01	03	2.03	07	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	Jumlah Peserta KB yang menerima Pembinaan Pasca Pelayanan		orang					
2	14	01	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi		Fasyankes			20.473.000		
2	14	01	03	2.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Fasilitas kesehatan yang melakukan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi		Fasyankes					
2	14	01	03	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang ditingkatkan kompetensinya		orang					
2	14	01	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah operasional pelayanan KB bergerak yang mendapat dukungan		kali					
2	14	01	03	2.03	12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Fasilitas kesehatan yang melakukan promosi dan konseling Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran		Fasyankes					
2	14	01	3	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah peserta KB pria yang dibina	280	peserta		31.199.450	30.099.450	200	31.430.000
2	14	01	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah organisasi masyarakat yang diberdayakan		organisasi		2.039.363.500	1.963.323.000		1.963.323.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	14	01	03	2.04	01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah mitra kerja yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB	1.259	orang		1.362.000.000	1.362.000.000	1.259	1.362.000.000
2	14	01	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang dibangun secara terintegrasi	59	Kampung KB		38.506.500	290.400.000	59	290.400.000
2	14	01	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah pertemuan kelompok kerja di kampung KB	708	kali		589.600.000	290.400.000	708	290.400.000
2	14	01	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah kampung KB yang dibina secara terpadu	59	kampung KB		49.257.000	20.523.000	59	20.523.000
2	14	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	27,00	%		1.813.788.800	1.691.203.159		2.020.913.000
2	14	01	04	2.01		<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>					<u>1.813.788.800</u>	<u>841.203.159</u>		<u>1.170.913.000</u>
2	14	01	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dibentuk		kelompok					
2	14	01	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah sarana yang diadakan		unit/ paket			52.250.000	31	52.250.000
2	14	01	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh kelompok kegiatan di kampung KB	132	kali		609.400.000	15.640.000	132	448.800.000
							Jumlah kelompok (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan UPPKS) yang dibina	45	kelompok		116.608.300	115.619.900	45	91.693.000
2	14	01	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang mengikuti orientasi/pelatihan		orang			79.512.759		
2	14	01	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang menerima biaya operasional		orang					
2	14	01	04	2.01	06	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang menerima biaya operasional		kelompok					
2	14	01	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta promosi dan sosialisasi		orang			290.400.000	0	290.400.000
2	14	01	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah peserta promosi dan sosialisasi		orang					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	14	01	04	2.01	09	Penyerasian Kebijakan Dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Laporan pelaksanaan penyerasian kebijakan Program yang Mendukung Tercapainya IPK		laporan					
2	14	01	04	2.01	10	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah materi IPK yang disediakan		materi					
2	14	01	04	2.01	11	Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah pelaksanaan advokasi dan promosi IPK		kali					
2	14	01	04	2.01	12	Sosialisasi IPK	jumlah peserta sosialisasi	120	orang		37.780.500	37.780.500	120	37.770.000
2	14	01	04	2.01	13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Laporan pelaksanaan koordinasi evaluasi pencapaian IPK		laporan		1.050.000.000	250.000.000		250.000.000
2	14	01	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang ditingkatkan peran sertanya dalam pembangunan keluarga		organisasi		-	850.000.000		850.000.000
2	14	01	04	2.02	01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan		kebijakan					
2	14	01	04	2.02	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan yang didayagunakan		orang/ organisasi					
2	14	01	04	2.02	03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas		orang			350.000.000	0	350.000.000
2	14	01	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah media/mitra kerja dalam pelaksanaan promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja		media/ mitra kerja			500.000.000	0	500.000.000
						Jumlah peserta sosialisasi			orang					
2	15					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
2	15	01				Dinas Perhubungan					8.531.666.687	14.210.360.354		11.681.177.621
2	15	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		4.319.867.611	4.515.195.454	100	4.582.700.471
2	15	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		-	44.072.800	100	44.072.800
2	15	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		4.398.000	2	4.398.000
2	15	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website		6.678.000		6.678.000
2	15	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		6.918.000	4	6.918.000
2	15	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)		23.354.000	6	23.354.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	15	01	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		2.724.800	1	2.724.800
2	15	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		3.442.170.187	3.216.085.413	100	3.328.344.966
2	15	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	504	OB		3.419.663.937	3.207.415.813	504	3.319.675.366
2	15	01	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			1.820.000	3	1.820.000
2	15	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			4.194.800	14	4.194.800
2	15	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan		22.506.250	2.654.800	1	2.654.800
2	15	01	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		868.197.424	1.183.537.241	100	1.135.582.705
							Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
2	15	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	2.500	Surat		39.600.000	43.200.000	2.500	43.632.000
2	15	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		86.385.720	87.248.316	12	88.120.799
2	15	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB					
2	15	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	30	unit		46.050.000	59.250.000	30	59.842.500
2	15	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	180	OB		178.026.000	260.520.000	180	260.520.000
2	15	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan	36	OB		23.171.325	28.800.000	36	29.088.000
2	15	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan	36	unit/ paket		12.936.315	8.122.300	36	8.203.523
2	15	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan		Jenis		57.649.500	57.801.600	0	57.801.600
2	15	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan		Jenis		25.283.400	25.285.400	0	25.285.400
2	15	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	106	jenis		10.975.750	10.975.750	106	11.085.508
2	15	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	unit/paket			3.971.325	1	3.971.325
2	15	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan		jenis		1.987.000	1.977.500		
2	15	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	6	jenis		11.000.000	11.000.000	6	11.000.000
2	15	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan		jenis			12.000.000	0	12.000.000
2	15	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan		jenis		22.865.000	22.865.000	0	22.865.000
2	15	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	22	OK		160.105.000	112.073.500	22	114.314.970
							Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	64	OK		15.980.000	15.980.000	64	16.139.800
2	15	01	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit					
2	15	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit					
2	15	01	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
2	15	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		unit					
2	15	01	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	15	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	3	jenis		14.817.550	14.817.550	3	20.000.000
2	15	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan		unit					
2	15	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	14	jenis		18.807.000	79.221.000	14	20.000.000
2	15	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit					
2	15	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	29	unit		142.557.864	328.428.000	29	331.712.280
2	15	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
2	15	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
2	15	01	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
2	15	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit					
2	15	01	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
2	15	01	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
2	15	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		9.500.000	71.500.000	100	74.700.000
2	15	01	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit		5.000.000			
2	15	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	63	stell/ pasang					25.200.000
2	15	01	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
2	15	01	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
2	15	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		stell/ pasang				63	35.000.000
2	15	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1	orang		4.500.000	4.500.000	1	4.500.000
2	15	01	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan		orang					
2	15	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	6	orang			67.000.000	1	10.000.000
2	15	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan ketersediaan PJU (Penerangan Jalan Umum)	300	Titik		4.114.153.750	9.564.763.750		6.968.076.000
							Pembangunan Sarana & Prasarana Pengamanan & Keselamatan Lalu Lintas	78,00	%					
							Jumlah arus penumpang angkutan umum	421.300	orang					
							Peningkatan Pengembangann sarana dan Prasarana Transportasi	82,00	%					
2	15	01	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten					-	-		-
2	15	01	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang disusun		dokumen					
2	15	01	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan		dokumen					
							Jumlah peserta Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten		orang					
2	15	01	02	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	Laporan hasil Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten		laporan					
2	15	01	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten					1.837.090.100	2.362.090.100		2.362.090.100

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	15	01	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten yang dibangun		unit					
2	15	01	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang/disediakan	337	unit		327.092.000	827.092.000	337	827.092.000
2	15	01	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah prasarana jalan yang direhabilitasi dan dipelihara	70	unit	Kegiatan PJU dari Dinas PUPR	1.480.000.000	1.505.000.000	70	1.505.000.000
							Jumlah titik PJU yang dipelihara	240	titik				240	
			0				Rehab dan Pemeliharaan PJU meterisasi dalam wil. Kota Belopa	80,00	titik	500.000.000,00	-		80,00	
							Rehab dan Pemeliharaan PJU meterisasi dalam wilayah Kota Belopa	100	titik				100	
2	15	01	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah sarana dan prasarana jalan yang direhabilitasi dan dipelihara	5	unit		29.998.100	29.998.100	5	29.998.100
2	15	01	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C					-	4.000.000.000		1.500.000.000
2	15	01	02	2.03	01	Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Dokumen rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang disusun		dokumen					
2	15	01	02	2.03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah terminal yang dibangun	1	unit			4.000.000.000		
2	15	01	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah sarana dan prasarana terminal yang dikembangkan		unit				1	1.500.000.000
2	15	01	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Fasilitas Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang direhab dan dipelihara		unit					
2	15	01	02	2.03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah peserta peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C		orang					
2	15	01	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir					-	-		-
2	15	01	02	2.04	01	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pemohon Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang difasilitasi		permohon					
2	15	01	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten		laporan					
2	15	01	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					50.270.000	160.782.500		106.992.500
2	15	01	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang disediakan	4	unit			53.790.000		
2	15	01	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		orang					
2	15	01	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang dilakukan uji berkala	1.000	unit		50.270.000	62.128.000	1.000	62.128.000
2	15	01	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang disediakan		lembar					
2	15	01	02	2.05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah peserta Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		orang					
2	15	01	02	2.05	06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Laporan hasil Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji		laporan					
2	15	01	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dipelihara	5	unit			44.864.500	5	44.864.500
2	15	01	02	2.05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		laporan					
2	15	01	02	2.05	09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditetapkan		dokumen					
2	15	01	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		laporan					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	15	01	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten					2.156.794.300	2.759.678.050		2.792.078.050
2	15	01	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan hasil pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi		laporan					
2	15	01	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diadakan dan dipasang	52	unit	Pindah dari PUPR	1.820.000.000	2.150.000.000	1	2.182.400.000
		01					Jumlah PJU yang dipasang				320.000.000			
		01					Pengadaan dan pemasangan PJU poros pammanu - paburinti	28,00	titik	1.500.000.000				
		01					Pemasangan PJU Dalam wil. Kab Luwu	130,00	titik					
		01					Pemasangan PJU dDesa Samulang	25,00	titik	62.000.000,00				
		01					Dusun Sambua,Jambu.P.Tempe, B.rombe	30,00	titik	75.000.000,00				
		01					Pemasangan PJU dDesa langkidi	50,00	titik	125.000.000,00				
		01					Pemasangan PJU Desa To'long	50,00	titik	125.000.000,00				
		01					Pemasangan PJU dEsa Lamunre	10,00	titik	25.000.000,00				
		01					Pemasangan PJU Kel. Tanamanai	20,00	titik	50.000.000,00				
		01					Pemasangan PJU dDesa Balu Balu	10,00	titik	25.000.000,00				
		01					Pemasangan PJU dDesa Desa Posi	20,00	titik	50.000.000,00				
		01					Pemasangan PJU dDesa Kelurahan S	30,00	titik	75.000.000,00				
		01					Pemasangan PJU dDesa Desa Tanarigella	10,00	titik	25.000.000,00				
		01					Pemasangan PJU Pabbaresseng	50,00	titik	125.000.000,00				
		01					Pemasangan PJU dDesa Desa Lengko	50,00	titik	125.000.000,00				
		01					Pemasangan PJU dDesa Desa Tampunia	20,00	titik	50.000.000,00				
		01					Pemasangan PJU dDesa Desa Tanjong	20,00	titik	50.000.000,00				
		01					Pemasangan PJU dDesa Desa Malenggang	20,00	titik	50.000.000,00				
		01					Pemasangan PJU dDesa Desa Seriti	25,00	titik	62.500.000,00				
		01					Pemasangan PJU dDesa Desa Pelalan	25,00	titik	62.500.000,00				
		01					Pemasangan PJU dDesa Lamasi Timu	50,00	titik	125.000.000,00				
		01					Pemasangan PJU dDesa Kel.Lamasi	25,00	titik	62.500.000,00				
		01					Pemasangan PJU dDesa Desa Se'Por	50,00	titik	125.000.000,00				
		01					Pemasangan PJU dDesa Desa To'pong	40,00	titik	100.000.000,00				
		01					Desa Pongsamelung	40,00	titik	100.000.000,00				
		01					Pemasangan PJU Kel.Pattedong	20,00	titik	50.000.000,00				
		01					Pemasangan PJU dDesa Desa Bakti	40,00	titik	100.000.000,00				
		01					Pemasangan PJU dDesa Desa Buntu K	20,00	titik	50.000.000,00				
		01					Pemasangan PJU dDesa Desa Bassiar	40,00	titik	100.000.000,00				
		01					Pemasangan PJU dDesa Desa Lampua	10,00	titik	25.000.000,00				
		01					Pemasangan PJU Desa BUNTU BARA	35,00	titik	87.500.000,00				
		01					Pemasangan PJU dDesa Botta	10,00	titik	25.000.000,00				
		01					Pemasangan PJU dDesa Papakaju	35,00	titik	87.500.000,00				
		01					Pemasangan PJU Kelurahan Bulu	50,00	titik	125.000.000,00				
		01					Pemasangan PJU Kelurahan Mario	30,00	titik	75.000.000,00				
		01					Pemasangan PJU Kelurahan wonosari	30,00	titik	75.000.000,00				
		01					Pemasangan PJU dsn Kombong	20,00	titik	50.000.000,00				
		01					Pengadaan dan pemasangan PJU poros pammanu - paburinti	28,00	titik	1.800.000.000				
							Jumlah PJU yang dipasang	20	titik				20	
2	15	01	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi		kali					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	15	01	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi	Jumlah titik pengawasan dan patroli keselamatan angkutan jalan	22	titik		336.794.300	609.678.050	22	609.678.050
2	15	01	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten					-	164.427.100		19.130.000
2	15	01	02	2.07	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Dokumen Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang ditetapkan	2	dokumen			145.297.100		
2	15	01	02	2.07	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang ditingkatkan kapasitasnya		orang					
2	15	01	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2	laporan			19.130.000	2	19.130.000
2	15	01	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Laporan pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin		laporan					
2	15	01	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					69.999.350	-		69.999.350
2	15	01	02	2.08	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang ditingkatkan kapasitasnya		orang					
2	15	01	02	2.08	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor		laporan					
2	15	01	02	2.08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal		laporan					
2	15	01	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten	Jumlah titik pengawasan dan patroli keselamatan angkutan jalan	22	titik		69.999.350		22	69.999.350
2	15	01	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		laporan					
2	15	01	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten					-	117.786.000		117.786.000
2	15	01	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota yang disediakan	2	unit			117.786.000	2	117.786.000
2	15	01	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten	Laporan pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang		laporan					
2	15	01	02	2.10		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten					-	-		-
2	15	01	02	2.10	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota yang disediakan		unit					
2	15	01	02	2.10	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten	Laporan pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang		laporan					
2	15	01	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten					-	-		-
2	15	01	02	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten yang disusun		dokumen					
2	15	01	02	2.11	02	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten yang ditetapkan		dokumen					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
							Jumlah peserta sosialisasi							
2	15	01	02	2.11	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten		laporan					
2	15	01	02	2.12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten					-	-		-
2	15	01	02	2.12	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten	Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten yang dirumuskan		dokumen					
2	15	01	02	2.12	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten		kali					
2	15	01	02	2.13		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten					-	-		-
2	15	01	02	2.13	01	Perumusan kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten	Dokumen Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten yang ditetapkan		dokumen					
2	15	01	02	2.13	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten		kali					
2	15	01	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten					-	-		-
2	15	01	02	2.14	01	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah permohonan yang difasilitasi dalam pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		permohonan					
2	15	01	02	2.14	02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten		laporan					
2	15	01	02	2.15		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten					-	-		-
2	15	01	02	2.15	01	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah permohonan yang difasilitasi dalam pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		permohonan					
2	15	01	02	2.15	02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten		laporan					
2	15	01	02	2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten					-	-		-

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	15	01	02	2.16	01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten	Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten		dokumen					
2	15	01	02	2.16	02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang disediakan		dokumen					
2	15	01	02	2.16	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		laporan					
2	15	01	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cakupan pengelolaan pelayaran		%		70.045.326	110.001.150		110.001.150
2	15	01	03	2.01		<i>Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/ Kota</i>				-	-	-	-	-
2	15	01	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut kewenangan Kabupaten dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah permohonan yang difasilitasi		permohonan					
2	15	01	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten		laporan					
2	15	01	03	2.02		<i>Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>				-	-	-	-	-
2	15	01	03	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah permohonan yang difasilitasi		permohonan					
2	15	01	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten		laporan					
2	15	01	03	2.03		<i>Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha</i>				-	-	-	-	-
2	15	01	03	2.03	01	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah permohonan yang difasilitasi		permohonan					
2	15	01	03	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha kewenangan Kabupaten	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha kewenangan Kabupaten		laporan					

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	15	01	03	2.04	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek dalam 1 daerah Kabupaten	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek dalam 1 daerah Kabupaten				-	-		-
2	15	01	03	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten Kewenangan Kabupaten dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah permohonan yang difasilitasi	permohonan					
2	15	01	03	2.04	02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten Kewenangan Kabupaten	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten Kewenangan Kabupaten	laporan					
2	15	01	03	2.05	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha				-	-		-
2	15	01	03	2.05	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha kewenangan Kabupaten dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah permohonan yang difasilitasi	permohonan					
2	15	01	03	2.05	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten	laporan					
2	15	01	03	2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten				-	-		-
2	15	01	03	2.06	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten dalam Daerah Kabupaten	Dokumen Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten dalam Daerah Kabupaten	dokumen					
2	15	01	03	2.06	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten dalam Daerah Kabupaten	Laporan pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten dalam Daerah Kabupaten	laporan					
2	15	01	03	2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten				-	-		-
2	15	01	03	2.07	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten	Dokumen Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten	dokumen					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	15	01	03	2.07	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten	Laporan pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten		laporan					
2	15	01	03	2.08		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal				-	-		-
2	15	01	03	2.08	01	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah permohonan yang difasilitasi		permohonan					
2	15	01	03	2.08	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal		laporan					
2	15	01	03	2.09		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten				-	-		-
2	15	01	03	2.09	01	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten	Laporan pelaksanaan Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten		laporan					
2	15	01	03	2.09	02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten	Dokumen Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten		dokumen					
2	15	01	03	2.09	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten	Laporan pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten		laporan					
2	15	01	03	2.10		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal				-	-		-
2	15	01	03	2.10	01	Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal yang disusun		dokumen					
2	15	01	03	2.10	02	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen Kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal yang ditetapkan		dokumen					
2	15	01	03	2.10	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal		laporan					
2	15	01	03	2.11		Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau				-	-		-

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	15	01	03	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau yang disusun		dokumen					
2	15	01	03	2.11	02	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen Kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau yang ditetapkan		dokumen					
2	15	01	03	2.11	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Laporan pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau		laporan					
2	15	01	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				-	-		-
2	15	01	03	2.12	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah permohonan yang difasilitasi		permohonan					
2	15	01	03	2.12	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dibangun		unit					
2	15	01	03	2.12	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dilakukan pengoperasian dan pemeliharaan		lokasi					
2	15	01	03	2.12	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan pelaksanaan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		laporan					
2	15	01	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				70.045.326	110.001.150		110.001.150
2	15	01	03	2.13	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah permohonan yang difasilitasi		permohonan					
2	15	01	03	2.13	02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun		unit					
2	15	01	03	2.13	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dilakukan pengoperasian dan pemeliharaan		lokasi					
2	15	01	03	2.13	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang diawasi	10	pelabuhan		70.045.326	110.001.150	10	110.001.150
2	15	01	03	2.14		Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal				-	-		-
2	15	01	03	2.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah permohonan yang difasilitasi		permohonan					
2	15	01	03	2.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal		laporan					
2	15	01	03	2.15		Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal				-	-		-
2	15	01	03	2.15	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah permohonan yang difasilitasi		permohonan					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	15	01	03	2.15	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal		laporan					
2	15	01	03	2.16		Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal				-	-		-
2	15	01	03	2.16	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah permohonan yang difasilitasi		permohonan					
2	15	01	03	2.16	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal		laporan					
2	15	01	03	2.17		Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal				-	-		-
2	15	01	03	2.17	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah permohonan yang difasilitasi		permohonan					
2	15	01	03	2.17	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal		laporan					
2	15	01	03	2.18		Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal				-	-		-
2	15	01	03	2.18	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah permohonan yang difasilitasi		permohonan					
2	15	01	03	2.18	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal		laporan					
2	15	01	03	2.19		Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal				-	-		-
2	15	01	03	2.19	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah permohonan yang difasilitasi		permohonan					
2	15	01	03	2.19	02	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan pelaksanaan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal		laporan					
2	15	01	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN					27.600.000	20.400.000		20.400.000
2	15	01	04	2.01		Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter					-	-		-

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	15	01	04	2.01	01	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter							
2	15	01	04	2.02		Penyelenggaraan Kebandarudaraan	Penyelenggaraan Kebandarudaraan				27.600.000	20.400.000		20.400.000
2	15	01	04	2.02	01	Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	Jumlah jenis Pelayanan Jasa Kebandarudaraan yang diselenggarakan		jenis					
2	15	01	04	2.02	02	Penetapan Kebijakan Besar Tarif, Personil, Sarana, dan Prasarana Penyelenggaraan Kebandarudaraan	Dokumen Kebijakan Besar Tarif, Personil, Sarana, dan Prasarana Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang ditetapkan		dokumen					
2	15	01	04	2.02	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan di Sekitar Bandar Udara	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan di Sekitar Bandar Udara		laporan					
2	15	01	04	2.02	04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Penyediaan Aksesibilitas dan Utilitas untuk Menunjang Kegiatan Bandar Udara	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Penyediaan Aksesibilitas dan Utilitas untuk Menunjang Kegiatan Bandar Udara		laporan					
2	15	01	04	2.02	05	Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten	Jumlah bandar udara yang di awasi	1	bandar udara		27.600.000	20.400.000	1	20.400.000
2	15	01	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Cakupan pengelolaan perkeretaapian	0	%		-	-		-
2	15	01	05	2.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian				-			
2	15	01	05	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian yang disusun		dokumen					
2	15	01	05	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Dokumen Kebijakan Rencana Induk Perkeretaapian yang ditetapkan		dokumen					
							Jumlah peserta sosialisasi		orang					
2	15	01	05	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Laporan pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian		laporan					
2	15	01	05	2.02		Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten				-	-		-
2	15	01	05	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah permohonan yang difasilitasi		permohonan					
2	15	01	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten		laporan					
2	15	01	05	2.03		Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten				-	-		-
2	15	01	05	2.03	01	Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Jalurnya Kewenangan Kabupaten	Dokumen rumusan kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Jalurnya Kewenangan Kabupaten		dokumen					
2	15	01	05	2.03	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Jalurnya Kewenangan Kabupaten	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Jalurnya Kewenangan Kabupaten		kali					
2	15	01	05	2.04		Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten	Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten				-	-		-

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	15	01	05	2.04	01	Perumusan kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten	Dokumen Rumusan kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten		dokumen					
2	15	01	05	2.05		Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten				-	-		-
2	15	01	05	2.05	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah permohonan yang difasilitasi		permohonan					
2	15	01	05	2.05	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten		laporan					
2	15	01	05	2.06		Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kabupaten					-	-		-
2	15	01	05	2.06	01	Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten	Dokumen rumusan kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten		dokumen					
2	15	01	05	2.06	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten		kali					
2	15	01	05	2.07		Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Dalam Daerah Kabupaten	Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Dalam Daerah Kabupaten				-	-		-
2	15	01	05	2.07	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Menjadi Kewenangan Kabupaten dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah permohonan yang difasilitasi		permohonan					
2	15	01	05	2.07	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya menjadi Kewenangan Kabupaten	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya menjadi Kewenangan Kabupaten		laporan					
2	16					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2	16	01				Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian								
2	16	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		3.747.189.526	3.775.683.306	100	3.901.856.350
2	16	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		9.250.000	22.000.000	100	22.000.000
2	16	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		5.000.000	2	5.000.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	16	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website		5.000.000		5.000.000
2	16	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan	9.250.000	5.000.000	4	5.000.000
2	16	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)		5.000.000	6	5.000.000
2	16	01	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		2.000.000	1	2.000.000
2	16	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		2.888.019.926	3.080.024.706	100	3.187.405.570
2	16	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	384	OB		2.865.513.676	3.068.024.706	384	3.175.405.570
2	16	01	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			2.000.000	3	2.000.000
2	16	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			5.000.000	14	5.000.000
2	16	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan		22.506.250	5.000.000	1	5.000.000
2	16	01	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		754.919.600	673.658.600	100	677.450.780
							Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
2	16	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi		Surat		3.750.000	3.750.000	0	3.750.000
2	16	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		15.000.000	15.000.000	12	15.000.000
2	16	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB			-	0	-
2	16	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan		unit		17.000.000	17.000.000	0	17.000.000
2	16	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	204	OB		218.880.000	218.880.000	204	218.880.000
2	16	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB		2.500.000	2.500.000	0	2.500.000
2	16	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan		unit/ paket			-	0	-
2	16	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan		Jenis		25.000.000	25.000.000	0	25.000.000
2	16	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan		Jenis		10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
2	16	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan		jenis		5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
2	16	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		unit	termasuk alat studio	92.000.000	92.000.000	0	92.000.000
2	16	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan		jenis			-	0	-
2	16	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan		jenis		20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
2	16	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan		jenis			-	0	-
2	16	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan		jenis		15.000.000	15.000.000	0	15.000.000
2	16	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	38	OK		270.870.000	189.609.000	38	193.401.180
							Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	20	OK		5.000.000	5.000.000	20	5.000.000
2	16	01	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit			-	0	-

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	16	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit			-	0	-
2	16	01	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis			-	0	-
2	16	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		unit			-	0	-
2	16	01	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis			-	0	-
2	16	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		jenis			-	0	-
2	16	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan		unit			-	0	-
2	16	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor		jenis		7.500.000	7.500.000	0	7.500.000
2	16	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit			-	0	-
2	16	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit		42.419.600	42.419.600	0	42.419.600
2	16	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set		5.000.000	2.500.000	0	2.500.000
2	16	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set			2.500.000	0	2.500.000
2	16	01	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set			-	0	-
2	16	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit			-	0	-
2	16	01	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit			-	0	-
2	16	01	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit			-	0	-
2	16	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		95.000.000	-	100	15.000.000
2	16	01	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
2	16	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		stell/ pasang					
2	16	01	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	25	stell/ pasang		15.000.000		25	15.000.000
2	16	01	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
2	16	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		stell/ pasang					
2	16	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	5	orang		80.000.000			-
2	16	01	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan		orang					
2	16	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis		orang					
2	16	01	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Komunikasi Informasi dan Media Massa	35,00	%		1.113.826.000	897.636.000		872.636.000
							Hasil layanan komunikasi dan informatika	100,00	%					
2	16	01	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten					1.113.826.000	897.636.000		872.636.000
2	16	01	02	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumen rumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	5	dokumen			25.000.000		
2	16	01	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Laporan pelaksanaan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		laporan			25.000.000		25.000.000
2	16	01	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Laporan pelaksanaan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		laporan					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	16	01	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik yang dikelola		konten		27.810.000	27.810.000	0	27.810.000
2	16	01	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Komunikasi Publik yang dikelola		jenis		500.000.000	500.000.000	0	500.000.000
2	16	01	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah jenis Informasi Publik yang diberikan pelayanan		jenis		47.400.000	47.400.000	0	47.400.000
2	16	01	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah pemangku kepentingan/ vendor yang bermitra dengan pemerintah daerah		media					
2	16	01	02	2.01	08	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	10	vendor		52.426.000	52.426.000	10	52.426.000
2	16	01	02	2.01	09	Manajemen Komunikasi Krisis	Laporan pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis		laporan					
2	16	01	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang ditingkatkan kapasitasnya		orang			-	0	-
2	16	01	02	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Laporan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		laporan		20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
2	16	01	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		4	laporan		466.190.000	200.000.000	4	200.000.000
2	16	01	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah aplikasi dalam rangka e-gov yang telah digunakan Pemda Kabupaten Luwu	1	aplikasi		493.300.000	493.300.000		493.300.000
2	16	01	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten					-	-		-
2	16	01	03	2.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten	Jumlah Domain Pemerintah yang didaftarkan		domain					
2	16	01	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Laporan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten		laporan					
2	16	01	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang diselenggarakan		sistem					
2	16	01	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten					493.300.000	493.300.000		493.300.000
2	16	01	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Laporan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten		laporan					
2	16	01	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Laporan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		laporan					
2	16	01	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat daerah yang telah terkoneksi dengan pusat data/ ruang server monitoring jaringan informasi		PD		282.000.000	282.000.000	0	282.000.000
2	16	01	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Laporan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		laporan					
2	16	01	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi		laporan					
2	16	01	03	2.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		laporan					
2	16	01	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang dikelola, website yang dikelola, perangkat lunak dan aplikasi yang diperbaiki, pengadaan hardware untuk aplikasi E-Gov, pembangunan / pengembangan /redesain aplikasi		aplikasi		196.300.000	196.300.000	0	196.300.000
2	16	01	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Laporan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		laporan					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	16	01	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten Cerdas dan Kota Cerdas	Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten Cerdas dan Kota Cerdas		laporan					
2	16	01	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah aparatur Pemda yang telah mendapatkan peningkatan kompetensi dibidang teknologi informatika		orang		15.000.000	15.000.000	0	15.000.000
2	16	01	03	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Laporan pelaksanaan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)		laporan					
2	17					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
2	17	01				Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian					2.686.436.092	4.086.640.478		3.859.047.833
2	17	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		2.567.436.092	3.840.440.478	100	3.612.847.833
2	17	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		-	47.000.000	100	47.000.000
2	17	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		5.000.000	2	5.000.000
2	17	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website		15.000.000		15.000.000
2	17	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		5.000.000	4	5.000.000
2	17	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)		20.000.000	6	20.000.000
2	17	01	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		2.000.000	1	2.000.000
2	17	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		1.618.986.092	2.425.212.978	100	2.497.675.433
2	17	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	300	OB		1.618.986.092	2.413.212.978	300	2.497.675.433
2	17	01	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			2.000.000		
2	17	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	2	laporan			5.000.000		
2	17	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan			5.000.000		
2	17	01	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		903.450.000	1.353.227.500	100	986.872.400
							Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
2	17	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	200	Surat		4.150.000	4.357.500	200	5.500.000
2	17	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan	Termasuk UPTD Barambing	66.600.000	66.600.000	12	38.000.000
2	17	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB					
2	17	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	13	unit		35.200.000	35.200.000	13	35.200.000
2	17	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	576	OB	Termasuk UPTD Barambing	391.200.000	391.200.000	576	391.200.000
2	17	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB		11.000.000	16.550.000	10.000	16.550.000
2	17	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan		unit/ paket			10.000.000		5.000.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju			
											Target	Pagu Indikatif		
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)		
2	17	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	Jenis	Termasuk UPTD Barambing	21.600.000	21.600.000	0	21.600.000	
2	17	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Jenis	Termasuk UPTD Barambing	17.100.000	17.100.000	0	17.100.000	
2	17	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	jenis			5.000.000		5.000.000	
2	17	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	unit			50.000.000		20.000.000	
2	17	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	jenis			2.500.000		2.500.000	
2	17	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	10	jenis	38.000.000	38.000.000	10	38.000.000	
2	17	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	10	jenis	Termasuk UPTD Barambing	26.000.000	26.000.000	10	20.000.000
2	17	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	jenis	Termasuk UPTD Barambing	16.000.000	16.000.000	0	16.000.000	
2	17	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	31	OK	Termasuk UPTD Barambing	221.600.000	155.120.000	55	158.222.400
							Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	84	OK		20.000.000	21.000.000	45	25.000.000
2	17	01	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan	unit						
2	17	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	2	unit		400.000.000	2	80.000.000	
2	17	01	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan	jenis						
2	17	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	5	jenis	5.000.000	20.000.000	5	20.000.000	
2	17	01	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan	jenis						
2	17	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	5	jenis	5.000.000	5.000.000	5	5.000.000	
2	17	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan	unit						
2	17	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	jenis			5.000.000		5.000.000	
2	17	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	unit						
2	17	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	8	unit	23.000.000	30.000.000	10	45.000.000	
2	17	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	unit/set			2.000.000		2.000.000	
2	17	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set	2.000.000	15.000.000	15	15.000.000	
2	17	01	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	unit/set						
2	17	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	unit						
2	17	01	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi dedang/berat	unit						
2	17	01	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat	unit						
2	17	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%	45.000.000	15.000.000	100	81.300.000	
2	17	01	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	unit						
2	17	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	stell/ pasang				78	39.000.000	
2	17	01	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan yang diadakan	stell/ pasang						
2	17	01	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan	28	stell/ pasang					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	17	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	78	stell/ pasang				78	27.300.000
2	17	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2	orang		45.000.000	15.000.000	2	15.000.000
2	17	01	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan		orang					
2	17	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis		orang					
2	17	01	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase izin usaha simpan pinjam yang terlayani		%		-	-		-
2	17	01	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten					-	-		-
2	17	01	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	Jumlah permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten yang difasilitasi		permohonan					
2	17	01	02	2.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	Persentase permohonan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten yang diselesaikan		%		-	-		-
2	17	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	Jumlah permohonan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten yang difasilitasi		permohonan					
2	17	01	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Cakupan penyelenggaraan pengawasan	100	%		30.000.000	30.000.000		30.000.000
2	17	01	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					30.000.000	30.000.000		30.000.000
2	17	01	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten	Laporan pelaksanaan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten	4	laporan		30.000.000	30.000.000	1	30.000.000
2	17	01	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten	Laporan pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten		laporan					
2	17	01	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Cakupan penilaian kesehatan KSP/ USP Koperasi		%		-	-		-
2	17	01	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten					-	-		-
2	17	01	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten	Laporan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten		laporan					
2	17	01	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten	Jumlah KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten yang diberikan penghargaan		KSP/USP					

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	17	01	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengurus koperasi yang telah diberikan pendidikan dan pelatihan		%		-	70.000.000		70.000.000
2	17	01	05	2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota					-	70.000.000		70.000.000
2	17	01	05	2.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang ditingkatkan kompetensinya	40	orang			70.000.000	40	70.000.000
2	17	01	06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Cakupan pemberdayaan dan perlindungan koperasi		%		30.000.000	38.700.000		38.700.000
2	17	01	06	2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					30.000.000	38.700.000		38.700.000
2	17	01	06	2.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten	Jumlah koperasi yang diberdayakan	5	unit		30.000.000	38.700.000		38.700.000
2	17	01	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Menengah Aktif	30,75	%		59.000.000	87.500.000		87.500.000
2	17	01	07	2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					59.000.000	87.500.000		87.500.000
2	17	01	07	2.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah dokumen data potensi dan pengembangan usaha mikro	1	dokumen		13.500.000	22.000.000	1	22.000.000
2	17	01	07	2.01	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Laporan pelaksanaan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		laporan					
2	17	01	07	2.01	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam kemudahan perizinan		UMKM					
2	17	01	07	2.01	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah peserta Pelatihan dan meningkatnya Kualitas SDM Bagi Pelaku UMKM	40	orang		45.500.000	45.500.000	40	45.500.000
2	17	01	07	2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	1	laporan			20.000.000	1	20.000.000
2	17	01	08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					-	20.000.000		20.000.000
2	17	01	08	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					-	20.000.000		20.000.000
2	17	01	08	2.01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi yang difasilitasi	2	unit usaha			20.000.000	2	20.000.000
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
2	18	01			Dinas Penanaman Modal dan PTSP					3.748.758.925	4.283.419.680		4.413.119.929
2	18	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		2.965.558.925	3.475.219.680	100	3.604.919.929

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju		
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)	
2	18	01	01	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		-	47.000.000	100	47.000.000	
2	18	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan	5.000.000	2	5.000.000	
2	18	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website	10.000.000		10.000.000	
2	18	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan	10.000.000	4	10.000.000	
2	18	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/has)	20.000.000	6	20.000.000	
2	18	01	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya	2.000.000	1	2.000.000	
2	18	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		2.512.774.925	2.987.435.680	100	3.091.575.929
2	18	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	396	OB		2.490.268.675	2.975.435.680	396	3.079.575.929
2	18	01	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			2.000.000	3	2.000.000
2	18	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			5.000.000	14	5.000.000
2	18	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan		22.506.250	5.000.000	1	5.000.000
2	18	01	01	2.03		Administrasi Umum	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		452.784.000	440.784.000	100	441.344.000
							Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
2	18	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	200	Surat		3.295.800	3.295.800	200	3.295.800
2	18	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		89.160.000	89.160.000	12	89.160.000
2	18	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB			-	0	-
2	18	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	8	unit		22.200.000	22.200.000	8	22.200.000
2	18	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	180	OB		170.000.000	170.000.000	180	170.000.000
2	18	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB		19.333.200	19.333.200	0	19.333.200
2	18	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan		unit/ paket		3.450.000	3.450.000	0	3.450.000
2	18	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan		Jenis		10.900.000	10.900.000	0	10.900.000
2	18	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		Jenis		3.500.000	3.500.000	0	3.500.000
2	18	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan		jenis		2.945.000	2.945.000	0	2.945.000
2	18	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		unit			-	0	-
2	18	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan		jenis			-	0	-
2	18	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan		jenis		24.000.000	24.000.000	0	24.000.000
2	18	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan		jenis		6.000.000	6.000.000	0	6.000.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	18	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan		jenis		3.000.000	3.000.000	0	3.000.000
2	18	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	6	OK		40.000.000	28.000.000	6	28.560.000
							Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	30	OK		7.500.000	7.500.000	30	7.500.000
2	18	01	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit				-	0
2	18	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit				-	0
2	18	01	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis				-	0
2	18	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		unit		16.500.000	16.500.000	0	16.500.000
2	18	01	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis				-	0
2	18	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		jenis				-	0
2	18	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan		unit				-	0
2	18	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor		jenis				-	0
2	18	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit				-	0
2	18	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit		31.000.000	31.000.000	0	31.000.000
2	18	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set				-	0
2	18	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set				-	0
2	18	01	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set				-	0
2	18	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit				-	0
2	18	01	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit				-	0
2	18	01	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit				-	0
2	18	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		-	-	100	25.000.000
2	18	01	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
2	18	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		stell/ pasang					
2	18	01	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
2	18	01	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
2	18	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		stell/ pasang					25.000.000
2	18	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang					
2	18	01	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan		orang					
2	18	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis		orang					
2	18	01	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan penyelenggaraan pengembangan iklim penanaman modal		%		-	-		-
2	18	01	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten					-	-	0	-

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	18	01	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen yang ditetapkan		dokumen			-	0	-
2	18	01	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		laporan			-	0	-
2	18	01	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten					-	-	0	-
2	18	01	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten	Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten		dokumen			-	0	-
2	18	01	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten		dokumen			-	0	-
2	18	01	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah kegiatan Promosi dan Kerja Sama	85,00	%		250.000.000	250.000.000		250.000.000
2	18	01	03	2.01		<i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>					250.000.000	250.000.000	0	250.000.000
2	18	01	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal	1	dokumen			50.000.000		50.000.000
2	18	01	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten	2	kali		250.000.000	200.000.000	2	200.000.000
2	18	01	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah kegiatan Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	13	investor		395.000.000	395.000.000		395.000.000
							Jumlah izin yang dikeluarkan berdasar SOP	65,00	%					
2	18	01	04	2.01		<i>Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>					395.000.000	395.000.000	0	395.000.000
2	18	01	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Sistem Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang disediakan	1	sistem		295.000.000	295.000.000	1	295.000.000
2	18	01	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Laporan hasil Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal		laporan		100.000.000	100.000.000	0	100.000.000
2	18	01	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan yang disediakan		layanan			-	0	-
2	18	01	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		laporan				0	-
2	18	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah pengendalian dan pengawasan perizinan	75,00	%		83.200.000	108.200.000		108.200.000
2	18	01	05	2.01		<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten</i>					83.200.000	108.200.000	0	108.200.000
2	18	01	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		laporan		83.200.000	83.200.000	0	83.200.000
2	18	01	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		laporan			25.000.000	0	25.000.000
2	18	01	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		laporan			-	0	-

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju		
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)	
2	18	01	06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data dan informasi penanaman modal		%		55.000.000	55.000.000		55.000.000	
2	18	01	06	2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten					55.000.000	55.000.000	0	55.000.000	
2	18	01	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Sisem yang disediakan untuk Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1	sistem	55.000.000	55.000.000	1	55.000.000	
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
2	19	01			Dinas Kepemudaan dan Olahraga					4.943.016.644	6.785.446.275		6.931.105.905	
2	19	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		2.775.296.644	3.404.246.275	100	3.549.905.905	
2	19	01	01	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		-	47.000.000	100	47.000.000	
2	19	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		5.000.000	2	5.000.000
2	19	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website		10.000.000		10.000.000
2	19	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		10.000.000	4	10.000.000
2	19	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan mengadakan acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/has)		20.000.000	6	20.000.000
2	19	01	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		2.000.000	1	2.000.000
2	19	01	01	2.02	Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		2.012.696.644	2.659.140.275	100	2.751.790.185	
2	19	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	312	OB		1.990.190.394	2.647.140.275	312	2.739.790.185
2	19	01	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiaian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan diiajakan	3	dokumen			2.000.000	3	2.000.000
2	19	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			5.000.000	14	5.000.000
2	19	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan		22.506.250	5.000.000	1	5.000.000
2	19	01	01	2.03	Administrasi Umum	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		752.600.000	688.106.000	100	691.115.720	
						Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%						
2	19	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi		Surat			-	0	-
2	19	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		15.000.000	15.000.000	12	15.000.000
2	19	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB			-	0	-
2	19	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan		unit		59.200.000	59.200.000	0	59.200.000
2	19	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	396	OB		343.920.000	343.920.000	396	343.920.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	19	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB		3.000.000	3.000.000	0	3.000.000
2	19	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan		unit/ paket			-	0	-
2	19	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan		Jenis		48.000.000	48.000.000	0	48.000.000
2	19	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan		Jenis		10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
2	19	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan		jenis		1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
2	19	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		unit		12.000.000	12.000.000	0	12.000.000
2	19	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan		jenis			-	0	-
2	19	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan		jenis		10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
2	19	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan		jenis			-	0	-
2	19	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan		jenis		20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
2	19	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	30	OK		214.980.000	150.486.000	30	153.495.720
							Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	40	OK		10.000.000	10.000.000	40	10.000.000
2	19	01	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit			-	0	-
2	19	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit			-	0	-
2	19	01	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis			-	0	-
2	19	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		unit			-	0	-
2	19	01	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis			-	0	-
2	19	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		jenis			-	0	-
2	19	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan		unit			-	0	-
2	19	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	1	jenis		5.000.000	5.000.000	1	5.000.000
2	19	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit			-	0	-
2	19	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit			-	0	-
2	19	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set			-	0	-
2	19	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set			-	0	-
2	19	01	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set			-	0	-
2	19	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit			-	0	-
2	19	01	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit			-	0	-
2	19	01	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit			-	0	-
2	19	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		10.000.000	10.000.000	100	60.000.000
2	19	01	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
2	19	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		stell/ pasang					25.000.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju		
												Target	Pagu Indikatif	
							(1)						(2)	(6)
2	19	01	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
2	19	01	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
2	19	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		stell/ pasang					25.000.000
2	19	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang	10.000.000	10.000.000	0		10.000.000
2	19	01	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan		orang			-	0	-
2	19	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis		orang			-	0	-
2	19	01	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pengurus organisasi pemuda yang telah mendapatkan pembinaan	100,00	%	516.450.000	1.016.450.000			1.016.450.000
2	19	01	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten				516.450.000	516.450.000			516.450.000
2	19	01	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor		laporan			-	0	-
2	19	01	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula		laporan			-	0	-
2	19	01	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten		laporan	Paskibraka	516.450.000	516.450.000	0	516.450.000
2	19	01	02	2.01	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam Pemenuhan Perlindungan, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan		orang			-	0	-
2	19	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/ Kota	Laporan hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan		laporan			-	0	-
2	19	01	02	2.01	06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Laporan hasil Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota		laporan			-	0	-
2	19	01	02	2.01	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda/organisasi pemuda yang diberikan Penghargaan		pemuda/ organisasi pemuda			-	0	-
2	19	01	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah pemuda yang terlibat dalam peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda		orang			-	0	-
2	19	01	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten				-	500.000.000			500.000.000
2	19	01	02	2.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha		laporan			-	0	-

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	19	01	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi dalam rangka peningkatan peran serta dalam pembangunan	2	organisasi	Hibah kepada organisasi pemuda		500.000.000	2	500.000.000
2	19	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah cabang olahraga yang digemari masyarakat Kabupaten Luwu	1	cabang olahraga		1.651.270.000	2.064.750.000		2.064.750.000
							Jumlah cabang olahraga yang menorehkan prestasi untuk Kabupaten Luwu	0	cabang olahraga					
2	19	01	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					1.125.520.000	39.000.000		39.000.000
2	19	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Laporan pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha		laporan		39.000.000	39.000.000	0	39.000.000
2	19	01	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	Laporan pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar		laporan				-	-
2	19	01	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota	Laporan pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota		laporan		1.086.520.000		0	-
							Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang disediakan		cabang olahraga					
2	19	01	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten					-	-		-
2	19	01	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten yang diselenggarakan		event				-	0
2	19	01	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Jumlah Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota yang diselenggarakan		event				-	0
2	19	01	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan		event				-	0
2	19	01	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten					10.350.000	10.350.000	0	10.350.000
2	19	01	03	2.03	01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah pelaksanaan Seleksi Atlet Daerah		kali					
2	19	01	03	2.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah atlet yang mengikuti Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)		orang				-	0
2	19	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kab/Kota yang dibina		orang				-	0
2	19	01	03	2.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten	Jumlah atlet/pelatih/pengurus yang diberikan Penghargaan Olahraga		orang				-	0
2	19	01	03	2.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga		laporan		10.350.000	10.350.000	0	10.350.000
2	19	01	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga					-	1.500.000.000		1.500.000.000
2	19	01	03	2.04	01	Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Laporan pelaksanaan Standarisasi Organisasi Keolahragaan		laporan				-	0
2	19	01	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah organisasi keolahragaan yang difasilitasi pengembangannya	1	organisasi	Hibah kepada organisasi olahraga (KONI)		1.500.000.000	1	1.500.000.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	19	01	03	2.04	03	Peningkatan Kerja sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten Dengan Lembaga Terkait	Jumlah Kerja sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten Dengan Lembaga Terkait	MoU			-	0	-
2	19	01	03	2.04	04	Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah organisasi Keolahragaan Berprestasi yang diberikan penghargaan	organisasi			-	0	-
2	19	01	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				515.400.000	515.400.000		515.400.000
2	19	01	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Festival dan Olahraga Rekreasi yang diselenggarakan	event		115.900.000	115.900.000	0	115.900.000
2	19	01	03	2.05	02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Perkumpulan Olahraga Rekreasi yang diberdayakan	perkumpulan			-	0	-
2	19	01	03	2.05	04	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang disediakan, dikembangkan, dan dipelihara	unit		399.500.000	399.500.000	0	399.500.000
2	19	01	03	2.05	05	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan yang dikembangkan	jenis			-	0	-
2	19	01	03	2.05	06	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Olahraga Tradisional yang dimanfaatkan dalam Masyarakat	jenis			-	0	-
2	19	01	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan pemuda dan kepramukaan yang dilaksanakan	100,00	%	-	300.000.000		300.000.000
2	19	01	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				-	300.000.000		300.000.000
2	19	01	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	laporan			-	0	-
2	19	01	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah organisasi kepramukaan yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas organisasi	1	organisasi	Hibah kepada organisasi kepramukaan	300.000.000	1	300.000.000
2	19	01	04	2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang mengikuti peningkatan kapasitas	orang			-	0	-
2	19	01	04	2.01	04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi/Kabupaten	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi/Kabupaten yang disediakan	lokasi			-	0	-
2	19	01	04	2.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah yang diselenggarakan	event			-	0	-
2	19	01	04	2.01	06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah jenis Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang disediakan	jenis			-	0	-
2	19	01	04	2.01	07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan pelaksanaan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	laporan			-	0	-
2	19	01	04	2.01	08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	kali			-	0	-
2	20					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							
2	20	01				Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian				103.580.000	103.580.000		103.580.000
2	20	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya data statistik	45,00	%	103.580.000	103.580.000		103.580.000
2	20	01	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten				103.580.000	103.580.000		103.580.000
2	20	01	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	laporan		80.230.000	80.230.000	0	80.230.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	20	01	02	2.01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Pemda yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		orang			-	0	-
2	20	01	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Metadata Statistik Sektoral yang dibangun		data		23.350.000	23.350.000	0	23.350.000
2	20	01	02	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Laporan pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		laporan					
2	20	01	02	2.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah jenis Infrastruktur yang dikembangkan		jenis					
2	20	01	02	2.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Laporan pelaksanaan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah		laporan					
2	21					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
2	21	01				Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian								
2	21	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI)	1	level		120.124.400	120.124.400		120.124.400
2	21	01	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten					74.834.400	74.834.400		74.834.400
2	21	01	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten	Dokumen Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten yang ditetapkan		dokumen		21.250.000	21.250.000	0	21.250.000
2	21	01	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten	Dokumen Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten		dokumen		13.500.000	13.500.000	0	13.500.000
2	21	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		laporan		13.750.000	13.750.000	0	13.750.000
2	21	01	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah jenis Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten yang disediakan		jenis		26.334.400	26.334.400	0	26.334.400
2	21	01	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten				45.290.000	45.290.000		45.290.000
2	21	01	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten	Laporan pelaksanaan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten		laporan		45.290.000	45.290.000	0	45.290.000
2	22					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
2	22	01				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan								
2	22	01	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan festival seni dan budaya daerah	6	kali		210.000.000	270.000.000		270.000.000
2	22	01	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten					140.000.000	140.000.000		140.000.000
2	22	01	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan		objek		140.000.000	140.000.000	0	140.000.000
2	22	01	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan yang dibina		orang					
									lembaga					
2	22	01	02	2.02		Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten					40.000.000	40.000.000		40.000.000
2	22	01	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan		objek		40.000.000	40.000.000	0	40.000.000
2	22	01	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional yang dibina		orang					
									lembaga					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	22	01	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah pihak yang berprestasi dan berkontribusi yang diberikan penghargaan		orang					
2	22	01	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten					30.000.000	30.000.000		30.000.000
2	22	01	02	2.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan		objek		30.000.000	30.000.000	0	30.000.000
2	22	01	02	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional yang dibina		orang					
							Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional yang dibina		lembaga					
2	22	01	02	2.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Lembaga Adat yang menerima sarana dan prasarana pembinaan		lembaga adat					
2	22	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang telah dikembangkan		%		-	20.000.000		20.000.000
2	22	01	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten					-	20.000.000		20.000.000
2	22	01	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang diberikan pendidikan dan pelatihan		orang					
2	22	01	03	2.01	02	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang distandarisasi dan sertifikasi		orang					
2	22	01	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya		lembaga			20.000.000	0	20.000.000
2	22	01	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan sejarah yang telah dilaksanakan pemerintah daerah		%		-	20.000.000		20.000.000
2	22	01	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten					-	20.000.000		20.000.000
2	22	01	04	2.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten yang ditingkatkan keberdayaannya		orang			20.000.000	0	20.000.000
									lembaga					
2	22	01	04	2.01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah yang disediakan		unit					
2	22	01	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah media informasi yang disediakan untuk meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah		media informasi					
2	22	01	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang telah dilestarikan dan dikelola		%		-	20.000.000		20.000.000
2	22	01	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten					-	-		-
2	22	01	05	2.01	01	Register Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang diregister		cagar budaya					
2	22	01	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten					-	-		-
2	22	01	05	2.02	02	Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilakukan Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan		cagar budaya					
2	22	01	05	2.02	03	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya	Jumlah cagar budaya yang ditingkatkan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Serta Pemanfaatannya		cagar budaya					
2	22	01	05	2.02	04	Pendayagunaan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang telah didayagunakan		cagar budaya					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	22	01	05	2.02	05	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Cagar Budaya yang ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya		orang					
2	22	01	05	2.03		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten					-	20.000.000		20.000.000
2	22	01	05	2.03	01	Register Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang diregister		cagar budaya					
2	22	01	05	2.03	02	Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dilakukan Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan		cagar budaya					
2	22	01	05	2.03	03	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya	Jumlah Cagar Budaya yang dilakukan Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Serta Pemanfaatannya		cagar budaya			20.000.000	0	20.000.000
2	22	01	05	2.03	04	Pendayagunaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didayagunakan		cagar budaya					
2	22	01	05	2.03	05	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Cagar Budaya yang ditingkatkan kapasitasnya		orang					
2	22	01	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Cakupan pengelolaan museum yang telah dilaksanakan		%		-	-		-
2	22	01	06	2.01		<i>Pengelolaan Museum Kabupaten</i>					-	-		-
2	22	01	06	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah koleksi museum yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan secara terpadu		koleksi					
2	22	01	06	2.01	02	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang ditingkatkan kapasitasnya		orang					
2	22	01	06	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Museum yang dilakukan ditingkatkan Akses nya		museum					
2	22	01	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang disediakan dan dipelihara		unit					
2	22	01	06	2.01	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Museum yang direvitalisasi		jenis					
2	23					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
2	23	01				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					2.969.706.249	4.786.159.704		4.773.427.296
2	23	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		2.866.349.623	4.330.552.704	100	4.480.820.296
2	23	01	01	2.01		<i>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu</i>	100,00	%		1.500.000	43.182.000	100	47.000.000
2	23	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		5.000.000	2	5.000.000
2	23	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website		8.600.000		10.000.000
2	23	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		10.000.000	4	10.000.000
2	23	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)		17.262.000	6	20.000.000
2	23	01	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya	1.500.000	2.320.000	1	2.000.000
2	23	01	01	2.02		<i>Administrasi Keuangan</i>	<i>Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu</i>	100,00	%		2.135.042.249	3.424.488.330	100	3.543.925.422
2	23	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	384	OB		2.112.535.999	3.412.488.330	384	3.531.925.422
2	23	01	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			2.000.000	3	2.000.000

KODE							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
								Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)							(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	23	01	01	2.02	07		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			5.000.000	14	5.000.000
2	23	01	01	2.02	09		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan		22.506.250	5.000.000	1	5.000.000
2	23	01	01	2.03			Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		729.807.374	862.882.374	100	864.894.874
								Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
2	23	01	01	2.03	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	200	Surat		1.500.000	1.500.000	200	1.500.000
2	23	01	01	2.03	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		63.713.124	63.713.124	12	63.713.124
2	23	01	01	2.03	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB			-	0	-
2	23	01	01	2.03	06		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	10	unit	Penambahan Jasa Upah Kerja Supir 3 orang	26.100.000	33.300.000	10	33.300.000
2	23	01	01	2.03	07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	588	OB	Penambahan Jasa Upah Kerja Non PNS dan Pengelola Keuangan	321.240.000	426.240.000	588	426.240.000
2	23	01	01	2.03	08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB	Penambahan Jasa Upah Kerja Jasa Kebersihan	32.200.000	35.600.000	0	35.600.000
2	23	01	01	2.03	09		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan		unit/ paket			-	0	-
2	23	01	01	2.03	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	30	Jenis		12.828.000	12.828.000	30	12.828.000
2	23	01	01	2.03	11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3	Jenis		1.000.000	1.000.000	3	1.000.000
2	23	01	01	2.03	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	jenis		3.000.000	3.000.000	10	3.000.000
2	23	01	01	2.03	13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3	unit	komputer 2, laptop 1	15.015.000	30.000.000	3	30.000.000
2	23	01	01	2.03	14		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan		jenis			-	0	-
2	23	01	01	2.03	15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	25	jenis		31.500.000	31.500.000	25	31.500.000
2	23	01	01	2.03	16		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	7	jenis			9.000.000	7	9.000.000
2	23	01	01	2.03	17		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	2	jenis		6.250.000	6.250.000	2	6.250.000
2	23	01	01	2.03	18		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	20	OK		143.750.000	100.625.000	20	102.637.500
								Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	20	OK		5.000.000	5.000.000	20	5.000.000
2	23	01	01	2.03	19		Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit			-	0	-
2	23	01	01	2.03	20		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit			-	0	-
2	23	01	01	2.03	21		Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis			-	0	-
2	23	01	01	2.03	22		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	3	unit	AC		15.015.000	3	15.015.000
2	23	01	01	2.03	23		Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis			-	0	-
2	23	01	01	2.03	24		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		jenis			-	0	-
2	23	01	01	2.03	25		Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan		unit			-	0	-
2	23	01	01	2.03	28		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	5	jenis		13.000.000	13.000.000	5	13.000.000
2	23	01	01	2.03	29		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit			-	0	-
2	23	01	01	2.03	30		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	8	unit	Ada penambahan aset kendaraan roda 4	48.711.250	68.311.250	8	68.311.250

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	23	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	10	unit/set		5.000.000	5.000.000	10	5.000.000
2	23	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set			2.000.000	5	2.000.000
2	23	01	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set			-	0	-
2	23	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit			-	0	-
2	23	01	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit			-	0	-
2	23	01	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit			-	0	-
2	23	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		-	-	100	25.000.000
2	23	01	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
2	23	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	34	stell/ pasang					
2	23	01	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
2	23	01	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
2	23	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	34	stell/ pasang					25.000.000
2	23	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang					
2	23	01	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan		orang					
2	23	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis		orang					
2	23	01	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Pengunjung Usia Sekolah ke Perpustakaan Umum Daerah	25,00	%		103.356.626	455.607.000		292.607.000
							Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan	2.773	orang					
							Cakupan penyelenggaraan pengelolaan bahan pustaka	100,00	%					
2	23	01	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten					48.270.000	371.657.000		208.657.000
2	23	01	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dipelihara dan dikembangkan	1	layanan		17.020.000	163.000.000		
2	23	01	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten yang dikembangkan		unit				0	-
2	23	01	02	2.01	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten yang dikembangkan kekhasan koleksinya		perpustakaan				0	-
2	23	01	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah satuan pendidikan yang dibina	47	satuan pendidikan	Jumlah Perpustakaan sekolah ada 237 Perpustakaan		21.961.500	47	21.961.500
2	23	01	02	2.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten	Jumlah perpustakaan khusus yang dibina		perpustakaan			-	0	-
2	23	01	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten yang ditingkatkan kapasitasnya	150	Peserta			43.450.000	150	43.450.000
2	23	01	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten	Jumlah Titik Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten	100	Titik Layanan		16.500.000	35.600.000	100	35.600.000
2	23	01	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang diadakan	150	judul			36.960.000	150	36.960.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	23	01	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Penjilidan surat kabar	96	dokumen		14.750.000	28.519.000	96	28.519.000
							Jumlah bahan pustaka yang diolah	250	Bahan Pustaka					
2	23	01	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten	Dokumen Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten yang disusun (KID)	1	dokumen			42.166.500	1	42.166.500
2	23	01	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten					55.086.626	83.950.000		83.950.000
2	23	01	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah siswa Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi	200	Siswa		7.972.626	36.950.000	200	36.950.000
2	23	01	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	Jumlah Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten yang dibangun dan dipelihara		unit				0	-
2	23	01	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah masyarakat yang diberikan penghargaan	8	orang		47.114.000	47.000.000	8	47.000.000
2	23	01	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah event/media pengembangan literasi		event/ media				0	-
2	23	01	02	2.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah pelaksanaan pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten		kali					
2	23	01	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan		%		-	-		-
2	23	01	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten					-	-		-
2	23	01	03	2.01	01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang melakukan Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno		orang				0	-
2	23	01	03	2.01	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah naskah kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat yang dilestarikan dan didayagunakan dengan pengolahan dan pengalihmediaan		naskah				0	-
2	23	01	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten					-	-		-
2	23	01	03	2.02	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan diadakan		koleksi				0	-
2	23	01	03	2.02	02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang dikelola		koleksi				0	-
2	24					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
2	24	01				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					25.000.000	89.365.000		79.365.000
2	24	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Presentase Sistem Administrasi Kearsipan yang Memiliki Predikat yang Baik	100,00	%		25.000.000	69.365.000		69.365.000
2	24	01	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten					-	11.260.000		11.260.000
2	24	01	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis					5.290.000	0	5.290.000
2	24	01	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis					5.970.000	0	5.970.000
2	24	01	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten				-	5.500.000		5.500.000
2	24	01	02	2.02	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI						0	-
2	24	01	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis					5.500.000	0	5.500.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	24	01	02	2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten				25.000.000	52.605.000		52.605.000
2	24	01	02	2.03	01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN				25.000.000		0	-
2	24	01	02	2.03	02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Jumlah unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah yang di tingkatkan kapasitasnya	57	unit/ lembaga			52.605.000	57	52.605.000
2	24	01	03		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Cakupan pelaksanaan perlindungan dan penyelamatan arsip		%		-	10.000.000		-
2	24	01	03	2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun					-	-		-
	24	01	03	2.01	01 Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun						0	-
2	24	01	03	2.01	02 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun						0	-
2	24	01	03	2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten					-	-		-
2	24	01	03	2.02	01 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana						0	-
2	24	01	03	2.02	02 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana						0	-
2	24	01	03	2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan					-	10.000.000		-
2	24	01	03	2.03	01 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten	Dokumen Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip	1	dokumen			10.000.000		
2	24	01	03	2.03	02 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten	Dokumen Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip	1	dokumen				1	-
2	24	01	03	2.03	03 Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan						0	-
2	24	01	03	2.03	04 Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan						0	-
2	24	01	03	2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten					-	-		-
2	24	01	03	2.04	01 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip						0	-
2	24	01	03	2.04	02 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip						0	-
2	24	01	03	2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten yang Dinyatakan Hilang					-	-		-
2	24	01	03	2.05	01 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang						0	-
2	24	01	03	2.05	02 Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang						0	-
2	24	01	03	2.05	03 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)						0	-
2	24	01	04		PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP	Cakupan ketersediaan perijinan penggunaan arsip		%		-	10.000.000		10.000.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
2	24	01	04	2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten					-	10.000.000		10.000.000
2	24	01	04	2.01	01 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Dokumen SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	2	dokumen			10.000.000	2	10.000.000
2	24	01	04	2.01	02 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang disediakan		dokumen				0	-
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
3	25	01			Dinas Perikanan					8.040.575.552	5.058.158.096		5.222.012.572
3	25	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		3.873.952.702	4.244.777.146	100	4.428.798.289
3	25	01	01	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		-	37.500.000	100	52.600.000
3	25	01	01	2.01	01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		5.000.000	2	10.000.000
3	25	01	01	2.01	02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan	48	Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website		10.000.000	48	10.000.000
3	25	01	01	2.01	03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		10.000.000	4	10.000.000
3	25	01	01	2.01	04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/regi/nas)		7.500.000	6	17.600.000
3	25	01	01	2.01	05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		5.000.000	1	5.000.000
3	25	01	01	2.02	Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		2.979.113.212	3.496.032.656	100	3.617.973.799
3	25	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	504	OB		2.956.606.962	3.484.032.656	504	3.605.973.799
3	25	01	01	2.02	05 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			2.000.000	3	2.000.000
3	25	01	01	2.02	07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			5.000.000	14	5.000.000
3	25	01	01	2.02	09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan		22.506.250	5.000.000	1	5.000.000
3	25	01	01	2.03	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		860.879.490	711.244.490	100	713.244.490
						Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	47,33	%					
3	25	01	01	2.03	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	500	Surat		2.400.000	2.400.000	500	2.400.000
3	25	01	01	2.03	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan	termasuk UPTD	31.440.090	31.440.090	12	31.440.090
3	25	01	01	2.03	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB			-	0	-
3	25	01	01	2.03	06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	15	unit		42.000.000	42.000.000	15	42.000.000
3	25	01	01	2.03	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	324	OB	termasuk UPTD	275.710.000	275.710.000	324	275.710.000
3	25	01	01	2.03	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB		17.580.975	17.580.975	0	17.580.975
3	25	01	01	2.03	09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan	10	unit/ paket		3.080.000	3.080.000	10	3.080.000
3	25	01	01	2.03	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	65	Jenis		71.661.985	71.661.985	65	71.661.985

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
3	25	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3	Jenis		11.661.750	11.661.750	3	11.661.750
3	25	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	15	jenis		15.798.140	15.798.140	15	15.798.140
3	25	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5	unit	termasuk UPTD	32.265.000	32.265.000	5	32.265.000
3	25	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan		jenis			-	0	-
3	25	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	12	jenis		19.800.000	19.800.000	12	19.800.000
3	25	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan		jenis			-	0	-
3	25	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3	jenis		22.090.000	22.090.000	3	22.090.000
3	25	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	20	OK		250.635.000	100.000.000	20	102.000.000
							Jumlah perjalanan dinas luar daerah	90	OK		22.576.750	22.576.750	90	22.576.750
3	25	01	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit			-	0	-
3	25	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit			-	0	-
3	25	01	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis			-	0	-
3	25	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	5	unit		3.650.000	3.650.000	5	3.650.000
3	25	01	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis			-	0	-
3	25	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	5	jenis			1.000.000	5	1.000.000
3	25	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan		unit			-	0	-
3	25	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor		jenis			-	0	-
3	25	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit			-	0	-
3	25	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	4	unit		38.529.800	38.529.800	4	38.529.800
3	25	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set			-	0	-
3	25	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set			-	0	-
3	25	01	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set			-	0	-
3	25	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit			-	0	-
3	25	01	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit			-	0	-
3	25	01	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit			-	0	-
3	25	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		33.960.000	-	100	44.980.000
3	25	01	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
3	25	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	55	stell/ pasang		33.960.000			
3	25	01	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan		stell/ pasang					
3	25	01	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang				44	16.980.000
3	25	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	55	stell/ pasang				56	28.000.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
													Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	Tolok Ukur	Target	(8)			(9)	(10)	(11)
3	25	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang					
3	25	01	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan		orang					
3	25	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	50	orang					
3	25	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	12,00	%		729.356.750	318.383.083		318.383.083
3	25	01	02	2.01		<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>					512.699.000	77.725.333		77.725.333
3	25	01	02	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah media yang disediakan dalam penyebaran data dan informasi sumber daya ikan	1	dokumen			23.333.333	1	23.333.333
3	25	01	02	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang disediakan	10	unit		512.699.000	54.392.000	10	54.392.000
3	25	01	02	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah kegiatan dalam upaya penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		kegiatan			-	0	-
3	25	01	02	2.02		<i>Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten</i>					99.677.750	109.677.750		109.677.750
3	25	01	02	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah kelompok Nelayan Kecil yang dikembangkan kapasitasnya	5	kelompok		84.677.750	84.677.750	5	84.677.750
3	25	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelembagaan Nelayan Kecil yang difasilitasi dalam Pembentukan dan Pengembangan	3	kelompok		15.000.000	15.000.000	3	15.000.000
3	25	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi dalam Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	2	kelompok			10.000.000	2	10.000.000
3	25	01	02	2.03		<i>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</i>					102.980.000	102.980.000		102.980.000
3	25	01	02	2.03	01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dokumen Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		dokumen			-	0	-
3	25	01	02	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5	TPI		102.980.000	102.980.000	5	102.980.000
3	25	01	02	2.04		<i>Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>					14.000.000	14.000.000		14.000.000
3	25	01	02	2.04	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Dokumen Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT		dokumen			-	0	-
3	25	01	02	2.04	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang dilayani	200	berkas		14.000.000	14.000.000	200	14.000.000
3	25	01	02	2.05		<i>Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>					-	-		-

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
													Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
3	25	01	02	2.05	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Dokumen Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT		dokumen			-	0	-
3	25	01	02	2.05	02	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran Sampai dengan 10 GT	Jumlah Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran Sampai dengan 10 GT yang dilayani		berkas			-	0	-
3	25	01	02	2.06		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten					-	14.000.000		14.000.000
3	25	01	02	2.06	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Dokumen Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT		dokumen			-	0	-
3	25	01	02	2.06	02	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT yang dilayani	200	berkas			14.000.000	200	14.000.000
3	25	01	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya		Ton		3.254.779.100	317.844.200		297.677.533
							Jumlah kelompok pembudidaya yang berhasil diberdayakan	30	kelompok					
3	25	01	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten					-	22.666.667		2.500.000
3	25	01	03	2.01	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Dokumen Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha yang ditetapkan	1	dokumen			22.666.667	1	
3	25	01	03	2.01	02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah permohonan Penerbitan Izin Usaha yang diberikan layanan	10	permohonan			-	10	2.500.000
3	25	01	03	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil					1.056.530.800	230.000.000		230.000.000
3	25	01	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudi Daya Ikan Kecil yang dikembangkan kapasitasnya	3	pembudi daya		1.056.530.800	200.000.000	3	200.000.000
3	25	01	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil yang difasilitasi	10	kelompok			10.000.000	10	10.000.000
3	25	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah kelompok usaha yang difasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	5	kelompok			10.000.000	5	10.000.000
3	25	01	03	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok pembudi daya yang diberikan Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5	kelompok			10.000.000	5	10.000.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
3	25	01	03	2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten					-	10.000.000		10.000.000
3	25	01	03	2.03	01 Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Dokumen persyaratan dan prosedur penerbitan TDPIK yang ditetapkan		dokumen			-	0	-
3	25	01	03	2.03	02 Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Jumlah kelompok yang diberikan Pelayanan penerbitan TDPIK	5	kelompok			10.000.000	5	10.000.000
3	25	01	03	2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					2.198.248.300	55.177.533		55.177.533
3	25	01	03	2.04	01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Dokumen Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan yang disediakan	1	dokumen			23.333.333	1	23.333.333
3	25	01	03	2.04	02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Jumlah kelompok pembudi daya yang memperoleh Prasarana Pembudidayaan Ikan		kelompok		1.844.974.100		0	-
						Jumlah Benih ikan yang dihasilkan oleh UPTD BBI	1.000.000	ekor					
3	25	01	03	2.04	03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Laporan pelaksanaan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan	1	laporan		323.274.200	1.844.200	1	1.844.200
3	25	01	03	2.04	04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Laporan pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya		laporan			-	0	-
3	25	01	03	2.04	05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Laporan pelaksanaan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	1	laporan		30.000.000	30.000.000	1	30.000.000
3	25	01	03	2.04	06 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Laporan pelaksanaan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		laporan			-	0	-
3	25	01	03	2.04	07 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Laporan pelaksanaan Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		laporan			-	0	-
3	25	01	04		PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan		%		-	40.000.000		40.000.000
3	25	01	04	2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten					-	40.000.000		40.000.000
3	25	01	04	2.01	01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten	Laporan pelaksanaan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	1	laporan			20.000.000	1	20.000.000
3	25	01	04	2.01	02 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten	Laporan pelaksanaan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	1	laporan			20.000.000	1	20.000.000
3	25	01	05		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase usaha skala mikro dan kecil yang difasilitasi dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan		%		182.487.000	137.153.667		137.153.667
3	25	01	05	2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil					68.000.000	22.666.667		22.666.667

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
3	25	01	05	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Dokumen Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan yang disediakan	1	dokumen		68.000.000	22.666.667	1	22.666.667
3	25	01	05	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil					14.487.000	14.487.000		14.487.000
3	25	01	05	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah kelompok usaha yang diberikan Bimbingan dan telah menerapkan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	2	kelompok		14.487.000	14.487.000	2	14.487.000
3	25	01	05	2.03		Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					100.000.000	100.000.000		100.000.000
3	25	01	05	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Laporan pelaksanaan Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan		laporan				-	0
3	25	01	05	2.03	02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang mendapatkan fasilitas	4	pelaku usaha		100.000.000	100.000.000	4	100.000.000
3	26	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
3	26	01				Dinas Pariwisata					4.330.344.660	4.488.399.216		4.578.048.798
3	26	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		3.160.044.660	3.457.865.216	100	3.623.114.798
3	26	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		31.000.000	32.000.000	100	47.000.000
3	26	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		5.000.000	2	5.000.000
3	26	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website	31.000.000	10.000.000		10.000.000
3	26	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		5.000.000	4	10.000.000
3	26	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)		10.000.000	6	20.000.000
3	26	01	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		2.000.000	1	2.000.000
3	26	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		2.185.344.660	2.662.045.216	100	2.754.796.798
3	26	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	300	OB		2.162.838.410	2.650.045.216	300	2.742.796.798
3	26	01	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			2.000.000	3	2.000.000
3	26	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			5.000.000	14	5.000.000
3	26	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan		22.506.250	5.000.000	1	5.000.000
3	26	01	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		869.200.000	763.820.000	100	795.084.000
							Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
3	26	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	300	Surat		4.170.000	4.170.000	300	4.170.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
3	26	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		54.450.000	54.450.000	12	54.450.000
3	26	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB			-	0	-
3	26	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	18	unit		22.000.000	52.000.000	18	52.000.000
3	26	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	a	OB		262.080.000	265.200.000	a	265.200.000
3	26	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB		63.000.000	20.000.000	0	20.000.000
3	26	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan	3	unit/ paket			1.000.000	3	1.000.000
3	26	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	46	Jenis		25.000.000	25.000.000	46	25.000.000
3	26	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	7	Jenis		20.000.000	20.000.000	7	20.000.000
3	26	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	17	jenis		7.000.000	7.000.000	17	7.000.000
3	26	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20	unit/ set		41.500.000	50.000.000	20	84.264.000
3	26	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan		jenis			-	0	-
3	26	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	13	jenis		15.000.000	15.000.000	13	15.000.000
3	26	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	15	jenis			20.000.000	15	20.000.000
3	26	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	5	jenis		40.000.000	20.000.000	5	20.000.000
3	26	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	20	OK		200.000.000	100.000.000	20	102.000.000
							Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	120	OK		30.000.000	30.000.000	120	30.000.000
3	26	01	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit			-	0	-
3	26	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit			-	0	-
3	26	01	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis			-	0	-
3	26	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		unit			-	0	-
3	26	01	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis			-	0	-
3	26	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		jenis			-	0	-
3	26	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	1	unit			5.000.000		
3	26	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	5	jenis	untuk pemeliharaan gedung yang akan di tempati dinas panisata	5.000.000	25.000.000	5	25.000.000
3	26	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit			-	0	-
3	26	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	17	unit		75.000.000	45.000.000	17	45.000.000
3	26	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set				0	-
3	26	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	6	unit/set		5.000.000	5.000.000	6	5.000.000
3	26	01	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set			-	0	-
3	26	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit			-	0	-

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
3	26	01	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit			-	0	-
3	26	01	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit			-	0	-
3	26	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		74.500.000	-	100	26.234.000
3	26	01	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
3	26	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		stell/ pasang		16.500.000			
3	26	01	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan		stell/ pasang					
3	26	01	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang				25	8.750.000
3	26	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		stell/ pasang				0	-
3	26	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang					
3	26	01	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan		orang					
3	26	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis		orang		58.000.000		2	17.484.000
3	26	01	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan secara terpadu	1	Destinasi		913.000.000	725.000.000		725.000.000
							Tingkat kepuasan pengunjung atas ketersediaan sarana prasarana obyek wisata	baik						
3	26	01	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten					-	250.000.000		250.000.000
3	26	01	02	2.01	01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten	Dokumen Daya Tarik Wisata Kabupaten		dokumen					
3	26	01	02	2.01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten	Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten		dokumen					
3	26	01	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten	Jumlah destinasi Wisata Kabupaten yang dikembangkan	3	destinasi			250.000.000		250.000.000
3	26	01	02	2.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten	Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten		laporan					
3	26	01	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten					150.000.000	150.000.000		150.000.000
3	26	01	02	2.02	01	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten	Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten		dokumen		150.000.000			-
3	26	01	02	2.02	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten	Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten		dokumen					
3	26	01	02	2.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang dikembangkan	1	kawasan			150.000.000		150.000.000
3	26	01	02	2.02	04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten	Jumlah lokasi Sarana dan Prasarana dalam Kawasan Wisata Strategis Pariwisata yang diadakan		lokasi					
							Jumlah unit Sarana dan Prasarana dalam Kawasan Wisata Strategis Pariwisata yang dipelihara		unit					
3	26	01	02	2.02	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten		dokumen					
3	26	01	02	2.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten	Jumlah kelompok Masyarakat yang diberdayakan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten		kelompok					
3	26	01	02	2.02	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten	Dokumen Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten		dokumen					

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan				Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
											Target	Pagu Indikatif
(1)	(2)				Tolok Ukur	Target	(8)			(9)	(10)	(11)
3	26	01	02	2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten				763.000.000	325.000.000		325.000.000
3	26	01	02	2.03	01 Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten	Dokumen Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten	dokumen					
3	26	01	02	2.03	02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	dokumen					
3	26	01	02	2.03	03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten yang dikembangkan	3	destinasi	745.000.000	250.000.000		250.000.000
3	26	01	02	2.03	04 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	Jumlah destinasi yang dilakukan pengadaan Sarana dan Prasarana dan pemeliharaan Destinasi Pariwisata Kabupaten yang diadakan	4	destinasi		75.000.000		75.000.000
						Jumlah Sarana dan Prasarana Destinasi Pariwisata Kabupaten yang dipelihara	unit					
3	26	01	02	2.03	05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	laporan					
3	26	01	02	2.03	06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	Jumlah kelompok Masyarakat yang diberdayakan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	kelompok		18.000.000			-
3	26	01	02	2.03	07 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	Dokumen Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	dokumen					
3	26	01	02	2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten				-	-		-
3	26	01	02	2.04	01 Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten	Jumlah tempat pelayanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten yang disediakan	lokasi					
3	26	01	02	2.04	02 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten yang diterbitkan	berkas					
3	26	01	02	2.04	03 Pengelolaan Investasi Pariwisata	Dokumen Pengelolaan Investasi Pariwisata	dokumen					
3	26	01	03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisata	13.216	orang	7.300.000	159.334.000		159.334.000
3	26	01	03	2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten				7.300.000	159.334.000		159.334.000
3	26	01	03	2.01	01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri yang dilakukan	3	kali		40.000.000		40.000.000
3	26	01	03	2.01	02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten	Jumlah Destinasi wisata yang difasilitasi dalam kegiatan pemasaran	3	destinasi	7.300.000	94.334.000		94.334.000
						Jumlah pameran dalam rangka pemasaran destinasi wisata yang diikuti	1	kali				
3	26	01	03	2.01	03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten, Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah media yang digunakan dalam pengelolaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten, Baik dalam dan Luar Negeri yang disediakan	2	media		25.000.000		25.000.000
3	26	01	03	2.01	04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Jumlah MoU Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	MoU					
3	26	01	04		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Cakupan pengembangan ekonomi kreatif yang telah dilaksanakan	%		-	-		-
3	26	01	04	2.01	Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Bereksprei, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten				-	-		-
3	26	01	04	2.01	01 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah lokasi pengembangan prasarana kota kreatif	lokasi					-
						Jumlah lokasi revitalisasi prasarana kota kreatif	lokasi					

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
3	26	01	05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah pelaku ekonomi kreatif Kabupaten Luwu	250	orang		250.000.000	146.200.000		70.600.000
3	26	01	05	2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					250.000.000	146.200.000		70.600.000
3	26	01	05	2.01	01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah peserta Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	50	orang			70.600.000	50	70.600.000
3	26	01	05	2.01	02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		kelompok					
3	26	01	05	2.01	03 Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah peserta Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	60	orang			75.600.000		
3	26	01	05	2.01	04 Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Tenaga Kerja Bidang Pariwisata yang mengikuti sertifikasi		orang					
3	26	01	05	2.01	05 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Jumlah kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif		kelompok		250.000.000			-
3	26	01	05	2.01	06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif yang difasilitasi dalam pengembangan Kompetensi		kelompok					-
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
3	27	01			Dinas Pertanian					20.276.034.610	28.164.374.314		29.092.752.714
3	27	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		14.737.233.075	16.929.014.199	100	17.632.392.599
3	27	01	01	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		-	45.098.080	100	45.098.080
3	27	01	01	2.01	01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		4.221.430	2	4.221.430
3	27	01	01	2.01	02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan	59	Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website		11.600.000		11.600.000
3	27	01	01	2.01	03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		9.630.250	4	9.630.250
3	27	01	01	2.01	04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/regional/nas)		17.100.000	6	17.100.000
3	27	01	01	2.01	05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		2.546.400	1	2.546.400
3	27	01	01	2.02	Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		14.152.937.610	15.905.113.569	100	16.461.471.969
3	27	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	2.028	OB		14.130.431.360	15.895.954.289	2.028	16.452.312.689
3	27	01	01	2.02	05 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			1.934.620	3	1.934.620
3	27	01	01	2.02	07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	2	laporan			3.775.000	2	3.775.000
3	27	01	01	2.02	09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan		22.506.250	3.449.660	1	3.449.660
3	27	01	01	2.03	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		584.295.465	964.812.150	100	958.322.150

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
							Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
3	27	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	1.700	Surat		11.850.000	12.441.000	1.700	12.441.000
3	27	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		34.723.800	54.000.000	12	54.000.000
3	27	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB					
3	27	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	145	unit		27.000.000	119.250.000	145	119.250.000
3	27	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	312	OB		225.600.000	225.600.000	312	225.600.000
3	27	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan	12	OB			16.800.000	12	16.800.000
3	27	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan	4	unit/ paket			3.000.000	4	3.000.000
3	27	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	25	Jenis		32.603.500	33.903.500	25	33.903.500
3	27	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3	Jenis		7.205.665	8.100.000	3	8.100.000
3	27	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan		jenis					
3	27	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	unit/paket			143.445.400	11	135.445.400
3	27	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan		jenis					
3	27	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	8	jenis		7.200.000	14.640.000	8	14.640.000
3	27	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	5	bulan			17.997.250	5	17.997.250
3	27	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3	jenis		18.000.000	18.250.000	3	18.250.000
3	27	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	28	OK		200.000.000	140.000.000	28	140.000.000
							Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	200	OK			50.000.000	200	52.500.000
3	27	01	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit					
3	27	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	2	unit			50.000.000	2	50.000.000
3	27	01	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
3	27	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	4	unit			3.960.000	3	2.970.000
3	27	01	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
3	27	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		jenis					
3	27	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan		unit					
3	27	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	1	jenis			30.000.000	1	30.000.000
3	27	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit					
3	27	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	145	unit		20.112.500	23.425.000	145	23.425.000
3	27	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
3	27	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
3	27	01	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
3	27	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit					
3	27	01	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
3	27	01	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
3	27	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		-	13.990.400	100	167.500.400
3	27	01	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
3	27	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		stell/ pasang					
3	27	01	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
3	27	01	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang				169	42.250.000
3	27	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		stell/ pasang				169	91.260.000
3	27	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang					
3	27	01	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	50	orang			13.990.400	50	13.990.400
3	27	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis		orang				2	20.000.000
3	27	01	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang memperoleh sarana pertanian/perkebunan		%		-	411.805.000		411.805.000
							Persentase peningkatan produksi komunitas tanaman pangan	3,00	%					
							Persentase peningkatan produksi komoditi perkebunan	3,00	%					
3	27	01	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					-	44.070.000		44.070.000
3	27	01	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan hasil Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	22	laporan			22.120.000	22	22.120.000
3	27	01	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan hasil pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	22	laporan			21.950.000	22	21.950.000
3	27	01	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota					-	323.735.000		323.735.000
3	27	01	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Luasan Areal Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tumbuhan	3	Ha			22.000.000	3	22.000.000
3	27	01	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Laporan pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		laporan					
3	27	01	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Luasan Pemanfaatan SDG Hewan / Tumbuhan	8	Ha			301.735.000	Ha	301.735.000
3	27	01	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota					-	44.000.000		44.000.000
3	27	01	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan pelaksanaan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	22	laporan			22.000.000	22	22.000.000
3	27	01	02	2.03	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Laporan pelaksanaan Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	22	laporan			22.000.000	22	22.000.000
3	27	01	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer					-	-		-

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
3	27	01	02	2.04	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Laporan pelaksanaan Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan		laporan					
3	27	01	02	2.04	02	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Laporan pelaksanaan Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan		laporan					
3	27	01	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota					-	-		-
3	27	01	02	2.05	01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Laporan pelaksanaan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan		laporan					
3	27	01	02	2.05	02	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Jumlah pelaksanaan Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak		kali					
3	27	01	02	2.05	03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Laporan pelaksanaan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak		laporan					
3	27	01	02	2.05	04	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Laporan pelaksanaan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan		laporan					
3	27	01	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Laporan pelaksanaan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak		laporan					
3	27	01	02	2.05	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Laporan pelaksanaan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan		laporan					
3	27	01	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain					-	-		-
3	27	01	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang diadakan		ekor					
3	27	01	02	2.06	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah jenis Hijauan Pakan Ternak yang diadakan		jenis					
3	27	01	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang memperoleh prasarana pertanian/perkebunan		%		2.007.600.000	4.789.889.915		5.014.889.915
							Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman hortikultura	3	%					
3	27	01	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian					94.800.000	144.889.915		169.889.915
3	27	01	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Luas lahan yang dikelola		Ha					25.000.000
3	27	01	03	2.01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Jumlah dokumen yang disusun	1	dokumen			110.089.915	1	110.089.915
3	27	01	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah kegiatan DAK yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi	1	kegiatan		34.800.000	34.800.000	1	34.800.000
3	27	01	03	2.01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah masterplan yang disusun	1	dokumen		60.000.000			
3	27	01	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian					1.912.800.000	4.595.000.000		4.595.000.000
3	27	01	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Panjang Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun		meter		1.372.800.000	1.220.000.000		1.220.000.000
							Panjang Jaringan Irigasi Usaha Tani yang direhab		meter					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
							Panjang Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dipelihara		meter					
							Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun	10	unit					
3	27	01	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang dibangun		unit					
							Jumlah Embung Pertanian yang direhab		unit					
							Jumlah Embung Pertanian yang dipelihara		unit					
3	27	01	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang Jalan Usaha Tani yang dibangun	10.000	meter			1.050.000.000	10.000	1.050.000.000
							Panjang Jalan Usaha Tani yang direhab		meter					
							Panjang yang dipelihara		meter					
3	27	01	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang dibangun	15	unit		540.000.000	1.800.000.000	15	1.800.000.000
							Jumlah DAM Parit yang direhab		unit					
							Jumlah DAM Parit yang dipelihara		unit					
3	27	01	03	2.02	05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah Long Storage yang dibangun		unit					
							Jumlah Long Storage yang direhab		unit					
							Jumlah Long Storage yang dipelihara		unit					
3	27	01	03	2.02	06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang dibangun	30	unit			525.000.000	30	525.000.000
							Jumlah Pintu Air yang direhab		unit					
							Jumlah Pintu Air yang dipelihara		unit					
3	27	01	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun		unit					
							Jumlah Rumah Potong Hewan yang direhab		unit					
							Jumlah Rumah Potong Hewan yang dipelihara		unit					
3	27	01	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun	4	unit			-	4	-
							Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhab	4	unit				4	
							Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dipelihara	4	unit				4	
3	27	01	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun		unit					
							Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang direhab		unit					
							Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dipelihara		unit					
3	27	01	03	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota					-	50.000.000		250.000.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
3	27	01	03	2.03	01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Luas Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang dilestarkan dan dimanfaatkan	5	Ha			50.000.000	5	250.000.000
3	27	01	03	2.03	02	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Laporan hasil Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak		laporan					
3	27	01	03	2.04		Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang dikembangkan		Ha		-	-		-
3	27	01	03	2.04	01	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	Laporan hasil Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum		laporan					
3	27	01	03	2.04	02	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah lokasi Lahan Penggembalaan Umum yang dikelola		lokasi					
3	27	01	03	2.04	03	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum		laporan					
3	27	01	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Peningkatan populasi ternak	3,00	%		14.352.417	96.000.000		96.000.000
3	27	01	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten					14.352.417	48.000.000		48.000.000
3	27	01	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan hasil pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan penyakit	12	laporan		14.352.417	48.000.000	12	48.000.000
3	27	01	04	2.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Jumlah kasus Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten		kasus				0	-
3	27	01	04	2.01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah ternak Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular yang ditanggulangi		ekor				0	-
3	27	01	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten					-	-		-
3	27	01	04	2.02	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Laporan hasil Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan		laporan				0	-
3	27	01	04	2.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan hasil Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan		laporan				0	-
3	27	01	04	2.02	03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten	Laporan hasil Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten		laporan				0	-
3	27	01	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten					-	-		-
3	27	01	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah permohonan Pelayanan Jasa Laboratorium yang dilayani		permohonan					
3	27	01	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah permohonan Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dilayani		permohonan					
3	27	01	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner					-	48.000.000		48.000.000
3	27	01	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Laporan pelaksanaan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan		laporan					
3	27	01	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan hasil Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12	laporan			48.000.000	12	48.000.000
3	27	01	04	2.04	03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Dokumen Persyaratan Teknis yang ditetapkan		dokumen					
3	27	01	04	2.04	04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pelaksanaan Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner		kali					
3	27	01	04	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan					-	-		-
3	27	01	04	2.05	01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Laporan hasil Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan		laporan					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
													Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	Tolok Ukur	Target	(8)			(9)	(10)	(11)
3	27	01	04	2.05	02	Penanganan atas Pelanggaran kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Laporan Penanganan atas Pelanggaran kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya		laporan					
3	27	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian yang dapat ditanggulangi		%		-	185.500.000		185.500.000
3	27	01	05	2.01		<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten</i>					-	185.500.000		185.500.000
3	27	01	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Laporan pelaksanaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	12	laporan			48.000.000	12	48.000.000
3	27	01	05	2.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Laporan pelaksanaan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		laporan					
3	27	01	05	2.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Laporan pelaksanaan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		laporan					
3	27	01	05	2.01	04	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Laporan pelaksanaan Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis		laporan					
3	27	01	05	2.01	05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Luasan Penanggulangan pasca bencana bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kesehatan Hewan	500	Ha			137.500.000	500	137.500.000
3	27	01	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase permohonan izin yang dapat diterbitkan		%		-	-		-
3	27	01	06	2.01		<i>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten</i>					-	-		-
3	27	01	06	2.01	01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Dokumen Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian yang disusun		dokumen					
3	27	01	06	2.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Laporan pelaksanaan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian		laporan					
3	27	01	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Laporan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian		laporan					
3	27	01	06	2.02		<i>Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan</i>					-	-		-
3	27	01	06	2.02	01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang diterbitkan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang diterbitkan		izin					
3	27	01	06	2.02	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Laporan pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan		laporan					
3	27	01	06	2.02	03	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Laporan pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan		laporan					
3	27	01	06	2.02	04	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan	Laporan pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan		laporan					
3	27	01	06	2.02	05	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Laporan pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan		laporan					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
3	27	01	06	2.03		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan					-	-		-
3	27	01	06	2.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah permohonan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang difasilitasi		permohonan					
3	27	01	06	2.03	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Laporan pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan		laporan					
3	27	01	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase penyuluh yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan	20,00	%		3.516.849.118	5.752.165.200		5.752.165.200
3	27	01	07	2.01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>					<i>3.516.849.118</i>	<i>5.752.165.200</i>		<i>5.752.165.200</i>
3	27	01	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	50	penyuluh swadaya		956.421.768	347.570.000	50	347.570.000
3	27	01	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani yang dikembangkan	125	kelompok tani	LOAN READ SI	1.360.427.350	4.200.000.000	125	4.200.000.000
3	27	01	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Balai Penyuluhan pertanian yang menerima dan difasilitasi pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	22	Balai Penyuluhan Pertanian		1.200.000.000	1.204.595.200	22	1.204.595.200
3	27	01	07	2.01	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang dibentuk		Badan Usaha					
3	28	01	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Cakupan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang telah dilaksanakan		%		-	-		-
3	28	01	04	2.01		<i>Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten</i>					<i>-</i>	<i>-</i>		<i>-</i>
3	28	01	04	2.01	01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Laporan pelaksanaan Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA		laporan					
3	28	01	04	2.01	02	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten	Laporan pelaksanaan Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten		laporan					
3	28	01	04	2.01	03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Kabupaten	Jumlah jenis Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA yang diawetkan		jenis					
3	28	01	04	2.01	04	Pengawetan Koridor Hidupan Liar	Laporan pelaksanaan Pengawetan Koridor Hidupan Liar		laporan					
3	28	01	04	2.01	05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten	Luas Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA yang dipulihkan		Ha					
3	28	01	04	2.01	06	Pemanfaatan Jasa lingkungan TAHURA Kabupaten	Luas lingkungan TAHURA yang telah dimanfaatkan		Ha					
3	28	01	04	2.01	07	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten	Laporan pelaksanaan Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten		MoU					
3	28	01	04	2.01	08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten	Jumlah kelompok masyarakat Masyarakat di Sekitar TAHURA yang diberdayakan		kelompok					
3	28	01	04	2.01	09	Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Kabupaten	Luas Daerah Penyangga TAHURA yang dikelola		Ha					
3	29	01	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan energi baru terbarukan		%		-	-		-
3	29	01	05	2.01		<i>Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten</i>					<i>-</i>	<i>-</i>		<i>-</i>
3	29	01	05	2.01	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten	Dokumen Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten yang ditetapkan		dokumen					
3	29	01	05	2.01	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten	Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten yang disusun		dokumen					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
3	29	01	05	2.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten	Laporan pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten		laporan					
3	30					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
3	30	01				Dinas Perdagangan					9.049.889.649	6.240.816.868		6.791.607.192
3	30	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		4.486.134.649	5.240.997.868	100	5.502.864.642
3	30	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		46.040.000	47.000.000	100	67.000.000
3	30	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan	16.000.000	5.000.000	2	5.000.000
3	30	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website	30.040.000	10.000.000		10.000.000
3	30	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		10.000.000	4	10.000.000
3	30	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)		20.000.000	6	40.000.000
3	30	01	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		2.000.000	1	2.000.000
3	30	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		3.678.789.649	4.476.970.898	100	4.633.244.879
3	30	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	576	OB		3.656.283.399	4.464.970.898	576	4.621.244.879
3	30	01	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			2.000.000	3	2.000.000
3	30	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			5.000.000	14	5.000.000
3	30	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan		22.506.250	5.000.000	1	5.000.000
3	30	01	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		746.305.000	717.026.970	100	719.169.763
							Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
3	30	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	300	Surat		3.500.000	3.675.000	300	3.858.750
3	30	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		27.200.000	28.560.000		29.988.000
3	30	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB					
3	30	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	22	unit		28.000.000	29.400.000	22	30.870.000
3	30	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	336	OB		331.680.000	331.680.000	336	331.680.000
3	30	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB		26.900.000	27.169.000	0	28.527.450
3	30	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan	10	jenis/ unit/ paket		10.000.000			
3	30	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan		Jenis		11.150.400	11.150.400	0	11.150.400
3	30	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2	Jenis		2.970.000	2.970.000	2	2.970.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
3	30	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	jenis		2.500.000	2.625.000	10	2.756.250
3	30	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10	unit			20.000.000	10	21.000.000
3	30	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan		jenis					
3	30	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2	jenis		18.000.000	18.900.000	2	19.845.000
3	30	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan		jenis		5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
3	30	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	2	jenis		21.700.000	21.700.000	2	21.700.000
3	30	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	31	OK		218.263.600	152.784.520	31	155.840.210
3	30	01	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	54	OK		12.975.000	13.623.750	54	14.304.938
3	30	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit					
3	30	01	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit					
3	30	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
3	30	01	01	2.03	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan		jenis					
3	30	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
3	30	01	01	2.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		jenis					
3	30	01	01	2.03	28	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan	1	unit			10.000.000		
3	30	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	5	jenis		5.700.000	5.985.000	5	6.284.250
3	30	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit					
3	30	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	10	unit		19.000.000	19.950.000	10	20.947.500
3	30	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set		1.766.000	1.854.300	5	1.947.015
3	30	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	10	unit/set			10.000.000	10	10.500.000
3	30	01	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
3	30	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit					
3	30	01	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
3	30	01	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
3	30	01	01	2.04	01	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		15.000.000	-	100	83.450.000
3	30	01	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
3	30	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		stell/ pasang				79	43.450.000
3	30	01	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan		stell/ pasang					
3	30	01	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
3	30	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		stell/ pasang					
3	30	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	3	orang					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
3	30	01	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	30	orang					
3	30	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis		orang		15.000.000		3	40.000.000
3	30	01	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase permohonan perizinan dan pendaftaran perusahaan yang difasilitasi		%		-	-		-
3	30	01	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan					-	-		-
3	30	01	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah permohonan perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang difasilitasi		permohonan					
3	30	01	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang					-	-		-
3	30	01	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah permohonan Penerbitan Tanda Daftar Gudang yang difasilitasi		permohonan					
3	30	01	02	2.03		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri					-	-		-
3	30	01	02	2.03	01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah permohonan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik yang difasilitasi		permohonan					
3	30	01	02	2.03	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah permohonan Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri yang difasilitasi		permohonan					
3	30	01	02	2.04		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri					-	-		-
3	30	01	02	2.04	01	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri yang tersedia		sistem					
3	30	01	02	2.04	02	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah permohonan Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri yang difasilitasi		permohonan					
3	30	01	02	2.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat					-	-		-
3	30	01	02	2.05	01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah permohonan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang difasilitasi		permohonan					
3	30	01	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					-	-		-
3	30	01	02	2.06	01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan berbahaya	Laporan pelaksanaan Pemeriksaan Penyimpanan Bahan berbahaya		laporan					
3	30	01	02	2.06	02	Fasilitasi pemenuhan komitmen pemeriksaan distribusi bahan berbahaya Bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah permohonan pemenuhan komitmen pemeriksaan distribusi bahan berbahaya Bagi P-B2 dan PA-B2 yang difasilitasi		permohonan					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
3	30	01	02	2.06	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)	Laporan pelaksanaan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)		laporan					
3	30	01	02	2.07		Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)					-	-		-
3	30	01	02	2.07	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA		laporan					
3	30	01	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PRODUKSI	Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan dengan kondisi layak	84,00	%		4.421.255.000	696.689.000		700.525.550
3	30	01	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					4.351.255.000	633.655.000		637.491.550
3	30	01	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan (pasar) yang disediakan/direhabilitasi	3	pasar		3.967.600.000	250.000.000	7	250.000.000
3	30	01	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan (pasar) yang difasilitasi	14	pasar		383.655.000	383.655.000	14	387.491.550
3	30	01	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya					70.000.000	63.034.000		63.034.000
3	30	01	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibina	14	pasar		40.000.000	33.034.000	14	33.034.000
3	30	01	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan (pedagang) yang diberdayakan		pedagang		30.000.000	30.000.000		30.000.000
3	30	01	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan penyelenggaraan kewenangan daerah dalam rangka stabilisasi harga barang kebutuhan dan barang penting		%		47.400.000	95.000.000		198.000.000
3	30	01	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					15.000.000	15.000.000		15.000.000
3	30	01	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		laporan					
3	30	01	04	2.01	02	Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi	12	kali		15.000.000	15.000.000	12	15.000.000
3	30	01	04	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan pelaksanaan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		laporan					
3	30	01	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten					32.400.000	40.000.000		143.000.000
3	30	01	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten	Laporan pelaksanaan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten		laporan					
3	30	01	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	12	kali		32.400.000	40.000.000	12	40.000.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
3	30	01	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten	Jumlah operasi pasar yang dilaksanakan	1	kali				1	103.000.000
3	30	01	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten					-	40.000.000		40.000.000
3	30	01	04	2.03	01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah pelaksanaan pemeriksaan	12	kali			10.000.000	12	10.000.000
3	30	01	04	2.03	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pelaksanaan pengawasan	12	kali			15.000.000	12	15.000.000
3	30	01	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pelaksanaan pengawasan	12	kali			15.000.000	12	15.000.000
3	30	01	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan ekspor daerah		%		47.600.000	30.000.000		80.000.000
3	30	01	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten					47.600.000	30.000.000		80.000.000
3	30	01	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten	Laporan pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten		laporan					
3	30	01	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah pameran dagang yang diikuti		kali		47.600.000		1	50.000.000
3	30	01	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah pameran dagang yang dilaksanakan	1	kali			30.000.000		30.000.000
3	30	01	05	2.01	04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah peserta Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan		OK					
3	30	01	05	2.01	05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Ekspor yang dilakukan peningkatan citra produk		produk ekspor					
3	30	01	05	2.01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibina		pelaku usaha					
3	30	01	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan penyelenggaraan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	100,00	%		47.500.000	78.130.000		80.217.000
3	30	01	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan					47.500.000	78.130.000		80.217.000
3	30	01	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah pelaksanaan tera/tera ulang	12	kali		32.500.000	35.000.000		35.000.000
3	30	01	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaksanaan pengawasan/penyuluhan	12	kali		15.000.000	20.570.000	12	22.657.000
3	30	01	06	2.01	03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah pelaksanaan penyidikan	52	kali			22.560.000	52	22.560.000
3	30	01	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha	100,00	%		-	100.000.000		230.000.000
3	30	01	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri					-	100.000.000		230.000.000
3	30	01	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan	Jumlah Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan		kali					
3	30	01	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten	Jumlah Produk Dalam Negeri yang dilakukan pemasaran dan peningkatan penggunaan Di Tingkat Kabupaten		jenis					
3	30	01	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah sistem dan jaringan informasi perdagangan yang disediakan	4	sistem dan jaringan			100.000.000	4	230.000.000
3	31					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
3	31	01				Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian					232.500.000	567.500.000		567.500.000
3	31	01	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan pembinaan dan pengawasan industri	100,00	%		232.500.000	517.500.000		517.500.000
3	31	01	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten					232.500.000	517.500.000	100	517.500.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
3	31	01	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang disusun		dokumen					
3	31	01	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi	1	kali			20.000.000	1	20.000.000
3	31	01	02	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi	2	kali		232.500.000	232.500.000	2	232.500.000
							Jumlah peserta pelatihan IKM	90	orang			225.000.000	90	225.000.000
3	31	01	02	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi		kali					
3	31	01	02	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	50	orang			35.000.000	50	35.000.000
3	31	01	02	2.01	06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen evaluasi	1	dokumen			5.000.000	1	5.000.000
3	31	01	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Kabupaten	Persentase ketersediaan layanan perizinan		%		-	30.000.000	100	30.000.000
3	31	01	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah					-	30.000.000	100	30.000.000
3	31	01	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten, Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi	2	kali			10.000.000	2	10.000.000
3	31	01	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan (IUI) Kewenangan Kabupaten dalam Memenuhi Ketentuan Perizinan	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi	2	kali			10.000.000	2	10.000.000
3	31	01	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pengamanan dan penyelamatan industri	2	kali			10.000.000	2	10.000.000
3	31	01	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan sistem informasi industri nasional		%		-	20.000.000		20.000.000
3	31	01	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten					-	20.000.000	100	20.000.000
3	31	01	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Laporan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi SINAS	1	laporan			10.000.000	1	10.000.000
3	31	01	04	2.01	02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten	Jumlah data informasi industri kabupaten yang dipublikasikan	1	dokumen			10.000.000	1	10.000.000
3	32					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								
3	32	01				Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi					35.700.000	276.940.000		155.700.000
3	32	01	02			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan Penyelenggaraan Transmigrasi	100,00	%		-	241.240.000		-
3	32	01	02	2.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi					-	241.240.000		-
3	32	01	02	2.01	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Potensi Kawasan Transmigrasi yang diidentifikasi	1	lokasi				1	-
3	32	01	02	2.01	02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Laporan pelaksanaan Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan		laporan				0	-
3	32	01	02	2.01	03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dokumen Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi		dokumen				0	-

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
3	32	01	02	2.01	04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1	dokumen			241.240.000		
3	32	01	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Luas kawasan transmigrasi yang dibangun		%		-	-		120.000.000
3	32	01	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					-	-		120.000.000
3	32	01	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi		laporan				0	-
3	32	01	03	2.01	02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Lokasi Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran yang disiapkan		lokasi				0	-
3	32	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Dokumen Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi		dokumen				3	120.000.000
3	32	01	03	2.01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang dipindahkan dan ditempatkan		Kepala Keluarga				0	-
3	32	01	03	2.01	05	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Jumlah peserta Penyuluhan		orang				0	-
3	32	01	03	2.01	06	Pelatihan Transmigrasi lokal	Jumlah peserta Pelatihan		orang				0	-
3	32	01	03	2.01	07	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Dokumen pelaksanaan kegiatan Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi		dokumen				0	-
3	32	01	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					35.700.000	35.700.000		35.700.000
3	32	01	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian					35.700.000	35.700.000		35.700.000
3	32	01	04	2.01	01	Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah SDM yang terlibat dalam rangka penguatan kemandirian satuan permukiman		orang				0	-
3	32	01	04	2.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan yang disiapkan dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman		jenis		35.700.000	35.700.000	0	35.700.000
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	01					SEKRETARIAT DAERAH								
4	01	01				Sekretariat Daerah					44.102.991.512	32.712.406.357		29.143.942.548
4	01	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		29.910.056.862	20.366.569.082	100	16.831.790.783
4	01	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		10.000.000	102.924.900	100	76.437.200
4	01	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		15.837.500	3	25.000.000
4	01	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website		21.517.500		10.000.000
4	01	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		17.874.700	4	10.000.000
4	01	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)		36.258.000	6	20.000.000
4	01	01	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya	10.000.000	11.437.200	1	11.437.200

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
4	01	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		10.640.139.062	10.604.086.882	100	10.969.822.333
4	01	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	1.272	OB		10.617.632.812	10.449.584.332	1.272	10.815.319.783
4	01	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	dokumen			16.597.650	1	16.597.650
4	01	01	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Bahan pelaksanaan verifikasi yang disiapkan	1	dokumen			29.867.950	1	29.867.950
4	01	01	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Dokumen pelaporan akuntansi dan keuangan yang disusun	1	dokumen			47.580.700	1	47.580.700
4	01	01	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	1	dokumen			16.498.525		16.498.525
4	01	01	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD yang disusun	1	laporan			7.296.000	1	7.296.000
4	01	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	2	laporan			15.976.850	2	15.976.850
4	01	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun dan dilaporkan	1	dokumen			5.679.875	1	5.679.875
4	01	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan		22.506.250	15.005.000	1	15.005.000
4	01	01	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		19.189.667.800	9.568.957.300	100	5.707.906.250
							Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
4	01	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	9.300	Surat		433.080.000	270.000.000	9.300	270.000.000
4	01	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		1.156.495.000	1.441.380.000	12	1.441.380.000
4	01	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB		645.000.000	426.000.000	0	426.000.000
4	01	01	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah PNS yang disediakan jasa pemeliharaan kesehatan	2	orang		200.000.000			-
4	01	01	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang disediakan jasa jaminan	0	unit/ paket			65.496.750	0	-
4	01	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan		unit		98.400.000	65.000.000	0	65.000.000
4	01	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	444	OB			194.400.000	444	194.400.000
4	01	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan	1	Tahun		401.800.000	400.000.000	1	400.000.000
4	01	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan		unit/ paket		25.000.000	41.570.000	0	41.570.000
4	01	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan		Jenis		50.300.000	14.058.200	0	14.058.200
4	01	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan		Jenis		19.500.000	73.900.000	0	73.900.000
4	01	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan		jenis		111.000.000	114.048.500	0	114.048.500
4	01	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	64	unit		2.007.400.000	262.100.000	64	262.100.000
4	01	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	7	jenis			60.000.000		
4	01	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan		jenis		150.000.000	206.400.000	0	206.400.000
4	01	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	5	jenis		24.000.000	227.943.750	5	227.943.750
4	01	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan		jenis		51.400.000	180.000.000	0	180.000.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
4	01	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	55	OK		1.573.840.000	276.765.000	55	282.300.300
							Jumlah peerjalanan dinas dalam daerah	0	OK		50.000.000		0	-
4	01	01	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan	1	unit			-	0	-
4	01	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	17	unit			-	0	-
4	01	01	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan	4	jenis		4.082.300.000	249.600.000	3	100.000.000
4	01	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	9	unit			484.000.000	9	100.000.000
4	01	01	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan	3	jenis			300.000.000	3	50.000.000
4	01	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	4	jenis			59.500.000	4	50.000.000
4	01	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan	18	unit/set		883.750.000	209.300.000		
4	01	01	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Luas bangunan rumah jabatan yang dilakukan pemeliharaan	8.500	m2		500.000.000	332.560.000	8.500	332.560.000
4	01	01	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Luas bangunan rumah dinas yang dilakukan pemeliharaan	1.000	m2		50.000.000	108.555.000	1.000	108.555.000
4	01	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Luas bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	1.000	m2		50.000.000	209.000.000	1.000	209.000.000
4	01	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	2	unit		130.000.000	81.900.000	2	81.900.000
4	01	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	87	unit		350.000.000	249.960.000	87	249.960.000
4	01	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	111	unit/set			26.920.100	111	26.920.100
4	01	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	32	unit/set			19.520.000	32	19.910.400
4	01	01	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	0	unit/set			-		
4	01	01	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Luas bangunan rumah jabatan yang dilakukan rehab	221	m2	lantai, km,	570.680.000	371.280.000		
4	01	01	01	2.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang direhab	25	m2			67.500.000		
4	01	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Luas bangunan gedung kantor yang dilakukan rehab	1.143	unit	Lanjutan rehab atap kantor bupati	5.475.722.800	2.400.300.000	1	100.000.000
4	01	01	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi dedang/berat	0	unit					
4	01	01	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat	3	unit		100.000.000	80.000.000	3	80.000.000
4	01	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		70.250.000	90.600.000	100	77.625.000
4	01	01	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	0	unit			-		
4	01	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	286	stell/ pasang		15.000.000			
4	01	01	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan yang diadakan	78	stell/ pasang				0	-
4	01	01	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan	0	stell/ pasang					27.625.000
4	01	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	60	stell/ pasang		55.250.000		0	-
4	01	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	4	orang			20.000.000	0	-
4	01	01	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	100	orang			20.600.000	0	-
4	01	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	4	orang			50.000.000	4	50.000.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
4	01	01	02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan penyelenggaraan koordinasi bidang pemerintahan	100,00	%		3.512.364.650	4.354.550.432		4.320.864.922
						Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan otonomi daerah	100,00	%					
						Cakupan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat	100,00	%					
						Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi dalam kurun waktu tahun yang sama	100,00	%					
4	1	01	02	2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Cakupan penyelenggaraan administrasi tata pemerintahan	100	%		323.070.000	553.694.500		553.694.500
4	1	01	02	2.01	01 Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen Penataan Administrasi Pemerintahan		dokumen		44.250.000	227.476.800	0	227.476.800
4	1	01	02	2.01	02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		dokumen		69.120.000	213.226.000	0	213.226.000
4	1	01	02	2.01	03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		dokumen		209.700.000	112.991.700	0	112.991.700
4	1	01	02	2.02	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					1.996.035.000	2.957.986.405		2.923.176.205
4	1	01	02	2.02	01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah kegiatan dalam rangka fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	11	kegiatan		1.843.535.000	2.847.846.705	11	2.847.846.705
4	01	01	02	2.02	02 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1	dokumen			54.810.200	1	20.000.000
4	01	01	02	2.02	03 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1	dokumen		152.500.000	55.329.500	1	55.329.500
4	1	01	02	2.03	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah					1.193.259.650	786.635.027		786.635.027
4	1	01	02	2.03	01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah penyusunan produk hukum daerah yang difasilitasi		produk hukum	termasuk dari OPD lain yg tidak ada kegiatan penyusunan peraturan	307.009.650	471.428.300	0	471.428.300
4	1	01	02	2.03	02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Dokumen fasilitasi bantuan hukum		dokumen		871.250.000	212.712.352	0	212.712.352
4	01	01	02	2.03	03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Sistem Informasi hukum yang dikelola	1	sistem		15.000.000	102.494.375	1	102.494.375
4	1	01	02	2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah					-	56.234.500		57.359.190
4	1	01	02	2.04	01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kerja Sama Dalam Negeri yang difasilitasi	4	MoU			29.673.500	4	30.266.970
4	1	01	02	2.04	02 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Kerja Sama Luar Negeri yang difasilitasi	1	MoU			-		
4	1	01	02	2.04	03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	5	laporan			26.561.000	5	27.092.220
4	01	01	03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Pembangunan Bidang Perekonomian	100,00	%		1.312.650.000	1.197.638.650		1.197.638.650
						Persentase ketersediaan Sistem SPSE beroperasi	85,00	%					
						Persentase penyelesaian tender Paket Pekerjaan Tepat waktu	86,00	%					
4	1	01	03	2.01	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					399.300.000	433.807.300		433.807.300
4	01	01	03	2.01	01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Laporan pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1	laporan		239.650.000	244.377.575	1	244.377.575
4	1	01	03	2.01	02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan pelaksanaan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1	laporan		36.050.000	98.746.075	1	98.746.075
4	01	01	03	2.01	03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Laporan pelaksanaan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	1	laporan		123.600.000	90.683.650	1	90.683.650
4	1	01	03	2.02	Administrasi Pembangunan					90.960.000	59.826.800		59.826.800
4	1	01	03	2.02	01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan		dokumen				0	-

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
4	01	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program pembangunan	1	laporan		64.560.000	59.826.800	1	59.826.800
4	01	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		dokumen		26.400.000		0	-
4	1	01	03	2.03		Pengadaan Barang dan Jasa					552.940.000	605.135.250		605.135.250
4	1	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	dokumen		274.765.000	237.669.150	1	237.669.150
4	01	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1	dokumen		178.175.000	163.488.280	1	163.488.280
4	01	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1	dokumen		100.000.000	203.977.820	1	203.977.820
4	01	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen evaluasi kebijakan terkait sumber daya alam				269.450.000	98.869.300		98.869.300
4	01	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Dokumen Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	4	laporan			58.869.300	4	58.869.300
4	01	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2	laporan			20.000.000	2	20.000.000
4	01	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Dokumen Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2	laporan		269.450.000	20.000.000	2	20.000.000
4	01	01	04			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Cakupan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100	%		9.367.920.000	6.793.648.193		6.793.648.193
							Cakupan Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol	100	%					
							Cakupan Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur	100	%					
							Cakupan pelayanan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan	100	%					
4	01	01	04	2.01		Pelaksanaan Administrasi Umum					4.468.100.000	5.288.732.188		5.288.732.188
4	01	01	04	2.01	01	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian					1.629.300.000	3.277.243.030	0	3.277.243.030
4	01	01	04	2.01	02	Pengelolaan Perlengkapan	Jumlah jenis perlengkapan yang dikelola		jenis		549.200.000	360.325.950	0	360.325.950
4	01	01	04	2.01	03	Pengelolaan Rumah Tangga	Rumah jabatan yang dikelola selama 1 tahun	3	rumah tangga		2.289.600.000	1.651.163.208	3	1.651.163.208
4	01	01	04	2.02		Penataan Organisasi					366.420.000	250.729.970		250.729.970
4	01	01	04	2.02	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Laporan pelaksanaan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		laporan		125.000.000	36.637.000	0	36.637.000
4	01	01	04	2.02	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah PD yang difasilitasi dalam peningkatan Pelayanan Publik dan Tata Laksana	57	PD		166.220.000	165.485.970	57	165.485.970
4	01	01	04	2.02	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Laporan pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		laporan		75.200.000	48.607.000	0	48.607.000
4	01	01	04	2.03		Protokol dan Komunikasi Pimpinan					3.543.350.000	494.173.550		494.173.550
4	01	01	04	2.03	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah kegiatan keprotokolan yang difasilitasi	24	kegiatan		224.000.000	220.400.000	24	220.400.000
4	01	01	04	2.03	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah dialog/audiensi/ koordinasi pimpinan yang difasilitasi	12	kali		2.835.000.000	256.519.800	12	256.519.800
4	01	01	04	2.03	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah kegiatan pimpinan yang didokumentasikan	36	kali		484.350.000	17.253.750	36	17.253.750
4	01	01	04	2.04		Perencanaan dan Keuangan					990.050.000	760.012.485		760.012.485
4	01	01	04	2.04	01	Pengelolaan Perencanaan	Dokumen Pengelolaan Perencanaan	3	dokumen			121.360.400	3	121.360.400
4	01	01	04	2.04	02	Pengelolaan Keuangan	Dokumen Pengelolaan Keuangan	1	dokumen		990.050.000	575.270.185	1	575.270.185
4	01	01	04	2.04	03	Penatausahaan Pelaporan	Dokumen Penatausahaan Pelaporan	1	dokumen			63.381.900	1	63.381.900

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
													Target	Target
(1)							(2)	Tolok Ukur					(7)	(8)
4	02					SEKRETARIAT DPRD								
4	02	01				Sekretariat DPRD					22.092.354.223	35.696.080.886		33.051.034.595
4	02	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		8.431.340.223	23.954.628.786	100	20.743.199.895
4	02	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		30.000.000	70.750.800	100	47.000.000
4	02	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan	15.000.000	6.190.600	2	5.000.000
4	02	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website		26.000.000		10.000.000
4	02	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan	15.000.000	11.867.600	4	10.000.000
4	02	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/has)		23.600.000	6	20.000.000
4	02	01	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		3.092.600	1	2.000.000
4	02	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		3.514.791.723	17.012.387.991	100	17.607.081.838
4	02	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	564	OB		3.492.285.473	16.991.252.791	564	17.585.946.638
4	02	01	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			2.000.000	3	2.000.000
4	02	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			11.567.600	14	11.567.600
4	02	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan		22.506.250	7.567.600	1	7.567.600
4	02	01	01	2.03		Administrasi Umum	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		4.520.308.500	6.863.989.995	100	3.008.368.057
							Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
4	02	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	13.400	Surat		230.215.000	116.863.850	14.740	116.863.850
4	02	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		339.716.475	339.716.475	12	339.716.475
4	02	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB		15.600.000	15.600.000	0	15.600.000
4	02	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	33	unit		124.100.000	118.600.000	33	118.600.000
4	02	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	456	OB		588.768.000	607.320.000	456	607.320.000
4	02	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB		109.414.650	109.414.650	0	109.414.650
4	02	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan		unit/ paket					
4	02	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan		Jenis			76.299.300	0	76.299.300
4	02	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		Jenis			39.169.350	0	39.169.350
4	02	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	5	jenis		12.078.350	10.435.700	5	10.435.700
4	02	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		unit					

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
4	02	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	jenis		16.109.500	13.109.500	0	13.109.500
4	02	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	jenis		270.900.000	270.900.000	0	270.900.000
4	02	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	jenis		25.489.500	39.997.920	0	39.997.920
4	02	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	jenis		115.500.000	94.468.500	0	94.468.500
4	02	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	56	OK	396.508.000	277.555.600	56	283.106.712
						Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	42	OK		10.450.000	10.450.000	42	10.450.000
4	02	01	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan	unit					
4	02	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	2	unit				
4	02	01	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan	5	jenis	441.936.170	74.500.000	6	95.139.000
4	02	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	10	unit		24.686.650	11	104.618.800
4	02	01	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan	4	jenis	172.355.350	86.000.000	5	94.600.000
4	02	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	10	jenis	526.417.005	104.363.000	11	104.618.800
4	02	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan	unit					
4	02	01	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	unit		49.999.500	49.999.500		49.999.500
4	02	01	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	unit		36.000.000			
4	02	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	jenis		100.001.000			
4	02	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	3	unit	111.000.000	125.700.000	3	122.100.000
4	02	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	11	unit	150.000.000	151.500.000	11	151.500.000
4	02	01	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	15	unit/set		9.150.000	15	9.150.000
4	02	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	250	unit/set	50.000.000	20.000.000		50.000.000
4	02	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	unit/set		50.000.000	48.190.000		48.190.000
4	02	01	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	79	unit/set				
4	02	01	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang direhab	unit		375.760.000			
4	02	01	01	2.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang direhab	unit					
4	02	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	1	unit	171.990.000	4.000.000.000		
4	02	01	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat	unit					
4	02	01	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat	1	unit	30.000.000	30.000.000	1	33.000.000
4	02	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%	366.240.000	7.500.000	100	80.750.000
4	02	01	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	1	unit		7.500.000		
4	02	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	stell/ pasang				85	42.500.000
4	02	01	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	stell/ pasang					
4	02	01	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan	stell/ pasang					
4	02	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	stell/ pasang				85	38.250.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
4	02	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang					
4	02	01	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan		orang					
4	02	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis		orang		366.240.000			
4	02	01	02			PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Cakupan penyelenggaraan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	100	%		1.017.000.000	1.081.000.000		1.099.025.000
4	02	01	02	2.01		<i>Layanan Administrasi DPRD</i>					<i>1.017.000.000</i>	<i>725.000.000</i>		<i>743.025.000</i>
4	02	01	02	2.01	01	Penyelenggaraan Administrasi, Ketatausahaan Dan Kepegawaian DPRD	Dokumen Penyelenggaraan Administrasi, Ketatausahaan Dan Kepegawaian DPRD		dokumen					
4	02	01	02	2.01	02	Fasilitasi Rapat DPRD	Jumlah rapat Paripurna DPRD yang difasilitasi	33	kali		93.000.000	77.000.000	35	95.025.000
4	02	01	02	2.01	03	Penyediaan Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Fraksi DPRD yang difasilitasi	10	Fraksi			84.000.000	10	84.000.000
4	02	01	02	2.01	04	Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Jumlah bulan/kali pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD	36	bulan		924.000.000	564.000.000	36	564.000.000
4	02	01	02	2.01	05	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD	Jumlah sarana dan prasarana Kantor DPRD yang diadakan dan dipelihara		unit/paket					
4	02	01	02	2.01	06	Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Dokumen Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		dokumen					
4	02	01	02	2.02		<i>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i>					-	<i>356.000.000</i>		<i>356.000.000</i>
4	02	01	02	2.02	01	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Dokumen Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD		dokumen					
4	02	01	02	2.02	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	214	stell/ pasang			303.500.000	214	303.500.000
4	02	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan Medical Check Up	35	orang			52.500.000	35	52.500.000
4	02	01	03			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase penyelesaian penyusunan PERDA sesuai Prolegda	100,00	%		12.644.014.000	10.660.452.100		11.208.809.700
4	02	01	03	2.01		<i>Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</i>					<i>3.472.239.000</i>	<i>2.873.679.400</i>		<i>3.422.037.000</i>
4	02	01	03	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen program legislasi daerah yang disusun dan dibahas	1	dokumen			97.641.000	1	97.641.000
4	02	01	03	2.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah rancangan Perda yang dibahas	8	Perda		3.472.239.000	2.676.038.400	9	3.224.396.000
4	02	01	03	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Dokumen Kajian Perundang-Undangan		dokumen					
4	02	01	03	2.01	04	Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik yang disusun	4	naskah			100.000.000	4	100.000.000
4	02	01	03	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Dokumen Tata Tertib DPRD		dokumen					
4	02	01	03	2.02		<i>Pembahasan Kebijakan Anggaran</i>					-	<i>700.672.500</i>		<i>700.672.500</i>
4	02	01	03	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah rapat dalam rangka pembahasan KUA dan PPAS	2	kali			142.816.500	2	142.816.500
4	02	01	03	2.02	02	Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	Jumlah rapat dalam rangka pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	2	kali			142.816.500	2	142.816.500
4	02	01	03	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah rapat dalam rangka Pembahasan APBD	2	kali			146.816.500	2	146.816.500
4	02	01	03	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah rapat dalam rangka Pembahasan APBD Perubahan	2	kali			146.816.500	2	146.816.500
4	02	01	03	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah rapat dalam rangka Pembahasan Laporan Semester		kali					
4	02	01	03	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah rapat dalam rangka Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	kali			121.406.500	1	121.406.500
4	02	01	03	2.03		<i>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>					-	<i>12.000.000</i>		<i>12.000.000</i>

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
4	02	01	03	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah rapat dalam rangka Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum		kali					
4	02	01	03	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah rapat dalam rangka Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		kali					
4	02	01	03	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rapat dalam rangka Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		kali					
4	02	01	03	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah rapat dalam rangka Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		kali					
4	02	01	03	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah rapat dalam rangka Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		kali					
4	02	01	03	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah rapat dalam rangka Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan		kali					
4	02	01	03	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah rapat dalam rangka Pengawasan Penggunaan Anggaran	2	kali			12.000.000	2	12.000.000
4	02	01	03	2.04		<i>Peningkatan Kapasitas DPRD</i>					2.382.916.000	1.801.400.000		1.801.400.000
4	02	01	03	2.04	01	Orientasi DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti orientasi		OK					
4	02	01	03	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah anggota DPRD/kali mengikuti bimbingan teknis	180	OK		1.908.426.000	1.385.688.000	210	1.385.688.000
4	02	01	03	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah kegiatan Dewan yang dipublikasikan dan didokumentasikan		kegiatan		84.330.000	84.330.000		84.330.000
4	02	01	03	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah pakar dan tim ahli yang disediakan		orang			34.600.000		34.600.000
4	02	01	03	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah orang/bulan penyediaan tenaga ahli fraksi	120	OB		221.800.000	187.200.000		187.200.000
4	02	01	03	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah pertemuan dengan masyarakat	4	kali		118.360.000	105.582.000	5	105.582.000
4	02	01	03	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah rapat dalam rangka Penyusunan Program Kerja DPRD		kali		50.000.000	4.000.000		4.000.000
4	02	01	03	2.05		<i>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i>					2.315.365.000	1.143.282.200		1.143.282.200
4	02	01	03	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah anggota DPRD/kali pelaksanaan kunjungan kerja	30	OK		176.260.000	125.773.000	33	125.773.000
4	02	01	03	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	1	dokumen		710.580.000	9.453.200	1	9.453.200
4	02	01	03	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah anggota DPRD/kali pelaksanaan Reses	90	OK		1.428.525.000	1.008.056.000	90	1.008.056.000
4	02	01	03	2.06		<i>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</i>					-	-		-
4	02	01	03	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Dokumen Kode Etik DPRD yang disusun		dokumen					
4	02	01	03	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah pertemuan dalam rangka Pengawasan Kode Etik DPRD		kali					
4	02	01	03	2.07		<i>Pembahasan Kerja Sama Daerah</i>					-	-		-
4	02	01	03	2.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah yang dilakukan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan		kerjasama daerah					
4	02	01	03	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Bahan Komunikasi dan Publikasi yang disusun		dokumen					
4	02	01	03	2.08		<i>Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD</i>					4.473.494.000	4.129.418.000		4.129.418.000
4	02	01	03	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah anggota DPRD/kali pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	660	OK		4.473.494.000	3.605.051.000	750	3.605.051.000
4	02	01	03	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	Dokumen Laporan Kinerja Pimpinan DPRD yang disusun		dokumen					
4	02	01	03	2.08	03	Pelaksanaan Undangan DPRD	Jumlah Undangan DPRD yang dilaksanakan	3	kali			524.367.000		524.367.000
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	01					PERENCANAAN								

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
5	01	01			Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah					6.805.626.728	6.954.861.845		6.739.410.421
5	01	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		5.603.205.978	5.202.296.265	100	5.322.649.051
5	01	01	01	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		-	47.000.000	100	47.000.000
5	01	01	01	2.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		5.000.000	2	5.000.000
5	01	01	01	2.01	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website		10.000.000		10.000.000
5	01	01	01	2.01	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		10.000.000	4	10.000.000
5	01	01	01	2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)		20.000.000	6	20.000.000
5	01	01	01	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		2.000.000	1	2.000.000
5	01	01	01	2.02	Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		3.119.010.460	3.165.551.185	100	3.275.668.356
5	01	01	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	420	OB		3.096.504.210	3.146.204.885	420	3.256.322.056
5	01	01	01	2.02	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			3.900.200	3	3.900.200
5	01	01	01	2.02	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			8.860.150	14	8.860.150
5	01	01	01	2.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan		22.506.250	6.585.950	1	6.585.950
5	01	01	01	2.03	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100,00	%		2.454.195.518	1.946.315.080	100	1.918.360.695
						Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
5	01	01	01	2.03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	300	Surat		19.474.901	17.061.000	300	17.061.000
5	01	01	01	2.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		298.795.332	243.822.000	12	243.822.000
5	01	01	01	2.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB					
5	01	01	01	2.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	28	unit		39.750.000	39.750.000	28	39.750.000
5	01	01	01	2.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	360	OB		261.552.000	223.692.515	360	223.692.515
5	01	01	01	2.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB		34.052.215	36.271.000	0	36.271.000
5	01	01	01	2.03	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan	10	unit/ paket		34.000.000	34.000.000	10	34.000.000
5	01	01	01	2.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	25	Jenis		29.548.100	46.166.420	25	46.166.420
5	01	01	01	2.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	Jenis		32.006.500	14.590.000	2	14.590.000
5	01	01	01	2.03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	jenis	lampu pijar, stop kontak, kabel, kabel gulung	24.999.920	31.931.400	4	31.931.400
5	01	01	01	2.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	9	unit		209.090.000	49.000.000	1	12.000.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
													Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)		(6)		(8)			(9)	(10)	(11)
							Tolok Ukur							
							Target							
							(7)							
5	01	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan		jenis					
5	01	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	3	jenis	koran, majalah, tabloid	250.000.000	246.000.000	3	246.000.000
5	01	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	7	jenis	Gula, kopi, teh, susu, air mineral, minuman kemasan, kue kering	37.966.800	34.470.000	7	34.470.000
5	01	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3	jenis	Makan minum tamu, rapat, dan kegiatan Sekretariat	97.020.000	82.280.000	3	82.280.000
5	01	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	90	OK		646.115.350	452.280.745	90	461.326.360
							Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	100	OK		19.824.400	25.000.000	100	25.000.000
5	01	01	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit					
5	01	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit					
5	01	01	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
5	01	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	10	unit			40.000.000	10	40.000.000
5	01	01	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
5	01	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		jenis					
5	01	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan		unit					
5	01	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	2	jenis		50.000.000	35.000.000	2	35.000.000
5	01	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit					
5	01	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	28	unit		140.000.000	140.000.000	28	140.000.000
5	01	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set		30.000.000	40.000.000	0	40.000.000
5	01	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set			15.000.000	0	15.000.000
5	01	01	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
5	01	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit		200.000.000	100.000.000		100.000.000
5	01	01	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
5	01	01	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
5	01	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		30.000.000	43.430.000	100	81.620.000
5	01	01	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
5	01	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		stell/ pasang					
5	01	01	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
5	01	01	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
5	01	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		stell/ pasang				68	38.190.000
5	01	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang					
5	01	01	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	79	orang			13.430.000	79	13.430.000
5	01	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	3	orang		30.000.000	30.000.000	3	30.000.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
5	01	01	02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Data dan informasi pencapaian sasaran RPJMD	4	dokumen		715.475.250	809.086.320		809.086.320
						Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD	100	%					
						Cakupan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100	%					
5	01	01	02	2.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan penyelenggaraan koordinasi perencanaan pembangunan daerah	100	%		547.875.250	580.836.170		580.836.170
5	01	01	02	2.01	01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	3	dokumen		236.420.450	300.604.260	2	300.604.260
5	01	01	02	2.01	02 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tingkat Kecamatan	Jumlah kecamatan yang melaksanakan musrenbang kabupaten di kecamatan	22	kecamatan			16.559.560	22	16.559.560
5	01	01	02	2.01	03 Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten	Jumlah Musrenbang Kabupaten yang dilaksanakan	1	kali		70.854.800	29.977.000	1	29.977.000
5	01	01	02	2.01	04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan	1	kali		30.000.000	27.841.350	1	27.841.350
5	01	01	02	2.01	05 Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan nasional, provinsi, dan kabupaten yang diintegrasikan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	62	dokumen	RPJMN, RKP, RPJMD Provinsi, RPJPD, RPJMD, RKPD serta Renstra, Renja-PD Kab. Luwu	100.000.000	94.086.000	62	94.086.000
5	1	01	02	2.01	06 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah	Rumusan permasalahan pembangunan daerah yang dimuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	2	rumusan			3.000.000	2	3.000.000
5	01	01	02	2.01	07 Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah platform sistem informasi perencanaan yang dikelola dengan baik dan tepat waktu	2	platform		75.000.000	99.628.000	2	99.628.000
5	01	01	02	2.01	08 Pengamanan Data Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah data base platform sistem informasi perencanaan yang difasilitasi dalam pengamanan data dan informasi	2	platform		35.600.000	6.100.000	2	6.100.000
5	01	01	02	2.01	09 Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Rumusan target pembangunan daerah untuk tahun rencana	1	rumusan			3.040.000	1	3.040.000
5	01	01	02	2.02	Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	Cakupan penyelenggaraan koordinasi pendanaan pembangunan daerah				-	140.379.150		140.379.150
5	01	01	02	2.02	01 Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah	Rumusan pagu indikatif pembangunan daerah untuk tahun rencana	1	rumusan			7.200.000	1	7.200.000
5	01	01	02	2.02	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah	Rekomendasi kebijakan penganggaran daerah	1	rekomendasi			58.204.000	1	58.204.000
5	01	01	02	2.02	03 Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang dilakukan analisa dan penokajian	5	dokumen			74.975.150	5	74.975.150
5	01	01	02	2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah					167.600.000	87.871.000		87.871.000
5	01	01	02	2.03	01 Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang dimonitoring	35	dokumen		80.000.000	-	35	-
5	01	01	02	2.03	02 Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM	Dokumen Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM	1	dokumen		45.600.000	5.359.400	1	5.359.400
5	01	01	02	2.03	03 Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	4	dokumen	Hasil evaluasi RKPD setiap triwulan	22.000.000	66.386.600	4	66.386.600
5	01	01	02	2.03	04 Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah	Dokumen capaian pembangunan daerah	1	dokumen	Capaian RPJMD	20.000.000	16.125.000	1	16.125.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
5	01	01	03		PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Rata-rata Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	%		286.945.500	473.902.060		276.808.000
5	01	01	03	2.01	<i>Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan</i>					161.945.500	151.752.260		113.768.000
5	01	01	03	2.01	01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah dibidang pemerintahan yang dikoordinasikan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	29	Perangkat Daerah	ATK, cetak penggandaan, rapat internal, jasa non PNS, PD luar daerah	161.945.500	78.718.260	29	39.382.000
5	01	01	03	2.01	02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah dibidang pemerintahan yang diasistinsi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	29	Perangkat Daerah	Verifikasi Renja dan Renstra		44.424.000	29	28.594.000
5	01	01	03	2.01	03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah dibidang pemerintahan yang dilakukan monitoring dan evaluasi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	29	Perangkat Daerah	Evaluasi Renja, PD dalam daerah		28.610.000	29	45.792.000
5	01	01	03	2.02	<i>Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia</i>					25.000.000	220.250.900		96.054.000
5	01	01	03	2.02	01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah dibidang pembangunan manusia yang dikoordinasikan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	8	Perangkat Daerah	ATK, cetak penggandaan, rapat internal, jasa non PNS, PD luar daerah	25.000.000	67.582.900	8	39.382.000
5	01	01	03	2.02	02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah dibidang pembangunan manusia yang diasistinsi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	8	Perangkat Daerah	Verifikasi Renja dan Renstra, Kabupaten Sehat		127.838.000	8	32.888.000
5	01	01	03	2.02	03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah dibidang pembangunan manusia yang dilakukan monitoring dan evaluasi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	8	Perangkat Daerah	Evaluasi Renja, PD dalam daerah		24.830.000	8	23.784.000
5	01	01	03	2.03	<i>Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat</i>					100.000.000	101.898.900		66.986.000
5	01	01	03	2.03	01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah perangkat daerah dibidang kesejahteraan masyarakat yang dikoordinasikan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	6	Perangkat Daerah	ATK, cetak penggandaan, rapat internal, jasa non PNS, PD luar daerah	100.000.000	67.504.900	6	39.382.000
5	01	01	03	2.03	02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah perangkat daerah dibidang kesejahteraan masyarakat yang diasistinsi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	6	Perangkat Daerah	Verifikasi Renja dan Renstra		9.924.000	6	5.916.000
5	01	01	03	2.03	03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah perangkat daerah dibidang kesejahteraan masyarakat yang dilakukan monitoring dan evaluasi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	6	Perangkat Daerah	Evaluasi Renja, PD dalam daerah		24.470.000	6	21.688.000
5	01	01	04		PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Rata-rata Capaian Kinerja Program Pembangunan Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	100	%		-	194.591.000		156.283.050
5	01	01	04	2.01	<i>Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian</i>				Dinas Perdagangan, Bapenda, BPKD, PTSP	-	80.031.250		78.283.050

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
5	01	01	04	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah dibidang perekonomian yang dikoordinasikan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4	Perangkat Daerah	ATK, cetak penggandaan, rapat internal, jasa non PNS, PD luar daerah		64.543.050	4	64.543.050
5	01	01	04	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah dibidang perekonomian yang diasistansi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4	Perangkat Daerah	Verifikasi Renja dan Renstra		5.010.000	4	3.944.000
5	01	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah dibidang perekonomian yang dilakukan monitoring dan evaluasi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4	Perangkat Daerah	Evaluasi Renja, PD dalam daerah		10.478.200	4	9.796.000
5	01	01	04	2.02		<i>Fasilitasi dan Move Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif</i>				<i>Dinas Koperasi UKM, Dinas Pariwisata</i>	-	51.264.500		34.500.000
5	01	01	04	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah perangkat daerah dibidang ekonomi kreatif yang dikoordinasikan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2	Perangkat Daerah	ATK, cetak penggandaan, rapat internal, PD luar daerah		39.001.100	2	22.732.000
5	01	01	04	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah perangkat daerah dibidang ekonomi kreatif yang diasistansi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2	Perangkat Daerah	Verifikasi Renja dan Renstra		2.510.000	2	1.972.000
5	01	01	04	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah perangkat daerah dibidang ekonomi kreatif yang dilakukan monitoring dan evaluasi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2	Perangkat Daerah	Evaluasi Renja, PD dalam daerah		9.753.400	2	9.796.000
5	01	01	04	2.03		<i>Fasilitasi dan Move Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam</i>				<i>Dinas Pertanian, Dinas Perikanan</i>	-	63.295.250		43.500.000
5	01	01	04	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah perangkat daerah dibidang sumber daya alam yang dikoordinasikan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2	Perangkat Daerah	ATK, cetak penggandaan, rapat internal, jasa non PNS, PD luar daerah		51.831.850	2	31.732.000
5	01	01	04	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah perangkat daerah dibidang sumber daya alam yang diasistansi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2	Perangkat Daerah	Verifikasi Renja dan Renstra		2.710.000	2	1.972.000
5	01	01	04	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah perangkat daerah dibidang sumber daya alam yang dilakukan monitoring dan evaluasi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2	Perangkat Daerah	Evaluasi Renja, PD dalam daerah		8.753.400	2	9.796.000
5	01	01	05			PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Rata-rata Capaian Kinerja Program Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	%		200.000.000	274.986.200		174.584.000
5	01	01	05	2.01		<i>Fasilitasi dan Move Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup</i>				<i>Dinas LH, Dinas PUPR</i>	50.000.000	85.737.800		93.500.000
5	01	01	05	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Jumlah perangkat daerah dibidang sumber daya air dan lingkungan hidup yang dikoordinasikan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2	Perangkat Daerah	ATK, cetak penggandaan, rapat internal, jasa non PNS, PD luar daerah	50.000.000	69.620.050	2	31.732.000
5	01	01	05	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Jumlah perangkat daerah dibidang sumber daya air dan lingkungan hidup yang diasistansi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2	Perangkat Daerah	Verifikasi Renja dan Renstra, PAMSIMAS		5.010.000	2	51.972.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
5	01	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Jumlah perangkat daerah dibidang sumber daya air dan lingkungan hidup yang dilakukan monitoring dan evaluasi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2	Perangkat Daerah	Evaluasi Renja, PD dalam daerah		11.107.750	2	9.796.000
5	01	01	05	2.02		Fasilitasi dan Move Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan				Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	150.000.000	107.877.350		43.500.000
5	01	01	05	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Jumlah perangkat daerah dibidang kebinamargaan dan perhubungan yang dikoordinasikan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2	Perangkat Daerah	ATK, cetak penggandaan, rapat internal, jasa non PNS, PD luar daerah	150.000.000	94.569.600	2	31.732.000
5	01	01	05	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Jumlah perangkat daerah dibidang kebinamargaan dan perhubungan yang diasistansi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2	Perangkat Daerah	Verifikasi Renja dan Renstra		5.010.000	2	1.972.000
5	01	01	05	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Jumlah perangkat daerah dibidang kebinamargaan dan perhubungan yang dilakukan monitoring dan evaluasi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2	Perangkat Daerah	Evaluasi Renja, PD dalam daerah		8.297.750	2	9.796.000
5	01	01	05	2.03		Fasilitasi dan Move Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan				Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Pertanahan	-	81.371.050		37.584.000
5	01	01	05	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah dibidang Keciaptakarya dan Kewilayahan yang dikoordinasikan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3	Perangkat Daerah			15.528.950	3	22.732.000
5	01	01	05	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah dibidang Keciaptakarya dan Kewilayahan yang diasistansi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3	Perangkat Daerah			4.410.000	3	2.958.000
5	01	01	05	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciaptakarya dan Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah dibidang Keciaptakarya dan Kewilayahan yang dilakukan monitoring dan evaluasi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3	Perangkat Daerah			61.432.100	3	11.894.000
5	02					KEUANGAN								
5	02	01				Badan Pengelolaan Keuangan Daerah					41.046.318.378	40.843.001.869		41.400.984.702
5	02	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		11.770.979.050	29.011.873.917	100	29.412.193.033
5	02	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		41.236.200	108.366.700	100	108.366.700
5	02	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	3	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		15.381.100	3	15.381.100
5	02	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan	11	Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website	41.236.200	31.877.000	11	31.877.000
5	02	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		9.567.000	4	9.567.000
5	02	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	7	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)		46.954.900	7	46.954.900

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
5	02	01	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		4.586.700	1	4.586.700
5	02	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		9.413.789.355	5.158.298.486	100	5.338.348.933
5	02	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	624	OB		9.391.283.105	5.144.298.486	624	5.324.348.933
5	02	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		dokumen					
5	02	01	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Bahan pelaksanaan verifikasi yang disiapkan	1.500	dokumen			2.000.000	1.500	2.000.000
5	02	01	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Dokumen pelaporan akuntansi dan keuangan yang disusun		dokumen					
5	02	01	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			2.000.000	3	2.000.000
5	02	01	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD yang disusun		laporan					
5	02	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	1	laporan			5.000.000	1	5.000.000
5	02	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun dan dilaporkan		dokumen					
5	02	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan		22.506.250	5.000.000	1	5.000.000
5	02	01	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		2.059.767.895	23.555.208.731	100	23.507.607.800
							Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
5	02	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	1.250	Surat		32.391.500	32.391.500	1.250	32.391.500
5	02	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jenis jasanya yang disediakan	3	jenis		157.119.500	204.490.000	3	204.490.000
5	02	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB					
5	02	01	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah PNS yang disediakan jasa pemeliharaan kesehatan		orang			21.558.321.761	0	21.558.321.761
5	02	01	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang disediakan jasa jaminan		unit/ paket					
5	02	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	25	unit		51.200.000	51.200.000	25	54.000.000
5	02	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	268	OB		754.586.000	754.586.000	268	754.586.000
5	02	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB		4.999.550	6.050.000	0	54.000.000
5	02	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan	25	unit		14.967.800	15.000.000	25	15.000.000
5	02	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	35	Jenis		20.499.400	20.499.400	35	20.499.400
5	02	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	6	Jenis		19.999.800	19.999.800	6	19.999.800
5	02	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	20	Jenis		4.993.025	5.000.000	20	5.000.000
5	02	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	39	unit		145.900.000	150.000.000	39	150.000.000
5	02	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan		jenis					
5	02	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	37	jenis		49.740.000	60.500.000	37	60.500.000
5	02	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	15	jenis		26.782.800	26.782.800	15	26.782.800

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
5	02	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3	jenis		36.702.000	36.702.000	3	36.702.000
5	02	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	66	OK		474.933.500	332.453.450	66	339.102.519
							Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	145	OK		20.021.000	36.300.000	145	36.300.000
5	02	01	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit					
5	02	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	3	unit			75.000.000	2	50.000.000
5	02	01	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
5	02	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	30	unit					
5	02	01	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
5	02	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		jenis					
5	02	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan		unit					
5	02	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	1	jenis		175.000.000	50.000.000	1	20.000.000
5	02	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit					
5	02	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	23	unit		69.932.020	69.932.020	25	69.932.020
5	02	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
5	02	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
5	02	01	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
5	02	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit					
5	02	01	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi dedang/berat		unit					
5	02	01	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat	1	unit			50.000.000		
5	02	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		256.185.600	190.000.000	100	457.869.600
5	02	01	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
5	02	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		stell/ pasang		71.280.000		108	71.280.000
5	02	01	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
5	02	01	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
5	02	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	108	stell/ pasang				110	60.069.600
5	02	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2	orang		69.905.900	70.000.000		70.000.000
5	02	01	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan		orang					
5	02	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	20	orang		114.999.700	120.000.000	28	256.520.000
5	02	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan dan kebutuhan	100,00	%		28.700.903.154	10.699.335.528		10.918.592.771
							Persentase Penerbitan SP2D yang Tepat Waktu	95,00	%					
							Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	98,00	%					

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
5	02	01	02	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					668.281.200	841.907.030		869.314.693
5	02	01	02	2.01	01 Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen PPAS APBD yang disusun	2	Dokumen		22.577.850	22.577.850	2	26.950.000
5	02	01	02	2.01	02 Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen PPAS Perubahan (PPAS P) yang disusun	2	Dokumen		22.578.050	22.578.050	2	22.578.050
5	02	01	02	2.01	03 Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	Jumlah RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD yang disusun dan direviu	57	RKA			22.578.050	57	22.578.050
5	02	01	02	2.01	04 Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD	Jumlah DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD yang disusun dan direviu	57	DPA			22.578.050	57	22.578.050
5	02	01	02	2.01	05 Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah Perda dan Perbup APBD yang disusun	2	Peraturan		243.466.550	253.466.550	2	255.630.000
5	02	01	02	2.01	06 Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda dan Perbup Perubahan APBD yang disusun	2	Peraturan		249.458.050	259.458.050	2	274.670.000
5	02	01	02	2.01	07 Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah peraturan yang disusun	1	Peraturan		83.440.500	80.000.000	1	82.400.000
5	2	01	02	2.01	08 Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran	Jumlah regulasi yang disusun	51	Dokumen		46.760.200	108.670.430	51	111.930.543
5	2	01	02	2.01	09 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah PD yang melakukan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	14	PD			20.000.000	14	20.000.000
5	02	01	02	2.01	10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah PD yang melakukan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	57	PD			30.000.000	57	30.000.000
5	2	01	02	2.01	11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Laporan pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		laporan					
5	02	01	02	2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					917.975.750	519.597.270		772.288.000
5	2	01	02	2.02	01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Arus Kas	12	Dokumen		81.998.700	81.998.700	12	176.500.000
5	2	01	02	2.02	02 Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen Penatausahaan Pembiayaan Daerah		Dokumen					
5	02	01	02	2.02	03 Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Bidang yang melaksanakan koordinasi dan pelaporan anggaran transfer daerah	15	bidang		90.374.600	100.374.600	15	149.314.000
5	02	01	02	2.02	04 Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	Jumlah SP2D yang diterbitkan	8.000	SP2D		22.952.050	23.952.050	8.000	25.000.000
5	02	01	02	2.02	05 Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	Jumlah Dokumen SPP, SPM, Pengesahan Gaji dan Non Gaji SKPP	80.100	Dokumen		625.397.000	100.000.000	10.800	100.000.000
5	02	01	02	2.02	06 Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Arus Kas dan pemotongan, penyetoran PFK	12	laporan		28.026.300	28.026.300	12	30.000.000
5	02	01	02	2.02	07 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	Laporan pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas		laporan					
5	02	01	02	2.02	08 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Jumlah PD yang melaksanakan rekonsiliasi	57	PD		69.227.100	69.227.100	57	77.474.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
5	02	01	02	2.02	09	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	Jumlah Petunjuk Teknis yang disusun		Dokumen					
5	02	01	02	2.02	10	Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah SPD yang diterbitkan	1.100	SPD			116.018.520	1.150	214.000.000
5	02	01	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					1.172.025.954	1.262.025.954		1.201.184.804
5	02	01	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah PD yang melaksanakan koordinasi penerimaan dan pengeluaran kas	57	PD		250.877.900	250.877.900	57	293.500.000
5	02	01	02	2.03	02	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	1	Perbup		42.325.700	42.325.700	1	66.429.000
5	02	01	02	2.03	04	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten	Jumlah Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	1	Perda		78.269.000	78.269.000	1	88.945.000
5	02	01	02	2.03	05	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah Laporan Keuangan Pemda yang disusun	5	Laporan		163.085.200	163.085.200	5	179.615.800
5	02	01	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah LHP BPK yang ditindaklanjuti	5	LHP		172.273.154	172.273.154	5	172.273.154
5	02	01	02	2.03	07	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan	Jumlah PD yang melakukan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan	57	PD		19.998.700	19.998.700	57	19.998.700
5	02	01	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah laporan analisis yang disusun	1	laporan		62.991.800	62.991.800	1	62.991.800
5	02	01	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah kebijakan dan panduan yang disusun	1	Kebijakan dan Panduan Teknis			70.000.000	1	22.000.000
5	02	01	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen sistem dan prosedur yang disusun	1	Dokumen			20.000.000	1	20.600.000
5	2	01	02	2.03	11	Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial	Jumlah PD yang diverifikasi dan diuji bukti memorialnya	57	PD		26.990.000	26.990.000	57	41.750.000
5	02	01	02	2.03	12	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Peserta Bimbingan Teknik Penyusunan RKA/Sosialisasi pengelolaan keuangan daerah	171	peserta		355.214.500	355.214.500	171	233.081.350
5	2	01	02	2.04		Kegiatan Penunjang Urusan					25.942.620.250	8.075.805.274		8.075.805.274
5	2	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Pinjaman Pada Pemerintah Daerah	Laporan pelaksanaan Pinjaman Pemerintah Daerah		laporan					
5	02	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan, Alokasi dan Pemberian Subsidi	Dokumen Kebijakan, Alokasi dan Pemberian Subsidi yang disusun	2	dokumen		171.650.250	171.650.250	2	171.650.250
5	02	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	Jumlah alokasi dan penyaluran keuangan yang dilaksanakan	4	alokasi	belanja tidak terduga, jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan kesehatan PNS	25.770.970.000	7.904.155.024	4	7.904.155.024
5	02	01	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase SKPD dalam penatausahaan BMD secara akurat	98,00	%		574.436.174	1.131.792.424		1.070.198.898
5	02	01	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah					574.436.174	1.131.792.424		1.070.198.898
5	02	01	03	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang	Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga yang disusun	2	Dokumen		96.772.500	96.772.500	2	104.600.000
5	02	01	03	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Standar Kebutuhan BMD yang disusun	1	Dokumen		23.959.200	23.959.200	1	23.959.200
5	02	01	03	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen RKBMD Pengadaan yang disusun	1	Dokumen		25.712.000	13.000.000	1	13.000.000
5	02	01	03	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen RKBMD Pemeliharaan yang disusun	1	Dokumen			13.000.000	1	13.000.000
5	02	01	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang/aset yang disusun	1	laporan			160.213.400	2	165.019.802

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
5	02	01	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah yang disusun	2	laporan			232.354.850	2	239.325.496
5	02	01	03	2.01	07	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang diamankan dan ditertibkan	60	unit		77.987.800	77.987.800	60	85.650.000
5	02	01	03	2.01	08	Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dinilai	60	unit		84.915.400	84.915.400	60	100.600.000
5	02	01	03	2.01	09	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dimanfaatkan, dimusnahkan, dan dihapus	360	unit		57.544.400	57.544.400	350	57.544.400
5	02	01	03	2.01	10	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dipindahtanggankan	60	unit			25.000.000	60	25.000.000
5	02	01	03	2.01	11	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah PD yang melaksanakan Rekonsiliasi BMD dan Update SIMDA Barang	57	PD		139.085.750	139.085.750	57	146.200.000
5	02	01	03	2.01	12	Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD	Jumlah Laporan konsolidasi yang disusun	1	laporan		68.459.124	68.459.124	1	76.300.000
5	02	01	03	2.01	13	Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis yang dibina	114	Peserta			139.500.000	114	20.000.000
5	02	02				Badan Pendapatan Daerah					13.908.446.618	13.372.395.218		13.385.075.687
5	02	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		12.091.972.018	11.772.326.518	100	11.903.177.987
5	02	02	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		10.649.000	56.511.400	100	56.511.400
5	02	02	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		6.454.000	2	6.454.000
5	02	02	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website	8.852.000	25.375.600	0	25.375.600
5	02	02	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		6.737.600	4	6.737.600
5	02	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)		13.933.000	6	13.933.000
5	02	02	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya	1.797.000	4.011.200	1	4.011.200
5	02	02	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		6.512.952.868	7.555.768.218	100	7.819.597.561
5	02	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	852	OB		6.490.446.618	7.537.981.218	852	7.801.810.561
5	02	02	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	1	berkas			3.925.000	1	3.925.000
5	02	02	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			7.421.400	14	7.421.400
5	02	02	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan		22.506.250	6.440.600	1	6.440.600
5	02	02	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		5.340.438.150	3.885.054.800	100	3.889.137.026
							Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
5	02	02	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi		Surat		33.541.500	17.061.000	0	17.061.000
5	02	02	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang disediakan biaya tagihan telepon, air dan listrik kantor	12	bulan		2.916.625.000	2.653.991.234	12	2.653.991.234

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
5	02	02	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB					
5	02	02	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	59	unit		51.000.000	51.000.000	59	51.000.000
5	02	02	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	564	OB		809.896.000	403.466.000	564	403.466.000
5	02	02	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB		3.167.580	8.697.000		8.697.000
5	02	02	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan	122	unit/ paket		15.000.000	15.000.000	122	15.000.000
5	02	02	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	32	Jenis		101.471.600	24.384.900	32	24.384.900
5	02	02	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	13	Jenis	cetak karcis, penggandaan kebutuhan kantor, dll, termasuk Pengelolaan dan Pemungutan PBB-P2	396.923.720	220.940.000	13	220.940.000
5	02	02	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan		jenis		10.000.000	7.450.750	0	7.450.750
5	02	02	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		unit		272.843.750	101.693.989	0	101.693.989
5	02	02	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan		jenis			-	0	-
5	02	02	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	3	jenis		60.000.000	40.000.000	3	40.000.000
5	02	02	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	15	jenis		30.000.000	24.058.000	15	24.058.000
5	02	02	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu kantor yang disediakan	550	OK		70.224.000	8.200.627	550	8.200.627
5	02	02	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	41	OK	termasuk untuk Pemungutan PBB-P2	356.195.000	204.111.300	41	208.193.526
							Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	140	OK	termasuk untuk Pemungutan PBB-P2	92.600.000	35.000.000	140	35.000.000
5	02	02	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit					
5	02	02	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit					
5	02	02	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
5	02	02	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		unit		6.000.000		0	-
5	02	02	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
5	02	02	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		jenis					
5	02	02	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan		unit		10.000.000			
5	02	02	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Luas bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	71,77	m2		25.000.000	15.000.000	72	15.000.000
5	02	02	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit					
5	02	02	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	51	unit		74.950.000	55.000.000	51	55.000.000
5	02	02	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
5	02	02	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set		5.000.000		0	-
5	02	02	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
5	02	02	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit					
5	02	02	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
5	02	02	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit			-		
5	02	02	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dilingkungan perangkat daerah dengan predikat kinerja baik	100,00	%		227.932.000	274.992.100	100	137.932.000
5	02	02	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
5	02	02	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		stell/ pasang		90.000.000	-		
5	02	02	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan		stell/ pasang					
5	02	02	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
5	02	02	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		stell/ pasang		45.000.000	58.320.000		45.000.000
5	02	02	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2	orang			85.339.600		
5	02	02	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan		orang					
5	02	02	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis		orang		92.932.000	131.332.500		92.932.000
5	02	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan	98,99	%		1.816.474.600	1.600.068.700		1.481.897.700
							Persentase ketercapaian target penerimaan retribusi daerah	98,99	%					
							Persentase Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan terhadap Target yang ditetapkan	90,00	%					
							Persentase realisasi penerimaan PBB dan BPHTB	80,00	%					
5	02	02	04	2.02		Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Cakupan penyelenggaraan perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah	100	%		1.816.474.600	1.600.068.700		1.481.897.700
5	02	02	04	2.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Jumlah kebijakan teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah yang disusun	1	dokumen		300.311.500	-		
5	02	02	04	2.02	02	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disusun		peraturan		269.374.000	-		
5	02	02	04	2.02	03	Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dokumen Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dirumuskan		dokumen			-		
5	02	02	04	2.02	04	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dokumen Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disusun dan dievaluasi		dokumen			-		
5	02	02	04	2.02	05	Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	Dokumen Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat yang dirumuskan		dokumen			-		
5	02	02	04	2.02	06	Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi	Dokumen Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi yang dirumuskan		kali					
5	02	02	04	2.02	07	Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	Jumlah Wajib Pajak dan Retribusi yang dilayani		orang		552.507.950	421.410.150	0	421.410.150
5	02	02	04	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah yang diselenggarakan	2	sistem informasi		147.492.050	589.220.900	2	589.220.900
5	02	02	04	2.02	09	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah basis data pajak daerah dan retribusi daerah yang dipelihara dan dimutakhirkan		basis data		328.919.100	309.118.400	0	309.118.400
5	02	02	04	2.02	10	Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah wajib Pajak yang diperiksa		wajib Pajak			118.171.000		

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
5	02	02	04	2.02	11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Laporan hasil monitoring dan evaluasi	1	laporan		217.870.000	162.148.250	1	162.148.250
5	03					KEPEGAWAIAN								
5	03	01				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					9.065.151.000	22.650.371.874		22.257.471.874
5	03	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		4.587.146.000	19.275.271.874	100	19.312.871.874
5	03	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		17.500.000	47.000.000	100	47.000.000
5	03	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		5.000.000	2	5.000.000
5	03	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website		10.000.000		10.000.000
5	03	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan	10.000.000	10.000.000	4	10.000.000
5	03	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)		20.000.000	6	20.000.000
5	03	01	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya	7.500.000	2.000.000	1	2.000.000
5	03	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		2.834.466.000	17.785.391.874	100	17.785.391.874
5	03	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	492	OB		2.811.959.750	17.773.391.874	492	17.773.391.874
5	03	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		dokumen					
5	03	01	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			2.000.000	3	2.000.000
5	03	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			5.000.000	14	5.000.000
5	03	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan		22.506.250	5.000.000	1	5.000.000
5	03	01	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		1.510.880.000	1.310.580.000	100	1.316.180.000
							Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
5	03	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi		Surat		193.780.000	193.780.000	0	193.780.000
5	03	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		30.500.000	30.500.000	12	30.500.000
5	03	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB					
5	03	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	20	unit		36.000.000	36.000.000	20	36.000.000
5	03	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	360	OB		363.640.000	363.640.000	360	363.640.000
5	03	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB		20.700.000	20.700.000	0	20.700.000
5	03	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan		unit/ paket					
5	03	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	25	Jenis		33.000.000	33.000.000	25	33.000.000
5	03	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3	Jenis		11.300.000	11.300.000	3	11.300.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
5	03	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	jenis		8.500.000	8.500.000	0	8.500.000
5	03	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	unit		83.500.000	83.500.000	0	83.500.000
5	03	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	jenis					
5	03	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	jenis		110.000.000	110.000.000	0	110.000.000
5	03	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	jenis					
5	03	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	jenis		20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
5	03	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	56	OK	400.000.000	280.000.000	56	285.600.000
5	03	01	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	38	OK	9.500.000	9.500.000	38	9.500.000
5	03	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	unit					
5	03	01	01	2.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	unit		80.000.000			
5	03	01	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan	jenis					
5	03	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	unit					
5	03	01	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan	jenis					
5	03	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	jenis					
5	03	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan	unit					
5	03	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	jenis		25.000.000	25.000.000	0	25.000.000
5	03	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	unit					
5	03	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	unit		65.160.000	65.160.000	0	65.160.000
5	03	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	unit/set		20.300.000	10.000.000	0	10.000.000
5	03	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	unit/set			10.000.000	0	10.000.000
5	03	01	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	unit/set					
5	03	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	unit					
5	03	01	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat	unit					
5	03	01	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat	unit					
5	03	01	01	2.04	01	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%	224.300.000	132.300.000	100	164.300.000
5	03	01	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	unit					
5	03	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	stell/ pasang					
5	03	01	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	stell/ pasang					
5	03	01	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan	stell/ pasang					32.000.000
5	03	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	stell/ pasang		32.000.000			
5	03	01	01	2.04	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah PNS yang pensiun yang difasilitasi pemulangannya ke tempat asal	orang					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
5	03	01	01	2.04	07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas yang difasilitasi pemulangannya		orang					
5	03	01	01	2.04	08	Pemindahan Tugas PNS	Jumlah PNS yang difasilitasi pindah tugasnya		orang					
5	03	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang		60.000.000			
5	03	01	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan		orang	termasuk aparaturnya OPD (sosialisasi kepegawaian)	67.300.000	67.300.000	0	67.300.000
5	03	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis		orang		65.000.000	65.000.000	0	65.000.000
5	03	01	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cakupan penyelenggaraan pengadaan, pemberhentian, dan informasi ASN	100	%		4.478.005.000	3.375.100.000		2.944.600.000
							Persentase penempatan SDM sesuai kompetensi		%					
5	03	01	02	2.01		<i>Pengelolaan Data dan Informasi ASN</i>					314.000.000	91.000.000		91.000.000
5	03	01	02	2.01	01	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN	Sistem informasi yang dikembangkan		sistem informasi		200.000.000			
5	03	01	02	2.01	02	Pengelolaan Data, Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional	Dokumen data, pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional	1	dokumen			10.000.000	1	10.000.000
5	03	01	02	2.01	03	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi yang dikelola	1	sistem informasi		39.000.000	39.000.000	1	39.000.000
5	03	01	02	2.01	04	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang dikelola		data pegawai		75.000.000	42.000.000	0	42.000.000
5	03	01	02	2.02		<i>Administrasi Kepegawaian</i>					3.212.405.000	2.457.500.000		2.064.500.000
5	03	01	02	2.02	01	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen analisis kebutuhan formasi dan pelaksanaan pengadaan ASN yang disusun	3	dokumen		112.500.000	112.500.000	3	112.500.000
5	03	01	02	2.02	02	Penataan dan Mutasi Jabatan	Dokumen penataan dan mutasi jabatan	1	dokumen			10.000.000	1	10.000.000
5	03	01	02	2.02	03	Penyelesaian Penempatan, Pengangkatan, Mutasi, dan Kepangkatan	Jumlah ASN yang diselesaikan penempatan, pengangkatan, mutasi dan kepegawaian		ASN		1.879.905.000	1.500.000.000	0	1.500.000.000
5	03	01	02	2.02	04	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	Jumlah ASN yang diselesaikan pemberhentian dan pensiunnya		orang		41.000.000	41.000.000	0	41.000.000
5	03	01	02	2.02	05	Pelaksanaan Proses Pemberhentian Pegawai	Dokumen pemberhentian pegawai yang diproses		dokumen			10.000.000	0	10.000.000
5	03	01	02	2.02	06	Fasilitasi Pengadaan dan Pemberhentian.	Jumlah ASN yang difasilitasi		orang		695.000.000	300.000.000	0	300.000.000
5	03	01	02	2.02	07	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah mutasi jabatan dalam satu tahun		mutasi		91.000.000	91.000.000	0	91.000.000
5	03	01	02	2.02	08	Pengelolaan Penempatan dalam Jabatan ASN	Dokumen penempatan dalam jabatan ASN		dokumen					
5	03	01	02	2.02	09	Pembuatan Daftar Penjagaan Kenaikan Pangkat	Dokumen Daftar Penjagaan Kenaikan Pangkat							
5	03	01	02	2.02	10	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Data kenaikan pangkat ASN yang dikelola		ASN		393.000.000	393.000.000		
5	03	01	02	2.03		<i>Peningkatan Kapasitas ASN</i>					834.100.000	709.100.000		709.100.000
5	03	01	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas		ASN					
5	03	01	02	2.03	02	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	Dokumen penilaian kinerja ASN		dokumen		425.000.000	200.000.000	0	200.000.000
5	03	01	02	2.03	03	Pengembangan Assessment Center	Jumlah pejabat yang mengikuti assesment		orang		288.500.000	288.500.000	0	288.500.000
5	03	01	02	2.03	04	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)	Jumlah Kelembagaan Profesi ASN yang difasilitasi	1	lembaga			100.000.000	1	100.000.000
5	03	01	02	2.03	05	Fasilitasi Profesi ASN	Jumlah ASN yang difasilitasi dalam pengembangan profesi				100.600.000	100.600.000	0	100.600.000
5	03	01	02	2.03	06	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		dokumen		20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
5	03	01	02	2.03	07	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Dokumen pengelolaan pendidikan lanjutan ASN		dokumen					
5	03	01	02	2.03	08	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Laporan hasil koordinasi dan kerjasama pelaksanaan Diklat		laporan					
5	03	01	02	2.03	09	Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional	Dokumen Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional		dokumen					

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan					Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
												Target	Pagu Indikatif
(1)	(2)					Tolok Ukur	Target	(8)			(9)	(10)	(11)
5 03 01 02 2.04	Pengembangan Karir ASN									80.000.000	80.000.000		80.000.000
5 03 01 02 2.04 01	Pengembangan Karir dan Promosi ASN					Dokumen Pengembangan Karir dan Promosi ASN		dokumen					
5 03 01 02 2.04 02	Penyusunan Pedoman Pola Pengembangan Karir					Dokumen pedoman pola pengembangan karir yang disusun	1	dokumen		80.000.000	80.000.000	1	80.000.000
5 03 01 02 2.05	Pembinaan ASN									37.500.000	37.500.000		-
5 03 01 02 2.05 01	Pembinaan Disiplin ASN					Jumlah peserta sosialisasi dalam rangka pembinaan disiplin ASN		orang					
5 03 01 02 2.05 02	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					Jumlah pelanggaran disiplin ASN yang diselesaikan		kasus					
5 03 01 02 2.05 03	Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan					Jumlah ASN yang dilakukan penegakan disiplin, diberikan penghargaan dan perlindungan		ASN		37.500.000	37.500.000		
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												
5 04 01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia									1.249.975.000	503.160.000		503.160.000
5 04 01 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai eselon		%		1.249.975.000	503.160.000		503.160.000
5 04 01 02 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis									253.160.000	253.160.000		253.160.000
5 04 01 02 2.01 01	Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					Dokumen yang disusun		dokumen					
5 04 01 02 2.01 02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					Dokumen yang disusun		dokumen					
5 04 01 02 2.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					Jumlah peserta pengembangan kompetensi	185	orang		253.160.000	253.160.000	185	253.160.000
5 04 01 02 2.01 04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					Lamporan pembinaan, koordinasi fasilitasi, pemantauan dan evaluasi		laporan					
5 04 01 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional									996.815.000	250.000.000		250.000.000
5 04 01 02 2.02 01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan Serta Jabatan Fungsional					Dokumen yang disusun		dokumen					
5 04 01 02 2.02 02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten					Laporan pelaksanaan Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten		laporan					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
													Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	Tolok Ukur	Target	(8)			(9)	(10)	(11)
5	04	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten	Jumlah ASN yang mengikuti sertifikasi kompetensi		orang					
5	04	01	02	2.02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		laporan					
5	04	01	02	2.02	05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah kerjasama antar lembaga		MoU					
5	04	01	02	2.02	06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Dokumen yang disusun		dokumen					
5	04	01	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	409	orang		996.815.000	250.000.000	409	250.000.000
5	04	01	02	2.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi		laporan					
5	05					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
5	05	01				Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah								
5	05	01	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Hasil kelitbangan utama	1	Rekomendasi		2.037.852.582	948.771.750		942.939.000
5	05	01	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Litbang di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang telah tersedia		litbang		685.200.000	725.442.000		122.939.000
5	05	01	02	2.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang difasilitasi		litbang		435.200.000			
5	05	01	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum yang difasilitasi	1	litbang			247.023.000		
5	05	01	02	2.01	03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang difasilitasi	1	litbang			155.480.000		
5	05	01	02	2.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi yang difasilitasi	1	litbang			200.000.000		
5	05	01	02	2.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah yang difasilitasi		litbang		250.000.000			
5	05	01	02	2.01	06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat yang difasilitasi		litbang					
5	05	01	02	2.01	07	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa yang difasilitasi		litbang					
5	05	01	02	2.01	08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa yang difasilitasi		litbang					
5	05	01	02	2.01	09	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa yang difasilitasi		litbang					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
5	05	01	02	2.01	10	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa yang difasilitasi		litbang					
5	05	01	02	2.01	11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa yang difasilitasi		litbang					
5	05	01	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang telah dikelola	1	data			122.939.000	1	122.939.000
5	05	01	02	2.01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan		rekomendasi					
5	05	01	02	2.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah laporan hasil fasilitasi dan evaluasi	1	laporan				1	-
5	05	01	02	2.01	15	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian Bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian Oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah rekomendasi yang diberikan		rekomendasi					
5	05	01	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Litbang di Bidang Sosial dan Kependudukan yang telah tersedia		litbang		-	90.033.800		300.000.000
5	05	01	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah penelitian dan pengembangan		litbang					
5	05	01	02	2.02	02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah penelitian dan pengembangan		litbang					
5	05	01	02	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah penelitian dan pengembangan	1	litbang					
5	05	01	02	2.02	04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah penelitian dan pengembangan		litbang					
5	05	01	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah penelitian dan pengembangan		litbang			90.033.800		
5	05	01	02	2.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah penelitian dan pengembangan		litbang					
5	05	01	02	2.02	07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah penelitian dan pengembangan		litbang					
5	05	01	02	2.02	08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah penelitian dan pengembangan		litbang					
5	05	01	02	2.02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah penelitian dan pengembangan		litbang				1	300.000.000
5	05	01	02	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah penelitian dan pengembangan		litbang					
5	05	01	02	2.02	11	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah penelitian dan pengembangan		litbang					
5	05	01	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Litbang di Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang telah tersedia		litbang		1.277.652.582	90.033.800		250.000.000
5	05	01	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah penelitian dan pengembangan		litbang					
5	05	01	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah penelitian dan pengembangan		litbang					
5	05	01	02	2.03	03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah penelitian dan pengembangan		litbang					
5	05	01	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah penelitian dan pengembangan		litbang					
5	05	01	02	2.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah penelitian dan pengembangan		litbang					
5	05	01	02	2.03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah penelitian dan pengembangan		litbang					
5	05	01	02	2.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen hasil penelitian		dokumen		400.000.000			
5	05	01	02	2.03	08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah penelitian dan pengembangan		litbang					
5	05	01	02	2.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah penelitian dan pengembangan		litbang					
5	05	01	02	2.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah penelitian dan pengembangan		litbang				1	250.000.000

KODE							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
								Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)							(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
5	05	01	02	2.03	11		Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah penelitian dan pengembangan		litbang		400.000.000			
5	05	01	02	2.03	12		Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah penelitian dan pengembangan		litbang		477.652.582	90.033.800		
5	05	01	02	2.03	13		Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah penelitian dan pengembangan	1	litbang					
5	05	01	02	2.04			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah jenis inovasi dan teknologi yang telah dikembangkan oleh daerah		jenis		75.000.000	43.262.150		270.000.000
5	05	01	02	2.04	01		Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah penelitian dan pengembangan		litbang				1	250.000.000
5	05	01	02	2.04	02		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah inovasi yang di uji coba dan diterapkan		inovasi					
5	05	01	02	2.04	03		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah inovasi yang didesiminasi		inovasi		75.000.000			
5	05	01	02	2.04	04		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah peserta sosialisasi/ desiminasi	35	OK			43.262.150	35	20.000.000
5	05	01	02	2.04	05		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah permohonan yang difasilitasi		permohonan					
5	06						PENGHUBUNG								
5	06	01					Badan Pendapatan Daerah					662.500.000	665.586.000		665.586.000
5	06	01	02				PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					662.500.000	665.586.000		665.586.000
5	06	01	02	2.01			Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Kabupaten	Cakupan pelaksanaan pelayanan penghubung yang telah dilaksanakan	100	%		662.500.000	665.586.000		665.586.000
5	06	01	02	2.01	01		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah bulan operasional Mess Pemda Kabupaten Luwu	12	bulan		647.500.000	644.750.000		644.750.000
5	06	01	02	2.01	02		Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah aparaturn dan masyarakat yang dilayani dalam 1 tahun		orang					
5	06	01	02	2.01	03		Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya yang dilaksanakan		kali					
5	06	01	02	2.01	04		Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Jumlah pelaksanaan Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya yang difasilitasi		kali					
5	06	01	02	2.01	05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penghubung	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penghubung yang dilakukan	5	kali		15.000.000	20.836.000	5	20.836.000
6							UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6	01						INSPEKTORAT DAERAH								
6	01	01					Inspektorat Daerah					10.319.844.101	11.656.172.949		11.917.722.780
6	01	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		6.997.313.351	8.745.569.199	100	9.007.119.030
6	01	01	01	2.01			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		-	53.908.050	100	53.908.050
6	01	01	01	2.01	01		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		11.012.250	2	11.012.250
6	01	01	01	2.01	02		Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan	11	Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website		14.450.000	11	14.450.000
6	01	01	01	2.01	03		Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		11.507.900	4	11.507.900
6	01	01	01	2.01	04		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	5	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)		14.760.000	5	14.760.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
6	01	01	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		2.177.900	1	2.177.900
6	01	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		4.552.423.835	6.136.380.463	100	6.350.879.824
6	01	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	432	OB		4.529.917.585	6.128.553.163	432	6.343.052.524
6	01	01	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan		dokumen					-
6	01	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			3.913.650	14	3.913.650
6	01	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan		22.506.250	3.913.650	1	3.913.650
6	01	01	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		1.756.661.566	1.581.999.536	100	1.559.850.186
							Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
6	01	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	9.370	Surat		32.488.900	27.360.000	9.400	27.360.000
6	01	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		108.761.270	117.980.270	9.400	117.980.270
6	01	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB					
6	01	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	87	unit		45.500.000	56.500.000	87	56.500.000
6	01	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	276	OB		334.862.000	389.180.000	276	389.180.000
6	01	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan	12	OB		24.804.000	16.800.000	12	16.800.000
6	01	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan		unit/ paket					
6	01	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	25	Jenis		40.499.100	44.965.600	25	44.965.600
6	01	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3	Jenis		12.601.250	12.590.000	3	12.590.000
6	01	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	5	jenis		10.008.075	11.492.050	5	11.492.050
6	01	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	49	unit		186.492.114	179.851.431	8	52.021.906
6	01	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	5	jenis		17.476.025	17.167.991	5	17.167.991
6	01	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	3	jenis		50.000.000	75.000.000	3	75.000.000
6	01	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	14	jenis			25.999.000	14	25.999.000
6	01	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3	jenis		33.999.000	41.600.000	3	41.600.000
6	01	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	49	OK		303.428.000	242.742.400	49	242.742.400
							Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	68	OK		10.867.500	16.890.000	68	16.890.000
6	01	01	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit					
6	01	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit		189.276.000		5	195.000.000
6	01	01	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
6	01	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		unit					
6	01	01	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
6	01	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		jenis					
6	01	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan		unit		155.671.950	89.319.825		
6	01	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	2	jenis		31.612.257	31.859.257	2	31.859.257
6	01	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit					
6	01	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	30	unit		155.756.625	162.246.713	30	162.246.713
6	01	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set		12.557.500	6.250.000	5	6.250.000
6	01	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	23	unit/set			16.205.000	23	16.205.000
6	01	01	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
6	01	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit					
6	01	01	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
6	01	01	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
6	01	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		688.227.950	973.281.150	100	1.042.480.970
							Cakupan SDM Aparatur yang mengikuti pelatihan dan lulus tes auditor		%					
6	01	01	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
6	01	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	60	stell/ pasang		39.600.000			
6	01	01	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
6	01	01	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang				60	33.000.000
6	01	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	60	stell/ pasang		25.000.000		60	33.000.000
6	01	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	45	orang		623.627.950	623.627.950	45	623.627.950
6	01	01	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	35	orang			31.998.200		35.198.020
6	01	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	38	orang			317.655.000	38	317.655.000
6	01	01	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Skor LPPD	2.983	Angka		2.563.305.150	2.218.988.710		2.218.988.710
6	01	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal					1.880.081.450	1.505.259.540		1.505.259.540
6	01	01	02	2.01	01	Audit Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	208	laporan		1.434.000.000	791.713.920	208	791.713.920
6	01	01	02	2.01	02	Review Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan reviu	92	laporan		201.894.250	265.706.040	92	265.706.040
6	01	01	02	2.01	03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan hasil koordinasi pengawasan	100	laporan		202.721.000	251.231.520	100	251.231.520
6	01	01	02	2.01	04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan evaluasi	28	laporan		41.466.200	196.608.060	28	196.608.060
6	01	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					683.223.700	713.729.170		713.729.170
6	01	01	02	2.02	01	Audit Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan hasil pemeriksaan kasus	132	laporan		120.074.950	120.074.950	132	120.074.950
6	01	01	02	2.02	02	Review Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan reviu	54	laporan		61.000.250	157.702.580	54	157.702.580
6	01	01	02	2.02	03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan hasil koordinasi pengawasan	18	laporan		363.610.900	297.414.040	18	297.414.040
6	01	01	02	2.02	04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan evaluasi	20	laporan		138.537.600	138.537.600	20	138.537.600
6	01	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Ketersediaan Kebijakan di bidang pengawasan dan penyelenggaraan pendampingan dan Asistensi	100	%		759.225.600	691.615.040		691.615.040

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
6	01	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan yang dirumuskan	5	kebijakan		62.190.100	10.939.250	5	10.939.250
6	01	01	03	2.01	01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Dokumen kebijakan teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan	4	dokumen		62.190.100	5.939.250	4	5.939.250
6	01	01	03	2.01	02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Dokumen kebijakan teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan	1	dokumen			5.000.000	1	5.000.000
6	01	01	03	2.02	Asistensi dan Pendampingan	Jumlah perangkat daerah Asistensi dan Pendampingan				697.035.500	680.675.790		680.675.790
6	01	01	03	2.02	01 Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Jumlah laporan hasil pemeriksaan kasus	180	laporan		649.536.700	607.835.690	180	607.835.690
6	01	01	03	2.02	02 Asistensi dan Pendampingan	Jumlah Laporan hasil Asistensi dan Pendampingan	16	laporan		47.498.800	72.840.100	16	72.840.100
7					UNSUR KEWILAYAHAN							0	-
7	01				KECAMATAN								
7	01	01			Kecamatan Bua					4.203.075.420	4.612.671.606		4.715.691.745
7	01	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		2.842.305.420	3.248.468.606	100	3.348.858.115
7	01	01	01	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		4.000.000	16.209.700	100	16.209.700
7	01	01	01	2.01	01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		3.858.600	2	3.858.600
7	01	01	01	2.01	02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website	4.000.000	1.200.000		1.200.000
7	01	01	01	2.01	03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		3.243.200	4	3.243.200
7	01	01	01	2.01	04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)		6.740.000	6	6.740.000
7	01	01	01	2.01	05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		1.167.900	1	1.167.900
7	01	01	01	2.02	Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		2.587.005.420	3.024.306.377	100	3.130.047.277
7	01	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	576	OB		2.587.005.420	3.021.168.577	576	3.126.909.477
7	01	01	01	2.02	05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			800.000	3	800.000
7	01	01	01	2.02	07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			1.245.200	14	1.245.200
7	01	01	01	2.02	09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan			1.092.600	1	1.092.600
7	01	01	01	2.03	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		251.300.000	207.952.529	100	184.601.138
7						Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
7	01	01	01	2.03	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	500	Surat		10.200.000	7.320.000	500	7.320.000
7	01	01	01	2.03	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		20.963.400	21.173.034	12	21.173.034
7	01	01	01	2.03	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB					
7	01	01	01	2.03	06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	11	unit		8.000.000	10.400.000	11	10.400.000
7	01	01	01	2.03	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	84	OB		130.401.400	85.080.000	84	61.440.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan	60	OB		20.561.400	19.159.100	60	19.159.100
7	01	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan	1	unit/ paket			350.000	1	350.000
7	01	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	25	Jenis			8.306.445	25	8.306.445
7	01	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2	Jenis			4.825.800	2	4.825.800
7	01	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	jenis			1.491.200	10	1.491.200
7	01	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20	unit		6.531.800	6.000.000	20	6.000.000
7	01	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	1	jenis			100.000	1	100.000
7	01	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2	jenis		4.800.000	1.200.000	2	1.200.000
7	01	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	10	jenis			1.197.750	10	1.197.750
7	01	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	2	jenis			4.400.000	2	4.400.000
7	01	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	2	OK		15.185.000	10.521.700	2	10.732.134
							Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	61	OK		19.220.000	15.360.000	61	15.360.000
7	01	01	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit					
7	01	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit					
7	01	01	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan	1	jenis			3.250.000	1	3.250.000
7	01	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		unit					
7	01	01	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
7	01	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		jenis					
7	01	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan		unit					
7	01	01	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara rutin/berkala		unit					
7	01	01	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala	2	unit		1.222.000	-	2	-
7	01	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	2	jenis		1.495.000	-	2	-
7	01	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit					
7	01	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	4	unit		11.302.500	6.400.000	4	6.464.000
7	01	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set			-	5	-
7	01	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set		1.417.500	1.417.500	5	1.431.675
7	01	01	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
7	01	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	01	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	01	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		-	-	100	18.000.000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan					Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
												Target	Pagu Indikatif
(1)	(2)					Tolok Ukur	Target	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	01	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	unit					
7	01	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	stell/ pasang					
7	01	01	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan yang diadakan	stell/ pasang					
7	01	01	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan	stell/ pasang					
7	01	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	stell/ pasang				36	18.000.000
7	01	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	orang					
7	01	01	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	orang					
7	01	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	orang					
7	01	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100	%	-	3.540.000		3.240.000
7	01	01	02	2.01		<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan</i>	<i>100,00</i>	<i>%</i>	<i>-</i>	<i>2.240.000</i>		<i>2.240.000</i>
7	01	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan	1	kali		800.000	1	800.000
7	01	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit kerja kecamatan yang bekerja dengan efektif	9	unit kerja		1.440.000	9	1.440.000
7	01	01	02	2.02		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	<i>Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	<i>100,00</i>	<i>%</i>	<i>-</i>	<i>500.000</i>		<i>500.000</i>
7	01	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan		dokumen		-	0	
7	01	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis dan mutu layanan SPM yang difasilitasi	26	SPM		500.000	26	500.000
7	01	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis pelaksanaan pelayanan yang telah terlaksana dengan efektif		jenis				
7	01	01	02	2.03		<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	<i>Cakupan koordinasi dalam rangka pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum</i>	<i>100,00</i>	<i>%</i>	<i>-</i>	<i>800.000</i>		<i>500.000</i>
7	01	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi	1	kali		800.000	1	500.000
7	01	01	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang dipelihara		unit				
7	01	01	02	2.04		<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</i>	<i>100,00</i>		<i>-</i>	<i>-</i>		<i>-</i>
7	01	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	2	laporan		-	2	-
7	01	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah urusan pemerintahan nonperizinan yang dilayani kecamatan		jenis				
7	01	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilaksanakan		jenis				

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100,00	%		1.089.070.000	1.085.363.000		1.094.293.630
7	01	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa yang dilakukan koordinasi dalam rangka pemberdayaan desa		%		-	500.000		500.000
7	01	01	03	2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah perencanaan	14	desa			-	14	-
7	01	01	03	2.01	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Laporan pelaksanaan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1	laporan			250.000	1	250.000
7	01	01	03	2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1	kali			250.000	1	250.000
7	01	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang dilakukan pemberdayaan kelurahan	100,00			1.089.070.000	1.084.863.000		1.093.793.630
7	01	01	03	2.02	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah di kelurahan	1	kelurahan	Operasional Kelurahan, Honor/Jasa Upah Kerja bagi Kepala Lingkungan, Kader Posyandu, Kader Kelurahan, LPMK	276.940.000	191.800.000	1	191.800.000
7	01	01	03	2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	2	unit/ jenis	DAU tambahan dan Dana Pendamping Kelurahan	767.130.000	893.063.000	2	901.993.630
						Pembangunan Saluran Drainase Kel. Sakti Kec. Bua			Usulan Musrenbang				
						Pengembangan Jaringan Perpipaan - SPAM IKK Bua			Usulan Musrenbang				
						Rehabilitasi SPAM IKK Bua			Usulan Musrenbang				
7	01	01	03	2.02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dilaksanakan fasilitasi dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat		kelurahan		45.000.000			-
7	01	01	03	2.02	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	1	kelurahan					-
7	01	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	%		264.200.000	260.500.000		260.500.000
7	01	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	%		264.200.000	259.700.000		259.700.000
7	01	01	04	2.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah pertemuan dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1	kali			500.000	1	500.000
7	01	01	04	2.01	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diberikan insentif	2.592	OB	Honor/Jasa Upah Kerja bagi guru mengaji/guru sekolah minggu	264.200.000	259.200.000	2.592	259.200.000
7	01	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam rangka penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	100,00	%		-	800.000		800.000
7	01	01	04	2.02	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Polri	12	laporan			800.000	12	800.000
7	01	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	100	%		-	2.200.000		2.200.000
7	01	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah	100,00	%		-	2.200.000		2.200.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	1	kegiatan			1.200.000	1	1.200.000
7	01	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		orang					
7	01	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah peserta fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		orang					
7	01	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrastuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya		kali					
7	01	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah konflik sosial yang ditangani		kasus					
7	01	01	05	2.01	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi		kali					
7	01	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal		laporan					
7	01	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	kali			1.000.000	1	1.000.000
7	01	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100,00	%		7.500.000	12.600.000		6.600.000
7	01	01	06	2.01		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</i>	<i>100,00</i>	<i>%</i>		<i>7.500.000</i>	<i>12.600.000</i>		<i>6.600.000</i>
7	01	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6	desa			600.000	6	600.000
7	01	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6	desa			600.000	6	600.000
7	01	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	14	desa		7.500.000	1.400.000	14	1.400.000
7	01	01	06	2.01	04	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		desa					
7	01	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6	desa			600.000	6	600.000
7	01	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6	desa			6.000.000		
7	01	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	6	desa			600.000	6	600.000
7	01	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang diberikan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		desa					
7	01	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	6	desa			600.000	6	600.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	01	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		desa					
7	01	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6	desa			600.000	6	600.000
7	01	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6	desa			600.000	6	600.000
7	01	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		desa					
7	01	01	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	2	desa			400.000	2	400.000
7	01	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		desa					
7	01	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	6	desa			600.000	6	600.000
7	01	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan pelaksanaan Koordinasi Pendampingan Desa		laporan					
7	01	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		laporan					
7	01	02				Kecamatan Bessesangtempe					1.935.780.695	2.056.598.275		2.109.716.181
7	01	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		1.729.877.586	1.822.608.275	100	1.875.726.181
7	01	02	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		5.065.000	20.857.300	100	20.621.800
7	01	02	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		3.858.600	2	3.858.600
7	01	02	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website		1.200.000		1.200.000
7	01	02	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		3.243.200	4	3.243.200
7	01	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)	5.065.000	11.320.000	6	11.320.000
7	01	02	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		1.235.500	1	1.000.000
7	01	02	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		1.492.877.586	1.532.751.475	100	1.586.244.553
7	01	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	240	OB		1.492.877.586	1.528.373.675	240	1.581.866.753
7	01	02	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			500.000	3	500.000
7	01	02	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			2.785.200	14	2.785.200
7	01	02	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan			1.092.600	1	1.092.600

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	02	01	2.03	Administrasi Umum	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		231.935.000	268.999.500	100	244.909.828
						Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
7	01	02	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	500	Surat	8.898.000	8.898.000	500	8.898.000
7	01	02	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan	4.941.000	4.990.400	12	4.990.400
7	01	02	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB				
7	01	02	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	11	unit	14.500.000	14.500.000	11	14.500.000
7	01	02	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	120	OB	83.640.000	101.160.000	120	101.160.000
7	01	02	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB	17.300.700	17.472.100	0	17.472.100
7	01	02	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan	2	unit/ paket		500.000	2	500.000
7	01	02	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	25	Jenis	5.597.550	5.653.450	25	5.653.450
7	01	02	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	Jenis	3.590.250	3.754.500	2	3.754.500
7	01	02	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	jenis	5.014.000	5.000.000	1	500.000
7	01	02	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	unit	28.062.500	28.000.000	2	8.000.000
7	01	02	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	1	jenis		100.000	1	100.000
7	01	02	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2	jenis	1.950.000	1.200.000	2	1.200.000
7	01	02	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	8	jenis		2.199.700	8	2.199.700
7	01	02	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3	jenis	14.100.000	14.120.000	3	14.120.000
7	01	02	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	12	OH	16.992.000	15.706.400	12	16.020.528
7	01	02	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	80	OH	20.140.500	21.600.000	80	21.600.000
7	01	02	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit				
7	01	02	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit				
7	01	02	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan	1	jenis		7.025.000	1	7.025.000
7	01	02	01	2.03	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	46	unit		2.500.000	46	2.500.000
7	01	02	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis				
7	01	02	01	2.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	1	jenis		2.500.000	1	2.500.000
7	01	02	01	2.03	26	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan		unit				
7	01	02	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara rutin/berkala		unit				
7	01	02	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala	2	unit		2.500.000	2	2.500.000
7	01	02	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor		jenis				-
7	01	02	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit				
7	01	02	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	11	unit	7.208.500	7.202.950	11	7.274.980

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	02	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	4	unit/set			1.000.000	4	1.010.000
7	01	02	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set			1.417.000	5	1.431.170
7	01	02	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
7	01	02	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	02	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	02	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	02	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		-	-	100	23.950.000
7	01	02	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
7	01	02	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		stell/ pasang				29	14.500.000
7	01	02	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	02	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	02	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		stell/ pasang				29	9.450.000
7	01	02	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang					
7	01	02	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan		orang					
7	01	02	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis		orang					
7	01	02	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100,00	%		-	3.860.000		3.860.000
7	01	02	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100,00	%		-	3.860.000		3.860.000
7	01	02	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	laporan			2.420.000	4	2.420.000
7	01	02	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit kerja kecamatan yang bekerja dengan efektif	9	unit kerja			1.440.000	9	1.440.000
7	01	02	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100,00	%		-	-		-
7	01	02	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan		dokumen					
7	01	02	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis dan mutu layanan SPM yang difasilitasi	26	SPM					
7	01	02	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis pelaksanaan pelayanan yang telah terlaksana dengan efektif		jenis					
7	01	02	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Cakupan koordinasi dalam rangka pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100,00	%		-	-		-
7	01	02	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi	1	kali					

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	02	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang dipelihara		unit				
7	01	02	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100,00		-	-		-
7	01	02	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	2	laporan				
7	01	02	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah urusan pemerintahan nonperizinan yang dilayani kecamatan		jenis				
7	01	02	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilaksanakan		jenis				
7	01	02	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100,00	%	-	1.700.000		1.700.000
7	01	02	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa yang dilakukan koordinasi dalam rangka pemberdayaan desa		%	-	1.700.000		1.700.000
7	01	02	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah perencanaan	12	desa		1.200.000	12	1.200.000
7	01	02	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Laporan pelaksanaan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1	laporan		250.000	1	250.000
7	01	02	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1	kali		250.000	1	250.000
7	01	02	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	%	165.903.109	164.210.000		164.210.000
7	01	02	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	%	165.903.109	161.800.000		161.800.000
7	01	02	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah pertemuan dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2	kali	103.109	1.000.000	2	1.000.000
7	01	02	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diberikan insentif	1.608	OB	165.800.000	160.800.000	1.608	160.800.000
7	01	02	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam rangka penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	100,00	%	-	2.410.000		2.410.000
7	01	02	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Polri	12	laporan		2.410.000	12	2.410.000
7	01	02	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	100,00	%	-	1.600.000		1.600.000
7	01	02	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah	100,00	%	-	1.600.000		1.600.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	02	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI		kegiatan				0	-
7	01	02	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		orang					
7	01	02	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah peserta fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		orang					
7	01	02	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrastuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya		kali					
7	01	02	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah konflik sosial yang ditangani		kasus					
7	01	02	05	2.01	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi		kali					
7	01	02	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal		kali					
7	01	02	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2	kali			1.600.000	2	1.600.000
7	01	02	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100,00	%		40.000.000	62.620.000		62.620.000
7	01	02	06	2.01		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</i>	<i>100,00</i>	<i>%</i>		<i>40.000.000</i>	<i>62.620.000</i>		<i>62.620.000</i>
7	01	02	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12	desa			2.300.000	12	2.300.000
7	01	02	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	desa			2.300.000	12	2.300.000
7	01	02	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	12	desa	40.000.000		38.720.000	12	38.720.000
7	01	02	06	2.01	04	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		desa					
7	01	02	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	desa			2.300.000	12	2.300.000
7	01	02	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5	desa			5.100.000	5	5.100.000
7	01	02	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12	desa			2.300.000	12	2.300.000
7	01	02	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang diberikan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		desa					
7	01	02	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	12	desa			2.300.000	12	2.300.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	02	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		desa					
7	01	02	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	desa			2.300.000	12	2.300.000
7	01	02	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12	desa			2.300.000	12	2.300.000
7	01	02	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		desa					
7	01	02	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	2	desa			400.000	2	400.000
7	01	02	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		desa					
7	01	02	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	12	desa			2.300.000	12	2.300.000
7	01	02	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan pelaksanaan Koordinasi Pendampingan Desa		laporan					
7	01	02	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		laporan					
7	01	03				Kecamatan Walenrang Timur					2.164.984.697	1.840.794.137		1.900.155.311
7	01	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		1.928.984.697	1.634.994.137	100	1.693.955.311
7	01	03	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		-	13.000.000	100	13.000.000
7	01	03	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		2.500.000	2	2.500.000
7	01	03	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website		5.000.000		5.000.000
7	01	03	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		2.000.000	4	2.000.000
7	01	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan mengadakan acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)		2.500.000	6	2.500.000
7	01	03	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		1.000.000	1	1.000.000
7	01	03	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		1.741.984.697	1.402.819.237	100	1.451.830.411
7	01	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	252	OB		1.741.984.697	1.400.319.237	252	1.449.330.411
7	01	03	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			500.000	3	500.000
7	01	03	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			1.000.000	14	1.000.000
7	01	03	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan			1.000.000	1	1.000.000
7	01	03	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		187.000.000	219.174.900	100	217.124.900

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
							Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
7	01	03	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	500	Surat		8.900.000	8.989.000	500	8.989.000
7	01	03	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		4.000.000	4.040.000	12	4.040.000
7	01	03	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB					
7	01	03	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	11	unit		15.300.000	15.300.000	11	15.300.000
7	01	03	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	120	OB		62.760.000	62.760.000	120	62.760.000
7	01	03	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB		10.400.000	10.504.000	0	10.504.000
7	01	03	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan	1	unit/ paket			500.000	1	500.000
7	01	03	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	25	Jenis		9.690.000	9.786.900	25	9.786.900
7	01	03	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	Jenis		2.000.000	2.020.000	2	2.020.000
7	01	03	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	jenis			500.000	10	500.000
7	01	03	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20	unit		10.750.000	10.750.000	20	10.750.000
7	01	03	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	1	jenis			100.000	1	100.000
7	01	03	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2	jenis		1.200.000	1.200.000	2	1.200.000
7	01	03	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	10	jenis			1.200.000	10	1.200.000
7	01	03	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	2	jenis			12.000.000	2	12.000.000
7	01	03	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	2	OK		10.000.000	10.000.000	2	10.200.000
							Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	100	OK		25.000.000	25.000.000	100	25.000.000
7	01	03	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit					
7	01	03	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	6	unit					
7	01	03	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan	1	jenis			7.025.000	1	7.025.000
7	01	03	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	2	unit			2.500.000	2	2.500.000
7	01	03	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
7	01	03	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	2	jenis			2.500.000	2	2.500.000
7	01	03	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan		unit					
7	01	03	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara rutin/berkala		unit			2.500.000		
7	01	03	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala	2	unit			2.500.000	2	2.500.000
7	01	03	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	2	jenis		2.000.000	2.500.000	2	2.500.000
7	01	03	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit					
7	01	03	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	11	unit		23.000.000	23.000.000	11	23.230.000
7	01	03	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set		1.000.000	1.000.000	5	1.010.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	03	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set		1.000.000	1.000.000	5	1.010.000
7	01	03	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
7	01	03	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	03	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	03	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	03	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		-	-	100	12.000.000
7	01	03	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
7	01	03	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	24	stell/ pasang					12.000.000
7	01	03	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	03	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	03	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	03	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang					
7	01	03	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	24	orang					
7	01	03	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis		orang					
7	01	03	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100,00	%		13.000.000	4.500.000		4.900.000
7	01	03	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100,00	%		13.000.000	3.400.000		3.400.000
7	01	03	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan	1	kali		13.000.000	2.500.000	1	2.500.000
7	01	03	02	2.01	02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit kerja kecamatan yang bekerja dengan efektif	9	unit kerja			900.000	9	900.000
7	01	03	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100,00	%		-	600.000		1.000.000
7	01	03	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan	1	dokumen			100.000	1	500.000
7	01	03	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis dan mutu layanan SPM yang difasilitasi	26	SPM			500.000	26	500.000
7	01	03	02	2.02	03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis pelaksanaan pelayanan yang telah terlaksana dengan efektif		jenis					
7	01	03	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Cakupan koordinasi dalam rangka pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100,00	%		-	500.000		500.000
7	01	03	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi	1	kali			500.000	1	500.000
7	01	03	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang dipelihara		unit					

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	03	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100,00			-	-		-
7	01	03	02	2.04	01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan		laporan					-
7	01	03	02	2.04	02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah urusan pemerintahan nonperizinan yang dilayani kecamatan		jenis					
7	01	03	02	2.04	03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilaksanakan		jenis					
7	01	03	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100,00	%		-	1.300.000		1.300.000
7	01	03	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa yang dilakukan koordinasi dalam rangka pemberdayaan desa		%		-	1.300.000		1.300.000
7	01	03	03	2.01	01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah perencanaan	8	desa			800.000	8	800.000
7	01	03	03	2.01	02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Laporan pelaksanaan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1	laporan			250.000	1	250.000
7	01	03	03	2.01	03 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1	kali			250.000	1	250.000
7	01	03	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	%		183.000.000	181.700.000		181.700.000
7	01	03	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	%		183.000.000	180.500.000		180.500.000
7	01	03	04	2.01	01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah pertemuan dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1	kali			500.000	1	500.000
7	01	03	04	2.01	02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diberikan insentif	1.800	OB	Honor/Jasa Upah Kerja bagi guru mengaji/guru sekolah minggu	183.000.000	180.000.000	1.800	180.000.000
7	01	03	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam rangka penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	100,00	%		-	1.200.000		1.200.000
7	01	03	04	2.02	01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Polri	12	laporan			1.200.000	12	1.200.000
7	01	03	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	100,00	%		-	2.000.000		2.000.000
7	01	03	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah	100,00	%		-	2.000.000		2.000.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	03	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	1	kegiatan			1.000.000	1	1.000.000
7	01	03	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		orang					
7	01	03	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah peserta fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		orang					
7	01	03	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrusuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya		kali					
7	01	03	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah konflik sosial yang ditangani		kasus					
7	01	03	05	2.01	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi		kali					
7	01	03	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal		kali					
7	01	03	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	kali			1.000.000	1	1.000.000
7	01	03	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100,00	%		40.000.000	16.300.000		16.300.000
7	01	03	06	2.01		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</i>	<i>100,00</i>	<i>%</i>		<i>40.000.000</i>	<i>16.300.000</i>		<i>16.300.000</i>
7	01	03	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8	desa			800.000	8	800.000
7	01	03	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8	desa			800.000	8	800.000
7	01	03	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	8	desa		40.000.000	7.500.000	8	7.500.000
7	01	03	06	2.01	04	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		desa					
7	01	03	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8	desa			800.000	8	800.000
7	01	03	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2	desa			2.000.000	2	2.000.000
7	01	03	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8	desa			800.000	8	800.000
7	01	03	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang diberikan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		desa					
7	01	03	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	8	desa			800.000	8	800.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	03	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		desa					
7	01	03	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8	desa			800.000	8	800.000
7	01	03	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	8	desa			800.000	8	800.000
7	01	03	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		desa					
7	01	03	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	2	desa			400.000	2	400.000
7	01	03	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		desa					
7	01	03	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	8	desa			800.000	8	800.000
7	01	03	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan pelaksanaan Koordinasi Pendampingan Desa		laporan					
7	01	03	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		laporan					
7	01	04				Kecamatan Lamasi Timur					1.761.929.455	1.611.407.448		1.659.479.008
7	01	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		1.585.929.455	1.449.907.448	100	1.497.579.008
7	01	04	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		-	13.000.000	100	13.000.000
7	01	04	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		2.500.000	2	2.500.000
7	01	04	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website		5.000.000		5.000.000
7	01	04	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		2.000.000	4	2.000.000
7	01	04	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan mengadakan acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)		2.500.000	6	2.500.000
7	01	04	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		1.000.000	1	1.000.000
7	01	04	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		1.384.929.455	1.214.258.848	100	1.256.670.408
7	01	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	228	OB		1.384.929.455	1.211.758.848	228	1.254.170.408
7	01	04	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			500.000	3	500.000
7	01	04	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			1.000.000	14	1.000.000
7	01	04	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan			1.000.000	1	1.000.000
7	01	04	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		193.800.000	222.648.600	100	220.708.600

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
							Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
7	01	04	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	500	Surat		23.600.000	23.836.000	500	23.836.000
7	01	04	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		5.000.000	5.050.000	12	5.050.000
7	01	04	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB					
7	01	04	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	11	unit		9.000.000	9.000.000	11	9.000.000
7	01	04	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	60	OB		38.640.000	38.640.000	60	38.640.000
7	01	04	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB		9.200.000	9.292.000	0	9.292.000
7	01	04	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan	1	unit/ paket			500.000	1	500.000
7	01	04	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	25	Jenis		10.000.000	10.100.000	25	10.100.000
7	01	04	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2	Jenis		4.560.000	4.605.600	2	4.605.600
7	01	04	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	jenis		2.000.000	2.000.000	10	2.000.000
7	01	04	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20	unit		20.500.000	20.500.000	20	20.500.000
7	01	04	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	1	jenis			100.000	1	100.000
7	01	04	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2	jenis		1.500.000	1.500.000	2	1.500.000
7	01	04	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	10	jenis			1.200.000	10	1.200.000
7	01	04	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	2	jenis			12.000.000	2	12.000.000
7	01	04	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	2	OK		10.000.000	10.000.000	2	10.200.000
							Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	75	OK		18.800.000	18.800.000	75	18.800.000
7	01	04	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit					
7	01	04	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	4	unit					
7	01	04	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan	1	jenis			7.025.000	1	7.025.000
7	01	04	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	2	unit			2.500.000	2	2.500.000
7	01	04	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
7	01	04	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	2	jenis			2.500.000	2	2.500.000
7	01	04	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan		unit					
7	01	04	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara rutin/berkala		unit			2.500.000		
7	01	04	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala	2	unit			2.500.000	2	2.500.000
7	01	04	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	2	jenis		5.000.000	2.500.000	2	2.500.000
7	01	04	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit					
7	01	04	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	11	unit		34.000.000	34.000.000	11	34.340.000
7	01	04	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set		1.000.000	1.000.000	5	1.010.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	04	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set		1.000.000	1.000.000	5	1.010.000
7	01	04	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
7	01	04	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	04	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	04	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	04	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		7.200.000	-	100	7.200.000
7	01	04	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
7	01	04	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	21	stell/ pasang		7.200.000			7.200.000
7	01	04	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	04	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	04	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	04	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang					
7	01	04	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	21	orang					
7	01	04	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis		orang					
7	01	04	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100,00	%		17.000.000	4.500.000		4.900.000
7	01	04	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100,00	%		17.000.000	3.400.000		3.400.000
7	01	04	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan	1	kali		17.000.000	2.500.000	1	2.500.000
7	01	04	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit kerja kecamatan yang bekerja dengan efektif	9	unit kerja			900.000	9	900.000
7	01	04	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100,00	%		-	600.000		1.000.000
7	01	04	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan	1	dokumen			100.000	1	500.000
7	01	04	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis dan mutu layanan SPM yang difasilitasi	26	SPM			500.000	26	500.000
7	01	04	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis pelaksanaan pelayanan yang telah terlaksana dengan efektif		jenis					
7	01	04	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Cakupan koordinasi dalam rangka pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100,00	%		-	500.000		500.000
7	01	04	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi	1	kali			500.000	1	500.000
7	01	04	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang dipelihara		unit					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	04	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100,00			-	-		-
7	01	04	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	2	laporan					
7	01	04	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah urusan pemerintahan nonperizinan yang dilayani kecamatan		jenis					
7	01	04	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilaksanakan		jenis					
7	01	04	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100,00	%		-	1.300.000		1.300.000
7	01	04	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa yang dilakukan koordinasi dalam rangka pemberdayaan desa		%		-	1.300.000		1.300.000
7	01	04	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah perencanaan	8	desa			800.000	8	800.000
7	01	04	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Laporan pelaksanaan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1	laporan			250.000	1	250.000
7	01	04	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1	kali			250.000	1	250.000
7	01	04	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	%		137.000.000	134.900.000		134.900.000
7	01	04	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	%		137.000.000	132.500.000		132.500.000
7	01	04	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah pertemuan dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1	kali			500.000	1	500.000
7	01	04	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diberikan insentif	1.320	OB	Honor/Jasa Upah Kerja bagi guru mengaji/guru sekolah minggu	137.000.000	132.000.000	1.320	132.000.000
7	01	04	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam rangka penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	100,00	%		-	2.400.000		2.400.000
7	01	04	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Polri	12	laporan			2.400.000	12	2.400.000
7	01	04	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	100,00	%		-	2.000.000		2.000.000
7	01	04	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah	100,00	%		-	2.000.000		2.000.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	04	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	1	kegiatan			1.000.000	1	1.000.000
7	01	04	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		orang					
7	01	04	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah peserta fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		orang					
7	01	04	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrastuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya		kali					
7	01	04	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah konflik sosial yang ditangani		kasus					
7	01	04	05	2.01	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi		kali					
7	01	04	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal		laporan					
7	01	04	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	kali			1.000.000	1	1.000.000
7	01	04	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100,00	%		22.000.000	18.800.000		18.800.000
7	01	04	06	2.01		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</i>	<i>100,00</i>	<i>%</i>		<i>22.000.000</i>	<i>18.800.000</i>		<i>18.800.000</i>
7	01	04	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8	desa			800.000	8	800.000
7	01	04	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8	desa			800.000	8	800.000
7	01	04	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	8	desa		22.000.000	10.000.000	8	10.000.000
7	01	04	06	2.01	04	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		desa					
7	01	04	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8	desa			800.000	8	800.000
7	01	04	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2	desa			2.000.000	2	2.000.000
7	01	04	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8	desa			800.000	8	800.000
7	01	04	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang diberikan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		desa					
7	01	04	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	8	desa			800.000	8	800.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	04	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		desa					
7	01	04	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8	desa			800.000	8	800.000
7	01	04	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	8	desa			800.000	8	800.000
7	01	04	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		desa					
7	01	04	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	2	desa			400.000	2	400.000
7	01	04	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		desa					
7	01	04	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	8	desa			800.000	8	800.000
7	01	04	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan pelaksanaan Koordinasi Pendampingan Desa		laporan					
7	01	04	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		laporan					
7	01	05				Kecamatan Ponrang Selatan					3.464.968.995	3.583.836.811		3.681.678.865
7	01	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		2.127.898.995	2.247.363.811	100	2.335.875.235
7	01	05	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		-	13.000.000	100	13.000.000
7	01	05	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		2.500.000	2	2.500.000
7	01	05	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website		5.000.000		5.000.000
7	01	05	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		2.000.000	4	2.000.000
7	01	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan mengadakan acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)		2.500.000	6	2.500.000
7	01	05	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		1.000.000	1	1.000.000
7	01	05	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		1.919.698.995	2.006.592.811	100	2.076.736.060
7	01	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	324	OB		1.919.698.995	2.004.092.811	324	2.074.236.060
7	01	05	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			500.000	3	500.000
7	01	05	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			1.000.000	14	1.000.000
7	01	05	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan			1.000.000	1	1.000.000
7	01	05	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		208.200.000	227.771.000	100	228.139.175

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
							Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
7	01	05	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	500	Surat		12.300.000	12.423.000	500	12.423.000
7	01	05	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		15.300.000	15.453.000	12	15.453.000
7	01	05	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB					
7	01	05	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	11	unit		7.400.000	7.400.000	11	7.400.000
7	01	05	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	144	OB		81.000.000	81.000.000	144	81.000.000
7	01	05	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB		16.400.000	16.564.000	0	16.564.000
7	01	05	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan	1	unit/ paket			500.000	1	500.000
7	01	05	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	25	Jenis		6.000.000	6.000.000	25	6.000.000
7	01	05	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2	Jenis		4.000.000	4.000.000	2	4.000.000
7	01	05	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	jenis			2.360.500	10	2.360.500
7	01	05	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20	unit		9.500.000	9.595.000	20	9.595.000
7	01	05	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	1	jenis			100.000	1	100.000
7	01	05	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2	jenis		2.000.000	2.000.000	2	2.000.000
7	01	05	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	10	jenis			1.200.000	10	1.200.000
7	01	05	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	2	jenis			24.000.000	2	24.000.000
7	01	05	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	3	OK		16.000.000	16.000.000	3	16.320.000
							Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	56	OK		14.000.000	14.000.000	56	14.000.000
7	01	05	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit					
7	01	05	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit					
7	01	05	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan	1	jenis			7.025.000	1	7.025.000
7	01	05	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		unit					
7	01	05	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
7	01	05	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		jenis					
7	01	05	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan		unit					
7	01	05	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara rutin/berkala		unit					
7	01	05	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala	2	unit				2	-
7	01	05	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	2	jenis		3.300.000	3.333.000	2	3.333.000
7	01	05	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit					
7	01	05	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	3	unit		21.000.000	2.400.000	3	2.424.000
7	01	05	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set			1.000.000	5	1.010.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	05	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set			1.417.500	5	1.431.675
7	01	05	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
7	01	05	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	05	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	05	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	05	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		-	-	100	18.000.000
7	01	05	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
7	01	05	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	05	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	05	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	05	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	31	stell/ pasang				36	18.000.000
7	01	05	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang					
7	01	05	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan		orang					
7	01	05	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis		orang					
7	01	05	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100,00	%		27.000.000	4.500.000		4.900.000
7	01	05	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100,00	%		27.000.000	3.400.000		3.400.000
7	01	05	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan	1	kali		27.000.000	2.500.000	1	2.500.000
7	01	05	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit kerja kecamatan yang bekerja dengan efektif	9	unit kerja			900.000	9	900.000
7	01	05	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100,00	%		-	600.000		1.000.000
7	01	05	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan	1	dokumen			100.000	1	500.000
7	01	05	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis dan mutu layanan SPM yang difasilitasi	26	SPM			500.000	26	500.000
7	01	05	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis pelaksanaan pelayanan yang telah terlaksana dengan efektif		jenis					
7	01	05	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Cakupan koordinasi dalam rangka pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100,00	%		-	500.000		500.000
7	01	05	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi	1	kali			500.000	1	500.000
7	01	05	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang dipelihara		unit					

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	05	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100,00			-	-		-
7	01	05	02	2.04	01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	2	laporan					
7	01	05	02	2.04	02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah urusan pemerintahan nonperizinan yang dilayani kecamatan		jenis					
7	01	05	02	2.04	03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilaksanakan		jenis					
7	01	05	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100,00	%		1.089.070.000	1.094.563.000		1.103.493.630
7	01	05	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa yang dilakukan koordinasi dalam rangka pemberdayaan desa	100,00	%		-	1.900.000		1.900.000
7	01	05	03	2.01	01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah perencanaan	14	desa			1.400.000	14	1.400.000
7	01	05	03	2.01	02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka sinkronisasi program kerja dan kegiatan	1	kali			250.000	1	250.000
7	01	05	03	2.01	03 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1	kali			250.000	1	250.000
7	01	05	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang dilakukan pemberdayaan kelurahan	100,00			1.089.070.000	1.092.663.000		1.101.593.630
7	01	05	03	2.02	01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah di kelurahan	1	kelurahan	Honor/Jasa Upah Kerja bagi Kepala Lingkungan, Kader Posyandu, Kader Kelurahan, LPMK	242.570.000	199.600.000	1	199.600.000
7	01	05	03	2.02	02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	1	unit/ jenis	DAU tambahan dan Dana Pendamping Kelurahan	796.500.000	893.063.000	1	901.993.630
7	01	05	03	2.02	03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dilaksanakan fasilitasi dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat	1	kelurahan	Operasional Kelurahan	50.000.000		1	-
7	01	05	03	2.02	04 Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi		kelurahan					
7	01	05	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	%		216.200.000	214.110.000		214.110.000
7	01	05	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	%		216.200.000	211.700.000		211.700.000
7	01	05	04	2.01	01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah pertemuan dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1	kali			500.000	1	500.000
7	01	05	04	2.01	02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diberikan insentif	2.112	OB	Honor/Jasa Upah Kerja bagi guru mengaji/guru sekolah minggu	216.200.000	211.200.000	2.112	211.200.000
7	01	05	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam rangka penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	100,00	%		-	2.410.000		2.410.000
7	01	05	04	2.02	01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Polri	12	laporan			2.410.000	12	2.410.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	05	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	100,00	%		-	2.000.000		2.000.000
7	01	05	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah	100,00	%		-	2.000.000		2.000.000
7	01	05	05	2.01	01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	1	kegiatan			1.000.000	1	1.000.000
7	01	05	05	2.01	02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		orang					
7	01	05	05	2.01	03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah peserta fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		orang					
7	01	05	05	2.01	04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya		kali					
7	01	05	05	2.01	05 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah konflik sosial yang ditangani		kasus					
7	01	05	05	2.01	06 Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi		kali					
7	01	05	05	2.01	07 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal		laporan					
7	01	05	05	2.01	08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	kali			1.000.000	1	1.000.000
7	01	05	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100,00	%		4.800.000	21.300.000		21.300.000
7	01	05	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100,00	%		4.800.000	21.300.000		21.300.000
7	01	05	06	2.01	01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12	desa			1.200.000	12	1.200.000
7	01	05	06	2.01	02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	desa			1.200.000	12	1.200.000
7	01	05	06	2.01	03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	12	desa		4.800.000	7.500.000	12	7.500.000
7	01	05	06	2.01	04 Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		desa					
7	01	05	06	2.01	05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	desa			1.200.000	12	1.200.000
7	01	05	06	2.01	06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5	desa			5.000.000		5.000.000
7	01	05	06	2.01	07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12	desa			1.200.000	12	1.200.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	05	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang diberikan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		desa					
7	01	05	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	12	desa			1.200.000	12	1.200.000
7	01	05	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		desa					
7	01	05	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6	desa			600.000	6	600.000
7	01	05	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6	desa			1.200.000	6	1.200.000
7	01	05	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		desa					
7	01	05	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	2	desa			400.000	2	400.000
7	01	05	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		desa					
7	01	05	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	6	desa			600.000	6	600.000
7	01	05	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan pelaksanaan Koordinasi Pendampingan Desa		laporan					
7	01	05	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		laporan					
7	01	06				Kecamatan Bupon					2.875.642.878	3.123.346.765		3.215.272.419
7	01	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		1.558.472.878	1.790.073.765	100	1.872.668.789
7	01	06	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		-	13.000.000	100	13.000.000
7	01	06	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		2.500.000	2	2.500.000
7	01	06	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website		5.000.000		5.000.000
7	01	06	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		2.000.000	4	2.000.000
7	01	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)		2.500.000	6	2.500.000
7	01	06	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		1.000.000	1	1.000.000
7	01	06	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		1.348.372.878	1.545.724.265	100	1.599.737.114
7	01	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	240	OB		1.348.372.878	1.543.224.265	240	1.597.237.114
7	01	06	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			500.000	3	500.000

KODE							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
								Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)							(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	06	01	2.02	07		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			1.000.000	14	1.000.000
7	01	06	01	2.02	09		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan			1.000.000	1	1.000.000
7	01	06	01	2.03			Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		210.100.000	231.349.500	100	241.931.675
								Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
7	01	06	01	2.03	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	230	surat		6.400.000	6.464.000	230	6.464.000
7	01	06	01	2.03	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		14.400.000	14.544.000	12	14.544.000
7	01	06	01	2.03	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB					
7	01	06	01	2.03	06		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	4	unit		13.400.000	13.400.000	4	13.400.000
7	01	06	01	2.03	07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	96	OB		61.920.000	61.920.000	96	61.920.000
7	01	06	01	2.03	08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB		7.400.000	7.474.000	0	7.474.000
7	01	06	01	2.03	09		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan	1	unit/ paket			500.000	1	500.000
7	01	06	01	2.03	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	25	Jenis		8.134.800	8.134.800	25	8.134.800
7	01	06	01	2.03	11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	Jenis		1.805.200	1.805.200	2	1.805.200
7	01	06	01	2.03	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	jenis			500.000	10	500.000
7	01	06	01	2.03	13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20	unit		35.000.000	35.350.000	20	35.350.000
7	01	06	01	2.03	14		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	1	jenis			100.000	1	100.000
7	01	06	01	2.03	15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2	jenis		1.440.000	1.440.000	2	1.440.000
7	01	06	01	2.03	16		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	10	jenis			1.200.000	10	1.200.000
7	01	06	01	2.03	17		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	2	jenis			24.000.000	2	24.000.000
7	01	06	01	2.03	18		Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	3	OK		17.200.000	17.200.000	3	17.544.000
								Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	36	OK		9.000.000	9.000.000	36	9.000.000
7	01	06	01	2.03	19		Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit					
7	01	06	01	2.03	20		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit					
7	01	06	01	2.03	21		Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan	2	jenis		4.500.000	4.500.000	2	4.500.000
7	01	06	01	2.03	22		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		unit					
7	01	06	01	2.03	23		Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
7	01	06	01	2.03	24		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		jenis					
7	01	06	01	2.03	25		Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan		unit					
7	01	06	01	2.03	26		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara rutin/berkala		unit					
7	01	06	01	2.03	27		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala	2	unit				2	-
7	01	06	01	2.03	28		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	2	jenis		1.500.000		2	10.000.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	06	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit					
7	01	06	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	4	unit		28.000.000	21.400.000	4	21.614.000
7	01	06	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set			1.000.000	5	1.010.000
7	01	06	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set			1.417.500	5	1.431.675
7	01	06	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
7	01	06	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	06	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	06	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	06	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		-	-	100	18.000.000
7	01	06	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
7	01	06	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	06	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	06	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	06	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	29	stell/ pasang				36	18.000.000
7	01	06	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang					
7	01	06	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan		orang					
7	01	06	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis		orang					
7	01	06	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100,00	%		-	6.100.000		6.500.000
7	01	06	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100,00	%		-	5.000.000		5.000.000
7	01	06	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan	1	kali			2.500.000	1	2.500.000
7	01	06	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit kerja kecamatan yang bekerja dengan efektif	9	unit kerja			2.500.000	9	2.500.000
7	01	06	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100,00	%		-	600.000		1.000.000
7	01	06	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan	1	dokumen			100.000	1	500.000
7	01	06	02	2.02	02	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis dan mutu layanan SPM yang difasilitasi	26	SPM			500.000	26	500.000
7	01	06	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis pelaksanaan pelayanan yang telah terlaksana dengan efektif		jenis					
7	01	06	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Cakupan koordinasi dalam rangka pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100,00	%		-	500.000		500.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	06	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi	1	kali			500.000	1	500.000
7	01	06	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang dipelihara		unit					
7	01	06	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100,00			-	-		-
7	01	06	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	2	laporan					
7	01	06	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah urusan pemerintahan nonperizinan yang dilayani kecamatan		jenis					
7	01	06	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilaksanakan		jenis					
7	01	06	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100,00	%		1.089.070.000	1.108.963.000		1.117.893.630
7	01	06	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa yang dilakukan koordinasi dalam rangka pemberdayaan desa	100,00	%		-	1.900.000		1.900.000
7	01	06	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah perencanaan	14	desa			1.400.000	14	1.400.000
7	01	06	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka sinkronisasi program kerja dan kegiatan	1	kali			250.000	1	250.000
7	01	06	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1	kali			250.000	1	250.000
7	01	06	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang dilakukan pemberdayaan kelurahan	100,00			1.089.070.000	1.107.063.000		1.115.993.630
7	01	06	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah di kelurahan	1	kelurahan	Honor/Jasa Upah Kerja bagi Kepala Lingkungan, Kader Posyandu, Kader Kelurahan, LPMK	251.070.000	214.000.000	1	214.000.000
7	01	06	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	1	unit/ jenis	DAU tambahan dan Dana Pendamping Kelurahan	772.000.000	893.063.000	1	901.993.630
7	01	06	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dilaksanakan fasilitasi dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat	1	kelurahan	Operasional Kelurahan	66.000.000			
7	01	06	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	1	kelurahan					
7	01	06	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	%		206.200.000	198.110.000		198.110.000
7	01	06	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	%		206.200.000	195.700.000		195.700.000
7	01	06	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah pertemuan dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1	kali		8.000.000	2.500.000	1	2.500.000
7	01	06	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diberikan insentif	1.932	OB	Honor/Jasa Upah Kerja bagi guru mengaji/guru sekolah minggu	198.200.000	193.200.000	1.932	193.200.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	06	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam rangka penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	100,00	%		-	2.410.000		2.410.000
7	01	06	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Polri	12	laporan			2.410.000	12	2.410.000
7	01	06	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	100,00	%		-	2.000.000		2.000.000
7	01	06	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah	100,00	%		-	2.000.000		2.000.000
7	01	06	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	1	kegiatan			1.000.000	1	1.000.000
7	01	06	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		orang					
7	01	06	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah peserta fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		orang					
7	01	06	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya		kali					
7	01	06	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah konflik sosial yang ditangani		kasus					
7	01	06	05	2.01	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi		kali					
7	01	06	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal		laporan					
7	01	06	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	kali			1.000.000	1	1.000.000
7	01	06	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100,00	%		21.900.000	18.100.000		18.100.000
7	01	06	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100,00	%		21.900.000	18.100.000		18.100.000
7	01	06	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	9	desa			900.000	9	900.000
7	01	06	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9	desa			900.000	9	900.000
7	01	06	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	9	desa		21.900.000	7.500.000	9	7.500.000
7	01	06	06	2.01	04	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		desa					

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	06	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9	desa		900.000	9	900.000
7	01	06	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3	desa		3.000.000		3.000.000
7	01	06	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	9	desa		900.000	9	900.000
7	01	06	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang diberikan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		desa				
7	01	06	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	9	desa		900.000	9	900.000
7	01	06	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		desa				
7	01	06	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9	desa		900.000	9	900.000
7	01	06	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	9	desa		900.000	9	900.000
7	01	06	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		desa				
7	01	06	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	2	desa		400.000	2	400.000
7	01	06	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		desa				
7	01	06	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	9	desa		900.000	9	900.000
7	01	06	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan pelaksanaan Koordinasi Pendampingan Desa		laporan				
7	01	06	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		laporan				
7	01	07				Kecamatan Walenrang Barat				1.442.614.271	1.581.107.375		1.633.648.636
7	01	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%	1.294.614.271	1.447.919.375	100	1.500.060.636
7	01	07	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%	-	13.000.000	100	13.000.000
7	01	07	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan	2.500.000	2	2.500.000
7	01	07	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website	5.000.000		5.000.000
7	01	07	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan	2.000.000	4	2.000.000
7	01	07	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)	2.500.000	6	2.500.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	07	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		1.000.000	1	1.000.000
7	01	07	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		1.092.014.271	1.211.150.035	100	1.253.452.786
7	01	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	180	OB		1.092.014.271	1.208.650.035	180	1.250.952.786
7	01	07	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			500.000	3	500.000
7	01	07	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			1.000.000	14	1.000.000
7	01	07	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan			1.000.000	1	1.000.000
7	01	07	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		202.600.000	221.769.340	100	222.157.850
							Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
7	01	07	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	500	Surat		15.399.000	15.552.990	500	15.552.990
7	01	07	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		1.760.400	1.778.004	12	1.778.004
7	01	07	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB					
7	01	07	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	11	unit		6.750.000	6.750.000	11	6.750.000
7	01	07	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	120	OB		56.760.000	56.760.000	120	56.760.000
7	01	07	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB		11.235.000	11.347.350	0	11.347.350
7	01	07	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan	1	unit/ paket			500.000	1	500.000
7	01	07	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	25	Jenis		4.079.600	4.120.396	25	4.120.396
7	01	07	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2	Jenis		1.960.000	1.979.600	2	1.979.600
7	01	07	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	jenis			500.000	10	500.000
7	01	07	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20	unit		10.250.000	10.250.000	20	10.250.000
7	01	07	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	1	jenis			100.000	1	100.000
7	01	07	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2	jenis		3.000.000	3.000.000	2	3.000.000
7	01	07	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	10	jenis			1.200.000	10	1.200.000
7	01	07	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	2	jenis		24.400.000	24.400.000	2	24.400.000
7	01	07	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	1	OK		6.100.000	6.100.000	1	6.222.000
							Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	129	OK		32.255.000	32.255.000	129	32.255.000
7	01	07	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit					
7	01	07	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit					
7	01	07	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan	1	jenis			7.025.000	1	7.025.000
7	01	07	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	2	unit			2.500.000	2	2.500.000
7	01	07	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	07	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	2	jenis			2.500.000	2	2.500.000
7	01	07	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan		unit					
7	01	07	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara rutin/berkala		unit					
7	01	07	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala	2	unit			2.500.000	2	2.500.000
7	01	07	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	2	jenis		4.000.000	4.000.000	2	4.000.000
7	01	07	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit					
7	01	07	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	11	unit		24.651.000	24.651.000	11	24.897.510
7	01	07	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set			1.000.000	5	1.010.000
7	01	07	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set			1.000.000	5	1.010.000
7	01	07	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
7	01	07	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	07	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	07	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	07	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		-	2.000.000	100	11.450.000
7	01	07	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
7	01	07	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		stell/ pasang					9.450.000
7	01	07	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	07	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	07	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	07	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	3	orang			2.000.000	3	2.000.000
7	01	07	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan		orang					
7	01	07	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis		orang					
7	01	07	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100,00	%		-	3.988.000		4.388.000
7	01	07	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100,00	%		-	2.888.000		2.888.000
7	01	07	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan	1	kali			1.988.000	1	1.988.000
7	01	07	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit kerja kecamatan yang bekerja dengan efektif	9	unit kerja			900.000	9	900.000
7	01	07	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100,00	%		-	600.000		1.000.000
7	01	07	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan	1	dokumen			100.000	1	500.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	07	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis dan mutu layanan SPM yang difasilitasi	26	SPM			500.000	26	500.000
7	01	07	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis pelaksanaan pelayanan yang telah terlaksana dengan efektif		jenis					
7	01	07	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Cakupan koordinasi dalam rangka pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100,00	%		-	500.000		500.000
7	01	07	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi	1	kali			500.000	1	500.000
7	01	07	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang dipelihara		unit					
7	01	07	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100,00			-	-		-
7	01	07	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	2	laporan					
7	01	07	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah urusan pemerintahan nonperizinan yang dilayani kecamatan		jenis					
7	01	07	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilaksanakan		jenis					
7	01	07	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100,00	%		-	1.100.000		1.100.000
7	01	07	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa yang dilakukan koordinasi dalam rangka pemberdayaan desa		%		-	1.100.000		1.100.000
7	01	07	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah perencanaan	6	desa			600.000	6	600.000
7	01	07	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Laporan pelaksanaan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1	laporan			250.000	1	250.000
7	01	07	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1	kali			250.000	1	250.000
7	01	07	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	%		108.000.000	110.900.000		110.900.000
7	01	07	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	%		108.000.000	108.500.000		108.500.000
7	01	07	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah pertemuan dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1	kali			500.000	1	500.000
7	01	07	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diberikan insentif	1.080	OB	Honor/Jasa Upah Kerja bagi guru mengaji/guru sekolah minggu	108.000.000	108.000.000	1.080	108.000.000
7	01	07	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam rangka penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	100,00	%		-	2.400.000		2.400.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	07	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Polri	12	laporan			2.400.000	12	2.400.000
7	01	07	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	100,00	%		-	2.000.000		2.000.000
7	01	07	05	2.01		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah</i>	<i>100,00</i>	<i>%</i>		-	<i>2.000.000</i>		<i>2.000.000</i>
7	01	07	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	1	kegiatan			1.000.000	1	1.000.000
7	01	07	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		orang					
7	01	07	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah peserta fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		orang					
7	01	07	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya		kali					
7	01	07	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah konflik sosial yang ditangani		kasus					
7	01	07	05	2.01	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi		kali					
7	01	07	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal		laporan					
7	01	07	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	kali			1.000.000	1	1.000.000
7	01	07	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100,00	%		40.000.000	15.200.000		15.200.000
7	01	07	06	2.01		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</i>	<i>100,00</i>	<i>%</i>		<i>40.000.000</i>	<i>15.200.000</i>		<i>15.200.000</i>
7	01	07	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6	desa			600.000	6	600.000
7	01	07	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6	desa			600.000	6	600.000
7	01	07	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	6	desa	40.000.000		10.000.000	6	10.000.000
7	01	07	06	2.01	04	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		desa					
7	01	07	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6	desa			600.000	6	600.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	07	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		desa					
7	01	07	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	6	desa			600.000	6	600.000
7	01	07	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang diberikan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		desa					
7	01	07	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	6	desa			600.000	6	600.000
7	01	07	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		desa					
7	01	07	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6	desa			600.000	6	600.000
7	01	07	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6	desa			600.000	6	600.000
7	01	07	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		desa					
7	01	07	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	2	desa			400.000	2	400.000
7	01	07	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		desa					
7	01	07	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	6	desa			600.000	6	600.000
7	01	07	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan pelaksanaan Koordinasi Pendampingan Desa		laporan					
7	01	07	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		laporan					
7	01	08				Kecamatan Walenrang Utara					3.503.850.032	3.845.139.901		3.955.659.251
7	01	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		2.702.236.532	2.552.086.901	100	2.661.275.621
7	01	08	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		5.000.000	13.000.000	100	13.000.000
7	01	08	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		2.500.000	2	2.500.000
7	01	08	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website	5.000.000	5.000.000		5.000.000
7	01	08	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		2.000.000	4	2.000.000
7	01	08	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)		2.500.000	6	2.500.000
7	01	08	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		1.000.000	1	1.000.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	08	01	2.02	Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		2.492.296.532	2.309.063.446	100	2.389.793.166
7	01	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	396	OB	2.492.296.532	2.306.563.446	396	2.387.293.166
7	01	08	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen		500.000	3	500.000
7	01	08	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan		1.000.000	14	1.000.000
7	01	08	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan		1.000.000	1	1.000.000
7	01	08	01	2.03	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		204.940.000	230.023.455	100	240.482.455
						Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
7	01	08	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	230	surat	22.599.000	22.824.990	230	22.824.990
7	01	08	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan	13.201.500	13.333.515	12	13.333.515
7	01	08	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB				
7	01	08	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	4	unit	13.850.000	13.850.000	4	13.850.000
7	01	08	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	120	OB	63.120.000	63.120.000	120	63.120.000
7	01	08	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB	8.195.000	8.276.950	0	8.276.950
7	01	08	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan		unit/ paket				-
7	01	08	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	25	Jenis	6.000.000	9.317.500	25	9.317.500
7	01	08	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	Jenis	2.840.500	2.840.500	2	2.840.500
7	01	08	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	jenis		2.000.000	10	2.000.000
7	01	08	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		unit	5.000.000		10	5.000.000
7	01	08	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan		jenis				
7	01	08	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2	jenis	2.400.000	2.400.000	2	2.400.000
7	01	08	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	10	jenis		3.000.000	10	3.000.000
7	01	08	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	2	jenis	20.000.000	21.700.000	2	21.700.000
7	01	08	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	3	OK	7.800.000	12.950.000	3	13.209.000
						Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	138	OK		33.410.000	34.410.000	138	34.410.000
7	01	08	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit				
7	01	08	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit				
7	01	08	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan	2	jenis		-	2	-
7	01	08	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		unit				
7	01	08	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis				
7	01	08	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		jenis				

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan					Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
												Target	Pagu Indikatif
(1)	(2)					Tolok Ukur		(7)	(8)		(9)	(10)	(11)
7	01	08	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan		unit				
7	01	08	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara rutin/berkala		unit				
7	01	08	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala	2	unit			2	-
7	01	08	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	2	jenis			2	5.000.000
7	01	08	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit				
7	01	08	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	6	unit	6.524.000	20.000.000	6	20.200.000
7	01	08	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set			5	-
7	01	08	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set			5	-
7	01	08	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set				
7	01	08	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit				
7	01	08	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit				
7	01	08	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat	6	unit				
7	01	08	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%	-	-	100	18.000.000
7	01	08	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit				
7	01	08	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		stell/ pasang				
7	01	08	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang				
7	01	08	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang				
7	01	08	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	33	stell/ pasang			36	18.000.000
7	01	08	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang				
7	01	08	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan		orang				
7	01	08	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis		orang				
7	01	08	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100,00	%	-	3.980.000		4.380.000
7	01	08	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100,00	%	-	2.880.000		2.880.000
7	01	08	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan	1	kali		1.980.000	1	1.980.000
7	01	08	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit kerja kecamatan yang bekerja dengan efektif	9	unit kerja		900.000	9	900.000
7	01	08	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100,00	%	-	600.000		1.000.000
7	01	08	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan	1	dokumen		100.000	1	500.000
7	01	08	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis dan mutu layanan SPM yang difasilitasi	26	SPM		500.000	26	500.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	08	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis pelaksanaan pelayanan yang telah terlaksana dengan efektif		jenis					
7	01	08	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Cakupan koordinasi dalam rangka pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100,00	%		-	500.000		500.000
7	01	08	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi	1	kali			500.000	1	500.000
7	01	08	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang dipelihara		unit					
7	01	08	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100,00			-	-		-
7	01	08	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	2	laporan					
7	01	08	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah urusan pemerintahan nonperizinan yang dilayani kecamatan		jenis					
7	01	08	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilaksanakan		jenis					
7	01	08	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100,00	%		598.613.500	1.090.263.000		1.099.193.630
7	01	08	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa yang dilakukan koordinasi dalam rangka pemberdayaan desa		%		-	1.200.000		1.200.000
7	01	08	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah perencanaan	14	desa			700.000	14	700.000
7	01	08	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka sinkronisasi program kerja dan kegiatan	1	kali			250.000	1	250.000
7	01	08	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1	kali			250.000	1	250.000
7	01	08	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang dilakukan pemberdayaan kelurahan	100,00			598.613.500	1.089.063.000		1.097.993.630
7	01	08	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah di kelurahan	1	kelurahan	Honor/Jasa Upah Kerja bagi Kepala Lingkungan, Kader Posyandu, Kader Kelurahan, LPMK	232.613.500	196.000.000	1	196.000.000
7	01	08	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	1	unit/ jenis	DAU tambahan dan Dana Pendamping Kelurahan	300.000.000	893.063.000	1	901.993.630
7	01	08	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dilaksanakan fasilitasi dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat		kelurahan	Operasional Kelurahan	66.000.000			-
7	01	08	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	1	kelurahan					
7	01	08	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	%		173.000.000	172.910.000		172.910.000
7	01	08	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	%		173.000.000	170.500.000		170.500.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	08	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah pertemuan dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1	kali			2.500.000	1	2.500.000
7	01	08	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diberikan insentif	1.680	OB	Honor/Jasa Upah Kerja bagi guru mengaji/guru sekolah minggu	173.000.000	168.000.000	1.680	168.000.000
7	01	08	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam rangka penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	100,00	%		-	2.410.000		2.410.000
7	01	08	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Polri	12	laporan			2.410.000	12	2.410.000
7	01	08	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	100,00	%		-	2.000.000		2.000.000
7	01	08	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah	100,00	%		-	2.000.000		2.000.000
7	01	08	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	1	kegiatan			1.000.000	1	1.000.000
7	01	08	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		orang					
7	01	08	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah peserta fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		orang					
7	01	08	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya		kali					
7	01	08	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah konflik sosial yang ditangani		kasus					
7	01	08	05	2.01	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi		kali					
7	01	08	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal		laporan					
7	01	08	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	kali			1.000.000	1	1.000.000
7	01	08	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100,00	%		30.000.000	23.900.000		15.900.000
7	01	08	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100,00	%		30.000.000	23.900.000		15.900.000
7	01	08	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10	desa			1.000.000	10	1.000.000
7	01	08	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10	desa			1.000.000	10	1.000.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	08	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	10	desa		30.000.000	7.500.000	10	7.500.000
7	01	08	06	2.01	04	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		desa					
7	01	08	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10	desa			1.000.000	10	1.000.000
7	01	08	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	8	desa			8.000.000		
7	01	08	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	10	desa			1.000.000	10	1.000.000
7	01	08	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang diberikan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		desa					
7	01	08	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	10	desa			1.000.000	10	1.000.000
7	01	08	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		desa					
7	01	08	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10	desa			1.000.000	10	1.000.000
7	01	08	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	10	desa			1.000.000	10	1.000.000
7	01	08	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		desa					
7	01	08	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	2	desa			400.000	2	400.000
7	01	08	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		desa					
7	01	08	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	10	desa			1.000.000	10	1.000.000
7	01	08	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan pelaksanaan Koordinasi Pendampingan Desa		laporan					
7	01	08	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		laporan					
7	01	09				Kecamatan Lamasi					3.510.677.232	3.732.736.714		2.942.255.140
7	01	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		2.141.607.232	2.329.873.714	100	2.436.055.140
7	01	09	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		5.000.000	13.000.000	100	13.000.000
7	01	09	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		2.500.000	2	2.500.000
7	01	09	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website	5.000.000	5.000.000		5.000.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	09	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		2.000.000	4	2.000.000
7	01	09	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)		2.500.000	6	2.500.000
7	01	09	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		1.000.000	1	1.000.000
7	01	09	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		1.718.907.232	2.041.820.870	100	2.113.197.101
7	01	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	324	OB		1.718.907.232	2.039.320.870	324	2.110.697.101
7	01	09	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			500.000	3	500.000
7	01	09	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			1.000.000	14	1.000.000
7	01	09	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan			1.000.000	1	1.000.000
7	01	09	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		417.700.000	275.052.844	100	291.858.039
							Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
7	01	09	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	500	surat		27.600.000	27.876.000	500	27.876.000
7	01	09	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		41.400.000	41.814.000	12	41.814.000
7	01	09	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB					
7	01	09	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	6	unit		8.000.000	8.000.000	6	8.000.000
7	01	09	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	72	OB		47.880.000	47.880.000	72	47.880.000
7	01	09	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB		9.199.400	9.291.394	0	9.291.394
7	01	09	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan	1	unit/ paket			500.000	1	500.000
7	01	09	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	25	Jenis		12.611.200	12.611.200	25	12.611.200
7	01	09	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2	Jenis		6.365.250	6.365.250	2	6.365.250
7	01	09	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	jenis		3.611.500	3.611.500	10	3.611.500
7	01	09	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	64	unit		227.000.000	63.035.000	64	63.035.000
7	01	09	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	1	jenis			500.000	1	100.000
7	01	09	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2	jenis			2.000.000	2	2.000.000
7	01	09	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	10	jenis			1.200.000	10	1.200.000
7	01	09	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	2	jenis			10.000.000	2	10.000.000
7	01	09	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	2	OK		9.751.000	9.751.000	2	9.946.020
							Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	60	OK		15.000.000	15.000.000	60	15.000.000
7	01	09	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit					
7	01	09	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	09	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan	2	jenis			-	2	-
7	01	09	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	5	unit		2.576.250	1.000.000		1.000.000
7	01	09	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis				13	16.879.000
7	01	09	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	10	jenis			1.500.000		1.500.000
7	01	09	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan		unit					
7	01	09	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara rutin/berkala		unit					
7	01	09	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala	2	unit				2	-
7	01	09	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor		jenis					
7	01	09	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit					
7	01	09	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	9	unit		6.705.400	10.700.000	9	10.807.000
7	01	09	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set			1.000.000	5	1.010.000
7	01	09	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set			1.417.500	5	1.431.675
7	01	09	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
7	01	09	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	09	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	09	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	09	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		-	-	100	18.000.000
7	01	09	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
7	01	09	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	09	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	09	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	09	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	33	stell/ pasang				36	18.000.000
7	01	09	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang					
7	01	09	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan		orang					
7	01	09	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis		orang					
7	01	09	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100,00	%		16.500.000	4.500.000		4.900.000
7	01	09	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100,00	%		15.000.000	3.400.000		3.400.000
7	01	09	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan	1	kali		15.000.000	2.500.000	1	2.500.000
7	01	09	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit kerja kecamatan yang bekerja dengan efektif	9	unit kerja			900.000	9	900.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	09	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100,00	%		-	600.000		1.000.000
7	01	09	02	2.02	01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan	1	dokumen			100.000	1	500.000
7	01	09	02	2.02	02 Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis dan mutu layanan SPM yang difasilitasi	26	SPM			500.000	26	500.000
7	01	09	02	2.02	03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis pelaksanaan pelayanan yang telah terlaksana dengan efektif		jenis					
7	01	09	02	2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Cakupan koordinasi dalam rangka pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100,00	%		-	500.000		500.000
7	01	09	02	2.03	01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi	1	kali			500.000	1	500.000
7	01	09	02	2.03	02 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang dipelihara		unit					
7	01	09	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100,00			1.500.000	-		-
7	01	09	02	2.04	01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan		laporan		1.500.000			-
7	01	09	02	2.04	02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah urusan pemerintahan nonperizinan yang dilayani kecamatan		jenis					
7	01	09	02	2.04	03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilaksanakan		jenis					
7	01	09	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100,00	%		1.089.070.000	1.164.063.000		271.000.000
7	01	09	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa yang dilakukan koordinasi dalam rangka pemberdayaan desa		%		-	1.200.000		1.200.000
7	01	09	03	2.01	01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah perencanaan	14	desa			700.000	14	700.000
7	01	09	03	2.01	02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka sinkronisasi program kerja dan kegiatan	1	kali			250.000	1	250.000
7	01	09	03	2.01	03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1	kali			250.000	1	250.000
7	01	09	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang dilakukan pemberdayaan kelurahan	100,00			1.089.070.000	1.162.863.000		269.800.000
7	01	09	03	2.02	01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah di kelurahan	1	kelurahan	Honor/Jasa Upah Kerja bagi Kepala Lingkungan, Kader Posyandu, Kader Kelurahan, LPMK	382.400.000	269.800.000	1	269.800.000
7	01	09	03	2.02	02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	1	unit/ jenis	DAU tambahan dan Dana Pendamping Kelurahan	640.670.000	893.063.000		
7	01	09	03	2.02	03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dilaksanakan fasilitasi dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat		kelurahan	Operasional Kelurahan	66.000.000			
7	01	09	03	2.02	04 Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	1	kelurahan					-

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	09	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	%		223.500.000	214.200.000		214.200.000
7	01	09	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	%		223.500.000	213.700.000		213.700.000
7	01	09	04	2.01	01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah pertemuan dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1	kali		10.800.000	2.500.000	1	2.500.000
7	01	09	04	2.01	02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diberikan insentif	2.112	OB	Honor/Jasa Upah Kerja bagi guru mengaji/guru sekolah minggu	212.700.000	211.200.000	2.112	211.200.000
7	01	09	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam rangka penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	100,00	%		-	500.000		500.000
7	01	09	04	2.02	01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Polri	12	laporan			500.000	12	500.000
7	01	09	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	100,00	%		-	1.000.000		1.000.000
7	01	09	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah	100,00	%		-	1.000.000		1.000.000
7	01	09	05	2.01	01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	1	kegiatan			500.000	1	500.000
7	01	09	05	2.01	02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		orang					
7	01	09	05	2.01	03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah peserta fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		orang					
7	01	09	05	2.01	04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrastuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya		kali					
7	01	09	05	2.01	05 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah konflik sosial yang ditangani		kasus					
7	01	09	05	2.01	06 Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi		kali					
7	01	09	05	2.01	07 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal		laporan					
7	01	09	05	2.01	08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	kali			500.000	1	500.000
7	01	09	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100,00	%		40.000.000	19.100.000		15.100.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	09	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100,00	%		40.000.000	19.100.000		15.100.000
7	01	09	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	9	desa			900.000	9	900.000
7	01	09	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9	desa			900.000	9	900.000
7	01	09	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	9	desa		40.000.000	7.500.000	9	7.500.000
7	01	09	06	2.01	04	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		desa					
7	01	09	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9	desa			900.000	9	900.000
7	01	09	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4	desa			4.000.000		
7	01	09	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	9	desa			900.000	9	900.000
7	01	09	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang diberikan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		desa					
7	01	09	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	9	desa			900.000	9	900.000
7	01	09	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		desa					
7	01	09	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9	desa			900.000	9	900.000
7	01	09	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	9	desa			900.000	9	900.000
7	01	09	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		desa					
7	01	09	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	2	desa			400.000	2	400.000
7	01	09	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		desa					
7	01	09	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	9	desa			900.000	9	900.000
7	01	09	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan pelaksanaan Koordinasi Pendampingan Desa		laporan					
7	01	09	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		laporan					
7	01	10				Kecamatan Kamanre					2.722.091.763	3.107.758.739		3.188.589.448
7	01	10	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		1.533.871.763	1.808.255.739	100	1.881.755.818

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	10	01	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		5.000.000	13.000.000	100	13.000.000
7	01	10	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen		2.500.000	2	2.500.000
7	01	10	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan	35	Program dan kegiatan	5.000.000	5.000.000		5.000.000
7	01	10	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen		2.000.000	4	2.000.000
7	01	10	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan		2.500.000	6	2.500.000
7	01	10	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen		1.000.000	1	1.000.000
7	01	10	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%	1.272.821.763	1.577.097.239	100	1.632.208.143
7	01	10	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	204	OB	1.272.821.763	1.574.597.239	204	1.629.708.143
7	01	10	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen		500.000	3	500.000
7	01	10	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan		1.000.000	14	1.000.000
7	01	10	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan		1.000.000	1	1.000.000
7	01	10	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%	245.550.000	218.158.500	100	221.547.675
							Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%				
7	01	10	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	230	surat	8.800.000	8.888.000	230	8.888.000
7	01	10	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan	16.800.000	16.968.000	12	16.968.000
7	01	10	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB				
7	01	10	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	6	unit	13.500.000	13.500.000	6	13.500.000
7	01	10	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	144	OB	89.880.000	89.880.000	144	89.880.000
7	01	10	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB	7.500.000	7.575.000	0	7.575.000
7	01	10	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan	1	unit/ paket		500.000	1	500.000
7	01	10	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	25	Jenis	5.000.000	5.000.000	25	5.000.000
7	01	10	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2	Jenis	4.500.000	4.500.000	2	4.500.000
7	01	10	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	jenis		500.000	10	500.000
7	01	10	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20	unit	11.000.000	11.110.000	20	11.110.000
7	01	10	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	1	jenis		100.000	1	100.000
7	01	10	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2	jenis	2.580.000	2.580.000	2	2.580.000
7	01	10	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	10	jenis		1.200.000	10	1.200.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	10	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	2	jenis		7.670.000	7.670.000	2	7.670.000
7	01	10	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	5	OK		25.000.000	25.000.000	5	25.500.000
							Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	0	OK			-	0	-
7	01	10	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit					
7	01	10	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit		32.550.000			
7	01	10	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan	2	jenis			-	2	-
7	01	10	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		unit					
7	01	10	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
7	01	10	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		jenis					
7	01	10	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan		unit					
7	01	10	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara rutin/berkala	6	unit					
7	01	10	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala	2	unit				2	-
7	01	10	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	2	jenis		7.270.000	7.270.000	2	10.000.000
7	01	10	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit					
7	01	10	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	6	unit		13.500.000	13.500.000	6	13.635.000
7	01	10	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set			1.000.000	5	1.010.000
7	01	10	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set			1.417.500	5	1.431.675
7	01	10	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
7	01	10	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	10	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	10	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	10	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		10.500.000	-	100	15.000.000
7	01	10	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
7	01	10	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	21	stell/ pasang		10.500.000			
7	01	10	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	10	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang				25	15.000.000
7	01	10	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	10	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang					
7	01	10	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	21	orang					
7	01	10	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis		orang					

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	10	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100,00	%		-	6.980.000		7.380.000
7	01	10	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100,00	%		-	2.880.000		2.880.000
7	01	10	02	2.01	01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan	1	kali			1.980.000	1	1.980.000
7	01	10	02	2.01	02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit kerja kecamatan yang bekerja dengan efektif	9	unit kerja			900.000	9	900.000
7	01	10	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100,00	%		-	600.000		1.000.000
7	01	10	02	2.02	01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan	1	dokumen			100.000	1	500.000
7	01	10	02	2.02	02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis dan mutu layanan SPM yang difasilitasi	26	SPM			500.000	26	500.000
7	01	10	02	2.02	03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis pelaksanaan pelayanan yang telah terlaksana dengan efektif		jenis					
7	01	10	02	2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Cakupan koordinasi dalam rangka pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100,00	%		-	500.000		500.000
7	01	10	02	2.03	01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi	1	kali			500.000	1	500.000
7	01	10	02	2.03	02 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang dipelihara		unit					
7	01	10	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100,00			-	3.000.000		3.000.000
7	01	10	02	2.04	01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	2	laporan			3.000.000	2	3.000.000
7	01	10	02	2.04	02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah urusan pemerintahan nonperizinan yang dilayani kecamatan		jenis					
7	01	10	02	2.04	03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilaksanakan		jenis					
7	01	10	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100,00	%		1.056.520.000	1.139.813.000		1.149.743.630
7	01	10	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa yang dilakukan koordinasi dalam rangka pemberdayaan desa		%		-	1.900.000		1.900.000
7	01	10	03	2.01	01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah perencanaan	14	desa			1.400.000	14	1.400.000
7	01	10	03	2.01	02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka sinkronisasi program kerja dan kegiatan	1	kali			250.000	1	250.000
7	01	10	03	2.01	03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1	kali			250.000	1	250.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	10	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang dilakukan pemberdayaan kelurahan	100,00			1.056.520.000	1.137.913.000		1.147.843.630
7	01	10	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah di kelurahan	1	kelurahan	Honor/Jasa Upah Kerja bagi Kepala Lingkungan, Kader Posyandu, Kader Kelurahan, LPMK	248.600.000	144.600.000	1	144.600.000
7	01	10	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	1	unit/ jenis	DAU tambahan dan Dana Pendamping Kelurahan	741.920.000	893.063.000	1	901.993.630
7	01	10	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dilaksanakan fasilitasi dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat	1	kelurahan	Operasional Kelurahan	66.000.000	100.000.000	1	101.000.000
7	01	10	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	1	kelurahan			250.000	1	250.000
7	01	10	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	%		118.200.000	122.610.000		122.610.000
7	01	10	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	%		118.200.000	120.200.000		120.200.000
7	01	10	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah pertemuan dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1	kali			5.000.000	1	5.000.000
7	01	10	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diberikan insentif	1.152	OB	Honor/Jasa Upah Kerja bagi guru mengaji/guru sekolah minggu	118.200.000	115.200.000	1.152	115.200.000
7	01	10	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam rangka penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	100,00	%		-	2.410.000		2.410.000
7	01	10	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Poli	12	laporan			2.410.000	12	2.410.000
7	01	10	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	100,00	%		-	2.000.000		2.000.000
7	01	10	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah	100,00	%		-	2.000.000		2.000.000
7	01	10	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	1	kegiatan			1.000.000	1	1.000.000
7	01	10	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		orang					
7	01	10	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah peserta fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		orang					
7	01	10	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrusuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya		kali					
7	01	10	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah konflik sosial yang ditangani		kasus					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	10	05	2.01	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi		kali					
7	01	10	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal		laporan					
7	01	10	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	kali			1.000.000	1	1.000.000
7	01	10	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100,00	%		13.500.000	28.100.000		25.100.000
7	01	10	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100,00	%		13.500.000	28.100.000		25.100.000
7	01	10	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7	desa			1.400.000	7	1.400.000
7	01	10	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7	desa			1.400.000	7	1.400.000
7	01	10	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	7	desa		13.500.000	13.500.000	7	13.500.000
7	01	10	06	2.01	04	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		desa					
7	01	10	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	7	desa			1.400.000	7	1.400.000
7	01	10	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3	desa			3.000.000		
7	01	10	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7	desa			1.400.000	7	1.400.000
7	01	10	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang diberikan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		desa					
7	01	10	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	7	desa			1.400.000	7	1.400.000
7	01	10	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		desa					
7	01	10	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7	desa			1.400.000	7	1.400.000
7	01	10	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	7	desa			1.400.000	7	1.400.000
7	01	10	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		desa					
7	01	10	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	2	desa			400.000	2	400.000
7	01	10	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		desa					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	10	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	7	desa			1.400.000	7	1.400.000
7	01	10	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan pelaksanaan Koordinasi Pendampingan Desa		laporan					
7	01	10	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		laporan					
7	01	11				Kecamatan Bajo Barat					1.658.718.405	1.677.261.680		1.727.620.183
7	01	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		1.496.708.405	1.492.671.680	100	1.542.630.183
7	01	11	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		5.000.000	13.000.000	100	13.000.000
7	01	11	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		2.500.000	2	2.500.000
7	01	11	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website	5.000.000	5.000.000		5.000.000
7	01	11	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		2.000.000	4	2.000.000
7	01	11	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)		2.500.000	6	2.500.000
7	01	11	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		1.000.000	1	1.000.000
7	01	11	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		1.284.118.405	1.218.028.680	100	1.260.572.183
7	01	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	216	OB		1.284.118.405	1.215.528.680	216	1.258.072.183
7	01	11	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			500.000	3	500.000
7	01	11	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			1.000.000	14	1.000.000
7	01	11	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan			1.000.000	1	1.000.000
7	01	11	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		207.590.000	261.643.000	100	259.608.000
							Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
7	01	11	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	500	Surat		19.000.000	19.190.000	500	19.190.000
7	01	11	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		3.000.000	3.030.000	12	3.030.000
7	01	11	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB					
7	01	11	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	11	unit		13.650.000	13.650.000	11	13.650.000
7	01	11	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	120	OB		73.440.000	73.440.000	120	73.440.000
7	01	11	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB		5.800.000	5.858.000	0	5.858.000
7	01	11	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan	1	unit/ paket			500.000	1	500.000
7	01	11	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	25	Jenis		3.000.000	3.030.000	25	3.030.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	11	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	Jenis		2.000.000	2.020.000	2	2.020.000
7	01	11	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	jenis			500.000	10	500.000
7	01	11	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20	unit			30.000.000	20	30.000.000
7	01	11	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	1	jenis			500.000	1	100.000
7	01	11	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2	jenis		1.200.000	1.200.000	2	1.200.000
7	01	11	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	10	jenis			1.200.000	10	1.200.000
7	01	11	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	2	jenis		18.000.000	18.000.000	2	18.000.000
7	01	11	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	6	OK		31.000.000	31.000.000	6	31.620.000
							Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	60	OK		15.000.000	15.000.000	60	15.000.000
7	01	11	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit					
7	01	11	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit					
7	01	11	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan	1	jenis			7.025.000	1	7.025.000
7	01	11	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	2	unit			2.500.000	2	2.500.000
7	01	11	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
7	01	11	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	2	jenis			2.500.000	2	2.500.000
7	01	11	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan		unit					
7	01	11	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara rutin/berkala		unit			2.500.000		
7	01	11	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala	2	unit			2.500.000	2	2.500.000
7	01	11	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	2	jenis			2.000.000	2	2.000.000
7	01	11	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit					
7	01	11	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	11	unit		22.500.000	22.500.000	11	22.725.000
7	01	11	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set			1.000.000	5	1.010.000
7	01	11	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set			1.000.000	5	1.010.000
7	01	11	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
7	01	11	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	11	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	11	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat	5	unit					
7	01	11	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		-	-	100	9.450.000
7	01	11	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
7	01	11	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		stell/ pasang					9.450.000
7	01	11	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan		stell/ pasang					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	11	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	11	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	11	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang					
7	01	11	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan		orang					
7	01	11	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis		orang					
7	01	11	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100,00	%		-	6.980.000		7.380.000
7	01	11	02	2.01		<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan</i>	<i>100,00</i>	<i>%</i>		<i>-</i>	<i>2.880.000</i>		<i>2.880.000</i>
7	01	11	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan	1	kali			1.980.000	1	1.980.000
7	01	11	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit kerja kecamatan yang bekerja dengan efektif	9	unit kerja			900.000	9	900.000
7	01	11	02	2.02		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	<i>Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	<i>100,00</i>	<i>%</i>		<i>-</i>	<i>600.000</i>		<i>1.000.000</i>
7	01	11	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan	1	dokumen			100.000	1	500.000
7	01	11	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis dan mutu layanan SPM yang difasilitasi	26	SPM			500.000	26	500.000
7	01	11	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis pelaksanaan pelayanan yang telah terlaksana dengan efektif		jenis					
7	01	11	02	2.03		<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	<i>Cakupan koordinasi dalam rangka pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum</i>	<i>100,00</i>	<i>%</i>		<i>-</i>	<i>500.000</i>		<i>500.000</i>
7	01	11	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi	1	kali			500.000	1	500.000
7	01	11	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang dipelihara		unit					
7	01	11	02	2.04		<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</i>	<i>100,00</i>			<i>-</i>	<i>3.000.000</i>		<i>3.000.000</i>
7	01	11	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	2	laporan			3.000.000	2	3.000.000
7	01	11	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah urusan pemerintahan nonperizinan yang dilayani kecamatan		jenis					
7	01	11	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilaksanakan		jenis					
7	01	11	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100,00	%		-	1.400.000		1.400.000
7	01	11	03	2.01		<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Persentase desa yang dilakukan koordinasi dalam rangka pemberdayaan desa</i>		<i>%</i>		<i>-</i>	<i>1.400.000</i>		<i>1.400.000</i>

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	11	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah perencanaan	9	desa			900.000	9	900.000
7	01	11	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Laporan pelaksanaan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1	laporan			250.000	1	250.000
7	01	11	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1	kali			250.000	1	250.000
7	01	11	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	%		152.600.000	150.000.000		150.000.000
7	01	11	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	%		152.600.000	147.600.000		147.600.000
7	01	11	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah pertemuan dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1	kali		18.000.000	18.000.000	1	18.000.000
7	01	11	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diberikan insentif	1.296	orang	Honor/Jasa Upah Kerja bagi guru mengaji/guru sekolah minggu	134.600.000	129.600.000	1.296	129.600.000
7	01	11	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam rangka penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	100,00	%		-	2.400.000		2.400.000
7	01	11	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Polri	12	laporan			2.400.000	12	2.400.000
7	01	11	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	100,00	%		-	2.000.000		2.000.000
7	01	11	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah	100,00	%		-	2.000.000		2.000.000
7	01	11	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	1	kegiatan			1.000.000	1	1.000.000
7	01	11	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		orang					
7	01	11	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah peserta fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		orang					
7	01	11	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrastuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya		kali					
7	01	11	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah konflik sosial yang ditangani		kasus					
7	01	11	05	2.01	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi		kali					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	11	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal		laporan					
7	01	11	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	kali			1.000.000	1	1.000.000
7	01	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100,00	%		9.410.000	24.210.000		24.210.000
7	01	11	06	2.01		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</i>	<i>100,00</i>	<i>%</i>		<i>9.410.000</i>	<i>24.210.000</i>		<i>24.210.000</i>
7	01	11	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	9	desa			1.800.000	9	1.800.000
7	01	11	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9	desa			1.800.000	9	1.800.000
7	01	11	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	9	desa		9.410.000	9.410.000	9	9.410.000
7	01	11	06	2.01	04	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		desa					
7	01	11	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9	desa			1.800.000	9	1.800.000
7	01	11	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		desa					
7	01	11	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	9	desa			1.800.000	9	1.800.000
7	01	11	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang diberikan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		desa					
7	01	11	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	9	desa			1.800.000	9	1.800.000
7	01	11	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		desa					
7	01	11	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9	desa			1.800.000	9	1.800.000
7	01	11	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	9	desa			1.800.000	9	1.800.000
7	01	11	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		desa					
7	01	11	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	2	desa			400.000	2	400.000
7	01	11	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		desa					
7	01	11	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	9	desa			1.800.000	9	1.800.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	11	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan pelaksanaan Koordinasi Pendampingan Desa		laporan					
7	01	11	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		laporan					
7	01	12				Kecamatan Belopa					7.449.737.301	8.160.094.693		8.343.511.800
7	01	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		3.223.057.301	3.508.782.693	100	3.652.077.280
7	01	12	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		-	13.000.000	100	13.000.000
7	01	12	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		2.500.000	2	2.500.000
7	01	12	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website		5.000.000		5.000.000
7	01	12	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		2.000.000	4	2.000.000
7	01	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan mengadakan acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)		2.500.000	6	2.500.000
7	01	12	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		1.000.000	1	1.000.000
7	01	12	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		3.018.557.301	3.272.683.193	100	3.387.139.605
7	01	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	504	OB		3.018.557.301	3.270.183.193	504	3.384.639.605
7	01	12	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			500.000	3	500.000
7	01	12	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			1.000.000	14	1.000.000
7	01	12	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan			1.000.000	1	1.000.000
7	01	12	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		204.500.000	223.099.500	100	233.937.675
							Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
7	01	12	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	230	surat		7.500.000	7.575.000	230	7.575.000
7	01	12	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		14.500.000	14.645.000	12	14.645.000
7	01	12	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB					
7	01	12	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	4	unit		10.200.000	10.200.000	4	10.200.000
7	01	12	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	192	OB		82.680.000	82.680.000	192	82.680.000
7	01	12	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB		13.200.000	13.332.000	0	13.332.000
7	01	12	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan	1	unit/ paket		1.000.000	1.000.000	1	1.000.000
7	01	12	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	25	Jenis		3.500.000	3.500.000	25	3.500.000
7	01	12	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2	Jenis		3.000.000	3.000.000	2	3.000.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	12	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	jenis		1.250.000	1.250.000	10	1.250.000
7	01	12	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20	unit			10.000.000	20	10.000.000
7	01	12	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	1	jenis			500.000	1	500.000
7	01	12	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2	jenis		2.400.000	2.400.000	2	2.400.000
7	01	12	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	10	jenis			1.200.000	10	1.200.000
7	01	12	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	2	jenis			18.000.000	2	18.000.000
7	01	12	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	6	OK		30.000.000	30.000.000	6	30.600.000
7	01	12	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	0	OK			-	0	-
7	01	12	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah mobil jabatan yang diadakan		unit		18.000.000			
7	01	12	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit					
7	01	12	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan	2	jenis			-	2	-
7	01	12	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		unit					
7	01	12	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
7	01	12	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		unit					
7	01	12	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah mebeleur yang diadakan		unit					
7	01	12	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara rutin/berkala		unit					
7	01	12	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala	2	unit				2	-
7	01	12	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	2	jenis				2	10.000.000
7	01	12	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit					
7	01	12	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	9	unit		17.270.000	21.400.000	9	21.614.000
7	01	12	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set			1.000.000	5	1.010.000
7	01	12	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set			1.417.500	5	1.431.675
7	01	12	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
7	01	12	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	12	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	12	01	2.04	01	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	12	01	2.04	02	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		-	-	100	18.000.000
7	01	12	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
7	01	12	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	12	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	12	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	12	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	30	stell/ pasang				36	18.000.000
7	01	12	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang					
7	01	12	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan		orang					
7	01	12	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis		orang					
7	01	12	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100,00	%		13.500.000	18.500.000		18.900.000
7	01	12	02	2.01		<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan</i>	<i>100,00</i>	<i>%</i>		<i>13.500.000</i>	<i>14.400.000</i>		<i>14.400.000</i>
7	01	12	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan	1	kali		13.500.000	13.500.000	1	13.500.000
7	01	12	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit kerja kecamatan yang bekerja dengan efektif	9	unit kerja			900.000	9	900.000
7	01	12	02	2.02		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	<i>Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	<i>100,00</i>	<i>%</i>		<i>-</i>	<i>600.000</i>		<i>1.000.000</i>
7	01	12	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan	1	dokumen			100.000	1	500.000
7	01	12	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis dan mutu layanan SPM yang difasilitasi	26	SPM			500.000	26	500.000
7	01	12	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis pelaksanaan pelayanan yang telah terlaksana dengan efektif		jenis					
7	01	12	02	2.03		<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	<i>Cakupan koordinasi dalam rangka pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum</i>	<i>100,00</i>	<i>%</i>		<i>-</i>	<i>500.000</i>		<i>500.000</i>
7	01	12	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi	1	kali			500.000	1	500.000
7	01	12	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang dipelihara		unit					
7	01	12	02	2.04		<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</i>	<i>100,00</i>			<i>-</i>	<i>3.000.000</i>		<i>3.000.000</i>
7	01	12	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	2	laporan			3.000.000	2	3.000.000
7	01	12	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah urusan pemerintahan nonperizinan yang dilayani kecamatan		jenis					
7	01	12	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilaksanakan		jenis					
7	01	12	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100,00	%		3.966.580.000	4.373.402.000		4.413.124.520
7	01	12	03	2.01		<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Persentase desa yang dilakukan koordinasi dalam rangka pemberdayaan desa</i>		<i>%</i>		<i>-</i>	<i>1.900.000</i>		<i>1.900.000</i>

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	12	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah perencanaan	14	desa			1.400.000	14	1.400.000
7	01	12	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka sinkronisasi program kerja dan kegiatan	1	kali			250.000	1	250.000
7	01	12	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1	kali			250.000	1	250.000
7	01	12	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang dilakukan pemberdayaan kelurahan	100,00			3.966.580.000	4.371.502.000		4.411.224.520
7	01	12	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah di kelurahan	1	kelurahan	Honor/Jasa Upah Kerja bagi Kepala Lingkungan, Kader Posyandu, Kader Kelurahan, LPMK	1.256.980.000	399.000.000	1	399.000.000
7	01	12	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	1	unit/ jenis	DAU tambahan dan Dana Pendamping Kelurahan	2.451.600.000	3.572.252.000	1	3.607.974.520
7	01	12	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dilaksanakan fasilitasi dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat	1	kelurahan	Operasional Kelurahan	258.000.000	400.000.000	1	404.000.000
7	01	12	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	1	kelurahan			250.000	1	250.000
7	01	12	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	%		206.600.000	209.010.000		209.010.000
7	01	12	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	%		206.600.000	206.600.000		206.600.000
7	01	12	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah pertemuan dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1	kali			5.000.000	1	5.000.000
7	01	12	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diberikan insentif	12	kali	Honor/Jasa Upah Kerja bagi guru mengaji/guru sekolah minggu	206.600.000	201.600.000	12	201.600.000
7	01	12	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam rangka penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	100,00	%		-	2.410.000		2.410.000
7	01	12	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Polri	12	laporan			2.410.000	12	2.410.000
7	01	12	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	100,00	%		-	2.000.000		2.000.000
7	01	12	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah	100,00	%		-	2.000.000		2.000.000
7	01	12	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	1	kegiatan			1.000.000	1	1.000.000
7	01	12	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		orang					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
													Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	Tolok Ukur	Target	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	12	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah peserta fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		orang					
7	01	12	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intraku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya		kali					
7	01	12	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah konflik sosial yang ditangani		kasus					
7	01	12	05	2.01	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi		kali					
7	01	12	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal		laporan					
7	01	12	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	kali			1.000.000	1	1.000.000
7	01	12	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100,00	%		40.000.000	48.400.000		48.400.000
7	01	12	06	2.01		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</i>	<i>100,00</i>	<i>%</i>		<i>40.000.000</i>	<i>48.400.000</i>		<i>48.400.000</i>
7	01	12	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5	desa			1.000.000	5	1.000.000
7	01	12	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5	desa			1.000.000	5	1.000.000
7	01	12	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	5	desa		40.000.000	40.000.000	5	40.000.000
7	01	12	06	2.01	04	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		desa					
7	01	12	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5	desa			1.000.000	5	1.000.000
7	01	12	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		desa					
7	01	12	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5	desa			1.000.000	5	1.000.000
7	01	12	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang diberikan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		desa					
7	01	12	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	5	desa			1.000.000	5	1.000.000
7	01	12	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		desa					
7	01	12	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5	desa			1.000.000	5	1.000.000
7	01	12	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5	desa			1.000.000	5	1.000.000
7	01	12	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		desa					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	12	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	2	desa			400.000	2	400.000
7	01	12	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		desa					
7	01	12	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5	desa			1.000.000	5	1.000.000
7	01	12	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan pelaksanaan Koordinasi Pendampingan Desa		laporan					
7	01	12	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		laporan					
7	01	13				Kecamatan Larompong Selatan					2.939.826.115	3.294.812.154		3.388.359.506
7	01	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		1.638.956.115	1.931.809.154	100	2.020.025.876
7	01	13	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		5.500.000	13.000.000	100	13.000.000
7	01	13	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		2.500.000	2	2.500.000
7	01	13	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website	5.500.000	5.000.000		5.000.000
7	01	13	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		2.000.000	4	2.000.000
7	01	13	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)		2.500.000	6	2.500.000
7	01	13	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		1.000.000	1	1.000.000
7	01	13	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		1.438.956.115	1.706.327.054	100	1.765.961.001
7	01	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	216	OB		1.438.956.115	1.703.827.054	216	1.763.461.001
7	01	13	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			500.000	3	500.000
7	01	13	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			1.000.000	14	1.000.000
7	01	13	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan			1.000.000	1	1.000.000
7	01	13	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		190.300.000	212.482.100	100	223.064.875
							Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
7	01	13	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	300	surat		18.300.000	18.483.000	300	18.483.000
7	01	13	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		5.000.000	5.050.000	12	5.050.000
7	01	13	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB					
7	01	13	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	6	unit		8.000.000	8.000.000	6	8.000.000

KODE							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
								Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)							(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	13	01	2.03	07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	84	OB		57.600.000	57.600.000	84	57.600.000
7	01	13	01	2.03	08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB		15.100.000	15.251.000	0	15.251.000
7	01	13	01	2.03	09		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan	1	unit/ paket		2.000.000	2.000.000	1	2.000.000
7	01	13	01	2.03	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	25	Jenis		10.550.000	10.550.000	25	10.550.000
7	01	13	01	2.03	11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2	Jenis		7.030.000	7.030.000	2	7.030.000
7	01	13	01	2.03	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	jenis		500.000	500.000	10	500.000
7	01	13	01	2.03	13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20	unit		8.060.000	8.140.600	20	8.140.600
7	01	13	01	2.03	14		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	1	jenis			100.000	1	100.000
7	01	13	01	2.03	15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2	jenis		1.800.000	1.800.000	2	1.800.000
7	01	13	01	2.03	16		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	10	jenis			1.200.000	10	1.200.000
7	01	13	01	2.03	17		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	2	jenis			18.000.000	2	18.000.000
7	01	13	01	2.03	18		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	4	OK		20.000.000	20.000.000	4	20.400.000
								Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	82	OK		20.500.000	20.500.000	82	20.500.000
7	01	13	01	2.03	19		Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit					
7	01	13	01	2.03	20		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit					
7	01	13	01	2.03	21		Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan	2	jenis			-		-
7	01	13	01	2.03	22		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		unit					
7	01	13	01	2.03	23		Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
7	01	13	01	2.03	24		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		jenis					
7	01	13	01	2.03	25		Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan		unit					
7	01	13	01	2.03	26		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara rutin/berkala		unit					
7	01	13	01	2.03	27		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala	2	unit				2	-
7	01	13	01	2.03	28		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	2	jenis				2	10.000.000
7	01	13	01	2.03	29		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit					
7	01	13	01	2.03	30		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	6	unit		15.860.000	15.860.000	6	16.018.600
7	01	13	01	2.03	32		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set			1.000.000	5	1.010.000
7	01	13	01	2.03	34		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set			1.417.500	5	1.431.675
7	01	13	01	2.03	35		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
7	01	13	01	2.03	38		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	13	01	2.03	39		Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi dedang/berat		unit					
7	01	13	01	2.03	40		Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	13	01	2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		4.200.000	-	100	18.000.000
7	01	13	01	2.04	01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
7	01	13	01	2.04	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	13	01	2.04	03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	13	01	2.04	04 Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					18.000.000
7	01	13	01	2.04	05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	32	stell/ pasang		4.200.000			
7	01	13	01	2.04	09 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang					
7	01	13	01	2.04	10 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan		orang					
7	01	13	01	2.04	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis		orang					
7	01	13	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100,00	%		-	6.980.000		7.380.000
7	01	13	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100,00	%		-	2.880.000		2.880.000
7	01	13	02	2.01	01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan	1	kali			1.980.000	1	1.980.000
7	01	13	02	2.01	02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit kerja kecamatan yang bekerja dengan efektif	9	unit kerja			900.000	9	900.000
7	01	13	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100,00	%		-	600.000		1.000.000
7	01	13	02	2.02	01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan	1	dokumen			100.000	1	500.000
7	01	13	02	2.02	02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis dan mutu layanan SPM yang difasilitasi	26	SPM			500.000	26	500.000
7	01	13	02	2.02	03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis pelaksanaan pelayanan yang telah terlaksana dengan efektif		jenis					
7	01	13	02	2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Cakupan koordinasi dalam rangka pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100,00	%		-	500.000		500.000
7	01	13	02	2.03	01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi	1	kali			500.000	1	500.000
7	01	13	02	2.03	02 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang dipelihara		unit					
7	01	13	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100,00			-	3.000.000		3.000.000
7	01	13	02	2.04	01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	2	laporan			3.000.000	2	3.000.000
7	01	13	02	2.04	02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah urusan pemerintahan nonperizinan yang dilayani kecamatan		jenis					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	13	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilmppahkan	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilaksanakan		jenis					
7	01	13	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100,00	%		1.089.070.000	1.120.013.000		1.129.943.630
7	01	13	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa yang dilakukan koordinasi dalam rangka pemberdayaan desa		%		-	1.900.000		1.900.000
7	01	13	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah perencanaan	14	desa			1.400.000	14	1.400.000
7	01	13	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka sinkronisasi program kerja dan kegiatan	1	kali			250.000	1	250.000
7	01	13	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1	kali			250.000	1	250.000
7	01	13	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang dilakukan pemberdayaan kelurahan	100,00			1.089.070.000	1.118.113.000		1.128.043.630
7	01	13	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah di kelurahan	1	kelurahan	Honor/Jasa Upah Kerja bagi Kepala Lingkungan, Kader Posyandu, Kader Kelurahan, LPMK	232.800.000	124.800.000	1	124.800.000
7	01	13	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	1	unit/ jenis	DAU tambahan dan Dana Pendamping Kelurahan	820.270.000	893.063.000	1	901.993.630
7	01	13	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dilaksanakan fasilitasi dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat	1	kelurahan	Operasional Kelurahan	36.000.000	100.000.000	1	101.000.000
7	01	13	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	1	kelurahan			250.000	1	250.000
7	01	13	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	%		171.800.000	174.210.000		174.210.000
7	01	13	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	%		171.800.000	171.800.000		171.800.000
7	01	13	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah pertemuan dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1	kali			5.000.000	1	5.000.000
7	01	13	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diberikan insentif	12	kali	Honor/Jasa Upah Kerja bagi guru mengaji/guru sekolah minggu	171.800.000	166.800.000	12	166.800.000
7	01	13	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam rangka penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	100,00	%		-	2.410.000		2.410.000
7	01	13	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Poli	12	laporan			2.410.000	12	2.410.000
7	01	13	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	100,00	%		-	2.000.000		2.000.000
7	01	13	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah	100,00	%		-	2.000.000		2.000.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	13	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	1	kegiatan			1.000.000	1	1.000.000
7	01	13	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		orang					
7	01	13	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah peserta fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		orang					
7	01	13	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrastuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya		kali					
7	01	13	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah konflik sosial yang ditangani		kasus					
7	01	13	05	2.01	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi		kali					
7	01	13	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal		laporan					
7	01	13	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	kali			1.000.000	1	1.000.000
7	01	13	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100,00	%		40.000.000	59.800.000		54.800.000
7	01	13	06	2.01		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</i>	<i>100,00</i>	<i>%</i>		<i>40.000.000</i>	<i>59.800.000</i>		<i>54.800.000</i>
7	01	13	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	9	desa			1.800.000	9	1.800.000
7	01	13	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9	desa			1.800.000	9	1.800.000
7	01	13	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	9	desa	40.000.000	40.000.000	40.000.000	9	40.000.000
7	01	13	06	2.01	04	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		desa					
7	01	13	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9	desa			1.800.000	9	1.800.000
7	01	13	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5	desa			5.000.000		
7	01	13	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	9	desa			1.800.000	9	1.800.000
7	01	13	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang diberikan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		desa					
7	01	13	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	9	desa			1.800.000	9	1.800.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	13	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		desa					
7	01	13	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9	desa			1.800.000	9	1.800.000
7	01	13	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	9	desa			1.800.000	9	1.800.000
7	01	13	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		desa					
7	01	13	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	2	desa			400.000	2	400.000
7	01	13	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		desa					
7	01	13	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	9	desa			1.800.000	9	1.800.000
7	01	13	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan pelaksanaan Koordinasi Pendampingan Desa		laporan					
7	01	13	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		laporan					
7	01	14				Kecamatan Larompong					3.219.925.600	3.552.408.013		3.640.492.061
7	01	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		1.827.855.600	2.092.405.013	100	2.176.158.431
7	01	14	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		-	13.000.000	100	13.000.000
7	01	14	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		2.500.000	2	2.500.000
7	01	14	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website		5.000.000		5.000.000
7	01	14	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		2.000.000	4	2.000.000
7	01	14	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan mengadakan acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)		2.500.000	6	2.500.000
7	01	14	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		1.000.000	1	1.000.000
7	01	14	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		1.633.855.600	1.863.335.513	100	1.928.464.756
7	01	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	288	OB		1.633.855.600	1.860.835.513	288	1.925.964.756
7	01	14	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			500.000	3	500.000
7	01	14	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			1.000.000	14	1.000.000
7	01	14	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan			1.000.000	1	1.000.000
7	01	14	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		194.000.000	216.069.500	100	216.693.675

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
							Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
7	01	14	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	230	surat		12.600.000	12.726.000	230	12.726.000
7	01	14	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		8.600.000	8.686.000	12	8.686.000
7	01	14	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB					
7	01	14	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	4	unit		15.600.000	15.600.000	4	15.600.000
7	01	14	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	108	OB		62.640.000	62.640.000	108	62.640.000
7	01	14	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB		14.000.000	14.140.000	0	14.140.000
7	01	14	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan	1	unit/ paket			500.000	1	500.000
7	01	14	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	25	Jenis		10.500.000	10.500.000	25	10.500.000
7	01	14	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	Jenis		3.000.000	3.000.000	2	3.000.000
7	01	14	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	jenis		1.000.000	500.000	10	500.000
7	01	14	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20	unit			10.000.000	20	10.000.000
7	01	14	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	1	jenis			100.000	1	100.000
7	01	14	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2	jenis		1.800.000	1.800.000	2	1.800.000
7	01	14	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	10	jenis			1.200.000	10	1.200.000
7	01	14	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	2	jenis		10.000.000	18.000.000	2	18.000.000
7	01	14	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	4	OK		20.000.000	20.000.000	4	20.400.000
							Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	37	OK		9.260.000	9.260.000	37	9.260.000
7	01	14	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit					
7	01	14	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit					
7	01	14	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan	2	jenis			-	2	-
7	01	14	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		unit					
7	01	14	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
7	01	14	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		jenis					
7	01	14	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan		unit					
7	01	14	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara rutin/berkala		unit					
7	01	14	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala	2	unit				2	-
7	01	14	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	2	jenis		5.000.000	5.000.000	2	5.000.000
7	01	14	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit					
7	01	14	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	4	unit		20.000.000	20.000.000	4	20.200.000
7	01	14	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set			1.000.000	5	1.010.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	14	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set			1.417.500	5	1.431.675
7	01	14	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
7	01	14	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	14	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	14	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	14	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		-	-	100	18.000.000
7	01	14	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
7	01	14	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	14	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	14	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	14	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	26	stell/ pasang				36	18.000.000
7	01	14	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang					
7	01	14	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	26	orang					
7	01	14	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis		orang					
7	01	14	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100,00	%		6.000.000	12.980.000		13.380.000
7	01	14	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100,00	%		-	2.880.000		2.880.000
7	01	14	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan	1	kali			1.980.000	1	1.980.000
7	01	14	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit kerja kecamatan yang bekerja dengan efektif	9	unit kerja			900.000	9	900.000
7	01	14	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100,00	%		-	600.000		1.000.000
7	01	14	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan	1	dokumen			100.000	1	500.000
7	01	14	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis dan mutu layanan SPM yang difasilitasi	26	SPM			500.000	26	500.000
7	01	14	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis pelaksanaan pelayanan yang telah terlaksana dengan efektif		jenis					
7	01	14	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Cakupan koordinasi dalam rangka pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100,00	%		-	500.000		500.000
7	01	14	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi	1	kali			500.000	1	500.000
7	01	14	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang dipelihara		unit					

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	14	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100,00			6.000.000	9.000.000		9.000.000
7	01	14	02	2.04	01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	2	laporan			3.000.000	2	3.000.000
7	01	14	02	2.04	02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah urusan pemerintahan nonperizinan yang dilayani kecamatan	1	jenis		6.000.000	6.000.000	1	6.000.000
7	01	14	02	2.04	03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilaksanakan		jenis					
7	01	14	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100,00	%		1.089.070.000	1.120.013.000		1.129.943.630
7	01	14	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa yang dilakukan koordinasi dalam rangka pemberdayaan desa		%		-	1.900.000		1.900.000
7	01	14	03	2.01	01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah perencanaan	14	desa			1.400.000	14	1.400.000
7	01	14	03	2.01	02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka sinkronisasi program kerja dan kegiatan	1	kali			250.000	1	250.000
7	01	14	03	2.01	03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1	kali			250.000	1	250.000
7	01	14	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang dilakukan pemberdayaan kelurahan	100,00			1.089.070.000	1.118.113.000		1.128.043.630
7	01	14	03	2.02	01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah di kelurahan	1	kelurahan	Honor/Jasa Upah Kerja bagi Kepala Lingkungan, Kader Posyandu, Kader Kelurahan, LPMK	348.606.800	124.800.000	1	124.800.000
7	01	14	03	2.02	02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	2	unit/ jenis	DAU tambahan dan Dana Pendamping Kelurahan	720.463.200	893.063.000	2	901.993.630
7	01	14	03	2.02	03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dilaksanakan fasilitasi dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat	1	kelurahan	Operasional Kelurahan	20.000.000	100.000.000	1	101.000.000
7	01	14	03	2.02	04 Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	1	kelurahan			250.000	1	250.000
7	01	14	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	%		257.000.000	259.410.000		259.410.000
7	01	14	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	%		257.000.000	257.000.000		257.000.000
7	01	14	04	2.01	01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah pertemuan dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1	kali			5.000.000	1	5.000.000
7	01	14	04	2.01	02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diberikan insentif	12	kali	Honor/Jasa Upah Kerja bagi guru mengaji/guru sekolah minggu	257.000.000	252.000.000	12	252.000.000
7	01	14	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam rangka penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	100,00	%		-	2.410.000		2.410.000
7	01	14	04	2.02	01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Polri	12	laporan			2.410.000	12	2.410.000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan				Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
					Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)	(2)				(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	14	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	100,00	%	-	2.000.000		2.000.000
7	01	14	05	2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah</i>	100,00	%	-	2.000.000		2.000.000
7	01	14	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	1	kegiatan	1.000.000	1	1.000.000
7	01	14	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang				
7	01	14	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah peserta fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	orang				
7	01	14	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya	kali				
7	01	14	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah konflik sosial yang ditangani	kasus				
7	01	14	05	2.01	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi	kali				
7	01	14	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	laporan				
7	01	14	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	kali	1.000.000	1	1.000.000
7	01	14	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100,00	%	40.000.000	65.600.000		59.600.000
7	01	14	06	2.01		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</i>	100,00	%	40.000.000	65.600.000	59.600.000
7	01	14	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12	desa	2.400.000	12	2.400.000
7	01	14	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	desa	2.400.000	12	2.400.000
7	01	14	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	12	desa	40.000.000	12	40.000.000
7	01	14	06	2.01	04	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	desa				
7	01	14	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	desa	2.400.000	12	2.400.000
7	01	14	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6	desa	6.000.000		
7	01	14	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12	desa	2.400.000	12	2.400.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	14	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang diberikan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		desa					
7	01	14	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	12	desa			2.400.000	12	2.400.000
7	01	14	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		desa					
7	01	14	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	desa			2.400.000	12	2.400.000
7	01	14	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12	desa			2.400.000	12	2.400.000
7	01	14	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		desa					
7	01	14	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	2	desa			400.000	2	400.000
7	01	14	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		desa					
7	01	14	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	12	desa			2.400.000	12	2.400.000
7	01	14	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan pelaksanaan Koordinasi Pendampingan Desa		laporan					
7	01	14	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		laporan					
7	01	15				Kecamatan Suli					2.552.269.770	3.045.114.677		3.132.041.123
7	01	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		1.267.419.770	1.663.831.677	100	1.740.427.493
7	01	15	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		-	13.000.000	100	13.000.000
7	01	15	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		2.500.000	2	2.500.000
7	01	15	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website		5.000.000		5.000.000
7	01	15	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		2.000.000	4	2.000.000
7	01	15	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)		2.500.000	6	2.500.000
7	01	15	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		1.000.000	1	1.000.000
7	01	15	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		1.088.599.770	1.441.061.177	100	1.491.410.818
7	01	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	204	OB		1.088.599.770	1.438.561.177	204	1.488.910.818
7	01	15	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			500.000	3	500.000

KODE							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
								Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)							(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	15	01	2.02	07		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			1.000.000	14	1.000.000
7	01	15	01	2.02	09		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan			1.000.000	1	1.000.000
7	01	15	01	2.03			Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		178.820.000	209.770.500	100	218.016.675
								Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
7	01	15	01	2.03	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	230	surat		31.700.000	32.017.000	230	32.017.000
7	01	15	01	2.03	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		18.000.000	18.180.000	12	18.180.000
7	01	15	01	2.03	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB					
7	01	15	01	2.03	06		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	4	unit		8.500.000	8.500.000	4	8.500.000
7	01	15	01	2.03	07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	72	OB		47.040.000	47.040.000	72	47.040.000
7	01	15	01	2.03	08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB		13.600.000	13.736.000	0	13.736.000
7	01	15	01	2.03	09		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan	1	unit/ paket		1.000.000	500.000	1	500.000
7	01	15	01	2.03	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	25	Jenis		5.000.000	5.000.000	25	5.000.000
7	01	15	01	2.03	11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2	Jenis		1.000.000	1.000.000	2	1.000.000
7	01	15	01	2.03	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	jenis			500.000	10	500.000
7	01	15	01	2.03	13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20	unit		10.000.000	10.100.000	20	10.100.000
7	01	15	01	2.03	14		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	1	jenis		5.000.000	100.000	1	100.000
7	01	15	01	2.03	15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2	jenis		1.380.000	1.380.000	2	1.380.000
7	01	15	01	2.03	16		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	10	jenis			1.200.000	10	1.200.000
7	01	15	01	2.03	17		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	2	jenis			24.000.000	2	24.000.000
7	01	15	01	2.03	18		Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	7	OK		33.600.000	33.600.000	7	34.272.000
								Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	12	OK		3.000.000	3.000.000	12	3.000.000
7	01	15	01	2.03	19		Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit					
7	01	15	01	2.03	20		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit					
7	01	15	01	2.03	21		Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan	2	jenis			-		-
7	01	15	01	2.03	22		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		unit					
7	01	15	01	2.03	23		Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
7	01	15	01	2.03	24		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		jenis					
7	01	15	01	2.03	25		Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan		unit					
7	01	15	01	2.03	26		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara rutin/berkala		unit					
7	01	15	01	2.03	27		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala	2	unit				2	-
7	01	15	01	2.03	28		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	2	jenis			2.500.000	2	10.000.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	15	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit					
7	01	15	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	4	unit			5.000.000	4	5.050.000
7	01	15	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set			1.000.000	5	1.010.000
7	01	15	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set			1.417.500	5	1.431.675
7	01	15	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
7	01	15	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	15	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	15	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	15	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		-	-	100	18.000.000
7	01	15	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
7	01	15	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	15	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	15	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	15	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		stell/ pasang				36	18.000.000
7	01	15	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang					
7	01	15	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan		orang					
7	01	15	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis		orang					
7	01	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100,00	%		-	6.880.000		7.280.000
7	01	15	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100,00	%		-	2.780.000		2.780.000
7	01	15	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan	1	kali			1.880.000	1	1.880.000
7	01	15	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit kerja kecamatan yang bekerja dengan efektif	9	unit kerja			900.000	9	900.000
7	01	15	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100,00	%		-	600.000		1.000.000
7	01	15	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan	1	dokumen			100.000	1	500.000
7	01	15	02	2.02	02	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis dan mutu layanan SPM yang difasilitasi	26	SPM			500.000	26	500.000
7	01	15	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis pelaksanaan pelayanan yang telah terlaksana dengan efektif		jenis					
7	01	15	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Cakupan koordinasi dalam rangka pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100,00	%		-	500.000		500.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	15	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi	1	kali			500.000	1	500.000
7	01	15	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang dipelihara		unit					
7	01	15	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100,00			-	3.000.000		3.000.000
7	01	15	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	2	laporan			3.000.000	2	3.000.000
7	01	15	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah urusan pemerintahan nonperizinan yang dilayani kecamatan		jenis					
7	01	15	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilaksanakan		jenis					
7	01	15	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100,00	%		1.089.070.000	1.159.613.000		1.169.543.630
7	01	15	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa yang dilakukan koordinasi dalam rangka pemberdayaan desa		%		-	1.900.000		1.900.000
7	01	15	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah perencanaan	14	desa			1.400.000	14	1.400.000
7	01	15	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka sinkronisasi program kerja dan kegiatan	1	kali			250.000	1	250.000
7	01	15	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1	kali			250.000	1	250.000
7	01	15	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang dilakukan pemberdayaan kelurahan	100,00			1.089.070.000	1.157.713.000		1.167.643.630
7	01	15	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah di kelurahan	1	kelurahan	Honor/Jasa Upah Kerja bagi Kepala Lingkungan, Kader Posyandu, Kader Kelurahan, LPMK	312.510.000	164.400.000	1	164.400.000
7	01	15	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	1	unit/ jenis	DAU tambahan dan Dana Pendamping Kelurahan	725.060.000	893.063.000	1	901.993.630
7	01	15	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dilaksanakan fasilitasi dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat	1	kelurahan	Operasional Kelurahan	51.500.000	100.000.000	1	101.000.000
7	01	15	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	1	kelurahan			250.000	1	250.000
7	01	15	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	%		155.780.000	153.190.000		153.190.000
7	01	15	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	%		155.780.000	150.780.000		150.780.000
7	01	15	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah pertemuan dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1	kali		21.180.000	21.180.000	1	21.180.000
7	01	15	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diberikan insentif	12	kali	Honor/Jasa Upah Kerja bagi guru mengaji/guru sekolah minggu	134.600.000	129.600.000	12	129.600.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	15	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam rangka penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	100,00	%		-	2.410.000		2.410.000
7	01	15	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Polri	12	laporan			2.410.000	12	2.410.000
7	01	15	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	100,00	%		-	2.000.000		2.000.000
7	01	15	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah	100,00	%		-	2.000.000		2.000.000
7	01	15	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	1	kegiatan			1.000.000	1	1.000.000
7	01	15	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		orang					
7	01	15	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah peserta fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		orang					
7	01	15	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrastuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya		kali					
7	01	15	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah konflik sosial yang ditangani		kasus					
7	01	15	05	2.01	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi		kali					
7	01	15	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal		laporan					
7	01	15	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	kali			1.000.000	1	1.000.000
7	01	15	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100,00	%		40.000.000	59.600.000		59.600.000
7	01	15	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100,00	%		40.000.000	59.600.000		59.600.000
7	01	15	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12	desa			2.400.000	12	2.400.000
7	01	15	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	desa			2.400.000	12	2.400.000
7	01	15	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	12	desa		40.000.000	40.000.000	12	40.000.000
7	01	15	06	2.01	04	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		desa					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	15	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	desa			2.400.000	12	2.400.000
7	01	15	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		desa					
7	01	15	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12	desa			2.400.000	12	2.400.000
7	01	15	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang diberikan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		desa					
7	01	15	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	12	desa			2.400.000	12	2.400.000
7	01	15	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		desa					
7	01	15	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	desa			2.400.000	12	2.400.000
7	01	15	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12	desa			2.400.000	12	2.400.000
7	01	15	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		desa					
7	01	15	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	2	desa			400.000	2	400.000
7	01	15	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		desa					
7	01	15	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	12	desa			2.400.000	12	2.400.000
7	01	15	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan pelaksanaan Koordinasi Pendampingan Desa		laporan					
7	01	15	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		laporan					
7	01	16				Kecamatan Suli Barat					2.622.696.823	2.728.725.803		2.797.958.434
7	01	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		1.344.326.823	1.437.322.803	100	1.498.224.804
7	01	16	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		-	13.000.000	100	13.000.000
7	01	16	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		2.500.000	2	2.500.000
7	01	16	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website		5.000.000		5.000.000
7	01	16	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		2.000.000	4	2.000.000
7	01	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)		2.500.000	6	2.500.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	16	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		1.000.000	1	1.000.000
7	01	16	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		1.159.026.823	1.212.449.303	100	1.254.797.529
7	01	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	144	OB		1.159.026.823	1.209.949.303	144	1.252.297.529
7	01	16	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			500.000	3	500.000
7	01	16	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			1.000.000	14	1.000.000
7	01	16	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan			1.000.000	1	1.000.000
7	01	16	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		185.300.000	211.873.500	100	212.427.275
							Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
7	01	16	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	230	surat		14.700.000	14.847.000	230	14.847.000
7	01	16	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		4.700.000	4.747.000	12	4.747.000
7	01	16	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB					
7	01	16	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	4	unit		1.000.000	1.000.000	4	1.000.000
7	01	16	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	108	OB		68.040.000	68.040.000	108	68.040.000
7	01	16	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB		16.200.000	16.362.000	0	16.362.000
7	01	16	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan	1	unit/ paket			500.000	1	500.000
7	01	16	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	25	Jenis		12.500.000	12.500.000	25	12.500.000
7	01	16	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2	Jenis		4.000.000	4.000.000	2	4.000.000
7	01	16	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	jenis			500.000	10	500.000
7	01	16	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20	unit		10.000.000	10.100.000	20	10.100.000
7	01	16	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	1	jenis			100.000	1	100.000
7	01	16	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2	jenis		3.600.000	3.600.000	2	3.600.000
7	01	16	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	10	jenis			1.200.000	10	1.200.000
7	01	16	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	2	jenis			24.000.000	2	24.000.000
7	01	16	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	4	OK		20.000.000	20.000.000	4	20.400.000
							Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	40	OK		10.000.000	10.000.000	40	10.000.000
7	01	16	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit					
7	01	16	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit					
7	01	16	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan	2	jenis			-	2	-
7	01	16	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		unit					
7	01	16	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	16	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		jenis					
7	01	16	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan		unit					
7	01	16	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara rutin/berkala		unit					
7	01	16	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala	2	unit				2	-
7	01	16	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	2	jenis		5.000.000	5.000.000	2	5.000.000
7	01	16	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit					
7	01	16	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit		12.960.000	12.960.000	5	13.089.600
7	01	16	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set		2.600.000	1.000.000	5	1.010.000
7	01	16	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set			1.417.500	5	1.431.675
7	01	16	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
7	01	16	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	16	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	16	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	16	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		-	-	100	18.000.000
7	01	16	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
7	01	16	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	16	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	16	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	16	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	17	stell/ pasang				36	18.000.000
7	01	16	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang					
7	01	16	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan		orang					
7	01	16	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis		orang					
7	01	16	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100,00	%		-	6.880.000		7.280.000
7	01	16	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100,00	%		-	2.780.000		2.780.000
7	01	16	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan	1	kali			1.880.000	1	1.880.000
7	01	16	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit kerja kecamatan yang bekerja dengan efektif	9	unit kerja			900.000	9	900.000
7	01	16	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100,00	%		-	600.000		1.000.000
7	01	16	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan	1	dokumen			100.000	1	500.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	16	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis dan mutu layanan SPM yang difasilitasi	26	SPM			500.000	26	500.000
7	01	16	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis pelaksanaan pelayanan yang telah terlaksana dengan efektif		jenis					
7	01	16	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Cakupan koordinasi dalam rangka pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100,00	%		-	500.000		500.000
7	01	16	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi	1	kali			500.000	1	500.000
7	01	16	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang dipelihara		unit					
7	01	16	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100,00			-	3.000.000		3.000.000
7	01	16	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	2	laporan			3.000.000	2	3.000.000
7	01	16	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah urusan pemerintahan nonperizinan yang dilayani kecamatan		jenis					
7	01	16	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilaksanakan		jenis					
7	01	16	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100,00	%		1.089.070.000	1.082.213.000		1.092.143.630
7	01	16	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa yang dilakukan koordinasi dalam rangka pemberdayaan desa		%		-	1.900.000		1.900.000
7	01	16	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah perencanaan	14	desa			1.400.000	14	1.400.000
7	01	16	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka sinkronisasi program kerja dan kegiatan	1	kali			250.000	1	250.000
7	01	16	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1	kali			250.000	1	250.000
7	01	16	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang dilakukan pemberdayaan kelurahan	100,00			1.089.070.000	1.080.313.000		1.090.243.630
7	01	16	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah di kelurahan	1	kelurahan	Honor/Jasa Upah Kerja bagi Kepala Lingkungan, Kader Posyandu, Kader Kelurahan, LPMK	247.300.000	87.000.000	1	87.000.000
7	01	16	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	2	unit/ jenis	DAU tambahan dan Dana Pendamping Kelurahan	805.770.000	893.063.000	2	901.993.630
7	01	16	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dilaksanakan fasilitasi dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat	1	kelurahan	Operasional Kelurahan	36.000.000	100.000.000	1	101.000.000
7	01	16	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	1	kelurahan			250.000	1	250.000
7	01	16	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	%		149.300.000	146.710.000		146.710.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	16	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100,00	%		149.300.000	144.300.000		144.300.000
7	01	16	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah pertemuan dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1	kali		14.700.000	14.700.000	1	14.700.000
7	01	16	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diberikan insentif	12	kali	Honor/Jasa Upah Kerja bagi guru mengaji/guru sekolah minggu	134.600.000	129.600.000	12	129.600.000
7	01	16	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam rangka penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	100,00	%		-	2.410.000		2.410.000
7	01	16	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Polri	12	laporan			2.410.000	12	2.410.000
7	01	16	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	100,00	%		-	2.000.000		2.000.000
7	01	16	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah	100,00	%		-	2.000.000		2.000.000
7	01	16	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	1	kegiatan			1.000.000	1	1.000.000
7	01	16	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		orang					
7	01	16	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah peserta fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		orang					
7	01	16	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya		kali					
7	01	16	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah konflik sosial yang ditangani		kasus					
7	01	16	05	2.01	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi		kali					
7	01	16	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal		laporan					
7	01	16	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	kali			1.000.000	1	1.000.000
7	01	16	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100,00	%		40.000.000	53.600.000		51.600.000
7	01	16	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100,00	%		40.000.000	53.600.000		51.600.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	16	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7	desa			1.400.000	7	1.400.000
7	01	16	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7	desa			1.400.000	7	1.400.000
7	01	16	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	7	desa		40.000.000	40.000.000	7	40.000.000
7	01	16	06	2.01	04	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		desa					
7	01	16	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	7	desa			1.400.000	7	1.400.000
7	01	16	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2	desa			2.000.000		
7	01	16	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7	desa			1.400.000	7	1.400.000
7	01	16	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang diberikan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		desa					
7	01	16	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	7	desa			1.400.000	7	1.400.000
7	01	16	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		desa					
7	01	16	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7	desa			1.400.000	7	1.400.000
7	01	16	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	7	desa			1.400.000	7	1.400.000
7	01	16	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		desa					
7	01	16	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	2	desa			400.000	2	400.000
7	01	16	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		desa					
7	01	16	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	7	desa			1.400.000	7	1.400.000
7	01	16	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan pelaksanaan Koordinasi Pendampingan Desa		laporan					
7	01	16	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		laporan					
7	01	17				Kecamatan Belopa Utara					4.167.492.110	5.137.760.667		5.272.887.010
7	01	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		2.266.622.110	2.704.994.667	100	2.819.859.750
7	01	17	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		4.000.000	13.000.000	100	13.000.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	17	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		2.500.000	2	2.500.000
7	01	17	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website	4.000.000	5.000.000		5.000.000
7	01	17	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		2.000.000	4	2.000.000
7	01	17	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)		2.500.000	6	2.500.000
7	01	17	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		1.000.000	1	1.000.000
7	01	17	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		2.063.822.110	2.463.925.967	100	2.550.075.875
7	01	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	336	OB		2.063.822.110	2.461.425.967	336	2.547.575.875
7	01	17	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			500.000	3	500.000
7	01	17	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			1.000.000	14	1.000.000
7	01	17	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan			1.000.000	1	1.000.000
7	01	17	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		198.800.000	228.068.700	100	238.783.875
							Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
7	01	17	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	230	surat		23.200.000	23.432.000	230	23.432.000
7	01	17	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		15.320.000	15.473.200	12	15.473.200
7	01	17	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB					
7	01	17	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	4	unit		12.750.000	12.750.000	4	12.750.000
7	01	17	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	120	OB		64.440.000	64.440.000	120	64.440.000
7	01	17	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB		11.600.000	11.716.000	0	11.716.000
7	01	17	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan	1	unit/ paket			500.000	1	500.000
7	01	17	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	25	Jenis		4.500.000	4.500.000	25	4.500.000
7	01	17	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2	Jenis		3.000.000	3.000.000	2	3.000.000
7	01	17	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	jenis		2.000.000	2.000.000	10	2.000.000
7	01	17	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20	unit			10.000.000	20	10.000.000
7	01	17	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	1	jenis			100.000	1	100.000
7	01	17	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2	jenis		7.440.000	7.440.000	2	7.440.000
7	01	17	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	10	jenis			1.200.000	10	1.200.000
7	01	17	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	2	jenis			24.000.000	2	24.000.000
7	01	17	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	6	OK		30.000.000	30.000.000	6	30.600.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
						Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	8	OK		2.000.000	2.000.000	8	2.000.000
7	01	17	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit				
7	01	17	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit				
7	01	17	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan	2	jenis	10.250.000		2	2.000.000
7	01	17	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1	unit	2.000.000	2.000.000	1	2.000.000
7	01	17	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis				
7	01	17	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		jenis				
7	01	17	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan		unit				
7	01	17	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara rutin/berkala		unit				
7	01	17	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala	2	unit			2	-
7	01	17	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	2	jenis		2.000.000	2	10.000.000
7	01	17	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit				
7	01	17	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	4	unit	9.100.000	9.100.000	4	9.191.000
7	01	17	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set	1.200.000	1.000.000	5	1.010.000
7	01	17	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set		1.417.500	5	1.431.675
7	01	17	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set				
7	01	17	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit				
7	01	17	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit				
7	01	17	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit				
7	01	17	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%	-	-	100	18.000.000
7	01	17	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit				
7	01	17	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		stell/ pasang				
7	01	17	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang				
7	01	17	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang				
7	01	17	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		stell/ pasang			36	18.000.000
7	01	17	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang				
7	01	17	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	36	orang				
7	01	17	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis		orang				
7	01	17	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100,00	%	-	6.880.000		7.280.000
7	01	17	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100,00	%	-	2.780.000		2.780.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	17	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan	1	kali			1.880.000	1	1.880.000
7	01	17	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit kerja kecamatan yang bekerja dengan efektif	9	unit kerja			900.000	9	900.000
7	01	17	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100,00	%		-	600.000		1.000.000
7	01	17	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan	1	dokumen			100.000	1	500.000
7	01	17	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis dan mutu layanan SPM yang difasilitasi	26	SPM			500.000	26	500.000
7	01	17	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis pelaksanaan pelayanan yang telah terlaksana dengan efektif		jenis					
7	01	17	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Cakupan koordinasi dalam rangka pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100,00	%		-	500.000		500.000
7	01	17	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi	1	kali			500.000	1	500.000
7	01	17	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang dipelihara		unit					
7	01	17	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100,00			-	3.000.000		3.000.000
7	01	17	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	2	laporan			3.000.000	2	3.000.000
7	01	17	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah urusan pemerintahan nonperizinan yang dilayani kecamatan		jenis					
7	01	17	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilaksanakan		jenis					
7	01	17	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100,00	%		1.683.870.000	2.198.276.000		2.218.137.260
7	01	17	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa yang dilakukan koordinasi dalam rangka pemberdayaan desa		%		-	1.900.000		1.900.000
7	01	17	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah perencanaan	14	desa			1.400.000	14	1.400.000
7	01	17	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka sinkronisasi program kerja dan kegiatan	1	kali			250.000	1	250.000
7	01	17	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1	kali			250.000	1	250.000
7	01	17	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang dilakukan pemberdayaan kelurahan	100,00			1.683.870.000	2.196.376.000		2.216.237.260
7	01	17	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah di kelurahan	2	kelurahan	Honor/Jasa Upah Kerja bagi Kepala Lingkungan, Kader Posyandu, Kader Kelurahan, LPMK	418.000.000	210.000.000	2	210.000.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	17	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	1	unit/ jenis	DAU tambahan dan Dana Pendamping Kelurahan	1.205.870.000	1.786.126.000	1	1.803.987.260
7	01	17	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dilaksanakan fasilitasi dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat	1	kelurahan	Operasional Kelurahan	60.000.000	200.000.000	1	202.000.000
7	01	17	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	1	kelurahan			250.000	1	250.000
7	01	17	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	%		177.000.000	175.610.000		175.610.000
7	01	17	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	%		177.000.000	173.200.000		173.200.000
7	01	17	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah pertemuan dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1	kali		11.200.000	11.200.000	1	11.200.000
7	01	17	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diberikan insentif	1.620	kali	Honor/Jasa Upah Kerja bagi guru mengaji/guru sekolah minggu	165.800.000	162.000.000	1.620	162.000.000
7	01	17	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam rangka penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	100,00	%		-	2.410.000		2.410.000
7	01	17	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Polri	12	laporan			2.410.000	12	2.410.000
7	01	17	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	100,00	%		-	2.000.000		2.000.000
7	01	17	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah	100,00	%		-	2.000.000		2.000.000
7	01	17	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	1	kegiatan			1.000.000	1	1.000.000
7	01	17	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		orang					
7	01	17	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah peserta fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		orang					
7	01	17	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya		kali					
7	01	17	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah konflik sosial yang ditangani		kasus					
7	01	17	05	2.01	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi		kali					
7	01	17	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal		laporan					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	17	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	kali			1.000.000	1	1.000.000
7	01	17	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100,00	%		40.000.000	50.000.000		50.000.000
7	01	17	06	2.01		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</i>	<i>100,00</i>	<i>%</i>		<i>40.000.000</i>	<i>50.000.000</i>		<i>50.000.000</i>
7	01	17	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6	desa			1.200.000	6	1.200.000
7	01	17	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6	desa			1.200.000	6	1.200.000
7	01	17	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	6	desa		40.000.000	40.000.000	6	40.000.000
7	01	17	06	2.01	04	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		desa					
7	01	17	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6	desa			1.200.000	6	1.200.000
7	01	17	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		desa					
7	01	17	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	6	desa			1.200.000	6	1.200.000
7	01	17	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang diberikan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		desa					
7	01	17	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	6	desa			1.200.000	6	1.200.000
7	01	17	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		desa					
7	01	17	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6	desa			1.200.000	6	1.200.000
7	01	17	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6	desa			1.200.000	6	1.200.000
7	01	17	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		desa					
7	01	17	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	2	desa			400.000	2	400.000
7	01	17	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		desa					
7	01	17	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	6	desa			1.200.000	6	1.200.000
7	01	17	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan pelaksanaan Koordinasi Pendampingan Desa		laporan					
7	01	17	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		laporan					

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	18			Kecamatan Bajo					3.594.630.088	3.763.363.889		3.877.153.547
7	01	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		2.322.060.088	2.446.460.889	100	2.549.919.917
7	01	18	01	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		6.000.000	13.000.000	100	13.000.000
7	01	18	01	2.01	01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		2.500.000	2	2.500.000
7	01	18	01	2.01	02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website	6.000.000	5.000.000		5.000.000
7	01	18	01	2.01	03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		2.000.000	4	2.000.000
7	01	18	01	2.01	04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)		2.500.000	6	2.500.000
7	01	18	01	2.01	05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		1.000.000	1	1.000.000
7	01	18	01	2.02	Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		2.110.759.188	2.196.095.783	100	2.272.871.635
7	01	18	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	372	OB		2.110.759.188	2.193.595.783	372	2.270.371.635
7	01	18	01	2.02	05 Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			500.000	3	500.000
7	01	18	01	2.02	07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			1.000.000	14	1.000.000
7	01	18	01	2.02	09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan			1.000.000	1	1.000.000
7	01	18	01	2.03	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		205.300.900	237.365.107	100	246.048.282
						Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
7	01	18	01	2.03	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	230	surat		26.100.000	26.361.000	230	26.361.000
7	01	18	01	2.03	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		13.500.000	13.635.000	12	13.635.000
7	01	18	01	2.03	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB					
7	01	18	01	2.03	06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	2	unit		13.630.000	13.630.000	2	13.630.000
7	01	18	01	2.03	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	84	OB		69.360.000	69.360.000	84	69.360.000
7	01	18	01	2.03	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB		4.344.400	4.387.844	0	4.387.844
7	01	18	01	2.03	09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan	1	unit/ paket			500.000	1	500.000
7	01	18	01	2.03	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	25	Jenis		10.114.350	10.114.350	25	10.114.350
7	01	18	01	2.03	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2	Jenis		3.968.000	3.968.000	2	3.968.000
7	01	18	01	2.03	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	jenis			500.000	10	500.000
7	01	18	01	2.03	13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20	unit		7.516.250	7.591.413	20	7.591.413

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	18	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	1	jenis			100.000	1	100.000
7	01	18	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2	jenis		1.800.000	1.800.000	2	1.800.000
7	01	18	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	10	jenis			1.200.000	10	1.200.000
7	01	18	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	2	jenis			24.000.000	2	24.000.000
7	01	18	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	4	OK		22.250.000	22.250.000	4	22.695.000
							Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	39	OK		9.650.000	9.650.000	39	9.650.000
7	01	18	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit					
7	01	18	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit					
7	01	18	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan	2	jenis			2.500.000	2	2.500.000
7	01	18	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		unit					
7	01	18	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
7	01	18	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		jenis					
7	01	18	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan		unit					
7	01	18	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara rutin/berkala		unit					
7	01	18	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala	2	unit				2	-
7	01	18	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	2	jenis		2.000.000	2.000.000	2	10.000.000
7	01	18	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit					
7	01	18	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	4	unit		21.067.900	21.400.000	4	21.614.000
7	01	18	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set			1.000.000	5	1.010.000
7	01	18	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set			1.417.500	5	1.431.675
7	01	18	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
7	01	18	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	18	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	18	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	18	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		-	-	100	18.000.000
7	01	18	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
7	01	18	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	18	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	18	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	18	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		stell/ pasang				36	18.000.000
7	01	18	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	18	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan		orang					
7	01	18	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis		orang					
7	01	18	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100,00	%		-	6.880.000		7.280.000
7	01	18	02	2.01		<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan</i>	<i>100,00</i>	<i>%</i>		<i>-</i>	<i>2.780.000</i>		<i>2.780.000</i>
7	01	18	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan	1	kali			1.880.000	1	1.880.000
7	01	18	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit kerja kecamatan yang bekerja dengan efektif	9	unit kerja			900.000	9	900.000
7	01	18	02	2.02		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	<i>Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	<i>100,00</i>	<i>%</i>		<i>-</i>	<i>600.000</i>		<i>1.000.000</i>
7	01	18	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan	1	dokumen			100.000	1	500.000
7	01	18	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis dan mutu layanan SPM yang difasilitasi	26	SPM			500.000	26	500.000
7	01	18	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis pelaksanaan pelayanan yang telah terlaksana dengan efektif		jenis					
7	01	18	02	2.03		<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	<i>Cakupan koordinasi dalam rangka pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum</i>	<i>100,00</i>	<i>%</i>		<i>-</i>	<i>500.000</i>		<i>500.000</i>
7	01	18	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi	1	kali			500.000	1	500.000
7	01	18	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang dipelihara		unit					
7	01	18	02	2.04		<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</i>	<i>100,00</i>			<i>-</i>	<i>3.000.000</i>		<i>3.000.000</i>
7	01	18	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	2	laporan			3.000.000	2	3.000.000
7	01	18	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah urusan pemerintahan nonperizinan yang dilayani kecamatan		jenis					
7	01	18	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilaksanakan		jenis					
7	01	18	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100,00	%		1.089.070.000	1.109.213.000		1.119.143.630
7	01	18	03	2.01		<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Persentase desa yang dilakukan koordinasi dalam rangka pemberdayaan desa</i>		<i>%</i>		<i>-</i>	<i>1.900.000</i>		<i>1.900.000</i>
7	01	18	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah perencanaan	14	desa			1.400.000	14	1.400.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	18	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka sinkronisasi program kerja dan kegiatan	1	kali			250.000	1	250.000
7	01	18	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1	kali			250.000	1	250.000
7	01	18	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang dilakukan pemberdayaan kelurahan	100,00			1.089.070.000	1.107.313.000		1.117.243.630
7	01	18	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah di kelurahan	1	kelurahan	Honor/Jasa Upah Kerja bagi Kepala Lingkungan, Kader Posyandu, Kader Kelurahan, LPMK	218.610.000	114.000.000	1	114.000.000
7	01	18	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	2	unit/ jenis	DAU tambahan dan Dana Pendamping Kelurahan	804.460.000	893.063.000	2	901.993.630
7	01	18	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dilaksanakan fasilitasi dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat	1	kelurahan	Operasional Kelurahan	66.000.000	100.000.000	1	101.000.000
7	01	18	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	1	kelurahan			250.000	1	250.000
7	01	18	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	%		163.500.000	160.810.000		160.810.000
7	01	18	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	%		163.400.000	158.400.000		158.400.000
7	01	18	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah pertemuan dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1	kali		10.800.000	10.800.000	1	10.800.000
7	01	18	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diberikan insentif	1.476	OB	Honor/Jasa Upah Kerja bagi guru mengaji/guru sekolah minggu	152.600.000	147.600.000	1.476	147.600.000
7	01	18	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam rangka penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	100,00	%		100.000	2.410.000		2.410.000
7	01	18	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Polri	12	laporan		100.000	2.410.000	12	2.410.000
7	01	18	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	100,00	%		-	2.000.000		2.000.000
7	01	18	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah	100,00	%		-	2.000.000		2.000.000
7	01	18	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	1	kegiatan			1.000.000	1	1.000.000
7	01	18	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		orang					
7	01	18	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah peserta fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		orang					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	18	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya		kali					
7	01	18	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah konflik sosial yang ditangani		kasus					
7	01	18	05	2.01	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi		kali					
7	01	18	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal		laporan					
7	01	18	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	kali			1.000.000	1	1.000.000
7	01	18	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100,00	%		20.000.000	38.000.000		38.000.000
7	01	18	06	2.01		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</i>	<i>100,00</i>	<i>%</i>		<i>20.000.000</i>	<i>38.000.000</i>		<i>38.000.000</i>
7	01	18	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11	desa			2.200.000	11	2.200.000
7	01	18	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11	desa			2.200.000	11	2.200.000
7	01	18	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	11	desa		20.000.000	20.000.000	11	20.000.000
7	01	18	06	2.01	04	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		desa					
7	01	18	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	11	desa			2.200.000	11	2.200.000
7	01	18	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		desa					
7	01	18	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	11	desa			2.200.000	11	2.200.000
7	01	18	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang diberikan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		desa					
7	01	18	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	11	desa			2.200.000	11	2.200.000
7	01	18	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		desa					
7	01	18	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11	desa			2.200.000	11	2.200.000
7	01	18	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	11	desa			2.200.000	11	2.200.000
7	01	18	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		desa					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	18	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	2	desa			400.000	2	400.000
7	01	18	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		desa					
7	01	18	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	11	desa			2.200.000	11	2.200.000
7	01	18	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan pelaksanaan Koordinasi Pendampingan Desa		laporan					
7	01	18	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		laporan					
7	01	19				Kecamatan Latimojong					1.393.043.740	1.497.226.316		1.535.419.646
7	01	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		1.202.793.740	1.272.146.316	100	1.315.939.646
7	01	19	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		1.000.000	13.000.000	100	13.000.000
7	01	19	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan	1.000.000	2.500.000	2	2.500.000
7	01	19	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website		5.000.000		5.000.000
7	01	19	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		2.000.000	4	2.000.000
7	01	19	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)		2.500.000	6	2.500.000
7	01	19	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		1.000.000	1	1.000.000
7	01	19	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		1.004.043.740	1.039.771.716	100	1.076.076.226
7	01	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	144	OB		1.004.043.740	1.037.271.716	144	1.073.576.226
7	01	19	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			500.000	3	500.000
7	01	19	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			1.000.000	14	1.000.000
7	01	19	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan			1.000.000	1	1.000.000
7	01	19	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		197.750.000	219.374.600	100	217.413.420
							Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
7	01	19	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	500	Surat		21.996.000	22.215.960	500	22.215.960
7	01	19	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan			-	12	-
7	01	19	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB					
7	01	19	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	11	unit		10.000.000	10.000.000	11	10.000.000

KODE							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
								Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)							(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	19	01	2.03	07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	84	OB		45.840.000	45.840.000	84	45.840.000
7	01	19	01	2.03	08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB		8.000.000	8.080.000	0	8.080.000
7	01	19	01	2.03	09		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan	1	unit/ paket			500.000	1	500.000
7	01	19	01	2.03	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	25	Jenis			5.000.000	25	5.000.000
7	01	19	01	2.03	11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	Jenis		2.014.000	2.034.140	2	2.034.140
7	01	19	01	2.03	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	jenis			500.000	10	500.000
7	01	19	01	2.03	13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20	unit		39.996.650	39.996.650	20	39.996.650
7	01	19	01	2.03	14		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	1	jenis			100.000	1	100.000
7	01	19	01	2.03	15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2	jenis		1.200.000	1.200.000	2	1.200.000
7	01	19	01	2.03	16		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	10	jenis			1.200.000	10	1.200.000
7	01	19	01	2.03	17		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	2	jenis		26.750.900	26.750.900	2	26.750.900
7	01	19	01	2.03	18		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	4	OK		19.950.000	19.950.000	4	20.349.000
								Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	20	OK		5.000.000	5.000.000	20	5.000.000
7	01	19	01	2.03	19		Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit					
7	01	19	01	2.03	20		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit					
7	01	19	01	2.03	21		Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan	1	jenis			7.025.000	1	7.025.000
7	01	19	01	2.03	22		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	2	unit			2.500.000	2	2.500.000
7	01	19	01	2.03	23		Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
7	01	19	01	2.03	24		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	2	jenis			2.500.000	2	2.500.000
7	01	19	01	2.03	25		Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan		unit					
7	01	19	01	2.03	26		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara rutin/berkala		unit			2.500.000		
7	01	19	01	2.03	27		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala	2	unit			2.500.000	2	2.500.000
7	01	19	01	2.03	28		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor		jenis					-
7	01	19	01	2.03	29		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit					
7	01	19	01	2.03	30		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit		11.981.950	11.981.950	5	12.101.770
7	01	19	01	2.03	32		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set			1.000.000	5	1.010.000
7	01	19	01	2.03	34		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set			1.000.000	5	1.010.000
7	01	19	01	2.03	35		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
7	01	19	01	2.03	38		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit		5.020.500			
7	01	19	01	2.03	39		Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	19	01	2.03	40		Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	19	01	2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		-	-	100	9.450.000
7	01	19	01	2.04	01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
7	01	19	01	2.04	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	22	stell/ pasang					9.450.000
7	01	19	01	2.04	03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	19	01	2.04	04 Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	19	01	2.04	05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	19	01	2.04	09 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang					
7	01	19	01	2.04	10 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan		orang					
7	01	19	01	2.04	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis		orang					
7	01	19	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100,00	%		-	6.880.000		7.280.000
7	01	19	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100,00	%		-	2.780.000		2.780.000
7	01	19	02	2.01	01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan	1	kali			1.880.000	1	1.880.000
7	01	19	02	2.01	02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit kerja kecamatan yang bekerja dengan efektif	9	unit kerja			900.000	9	900.000
7	01	19	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100,00	%		-	600.000		1.000.000
7	01	19	02	2.02	01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan	1	dokumen			100.000	1	500.000
7	01	19	02	2.02	02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis dan mutu layanan SPM yang difasilitasi	26	SPM			500.000	26	500.000
7	01	19	02	2.02	03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis pelaksanaan pelayanan yang telah terlaksana dengan efektif		jenis					
7	01	19	02	2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Cakupan koordinasi dalam rangka pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100,00	%		-	500.000		500.000
7	01	19	02	2.03	01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi	1	kali			500.000	1	500.000
7	01	19	02	2.03	02 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang dipelihara		unit					
7	01	19	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100,00			-	3.000.000		3.000.000
7	01	19	02	2.04	01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	2	laporan			3.000.000	2	3.000.000
7	01	19	02	2.04	02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah urusan pemerintahan nonperizinan yang dilayani kecamatan		jenis					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	19	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Diliimpahkan	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilaksanakan		jenis					
7	01	19	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100,00	%		-	1.700.000		1.700.000
7	01	19	03	2.01		<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Persentase desa yang dilakukan koordinasi dalam rangka pemberdayaan desa</i>		%		-	1.700.000		1.700.000
7	01	19	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah perencanaan	12	desa			1.200.000	12	1.200.000
7	01	19	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Laporan pelaksanaan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1	laporan			250.000	1	250.000
7	01	19	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1	kali			250.000	1	250.000
7	01	19	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	%		150.250.000	148.900.000		148.900.000
7	01	19	04	2.01		<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Persentase pelaksanaan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</i>	100,00	%		150.250.000	146.500.000		146.500.000
7	01	19	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah pertemuan dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1	kali		1.250.000	2.500.000	1	2.500.000
7	01	19	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diberikan insentif	1.440	OB	Honor/Jasa Upah Kerja bagi guru mengaji/guru sekolah minggu	149.000.000	144.000.000	1.440	144.000.000
7	01	19	04	2.02		<i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada</i>	<i>Persentase pelaksanaan koordinasi dalam rangka penerapan dan penegakan Perda dan Perkada</i>	100,00	%		-	2.400.000		2.400.000
7	01	19	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Polri	12	laporan			2.400.000	12	2.400.000
7	01	19	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	100,00	%		-	2.000.000		2.000.000
7	01	19	05	2.01		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah</i>	100,00	%		-	2.000.000		2.000.000
7	01	19	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	1	kegiatan			1.000.000	1	1.000.000
7	01	19	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		orang					
7	01	19	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah peserta fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		orang					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	19	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intraku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya		kali					
7	01	19	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah konflik sosial yang ditangani		kasus					
7	01	19	05	2.01	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi		kali					
7	01	19	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal		laporan					
7	01	19	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	kali			1.000.000	1	1.000.000
7	01	19	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100,00	%		40.000.000	65.600.000		59.600.000
7	01	19	06	2.01		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</i>	<i>100,00</i>	<i>%</i>		<i>40.000.000</i>	<i>65.600.000</i>		<i>59.600.000</i>
7	01	19	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12	desa			2.400.000	12	2.400.000
7	01	19	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	desa			2.400.000	12	2.400.000
7	01	19	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	12	desa	40.000.000	40.000.000	40.000.000	12	40.000.000
7	01	19	06	2.01	04	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		desa					
7	01	19	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	desa			2.400.000	12	2.400.000
7	01	19	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6	desa			6.000.000		
7	01	19	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12	desa			2.400.000	12	2.400.000
7	01	19	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang diberikan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		desa					
7	01	19	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	12	desa			2.400.000	12	2.400.000
7	01	19	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		desa					
7	01	19	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	desa			2.400.000	12	2.400.000
7	01	19	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12	desa			2.400.000	12	2.400.000
7	01	19	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		desa					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	19	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	2	desa			400.000	2	400.000
7	01	19	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		desa					
7	01	19	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	12	desa			2.400.000	12	2.400.000
7	01	19	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan pelaksanaan Koordinasi Pendampingan Desa		laporan					
7	01	19	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		laporan					
7	01	20				Kecamatan Ponrang					4.412.363.448	5.667.829.818		5.818.170.229
7	01	20	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		2.910.903.448	3.151.063.818	100	3.281.142.969
7	01	20	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		7.000.000	13.000.000	100	13.000.000
7	01	20	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		2.500.000	2	2.500.000
7	01	20	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website	7.000.000	5.000.000		5.000.000
7	01	20	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		2.000.000	4	2.000.000
7	01	20	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)		2.500.000	6	2.500.000
7	01	20	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		1.000.000	1	1.000.000
7	01	20	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		2.691.903.448	2.904.699.318	100	3.006.276.294
7	01	20	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	456	OB		2.691.903.448	2.902.199.318	456	3.003.776.294
7	01	20	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			500.000	3	500.000
7	01	20	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			1.000.000	14	1.000.000
7	01	20	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan			1.000.000	1	1.000.000
7	01	20	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		208.200.000	233.364.500	100	243.866.675
							Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
7	01	20	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	230	surat		13.600.000	13.736.000	230	13.736.000
7	01	20	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		18.600.000	18.786.000	12	18.786.000
7	01	20	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB					
7	01	20	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	4	unit		13.800.000	13.800.000	4	13.800.000

KODE							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
								Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)							(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	20	01	2.03	07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	204	OB		89.880.000	89.880.000	204	89.880.000
7	01	20	01	2.03	08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB			-	0	-
7	01	20	01	2.03	09		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan	1	unit/ paket			500.000	1	500.000
7	01	20	01	2.03	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	25	Jenis		9.480.000	9.480.000	25	9.480.000
7	01	20	01	2.03	11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	Jenis		3.000.000	3.000.000	2	3.000.000
7	01	20	01	2.03	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	jenis			500.000	10	500.000
7	01	20	01	2.03	13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20	unit		12.500.000	12.625.000	20	12.625.000
7	01	20	01	2.03	14		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	1	jenis			100.000	1	100.000
7	01	20	01	2.03	15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2	jenis		1.440.000	1.440.000	2	1.440.000
7	01	20	01	2.03	16		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	10	jenis			1.200.000	10	1.200.000
7	01	20	01	2.03	17		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	2	jenis			24.000.000	2	24.000.000
7	01	20	01	2.03	18		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	3	OK		15.900.000	15.900.000	3	16.218.000
								Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	40	OK		10.000.000	10.000.000	40	10.000.000
7	01	20	01	2.03	19		Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit					
7	01	20	01	2.03	20		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit					
7	01	20	01	2.03	21		Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan	2	jenis			-		-
7	01	20	01	2.03	22		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		unit					
7	01	20	01	2.03	23		Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
7	01	20	01	2.03	24		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		jenis					
7	01	20	01	2.03	25		Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan		unit					
7	01	20	01	2.03	26		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara rutin/berkala		unit					
7	01	20	01	2.03	27		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala	2	unit					-
7	01	20	01	2.03	28		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	2	jenis		4.000.000		2	10.000.000
7	01	20	01	2.03	29		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit					
7	01	20	01	2.03	30		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	4	unit		16.000.000	16.000.000	4	16.160.000
7	01	20	01	2.03	32		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set			1.000.000	5	1.010.000
7	01	20	01	2.03	34		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set			1.417.500	5	1.431.675
7	01	20	01	2.03	35		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
7	01	20	01	2.03	38		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	20	01	2.03	39		Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	20	01	2.03	40		Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	20	01	2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		3.800.000	-	100	18.000.000
7	01	20	01	2.04	01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
7	01	20	01	2.04	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	20	01	2.04	03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang		3.800.000			
7	01	20	01	2.04	04 Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	20	01	2.04	05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		stell/ pasang				36	18.000.000
7	01	20	01	2.04	09 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang					
7	01	20	01	2.04	10 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan		orang					
7	01	20	01	2.04	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis		orang					
7	01	20	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100,00	%		-	6.880.000		7.280.000
7	01	20	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100,00	%		-	2.780.000		2.780.000
7	01	20	02	2.01	01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan	1	kali			1.880.000	1	1.880.000
7	01	20	02	2.01	02 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit kerja kecamatan yang bekerja dengan efektif	9	unit kerja			900.000	9	900.000
7	01	20	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100,00	%		-	600.000		1.000.000
7	01	20	02	2.02	01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan	1	dokumen			100.000	1	500.000
7	01	20	02	2.02	02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis dan mutu layanan SPM yang difasilitasi	26	SPM			500.000	26	500.000
7	01	20	02	2.02	03 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis pelaksanaan pelayanan yang telah terlaksana dengan efektif		jenis					
7	01	20	02	2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Cakupan koordinasi dalam rangka pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100,00	%		-	500.000		500.000
7	01	20	02	2.03	01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi	1	kali			500.000	1	500.000
7	01	20	02	2.03	02 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang dipelihara		unit					
7	01	20	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100,00			-	3.000.000		3.000.000
7	01	20	02	2.04	01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	2	laporan			3.000.000	2	3.000.000
7	01	20	02	2.04	02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah urusan pemerintahan nonperizinan yang dilayani kecamatan		jenis					

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	20	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilaksanakan		jenis				
7	01	20	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100,00	%	1.283.460.000	2.279.276.000		2.299.137.260
7	01	20	03	2.01		<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Persentase desa yang dilakukan koordinasi dalam rangka pemberdayaan desa</i>		%	-	1.900.000		1.900.000
7	01	20	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah perencanaan	14	desa		1.400.000	14	1.400.000
7	01	20	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka sinkronisasi program kerja dan kegiatan	1	kali		250.000	1	250.000
7	01	20	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1	kali		250.000	1	250.000
7	01	20	03	2.02		<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>Persentase kelurahan yang dilakukan pemberdayaan kelurahan</i>	<i>100,00</i>		<i>1.283.460.000</i>	<i>2.277.376.000</i>		<i>2.297.237.260</i>
7	01	20	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah di kelurahan	2	kelurahan	551.460.000	291.000.000	2	291.000.000
7	01	20	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	2	unit/ jenis	635.100.000	1.786.126.000	2	1.803.987.260
7	01	20	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dilaksanakan fasilitasi dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat	2	kelurahan	96.900.000	200.000.000	2	202.000.000
7	01	20	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	1	kelurahan		250.000	1	250.000
7	01	20	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	%	214.000.000	211.410.000		211.410.000
7	01	20	04	2.01		<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Persentase pelaksanaan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</i>	<i>100,00</i>	<i>%</i>	<i>214.000.000</i>	<i>209.000.000</i>		<i>209.000.000</i>
7	01	20	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah pertemuan dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1	kali	17.000.000	17.000.000	1	17.000.000
7	01	20	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diberikan insentif	1.920	OB	197.000.000	192.000.000	1.920	192.000.000
7	01	20	04	2.02		<i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada</i>	<i>Persentase pelaksanaan koordinasi dalam rangka penerapan dan penegakan Perda dan Perkada</i>	<i>100,00</i>	<i>%</i>	<i>-</i>	<i>2.410.000</i>		<i>2.410.000</i>
7	01	20	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Poli	12	laporan		2.410.000	12	2.410.000
7	01	20	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	100,00	%	-	2.000.000		2.000.000
7	01	20	05	2.01		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah</i>	<i>100,00</i>	<i>%</i>	<i>-</i>	<i>2.000.000</i>		<i>2.000.000</i>

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	20	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	1	kegiatan			1.000.000	1	1.000.000
7	01	20	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		orang					
7	01	20	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah peserta fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		orang					
7	01	20	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrastuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya		kali					
7	01	20	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah konflik sosial yang ditangani		kasus					
7	01	20	05	2.01	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi		kali					
7	01	20	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal		laporan					
7	01	20	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	kali			1.000.000	1	1.000.000
7	01	20	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100,00	%		4.000.000	17.200.000		17.200.000
7	01	20	06	2.01		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</i>	<i>100,00</i>	<i>%</i>		<i>4.000.000</i>	<i>17.200.000</i>		<i>17.200.000</i>
7	01	20	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8	desa			1.600.000	8	1.600.000
7	01	20	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8	desa			1.600.000	8	1.600.000
7	01	20	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	8	desa	4.000.000	4.000.000	4.000.000	8	4.000.000
7	01	20	06	2.01	04	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		desa					
7	01	20	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8	desa			1.600.000	8	1.600.000
7	01	20	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		desa					
7	01	20	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8	desa			1.600.000	8	1.600.000
7	01	20	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang diberikan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		desa					
7	01	20	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	8	desa			1.600.000	8	1.600.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	20	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		desa					
7	01	20	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8	desa			1.600.000	8	1.600.000
7	01	20	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	8	desa			1.600.000	8	1.600.000
7	01	20	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		desa					
7	01	20	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	2	desa			400.000	2	400.000
7	01	20	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		desa					
7	01	20	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	8	desa			1.600.000	8	1.600.000
7	01	20	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan pelaksanaan Koordinasi Pendampingan Desa		laporan					
7	01	20	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		laporan					
7	01	21				Kecamatan Walenrang					3.761.695.843	4.024.158.397		4.135.303.426
7	01	21	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		2.462.025.843	2.694.855.397	100	2.798.669.796
7	01	21	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		-	13.000.000	100	13.000.000
7	01	21	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		2.500.000	2	2.500.000
7	01	21	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website		5.000.000		5.000.000
7	01	21	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		2.000.000	4	2.000.000
7	01	21	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan mengadakan acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)		2.500.000	6	2.500.000
7	01	21	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		1.000.000	1	1.000.000
7	01	21	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		2.237.025.843	2.441.797.832	100	2.527.173.256
7	01	21	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	384	OB		2.237.025.843	2.439.297.832	384	2.524.673.256
7	01	21	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			500.000	3	500.000
7	01	21	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			1.000.000	14	1.000.000
7	01	21	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan			1.000.000	1	1.000.000
7	01	21	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		225.000.000	240.057.565	100	240.496.540

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
							Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
7	01	21	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	230	surat		16.200.000	16.362.000	230	16.362.000
7	01	21	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		10.034.250	14.400.000	12	14.400.000
7	01	21	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB					
7	01	21	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	4	unit		11.100.000	12.600.000	4	12.600.000
7	01	21	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	120	OB		65.520.000	65.520.000	120	65.520.000
7	01	21	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB		10.201.500	10.303.515	0	10.303.515
7	01	21	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan	1	unit/ paket			500.000	1	500.000
7	01	21	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	25	Jenis		6.163.170	6.163.170	25	6.163.170
7	01	21	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2	Jenis		2.820.380	2.820.380	2	2.820.380
7	01	21	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	jenis		2.001.500	500.000	10	500.000
7	01	21	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20	unit		19.131.000	24.131.000	20	19.131.000
7	01	21	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	1	jenis			100.000	1	100.000
7	01	21	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2	jenis		3.000.000	3.600.000	2	3.600.000
7	01	21	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	10	jenis			1.200.000	10	1.200.000
7	01	21	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	2	jenis		23.600.000	18.000.000	2	18.000.000
7	01	21	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	2	OK		10.040.000	10.040.000	2	10.240.800
							Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	100	OK		16.400.000	25.000.000	100	25.000.000
7	01	21	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit					
7	01	21	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit					
7	01	21	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan	2	jenis			-	2	-
7	01	21	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		unit					
7	01	21	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
7	01	21	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		jenis					
7	01	21	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan		unit					
7	01	21	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara rutin/berkala		unit					
7	01	21	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala	2	unit				2	-
7	01	21	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	2	jenis		2.002.000	5.000.000	2	10.000.000
7	01	21	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit					
7	01	21	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	8	unit		24.791.200	21.400.000	8	21.614.000
7	01	21	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set		1.995.000	1.000.000	5	1.010.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	21	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set			1.417.500	5	1.431.675
7	01	21	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
7	01	21	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	21	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	21	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	21	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		-	-	100	18.000.000
7	01	21	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
7	01	21	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	21	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	21	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	21	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	37	stell/ pasang				36	18.000.000
7	01	21	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang					
7	01	21	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan		orang					
7	01	21	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis		orang					
7	01	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100,00	%		-	6.880.000		7.280.000
7	01	21	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100,00	%		-	2.780.000		2.780.000
7	01	21	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan	1	kali			1.880.000	1	1.880.000
7	01	21	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit kerja kecamatan yang bekerja dengan efektif	9	unit kerja			900.000	9	900.000
7	01	21	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100,00	%		-	600.000		1.000.000
7	01	21	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan	1	dokumen			100.000	1	500.000
7	01	21	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis dan mutu layanan SPM yang difasilitasi	26	SPM			500.000	26	500.000
7	01	21	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis pelaksanaan pelayanan yang telah terlaksana dengan efektif		jenis					
7	01	21	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Cakupan koordinasi dalam rangka pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100,00	%		-	500.000		500.000
7	01	21	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi	1	kali			500.000	1	500.000
7	01	21	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang dipelihara		unit					

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	21	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100,00			-	3.000.000		3.000.000
7	01	21	02	2.04	01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	2	laporan			3.000.000	2	3.000.000
7	01	21	02	2.04	02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah urusan pemerintahan nonperizinan yang dilayani kecamatan		jenis					
7	01	21	02	2.04	03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilaksanakan		jenis					
7	01	21	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100,00	%		1.089.070.000	1.091.213.000		1.101.143.630
7	01	21	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa yang dilakukan koordinasi dalam rangka pemberdayaan desa		%		-	1.900.000		1.900.000
7	01	21	03	2.01	01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah perencanaan	14	desa			1.400.000	14	1.400.000
7	01	21	03	2.01	02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka sinkronisasi program kerja dan kegiatan	1	kali			250.000	1	250.000
7	01	21	03	2.01	03 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1	kali			250.000	1	250.000
7	01	21	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang dilakukan pemberdayaan kelurahan	100,00			1.089.070.000	1.089.313.000		1.099.243.630
7	01	21	03	2.02	01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah di kelurahan	1	kelurahan	Honor/Jasa Upah Kerja bagi Kepala Lingkungan, Kader Posyandu, Kader Kelurahan, LPMK	305.070.000	96.000.000	1	96.000.000
7	01	21	03	2.02	02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	1	unit/ jenis	DAU tambahan dan Dana Pendamping Kelurahan	754.000.000	893.063.000	1	901.993.630
7	01	21	03	2.02	03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dilaksanakan fasilitasi dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat	1	kelurahan	Operasional Kelurahan	30.000.000	100.000.000	1	101.000.000
7	01	21	03	2.02	04 Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	1	kelurahan			250.000	1	250.000
7	01	21	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	%		170.600.000	173.010.000		173.010.000
7	01	21	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	%		170.600.000	170.600.000		170.600.000
7	01	21	04	2.01	01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah pertemuan dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1	kali			5.000.000	1	5.000.000
7	01	21	04	2.01	02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diberikan insentif	1.656	OB	Honor/Jasa Upah Kerja bagi guru mengaji/guru sekolah minggu	170.600.000	165.600.000	1.656	165.600.000
7	01	21	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam rangka penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	100,00	%		-	2.410.000		2.410.000
7	01	21	04	2.02	01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Polri	12	laporan			2.410.000	12	2.410.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
													Target	Pagu Indikatif
							(1)						(6)	
7	01	21	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	100,00	%		-	2.000.000		2.000.000
7	01	21	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah	100,00	%		-	2.000.000		2.000.000
7	01	21	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	1	kegiatan			1.000.000	1	1.000.000
7	01	21	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		orang					
7	01	21	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah peserta fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		orang					
7	01	21	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya		kali					
7	01	21	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah konflik sosial yang ditangani		kasus					
7	01	21	05	2.01	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi		kali					
7	01	21	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal		laporan					
7	01	21	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	kali			1.000.000	1	1.000.000
7	01	21	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100,00	%		40.000.000	56.200.000		53.200.000
7	01	21	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100,00	%		40.000.000	56.200.000		53.200.000
7	01	21	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8	desa			1.600.000	8	1.600.000
7	01	21	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8	desa			1.600.000	8	1.600.000
7	01	21	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	8	desa		40.000.000	40.000.000	8	40.000.000
7	01	21	06	2.01	04	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		desa					
7	01	21	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8	desa			1.600.000	8	1.600.000
7	01	21	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3	desa			3.000.000		
7	01	21	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8	desa			1.600.000	8	1.600.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	21	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang diberikan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		desa					
7	01	21	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	8	desa			1.600.000	8	1.600.000
7	01	21	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		desa					
7	01	21	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8	desa			1.600.000	8	1.600.000
7	01	21	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	8	desa			1.600.000	8	1.600.000
7	01	21	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		desa					
7	01	21	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	2	desa			400.000	2	400.000
7	01	21	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		desa					
7	01	21	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	8	desa			1.600.000	8	1.600.000
7	01	21	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan pelaksanaan Koordinasi Pendampingan Desa		laporan					
7	01	21	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		laporan					
7	01	22				Kecamatan Bessesangtempe Utara					1.633.649.021	1.673.741.247		1.730.782.441
7	01	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		1.485.649.021	1.513.661.247	100	1.570.302.441
7	01	22	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		-	13.000.000	100	13.000.000
7	01	22	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan		2.500.000	2	2.500.000
7	01	22	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website		5.000.000		5.000.000
7	01	22	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		2.000.000	4	2.000.000
7	01	22	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)		2.500.000	6	2.500.000
7	01	22	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		1.000.000	1	1.000.000
7	01	22	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		1.266.141.621	1.265.573.616	100	1.309.781.192
7	01	22	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	204	OB		1.266.141.621	1.263.073.616	204	1.307.281.192
7	01	22	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			500.000	3	500.000

KODE							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
								Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)							(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	22	01	2.02	07		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			1.000.000	14	1.000.000
7	01	22	01	2.02	09		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan			1.000.000	1	1.000.000
7	01	22	01	2.03			Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		213.507.400	235.087.631	100	238.071.249
								Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
7	01	22	01	2.03	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	500	Surat		7.356.000	7.429.560	500	7.429.560
7	01	22	01	2.03	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		1.082.550	1.093.376	12	1.093.376
7	01	22	01	2.03	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB					
7	01	22	01	2.03	06		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	11	unit		10.150.000	10.150.000	11	10.150.000
7	01	22	01	2.03	07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	108	OB		61.080.000	61.080.000	108	61.080.000
7	01	22	01	2.03	08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB		7.991.800	8.071.718	0	8.071.718
7	01	22	01	2.03	09		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan	1	unit/ paket			500.000	1	500.000
7	01	22	01	2.03	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	25	Jenis		7.000.000	7.070.000	25	7.070.000
7	01	22	01	2.03	11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2	Jenis		2.092.750	2.113.678	2	2.113.678
7	01	22	01	2.03	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	jenis			500.000	10	500.000
7	01	22	01	2.03	13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20	unit		49.087.500	49.087.500	20	49.087.500
7	01	22	01	2.03	14		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	1	jenis			100.000	1	100.000
7	01	22	01	2.03	15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2	jenis		1.200.000	1.200.000	2	1.200.000
7	01	22	01	2.03	16		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	10	jenis			1.200.000	10	1.200.000
7	01	22	01	2.03	17		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	2	jenis		17.600.000	17.600.000	2	17.600.000
7	01	22	01	2.03	18		Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	3	OK		17.345.000	17.345.000	3	17.691.900
								Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	79	OK		19.850.000	19.850.000	79	19.850.000
7	01	22	01	2.03	19		Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit					
7	01	22	01	2.03	20		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit					
7	01	22	01	2.03	21		Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan	1	jenis			7.025.000	1	7.025.000
7	01	22	01	2.03	22		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	2	unit			2.500.000	2	2.500.000
7	01	22	01	2.03	23		Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
7	01	22	01	2.03	24		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	2	jenis			2.500.000	2	2.500.000
7	01	22	01	2.03	25		Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan		unit					
7	01	22	01	2.03	26		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara rutin/berkala		unit			2.500.000		
7	01	22	01	2.03	27		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala	2	unit			2.500.000	2	2.500.000
7	01	22	01	2.03	28		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	2	jenis			-	2	5.000.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	22	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit					
7	01	22	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	6	unit		11.671.800	11.671.800	6	11.788.518
7	01	22	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set			1.000.000	5	1.010.000
7	01	22	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5	unit/set			1.000.000	5	1.010.000
7	01	22	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
7	01	22	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	22	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	22	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
7	01	22	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		6.000.000	-	100	9.450.000
7	01	22	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
7	01	22	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	22	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan		stell/ pasang					
7	01	22	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					9.450.000
7	01	22	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	22	stell/ pasang		6.000.000			
7	01	22	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang					
7	01	22	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan		orang					
7	01	22	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis		orang					
7	01	22	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100,00	%		-	6.880.000		7.280.000
7	01	22	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100,00	%		-	2.780.000		2.780.000
7	01	22	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan	1	kali			1.880.000	1	1.880.000
7	01	22	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit kerja kecamatan yang bekerja dengan efektif	9	unit kerja			900.000	9	900.000
7	01	22	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100,00	%		-	600.000		1.000.000
7	01	22	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan	1	dokumen			100.000	1	500.000
7	01	22	02	2.02	02	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis dan mutu layanan SPM yang difasilitasi	26	SPM			500.000	26	500.000
7	01	22	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis pelaksanaan pelayanan yang telah terlaksana dengan efektif		jenis					
7	01	22	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Cakupan koordinasi dalam rangka pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100,00	%		-	500.000		500.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	22	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi	1	kali			500.000	1	500.000
7	01	22	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang dipelihara		unit					
7	01	22	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100,00			-	3.000.000		3.000.000
7	01	22	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	2	laporan			3.000.000	2	3.000.000
7	01	22	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah urusan pemerintahan nonperizinan yang dilayani kecamatan		jenis					
7	01	22	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilaksanakan		jenis					
7	01	22	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100,00	%		-	1.100.000		1.100.000
7	01	22	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa yang dilakukan koordinasi dalam rangka pemberdayaan desa		%		-	1.100.000		1.100.000
7	01	22	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah perencanaan	6	desa			600.000	6	600.000
7	01	22	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Laporan pelaksanaan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1	laporan			250.000	1	250.000
7	01	22	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1	kali			250.000	1	250.000
7	01	22	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	%		108.000.000	100.100.000		100.100.000
7	01	22	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	%		108.000.000	97.700.000		97.700.000
7	01	22	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah pertemuan dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1	kali			500.000	1	500.000
7	01	22	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diberikan insentif	972	OB	Honor/Jasa Upah Kerja bagi guru mengaji/guru sekolah minggu	108.000.000	97.200.000	972	97.200.000
7	01	22	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam rangka penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	100,00	%		-	2.400.000		2.400.000
7	01	22	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Polri	12	laporan			2.400.000	12	2.400.000
7	01	22	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	100,00	%		-	2.000.000		2.000.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	22	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah	100,00	%		-	2.000.000		2.000.000
7	01	22	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	1	kegiatan			1.000.000	1	1.000.000
7	01	22	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		orang					
7	01	22	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah peserta fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		orang					
7	01	22	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya		kali					
7	01	22	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah konflik sosial yang ditangani		kasus					
7	01	22	05	2.01	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi		kali					
7	01	22	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal		laporan					
7	01	22	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Laporan pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	laporan			1.000.000	1	1.000.000
7	01	22	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100,00	%		40.000.000	50.000.000		50.000.000
7	01	22	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100,00	%		40.000.000	50.000.000		50.000.000
7	01	22	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6	desa			1.200.000	6	1.200.000
7	01	22	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6	desa			1.200.000	6	1.200.000
7	01	22	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	6	desa		40.000.000	40.000.000	6	40.000.000
7	01	22	06	2.01	04	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		desa					
7	01	22	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6	desa			1.200.000	6	1.200.000
7	01	22	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		desa					
7	01	22	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	6	desa			1.200.000	6	1.200.000
7	01	22	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang diberikan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		desa					

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
7	01	22	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	6	desa			1.200.000	6	1.200.000
7	01	22	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		desa					
7	01	22	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6	desa			1.200.000	6	1.200.000
7	01	22	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6	desa			1.200.000	6	1.200.000
7	01	22	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		desa					
7	01	22	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah desa yang difasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	2	desa			400.000	2	400.000
7	01	22	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		desa					
7	01	22	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	6	desa			1.200.000	6	1.200.000
7	01	22	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan pelaksanaan Koordinasi Pendampingan Desa		laporan					
7	01	22	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		laporan					
8						UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
8	01					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
8	01	01				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					3.454.808.025	5.297.515.082		5.448.533.388
8	01	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	%		2.730.058.025	3.250.935.178	100	3.405.153.484
8	01	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	%		13.800.000	37.000.000	100	47.000.000
8	01	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	Renja/Renstra Pokok dan Perubahan	6.900.000	5.000.000	2	5.000.000
8	01	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan		Program dan kegiatan	Rapat-rapat lainnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun penyediaan aplikasi/website	6.900.000	10.000.000		10.000.000
8	01	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan hasil pelaksanaan Renja setiap triwulan		10.000.000	4	10.000.000
8	01	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6	laporan	Forum PD dan menghadiri acara terkait dengan sinkronisasi perencanaan (Musrenbang lokal/reg/nas)		10.000.000	6	20.000.000
8	01	01	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1	dokumen	Rapat penyusunan dan pembahasan LAKIP dan pendukungnya		2.000.000	1	2.000.000
8	01	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00	%		1.764.658.025	2.343.380.178	100	2.424.978.484
8	01	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	264	OB		1.742.151.775	2.331.380.178	264	2.412.978.484
8	01	01	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3	dokumen			2.000.000	3	2.000.000

KODE							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
								Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)							(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
8	01	01	01	2.02	07		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan			5.000.000	14	5.000.000
8	01	01	01	2.02	09		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan		22.506.250	5.000.000	1	5.000.000
8	01	01	01	2.03			Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100,00	%		886.600.000	870.555.000	100	916.675.000
								Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		%					
8	01	01	01	2.03	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	2.000	Surat		92.900.000	94.000.000	2.250	94.000.000
8	01	01	01	2.03	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan		7.500.000	8.250.000	12	8.250.000
8	01	01	01	2.03	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		OB					
8	01	01	01	2.03	06		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	13	unit		21.000.000	23.100.000	13	23.100.000
8	01	01	01	2.03	07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	324	OB		263.880.000	263.880.000	324	263.880.000
8	01	01	01	2.03	08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan		OB		1.000.000	1.100.000	0	1.100.000
8	01	01	01	2.03	09		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan	10	unit/ paket		2.000.000	2.200.000	10	2.200.000
8	01	01	01	2.03	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	25	Jenis		40.000.000	40.000.000	25	40.000.000
8	01	01	01	2.03	11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	40	Jenis		9.320.000	9.320.000	40	9.320.000
8	01	01	01	2.03	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan		jenis					
8	01	01	01	2.03	13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	46	unit			69.705.000	47	82.775.000
8	01	01	01	2.03	14		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan		jenis					
8	01	01	01	2.03	15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2	jenis		15.000.000	16.500.000	2	55.000.000
8	01	01	01	2.03	16		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan		jenis					
8	01	01	01	2.03	17		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3	jenis		12.000.000	12.000.000	3	12.000.000
8	01	01	01	2.03	18		Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	46	OK		325.000.000	227.500.000	46	232.050.000
								Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	260	OK		65.000.000	65.000.000	260	55.000.000
8	01	01	01	2.03	19		Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan		unit					
8	01	01	01	2.03	20		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit					
8	01	01	01	2.03	21		Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		jenis					
8	01	01	01	2.03	22		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		unit					
8	01	01	01	2.03	23		Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/dinas yang diadakan		jenis					
8	01	01	01	2.03	24		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		jenis					
8	01	01	01	2.03	25		Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan		unit					
8	01	01	01	2.03	28		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor		jenis					
8	01	01	01	2.03	29		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit					
8	01	01	01	2.03	30		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	10	unit		32.000.000	38.000.000	10	38.000.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	definisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
8	01	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
8	01	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
8	01	01	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		unit/set					
8	01	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		unit					
8	01	01	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
8	01	01	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		unit					
8	01	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	%		65.000.000	-	100	16.500.000
8	01	01	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		unit					
8	01	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		stell/ pasang		27.000.000			
8	01	01	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang					
8	01	01	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan		stell/ pasang				30	16.500.000
8	01	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		stell/ pasang					
8	01	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang		38.000.000			
8	01	01	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan		orang					
8	01	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis		orang					
8	01	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan	100,00	%		261.440.000	280.800.000		299.300.000
8	01	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan pematapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					261.440.000	280.800.000		299.300.000
8	01	01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen yang disusun	1	dokumen			2.500.000	1	2.500.000
8	01	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen rumusan kebijakan teknis	1	dokumen			2.500.000	1	2.500.000
8	01	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah pertemuan dalam rangka koordinasi	2	kali		216.840.000	221.200.000	2	239.700.000
8	01	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi	4	laporan			10.000.000	4	10.000.000
8	01	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan	Jumlah laporan pelaksanaan fungsi	4	laporan		44.600.000	44.600.000	4	44.600.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
8	01	01	03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	cakupan penyelenggaraan pendidikan Pembinaan Politik Masyarakat	100,00	%		72.000.000	1.255.119.904		1.244.269.904
8	01	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah dokumen yang disusun	1	dokumen		72.000.000	1.255.119.904	1	1.244.269.904
8	01	01	03	2.01	01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen rumusan kebijakan teknis yang disusun	1	dokumen			2.500.000	1	2.500.000
8	01	01	03	2.01	02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	1	dokumen		20.550.000	20.550.000		
8	01	01	03	2.01	03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan	1	laporan		12.800.000	12.800.000		20.000.000
8	01	01	03	2.01	04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan hasil pelaksanaan koordinasi	1	laporan		31.150.000	31.150.000		31.150.000
						Jumlah partai politik yang difasilitasi dalam pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi	10	Parpol			1.170.619.904	10	1.170.619.904
8	01	01	03	2.01	05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi	1	dokumen		7.500.000	7.500.000		10.000.000
8	01	01	03	2.01	06 Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Pimpinan	Jumlah laporan pelaksanaan fungsi	4	laporan			10.000.000	4	10.000.000
8	01	01	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					-	60.550.000		42.500.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
						Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
8	01	01	04	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			dokumen		-	60.550.000		42.500.000
8	01	01	04	2.01	01 Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	1	dokumen			2.500.000	1	2.500.000
8	01	01	04	2.01	02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	1	dokumen			20.550.000		
8	01	01	04	2.01	03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan hasil pelaksanaan kebijakan	1	laporan			20.000.000	1	20.000.000
8	01	01	04	2.01	04 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi	1	dokumen			7.500.000		10.000.000
8	01	01	04	2.01	05 Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan	Jumlah laporan pelaksanaan fungsi	4	laporan			10.000.000	4	10.000.000
8	01	01	05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					82.660.000	96.960.000		104.160.000
8	01	01	05	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya					82.660.000	96.960.000		104.160.000
8	01	01	05	2.01	01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	1	dokumen			2.500.000	1	2.500.000
8	01	01	05	2.01	02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	1	dokumen		20.860.000	20.860.000		20.860.000
8	01	01	05	2.01	03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan	1	laporan			12.800.000		20.000.000
8	01	01	05	2.01	04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan hasil pelaksanaan koordinasi	1	laporan			31.150.000		31.150.000

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	defenisi operasional	Pagu APBD TA 2020	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	
							Tolok Ukur	Target					Target	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)
8	01	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	4	laporan		19.650.000	19.650.000	4	19.650.000
8	01	01	05	2.01	06	Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan Oleh Pimpinan	Jumlah laporan pelaksanaan fungsi	4	laporan		42.150.000	10.000.000	4	10.000.000
8	01	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan koordinasi dalam rangka peningkatan kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	100,00	%		308.650.000	353.150.000		353.150.000
8	01	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					308.650.000	353.150.000		353.150.000
8	01	01	06	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	1	dokumen			2.500.000	1	2.500.000
8	01	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen yang disusun		dokumen		37.650.000			
8	01	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan	1	laporan			50.000.000		50.000.000
8	01	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)	12	kali		271.000.000	271.000.000	12	271.000.000
8	01	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	4	laporan			19.650.000	4	19.650.000
8	01	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Pimpinan	Jumlah laporan pelaksanaan fungsi	4	laporan			10.000.000	4	10.000.000
						JUMLAH					1.528.473.800.000	1.553.306.210.000		1.613.550.750.000